



# LAPORAN KEUANGAN

*(AUDITED)*

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG**



# BUPATI SUMEDANG

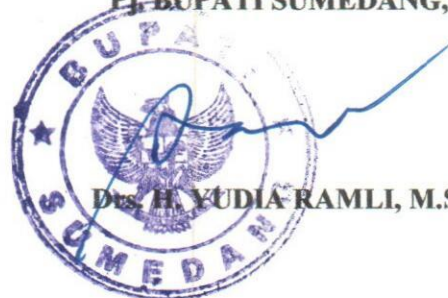
## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Sumedang, Mei 2024

Pj. **BUPATI SUMEDANG,**



**Des. H. YUDIA RAMLI, M.Si**

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB		
DAFTAR ISI		i
DAFTAR TABEL		iii
DAFTAR GAMBAR		v
DAFTAR LAMPIRAN		vi
BAGIAN I	Laporan Realisasi APBD untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022	viii
BAGIAN II	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Per 31 Desember 2023 dan 2022	x
BAGIAN III	Neraca Per 31 Desember 2023 dan 2022	xi
BAGIAN IV	Laporan Operasional untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022	xii
BAGIAN V	Laporan Arus Kas untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022	xiii
BAGIAN VI	Laporan Perubahan Ekuitas untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022	xv
BAGIAN VII	Catatan Atas Laporan Keuangan	xvi
BAB I	Pendahuluan	1
	1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
	1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	3
	1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	5
BAB II	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD	7
	2.1. Ekonomi Makro	7
	2.2. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan	12
	2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	20
BAB III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	22
	3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	22
	3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	31
BAB IV	Kebijakan Akuntansi	34
	4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	34
	4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	34

4.3.	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	35
4.4.	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP	55
<b>BAB V</b>	<b>Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan</b>	<b>56</b>
5.1.	Rincian dan Penjelasan Setiap Pos-pos Laporan Keuangan	56
5.1.1.	Pendapatan-LRA	56
5.1.2.	Belanja	75
5.1.3.	Transfer	84
5.1.4.	Pembiayaan	87
5.1.5.	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)	90
5.1.6.	Aset	92
5.1.7.	Kewajiban	149
5.1.8.	Ekuitas	153
5.1.9.	Pendapatan-LO	154
5.1.10.	Beban	165
5.1.11	Surplus/Defisit dari Operasi	176
5.1.12	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	177
5.1.13	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	179
5.1.14	Pos Luar Biasa	179
5.1.15	Surplus/Defisit Laporan Operasional	180
5.1.16	Laporan Arus Kas	181
5.1.17	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	187
<b>BAB VI</b>	<b>Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan</b>	<b>192</b>
6.1	Kondisi Geografis & Administrasi Wilayah	192
6.2	Penggantian Manajemen Pemerintahan Selama Tahun Berjalan	196
6.3	Susunan Organisasi Perangkat Daerah	197
6.4	Kewajiban Kontinjensi	200
6.5	Penjelasan Non Keuangan Lainnya	201
	<b>LAMPIRAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN</b>	<b>204</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>		<b>Hal</b>
2.1	Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Sumedang Tahun 2021 - 2023	7
2.2	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Sumedang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2019-2023 (persen)	10
2.3	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Sumedang Menurut Lapangan Usaha 2019-2023 (persen)	11
2.4	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah) Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023	11
2.5	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah) Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023	12
2.6	Perubahan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023	16
2.7	Perubahan Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	18
2.8	Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD TA 2023	19
2.9	Perubahan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023	19
2.10	Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD menurut Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi TA 2023	20
3.1	Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Berdasarkan Aspek Pendapatan Untuk PAD	22
3.2	Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Berdasarkan Aspek Pendapatan Untuk Pendapatan Transfer	23
3.3	Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Berdasarkan Aspek Pendapatan Untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	23
3.4	Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Berdasarkan Aspek Belanja Untuk Belanja Operasi	25
3.5	Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Berdasarkan Aspek Belanja Untuk Belanja Modal	25
3.6	Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Berdasarkan Aspek Belanja Untuk Belanja Transfer	26
3.7	Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Berdasarkan Aspek Pembiayaan Untuk Penerimaan Pembiayaan	27
3.8	Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Berdasarkan Aspek Pembiayaan Untuk Pengeluaran Pembiayaan	27

<b>Tabel</b>	<b>Hal</b>	
3.9	Mandatory Spending terkait Bidang Pendidikan	29
3.10	Mandatory Spending terkait Bidang Kesehatan	30
3.11	Mandatory Spending terkait Infrastruktur	30
4.1	Umur Piutang dan Tingkat Kolektibilitas	40
4.2	Prosentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih	40
4.3	Umur Piutang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang BLUD	41
4.4	Prosentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang BLUD	41
4.5	Umur Piutang dan Tingkat Kolektibilitas Dana Bergulir	43
4.6	Prosentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih Dana Bergulir	43
4.7	Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru Aset Tetap	46
4.8	Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, dan Restorasi	46
4.9	Umur Ekonomis Aset Tetap	46
4.10	Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	49
6.1	Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang	193
6.2	Kawasan Rawan Bencana	194
6.3	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tingkat Kecamatan	195
6.4	Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023	197
6.5	Jumlah Desa per Kecamatan di Kabupaten Sumedang	198
6.6	Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) pada Kabupaten Sumedang	198
6.7	Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kabupaten Sumedang Tahun 2023	199
6.8	Kewajiban Kontinjensi per 31 Desember 2023	200

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>		<b>Hal</b>
2.1	Sumber Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumedang 2019 - 2023	9
6.1	Peta Administratif Berdasarkan Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Sumedang	192

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>		<b>Hal</b>
Lampiran 1	Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa LRA	204
Lampiran 2	Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin LRA	205
Lampiran 3	Rincian Realisasi Belanja Dan Transfer Berdasarkan Klasifikasi Organisasi	207
Lampiran 4	Rincian Kas Daerah	210
Lampiran 5	Rincian Kas di Bendahara BLUD Puskesmas dan Labkesda	212
Lampiran 6	Rincian Kas di Bendahara BOS Dan Kas Lainnya Dinas Pendidikan	213
Lampiran 7	Rincian Kas Lainnya BLUD Puskesmas	225
Lampiran 8	Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang	226
Lampiran 9	Rincian Persediaan	227
Lampiran 10	Rincian Mutasi Aset Tetap Dan Aset Lainnya Di Neraca Dibandingkan Mutasi Seharusnya di SKPD	233
Lampiran 11	Rincian Aset Tetap Bermasalah	237
Lampiran 12	Rincian Hibah Tanah	238
Lampiran 13	Rincian Tanah Pinjam Pakai	241
Lampiran 14	Rincian Tanah Bukan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang	243
Lampiran 15	Rincian Tanah Bersertifikat	245
Lampiran 16	Rincian Peralatan Dan Mesin	254
Lampiran 17	Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	255
Lampiran 18	Rincian Mutasi Masuk Antar SKPD Peralatan Dan Mesin	257
Lampiran 19	Rincian Ekstrakompatabel Peralatan Dan Mesin	259
Lampiran 20	Rincian Hibah Keluar Peralatan Dan Mesin	260
Lampiran 21	Rincian Mutasi Keluar Antar SKPD Peralatan Dan Mesin	261
Lampiran 22	Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	262
Lampiran 23	Rincian Atribusi Biaya Umum Gedung Dan Bangunan	263
Lampiran 24	Rincian Kapitalisasi Gedung Dan Bangunan	264
Lampiran 25	Rincian Hibah Gedung Dan Bangunan	265
Lampiran 26	Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	267
Lampiran 27	Rincian Hibah Jalan, Irigasi Dan Jaringan	268
Lampiran 28	Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	270
Lampiran 29	Rincian Reklas Ke Aset Lainnya	271
Lampiran 30	Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan	272



<b>Lampiran</b>		<b>Hal</b>
Lampiran 31	Rincian Akumulasi Penyusutan	273
Lampiran 32	Rincian Aset Lainnya Tuntutan Ganti Rugi	275
Lampiran 33	Rincian Aset Tidak Berwujud	276
Lampiran 34	Rincian Aset Lain-Lain	278
Lampiran 35	Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	280
Lampiran 36	Rincian Utang Belanja BLUD RSUD	282
Lampiran 37	Rincian Utang Belanja BLUD Puskesmas	285
Lampiran 38	Rincian Beban Persediaan LO	286
Lampiran 39	Rincian Beban Jasa LO	288
Lampiran 40	Rincian Beban Penyusutan LO	293
Lampiran 41	Daftar Desa Dan Kelurahan Di Wilayah Kecamatan Kabupaten Sumedang	295

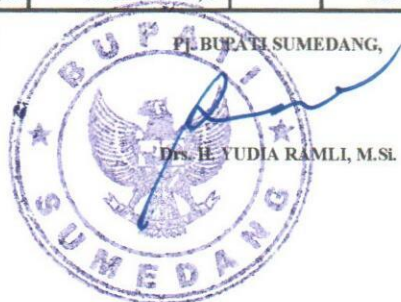


**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	CATATAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
1	<b>PENDAPATAN</b>					
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>					
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	285.185.678.752,00	222.791.864.642,00	78,12	221.379.897.839,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	18.069.211.247,00	8.473.124.358,00	46,89	9.276.092.781,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	13.214.156.341,00	12.491.956.500,00	94,53	12.643.497.231,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4	300.091.667.811,00	274.928.046.490,44	91,61	275.687.324.303,84
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>5.1.1.1</b>	<b>616.560.714.151,00</b>	<b>518.684.991.990,44</b>	<b>84,13</b>	<b>518.986.812.154,84</b>
8						
9	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>					
10	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA</b>					
11	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	74.931.469.630,00	78.354.987.933,00	104,57	67.220.420.048,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.2.1.2	37.426.448.317,00	34.739.744.040,00	92,82	36.225.796.565,00
13	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.3	1.095.966.940.000,00	1.095.600.984.600,00	99,97	1.052.231.192.000,00
14	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1.4	537.345.852.000,00	522.659.952.109,00	97,27	609.455.496.125,00
15	<b>Jumlah Pendapatan Transfer - Dana Perimbangan</b>	<b>5.1.1.2.1</b>	<b>1.745.670.709.947,00</b>	<b>1.731.355.668.682,00</b>	<b>99,18</b>	<b>1.765.132.904.738,00</b>
16						
17	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>					
18	Dana Penyesuaian	5.1.1.2.2.1	0,00	0,00	-	37.001.635.000,00
19	Dana Desa	5.1.1.2.2.2	277.448.813.000,00	277.350.642.100,00	99,96	237.420.551.800,00
20	Insentif Fiskal	5.1.1.2.2.3	12.018.294.000,00	12.018.294.000,00	100,00	0,00
21	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>	<b>5.1.1.2.2</b>	<b>289.467.107.000,00</b>	<b>289.368.936.100,00</b>	<b>99,97</b>	<b>274.422.186.800,00</b>
22						
23	<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>					
24	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.3.1	182.085.983.443,00	170.084.493.616,00	93,41	164.239.295.900,00
25	Bantuan Keuangan	5.1.1.2.3.2	136.668.883.065,00	135.291.215.126,00	98,99	161.778.833.122,00
26	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>5.1.1.2.3</b>	<b>318.754.866.508,00</b>	<b>305.375.708.742,00</b>	<b>95,80</b>	<b>326.018.129.022,00</b>
27	<b>Total Pendapatan Transfer</b>	<b>5.1.1.2</b>	<b>2.353.892.683.455,00</b>	<b>2.326.100.313.524,00</b>	<b>98,82</b>	<b>2.365.573.220.560,00</b>
28						
29	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>					
30	Pendapatan Hibah	5.1.1.3	2.074.482.000,00	537.133.033,00	-	3.411.071.029,00
31	<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>5.1.1.3</b>	<b>2.074.482.000,00</b>	<b>537.133.033,00</b>	<b>-</b>	<b>3.411.071.029,00</b>
32	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>5.1.1</b>	<b>2.972.527.879.606,00</b>	<b>2.845.322.438.547,44</b>	<b>95,72</b>	<b>2.887.971.103.743,84</b>
33						
34	<b>BELANJA</b>					
35	<b>BELANJA OPERASI</b>					
36	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	1.231.283.595.916,00	1.136.204.761.480,00	92,28	1.169.624.519.375,00
37	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	883.866.664.758,00	855.904.168.659,00	96,84	803.235.286.510,00
38	Bunga	5.1.2.1.3	0,00	0,00	-	0,00
39	Subsidi	5.1.2.1.4	450.000.000,00	450.000.000,00	100,00	95.782.500,00
40	Hibah	5.1.2.1.5	64.134.915.000,00	65.146.756.399,00	101,58	78.047.993.016,00
41	Bantuan Sosial	5.1.2.1.6	10.858.130.000,00	9.839.400.000,00	90,62	6.712.957.200,00
42	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>5.1.2.1</b>	<b>2.190.593.305.674,00</b>	<b>2.067.545.086.538,00</b>	<b>94,38</b>	<b>2.057.716.538.601,00</b>
43						
44	<b>BELANJA MODAL</b>					
45	Belanja Tanah	5.1.2.2.1	3.538.500.000,00	3.486.649.000,00	98,53	27.007.255.100,00
46	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	132.744.781.344,00	118.167.717.934,00	89,02	189.446.017.112,00
47	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	91.884.563.203,00	86.018.035.799,00	93,62	129.969.430.312,00
48	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	179.901.990.997,00	175.796.888.261,00	97,72	116.084.739.946,00
49	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	25.256.439.493,00	19.324.226.162,00	76,51	17.526.966.056,00
50	Belanja Aset Lainnya	5.1.2.2.6	3.075.420.000,00	2.924.327.500,00	95,09	543.850.955,00
51	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>5.1.2.2</b>	<b>436.401.695.037,00</b>	<b>405.717.844.656,00</b>	<b>92,97</b>	<b>480.578.259.481,00</b>
52						
53	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>					
54	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3	36.191.841.774,00	6.967.211.399,00	19,25	2.786.124.220,00
55	<b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>	<b>5.1.2.3</b>	<b>36.191.841.774,00</b>	<b>6.967.211.399,00</b>	<b>19,25</b>	<b>2.786.124.220,00</b>
56	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>5.1.2</b>	<b>2.663.186.842.485,00</b>	<b>2.480.230.142.593,00</b>	<b>93,13</b>	<b>2.541.080.922.302,00</b>
57						
58	<b>TRANSFER</b>					
59	Bagi Hasil Pajak	5.1.3.1	28.867.662.500,00	28.867.652.500,00	100,00	27.321.453.500,00
60	Bagi Hasil Retribusi	5.1.3.2	1.683.386.400,00	1.683.386.450,00	100,00	2.164.870.000,00
61	Bantuan Keuangan	5.1.3.3	409.334.813.000,00	409.154.145.316,00	99,96	360.368.729.443,00
62	<b>JUMLAH TRANSFER</b>	<b>5.1.3</b>	<b>439.885.861.900,00</b>	<b>439.705.184.266,00</b>	<b>99,96</b>	<b>389.855.052.943,00</b>
63	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>		<b>3.103.072.704.385,00</b>	<b>2.919.935.326.859,00</b>	<b>94,10</b>	<b>2.930.935.975.245,00</b>
64						
65	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>		<b>(130.544.824.779,00)</b>	<b>(74.612.888.311,56)</b>	<b>57,15</b>	<b>(42.964.871.501,16)</b>
66						

NO	URAIAN	CATATAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
67	<b>PEMBIAYAAN</b>					
68	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>					
69	Penggunaan SILPA	5.1.4.1.1	162.044.824.779,00	161.530.195.031,74	99,68	232.339.367.075,90
70	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Masyarakat	5.1.4.1.2	0,00	85.231.708,00	-	-
71	<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>5.1.4.1</b>	<b>162.044.824.779,00</b>	<b>161.615.426.739,74</b>	<b>99,74</b>	<b>232.339.367.075,90</b>
72						
73	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>					
74	Pembentukan Dana Cadangan	5.1.4.2.1	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	100,00	15.000.000.000,00
75	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.4.2.2	6.500.000.000,00	6.000.000.000,00	92,31	12.329.670.795,00
76	<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>5.1.4.2</b>	<b>31.500.000.000,00</b>	<b>31.000.000.000,00</b>	<b>98,41</b>	<b>27.329.670.795,00</b>
77	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>130.544.824.779,00</b>	<b>130.615.426.739,74</b>	<b>100,05</b>	<b>205.009.696.280,90</b>
78						
79	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	5.1.4.3	0,00	56.002.538.428,18	-	162.044.824.779,74





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH  
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	CATATAN	2023	2022
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.1.5.1	162.044.824.779,74	232.339.367.075,90
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.1.5.2	(161.530.195.031,74)	(232.339.367.075,90)
3	<b>Subtotal (1 + 2)</b>		<b>514.629.748,00</b>	<b>0,00</b>
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/ SiKPA)	5.1.5.3	56.002.538.428,18	162.044.824.779,74
5	<b>Subtotal (3 + 4)</b>		<b>56.517.168.176,18</b>	<b>162.044.824.779,74</b>
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.1.5.4	(514.629.748,00)	0,00
7	Lain-lain	5.1.5.5	0,00	0,00
8	<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)</b>	<b>5.1.5</b>	<b>56.002.538.428,18</b>	<b>162.044.824.779,74</b>





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
1	<b>ASET</b>			
2	<b>ASET LANCAR</b>			
3	<b>Kas dan Setara Kas</b>	<b>5.1.6.1.1</b>	<b>56.002.538.428,18</b>	<b>161.546.137.893,74</b>
4	Kas di Kas Daerah	5.1.6.1.1.1	42.529.895.690,18	146.307.325.290,74
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.1.6.1.1.2	8.240.617,00	105.248.357,00
6	Kas di Bendahara Penerimaan	5.1.6.1.1.3	0,00	46.800,00
7	Kas di BLUD	5.1.6.1.1.4	12.219.061.526,00	14.798.385.042,00
8	Kas di Bendahara BOS	5.1.6.1.1.5	379.772.898,00	305.784.351,00
9	Kas Lainnya	5.1.6.1.1.6	865.567.697,00	29.348.053,00
10	<b>Piutang</b>	<b>5.1.6.1.2</b>	<b>136.671.197.167,00</b>	<b>112.269.284.850,88</b>
11	Piutang Pajak	5.1.6.1.2.1	112.102.271.141,00	88.429.348.407,00
12	Piutang Retribusi	5.1.6.1.2.2	266.318.564,00	535.689.304,00
13	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.1.6.1.2.3	2.102.651.020,00	2.065.422.985,88
14	Piutang Pendapatan BLUD	5.1.6.1.2.4	15.974.010.746,00	9.084.798.362,00
15	Piutang Transfer Antar Daerah	5.1.6.1.2.5	6.174.445.696,00	12.145.642.492,00
16	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.1.6.1.2.6	51.500.000,00	8.383.300,00
17	Penyisihan Piutang	5.1.6.1.3	(49.225.746.431,53)	(41.862.755.145,35)
18	Beban Dibayar Dimuka	5.1.6.1.4	57.236.438,36	131.698.630,14
19	Persediaan	5.1.6.1.5	41.135.563.145,36	34.226.772.445,91
20	<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>5.1.6.1</b>	<b>184.640.788.747,37</b>	<b>266.311.138.675,32</b>
21				
22	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>			
23	<b>Investasi Nonpermanen</b>			
24	Dana Bergulir	5.1.6.2.1.1	3.369.801.837,00	4.045.315.800,00
25	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	5.1.6.2.1.2	(2.479.113.082,75)	(3.044.383.228,38)
26	<b>Jumlah Investasi Nonpermanen</b>	<b>5.1.6.2.1</b>	<b>890.688.754,25</b>	<b>1.000.932.571,62</b>
27				
28	<b>Investasi Permanen</b>			
29	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.6.2.2.1	155.067.430.665,93	144.305.945.646,29
30	<b>Jumlah Investasi Permanen</b>	<b>5.1.6.2.2</b>	<b>155.067.430.665,93</b>	<b>144.305.945.646,29</b>
31	<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>	<b>5.1.6.2</b>	<b>155.958.119.420,18</b>	<b>145.306.878.217,91</b>
32				
33	<b>ASET TETAP</b>			
34	Tanah	5.1.6.3.1	779.803.484.596,70	582.116.454.610,77
35	Peralatan dan Mesin	5.1.6.3.2	1.620.650.976.708,34	1.525.702.360.148,95
36	Gedung dan Bangunan	5.1.6.3.3	1.669.060.803.578,38	1.541.028.614.238,83
37	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.6.3.4	3.230.891.609.798,35	3.051.233.809.417,23
38	Aset Tetap Lainnya	5.1.6.3.5	231.399.529.043,12	212.813.927.498,19
39	Konstruksi dalam Pengerjaan	5.1.6.3.6	13.664.221.546,00	42.865.020.217,00
40	Akumulasi Penyusutan	5.1.6.3.7	(4.100.427.603.644,00)	(3.648.913.349.508,75)
41	<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>5.1.6.3</b>	<b>3.445.043.021.626,89</b>	<b>3.306.846.836.622,22</b>
42				
43	<b>DANA CADANGAN</b>			
44	Dana Cadangan	5.1.6.4.1	40.449.173.049,00	15.000.937.500,00
45	<b>Jumlah Dana Cadangan</b>	<b>5.1.6.4</b>	<b>40.449.173.049,00</b>	<b>15.000.937.500,00</b>
46				
47	<b>ASET LAINNYA</b>			
48	Tuntutan Ganti Rugi	5.1.6.5.1	346.289.612,00	342.006.312,00
49	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.1.6.5.2	69.173.543,00	69.173.543,00
50	Aset Tak Berwujud	5.1.6.5.3	49.464.493.935,26	46.127.823.312,26
51	Aset Lain-lain	5.1.6.5.4	42.718.990.580,32	43.926.696.727,67
52	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	5.1.6.5.5	(41.397.117.994,00)	(42.527.887.464,25)
53	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.1.6.5.6	(44.216.328.631,59)	(42.951.089.531,93)
54	Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility (TDF)</i>	5.1.6.5.7	29.576.034.000,00	11.247.520.973,00
55	<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>5.1.6.5</b>	<b>36.561.535.044,99</b>	<b>16.234.243.871,75</b>
56	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>5.1.6</b>	<b>3.862.652.637.888,43</b>	<b>3.749.700.034.887,20</b>
57				
58	<b>KEWAJIBAN</b>			
59	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
60	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.1.7.1.1	0,00	3.277.500,00
61	Pendapatan Diterima Dimuka	5.1.7.1.2	2.209.452.472,49	2.367.125.480,40
62	Utang Belanja	5.1.7.1.3	51.810.728.979,00	82.764.944.871,00
63	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.1.7.1.4	232.826.270,00	6.622.385.662,00
64	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>5.1.7.1</b>	<b>54.253.007.721,49</b>	<b>91.757.733.513,40</b>
65	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>5.1.7</b>	<b>54.253.007.721,49</b>	<b>91.757.733.513,40</b>
66				
67	<b>EKUITAS</b>			
68	<b>EKUITAS</b>	<b>5.1.8</b>	<b>3.808.399.630.166,94</b>	<b>3.657.942.301.373,80</b>
69	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>3.862.652.637.888,43</b>	<b>3.749.700.034.887,20</b>





**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	CATATAN	2023	2022	KENAIKAN/PENURUNAN	(%)
1	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>					
2	<b>PENDAPATAN</b>					
3	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>					
4	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.9.1.1	246.388.065.202,94	231.684.635.720,96	14.703.429.481,98	6,35
5	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.9.1.2	8.953.215.273,97	8.709.886.272,79	243.329.001,18	2,79
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.9.1.3	5.153.021.995,00	4.884.459.679,00	268.562.316,00	5,50
7	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.9.1.4	282.032.312.870,56	278.874.954.701,72	3.157.358.168,84	1,13
8	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>5.1.9.1</b>	<b>542.526.615.342,47</b>	<b>524.153.936.374,47</b>	<b>18.372.678.968,00</b>	<b>3,51</b>
9						
10	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>					
11	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN</b>					
12	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.9.2.1.1	82.914.338.000,00	75.404.834.981,00	7.509.503.019,00	9,96
13	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.9.2.1.2	48.508.907.000,00	39.288.902.605,00	9.220.004.395,00	23,47
14	Dana Alokasi Umum	5.1.9.2.1.3	1.095.600.984.600,00	1.052.231.192.000,00	43.369.792.600,00	4,12
15	Dana Alokasi Khusus	5.1.9.2.1.4	522.659.952.109,00	609.455.496.125,00	(86.795.544.016,00)	(14,24)
16	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>	<b>5.1.9.2.1</b>	<b>1.749.684.181.709,00</b>	<b>1.776.380.425.711,00</b>	<b>(26.696.244.002,00)</b>	<b>(1,50)</b>
17						
18	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA</b>					
19	Dana Penyesuaian	5.1.9.2.2.1	0,00	37.001.635.000,00	(37.001.635.000,00)	(100,00)
20	Dana Desa	5.1.9.2.2.2	0,00	0,00	0,00	-
21	Insentif Fiskal	5.1.9.2.2.3	12.018.294.000,00	0,00	0,00	-
22	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -</b>	<b>5.1.9.2.2</b>	<b>12.018.294.000,00</b>	<b>37.001.635.000,00</b>	<b>(24.983.341.000,00)</b>	<b>(67,52)</b>
23						
24	<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>					
25	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.9.2.3.1	164.603.296.820,00	164.694.040.219,00	(90.743.399,00)	(0,06)
26	Bantuan Keuangan	5.1.9.2.3.2	134.568.388.856,00	162.229.127.922,00	(27.660.739.066,00)	(17,05)
27	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>5.1.9.2.3</b>	<b>299.171.685.676,00</b>	<b>326.923.168.141,00</b>	<b>(27.751.482.465,00)</b>	<b>(8,49)</b>
28	<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>	<b>5.1.9.2</b>	<b>2.060.874.161.385,00</b>	<b>2.140.305.228.852,00</b>	<b>(79.431.067.467,00)</b>	<b>(3,71)</b>
29						
30	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>					
31	Pendapatan Hibah	5.1.9.3	145.985.304.182,18	163.029.389.757,97	(17.044.085.575,79)	(10,45)
32	<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah</b>	<b>5.1.9.3</b>	<b>145.985.304.182,18</b>	<b>163.029.389.757,97</b>	<b>(17.044.085.575,79)</b>	<b>(10,45)</b>
33	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>5.1.9</b>	<b>2.749.386.080.909,65</b>	<b>2.827.488.554.984,44</b>	<b>(78.102.474.074,79)</b>	<b>(2,76)</b>
34	<b>BEBAN</b>					
35	<b>BEBAN OPERASI</b>					
36	Beban Pegawai	5.1.10.1.1	1.135.768.094.390,00	1.158.485.389.412,00	(22.717.295.022,00)	(1,96)
37	Beban Persediaan	5.1.10.1.2	206.171.760.380,80	237.531.836.718,28	(31.360.076.337,48)	(13,20)
38	Beban Jasa	5.1.10.1.3	587.790.403.886,63	498.857.377.442,70	88.933.026.443,93	17,83
39	Beban Pemeliharaan	5.1.10.1.4	10.032.568.800,43	10.960.145.636,50	(927.576.836,07)	(8,46)
40	Beban Perjalanan Dinas	5.1.10.1.5	62.189.508.048,00	57.608.701.050,00	4.580.806.998,00	7,95
41	Beban Bunga	5.1.10.1.6	0,00	0,00	0,00	-
42	Beban Subsidi	5.1.10.1.7	450.000.000,00	95.782.500,00	354.217.500,00	-
43	Beban Hibah	5.1.10.1.8	70.710.600.899,00	80.139.680.216,00	(9.429.079.317,00)	(11,77)
44	Beban Bantuan Sosial	5.1.10.1.9	9.839.400.000,00	6.712.957.200,00	3.126.442.800,00	46,57
45	Beban Penyusutan	5.1.10.1.10	454.366.491.394,46	430.731.297.876,10	23.635.193.518,36	5,49
46	Beban Penyisihan Piutang	5.1.10.1.11	7.441.997.979,00	6.089.773.386,43	1.352.224.592,57	22,20
47	Beban Lain-lain	5.1.10.1.12	16.973.281.462,69	15.303.280.984,67	1.670.000.478,02	10,91
48	<b>Jumlah Beban Operasi</b>	<b>5.1.10.1</b>	<b>2.561.734.107.241,01</b>	<b>2.502.516.222.422,68</b>	<b>59.217.884.818,33</b>	<b>2,37</b>
49						
50	<b>BEBAN TRANSFER</b>					
51	Beban Bagi Hasil Pajak	5.1.10.2.1	28.867.652.500,00	27.321.453.500,00	1.546.199.000,00	5,66
52	Beban Bagi Hasil Retribusi	5.1.10.2.2	1.683.386.450,00	2.164.870.000,00	(481.483.550,00)	(22,24)
53	Beban Bantuan Keuangan	5.1.10.2.3	131.803.503.216,00	122.948.177.643,00	8.855.325.573,00	7,20
54	<b>Jumlah Beban Transfer</b>	<b>5.1.10.2</b>	<b>162.354.542.166,00</b>	<b>152.434.501.143,00</b>	<b>9.920.041.023,00</b>	<b>6,51</b>
55	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>5.1.10</b>	<b>2.724.088.649.407,01</b>	<b>2.654.950.723.565,68</b>	<b>69.137.925.841,33</b>	<b>2,60</b>
56						
57	<b>JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>5.1.11</b>	<b>25.297.431.502,64</b>	<b>172.537.831.418,76</b>	<b>(147.240.399.916,13)</b>	<b>(85,34)</b>
58						
59	<b>SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>					
60	<b>SURPLUS NON OPERASIONAL</b>					
61	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.1.12.1	14.371.776.605,45	13.765.758.429,31	606.018.176,14	4,40
62	<b>Jumlah Surplus Non Operasional</b>	<b>5.1.12.1</b>	<b>14.371.776.605,45</b>	<b>13.765.758.429,31</b>	<b>606.018.176,14</b>	<b>4,40</b>
63						
64	<b>DEFISIT NON OPERASIONAL</b>					
65	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	5.1.12.2.1	40.810.246,73	9.700.000,00	31.110.246,73	320,72
66	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.1.12.2.2	2.401.352.107,08	2.515.598.432,57	(114.246.325,49)	(4,54)
67	<b>Jumlah Defisit Non Operasional</b>	<b>5.1.12.2</b>	<b>2.442.162.353,81</b>	<b>2.525.298.432,57</b>	<b>(83.136.078,76)</b>	<b>(3,29)</b>
68	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>5.1.12</b>	<b>11.929.614.251,64</b>	<b>11.240.459.996,74</b>	<b>689.154.254,90</b>	<b>6,13</b>
69						
70	<b>SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>5.1.13</b>	<b>37.227.045.754,28</b>	<b>183.778.291.415,50</b>	<b>(146.551.245.661,23)</b>	<b>(79,74)</b>
71						
72	<b>POS LUAR BIASA</b>					
73	Pendapatan Luar Biasa	5.1.14.1	0,00	0,00	0,00	-
74	Beban Luar Biasa	5.1.14.2	344.825.737,00	9.120.525.832,00	(8.775.700.095,00)	(96,22)
75	<b>POS LUAR BIASA</b>	<b>5.1.14</b>	<b>(344.825.737,00)</b>	<b>(9.120.525.832,00)</b>	<b>8.775.700.095,00</b>	<b>(96,22)</b>
76						
77	<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	<b>5.1.15</b>	<b>36.882.220.017,28</b>	<b>174.657.765.583,50</b>	<b>(137.775.545.566,23)</b>	<b>(78,88)</b>





**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**  
**Metode Langsung**

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
1	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			
2	<b>Arus Masuk Kas</b>			
3	Penerimaan Pajak Daerah		222.791.864.642,00	221.379.897.839,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		8.473.124.358,00	9.276.092.781,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		12.491.956.500,00	12.643.497.231,00
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		274.928.046.490,44	275.687.324.303,84
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		78.354.987.933,00	67.220.420.048,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		34.739.744.040,00	36.225.796.565,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		1.095.600.984.600,00	1.052.231.192.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		522.659.952.109,00	609.455.496.125,00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian		0,00	37.001.635.000,00
12	Penerimaan Dana Desa		277.350.642.100,00	237.420.551.800,00
13	Penerimaan Insentif Fiskal		12.018.294.000,00	0,00
14	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		170.084.493.616,00	164.239.295.900,00
15	Penerimaan Bantuan Keuangan		135.291.215.126,00	161.778.833.122,00
16	Penerimaan Hibah		537.133.033,00	3.411.071.029,00
17	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>5.1.16.1.1</b>	<b>2.845.322.438.547,44</b>	<b>2.887.971.103.743,84</b>
18	<b>Arus Keluar Kas</b>			
19	Pembayaran Pegawai		1.136.204.761.480,00	1.169.624.519.375,00
20	Pembayaran Barang Jasa		855.904.168.659,00	803.235.286.510,00
21	Pembayaran Bunga		0,00	0,00
22	Pembayaran Subsidi		450.000.000,00	95.782.500,00
23	Pembayaran Hibah		65.146.756.399,00	78.047.993.016,00
24	Pembayaran Bantuan Sosial		9.839.400.000,00	6.712.957.200,00
25	Pembayaran Tak Terduga		6.967.211.399,00	2.786.124.220,00
26	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		28.867.652.500,00	27.321.453.500,00
27	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		1.683.386.450,00	2.164.870.000,00
28	Pembayaran Bantuan Keuangan		409.154.145.316,00	360.368.729.443,00
29	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>5.1.16.1.2</b>	<b>2.514.217.482.203,00</b>	<b>2.450.357.715.764,00</b>
30	<b>Arus Kas Bersih dari Aktlvitas Operasi</b>	<b>5.1.16.1</b>	<b>331.104.956.344,44</b>	<b>437.613.387.979,84</b>
31				
32	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			
33	<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>5.1.16.2.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34	<b>Arus Keluar Kas</b>			
35	Pembentukan Dana Cadangan		25.000.000.000,00	15.000.937.500,00
36	Perolehan Tanah		3.486.649.000,00	27.007.255.100,00
37	Perolehan Peralatan dan Mesin		118.167.717.934,00	189.446.017.112,00
38	Perolehan Gedung dan Bangunan		86.018.035.799,00	129.969.430.312,00
39	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		175.796.888.261,00	116.084.739.946,00
40	Perolehan Aset Tetap Lainnya		19.324.226.162,00	17.526.966.056,00
41	Perolehan Aset Lainnya		2.924.327.500,00	543.850.955,00
42	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		6.000.000.000,00	12.329.670.795,00
43	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>5.1.16.2.2</b>	<b>436.717.844.656,00</b>	<b>507.908.867.776,00</b>
44	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>5.1.16.2</b>	<b>(436.717.844.656,00)</b>	<b>(507.908.867.776,00)</b>
45				
46	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			
47	<b>Arus Masuk Kas</b>			
48	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Masyarakat		85.231.708,00	0,00
49	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>5.1.16.3.1</b>	<b>85.231.708,00</b>	<b>0,00</b>
50	<b>Arus Keluar Kas</b>			
51	Pembayaran Poko Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
52	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>5.1.16.3.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
53	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>5.1.16.3</b>	<b>85.231.708,00</b>	<b>0,00</b>
54				
55	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b>			
56	<b>Arus Masuk Kas</b>			
57	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.1.16.4.1.1	193.906.504.438,00	202.376.656.578,00
58	Penambahan Kas BOS tahun lalu	5.1.16.4.1.2	33.638,00	261.101,00
59	Penambahan Kas di BLUD	5.1.16.4.1.3	0,00	480.000,00
60	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>5.1.16.4.1</b>	<b>193.906.538.076,00</b>	<b>202.377.397.679,00</b>

NO	URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
61	<b>Arus Keluar Kas</b>			
62	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.1.16.4.2.1	193.909.781.938,00	202.373.379.078,00
63	Pengembalian Kas Desa Tahun 2022 melalui Pemindahbukuan Kasda Tahun 2023	5.1.16.4.2.2	12.699.000,00	0,00
64	Pengurangan Kas BLUD RSUD pengembalian kelebihan pendapatan BPJS Tahun 2021	5.1.16.4.2.3	0,00	191.653.067,00
65	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>5.1.16.4.2</b>	<b>193.922.480.938,00</b>	<b>202.565.032.145,00</b>
66	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>5.1.16.4</b>	<b>(15.942.862,00)</b>	<b>(187.634.466,00)</b>
67	<b>Kenaikan/Penurunan Kas</b>		<b>(105.543.599.465,56)</b>	<b>(70.483.114.262,16)</b>
68	Saldo Awal Kas	5.1.16.5	161.546.137.893,74	232.029.252.155,90
69	<b>Saldo Akhir Kas:</b>	<b>5.1.16.6</b>	<b>56.002.538.428,18</b>	<b>161.546.137.893,74</b>
70	Saldo Akhir Kas di BUD		42.529.895.690,18	146.307.325.290,74
71	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		8.240.617,00	105.248.357,00
72	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	46.800,00
73	Saldo Akhir Kas BLUD		12.219.061.526,00	14.798.385.042,00
74	Saldo Akhir Kas BOS		379.772.898,00	305.784.351,00
75	Saldo Akhir Kas Lainnya		865.567.697,00	29.348.053,00







PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	CATATAN	2023	2022
1	Ekuitas Awal	5.1.17.1	3.657.942.301.373,80	3.482.042.924.068,62
2	Surplus / Defisit - LO	5.1.17.2	36.882.220.017,28	174.657.765.583,50
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :	5.1.17.3	113.575.108.775,86	1.241.611.721,68
	1) Koreksi Nilai Kas	5.1.17.3.1	(12.665.362,00)	741.101,00
	2) Koreksi Nilai Persediaan	5.1.17.3.2	2.135.055.440,19	165.175.121,44
	3) Koreksi Piutang	5.1.17.3.3	(197.256.888,00)	(491.663.082,00)
	4) Koreksi Penyisihan Piutang	5.1.17.3.4	891.030,00	0,00
	5) Koreksi Pencatatan Aset Tetap	5.1.17.3.5	113.392.254.854,50	3.657.150.000,00
	6) Koreksi Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.1.17.3.6	(1.898.975.467,12)	5.183.905.470,07
	7) Koreksi Pencatatan Aset Lain-lain	5.1.17.3.7	0,00	0,00
	8) Koreksi Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	5.1.17.3.8	(5.495.291,51)	1.194.204.889,42
	9) Koreksi Perhitungan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.1.17.3.9	161.300.459,80	102.405.017,50
	10) Koreksi Atas Utang	5.1.17.3.10	0,00	133.591.368,00
	11) Koreksi Ekuitas Lainnya	5.1.17.3.11	0,00	(8.703.898.163,75)
	12) Lain-lain:	5.1.17.3.12	0,00	0,00
4	Ekuitas Akhir	5.1.17.4	3.808.399.630.166,94	3.657.942.301.373,80

Dj. BUPATI SUMEDANG,  
Drs. H. YUDIA RAMLI, M.Si.



INSUN MEDICAL

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang No.14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan peraturan tersebut, Sumedang ditetapkan menjadi Kabupaten dan berkedudukan di Sumedang.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 merupakan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang atas pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2023 yang berisi upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan seluruh kegiatan secara sistematis dan terstruktur yang disusun dan disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

#### **a. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang selama satu periode pelaporan, membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

#### **a) Akuntabilitas**

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

#### **b) Manajemen**

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan,

pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

**c) Transparansi**

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

**d) Keseimbangan antar Generasi**

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah daerah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

**e) Evaluasi Kinerja**

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah daerah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

**b. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Pelaporan keuangan bertujuan untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang serta hasil-hasil yang dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya; dan
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama TA 2023.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan dengan memperhatikan 4 (empat) kriteria laporan keuangan yang berkualitas, yaitu:

**a. Relevan**

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang disajikan dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan dengan membantunya mengambil kebijakan dengan cara mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan serta mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Informasi yang relevan ini harus memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), tepat waktu, dan disajikan secara lengkap mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan.

**b. Andal**

Informasi yang andal memenuhi karakteristik penyajian jujur, dapat diverifikasi (*verifiability*) dan netralitas. Informasi dalam laporan keuangan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material.

**c. Dapat Dibandingkan**

Informasi yang dimuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna apabila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan tahun sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya. Perbandingan ini dapat dilakukan secara internal maupun secara eksternal.

**d. Dapat dipahami**

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna laporan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah-istilah yang digunakan dalam laporan disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan.

## **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan pada peraturan Perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
25. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
26. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
27. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 123 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; dan
28. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 124 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 123 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

### **1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I      Pendahuluan**

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

#### **BAB II      Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD**

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

#### **BAB III     Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

#### **BAB IV     Kebijakan Akuntansi**

- 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang

Ada Dalam SAP

**BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**

5.1. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.1.1. Pendapatan-LRA

5.1.2. Belanja

5.1.3. Transfer

5.1.4. Pembiayaan

5.1.5. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

5.1.6. Aset

5.1.7. Kewajiban

5.1.8. Ekuitas

5.1.9. Pendapatan-LO

5.1.10. Beban

5.1.11. Surplus/Defisit dari Operasi

5.1.12. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

5.1.13. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

5.1.14. Pos Luar Biasa

5.1.15. Surplus/Defisit Laporan Operasional

5.1.16. Laporan Arus Kas

5.1.17. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

**BAB VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan**

6.1. Kondisi Geografis & Administrasi Wilayah

6.2. Susunan Organisasi Perangkat Daerah

6.3. Kewajiban Kontinjensi

6.4. Penjelasan Non Keuangan Lainnya



## BAB II

### EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

#### 2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi Makro daerah merupakan refleksi dari kinerja makro perekonomian daerah sebagai bagian dari proses pembangunan secara umum di daerah, secara khususnya pembangunan di bidang ekonomi. Kondisi ekonomi makro Kabupaten Sumedang Tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Sumedang Tahun 2021 - 2023**

No.	Uraian	2021	2022	2023
1	Tingkat Pengangguran (%)	9,18	7,72	6,94
2	Angka Kemiskinan (%)	10,71	10,14	9,36
3	Gini Rasio (Poin)	0,359	0,394	0,366
4	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	71,80	72,69	74,02
5	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,17	5,03	5,01
6	PDRB Per Kapita	32,13	34,46	36,77

*Sumber : BAPPPEDA Sumedang*

#### 1) Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sumedang dipengaruhi oleh banyaknya penduduk usia kerja yang terdampak pandemi *Covid-19*, khususnya di tahun 2020. Setelah itu, TPT kembali menurun lebih cepat, bahkan di tahun 2021 sudah mendekati kondisi sebelum pandemi. Adapun TPT di tahun 2022 mengalami penurunan pengangguran paling tinggi dibanding 2021. Hal ini diduga karena adanya lapangan pekerjaan baru atau ada penambahan lapangan pekerjaan dan didukung oleh masa pandemik yang berakhir sehingga pemulihan ekonomi di berbagai sektor kembali bangkit yang berperan terhadap banyaknya lapangan pekerjaan.

Tingkat pengangguran Kabupaten Sumedang kembali mengalami penurunan sebesar 0,78% dari angka tahun 2022. Pada Tahun 2023, kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Sumedang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya ditandai dengan meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang disertai dengan penurunan pengangguran. Hal ini berarti sudah banyak angkatan kerja yang kembali mendapatkan pekerjaan setelah sebelumnya terdampak pandemi *Covid-19*, bahkan TPT jauh lebih baik dibandingkan sebelum pandemi. Pada tahun

2023, Kabupaten Sumedang mampu menurunkan TPT hingga 10,10% lebih rendah dibandingkan Tahun 2022 atau turun 0,78%.

## **2) Angka Kemiskinan**

Dampak pandemi telah menyebabkan jumlah penduduk miskin kembali bertambah selama 2020-2021, dan pada 2022 kembali dapat diturunkan menjadi 10,14%. Hal ini disebabkan karena ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, kesiapan masyarakat, dan kestabilan ekonomi pasca pandemik sehingga pemulihan ekonomi terjadi dan faktor-faktor tersebut berperan dalam penurunan angka kemiskinan.

Sama halnya dengan Tingkat Pengangguran, Angka Kemiskinan Kabupaten Sumedang Tahun 2023 turun sebesar 0,78% dari angka tahun 2022. Persentase penduduk miskin Kabupaten Sumedang memperlihatkan penurunan yang lebih cepat dibandingkan nasional dan Jawa Barat, meski sempat melonjak akibat pandemi *Covid-19*.

Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran ini tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen daerah. Kabupaten Sumedang terus berupaya dalam menekan angka Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan antara lain melalui perluasan kesempatan kerja dan pengembangan kewirausahaan, pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan keluarga miskin. Disisi permodalan, Kabupaten Sumedang telah menggulirkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank bjb dan Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA) dari Bank Sumedang. Sementara itu, akselerasi penanganan kemiskinan dilakukan melalui program KKN Tematik Gotong Royong Membangun Desa (GRMD) dengan cara berkolaborasi bersama 48 Perguruan Tinggi dibawah LLDIKTI Wilayah IV. Indikator kinerja dari program KKN tersebut meliputi penurunan angka kemiskinan, pencegahan stunting dan peningkatan daya saing desa.

## **3) Gini Rasio**

Ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat Sumedang dalam tiga tahun terakhir lebih fluktuatif dibandingkan nasional dan regional Jawa Barat. Di tahun 2019 sebelum terjadi pandemi *Covid-19*, gini ratio Kabupaten Sumedang berada di 0,344. Sementara ketika terjadi awal pandemi *Covid-19* di tahun 2020, ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat Sumedang meningkat menjadi 0,394, dan pada tahun 2022 ketimpangan kembali menurun ke 0,366 dan pada tahun 2023 dengan laju kinerja tahun 2023 sebesar -7,107%.

## **4) Indeks Pembangunan Manusia**

IPM Kabupaten Sumedang konsisten meningkat setiap tahun meskipun sedikit melambat di masa pandemi *Covid-19*. Namun, ditahun 2022 mampu kembali meningkat cukup tinggi (0,89 poin) hingga mencapai 72,69 poin. Kondisi ini diduga karena dalam proses masa pemulihan ekonomi pasca pandemik sehingga meningkatkan IPM Kabupaten Sumedang.

Sementara itu, pencapaian IPM Kabupaten Sumedang pada Tahun 2023 relatif kurang progresif dibandingkan kabupaten/kota lain di Jawa Barat dimana hanya tumbuh 0,67% atau

0,49 poin dibandingkan Tahun 2022. Namun nilai IPM tersebut termasuk kategori tinggi yaitu berada di peringkat 11 dari 27 Kabupaten/Kota atau peringkat 3 jika dibandingkan antar 18 Kabupaten di Jawa Barat.

## 5) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Pertumbuhan ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang bisa dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB menurut Badan Pusat Statistik didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. Indikator perekonomian makro dijelaskan oleh PDRB baik dari sisi penawaran (PDRB Menurut Lapangan Usaha) maupun sisi permintaan (PDRB Menurut Pengeluaran). Pertumbuhan keduanya merupakan instrumen yang digunakan sebagai evaluasi terhadap keberhasilan program pembangunan ekonomi suatu pemerintah daerah. PDRB Menurut Lapangan Usaha menjabarkan perekonomian dalam hal penciptaan nilai tambah atas produksi barang dan jasa secara agregat oleh seluruh lapangan usaha, sedangkan PDRB Menurut Pengeluaran menjabarkan bagaimana seluruh produk barang dan jasa tersebut digunakan.

Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023 mengalami perlambatan, baik di Kabupaten Sumedang, regional Jawa Barat maupun Nasional. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang Tahun 2023 berada pada 5,01% turun 0,02 dari Tahun 2022. Penurunan yang sama terjadi pada Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat dan Nasional masing-masing turun sebesar 0,45% dan 0,27% dari tahun sebelumnya.

Lapangan Usaha	Pertumbuhan					Sumber Pertumbuhan				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,18	2,82	(1,18)	5,21	2,83	0,41	0,56	(0,22)	0,97	0,53
Pertambangan dan Peggalian	(0,78)	1,38	10,80	0,18	(0,82)	(0,00)	0,00	0,01	0,00	(0,00)
<b>Industri Pengolahan</b>	<b>13,72</b>	<b>(1,44)</b>	2,47	<b>6,84</b>	0,97	<b>2,74</b>	(0,29)	0,50	<b>1,40</b>	0,19
Pengadaan Listrik dan Gas	4,63	(3,01)	8,48	2,55	2,13	0,02	(0,01)	0,03	0,01	0,01
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,13	(1,56)	4,22	3,54	8,63	0,00	(0,00)	0,00	0,00	0,00
<b>Konstruksi</b>	2,65	(4,20)	<b>13,07</b>	3,68	2,99	0,28	(0,42)	<b>1,46</b>	0,41	0,33
<b>Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor</b>	5,23	(7,78)	3,99	3,13	<b>9,99</b>	0,82	(1,13)	0,59	0,46	<b>1,57</b>
Transportasi dan Pergudangan	4,81	(6,57)	(4,23)	11,15	11,30	0,24	(0,32)	(0,19)	0,53	0,59
Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	6,02	(4,50)	2,08	15,06	9,84	0,28	(0,20)	0,09	0,74	0,50
<b>Informasi dan Komunikasi</b>	9,32	<b>22,90</b>	4,78	5,75	6,25	0,29	<b>0,89</b>	0,19	0,22	0,23
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,64	(1,78)	3,77	(1,20)	3,67	0,30	(0,08)	0,17	(0,05)	0,16
Real Estate	8,10	(5,21)	7,55	5,13	6,70	0,13	(0,08)	0,12	0,08	0,10
Jasa Perusahaan	7,90	(6,72)	-	12,14	16,35	<b>0,01</b>	(0,01)	-	0,01	0,02
Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,36	(2,24)	0,53	(1,84)	3,09	0,20	(0,13)	0,03	(0,10)	0,16
Jasa Pendidikan	6,19	3,24	0,67	0,12	5,01	0,40	0,23	0,05	0,01	0,32
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,97	3,23	7,14	4,49	5,65	0,08	0,04	0,09	0,05	0,07
Jasa Lainnya	5,83	(3,65)	-	19,87	12,05	0,11	(0,06)	-	0,39	0,24
<b>Pertumbuhan PDRB</b>	<b>6,33</b>	<b>(1,12)</b>	<b>2,97</b>	<b>5,03</b>	<b>5,01</b>	<b>6,33</b>	<b>(1,12)</b>	<b>2,97</b>	<b>5,03</b>	<b>5,01</b>

Gambar 2.1 Sumber Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumedang 2019 – 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Terdapat perbedaan sumber pertumbuhan ekonomi antar tahun, dimana pada tahun 2019 Industri Pengolahan tumbuh 13,72% dan berkontribusi 2,74% pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang. Tahun 2020, Informasi dan Komunikasi tumbuh sebesar 22,90% dan berkontribusi 0,89%. Tahun 2021 Konstruksi tumbuh sebesar 13,07% dan berkontribusi 1,46%. Tahun 2022 Industri Pengolahan tumbuh 6,84% dan berkontribusi 1,40% dan tahun 2023, sektor Perdagangan tumbuh lebih cepat 9,99% dibanding sektor utama lainnya dan menjadi sumber pertumbuhan PDRB dengan kontribusi 1,57%.

**a. PDRB Menurut Lapangan Usaha**

Selama lima tahun terakhir (2019-2023) struktur perekonomian Sumedang didominasi oleh 4 (empat) kategori lapangan usaha, yaitu Industri Pengolahan, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Perdagangan besar dan eceran serta Kategori Konstruksi.

**Tabel 2.2**  
**Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Sumedang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2019-2023 (persen)**

	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	19,05	19,81	18,42	18,67	18,80
B	Pertambangan dan Penggalian	0,08	0,08	0,09	0,08	0,08
C	Industri Pengolahan	19,98	20,02	20,22	20,45	19,48
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,39	0,38	0,39	0,38	0,36
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
F	Konstruksi	10,41	9,98	11,18	11,26	10,94
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,62	14,58	14,87	14,6	15,76
H	Transportasi dan Pergudangan	5,02	4,80	4,53	4,78	5,24
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,60	4,52	4,45	4,90	5,05
J	Informasi dan Komunikasi	3,13	3,88	3,87	3,75	3,65
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,56	4,44	4,55	4,41	4,26
L	Real Estat	1,61	1,53	1,59	1,57	1,57
M,N	Jasa Perusahaan	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09
O	Administasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,95	5,89	5,90	5,34	5,07
P	Jasa Pendidikan	6,54	7,03	6,91	6,54	6,40
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,14	1,19	1,24	1,20	1,20
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,82	1,77	1,69	1,94	2,03
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan harga berlaku, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Perusahaan dan Jasa Lainnya mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya dimana Industri Pengolahan mengalami peningkatan peran paling tinggi yaitu 1,20 poin sehingga menjadi 15,76% pada Tahun 2023.

**Tabel 2.3**  
**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010**  
**Sumedang Menurut Lapangan Usaha 2019-2023 (persen)**

	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,17	2,82	-1,18	5,21	2,83
B	Pertambangan dan Penggalian	-0,80	1,41	10,81	0,17	-0,84
C	Industri Pengolahan	13,72	-1,44	2,47	6,84	0,97
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,63	-3,01	8,47	2,55	2,14
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,20	-1,57	4,08	3,57	8,70
F	Konstruksi	2,65	-4,20	13,07	3,68	2,99
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,23	-7,78	3,99	3,13	9,99
H	Transportasi dan Pergudangan	4,81	-6,57	-4,23	11,15	11,30
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,02	-4,50	2,08	15,06	9,84
J	Informasi dan Komunikasi	9,32	22,90	4,78	5,75	6,25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,64	-1,78	3,77	-1,20	3,67
L	Real Estat	8,10	-5,21	7,55	5,12	6,69
M,N	Jasa Perusahaan	7,92	-6,73	0,00	12,09	16,38
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,36	-2,24	0,56	-1,84	3,09
P	Jasa Pendidikan	6,19	3,24	0,67	0,12	5,01
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,97	3,23	7,14	4,49	5,65
R,S,T,U	Jasa Lainnya	5,83	-3,65	0,00	19,87	12,05
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>6,33</b>	<b>-1,12</b>	<b>2,97</b>	<b>5,03</b>	<b>5,01</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Laju PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010, hampir seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif kecuali kategori Pertambangan dan Penggalian yang mengalami kontraksi -0,84. Industri Pengolahan memiliki kontribusi terbesar di dalam perekonomian Jawa Barat, namun memberikan andil paling kecil terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sepanjang Tahun 2023.

#### **b. PDRB Menurut Pengeluaran**

Peningkatan nilai PDRB Kabupaten Sumedang pada tahun 2023 atas dasar harga berlaku menurut Pengeluaran terjadi pada semua komponen konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPR, konsumsi pemerintah, PMTB dan Net Ekspor kecuali Perubahan Inventori.

**Tabel 2.4**  
**Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)**  
**Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023**

Komponen Pengeluaran	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
1. Konsumsi Rumah Tangga	24.367.849,20	24.372.637,93	25.187.624,28	27.355.149,95	29.540.805,20
2. Konsumsi LNPR	535.099,93	522.765,63	538.796,87	577.743,02	678.790,67
3. Konsumsi Pemerintah	3.133.224,60	3.148.243,68	3.270.190,20	3.383.237,75	3.495.594,13
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	8.701.971,56	8.091.987,36	8.978.873,19	9.601.356,84	10.111.784,51
5. Perubahan Inventori	1.210.501,08	648.043,76	(365.104,32)	58.491,97	51.961,00
6. Net Ekspor	(2.509.019,79)	(1.294.595,70)	(548.611,72)	(950.966,14)	(551.787,00)
<b>PDRB</b>	<b>35.439.626,58</b>	<b>35.489.082,66</b>	<b>37.061.768,50</b>	<b>40.025.013,39</b>	<b>43.327.148,51</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan distribusi tersebut, dapat diketahui bahwa selama periode tahun 2019 sampai 2023, sebagian besar PDRB Kabupaten Sumedang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Sedangkan pada komponen Net Ekspor, terjadi peningkatan nilai yang ditandai dengan berkurangnya nilai negatif. Hal ini berarti bahwa Kabupaten Sumedang yang

selama ini di dominasi oleh komponen impor daripada ekspor ke luar daerah menunjukkan kecenderungan meningkatnya nilai ekspor komoditi ke luar daerah baik barang maupun jasa, sehingga dapat dikatakan bahwa kemandirian ekonomi semakin baik.

**Tabel 2.5**

**Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah) Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023**

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
1. Konsumsi Rumah Tangga	15.924.291,72	15.618.132,80	15.875.259,24	16.739.418,92	17.476.479,62
2. Konsumsi LNPRT	377.255,47	360.731,70	367.420,74	380.781,29	429.381,07
3. Konsumsi Pemerintah	1.989.009,28	1.977.120,82	2.000.198,51	1.993.700,99	2.018.169,60
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5.929.737,65	5.487.006,54	5.967.232,07	6.068.622,72	6.188.927,38
5. Perubahan Inventori	747.708,82	397.917,46	(210.644,11)	33.481,40	28.873,68
6. Net Ekspor	(1.035.273,22)	(175.902,67)	369.259,14	379.013,50	735.030,17
<b>PDRB</b>	<b>23.932.729,72</b>	<b>23.665.006,65</b>	<b>24.368.725,59</b>	<b>25.595.018,82</b>	<b>26.876.861,52</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan harga konstan 2010, PDRB Kabupaten Sumedang menunjukkan peningkatan dari tahun 2019 sampai 2023. Meski mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020 akibat adanya wabah *Covid-19* yang mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat, namun pada tahun 2021 terjadi peningkatan kembali meski masih relatif lebih kecil.

#### 6) PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah. Perkembangan PDRB per kapita di Kabupaten Sumedang menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun sejalan dengan tujuan ke-8 SDG's yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.

PDRB perkapita Kabupaten Sumedang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. PDRB Per kapita pada tahun 2022 sebesar Rp34.243,31 juta rupiah dan pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp36.772,93 juta rupiah. Kemudian dilihat persentase pertumbuhannya secara riil terlihat bahwa pada periode 2021-2023 pertumbuhan PDRB perkapita menunjukkan kecenderungan untuk meningkat terus.

#### 2.2 Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan Keuangan Daerah yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada peraturan perundang-undangan. Selain sebagai wujud pengelolaan keuangan

daerah, APBD dijadikan sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan atau Pendapatan Daerah, Pengeluaran atau Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah digunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ketahun yang diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan pembangunan, baik secara fisik maupun nonfisik.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kondisi keuangan daerah yang mantap, berimbang dan memadai berpengaruh positif terhadap pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Adapun pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
3. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
4. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 123 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 124 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 123 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

### **2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah**

Secara garis besar, pendapatan daerah Kabupaten Sumedang bersumber dari 3 (tiga) komponen yaitu **1) Pendapatan Asli Daerah** meliputi Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah, **2) Pendapatan Transfer** meliputi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi, **3) Lain-lain Pendapatan yang Sah** meliputi Pendapatan Hibah.

Sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Adapun ruang lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah meliputi:

- a. Pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi;
- b. Pengelolaan TKD;
- c. Pengelolaan Belanja Daerah;
- d. Pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah; dan
- e. Pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

Sejalan dengan kebijakan Pajak dan Retribusi dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 memuat aturan pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan iklim investasi diantaranya mengenai mekanisme pemberian dukungan intensif, penyesuaian tarif, evaluasi atas rancangan Perda, Perda dan peraturan pelaksanaannya. Selain itu, melalui penerapan peraturan ini pemerintah daerah tetap didorong agar terus mengedepankan penggalan potensi Pajak secara optimal, salah satunya melalui kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dan pemanfaatan data dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, maupun pihak ketiga dengan tetap menjaga kerahasiaan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023 diarahkan melalui kesepakatan bersama antara DPRD Kabupaten Sumedang dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk dijadikan acuan dalam proses perencanaan pembangunan serta pembiayaan setiap usulan kegiatan yang akan dibahas dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan baik melalui mekanisme Kewilayahan maupun melalui forum SKPD Kabupaten dan Musrenbang Kecamatan. Selanjutnya dilakukan perumusan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos pendapatan daerah dalam APBD. Adapun arah kebijakan pendapatan daerah meliputi:

1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan dengan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai melebihi yang ditargetkan;
2. Uraian arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah; dan
3. Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target.

Berdasarkan hal tersebut, maka upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumedang dalam mencapai target pendapatan adalah sebagai berikut:

**a. Peningkatan Pajak Daerah melalui Upaya Intensifikasi**

1. Melakukan optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui pendekatan Teknologi Informasi dan Komunikasi berupa sistem online terhadap jenis pajak daerah yang memungkinkan;
2. Melakukan pemutakhiran data objek pajak, melalui:
  - a. Pendapatan wajib pajak untuk pajak hotel, restoran, hiburan, parkir dan reklame;



- b. Melakukan pemutakhiran administrasi pajak daerah berbasis Nomor Induk Kependudukan terhadap PBB dan BPHTB; dan
- c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2):
  - a) Pemutihan/penghapusan tunggakan/piutang PBB-P2;
  - b) Pemutakhiran Data Objek Tanah dan Bangunan; dan
  - c) Penilaian individual terhadap objek PBB-P2.
- 3. Melakukan pemeriksaan terhadap:
  - a. Wajib pajak self assessment;
  - b. Wajib pajak PBB-KB; dan
  - c. Wajib pajak PPJ.
- 4. Melakukan penagihan piutang pajak antara lain:
  - a. Penyelenggaraan reklame yang belum daftar ulang (BDU) pajak reklame;
  - b. PBB-P2 dan jenis pajak daerah lainnya; dan
  - c. Melakukan cleansing data terhadap piutang pajak.
- 5. Melakukan pemasangan stiker atau plang bagi penunggak pajak.

**b. Peningkatan Pajak Daerah melalui Upaya Ekstensifikasi**

- 1. Melakukan revisi peraturan daerah terhadap pajak daerah dengan cara:
  - a. Melakukan penambahan objek pajak;
  - b. Melakukan perubahan tarif melalui revisi peraturan daerah terhadap jenis pajak parkir; dan
  - c. Melakukan perubahan nilai sewa reklame (NSR) dan kelas jalan sebagai dasar pengenaan pajak reklame.
- 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dengan cara:
  - a. Melakukan peningkatan integritas dan kualitas SDM; dan
  - b. Melakukan pembangunan, pembenahan, perluasan dan sosialisasi pelayanan.

**c. Peningkatan Retribusi Daerah**

- 1. Peningkatan pelayanan retribusi daerah melalui:
  - a. Mengembangkan pengelolaan retribusi daerah berbasis elektronik;
  - b. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan kepada perangkat daerah pemungut retribusi;
  - c. Melaksanakan monitoring implementasi pembayaran retribusi;
  - d. Menerapkan *cash less* dalam pembayaran retribusi dengan *banking system*;
  - e. Memulai menerapkan *e-ticketing*; dan
  - f. Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat sebagian besar pelayanan retribusi perizinan dan non perizinan dilaksanakan melalui Dinas PTSP.

2. Intensifikasi dan ekstensifikasi perlu dilakukan secara komprehensif guna mengoptimalkan penerimaan retribusi. Dalam hal ini intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan retribusi daerah dilakukan melalui:
  - a. Melakukan penyesuaian tarif secara komprehensif untuk beberapa jenis retribusi daerah; dan
  - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi daerah.

**d. Peningkatan kinerja komponen Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

1. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan BUMD yang dapat meningkatkan laba BUMD;
2. Menerapkan strategi bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan;
3. Membuat surat penagihan deviden kepada BUMD; dan
4. Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD.

**e. Peningkatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah**

1. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga; dan
3. Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal melalui *debt management*.

**f. Dana Perimbangan**

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melakukan upaya peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat bekerjasama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan melalui dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak (Sumber Daya Alam) dengan melakukan kegiatan bersama berupa ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah pusat dan meningkatkan penerimaan pajak negara.

**Tabel 2.6**  
**Perubahan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
		APBD TA 2023 (Rp)	Perubahan Proyeksi Pendapatan (Rp)	(Rp)	%
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
4.1.	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>625.007.877.571,00</b>	<b>616.560.714.151,00</b>	<b>(8.447.163.420,00)</b>	<b>(1,35)</b>
4.1.01.	Pajak Daerah	290.311.625.000,00	285.185.678.752,00	(5.125.946.248,00)	(1,77)

No	Uraian	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
		APBD TA 2023 (Rp)	Perubahan Proyeksi Pendapatan (Rp)	(Rp)	%
4.1.02.	Retribusi Daerah	18.555.878.186,00	18.069.211.247,00	(486.666.939,00)	(2,62)
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.238.342.077,00	13.214.156.341,00	(24.185.736,00)	(0,18)
4.1.04.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	302.902.032.308,00	300.091.667.811,00	(2.810.364.497,00)	(0,93)
<b>4.2.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.169.740.390.285,00</b>	<b>2.353.892.683.455,00</b>	<b>184.152.293.170,00</b>	<b>8,49</b>
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.004.347.018.357,00	2.035.137.816.947,00	30.790.798.590,00	1,54
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	165.393.371.928,00	318.754.866.508,00	153.361.494.580,00	92,73
4.3.	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>2.074.482.000,00</b>	<b>2.074.482.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.1.	Pendapatan Hibah	2.074.482.000,00	2.074.482.000,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.796.822.749.856,00</b>	<b>2.972.527.879.606,00</b>	<b>175.705.129.750,00</b>	<b>6,28</b>

### 2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023 telah mengacu pada ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang terdiri atas **1) Belanja Operasi** yang memuat Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, **2) Belanja Modal** yang memuat Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, **3) Belanja Tidak Terduga** digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, **4) Belanja Transfer** dirinci atas Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja harus diarahkan dan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan

dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial disamping juga untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat.

Adapun Perubahan Proyeksi Belanja Daerah pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.7**  
**Perubahan Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
		APBD TA 2023 (Rp)	Perubahan Proyeksi Belanja (Rp)	(Rp)	%
<b>5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>				
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	2.134.972.336.184	2.190.593.305.674	55.620.969.490,00	2,61
5.1.01.	Belanja Pegawai	1.255.084.934.591	1.231.283.595.916	(23.801.338.675,00)	(1,90)
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	673.184.501.593	883.866.664.758	210.682.163.165,00	31,30
5.1.04.	Belanja Subsidi	350.000.000	450.000.000	100.000.000,00	28,57
5.1.05.	Belanja Hibah	193.362.870.000	64.134.915.000	(129.227.955.000,00)	(66,83)
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	12.990.030.000	10.858.130.000	(2.131.900.000,00)	(16,41)
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	217.570.638.977	436.401.695.037	218.831.056.060,00	100,58
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	1.202.500.000	3.538.500.000	2.336.000.000,00	194,26
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.799.095.687	132.744.781.344	77.945.685.657,00	142,24
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75.150.624.290	91.884.563.203	16.733.938.913,00	22,27
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	82.864.099.000	179.901.990.997	97.037.891.997,00	117,10
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	516.900.000	25.256.439.493	24.739.539.493,00	4.786,14
5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	3.037.420.000	3.075.420.000	38.000.000,00	1,25
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	13.155.296.795	36.191.841.774	23.036.544.979,00	175,11
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	13.155.296.795	36.191.841.774	23.036.544.979,00	175,11
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	429.624.477.900	439.885.861.900	10.261.384.000,00	2,39
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	30.551.048.900	30.551.048.900	0,00	0,00
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	399.073.429.000	409.334.813.000	10.261.384.000,00	2,57
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	<b>2.795.322.749.856</b>	<b>3.103.072.704.385</b>	<b>307.749.954.529,00</b>	<b>11,01</b>

### 2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan bersumber dari SiLPA, pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk pembayaran cicilan pokok Utang Jatuh Tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, pemberian Pinjaman Daerah dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023 meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sementara Pengeluaran Pembiayaan meliputi Pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Rincian Penyertaan Modal Daerah pada BUMD TA 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.8**  
**Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD TA 2023**

NO	BUMD	PERDA PENYERTAAN MODAL	NILAI PENYERTAAN MODAL TA 2023	SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PENYERTAAN MODAL TA 2023
1	Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang	Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang	Rp1.000.000.000,00	Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 184 Tahun 2023 tentang Penetapan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Sumedang Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023
2	Bank Perkreditan Rakyat Sumedang	Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sumedang	Rp 5.000.000.000,00	Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 350 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Pemerintah daerah Kabupaten Sumedang Pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang Tahun Anggaran 2023

Adapun Perubahan Proyeksi Pembiayaan Daerah pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.9**  
**Perubahan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
		APBD TA 2023	Perubahan Proyeksi Pembiayaan	Rp	%
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
<b>6.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>162.044.824.779,00</b>	<b>142.044.824.779,00</b>	<b>710,22</b>
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	20.000.000.000,00	162.044.824.779,00	142.044.824.779,00	710,22
<b>6.2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>21.500.000.000,00</b>	<b>31.500.000.000,00</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>46,51</b>
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	25.000.000.000,00	10.000.000.000,00	66,67
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	0,00	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(1.500.000.000,00)</b>	<b>130.544.824.779,00</b>	<b>132.044.824.779,00</b>	<b>(8.802,99)</b>

### 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2023 menurut keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi, sebagai berikut:

**Tabel 2.10**  
**Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD menurut Keselarasan dan Keterpaduan**  
**Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi TA 2023**

Kode	Uraian	Realisasi Keuangan (%)
<b>01.</b>	<b>Pelayanan Umum</b>	<b>89,30</b>
01.1.05.	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	98,33
01.2.16.	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	95,05
01.2.20.	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	94,05
01.2.21.	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	96,16
01.2.24.	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	96,35
01.3.31.	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	98,47
01.3.32.	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	97,44
01.4.01.	Sekretariat Daerah	97,92
01.4.02.	Sekretariat DPRD	96,92
01.5.01.	Perencanaan	96,95
01.5.02.	Keuangan	84,81
01.5.03.	Kepegawaian	92,69
01.5.05.	Penelitian dan Pengembangan	83,27
01.6.01.	Inspektorat Daerah	98,22
01.7.01.	Kecamatan	97,63
<b>03.</b>	<b>Ketertiban dan ketentraman</b>	<b>97,53</b>
03.8.01.	Kesatuan Bangsa dan Politik	97,53
<b>04.</b>	<b>Ekonomi</b>	<b>97,45</b>
04.2.07.	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	96,12
04.2.09.	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	95,91
04.2.13.	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	98,34
04.2.15.	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	98,30
04.2.17.	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	97,37
04.2.18.	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	93,52
04.3.25.	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	96,71
04.3.27.	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	97,77
04.3.28.	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	99,70
04.3.30.	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	98,26
<b>05.</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>	<b>97,49</b>
05.2.10.	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	98,42
05.2.11.	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	97,32
<b>06.</b>	<b>Perumahan dan fasilitas umum</b>	<b>96,93</b>
06.1.03.	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	96,77
06.1.04.	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	98,37

<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>	<b>Realisasi Keuangan (%)</b>
<b>07.</b>	<b>Kesehatan</b>	<b>93,91</b>
07.1.02.	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	93,74
07.2.14.	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	97,52
<b>08.</b>	<b>Pariwisata dan Budaya</b>	<b>94,29</b>
08.2.22.	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	97,79
08.3.26.	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	93,96
<b>10.</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>97,65</b>
10.1.01.	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	97,64
10.2.19.	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	99,78
10.2.23.	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	98,11
<b>11.</b>	<b>Perlindungan Sosial</b>	<b>93,57</b>
11.1.06.	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	92,15
11.2.08.	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	95,10
11.2.12.	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	95,31

**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada Tahun Anggaran 2023 dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut ini:

**3.1.1 Pendapatan Daerah**

Realisasi Pendapatan pada Tahun 2023 sebesar Rp2.845.322.438.547,44 dibandingkan Anggaran Pendapatan Tahun 2023 sebesar Rp2.972.527.879.606,00 kurang dari anggaran sebesar Rp127.205.441.058,56 (4,28%). Realisasi Pendapatan Daerah ini berasal dari:

**3.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah**

Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang pada Tahun Anggaran 2023, dapat dijelaskan oleh tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2023**  
**Berdasarkan Aspek Pendapatan Untuk PAD**

No	Uraian Pendapatan	Tahun Anggaran 2023		%	Selisih (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5	6 (=4-3)
1	Pendapatan Pajak Daerah	285.185.678.752,00	222.791.864.642,00	78,12	(62.393.814.110,00)
2	Pendapatan Retribusi Daerah	18.069.211.247,00	8.473.124.358,00	46,89	(9.596.086.889,00)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.214.156.341,00	12.491.956.500,00	94,53	(722.199.841,00)
4	Lain-lain PAD yang Sah	300.091.667.811,00	274.928.046.490,44	91,61	(25.163.621.320,56)
<b>Jumlah</b>		<b>616.560.714.151,00</b>	<b>518.684.991.990,44</b>	<b>84,13</b>	<b>(97.875.722.160,56)</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jika dibandingkan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp616.560.714.151,00, Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp518.684.991.990,44 mengalami penurunan penerimaan sebesar Rp97.875.722.160,56 atau turun (15,87%) dari anggaran.

**3.1.1.2 Pendapatan Transfer**

Pendapatan Transfer memiliki peranan terbesar terhadap penerimaan Pendapatan Daerah jika dibandingkan dengan kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Transfer dari target Tahun 2023 sebesar Rp2.353.892.683.455,00 telah



terrealisasi sebesar Rp2.326.100.313.524,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp27.792.369.931,00 (1,18%). Sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:.

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2023**  
**Berdasarkan Aspek Pendapatan Untuk Pendapatan Transfer**

No	Uraian Pendapatan	Tahun Anggaran 2023		%	Selisih (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5	6 (=4-3)
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.745.670.709.947,00	1.731.355.668.682,00	99,18	(14.315.041.265,00)
2	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Desa	277.448.813.000,00	277.350.642.100,00	99,96	(98.170.900,00)
3	Transfer Pemerintah Pusat - Insentif Fiskal	12.018.294.000,00	12.018.294.000,00	100,00	0,00
4	Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil	182.085.983.443,00	170.084.493.616,00	93,41	(12.001.489.827,00)
5	Transfer Antar Daerah - Bantuan Keuangan	136.668.883.065,00	135.291.215.126,00	98,99	(1.377.667.939,00)
<b>Jumlah</b>		<b>2.353.892.683.455,00</b>	<b>2.326.100.313.524,00</b>	<b>98,82</b>	<b>(27.792.369.931,00)</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi pendapatan transfer secara keseluruhan kurang sebesar (Rp27.792.369.931,00) dari anggaran perubahan yang telah ditetapkan.

Adapun rincian Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2023**  
**Berdasarkan Aspek Pendapatan Untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan**

No	Uraian Pendapatan	Tahun Anggaran 2023		%	Selisih (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5	6 (=4-3)
1	Dana Bagi Hasil	112.357.917.947,00	113.094.731.973,00	100,66	736.814.026,00
2	Dana Alokasi Umum	1.095.966.940.000,00	1.095.600.984.600,00	99,97	(365.955.400,00)
3	Dana Alokasi Khusus - Fisik	87.351.033.000,00	81.093.831.761,00	92,84	(6.257.201.239,00)
4	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	449.994.819.000,00	441.566.120.348,00	98,13	(8.428.698.652,00)
<b>Jumlah</b>		<b>1.745.670.709.947,00</b>	<b>1.731.355.668.682,00</b>	<b>99,18</b>	<b>(14.315.041.265,00)</b>

Dana Bagi Hasil terrealisasi sebesar Rp113.094.731.973,00 terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak yang terrealisasi sebesar Rp78.354.987.933,00 dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang terrealisasi sebesar Rp34.739.744.040,00.

### **3.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah**

Lain-lain Pendapatan yang Sah berupa Pendapatan Hibah yang dianggarkan sebesar Rp2.074.482.000,00 pada Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp537.133.033,00, kurang Rp1.537.348.967,00 (74,11%).

### **3.1.2 Belanja Daerah**

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten, yang terdiri dari program/kegiatan pada setiap SKPD pada urusan wajib serta urusan pilihan.

Penggunaan anggaran untuk mendanai program/kegiatan urusan wajib pada setiap SKPD dilakukan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD, sedangkan penggunaan anggaran untuk mendanai program/kegiatan urusan pilihan dilakukan melalui pendekatan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Pelaksanaan belanja tersebut diatur menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Menurut klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga dan Transfer.

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.919.935.326.859,00 bila dibandingkan dengan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2023 sebesar Rp3.103.072.704.385,00 kurang dari anggaran sebesar Rp183.137.377.526,00 atau (5,90%). Realisasi Belanja Daerah ini berasal dari:

#### **3.1.2.1 Belanja Operasi**

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi antara lain meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

Perbandingan target dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang berdasarkan akuntabilitas belanja untuk kelompok Belanja Operasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2023**  
**Berdasarkan Aspek Belanja Untuk Belanja Operasi**

No	Uraian Belanja	Tahun Anggaran 2023		%	Selisih (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5	6 (=4-3)
1	Belanja Pegawai	1.231.283.595.916,00	1.136.211.048.780,00	92,28	(95.072.547.136,00)
2	Belanja Barang dan Jasa	883.866.664.758,00	855.897.881.359,00	96,84	(27.968.783.399,00)
3	Subsidi	450.000.000,00	450.000.000,00	100,00	0,00
4	Hibah	64.134.915.000,00	65.146.756.399,00	101,58	1.011.841.399,00
5	Bantuan Sosial	10.858.130.000,00	9.839.400.000,00	90,62	(1.018.730.000,00)
<b>Jumlah</b>		<b>2.190.593.305.674,00</b>	<b>2.067.545.086.538,00</b>	<b>94,38</b>	<b>(123.048.219.136,00)</b>

Berdasarkan tabel 3.6. di atas terlihat bahwa Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp2.067.545.086.538,00 dari Anggaran Perubahan sebesar Rp2.190.593.305.674,00 terdapat selisih kurang sebesar Rp123.048.219.136,00 atau kurang (5,62%).

### 3.1.2.2 Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Untuk melihat dengan lebih jelas, anggaran dan realisasi mengenai Belanja Modal Tahun Anggaran 2023, dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2023**  
**Berdasarkan Aspek Belanja Untuk Belanja Modal**

No.	Uraian Belanja	Tahun Anggaran 2023		%	Selisih (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5	6 (=4-3)
1	Belanja Modal Tanah	3.538.500.000,00	3.486.649.000,00	98,53	(51.851.000,00)
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	132.744.781.344,00	118.167.717.934,00	89,02	(14.577.063.410,00)
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	91.884.563.203,00	86.018.035.799,00	93,62	(5.866.527.404,00)
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	179.901.990.997,00	175.796.888.261,00	97,72	(4.105.102.736,00)
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25.256.439.493,00	19.324.226.162,00	76,51	(5.932.213.331,00)
6	Belanja Modal Aset Lainnya	3.075.420.000,00	2.924.327.500,00	95,09	(151.092.500,00)
<b>Jumlah</b>		<b>436.401.695.037,00</b>	<b>405.717.844.656,00</b>	<b>92,97</b>	<b>(30.683.850.381,00)</b>

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Realisasi Belanja Modal adalah sebesar Rp405.717.844.656,00 dari Anggaran Perubahan sebesar Rp436.401.695.037,00 terdapat selisih kurang sebesar Rp30.683.850.381,00 atau kurang (7,03%).

### 3.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Belanja Tidak Terduga Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.967.211.399,00 bila dibandingkan dengan Anggaran Perubahan yang ditetapkan sebesar Rp36.191.841.774,00 terdapat selisih kurang sebesar Rp29.224.630.375,00 atau kurang (80,75%).

### 3.1.3 Belanja Transfer

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Transfer merupakan bagian dari Belanja. Jenis transfer menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yaitu Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan.

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2023**  
**Berdasarkan Aspek Belanja Untuk Belanja Transfer**

No.	Uraian Belanja	Tahun Anggaran 2023		%	Selisih (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5	6 (=4-3)
1	Belanja Bagi Hasil	30.551.048.900,00	30.551.038.950,00	99,99	(9.950,00)
2	Belanja Bantuan Keuangan	409.334.813.000,00	409.154.145.316,00	99,96	(180.667.684,00)
<b>Jumlah</b>		<b>439.885.861.900,00</b>	<b>439.705.184.266,00</b>	<b>99,96</b>	<b>(180.677.634,00)</b>

Realisasi Transfer tahun 2023 sebesar Rp439.705.184.266,00 bila dibandingkan dengan Anggaran Perubahan yang ditetapkan sebesar Rp439.885.861.900,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp180.677.634,00 atau (0,04%).

### 3.1.4 Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan netto yang akan digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah.

Kebijakan pembiayaan daerah dari sisi penerimaan pembiayaan tetap melanjutkan kebijakan yang telah ada yaitu pengamanan kemungkinan terjadinya sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2023. Sedangkan kebijakan pembiayaan daerah dari sisi pengeluaran

pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang.

Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp131.044.824.779,74 dengan tingkat capaian 100,38% dari target Anggaran Perubahan yang ditetapkan sebesar Rp130.544.824.779,00. Realisasi Pembiayaan Daerah ini terdiri dari Realisasi Penerimaan Pembiayaan dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan.

**Tabel 3.7**

**Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Berdasarkan Aspek Pembiayaan Untuk Penerimaan Pembiayaan**

No	Uraian Pendapatan	Tahun Anggaran 2023		%	Selisih (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5	6 (=4-3)
1	Penggunaan SILPA	162.044.824.779,00	161.530.195.031,74	99,68	(514.629.747,26)
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	85.231.708,00	0,00	85.231.708,00
<b>Jumlah</b>		<b>162.044.824.779,00</b>	<b>161.615.426.739,74</b>	<b>99,74</b>	<b>(429.398.039,26)</b>

Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp161.615.426.739,74 dengan tingkat capaian 99,74% dari target Anggaran Perubahan yang ditetapkan sebesar Rp162.044.824.779,00 yang berasal dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.

**Tabel 3.8**

**Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Berdasarkan Aspek Pembiayaan Untuk Pengeluaran Pembiayaan**

No	Uraian Pendapatan	Tahun Anggaran 2023		%	Selisih (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5	6 (=4-3)
1	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	100,00	0,00
2	Penyertaan Modal Daerah	6.500.000.000,00	6.000.000.000,00	92,31	(500.000.000,00)
<b>Jumlah</b>		<b>31.500.000.000,00</b>	<b>31.000.000.000,00</b>	<b>98,41</b>	<b>(500.000.000,00)</b>

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp31.000.000.000,00 dibandingkan dengan Anggaran Perubahan yang ditetapkan sebesar Rp31.500.000.000,00 atau realisasinya mencapai 98,41% yang berasal dari Pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

### 3.1.5 Mandatory Spending

*Mandatory Spending* merupakan belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh Undang-Undang bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah

serta pencapaian Target Prioritas Pembangunan Daerah dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah. *Mandatory Spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Bidang pendidikan

Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari Belanja Daerah sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (4) yang dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1);

2. Bidang Kesehatan

- a. Alokasi anggaran kesehatan pemerintah daerah mengalokasikan minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar Belanja Gaji dan Tunjangan Sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; dan
- b. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok dialokasikan paling sedikit 50% (Lima Puluh persen) untuk Mendanai Pelayanan Kesehatan dan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dapat digunakan untuk sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.

3. Dana Transfer Kepada Pemerintah Desa

Sebagaimana Diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Yang memiliki desa harus menganggarkan paling sedikit 10 (sepuluh) persen untuk dana transfer ke pemerintah desa dengan uraian sebagai berikut:

- a. Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota setelah dikurangi DAK; dan
- b. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari Rencana Pendapatan pajak dan retribusi daerah.

4. Belanja Pegawai dan Infrastruktur

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa pemerintah daerah wajib mengalokasikan Belanja Pegawai dan Belanja infrastruktur dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Transfer Ke Daerah (TKD) paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD;

b. Belanja infrastruktur

Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa.

Dalam hal persentase belanja Pegawai dan infrastruktur pelayanan publik belum memenuhi ketentuan prosentase yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja Pegawai dan infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan atau paling lama pada Tahun 2026.

Anggaran belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang TA 2023 dalam rangka pemenuhan *Mandatory Spending* adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.9**  
***Mandatory Spending* terkait Bidang Pendidikan**

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	a. <b>Belanja Pada Dinas Pendidikan (1+2)</b>	<b>966.113.509.928,00</b>	<b>935.252.928.194,00</b>
	1) <b>Belanja Operasi (a+b+c+d)</b>	<b>833.381.825.587,00</b>	<b>820.976.992.715,00</b>
	a. Belanja Pegawai	662.490.197.757,00	645.368.987.636,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	126.815.182.830,00	133.614.716.680,00
	c. Belanja Hibah	44.076.445.000,00	41.993.288.399,00
	d. Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
	2) <b>Belanja Modal</b>	<b>132.731.684.341,00</b>	114.275.935.479,00
	b. <b>Belanja di Luar Dinas Pendidikan yang Menunjang Pendidikan</b>	<b>0,00</b>	0,00
2.	<b>Anggaran Pendidikan (a+b)</b>	<b>966.113.509.928,00</b>	<b>935.252.928.194,00</b>
3.	<b>Total Belanja Daerah</b>	<b>3.103.072.704.385,00</b>	2.919.935.326.859,00
4.	<b>Rasio Anggaran Pendidikan (2/3 x 100%)</b>	<b>31,13</b>	<b>32,03</b>

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa Rasio Anggaran *Mandatory Spending* terkait Bidang Pendidikan dianggarkan sebesar 31,13% dari total belanja daerah atau sebesar Rp966.113.509.928,00. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang mengalokasikan 31,13% anggaran belanja dari total belanja daerah untuk bidang pendidikan. Meskipun realisasi belanja pendidikan sebesar Rp935.252.928.194,00 tidak memenuhi anggaran yang telah ditetapkan, namun realisasi rasio *mandatory spending* terkait Bidang Pendidikan naik sebesar 32,03%.

**Tabel 3.10**  
**Mandatory Spending terkait Bidang Kesehatan**

No.		Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	a.	<b>Belanja Pada Dinas Kesehatan (1+2)</b>	<b>515.357.011.224,00</b>	<b>482.151.776.371,00</b>
		<b>1) Belanja Operasi (a+b+c+d)</b>	<b>477.105.107.150,00</b>	<b>449.677.692.991,00</b>
		a. Belanja Pegawai	122.020.573.876,00	120.407.672.426,00
		b. Belanja Barang dan Jasa	354.424.533.274,00	328.610.020.565,00
		c. Belanja Hibah	660.000.000,00	660.000.000,00
		d. Belanja Bantuan Sosial	0,00	0
		<b>2) Belanja Modal</b>	<b>38.251.904.074,00</b>	<b>32.474.083.380,00</b>
	b.	<b>Belanja di Luar Dinas Kesehatan yang Menunjang Kesehatan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.		<b>Anggaran Kesehatan (a+b)</b>	<b>515.357.011.224,00</b>	<b>482.151.776.371,00</b>
3.		<b>Total Belanja Daerah</b>	<b>3.103.072.704.385,00</b>	<b>2.919.935.326.859,00</b>
4.		<b>Gaji ASN</b>	<b>759.742.769.590,00</b>	<b>684.507.427.686,00</b>
5.		<b>Total Belanja Daerah di Luar Gaji ASN (3-4)</b>	<b>2.343.329.934.795,00</b>	<b>2.235.427.899.173,00</b>
6.		<b>Rasio Anggaran Kesehatan (2/5 x 100%)</b>	<b>21,99</b>	<b>21,57</b>

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa Rasio Anggaran *Mandatory Spending* terkait Bidang Kesehatan dianggarkan sebesar 21,99% dari total belanja daerah di luar Gaji ASN. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang mengalokasikan 21,99% anggaran belanja dari total belanja daerah di luar Gaji ASN untuk bidang kesehatan.

**Tabel 3.11**  
**Mandatory Spending terkait Infrastruktur**

No.		Uraian	Anggaran	Realisasi
1.	a.	<b>Belanja Modal</b>	<b>436.401.695.037,00</b>	<b>405.717.844.656,00</b>
		1) Tanah	3.538.500.000,00	3.486.649.000,00
		2) Peralatan dan Mesin	132.744.781.344,00	118.167.717.934,00
		3) Bangunan dan Gedung	91.884.563.203,00	86.018.035.799,00
		4) Jalan, jaringan dan irigasi	179.901.990.997,00	175.796.888.261,00
		5) Aset tetap lainnya	25.256.439.493,00	19.324.226.162,00
		6) Aset lainnya	3.075.420.000,00	2.924.327.500,00
	b.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>19.937.006.820,00</b>	<b>19.691.937.729,00</b>
	c.	<b>Belanja Hibah</b>	<b>64.134.915.000,00</b>	<b>65.146.756.399,00</b>
	d.	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>10.858.130.000,00</b>	<b>9.839.400.000,00</b>
	e.	<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>	<b>409.334.813.000,00</b>	<b>409.154.145.316,00</b>
2.		<b>Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (a+b+c+d+e)</b>	<b>940.666.559.857,00</b>	<b>909.550.084.100,00</b>
3.		<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>3.134.572.704.385,00</b>	<b>2.845.322.438.547,44</b>
4.		<b>Rasio Anggaran Infrastruktur (2/3*100%)</b>	<b>30,01</b>	<b>31,97</b>

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa Rasio Anggaran *Mandatory Spending* terkait Infrastruktur dianggarkan sebesar 30,01% dari total pendapatan daerah. Hal ini berarti



bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang mengalokasikan 30,01% anggaran belanja infrastruktur dari total pendapatan daerah.

### **3.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan**

#### **3.2.1. Permasalahan dan Solusi Pendapatan**

Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan pendapatan daerah diantaranya adalah:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia belum Optimal

Kualitas Sumber Daya Manusia membawa dampak terhadap kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga dalam segi wawasan dan kemampuan untuk manajemen pengelolaan Pendapatan Daerah dirasakan belum optimal. Kurangnya SDM yang mampu menganalisis potensi Pendapatan Asli Daerah mengakibatkan penggalan sumber-sumber Pendapatan Daerah menjadi kurang optimal.

2. Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Publik

Kecenderungan kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik dalam peningkatan pendapatan, akan berdampak terhadap tingkat pelayanan kepada masyarakat khususnya Wajib Pajak/Retribusi sehingga berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan pendapatan.

3. Kurangnya Kesadaran dari Wajib Pajak/Retribusi

Masih banyak Wajib Pajak/Retribusi yang belum sadar dan belum mematuhi/memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Perpajakan akan kewajiban dalam membayar Pajak/retribusi terkesan menghindar dari kewajiban dalam pembayaran Pajak/retribusi Daerah dengan berbagai alasan antara lain pendapatan yang diterima tidak sesuai dengan pengeluaran akibat banyaknya pesaing, serta banyak Wajib Pajak/retribusi yang tidak operasional lagi (tutup) diantaranya karena terdampak pandemi *Covid-19*.

4. Penegakan dan Penerapan Sanksi Hukum yang belum Optimal

Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam penerapan sanksi hukum yang berkaitan dengan pemeriksaan/auditor Pajak Daerah/Retribusi Daerah dan penegakan Peraturan Perundangan belum optimal

Adapun solusi dari permasalahan diatas, antara lain:

- a. Telah menyusun Dokumen *Data Base* pendapatan melalui kegiatan *Updating Data Base* dan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tentang penetapan formulasi perhitungan estimasi pendapatan;
- b. Telah melaksanakan bimbingan teknis kepada pemeriksa pajak sebagai tenaga untuk memeriksa petugas dan WP khususnya untuk jenis pajak yang sifatnya *self assesment*;

- c. Menyediakan ruangan pelayanan pajak terpadu seluruh jenis pajak daerah dengan sistem pembayaran *host to host bjb* gratis, dengan tujuan memudahkan pelayanan yang cepat dan tanpa dipungut biaya apapun kepada masyarakat;
- d. Menyediakan mobil keliling jemput bola pembayaran pajak ke desa-desa bekerjasama dengan BJB dan BRI;
- e. Melaksanakan dan mengembangkan sistem E-SPTPD, dimana WP bisa melakukan pendaftaran sebagai WP baru dan mengetahui besaran pajak yang harus dibayar hanya melalui ponsel serta dapat mengetahui realisasi pembayaran pajak *real time*;
- f. Melakukan MOU dengan kejelasan untuk membantu mediasi dengan WP yang macet melakukan pembayaran pajak;
- g. Melakukan pemutakhiran Data Base PBB P2 diawali dengan penilaian Zona Nilai Tanah sebagai bahan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang telah 5 tahun belum disesuaikan;
- h. Peningkatan kapasitas aparatur pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah melalui pendidikan dan latihan teknis maupun fungsional, bimbingan teknis pengelolaan Pajak Daerah;
- i. Perbaikan sistem kerja, sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja, diantaranya yaitu dengan diresmikannya Mal Pelayanan Publik sehingga pelayanan bisa cepat, mudah, terjangkau dan nyaman;
- j. Melakukan pendekatan secara persuasif kepada Wajib Pajak dengan memberikan pemahaman tentang Peraturan Pajak; dan
- k. Pembinaan terhadap Wajib Pajak melalui sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung dan media sosial lainnya.

Selanjutnya dalam upaya pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditempuh melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Optimalisasi pendapatan daerah mengacu kepada arah kebijakan umum dan rencana strategis bidang pendapatan yang telah ditetapkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan;
2. Perencanaan target penerimaan daerah diupayakan lebih realistis berdasarkan potensi sumber daya yang ada;
3. Transparansi dalam proses penetapan dan pembayaran pajak/retribusi daerah;
4. Meningkatkan koordinasi antar dinas pengelola pendapatan dalam rangka mengamankan target pendapatan;

5. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan pendapatan dari Dana Perimbangan; dan
6. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dengan mengikutsertakan dalam berbagai pendidikan baik struktural maupun fungsional dan pembinaan teknis pemungutan.

### **3.2.2. Permasalahan dan Solusi Belanja**

Penentuan besaran Anggaran Belanja Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan besarnya jumlah kebutuhan daerah baik dari sisi belanja tidak langsung maupun dari sisi belanja langsung yang dialokasikan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Sedangkan dalam realisasinya, Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dilihat dari realisasi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan transfer. Apabila dianalisa lebih jauh, peningkatan anggaran dan realisasi belanja daerah semata-mata lebih merupakan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Penyusunan APBD Tahun 2023 mengacu kepada anggaran berbasis kinerja, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, maka diharapkan APBD dimaksud dapat lebih memaksimalkan dan mengefisienkan penggunaan anggaran untuk membiayai aktifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, disamping sebagai bagian untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang dibiayai dari dana masyarakat yaitu APBD dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kabupaten Sumedang. Pemilahan akun Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dari penggunaan anggaran pemerintah ke dalam struktur APBD merupakan langkah-langkah penyesuaian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang ada, yang selanjutnya sampai dengan hari ini masih terus dikaji dan dikembangkan dengan melihat kebutuhan dan kondisi daerah.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah memiliki fungsi sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas Akuntansi merupakan unit pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Adapun Entitas Akuntansi yang dimaksud adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Laporan Keuangan yang disusun oleh Entitas Akuntansi terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Adapun Entitas Pelaporan yang dimaksud adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang menyajikan informasi meliputi LRA, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, LO, Laporan Arus Kas (LAK), LPE dan CaLK, dimana laporan tersebut merupakan konsolidasi dari Entitas Akuntansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Dalam hal ini, Entitas Pelaporan yang mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebagai konsolidator adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang berada pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

#### **4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Lampiran Peraturan Bupati Sumedang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis akrual, maka setiap entitas wajib menyajikan laporan keuangan berbasis akrual.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang

mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Penyusunan dan penyajian LKPD Tahun Anggaran 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Serta Peraturan lainnya yang menjadi dasar penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 98 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual serta Peraturan Bupati Sumedang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Dengan demikian dalam penyusunan LKPD telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah daerah.

#### **4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPD adalah:

##### **A. Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Daerah, serta dapat diukur dalam satuan

uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset terdiri dari Aset Lancar yang meliputi Kas Dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, serta Persediaan dan Aset Nonlancar yang meliputi Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, serta Aset Lainnya.

### **1. Aset Lancar**

Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, Investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

#### **a. Kas dan Setara Kas**

Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah atau Investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas terdiri dari:

- Kas di Kas Daerah;
- Kas di Bendahara Penerimaan;
- Kas di Bendahara Pengeluaran;
- Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
- Kas Lainnya.

Sementara Setara Kas terdiri dari:

- Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;
- Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan; dan
- Instrumen pasar uang yang diperoleh dan akan dicairkan dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.

Kas dan Setara Kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan. Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal Neraca.

#### **b. Investasi Jangka Pendek**

Investasi jangka pendek adalah Investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi yang digolongkan sebagai Investasi jangka pendek, antara lain terdiri dari Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara

otomatis (*revolving deposits*); Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek; Pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan Pembelian Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Pengeluaran untuk memperoleh Investasi Jangka Pendek diakui sebagai pengeluaran kas dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam LRA maupun beban dalam LO dengan alasan bahwa pengeluaran untuk perolehan Investasi jangka pendek merupakan reklasifikasi Aset lancar dan tidak dilaporkan dalam LRA maupun LO. Penilaian Investasi Jangka Pendek dilakukan dengan metode biaya, artinya bahwa Investasi Jangka Pendek dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas Investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya Investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Investasi disajikan sesuai dengan klasifikasi Investasi dalam Neraca SKPKD. Investasi Jangka Pendek disajikan pada pos Aset lancar di Neraca.

### c. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pemberian barang/jasa dan perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.

Piutang diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi dan terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti Surat Keputusan Pembebanan/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). Surat Keputusan Pembebanan/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang Pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, Pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pemberhentian Pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian Pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. Pemberhentian Pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write-down*).

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan Akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizablevalue*-nya. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel. Sementara itu, Penghapus tagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di Neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan.

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

- 1) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Ketetapan Retribusi;
- 2) Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan atau SPTPD yang telah diterima;
- 3) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
- 4) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- 5) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.



Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

1) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai Kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

2) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

3) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

4) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah daerah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan Pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

1) Disajikan sebagai Aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan

2) Disajikan sebagai Aset Lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Penggolongan Kualitas Piutang Daerah, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- Kualitas Lancar, jika umur piutang kurang dari 1 tahun;
- Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun;
- Kualitas Diragukan, jika umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan
- Kualitas Macet, jika umur piutang di atas 5 tahun.

Kebijakan penggolongan kualitas piutang dan perhitungan prosentase penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Umur Piutang dan Tingkat Kolektibilitas**

No.	Uraian	Umur Piutang dan Tingkat Kolektibilitas			
		< 1 Tahun	1 s.d 2 Tahun	>2 s.d 5 Tahun	diatas 5 Tahun
1	Piutang Pajak Daerah	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
2	Piutang Retribusi Daerah	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
3	Bagian Laba BUMD	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
4	Biaya Dibayar di Muka	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
5	Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Propinsi	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
6	Piutang Penjualan dan atau Bagian Lancar Penjualan Angsuran	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
7	Piutang Pemberian Pinjaman dan atau Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
8	Piutang Kemitraan dan/atau Bagian Lancar Piutang Kemitraan	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
9	Piutang atas Fasilitas/Jasa dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Fasilitas/Jasa	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
10	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dan atau Bagian Lancar atas Tagihan TGR	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
11	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
12	Piutang Lain-Lain	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet

**Tabel 4.2**  
**Prosentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

No.	Uraian	Prosentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih			
		< 1 Tahun	1 s.d 2 Tahun	>2 s.d 5 Tahun	diatas 5 Tahun
1	Piutang Pajak Daerah	0,5 %	10 %	50 %	100 %
2	Piutang Retribusi Daerah	0,5 %	10 %	50 %	100 %
3	Bagian Laba BUMD	0,5 %	10 %	50 %	100 %
4	Biaya Dibayar di Muka	0,5 %	10 %	50 %	100 %
5	Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Propinsi	0,5 %	10 %	50 %	100 %
6	Piutang Penjualan dan atau Bagian Lancar Penjualan Angsuran	0,5 %	10 %	50 %	100 %
7	Piutang Pemberian Pinjaman dan atau Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	0,5 %	10 %	50 %	100 %
8	Piutang Kemitraan dan/atau Bagian Lancar Piutang Kemitraan	0,5 %	10 %	50 %	100 %
9	Piutang atas Fasilitas/Jasa dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Fasilitas/Jasa	0,5 %	10 %	50 %	100 %
10	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dan atau Bagian Lancar atas Tagihan TGR	0,5 %	10 %	50 %	100 %
11	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	0,5 %	10 %	50 %	100 %

No.	Uraian	Prosentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih			
		< 1 Tahun	1 s.d 2 Tahun	>2 s.d 5 Tahun	diatas 5 Tahun
12	Piutang Lain-Lain	0,5 %	10 %	50 %	100 %

Kebijakan penggolongan kualitas piutang perhitungan prosentase penyisihan piutang tidak tertagih khusus piutang BLUD adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Umur Piutang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang BLUD**

No.	Uraian	Umur Piutang dan Tingkat Kolektibilitas			
		< 1 Tahun	>1 s.d 2 Tahun	>2 s.d 3 Tahun	diatas 3 Tahun
1	Piutang BLUD	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet

**Tabel 4.4**  
**Prosentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang BLUD**

No.	Uraian	Prosentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih			
		< 1 Tahun	>1 s.d 2 Tahun	>2 s.d 3 Tahun	diatas 3 Tahun
1	Piutang BLUD	0 %	25 %	50 %	100 %

**d. Beban Dibayar Dimuka**

Beban Dibayar Dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Beban Dibayar Dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban. Pengukuran Beban Dibayar Dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan. Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam Aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode Akuntansi.

**e. Persediaan**

Persediaan adalah Aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan juga mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Secara rinci, persediaan merupakan Aset berwujud yang berupa:

- 1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;

- 2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- 4) Barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan :

**(a) Metode Perpetual**

Metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-*update*. Metode ini digunakan untuk mencatat jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama SKPD dan sifatnya berkelanjutan serta membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan di rumah sakit umum Daerah dan SKPD yang membidangi urusan kesehatan, blanko kependudukan di SKPD yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil, pupuk di SKPD yang membidangi urusan pertanian dan karcis di SKPD pengelola pendapatan.

**(b) Metode Periodik**

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka Pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar. Digunakan untuk mencatat persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK).

Apabila Penilaian persediaan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*), maka harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, atau nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal (yang seringkali disebut sebagai benda berharga) yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis Retribusi, dinilai sebesar biaya perolehan/pembuatan benda berharga, bukan sebesar nilai nominal karcis yang telah diporporasi.

Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian LO dan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Persediaan disajikan di Neraca SKPD sebagai bagian dari Aset lancar.

## 2. Aset Non Lancar

Aset non lancar terdiri dari Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya.

### a. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah Investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman Investasinya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Investasi Jangka Panjang Non Permanen dan Investasi Jangka Panjang Permanen.

#### a) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan Investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali. Investasi non permanen dapat berupa Pembelian Surat Utang Negara yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, Modal Kerja yang digulirkan ke masyarakat/kelompok masyarakat atau biasa disebut dengan Dana Bergulir dan Investasi non permanen lainnya.

Dana Bergulir merupakan dana atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dipinjamkan/digulirkan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Penyisihan Dana Bergulir adalah estimasi yang dilakukan untuk dana bergulir tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun Dana Bergulir berdasarkan penggolongan kualitas dana bergulir. Kebijakan Akuntansi atas penetapan aging schedule, kategori dan tingkat kolektibilitas serta prosentase Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.5**

**Umur Piutang dan Tingkat Kolektibilitas Dana Bergulir**

No	Uraian	Umur Piutang dan Tingkat Kolektibilitas			
		< 1 Tahun	> 1 s.d 3	> 3 s.d 5	> 5 Tahun
1.	Dana Bergulir	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet

**Tabel 4.6**

**Prosentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih Dana Bergulir**

No	Uraian	Prosentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih			
		< 1 Tahun	> 1 s.d 3	> 3 s.d 5	> 5 Tahun
1.	Dana Bergulir	0,5%	10 %	50 %	100 %

## **b) Investasi Jangka Panjang Permanen**

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan Investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah Investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa:

- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan daerah/Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan badan usaha swasta. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.
- Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk Investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh Pemerintah Daerah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya Investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam pernyataan ini.

Penilaian Investasi jangka panjang Pemerintah Daerah dilakukan dengan 3 (tiga) metode sebagai berikut:

### **(a) Metode biaya**

Dengan menggunakan metode biaya, Investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari Investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya Investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

### **(b) Metode Ekuitas**

Metode Dengan menggunakan metode Ekuitas, Investasi Pemerintah Daerah dinilai sebesar biaya perolehan Investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima Pemerintah Daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai Investasi Pemerintah Daerah.

Penyesuaian terhadap nilai Investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan Investasi Pemerintah Daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi Aset tetap.

### **(c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasi**

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, Investasi Pemerintah Daerah dinilai sebesar harga perolehan Investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas Investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Penggunaan metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode Ekuitas;
- Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode Ekuitas; dan
- Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

### **b. Aset Tetap**

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dengan batasan pengertian tersebut maka pemerintah daerah harus mencatat suatu Aset Tetap yang dimilikinya meskipun aset tetap tersebut digunakan oleh pihak ketiga.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- 1) Tanah;
- 2) Peralatan dan Mesin;
- 3) Gedung dan Bangunan;
- 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- 5) Aset Tetap Lainnya; dan
- 6) Konstruksi dalam Pengerjaan

Pada umumnya Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 3) Biaya perolehan Aset dapat diukur secara andal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan

6) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi Aset tetap yang telah ditetapkan.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru atau penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Berikut Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru Aset Tetap:

**Tabel 4.7**  
**Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru Aset Tetap**

No.	Jenis Aset	Batasan Kapitalisasi
1	Tanah	$\geq 1,00$
2	Peralatan dan Mesin	$\geq 1.000.000$
3	Gedung dan Bangunan	$\geq 25.000.000$
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	$\geq 10.000.000$
5	Aset Tetap Lainnya	$\geq 1,00$

Berikut Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, dan Restorasi:

**Tabel 4.8**  
**Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, dan Restorasi**

No	Jenis Aset	Batasan Kapitalisasi
1	Tanah	$\geq 1,00$
2	Peralatan dan Mesin	$\geq 5.000.000$
3	Gedung dan Bangunan	$\geq 25.000.000$
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	$\geq 10.000.000$
5	Aset Tetap Lainnya	Pemeliharaan tidak dikapitalisasi

Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat Aset yang bersangkutan. Tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai Aset Tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya. Disamping itu penyusutan juga dimaksudkan untuk menggambarkan penurunan kapasitas dan manfaat yang diakibatkan pemakaian Aset Tetap dalam kegiatan pemerintahan.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan masa manfaat sebagai berikut:

**Tabel 4.9**  
**Umur Ekonomis Aset Tetap**

No	Jenis Aset Tetap	Umur Ekonomis (Tahun)
1	Tanah	-
2	Peralatan dan Mesin	5
3	Gedung dan Bangunan	20
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	10
5	Aset Tetap Lainnya	-

Aset Tetap dapat dihentikan dari penggunaannya apabila suatu Aset tetap tidak dapat digunakan karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang



(RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir. Maka Aset Tetap tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah, dengan kata lain dihentikan dari penggunaan aktif, maka tidak memenuhi kriteria dan tidak dapat dikelompokkan sebagai Aset Tetap maka harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

**a) Kontrak-Kontrak Konstruksi**

Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu Aset atau suatu kombinasi Aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi.

Kontrak konstruksi dapat meliputi:

- a. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi Aset, seperti jasa arsitektur;
- b. Kontrak untuk perolehan atau konstruksi Aset;
- c. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi Aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*; dan
- d. Kontrak untuk membongkar atau merestorasi Aset dan restorasi lingkungan.

Suatu kontrak konstruksi dapat digunakan untuk perolehan satu jenis Aset atau mencakup sejumlah Aset. Apabila suatu kontrak konstruksi mencakup perolehan sejumlah Aset, dimana komponen-komponen Aset tersebut dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok Aset secara bersama maka untuk setiap komponen atau suatu kelompok Aset tersebut dapat diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
- c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

### **c. Dana Cadangan**

Pembentukan Dana Cadangan merupakan pengeluaran kas yang ditujukan untuk membentuk Dana Cadangan yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan daerah. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Pendapatan Asli Daerah Lainnya. Pembentukan Dana Cadangan dirinci berdasarkan peruntukan atau tujuan pembentukan dana cadangan.

Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan. Penerimaan pembiayaan daerah yang berasal dari pencairan dana cadangan dirinci berdasarkan peruntukan dana cadangan yang dicairkan.

### **d. Aset Lainnya**

Aset Lainnya ialah Aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Dana Cadangan. Aset Lainnya meliputi Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, Piutang Tidak Lancar, dan Aset Lain- Lain. Aset Tak Berwujud meliputi perangkat lunak (*Software*) Komputer, Lisensi, Waralaba (*Franchise*), Hak Cipta (*Copyright*) dan Hak Paten.

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tuntutan Perbendaharaan dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas Daerah.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTM) dan Surat Ketetapan Tuntutan Ganti Rugi dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas Daerah.

Bangun Kelola Serah (BKS/BOT) dicatat sebesar nilai Aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga untuk membangun Aset BKS tersebut. Bangun Serah Kelola (BSK/BTO) dicatat sebesar nilai perolehan Aset yang dibangun yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan jumlah Aset yang dikeluarkan pihak ketiga untuk membangun Aset tersebut.

Piutang Tidak Lancar diakui pada akhir periode Akuntansi dan dinilai berdasarkan nilai nominal tagihan. Aset Lain-Lain diakui berdasarkan nilai perolehan Aset Lain-Lain tersebut. Aset Lainnya disajikan di Neraca berdasarkan jenis Aset. Rincian dan keterangan atas jenis Aset yang bersangkutan diungkapkan dalam CaLK. Piutang Tidak Lancar dapat dihapuskan dari Neraca melalui proses penghapusan piutang. Mekanisme dan prosedur penghapusan piutang ditetapkan tersendiri oleh Bupati.

### a) Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah Aset non keuangan yang dapat diidentifikasi namun tidak memiliki wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, Perangkat Lunak (*software*) Komputer, Lisensi, Waralaba (*franchise*), Hak Cipta (*copyright*), paten, dan hak atas kekayaan intelektual lainnya.

Amortisasi Aset Tak Berwujud dilaksanakan untuk:

- 1) Menyajikan nilai Aset Tak Berwujud secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi Aset Tak Berwujud dalam Laporan Keuangan;
- 2) Mengetahui potensi Aset Tak Berwujud dengan memperkirakan sisa Masa Manfaat suatu Aset Tak Berwujud yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan; dan
- 3) Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tak Berwujud yang sudah dimiliki.

Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus, dengan masa manfaat sebagai berikut:

**Tabel 4.10**  
**Masa Manfaat Aset Tak Berwujud**

No	Jenis Aset Tak Berwujud	Umur Ekonomis (Tahun)
1	Software Komputer	4
2	Lisensi	10
3	Waralaba ( <i>franchise</i> )	5
4	Hak Cipta ( <i>copyright</i> ) atas Ciptaan Gol. I	70
5	Hak Paten Sederhana	10
6	Hak Cipta ( <i>copyright</i> ) atas Ciptaan Gol. II	50
7	Hak Cipta Karya Seni Terapan	25
8	Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan	50
9	Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
10	Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran	20
11	Paten Biasa	20
12	Merek	10
13	Desain Industri/DED/Kajian	10
14	Rahasia Dagang	10
15	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
16	Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
17	Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

Pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tak Berwujud sampai dengan Aset Tak Berwujud tersebut dihapuskan. Amortisasi Aset Tak Berwujud disajikan sebagai Beban Amortisasi dalam LO dan Akumulasi Amortisasi dalam Neraca. Penghapusan terhadap Aset Tak Berwujud

mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah.

#### **b) Akuntansi Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga**

Aset Kemitraan adalah Aset kerjasama yang timbul dari perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor) yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan Aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Bangun, Kelola, Serah - BKS (*Build, Operate, Transfer*-BOT), adalah pola kerjasama berupa pemanfaatan Aset Pemerintah Daerah oleh mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor), dengan cara pihak mitra tersebut mendirikan bangunan dan/ atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagukannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkan kembali Aset pemerintah daerah beserta bangunan dan/ atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).

Bangun, Serah, Kelola - BSK (*Build, Transfer, Operate*-BTO) adalah pola kerjasama berupa pemanfaatan Aset pemerintah daerah oleh mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor), dengan cara pihak mitra tersebut mendirikan bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan Aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati (masa konsesi).

BMD yang dipartisipasikan dalam pola kerjasama pemanfaatan BKS/BSK diakui sebagai Aset kemitraan pada saat telah terdapat BAST kerjasama pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan dan diukur sebesar nilai bersih yang tercatat atau nilai wajar pada saat telah terdapat BAST atau dokumen yang dipersamakan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

Aset kemitraan disajikan di Neraca pada pos Aset Lainnya. Aset Kemitraan yang mempunyai karakteristik Aset untuk disusutkan atau diamortisasi, dilakukan perhitungan estimasi nilai penyusutan atau amortisasi Aset secara sistematis selama umur ekonomi Aset dimaksud, dan tidak dibatasi oleh masa konsesi. Pada akhir masa konsesi, Aset Kemitraan direklasifikasi ke dalam jenis Aset Tetap atau Aset Tak Berwujud. Reklasifikasi Aset dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat Asetnya.

#### **B. Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah terdiri dari Kewajiban Jangka Panjang dan Kewajiban Jangka Pendek.

## **1. Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban Jangka Panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menutup defisit anggarannya. Secara umum Kewajiban Jangka Panjang adalah semua Kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari:

- 1) Utang Dalam Negeri
- 2) Utang Jangka Panjang Lainnya Utang Dalam Negeri, terdiri dari:
  - a. Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan;
  - b. Utang Dalam Negeri–Obligasi; dan
  - c. Utang Jangka Panjang Lainnya.

## **2. Kewajiban Jangka Pendek**

Suatu Kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti Aset Lancar. Kewajiban Jangka Pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap Aset Lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek di PPKD terdiri atas:

1. Utang kepada Pihak Ketiga;
2. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
3. Utang Bunga;
4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
5. Utang Beban; dan
6. Utang Jangka Pendek Lainnya;

Kewajiban jangka pendek di SKPD terdiri atas:

1. Utang kepada Pihak Ketiga;
2. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
3. Pendapatan Diterima Dimuka;
4. Utang Beban; dan
5. Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban Jangka Pendek diakui pada saat diterima oleh pemerintah daerah namun belum dilakukan pembayaran dan atau pada saat Kewajiban tersebut timbul. Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah daerah harus mengakui Kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.

### **3. Ekuitas**

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Ekuitas diakui pada akhir periode berdasarkan jurnal penyesuaian untuk memindahkan surplus/defisit LO ke dalam Neraca. Sedangkan Ekuitas untuk dikonsolidasikan diakui pada saat terjadi transaksi resiprokal antara SKPKD dengan SKPD. Pada akhir periode Akuntansi, Ekuitas untuk dikonsolidasikan ini akan dieliminasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan konsolidasian. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir Ekuitas pada LPE.

### **4. Pendapatan - LRA**

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan-LRA diakui pada saat Pendapatan telah diterima. Pada akhir periode pelaporan, jika terdapat pendapatan yang dipungut oleh/disetor kepada Bendahara Penerimaan SKPD namun belum disetorkan ke Kas Umum Daerah tidak diakui sebagai pendapatan LRA. Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan namun belum dianggarkan dalam APBD, tetap disetorkan ke kas daerah sesuai dengan jenis pendapatan yang diterima dan dilaporkan dalam LRA dengan target anggaran pendapatan sebesar nol. Atas setoran pendapatan tersebut diakui menambah pendapatan di SKPD pemungut dan penyetor. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya.

### **5. Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil. Belanja diukur berdasarkan realisasi belanja menurut klasifikasi yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah. Realisasi belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

## **6. Pendapatan - LO**

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. PAD melalui penetapan ini diartikan sebagai perolehan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang disahkan dengan penetapan. PAD tanpa Penetapan adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Sumedang tanpa didahului dengan penetapan secara resmi yang dikirimkan ke pemerintah daerah karena proses bisnis yang tidak memungkinkan. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto. Atas penerimaan pendapatan oleh Bendahara Penerimaan pada akhir periode pelaporan dan belum disetorkan ke Kas Umum Daerah dicatat sebagai Pendapatan-LO sebesar hak Pemerintah Daerah.

## **7. Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan Ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi Aset atau timbulnya Kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO). Beban diakui pada saat timbulnya Kewajiban, konsumsi Aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur berdasarkan harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas Kewajiban beban yang timbul, konsumsi Aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dan taksiran nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

## **8. Transfer**

Transfer dikategorikan berdasarkan sumbernya kejadiannya dan diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan.
- b) Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya.
- c) Transfer Pemerintah Provinsi.
- d) Transfer/Bagi hasil ke Desa.
- e) Transfer/Bantuan Keuangan.

Transfer masuk untuk kepentingan penyusunan LO diakui pada saat diterimanya Surat Keputusan yang menimbulkan adanya hak daerah terhadap transfer masuk. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada LO, Pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat

penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan. Transfer masuk untuk kepentingan penyusunan LRA diakui pada saat transfer tersebut masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan LO, Pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan Pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang menyatakan Kewajiban transfer Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada LRA, Pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar. Transfer Keluar untuk penyajian LRA diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

## **9. Pembiayaan**

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari penggunaan SILPA merupakan penerimaan pembiayaan yang berasal dari sisa perhitungan APBD periode sebelumnya. Penggunaan SILPA diakui pada saat perda tentang perhitungan APBD tahun sebelumnya telah disahkan oleh DPRD. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.



#### **4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP**

Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan (Akuntansi Berbasis Akrua) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah. Pada Tahun 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan akuntansi berbasis akrua adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sudah menerbitkan Keputusan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua dan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akrua pada Tahun 2013 serta Peraturan Bupati Sumedang Nomor 100 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah tanggal 2 Oktober 2015, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 24 Tahun 2016 tanggal 6 Oktober 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 122 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, dan terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang serta Peraturan Bupati Sumedang Nomor 98 Tahun 2022 tanggal 29 Maret 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua;
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sumedang sudah terintegrasi antara SKPD dengan SKPKD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Sistem Informasi SIPASTI sebagai pendamping SIPD, yaitu SIPASTI Keuangan dan SIPASTI BMD;
3. Pembinaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada setiap SKPD yang dilakukan setiap triwulan; dan
4. Pelatihan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berbasis akrua dimana pesertanya sebanyak 3 (tiga) orang dari setiap SKPD yaitu PPTK, Petugas Akuntansi dan Pengurus Barang. Pelatihan tersebut dilakukan diakhir tahun anggaran.

**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**5.1. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran (TA) 2023 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Selanjutnya pos-pos dalam laporan keuangan dijelaskan sebagai berikut.

**5.1.1. Pendapatan-LRA**

Pendapatan-LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang berasal dari 3 (tiga) sumber yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan merupakan semua penerimaan Kas Daerah yang menambah Ekuitas Dana Lancar dalam periode TA berjalan yang menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan tidak perlu dibayar kembali.

Komposisi Pendapatan-LRA Daerah TA 2023 menurut sumbernya adalah sebagai berikut.

No.	Pendapatan-LRA	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Asli Daerah-LRA	616.560.714.151,00	518.684.991.990,44	(97.875.722.160,56)	518.986.812.154,84
2.	Pendapatan Transfer	2.353.892.683.455,00	2.326.100.313.524,00	(27.792.369.931,00)	2.365.573.220.560,00
3.	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	2.074.482.000,00	537.133.033,00	(1.537.348.967,00)	3.411.071.029,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.972.527.879.606,00</b>	<b>2.845.322.438.547,44</b>	<b>(127.205.441.058,56)</b>	<b>2.887.971.103.743,84</b>

Realisasi Pendapatan-LRA yang diperoleh selama TA 2023 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah mencapai sebesar Rp2.845.322.438.547,44 lebih rendah dari realisasi Pendapatan-LRA TA 2022 sebesar Rp2.887.971.103.743,84. Jumlah pendapatan daerah merupakan realisasi pendapatan dari tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp518.684.991.990,44, Pendapatan Transfer sebesar Rp2.326.100.313.524,00, serta Lain-Lain Pendapatan yang Sah Rp537.133.033,00.

Adapun rincian lebih lanjut pendapatan-LRA menurut sumbernya adalah sebagai berikut.

**5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah-LRA**

Pendapatan Asli Daerah-LRA meliputi Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Dipisahkan dengan nilai anggaran dan realisasi sebagai berikut.

No.	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Pajak Daerah	285.185.678.752,00	222.791.864.642,00	(62.393.814.110,00)	221.379.897.839,00
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	18.069.211.247,00	8.473.124.358,00	(9.596.086.889,00)	9.276.092.781,00
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.214.156.341,00	12.491.956.500,00	(722.199.841,00)	12.643.497.231,00
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	300.091.667.811,00	274.928.046.490,44	(25.163.621.320,56)	275.687.324.303,84
<b>Jumlah</b>		<b>616.560.714.151,00</b>	<b>518.684.991.990,44</b>	<b>(97.875.722.160,56)</b>	<b>518.986.812.154,84</b>

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA TA 2023 sebesar Rp518.684.991.990,44 lebih rendah dari realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA TA 2022 sebesar Rp518.986.812.154,84. Tingkat capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA sebesar 84,13% dari APBD Perubahan sebesar Rp616.560.714.151,00 atau kurang sebesar (Rp97.875.722.160,56) (15,87%).

#### 5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 sebesar Rp222.791.864.642,00 lebih besar dari Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 sebesar Rp221.379.897.839,00. Tingkat capaian realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar 78,12% dari APBD Perubahan sebesar Rp285.185.678.752,00 atau kurang sebesar (Rp62.393.814.110,00) (21,88%).

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	<b>285.185.678.752,00</b>	<b>222.791.864.642,00</b>	<b>(62.393.814.110,00)</b>	<b>221.379.897.839,00</b>

Rincian Pendapatan Pajak Daerah adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pajak Hotel	4.050.000.000,00	4.470.447.770,00	420.447.770,00	4.023.931.148,00
2.	Pajak Restoran	22.764.000.000,00	25.109.298.995,00	2.345.298.995,00	20.225.354.236,00
3.	Pajak Hiburan	3.000.000.000,00	3.745.011.842,00	745.011.842,00	2.721.750.482,00
4.	Pajak Reklame	3.000.000.000,00	3.024.713.365,00	24.713.365,00	2.582.896.575,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	76.021.500.000,00	77.232.598.452,00	1.211.098.452,00	81.201.927.451,00
6.	Pajak Parkir	1.250.000.000,00	1.409.154.550,00	159.154.550,00	1.223.357.875,00
7.	Pajak Air Tanah	10.100.000.000,00	6.479.946.258,00	(3.620.053.742,00)	10.091.300.272,00
8.	Pajak Sarang Burung Walet	2.125.000,00	2.150.000,00	25.000,00	2.250.000,00
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.000.000.000,00	1.423.357.360,00	(576.642.640,00)	1.824.019.204,00
10.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	85.472.000.000,00	62.763.788.622,00	(22.708.211.378,00)	61.530.120.063,00
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	77.526.053.752,00	37.131.397.428,00	(40.394.656.324,00)	35.952.990.533,00
<b>Jumlah</b>		<b>285.185.678.752,00</b>	<b>222.791.864.642,00</b>	<b>(62.393.814.110,00)</b>	<b>221.379.897.839,00</b>

## **1. Pajak Hotel**

Realisasi Pajak Hotel TA 2023 sebesar Rp4.470.447.770,00 melebihi anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp420.447.770,00 atau lebih 10,38% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp4.050.000.000,00. Menurut Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) hal ini terjadi karena adanya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi khususnya dari sektor pondokan/kost yaitu berupa penambahan Wajib Pajak baru Hotel yaitu Koz Koliving dan Pondok Ameera 2, serta tingkat kesadaran Wajib Pajak yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Pendapatan Pajak Hotel berasal dari:

- a. Hotel sebesar Rp3.799.472.770,00; dan
- b. Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari sepuluh sebesar Rp670.975.000,00.

## **2. Pajak Restoran**

Realisasi Pajak Restoran TA 2023 sebesar Rp25.109.298.995,00 melebihi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.345.298.995,00 atau lebih 10,30% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp22.764.000.000,00. Menurut Bapenda hal ini dikarenakan:

- a. Intensifikasi;
- b. Ekstensifikasi berupa adanya Wajib Pajak baru sebanyak 90 Wajib Pajak diantaranya yaitu Glow Beauty Bar Coffee and Space, Incoffee, Kopi Kadeudeuh, Rumah Makan Prima Seafood, Catering Ratulangi, PT. Sari Coffee Indonesia, CV Selalu Manis Bersama, 95 Villa Resto, Bento Kopi, Burger Bangor Jatinangor, Warung Ai Wina, Rocket Chicken Cabang Situraja, Mixue Situraja, Cafe Wasabi, CV Asstro Puteri Berri/Toga Hill, Rumah Makan Sampurasun Nusasari, Dapur Bunda, Catering Berkah, Bumdes Mulya Jaya, Aulia Catering, Karomah Catering; dan
- c. Adanya kenaikan tingkat konsumsi/transaksi di objek pajak restoran yang dilakukan masyarakat.

Pendapatan Pajak Restoran berasal dari:

- a. Restoran sebesar Rp12.219.644.691,00;
- b. Rumah Makan sebesar Rp2.483.575.497,00;
- c. Kafetaria sebesar Rp5.901.543.504,00;
- d. Warung sebesar Rp7.920.658,00; dan
- e. Jasa Boga/Katering sebesar Rp4.496.614.645,00.

## **3. Pajak Hiburan**

Realisasi Pajak Hiburan TA 2023 sebesar Rp3.745.011.842,00 melebihi anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp745.011.842,00 atau lebih 24,83% dari target yang telah ditetapkan

sebesar Rp3.000.000.000,00. Menurut Bapenda kenaikan ini karena telah dilakukannya upaya Intensifikasi.

#### **4. Pajak Reklame**

Realisasi Pajak Reklame TA 2023 sebesar Rp3.024.713.365,00 melebihi anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp24.713.365,00 atau lebih 0,82% dari target yang telah ditetapkan sebesar 3.000.000.000,00. Menurut Bapenda hal ini dikarenakan:

- a. Intensifikasi;
- b. Ekstensifikasi berupa adanya penambahan 66 Wajib Pajak baru, diantaranya yaitu PT.Elang Perdana Tyre Industry, PT Rocket Chicken Indonesia, PT J Co Donuts & Coffee, PT Dimsuming Express Indonesia, CV Cipta Kinerja, CV Anugerah Tanjungsari, PT Rekso Nasional Food/Mcdonald's Mekarjaya Smd, CV Aa Advertising, PT. Daya Indah Yasa, CV Muharomi Semesta, PT Nusa Prima Pangan, CV Yatmaka, PT Tumeko Grup Indonesia, Tahu Sumedang Renyah, Solikhin; dan
- c. Tingkat Kesadaran Wajib Pajak meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

#### **5. Pajak Penerangan Jalan**

Realisasi Pajak Penerangan Jalan TA 2023 sebesar Rp77.232.598.452,00 melebihi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.211.098.452,00 atau lebih 1,59% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp76.021.500.000,00. Menurut Bapenda hal ini dikarenakan:

- a. Banyaknya investor masuk ke Kabupaten Sumedang sehingga meningkatnya pembangunan di Kabupaten Sumedang seperti perumahan-perumahan baru sehingga meningkatnya pemasangan daya listrik baru;
- b. Peningkatan pengendalian dan pengawasan serta kerja sama dengan PT. PLN (persero); dan
- c. Intensifnya penyebarluasan dan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat akan pentingnya pajak penerangan jalan bagi pembangunan Kabupaten Sumedang.

#### **6. Pajak Parkir**

Realisasi Pajak Parkir TA 2023 sebesar Rp1.409.154.550,00 melebihi anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp159.154.550,00 atau lebih 12,73% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp1.250.000.000,00. Menurut Bapenda kelebihan dari target ini disebabkan oleh:

- a. Intensifikasi;
- b. Ektensifikasi, berupa penambahan Wajib Pajak baru sebanyak dua Wajib Pajak yaitu Parkir ITB Jatinangor dan Parkir Toga Hill; dan
- c. Tingkat kesadaran Wajib Pajak meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

#### **7. Pajak Air Tanah**

Realisasi Pajak Air Tanah TA 2023 sebesar Rp6.479.946.258,00 kurang dari anggaran yang ditetapkan sebesar (Rp3.620.053.742,00) atau kurang (35,84%) dari target yang telah

ditetapkan sebesar Rp10.100.000.000,00. Menurut Bapenda hal ini dikarenakan sekitar 114 Wajib Pajak yang izinnya sudah habis dan tidak disahkan oleh ESDM Provinsi dikarenakan masih proses perpanjangan izin. Sementara untuk izin yang habis masa berlakunya belum bisa diperpanjang dikarenakan masih dalam proses pembahasan dasar hukum oleh BKAT (Badan Geologi kementerian ESDM). Adapun titik sumur yang berizin berjumlah 110 titik sedangkan yang tidak berizin berjumlah 182 titik.

#### **8. Pajak Sarang Burung Walet**

Pajak Sarang Burung Walet TA 2023 sebesar Rp2.150.000,00 melebihi anggaran yang ditetapkan realisasinya sebesar Rp25.000,00 atau lebih 1,18% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp2.125.000,00. Menurut Bapenda hal ini dikarenakan tingkat kesadaran dari para pengusaha Pajak Sarang Burung Walet semakin meningkat.

#### **9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2023 sebesar Rp1.423.357.360,00 kurang dari anggaran yang ditetapkan sebesar (Rp576.642.640,00) atau kurang (28,83%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000,00. Menurut Bapenda hal ini dikarenakan tidak terdapat sanksi tegas terhadap objek galian yang tidak berizin sehingga mempengaruhi ketaatan Wajib Pajak yang berizin dalam membayar pajak.

#### **10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)**

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) TA 2023 sebesar Rp62.763.788.622,00 kurang dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar (Rp22.708.211.378,00) atau kurang (26,57%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp85.472.000.000,00. Menurut Bapenda kekurangan dari target ini disebabkan oleh:

- a. Terdapat beberapa Wajib Pajak yang belum disiplin dan taat terhadap pembayaran pajak yang telah ditetapkan besaran pajak terhutangnyanya sehingga pembayaran pajaknya mengalami keterlambatan dengan alasan produk dan usahanya belum mengalami kemajuan/usahanya belum stabil;
- b. Khususnya dalam pengelolaan PBB P2, para Wajib Pajak/penanggung pajak tidak berada di tempat usaha/Objek Pajak (guntay), sehingga masih sulit dalam penagihannya mengakibatkan pajak sulit bayar;
- c. Masih terdapat beberapa Wajib Pajak daerah yang belum aktif/sadar dalam melakukan pembayaran pajak daerah sehingga masih diperlukan adanya jemput bola; dan
- d. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan pajak daerah khususnya para petugas dalam proses penindakan pajak daerah seperti Petugas Pemeriksa Pajak, Petugas Juru Sita, Petugas Penilai Pajak/PBBP2, dan sebagainya.

## 11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Realisasi BPHTB TA 2023 sebesar Rp37.131.397.428,00 kurang dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar (Rp40.394.656.324,00) atau kurang (52,10%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp77.526.053.752,00. Menurut Bapenda kekurangan dari target ini disebabkan oleh:

- Masih kurangnya transaksi jual beli tanah; dan
- BPHTB sangat dipengaruhi oleh iklim investasi daerah dan perkembangan ekonomi.

### 5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 sebesar Rp8.473.124.358,00 lebih rendah dari Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022 sebesar Rp9.276.092.781,00. Tingkat capaian realisasi Pendapatan Retribusi Daerah sebesar 46,89% dari APBD Perubahan sebesar Rp18.069.211.247,00 atau kurang sebesar (Rp9.596.086.889,00) (53,11%).

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Retribusi Daerah	18.069.211.247,00	8.473.124.358,00	(9.596.086.889,00)	9.276.092.781,00

Rincian Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.968.860.500,00	1.416.773.160,00	(552.087.340,00)	1.258.873.000,00
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.500.000.000,00	841.962.000,00	(3.658.038.000,00)	2.173.390.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar	1.145.194.406,00	578.376.060,00	(566.818.346,00)	466.403.150,00
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	855.000.000,00	217.749.400,00	(637.250.600,00)	340.746.000,00
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	35.000.000,00	35.022.000,00	22.000,00	12.846.000,00
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	93.765.500,00	83.832.000,00	(9.933.500,00)	66.628.500,00
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.128.341.340,00	1.204.063.383,00	75.722.043,00	1.128.341.340,00
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	608.559.276,00	736.198.373,00	127.639.097,00	330.836.966,00
9	Retribusi Terminal	48.456.200,00	9.479.000,00	(38.977.200,00)	44.936.600,00
10	Retribusi Rumah Potong Hewan	30.479.000,00	30.479.000,00	0,00	29.009.000,00
11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	53.400.000,00	53.400.000,00	0,00	51.935.400,00
12	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	6.918.082.025,00	2.617.596.782,00	(4.300.485.243,00)	2.998.520.725,00
13	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	62.473.000,00	3.266.700,00	(59.206.300,00)	96.714.100,00

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
14	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	621.600.000,00	644.926.500,00	23.326.500,00	276.912.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>18.069.211.247,00</b>	<b>8.473.124.358,00</b>	<b>(9.596.086.889,00)</b>	<b>9.276.092.781,00</b>

### 1. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan TA 2023 sebesar Rp1.416.773.160,00 kurang dari anggaran yang ditetapkan sebesar (Rp552.087.340,00) atau kurang (28,04%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp1.968.860.500,00. Hal ini diantaranya disebabkan oleh sepiunya pengunjung yang berkunjung ke Pasar Rakyat mengakibatkan banyak Kios/Los yang tutup sementara dan tutup total sehingga tidak dapat dilakukan pungut Retibusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

### 2. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum TA 2023 sebesar Rp841.962.000,00 kurang dari anggaran yang ditetapkan sebesar (Rp3.658.038.000,00) atau kurang (81,29%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp4.500.000.000,00. Hal ini diantaranya disebabkan:

- a. Parkir Berlangganan belum dapat dimasukkan di sistem ke-samsatan yang sudah berjalan;
- b. Rasionalisasi jumlah Juru Parkir yang berakibat berkurangnya jumlah Juru Parkir;
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan parkir sesuai dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 89 Tahun 2022 Pasal 33 ayat (1) tentang Penyelenggaraan Parkir oleh Dinas Perhubungan belum optimal;
- d. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan parkir dengan dapat melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Resort Sumedang sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Bupati Sumedang No 89 Tahun 2022 Pasal 33 ayat (1) tentang Penyelenggaraan Parkir belum optimal dilaksanakan;
- e. Pemenuhan fasilitas dan sarana dalam Program Parkir Berlangganan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 89 Tahun 2022 Pasal 8 Ayat (1) tentang Penyelenggaraan Parkir belum merata di semua titik dan zona parkir;
- f. Belum adanya *database* yang terintegrasi Wajib Retribusi parkir berlangganan yang lengkap dengan nama, alamat, nomor kendaraan dan masa berlaku parkir berlangganan;
- g. Sosialisasi, penyebaran informasi dan penawaran parkir berlangganan kepada masyarakat dan Wajib Retribusi belum optimal dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan oleh Dinas Perhubungan; dan



- h. Pelaksanaan tugas Juru Parkir dan Pengawas Juru Parkir untuk melaksanakan sosialisasi dan penawaran parkir berlangganan kepada pemilik kendaraan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Bupati Sumedang No 89 Tahun 2022 Pasal 23 dan Pasal 31 tentang Penyelenggaraan Parkir belum optimal dilaksanakan.

### **3. Retribusi Pelayanan Pasar**

Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar TA 2023 sebesar Rp578.376.060,00 kurang dari anggaran yang ditetapkan sebesar (Rp566.818.346,00) atau kurang (49,50%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp1.145.194.406,00. Hal ini diantaranya disebabkan:

- a. Pasar Rakyat masih sepi pengunjung karena pasar rakyat tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), belum tertata dengan rapih, kalah bersaing dengan pasar modern/swalayan/supermarket yang fasilitasnya lebih memadai dan harga relatif murah sehingga sehingga pengunjung lebih memilih berbelanja di pasar modern hal ini mengakibatkan banyak Kios/Los yang tutup total dan tutup sementara tidak membayar retribusi;
- b. Dampak dari revitalisasi Pasar Inpres Sumedang Kota banyak pedagang yang pindah berjualannya ke Pasar Kordon dan menjamur ke jalan 11 April dan setelah bangunan selesai tidak pindah lagi sehingga sangat berpengaruh besar terhadap daya beli konsumen ke Pasar Inpres;
- c. Merebaknya pasar dadakan di wilayah pemukiman penduduk/ desa sehingga menjadi kurang pengunjung dan banyaknya kios/los yang tutup total dan tutup buka sehingga banyak pengguna kios banyak yang kurang bayar sehingga berdampak kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan
- d. Dengan adanya media *online*, pasar menjadi sepi pembeli dikarenakan konsumen lebih baik diam di rumah dan merasa lebih nyaman serta harga berbelanja di *online* lebih murah daripada di pasar.

### **4. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor TA 2023 sebesar Rp217.749.400,00 kurang dari anggaran yang ditetapkan sebesar (Rp637.250.600,00) atau kurang (74,53%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp855.000.000,00, hal ini diantaranya disebabkan:

- a. Kurangnya SDM dalam Pengelolaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. Lokasi Pengujian Kendaraan Bermotor Relatif sulit dijangkau oleh para pemilik kendaraan wajib uji yang lokasinya cukup jauh, seperti Wilayah Kecamatan Ujungjaya, Kecamatan Surian, Kecamatan Tanjungmedar dan Kecamatan Buahdua dll;
- c. Adanya Amanat UUD Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan

d. Tidak adanya Kendaraan wajib uji keliling.

#### **5. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran**

Realisasi Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran TA 2023 sebesar Rp35.022.000,00, melebihi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp22.000,00 atau lebih 0,06% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp35.000.000,00. Hal ini disebabkan adanya penambahan potensi Wajib Pajak yang tidak terdaftar dari Objek Pajak sebelumnya.

#### **6. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**

Realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang TA 2023 sebesar Rp83.832.000,00 kurang dari anggaran yang ditetapkan sebesar (Rp9.933.500,00) atau kurang (10,59%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp93.765.500,00. Hal ini karena pagu anggaran tera/tera ulang untuk TA 2023 naik cukup signifikan sementara masih terdapatnya pangkalan LPG 3 kg yang menera ulang alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya ke UPTD Metrologi Legal Kabupaten Bandung. Selain itu sehubungan dengan telah selesainya pembangunan jalan tol sehingga banyak perusahaan yang terkait telah berpindah lokasi dan tidak melaksanakan tera ulang di Kabupaten Sumedang.

#### **7. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi**

Realisasi Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi TA 2023 sebesar Rp1.204.063.383,00 melebihi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp75.722.043,00 atau lebih 6,71% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp1.128.341.340,00. Hal ini karena adanya penambahan pembangunan menara telekomunikasi baru.

#### **8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2023 sebesar Rp736.198.373,00 melebihi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp127.639.097,00 atau lebih 20,97% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp608.559.276,00, hal ini diantaranya disebabkan:

- a. Bertambahnya pihak ketiga yang menyewa aset milik pemerintah daerah, diantaranya yaitu penyewaan WC Umum di Pasar Conggeang, Pasar Darmaraja, Pasar Inpres, Pasar Parakanmuncang, Pasar Tanjungsari dan Pasar Wado;
- b. Terus dilakukannya sosialisasi terkait pengujian yang bisa dilakukan di UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi (terutama dalam proses *free Construction Meeting*); dan
- c. Banyak paket pekerjaan jalan yang menyewa mesin gilas dari UPTD Peralatan dan Perbengkelan DPUTR.

#### **9. Retribusi Terminal**

Realisasi Retribusi Terminal TA 2023 sebesar Rp9.479.000,00 kurang dari anggaran yang ditetapkan sebesar (Rp38.977.200,00) atau kurang (80,44%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp48.456.200,00. Hal ini disebabkan oleh kewenangan pemungutan retribusi

Terminal Ciakar yang sebelumnya dipungut oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang kini kewenangannya diambil alih oleh pemerintah pusat. Selain itu, pembangunan Waduk Jatigede berdampak terhadap operasional Terminal Wado sehingga pemungutan retribusi di Terminal Wado diberhentikan.

#### **10. Retribusi Rumah Potong Hewan**

Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan TA 2023 sebesar Rp30.479.000,00 dengan tingkat capaian 100% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp30.479.000,00.

#### **11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**

Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah TA 2023 sebesar Rp53.400.000,00 dengan tingkat capaian 100% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp53.400.000,00, berasal dari retribusi penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta bibit atau benih ikan pada Dinas Perikanan dan Peternakan.

#### **12. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**

Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan TA 2023 sebesar Rp2.617.596.782,00 kurang dari anggaran yang ditetapkan sebesar (Rp4.300.485.243,00) atau kurang (62,16%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp6.918.082.025,00, hal ini diantaranya disebabkan:

- a. Belum optimalnya kegiatan sosialisasi PBG/SLF;
- b. Belum optimalnya *data base* Bangunan Gedung sebagai acuan target Retribusi PBG; dan
- c. Terdapat permohonan PBG/SLF yang belum memenuhi persyaratan untuk diterbitkan.

#### **13. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum**

Realisasi Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum TA 2023 sebesar Rp3.266.700,00 kurang dari anggaran yang ditetapkan sebesar (Rp59.206.300,00) atau kurang (94,77%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp62.473.000,00. Hal ini diantaranya disebabkan oleh tidak aktifnya aplikasi SIICEMANDIRI sehingga SK izin trayek yang habis tahun 2023 tidak dapat diproses untuk diperpanjang.

#### **14. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)**

Realisasi Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) TA 2023 sebesar Rp644.926.500,00 melebihi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp23.326.500,00 atau lebih 3,75% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp621.600.000,00. Hal ini disebabkan karena keterlibatan pihak luar (Penggunaan Tenaga Kerja Asing) yang bertambah dibanding tahun sebelumnya dimana realisasi sebesar Rp644.926.500,00 berasal dari kontrak per tahun dari 37 orang TKA yang akan habis kontrak pada tahun 2024.

### 5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 sebesar Rp12.491.956.500,00 lebih rendah dari realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2022 sebesar Rp12.643.497.231,00. Tingkat capaian realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 94,53% dari APBD Perubahan sebesar Rp13.214.156.341,00.

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.214.156.341,00	12.491.956.500,00	(722.199.841,00)	12.643.497.231,00

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara rinci dapat dilihat dari tabel berikut.

No.	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	12.714.156.341,00	12.487.814.264,00	(226.342.077,00)	12.640.008.120,00
2.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	0,00	4.142.236,00	4.142.236,00	3.489.111,00
3.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>13.214.156.341,00</b>	<b>12.491.956.500,00</b>	<b>(722.199.841,00)</b>	<b>12.643.497.231,00</b>

#### 1. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) realisasinya sebesar Rp12.487.814.264,00 dengan tingkat capaian 98,22% dari APBD Perubahan sebesar Rp12.714.156.341,00. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebesar Rp12.487.814.264,00 berasal dari :

- a. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten sebesar 5.148.879.759,00; dan
- b. Bank Sumedang sebesar Rp7.338.934.505,00.

#### 2. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) realisasinya sebesar Rp4.142.236,00, yaitu dari *Geothermal Energy*

berupa bonus produksi sebagai bentuk bagi hasil kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

### 3. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum), yaitu dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang realisasinya sebesar Rp0,00 atau tidak mencapai target anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00. Seharusnya PDAM menyetorkan bagian laba Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 96 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang Pasal 96 Ayat 1 Huruf a, disetorkan sebagai Pendapatan Asli Daerah sebesar 50% dari laba bersihnya.

#### 5.1.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2023 sebesar Rp274.928.046.490,44 lebih rendah dari realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2022 sebesar Rp275.687.324.303,84. Tingkat capaian realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar 91,61% dari APBD Perubahan sebesar Rp300.091.667.811,00 atau kurang sebesar (Rp25.163.621.320,56) (8,39%).

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	300.091.667.811,00	274.928.046.490,44	(25.163.621.320,56)	275.687.324.303,84

Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah sebagai berikut.

No.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.787.056.913,00	913.126.292,00	(873.930.621,00)	638.078.382,00
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	220.374.600,00	147.994.200,00	(72.380.400,00)	44.700.000,00
3.	Jasa Giro	5.500.000.000,00	3.084.798.644,34	(2.415.201.355,66)	5.103.813.567,25
4.	Pendapatan Bunga	5.000.000.000,00	1.539.089.611,10	(3.460.910.388,90)	2.492.589.446,59
5.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	6.500.000,00	16.300.000,00	9.800.000,00	29.000.000,00
6.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	34.103.300,00	123.114.632,00	89.011.332,00	268.281.758,00
7.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	3.600.000.000,00	4.309.618.864,00	709.618.864,00	3.767.794.655,00

No.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
8.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	2.500.000.000,00	1.726.904.186,00	(773.095.814,00)	2.001.823.841,00
9.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	1.353.200,00	7.381.824,00	6.028.624,00	6.793.400,00
10.	Pendapatan dari Pengembalian	400.000.000,00	236.004.791,00	(163.995.209,00)	215.572.520,00
11.	Pendapatan BLUD	280.742.279.798,00	262.823.713.446,00	(17.918.566.352,00)	261.107.025.934,00
12.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	11.850.800,00
<b>Jumlah</b>		<b>300.091.667.811,00</b>	<b>274.928.046.490,44</b>	<b>(25.163.621.320,56)</b>	<b>275.687.324.303,84</b>

Beberapa komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mengalami kenaikan dibandingkan realisasi TA sebelumnya, yaitu Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Retribusi Daerah, Pendapatan dari Pengembalian, dan Pendapatan BLUD.

#### 5.1.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi dengan rincian anggaran dan realisasi sebagai berikut.

No.	Pendapatan Transfer	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.745.670.709.947,00	1.731.355.668.682,00	(14.315.041.265,00)	1.765.132.904.738,00
2.	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	289.467.107.000,00	289.368.936.100,00	(98.170.900,00)	274.422.186.800,00
3.	Transfer Pemerintah Provinsi	318.754.866.508,00	305.375.708.742,00	(13.379.157.766,00)	326.018.129.022,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.353.892.683.455,00</b>	<b>2.326.100.313.524,00</b>	<b>(27.792.369.931,00)</b>	<b>2.365.573.220.560,00</b>

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 sebesar Rp2.326.100.313.524,00 lebih rendah dari Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 sebesar Rp2.365.573.220.560,00. Tingkat capaian realisasi Pendapatan Transfer sebesar 98,82% dari APBD Perubahan sebesar Rp2.353.892.683.455,00 atau kurang sebesar (Rp27.792.369.931,00) (1,18%).

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 meliputi:

##### 5.1.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Realisasi Dana Perimbangan TA 2023 sebesar Rp1.731.355.668.682,00 lebih rendah dari Realisasi Dana Perimbangan TA 2022 sebesar Rp1.765.132.904.738,00. Tingkat capaian realisasi Dana Perimbangan sebesar 99,18% dari APBD Perubahan sebesar Rp1.745.670.709.947,00 atau kurang sebesar (Rp14.315.041.265,00) (0,82%).

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.745.670.709.947,00	1.731.355.668.682,00	(14.315.041.265,00)	1.765.132.904.738,00

Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Dana Bagi Hasil Pajak	74.931.469.630,00	78.354.987.933,00	3.423.518.303,00	67.220.420.048,00
2.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	37.426.448.317,00	34.739.744.040,00	(2.686.704.277,00)	36.225.796.565,00
3.	Dana Alokasi Umum	1.095.966.940.000,00	1.095.600.984.600,00	(365.955.400,00)	1.052.231.192.000,00
4.	Dana Alokasi Khusus	537.345.852.000,00	522.659.952.109,00	(14.685.899.891,00)	609.455.496.125,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.745.670.709.947,00</b>	<b>1.731.355.668.682,00</b>	<b>(14.315.041.265,00)</b>	<b>1.765.132.904.738,00</b>

#### 5.1.1.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak sebesar Rp78.354.987.933,00 dengan tingkat capaian 104,57% dari APBD Perubahan sebesar Rp74.931.469.630,00 atau lebih sebesar Rp3.423.518.303,00 (4,57%), dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.427.686.200,00	5.480.841.534,00	1.053.155.334,00	8.396.339.031,00
2.	DBH PPh Pasal 21	37.967.136.073,00	35.369.516.845,00	(2.597.619.228,00)	34.464.996.164,00
3.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	2.473.530.897,00	2.473.530.897,00	2.729.480.054,00
4.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	32.536.647.357,00	35.031.098.657,00	2.494.451.300,00	21.629.604.799,00
<b>Jumlah</b>		<b>74.931.469.630,00</b>	<b>78.354.987.933,00</b>	<b>3.423.518.303,00</b>	<b>67.220.420.048,00</b>

#### 5.1.1.2.1.2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Realisasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp34.739.744.040,00 tingkat capaiannya 92,82% dari APBD Perubahan sebesar Rp37.426.448.317,00 atau kurang sebesar (Rp2.686.704.277,00) (7,18%), dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	DBH SDA Minyak Bumi	5.485.258.490,00	7.424.490.977,00	1.939.232.487,00	6.486.579.939,00
2.	DBH SDA Gas Bumi	5.292.378.419,00	2.782.676.063,00	(2.509.702.356,00)	5.751.385.967,00
3.	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	24.512.667.953,00	21.294.451.811,00	(3.218.216.142,00)	20.613.333.652,00
4.	DBH SDA Mineral dan Batubara- Landrent	0,00	1.928.850,00	1.928.850,00	0,00
5.	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	249.754.000,00	643.879.069,00	394.125.069,00	1.151.910.612,00
6.	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan	1.121.989.000,00	147.016.059,00	(974.972.941,00)	264.275.395,00

No.	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
	(PSDH)				
7.	DBH SDA Perikanan	764.400.455,00	1.444.887.211,00	680.486.756,00	1.958.311.000,00
8.	DBH Sawit	0,00	1.000.414.000,00	1.000.414.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>37.426.448.317,00</b>	<b>34.739.744.040,00</b>	<b>(2.686.704.277,00)</b>	<b>36.225.796.565,00</b>

#### 5.1.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum

Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2023 sebesar Rp1.095.600.984.600,00 lebih besar dari Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2022 sebesar Rp1.052.231.192.000,00. Tingkat capaiannya sebesar 99,97% dari APBD Perubahan sebesar Rp1.095.966.940.000,00 atau kurang sebesar (Rp365.955.400,00) (0,03%), hal ini karena adanya sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik Administrasi Kependudukan sampai dengan TA 2023 yang diperhitungkan pada saat penyaluran dana alokasi khusus bulan Oktober 2023.

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>Dana Alokasi Umum</b>	<b>1.095.966.940.000,00</b>	<b>1.095.600.984.600,00</b>	<b>(365.955.400,00)</b>	<b>1.052.231.192.000,00</b>

#### 5.1.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) terealisasi sebesar Rp522.659.952.109,00 dengan tingkat capaian 97,27% dari APBD Perubahan sebesar Rp537.345.852.000,00 atau kurang sebesar (Rp14.685.899.891,00) (2,73%). Rincian DAK sebagai berikut.

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)
<b>A</b>	<b>DANA ALOKASI KHUSUS FISIK</b>	<b>81.093.831.761,00</b>
<b>1.</b>	<b>Dana Alokasi Khusus Reguler</b>	<b>63.649.448.761,00</b>
	a. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	2.109.401.800,00
	b. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	26.262.209.885,00
	c. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	9.895.900.269,00
	d. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.016.669.642,00
	e. DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00
	f. DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	8.287.087.911,00
	g. DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	8.162.317.000,00
	h. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	2.600.388.900,00
	i. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	5.315.473.354,00
<b>2.</b>	<b>Dana Alokasi Khusus Penugasan</b>	<b>17.444.383.000,00</b>
	a. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan- Penguatan Intervensi Stunting	11.175.600.000,00
	b. DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	6.268.783.000,00
<b>B</b>	<b>DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK</b>	<b>441.566.120.348,00</b>
1.	DAK Non Fisik-BOS Reguler	140.748.224.292,00
2.	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	5.025.000.000,00



No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)
3.	DAK Non Fisik-TPG PNSD	222.408.378.167,00
4.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.565.637.499,00
5.	DAK Non Fisik-BOP PAUD	18.226.750.000,00
6.	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	9.530.930.000,00
7.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	6.078.218.230,00
8.	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	22.683.722.000,00
9.	DAK Non Fisik-BOKB	12.287.731.600,00
10.	DAK Non Fisik-Dana Fasilitasi Penanaman Modal	283.871.310,00
11.	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.331.587.250,00
12.	DAK Non Fisik-PK2UMK	396.070.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>522.659.952.109,00</b>

#### 5.1.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat– Lainnya

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya TA 2023 sebesar Rp289.368.936.100,00 lebih besar dari Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya TA 2022 sebesar Rp274.422.186.800,00. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya yaitu berupa Dana Desa dan Insentif Fiskal.

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>Transfer Pemerintah Pusat– Lainnya</b>	<b>289.467.107.000,00</b>	<b>289.368.936.100,00</b>	<b>(98.170.900,00)</b>	<b>274.422.186.800,00</b>

Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00	37.001.635.000,00
2.	Dana Desa	277.448.813.000,00	277.350.642.100,00	(98.170.900,00)	237.420.551.800,00
3.	Insentif Fiskal	12.018.294.000,00	12.018.294.000,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>289.467.107.000,00</b>	<b>289.368.936.100,00</b>	<b>(98.170.900,00)</b>	<b>274.422.186.800,00</b>

##### 5.1.1.2.2.1. Dana Penyesuaian

Pada TA 2023, Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya berupa Dana Penyesuaian tidak dianggarkan, sedangkan pada TA 2022 terdapat realisasi sebesar Rp37.001.635.000,00.

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>Dana Penyesuaian</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.001.635.000,00</b>

#### 5.1.1.2.2. Dana Desa

Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya berupa Dana Desa terealisasi sebesar Rp277.350.642.100,00 dengan tingkat capaian 99,96% dari APBD Perubahan sebesar Rp277.448.813.000,00 atau kurang sebesar Rp98.170.900,00 (0,04%), hal ini karena ada tiga desa yang realisasinya tidak sesuai ajuan, karena langsung dilakukan pengurangan dari pemerintah pusat berdasarkan dari perhitungan aplikasi Omspan, yaitu Desa Ranjeng sebesar Rp48.197.100,00 dan Desa Sundamekar sebesar Rp49.973.800.

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
Dana Desa	277.448.813.000,00	277.350.642.100,00	(98.170.900,00)	237.420.551.800,00

Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya berupa Dana Desa tidak dicatat sebagai Pendapatan Transfer di Laporan Operasional karena bukan merupakan pendapatan operasional Pemda dan tidak menjadi beban Pemerintah Daerah.

#### 5.1.1.2.2.3. Insentif Fiskal

Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya berupa Insentif Fiskal terealisasi sebesar Rp12.018.294.000,00 dengan tingkat capaian 100,00% dari APBD Perubahan sebesar Rp12.018.294.000,00.

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
Insentif Fiskal	12.018.294.000,00	12.018.294.000,00	0,00	0,00

#### 5.1.1.2.3. Transfer Pemerintah Provinsi

Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi TA 2023 sebesar Rp305.375.708.742,00 lebih rendah dari Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi TA 2022 sebesar Rp326.018.129.022,00. Transfer Pemerintah Provinsi yaitu berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan.

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
Transfer Pemerintah Provinsi	318.754.866.508,00	305.375.708.742,00	(13.379.157.766,00)	326.018.129.022,00

Rincian Transfer Pemerintah Provinsi adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	182.085.983.443,00	170.084.493.616,00	(12.001.489.827,00)	164.239.295.900,00

No.	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
2.	Bantuan Keuangan	136.668.883.065,00	135.291.215.126,00	(1.377.667.939,00)	161.778.833.122,00
<b>Jumlah</b>		<b>318.754.866.508,00</b>	<b>305.375.708.742,00</b>	<b>(13.379.157.766,00)</b>	<b>326.018.129.022,00</b>

#### 5.1.1.2.3.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Pajak terealisasi sebesar Rp170.084.493.616,00 dengan tingkat capaian 93,41% dari APBD Perubahan sebesar Rp182.085.983.443,00 atau kurang sebesar (Rp12.001.489.827,00) (6,59%). DBH Pajak dari Provinsi terdiri dari:

No.	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	34.005.984.795,00	32.444.081.625,00	(1.561.903.170,00)	31.208.572.714,00
2.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	21.478.626.926,00	18.549.137.760,00	(2.929.489.166,00)	19.126.126.155,00
3.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	52.416.893.284,00	50.702.068.613,00	(1.714.824.671,00)	50.468.956.783,00
4.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	559.742.148,00	512.452.704,00	(47.289.444,00)	518.166.434,00
5.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	73.624.736.290,00	67.876.752.914,00	(5.747.983.376,00)	62.917.473.814,00
<b>Jumlah</b>		<b>182.085.983.443,00</b>	<b>170.084.493.616,00</b>	<b>(12.001.489.827,00)</b>	<b>164.239.295.900,00</b>

#### 5.1.1.2.3.2. Bantuan Keuangan

Realisasi Bantuan Keuangan TA 2023 berasal dari Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi untuk membiayai kegiatan-kegiatan di SKPD tahun 2023 sebesar Rp135.291.215.126,00 dengan tingkat capaian 98,99% dari APBD Perubahan sebesar Rp136.668.883.065,00 atau kurang sebesar (Rp1.377.667.939,00) (1,01%).

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>Bantuan Keuangan</b>	<b>136.668.883.065,00</b>	<b>135.291.215.126,00</b>	<b>(1.377.667.939,00)</b>	<b>161.778.833.122,00</b>

Bantuan keuangan ini diantaranya untuk kegiatan pengadaan buku perpustakaan, kegiatan Jamkes tahun 2023, Pengadaan *Arm Roll* Truk dan Kontainer, Pengembangan Budidaya dan Teknologi Pertanian, Bantuan Keuangan Kegiatan Perlindungan terhadap Perempuan TA 2023, Budidaya dan Teknologi Tani, Rehabilitasi Jalan, Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pelayanan Disdukcapil, Kegiatan Pembangunan Jembatan Cilutung, Penerangan Jalan Umum.

### 5.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2023 sebesar Rp537.133.033,00 lebih rendah dari Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2022 sebesar Rp3.411.071.029,00.

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	2.074.482.000,00	537.133.033,00	(1.537.348.967,00)	3.411.071.029,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2023 berupa Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat untuk *Integrated Participatory Development and Management Irrigation Project* (IPDMIP) sebesar Rp102.580.000,00 dan Pendapatan Hibah Air Minum Berbasis Kinerja (HAMBK) ke PDAM dari Kementerian Keuangan atas hasil penilaian kinerja PDAM sebesar Rp434.553.033,00.

Kegiatan IPDMIP merupakan suatu program Integrasi Partisipasi Pertanian yang turut melibatkan Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan yang bekerjasama dengan masyarakat petani dan semua pihak yang terkait baik di dalam dan sekitar daerah Irigasi.

### 5.1.2. Belanja

Belanja meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga dengan rincian anggaran dan realisasi sebagai berikut.

No.	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Operasi	2.190.593.305.674,00	2.067.545.086.538,00	(123.048.219.136,00)	2.057.716.538.601,00
2.	Belanja Modal	436.401.695.037,00	405.717.844.656,00	(30.683.850.381,00)	480.578.259.481,00
3.	Belanja Tidak Terduga	36.191.841.774,00	6.967.211.399,00	(29.224.630.375,00)	2.786.124.220,00
Jumlah		2.663.186.842.485,00	2.480.230.142.593,00	(182.956.699.892,00)	2.541.080.922.302,00

Realisasi Belanja Daerah belum termasuk Transfer TA 2023 sebesar Rp2.480.230.142.593,00 lebih rendah dari Realisasi Belanja Daerah TA 2022 sebesar Rp2.541.080.922.302,00. Tingkat capaian realisasi Belanja Daerah sebesar 93,13% dari anggaran perubahan yang telah ditetapkan sebesar Rp2.663.186.842.485,00 atau kurang sebesar (Rp182.956.699.892,00) (6,87%).

Adapun rincian lebih lanjut dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga adalah sebagai berikut.

#### 5.1.2.1. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi pada TA 2023 sebesar Rp2.067.545.086.538,00 lebih besar dari Realisasi Belanja Operasi TA 2022 sebesar Rp2.057.716.538.601,00. Tingkat capaian realisasi Belanja Operasi sebesar 94,38% dari APBD Perubahan sebesar Rp2.190.593.305.674,00 atau kurang sebesar (Rp123.048.219.136,00) (5,62%).

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Operasi	2.190.593.305.674,00	2.067.545.086.538,00	(123.048.219.136,00)	2.057.716.538.601,00

Rincian realisasi Belanja Operasi adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Pegawai	1.231.283.595.916,00	1.136.204.761.480,00	(95.078.834.436,00)	1.169.624.519.375,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	883.866.664.758,00	855.904.168.659,00	(27.962.496.099,00)	803.235.286.510,00
3.	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Belanja Subsidi	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	95.782.500,00
5.	Belanja Hibah	64.134.915.000,00	65.146.756.399,00	1.011.841.399,00	78.047.993.016,00
6.	Belanja Bantuan Sosial	10.858.130.000,00	9.839.400.000,00	(1.018.730.000,00)	6.712.957.200,00
Jumlah		2.190.593.305.674,00	2.067.545.086.538,00	(123.048.219.136,00)	2.057.716.538.601,00

#### 5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai pada TA 2023 sebesar Rp1.136.204.761.480,00 lebih rendah dari Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 sebesar Rp1.169.624.519.375,00. Tingkat capaian realisasi Belanja Pegawai sebesar 92,28% dari APBD Perubahan sebesar 1.231.283.595.916,00 atau kurang sebesar (Rp95.078.834.436,00) (7,72%). Rincian realisasi belanja pegawai adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	759.742.769.590,00	684.507.427.686,00	(75.235.341.904,00)	713.508.762.152,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	198.033.212.384,00	193.043.551.605,00	(4.989.660.779,00)	188.557.688.054,00
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	232.165.375.000,00	218.611.594.500,00	(13.553.780.500,00)	234.845.337.337,00
4.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	36.555.356.364,00	36.136.828.896,00	(418.527.468,00)	29.981.486.190,00
5.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	992.147.328,00	954.593.192,00	(37.554.136,00)	985.916.230,00
6.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.312.320.000,00	1.220.400.000,00	(91.920.000,00)	1.312.320.000,00
7.	Belanja Pegawai BLUD	2.482.415.250,00	1.730.365.601,00	(752.049.649,00)	433.009.412,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.231.283.595.916,00</b>	<b>1.136.204.761.480,00</b>	<b>(95.078.834.436,00)</b>	<b>1.169.624.519.375,00</b>

#### 5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp855.904.168.659,00 dengan tingkat capaian 96,84% dari APBD Perubahan sebesar Rp883.866.664.758,00 atau kurang sebesar (Rp27.962.496.099,00) (3,16%). Realisasi Belanja Barang dan Jasa kurang dari anggaran yang telah ditetapkan antara lain adanya efisiensi anggaran belanja. Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa dapat dilihat pada **Lampiran 1 - Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa LRA.**

#### 5.1.2.1.3. Belanja Bunga

Pada TA 2023, tidak terdapat anggaran dan realisasi Belanja Bunga, seperti halnya pada TA 2022.

#### 5.1.2.1.4. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi realisasinya sebesar Rp450.000.000,00 dengan tingkat capaian 100,00% dari APBD Perubahan sebesar Rp450.000.000,00. Belanja Subsidi ini berupa alokasi subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA) TA 2023.

### 5.1.2.1.5. Belanja Hibah

Belanja Hibah realisasinya sebesar Rp65.146.756.399,00 dengan tingkat capaian 101,58% dari APBD Perubahan atau lebih sebesar Rp1.011.841.399,00 (1,58%). Belanja Hibah ini terdiri dari:

No.	Belanja Hibah	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)
<b>1</b>	<b>Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat</b>		<b>2.743.468.000,00</b>
a.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat		<b>1.600.000.000,00</b>
		Sekretariat Daerah	850.000.000,00
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	750.000.000,00
b.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat		<b>1.143.468.000,00</b>
		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	946.468.000,00
		Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	197.000.000,00
<b>2</b>	<b>Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia</b>		<b>46.279.208.000,00</b>
a.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan		<b>7.950.508.000,00</b>
		Dinas Kesehatan	660.000.000,00
		Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	2.900.000.000,00
		Sekretariat Daerah	2.970.508.000,00
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.130.000.000,00
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100.000.000,00
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	190.000.000,00
b.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		<b>30.023.700.000,00</b>
		Dinas Pendidikan	27.723.700.000,00
		Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	150.000.000,00
		Sekretariat Daerah	1.350.000.000,00
		Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	300.000.000,00
		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak	500.000.000,00
c.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		<b>8.175.000.000,00</b>
		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	400.000.000,00
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	200.000.000,00
		Sekretariat Daerah	7.575.000.000,00
d.	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		<b>130.000.000,00</b>
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	130.000.000,00
<b>3.</b>	<b>Belanja Hibah Dana BOS</b>		<b>14.269.588.399,00</b>
a.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	Dinas Pendidikan	14.269.588.399,00
<b>4.</b>	<b>Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik</b>		<b>1.854.492.000,00</b>
a.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.854.492.000,00
	<b>Jumlah</b>		<b>65.146.756.399,00</b>

Belanja Hibah yang terealisasi lebih besar dari APBD Perubahan sebesar Rp1.011.841.399,00 berasal dari realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar yaitu pada Dinas Pendidikan yang terealisasi lebih sebesar Rp528.305.000,00 serta Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta pada Dinas Pendidikan yang terealisasi lebih sebesar Rp588.538.399,00. Sementara Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik terealisasi kurang dari APBD Perubahan masing-masing sebesar Rp103.532.000,00 dan Rp1.470.000,00.

Adapun Belanja Hibah pada Dinas Pendidikan yang terealisasi lebih besar dari APBD Perubahan yang ditetapkan disebabkan oleh adanya perbedaan penganggaran DAK Non Fisik TA 2023 berdasarkan PMK dengan DPPA TA 2023 serta perbedaan pencatatan antara DPPA TA 2023 dengan Laporan Pendapatan/Realisasi Hibah yang bersumber dari dana BOP PAUD dan Kesetaraan tahun 2023.

#### 5.1.2.1.6. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp9.839.400.000,00 dengan tingkat capaian 90,62% dari APBD Perubahan sebesar Rp10.858.130.000,00 atau kurang sebesar (Rp1.018.730.000,00) (9,38%). Belanja Bantuan Sosial ini terdiri dari:

No.	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	7.070.100.000,00	Pembayaran Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan, Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu kegiatan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga, Pekerjaan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (PIK) RTLH PIK Kecamatan Cisit, Kecamatan Darmaraja, Kecamatan Tanjungmedar, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Ujungjaya, Kecamatan Paseh, Kecamatan Sumedang Utara, dan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (PIK) RTLH APBD LPM Desa Cibereum Kulon, Desa Sukawening, Desa Buahdua, Desa Cibereum Wetan, Desa Kertamekar, Desa Cikoneng.
2.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	400.870.000,00	Penyediaan permakanan, penyediaan alat bantu dan sandang.
3.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	699.000.000,00	Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat
4.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.669.430.000,00	Penyediaan permakanan
<b>Jumlah</b>		<b>9.839.400.000,00</b>	



### 5.1.2.2. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2023 sebesar Rp405.717.844.656,00 lebih rendah dari Realisasi Belanja Modal TA 2022 sebesar Rp480.578.259.481,00. Tingkat capaian realisasi Belanja Modal sebesar 92,97% dari APBD Perubahan sebesar Rp436.401.695.037,00 atau kurang sebesar (Rp30.683.850.381,00) (7,03%).

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Modal	436.401.695.037,00	405.717.844.656,00	(30.683.850.381,00)	480.578.259.481,00

Adapun rincian belanja modal adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Tanah	3.538.500.000,00	3.486.649.000,00	(51.851.000,00)	27.007.255.100,00
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	132.744.781.344,00	118.167.717.934,00	(14.577.063.410,00)	189.446.017.112,00
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	91.884.563.203,00	86.018.035.799,00	(5.866.527.404,00)	129.969.430.312,00
4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	179.901.990.997,00	175.796.888.261,00	(4.105.102.736,00)	116.084.739.946,00
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	25.256.439.493,00	19.324.226.162,00	(5.932.213.331,00)	17.526.966.056,00
6.	Belanja Aset Lainnya	3.075.420.000,00	2.924.327.500,00	(151.092.500,00)	543.850.955,00
<b>Jumlah</b>		<b>436.401.695.037,00</b>	<b>405.717.844.656,00</b>	<b>(30.683.850.381,00)</b>	<b>480.578.259.481,00</b>

Berdasarkan Buletin Teknis (04) Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, pembayaran termin terakhir atas penyerahan pekerjaan yang sudah jadi dari Pihak Ketiga, dapat dilakukan melalui dua (2) cara yaitu:

1. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan.
2. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak dan penyedia barang/jasa harus menyerahkan jaminan bank sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang diterbitkan oleh Bank Umum atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (*surety bond*) dan direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melakukan pembayaran sebesar 100% dari nilai kontrak terkait pembayaran termin terakhir atas penyerahan pekerjaan yang sudah jadi dari Pihak Ketiga, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tidak mencatat Utang Retensi atas Jaminan Pemeliharaan. Adapun SKPD yang memiliki Jaminan Pemeliharaan atas Pekerjaan

konstruksi yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Rincian lebih lanjut mengenai masing-masing Belanja Modal adalah sebagai berikut.

#### 5.1.2.2.1. Belanja Tanah

Realisasi Belanja Tanah TA 2023 sebesar Rp3.486.649.000,00 lebih rendah dari realisasi Belanja Tanah TA 2022 sebesar Rp27.007.255.100,00. Belanja Tanah TA 2023 yaitu berasal dari Belanja Modal Lapangan (Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan dan Tanah untuk Jalan) realisasinya sebesar Rp3.486.649.000,00 dengan tingkat capaian 98,53% dari APBD Perubahan sebesar Rp3.538.500.000,00 atau kurang sebesar (Rp51.851.000,00) (1,47%). Rincian anggaran dan realisasi Belanja Tanah sebagai berikut:

No.	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Modal Tanah Persil	0,00	0,00	0,00	10.816.110.000,00
2.	Belanja Modal Lapangan	3.538.500.000,00	3.486.649.000,00	(51.851.000,00)	16.191.145.100,00
<b>Jumlah</b>		<b>3.538.500.000,00</b>	<b>3.486.649.000,00</b>	<b>(51.851.000,00)</b>	<b>27.007.255.100,00</b>

#### 5.1.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2023 sebesar Rp118.167.717.934,00 lebih rendah dari realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2022 sebesar Rp189.446.017.112,00. Tingkat capaian realisasi Belanja Peralatan dan Mesin sebesar 89,02% dari APBD Perubahan sebesar Rp132.744.781.344,00 atau kurang sebesar (Rp14.577.063.410,00) (10,98%). Rincian Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada **Lampiran 2 - Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin LRA.**

#### 5.1.2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2023 sebesar Rp86.018.035.799,00 lebih rendah dari realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2022 sebesar Rp129.969.430.312,00. Tingkat capaian realisasi Belanja Gedung dan Bangunan sebesar 93,62% dari APBD Perubahan sebesar Rp91.884.563.203,00 atau kurang sebesar (Rp5.866.527.404,00) (6,38%). Rincian realisasi belanja gedung dan bangunan sebagai berikut.

No.	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	80.055.643.084,00	76.007.679.490,00	(4.047.963.594,00)	105.453.544.736,00
2.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	2.992.500.000,00
3.	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	11.828.920.119,00	10.010.356.309,00	(1.818.563.810,00)	21.324.089.976,00
4.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0,00	0,00	0,00	69.721.000,00

No.	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
5.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00	0,00	0,00	129.574.600,00
<b>Jumlah</b>		<b>91.884.563.203,00</b>	<b>86.018.035.799,00</b>	<b>(5.866.527.404,00)</b>	<b>129.969.430.312,00</b>

#### 5.1.2.2.4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 sebesar Rp175.796.888.261,00 lebih besar dari realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 sebesar Rp116.084.739.946,00. Tingkat capaian realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar 97,72% dari APBD Perubahan sebesar Rp179.901.990.997,00 atau kurang sebesar (Rp4.105.102.736,00) (2,28%). Rincian realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut.

No.	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Modal Jalan	115.498.126.197,00	113.342.862.403,00	(2.155.263.794,00)	53.237.511.168,00
2.	Belanja Modal Jembatan	29.918.039.982,00	29.917.889.982,00	(150.000,00)	4.493.075.120,00
3.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	25.001.292.518,00	24.752.106.000,00	(249.186.518,00)	49.918.652.700,00
4.	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	99.967.000,00
5.	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	0,00	0,00	0,00	747.944.000,00
6.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	105.000.000,00	104.950.000,00	(50.000,00)	69.750.000,00
7.	Belanja Modal Jaringan Air Minum	9.379.532.300,00	7.679.079.876,00	(1.700.452.424,00)	7.509.539.958,00
8.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>179.901.990.997,00</b>	<b>175.796.888.261,00</b>	<b>(4.105.102.736,00)</b>	<b>116.084.739.946,00</b>

#### 5.1.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2023 sebesar Rp19.324.226.162,00 lebih besar dari realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2022 sebesar Rp17.526.966.056,00. Tingkat capaian realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar 76,51% dari APBD Perubahan sebesar Rp25.256.439.493,00 atau kurang sebesar (Rp5.932.213.331,00) (23,49%). Rincian realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya sebagai berikut:

No.	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	808.300.000,00	793.150.000,00	(15.150.000,00)	1.537.795.033,00
2.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	0,00	0,00	0,00	1.636.111.000,00
3.	Belanja Modal Tanda Penghargaan	119.000.000,00	118.878.225,00	(121.775,00)	0,00

No.	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
4.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	414.825.000,00	412.343.123,00	(2.481.877,00)	698.720.030,00
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	23.892.714.493,00	17.999.854.814,00	(5.892.859.679,00)	13.652.989.993,00
6.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	21.600.000,00	0,00	(21.600.000,00)	1.350.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>25.256.439.493,00</b>	<b>19.324.226.162,00</b>	<b>(5.932.213.331,00)</b>	<b>17.526.966.056,00</b>

Belanja Modal Aset Tidak Berwujud masuk pada Akun Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Hal ini karena pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023 dan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 124 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 123 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023, Akun Belanja Modal Aset Tidak Berwujud dianggarkan dan direalisasikan pada Akun Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Kebijakan ini sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

#### 5.1.2.2.6. Belanja Aset Lainnya

Realisasi Belanja Aset Lainnya TA 2023 sebesar Rp2.924.327.500,00 lebih besar dari realisasi Belanja Aset Lainnya TA 2022 sebesar Rp543.850.955,00, tingkat capaiannya sebesar 95,09% dari APBD Perubahan sebesar Rp3.075.420.000,00 atau kurang sebesar (Rp151.092.500,00) (4,91%). Rincian Belanja Aset Lainnya adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Lisensi dan <i>Franchise</i> (Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik)	38.000.000,00
2.	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	2.886.327.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.924.327.500,00</b>

### 5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2023 sebesar Rp6.967.211.399,00 lebih tinggi dari Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2022 sebesar Rp2.786.124.220,00. Tingkat capaian realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar 19,25% dari APBD Perubahan sebesar Rp36.191.841.774,00 atau kurang sebesar (Rp29.224.630.375,00) (80,75%).

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Tidak Terduga	36.191.841.774,00	6.967.211.399,00	(29.224.630.375,00)	2.786.124.220,00

Realisasi Belanja Tidak Terduga ini digunakan untuk:

1. Pengembalian Sisa Bantuan Keuangan Provinsi TA 2021 dan 2022;
2. Pengembalian Sisa Bantuan Keuangan Provinsi TA 2022 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
3. Penanganan Kejadian Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2023;
4. Pengembalian kelebihan Pajak Air Tanah PT. Coca Cola Botling Indonesia; dan
5. Pembayaran kekurangan Pencairan atas Pelaksanaan Eksekusi Gugatan dari Suryadi Wijaya dkk perkara Nomor 775K/PDT/2017 Jo. Nomor : 330/PDT/2016/PT.BDF Jo. Nomor 33/PDT.G/2015/PN.Smd.

### 5.1.3. Transfer

Realisasi Transfer TA 2023 sebesar Rp439.705.184.266,00 lebih besar dari Realisasi Transfer TA 2022 sebesar Rp389.855.052.943,00. Tingkat capaian realisasi Transfer sebesar 99,96% dari APBD Perubahan sebesar Rp439.885.861.900,00 atau kurang sebesar (Rp180.677.634,00) (0,04%).

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
TRANSFER	439.885.861.900,00	439.705.184.266,00	(180.677.634,00)	389.855.052.943,00

Transfer ini berupa Transfer/Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan, dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1	<b>Belanja Bagi Hasil</b>	<b>30.551.048.900,00</b>	<b>30.551.038.950,00</b>	<b>(9.950,00)</b>	<b>29.486.323.500,00</b>
	- Belanja Bagi Hasil Pajak	28.867.662.500,00	28.867.652.500,00	(10.000,00)	27.321.453.500,00
	- Belanja Bagi Hasil Retribusi	1.683.386.400,00	1.683.386.450,00	50,00	2.164.870.000,00
2	<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>	<b>409.334.813.000,00</b>	<b>409.154.145.316,00</b>	<b>(180.667.684,00)</b>	<b>360.368.729.443,00</b>
	- Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00
	- Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	396.334.813.000,00	396.194.145.316,00	(140.667.684,00)	353.618.729.443,00
	- Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	13.000.000.000,00	12.960.000.000,00	(40.000.000,00)	6.500.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>439.885.861.900,00</b>	<b>439.705.184.266,00</b>	<b>(180.677.634,00)</b>	<b>389.855.052.943,00</b>

#### 5.1.3.1. Bagi Hasil Pajak

Belanja Bagi Hasil Pajak sebesar Rp28.867.652.500,00 dengan tingkat capaian hampir 100% atau 99,9965% dari APBD Perubahan sebesar Rp28.867.662.500,00 atau kurang sebesar (Rp10.000,00) (0,0035%). Belanja Bagi Hasil Pajak merupakan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Desa.

#### 5.1.3.2. Bagi Hasil Retribusi

Belanja Bagi Hasil Retribusi sebesar Rp1.683.386.450,00 dengan tingkat capaian 100,0003% dari APBD Perubahan sebesar Rp1.683.386.400,00 atau lebih sebesar Rp50,00 (0,0003%). Belanja Bagi Hasil Retribusi merupakan alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi kepada Pemerintah Desa.

### 5.1.3.3. Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp409.154.145.316,00 dengan tingkat capaian 99,96% dari APBD Perubahan sebesar Rp409.334.813.000,00 atau kurang sebesar (Rp180.667.684,00) (0,04%), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	396.194.145.316,00
2.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	12.960.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>409.154.145.316,00</b>

1. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp396.194.145.316,00, yaitu berupa Alokasi Dana Desa sebesar Rp118.843.503.216,00 dan Dana Desa sebesar Rp277.350.642.100,00; dan
2. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp12.960.000.000,00, yaitu berasal dari bantuan keuangan Kabupaten kepada pemerintah desa penerima bantuan khusus.

Total Belanja dan Transfer Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.919.935.326.859,00. Adapun realisasi Belanja dan Transfer berdasarkan Klasifikasi Urusan dan Fungsi adalah sebagai berikut.

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>01.</b>	<b>Pelayanan Umum</b>	<b>1.011.955.545.956,00</b>	<b>903.652.484.265,00</b>
01.1.05.	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	27.473.419.553,00	27.014.540.829,00
01.2.16.	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	19.117.766.526,00	18.171.769.123,00
01.2.20.	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	295.940.000,00	278.320.380,00
01.2.21.	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	742.598.000,00	714.081.262,00
01.2.24.	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	8.225.266.332,00	7.925.194.657,00
01.3.31.	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	920.000.000,00	905.900.090,00
01.3.32.	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	442.000.000,00	430.683.425,00
01.4.01.	Sekretariat Daerah	79.853.992.851,00	78.190.322.142,00
01.4.02.	Sekretariat Dprd	74.916.840.042,00	72.612.023.291,00
01.5.01.	Perencanaan	16.985.640.592,00	16.467.455.534,00
01.5.02.	Keuangan	644.827.671.453,00	546.890.686.928,00
01.5.03.	Kepegawaian	15.079.869.877,00	13.977.458.067,00
01.5.05.	Penelitian Dan Pengembangan	1.410.000.000,00	1.174.053.475,00
01.6.01.	Inspektorat Daerah	20.484.782.063,00	20.119.211.408,00
01.7.01.	Kecamatan	101.179.758.667,00	98.780.783.654,00
<b>03.</b>	<b>Ketertiban Dan Ketentruman</b>	<b>14.166.890.429,00</b>	<b>13.816.907.252,00</b>
03.8.01.	Kesatuan Bangsa Dan Politik	14.166.890.429,00	13.816.907.252,00
<b>04.</b>	<b>Ekonomi</b>	<b>182.191.461.002,00</b>	<b>177.551.585.632,00</b>
04.2.07.	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	11.811.337.363,00	11.353.453.135,00
04.2.09.	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	1.807.911.000,00	1.734.044.857,00
04.2.13.	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	18.070.498.032,00	17.770.904.738,00

<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
04.2.15.	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	34.532.014.137,00	33.945.595.517,00
04.2.17.	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	14.599.587.286,00	14.215.109.192,00
04.2.18.	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	9.767.892.497,00	9.135.271.882,00
04.3.25.	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	15.645.273.150,00	15.130.461.867,00
04.3.27.	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	75.003.489.837,00	73.328.987.464,00
04.3.28.	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	60.000.000,00	59.817.280,00
04.3.30.	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	893.457.700,00	877.939.700,00
<b>05.</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>	<b>31.213.331.429,00</b>	<b>30.428.661.181,00</b>
05.2.10.	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	4.741.000.000,00	4.666.017.650,00
05.2.11.	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	26.472.331.429,00	25.762.643.531,00
<b>06.</b>	<b>Perumahan Dan Fasilitas Umum</b>	<b>277.290.190.766,00</b>	<b>268.771.749.476,00</b>
06.1.03.	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	249.947.139.627,00	241.874.708.579,00
06.1.04.	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	27.343.051.139,00	26.897.040.897,00
<b>07.</b>	<b>Kesehatan</b>	<b>575.291.464.035,00</b>	<b>540.263.051.662,00</b>
07.1.02.	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	549.666.319.970,00	515.273.778.138,00
07.2.14.	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	25.625.144.065,00	24.989.273.524,00
<b>08.</b>	<b>Pariwisata Dan Budaya</b>	<b>12.606.793.832,00</b>	<b>11.887.466.880,00</b>
08.2.22.	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	1.100.000.000,00	1.075.691.650,00
08.3.26.	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	11.506.793.832,00	10.811.775.230,00
<b>10.</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>965.248.509.928,00</b>	<b>942.584.549.498,00</b>
10.1.01.	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	957.878.509.928,00	935.252.928.194,00
10.2.19.	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	6.045.000.000,00	6.031.622.780,00
10.2.23.	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	1.325.000.000,00	1.299.998.524,00
<b>11.</b>	<b>Perlindungan Sosial</b>	<b>33.108.517.008,00</b>	<b>30.978.871.013,00</b>
11.1.06.	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	18.084.175.133,00	16.665.121.443,00
11.2.08.	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2.652.669.000,00	2.522.619.940,00
11.2.12.	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	12.371.672.875,00	11.791.129.630,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.103.072.704.385,00</b>	<b>2.919.935.326.859,00</b>

Adapun realisasi Belanja dan Transfer berdasarkan klasifikasi Organisasi dapat dilihat pada **Lampiran 3 - Rincian Realisasi Belanja Dan Transfer Berdasarkan Klasifikasi Organisasi.**



#### 5.1.4. Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah, Belanja Daerah serta Transfer. Pembiayaan Netto per 31 Desember 2023 sebesar Rp130.615.426.739,74. Selama TA 2023 Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp2.845.322.438.547,44, Belanja sebesar Rp2.480.230.142.593,00 dan Transfer sebesar Rp439.705.184.266,00, sehingga terdapat Defisit Realisasi Anggaran sebesar (Rp74.612.888.311,56).

Rincian lebih lanjut terkait anggaran dan realisasi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan untuk TA 2023 adalah sebagai berikut.

##### 5.1.4.1. Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2023 sebesar Rp161.615.426.739,74 lebih rendah dari Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2022 sebesar Rp232.339.367.075,90. Tingkat capaian realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar 99,74% dari APBD Perubahan sebesar Rp162.044.824.779,00.

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
Penerimaan Pembiayaan	162.044.824.779,00	161.615.426.739,74	(429.398.039,26)	232.339.367.075,90

Penerimaan Pembiayaan ini berasal dari realisasi penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA Sebelumnya (TA 2022) sebesar Rp161.530.195.031,74 dan Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat sebesar Rp85.231.708,00 berupa pengembalian dana bergulir yang digunakan untuk membiayai program PAKEPUK melalui *Crash Program* (Optimalisasi penyelesaian piutang negara yang dilakukan secara terpadu dalam bentuk keringanan utang) yang merupakan program Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Hal ini berdasarkan surat dari KPKNL ke Dinas Koperasi Usaha Kecil Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian pada tanggal 5 April 2023 perihal Pemberitahuan *Crash Program* Penyelesaian Utang Kepada Penanggung Hutang/Penjamin hutang penyerahan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Dinas Koperasi Usaha Kecil Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.

##### 5.1.4.2. Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 sebesar Rp31.000.000.000,00 lebih besar dari Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2022 sebesar Rp27.329.670.795,00. Tingkat capaian realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar 98,41% dari APBD Perubahan sebesar Rp31.500.000.000,00.

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
Pengeluaran Pembiayaan	31.500.000.000,00	31.000.000.000,00	(500.000.000,00)	27.329.670.795,00

Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk:

1. Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp25.000.000.000,00 dengan tingkat capaian 100% dari APBD Perubahan sebesar Rp25.000.000.000,00, yaitu untuk pelaksanaan Pilkada tahun 2024, berdasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2024 yang dilakukan secara bertahap; dan
2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp6.000.000.000,00 dengan tingkat capaian 92,31% dari APBD Perubahan sebesar Rp6.500.000.000,00. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ini diberikan kepada:
  - a. PDAM Tirta Meda Kabupaten Sumedang sebesar Rp1.000.000.000,00; dan
  - b. Bank Perkreditan Rakyat (Bank Sumedang) sebesar Rp5.000.000.000,00.

#### 5.1.4.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2023, realisasinya sebesar Rp56.002.538.428,18 yaitu merupakan Defisit Realisasi Anggaran ditambah dengan Pos Pembiayaan Penerimaan dikurangi dengan Pos Pembiayaan Pengeluaran dengan rincian sebagai berikut.

<b>Defisit Realisasi Anggaran TA 2023</b>	<b>(74.612.888.311,56)</b>
<b><u>Ditambah:</u></b>	
Penggunaan SiLPA	Rp 161.530.195.031,74
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	Rp 85.231.708,00
<b><u>Dikurangi:</u></b>	
Pembentukan Dana Cadangan	Rp 25.000.000.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Rp 6.000.000.000,00
<b><i>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</i></b>	<b>Rp 56.002.538.428,18</b>

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2023 terdiri dari:

1. SILPA berupa kas di Bendahara Pengeluaran SKPD sebesar Rp8.240.617,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama SKPD	Tanggal Setor ke Kasda	Nilai (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	08/01/2024	2.897.780,00
2.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	02/01/2024	223.000,00
3.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	03/01/2024	364.430,00
4.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	02/01/2024 05/01/2024	4.755.407,00
<b>Jumlah Total</b>			<b>8.240.617,00</b>

2. SILPA pada BLUD RSUD sebesar Rp2.766.996.443,00;
3. SILPA pada 35 BLUD Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sumedang sebesar Rp9.452.065.083,00;
4. SILPA pada Dinas Pendidikan berupa kas BOS sebesar Rp379.772.898,00;
5. SILPA pada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sumedang berupa Giro sebesar Rp42.529.895.690,18. SILPA tersebut terbagi atas:
  - 1) SILPA Dana Spesifik sebesar Rp38.214.733.658,00 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Silpa DAK Fisik	7.182.972.379,00
2.	Silpa DAK Non Fisik	17.406.981.554,00
3.	DAU SG	6.554.498.879,00
4.	DBH SAWIT	1.000.414.000,00
5.	DBHCHT	3.173.822.697,00
6.	Bantuan Provinsi	2.885.603.280,00
7.	Dana Aset Desa yang dihapuskan atas dampak pembangunan Waduk Jatigede	5.454.000,00
8.	DID/DIF	4.986.869,00
	<b>Jumlah</b>	<b>38.214.733.658,00</b>

- 2) SILPA diluar Dana Spesifik sebesar Rp 4.315.162.032,18.
6. SILPA tahun lalu berupa Kas Lainnya sebesar Rp1.988.833,00 yang terdiri dari Bunga Bank BOS SD sebesar Rp438.270,00 dan Bunga Bank BOS SMP sebesar Rp1.550.563,00;
7. SILPA berupa Kas Lainnya dari Jasa Giro Rekening Tabungan Bendahara Pengeluaran Kecamatan Buahdua sebesar Rp8.394,00; dan
8. SILPA berupa Kas Lainnya yaitu Sisa Kas Bantuan Operasional Kesehatan di BLUD Puskesmas sebesar Rp863.570.470,00.

### 5.1.5. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir per 31 Desember 2023 sebesar Rp56.002.538.428,18 mengalami penurunan sebesar (Rp106.042.286.351,56) (65,44%) dari SAL Akhir per 31 Desember 2022 sebesar Rp162.044.824.779,74.

NO	URAIAN	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	162.044.824.779,74	232.339.367.075,90
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(161.530.195.031,74)	(232.339.367.075,90)
3	<b>Subtotal (1 + 2)</b>	<b>514.629.748,00</b>	<b>0,00</b>
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/ SiKPA)	56.002.538.428,18	162.044.824.779,74
5	<b>Subtotal (3 + 4)</b>	<b>56.517.168.176,18</b>	<b>162.044.824.779,74</b>
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(514.629.748,00)	0,00
7	Lain-lain	0,00	0,00
8	<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)</b>	<b>56.002.538.428,18</b>	<b>162.044.824.779,74</b>

Rincian SAL Akhir per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

1. SAL Awal TA 2023 sebesar Rp162.044.824.779,74 merupakan SAL Akhir TA 2022. Nilai SAL Awal TA 2023 sama dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2022.
2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar (Rp161.530.195.031,74) merupakan kas awal yang digunakan di tahun berjalan untuk pelaksanaan anggaran.
3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun Berjalan sebesar Rp56.002.538.428,18 merupakan nilai SiLPA/SiKPA yang berasal dari Defisit LRA sebesar (Rp74.612.888.311,56) ditambah dengan Pembiayaan Netto sebesar Rp130.615.426.739,74.
4. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar (Rp514.629.748,00). Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya ini merupakan koreksi selisih SILPA TA 2021, 2022 dan 2023. Rincian koreksi selisih SILPA sebagai berikut.
  - 1) Koreksi selisih SILPA TA 2021 sebesar Rp310.114.920,00 terdiri dari:
    - a. Koreksi Penambahan Kas Lainnya dari Jasa Giro Rekening Tabungan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan TA 2018 sebesar (Rp23.017,00);
    - b. Pengembalian Sisa Dana Bantuan Keuangan (PEN) yang langsung dipindahbukukan dari rekening Kas Daerah Kabupaten Sumedang ke Kas Daerah Provinsi Jawa Barat TA 2021 tidak melalui mekanisme BTT sebesar Rp155.830.968,00;
    - c. Koreksi Pengurangan Kas di Bendahara BOS dari lebih saji Kas BOS TA 2020 sebesar Rp153.024.880,00;
    - d. Koreksi Penambahan Kas di Bendahara BOS dari kurang saji saldo awal BOS TA 2021 sebesar (Rp151.617,00);

- e. Koreksi Pengurangan Kas BLUD Puskesmas berupa koreksi pendapatan TA 2020 sebesar Rp8.706,00; dan
  - f. Koreksi Pengurangan Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Arsip dan Perpustakaan berupa pembayaran utang belanja honor TA 2020 sebesar Rp1.425.000,00.
- 2) Koreksi selisih SILPA TA 2022 sebesar Rp188.571.966,00 terdiri dari:
- a. Koreksi Penambahan Kas di Bendahara BOS dari kurang saji saldo awal BOS TA 2022 sebesar (Rp261.101,00);
  - b. Koreksi Pengurangan Kas BLUD RSUD berupa pengembalian kelebihan pendapatan BPJS TA 2021 sebesar Rp191.653.067,00;
  - c. Koreksi Penambahan Kas BLUD RSUD yaitu berupa kas tunai di Bendahara Pengeluaran Pembantu sebesar (Rp480.000,00);
  - d. Penambahan Dana Cadangan dari jasa giro dana cadangan TA 2022 sebesar Rp937.500,00; dan
  - e. Koreksi Penambahan Kas Lainnya berupa Pajak PPh Pasal 21 pada Kecamatan Sumedang Selatan yang belum disetorkan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp3.277.500,00).
- 3) Koreksi selisih SILPA TA 2023 sebesar Rp15.942.862,00 terdiri dari:
- 1. Koreksi Pengurangan Kas Lainnya berupa pembayaran Pajak PPh Pasal 21 TA 2022 pada Kecamatan Sumedang Selatan sebesar Rp3.277.500,00;
  - 2. Koreksi Penambahan Kas di Bendahara BOS dari kurang saji saldo awal BOS TA 2023 sebesar (Rp33.638,00); dan
  - 3. Koreksi Pengembalian Pendapatan TA 2022 atas Pengembalian Belanja Desa yang langsung dipindahbukukan dari Kas Daerah Kabupaten Sumedang ke Kas Desa sebesar Rp12.699.000,00.
5. Lain-lain nilainya Rp0,00 (nihil).

### 5.1.6. Aset

Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.862.652.637.888,43 mengalami kenaikan sebesar Rp112.952.603.001,23 (3,01%) dari Aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.749.700.034.887,20 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Aset Lancar	184.640.788.747,37	266.311.138.675,32	(81.670.349.927,95)
2	Investasi Jangka Panjang	155.958.119.420,18	145.306.878.217,91	10.651.241.202,27
3	Aset Tetap	3.445.043.021.626,89	3.306.846.836.622,22	138.196.185.004,67
4	Dana Cadangan	40.449.173.049,00	15.000.937.500,00	25.448.235.549,00
5	Aset Lainnya	36.561.535.044,99	16.234.243.871,75	20.327.291.173,24
<b>Jumlah</b>		<b>3.862.652.637.888,43</b>	<b>3.749.700.034.887,20</b>	<b>112.952.603.001,23</b>

#### 5.1.6.1. Aset Lancar

Kondisi Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp184.640.788.747,37 mengalami penurunan sebesar (Rp81.670.349.927,95) (30,67%) dari Aset Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp266.311.138.675,32. Rincian Aset Lancar adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Kas dan Setara Kas	56.002.538.428,18	161.546.137.893,74	(105.543.599.465,56)
2	Piutang	136.671.197.167,00	112.269.284.850,88	24.401.912.316,12
3	Penyisihan Piutang	(49.225.746.431,53)	(41.862.755.145,35)	(7.362.991.286,18)
4	Beban Dibayar Di Muka	57.236.438,36	131.698.630,14	(74.462.191,78)
5	Persediaan	41.135.563.145,36	34.226.772.445,91	6.908.790.699,45
<b>Jumlah</b>		<b>184.640.788.747,37</b>	<b>266.311.138.675,32</b>	<b>(81.670.349.927,95)</b>

##### 5.1.6.1.1. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang per 31 Desember 2023 sebesar Rp56.002.538.428,18 mengalami penurunan sebesar (Rp105.543.599.465,56) (65,33%) dari Kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp161.546.137.893,74. Adapun rincian Kas per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	42.529.895.690,18	146.307.325.290,74	(103.777.429.600,56)
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	8.240.617,00	105.248.357,00	(97.007.740,00)
3	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	46.800,00	(46.800,00)
4	Kas di BLUD	12.219.061.526,00	14.798.385.042,00	(2.579.323.516,00)
5	Kas di Bendahara BOS	379.772.898,00	305.784.351,00	73.988.547,00
6	Kas Lainnya	865.567.697,00	29.348.053,00	836.219.644,00
<b>Jumlah</b>		<b>56.002.538.428,18</b>	<b>161.546.137.893,74</b>	<b>(105.543.599.465,56)</b>

#### 5.1.6.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp42.529.895.690,18 mengalami penurunan sebesar (Rp103.777.429.600,56) (70,93%) dari Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp146.307.325.290,74. Rincian Kas di Rekening Kas Daerah sebagai berikut.

No.	Nomor Rekening Giro	Nama Bank	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1.	0110230000015	Bank Jabar Cabang Sumedang	9.748.874.868,00	98.594.909.678,00	(88.846.034.810,00)
2.	0094-01-000405-30-6	Bank BRI Cabang Sumedang	10.785.512.560,86	8.123.158.420,86	2.662.354.140,00
3.	0094-01-004126-40-9	Bank BRI Cabang Sumedang	0,00	0,00	0,00
4.	016452329	Bank BNI Cabang Sumedang	3.142.822.349,00	6.991.881.238,00	(3.849.058.889,00)
5.	00381-01-30-000022-9	Bank BTN KCP Sumedang	0,00	3.629.700.319,34	(3.629.700.319,34)
6.	5180102000600	BJB Syariah Cabang Pembantu Sumedang	13.061.270.938,26	12.863.223.036,18	198.047.902,08
7.	1310013281698	Bank Mandiri Cabang Sumedang	0,00	5.684.911.965,39	(5.684.911.965,39)
8.	2971212128	Bank Syariah Indonesia KCP Sumedang	5.781.412.710,40	10.409.528.068,92	(4.628.115.358,52)
9.	2971313137	Bank Syariah Indonesia KCP Sumedang	10.002.263,66	10.012.564,05	(10.300,39)
<b>Jumlah</b>			<b>42.529.895.690,18</b>	<b>146.307.325.290,74</b>	<b>(103.777.429.600,56)</b>

Penjelasan rincian Kas Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 4 – Rincian Kas Daerah**.

#### 5.1.6.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.240.617,00 mengalami penurunan sebesar (Rp97.007.740,00) (92,17%) dari Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp105.248.357,00. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	2.897.780,00	0,00	2.897.780,00	a) Pengembalian Kelebihan Tunjangan Suami bulan Juli s.d. Agustus TA 2023 an. LALAS SRI SULASTRI, S.Sos sebesar Rp.785.780,00. Telah disetor ke Kas Daerah Tanggal 08/01/2024 ; STS Nomor : 01/STS/I/DISDIK/2024 b) Pengembalian Kelebihan Tunjangan Suami bulan Juli s.d. Oktober TA 2023 an. YUYUM MARYAMAH, S.Pd sebesar Rp2.112.000,00. Telah disetor ke Kas Daerah Tanggal 08/01/2024 STS Nomor : 02/STS/I/DISDIK/2024
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	223.000,00	0,00	223.000,00	Pengembalian Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan. Telah disetor ke Kas Daerah tanggal 02/01/2024

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	Keterangan
					STS Nomor : 003/STS-LS/DLHK/XII/2023
3	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	364.430,00	0,00	364.430,00	Kelebihan Tunjangan Suami dan Tunjangan Beras Bulan Desember 2023 an. Ela Nurlaela. Telah disetor ke Kas Daerah tanggal 03/01/2024 STS Nomor : 01/STS-Gaji/DPKP/I/2024
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	4.755.407,00	0,00	4.755.407,00	Pengembalian Kelebihan ADD Tahun 2023 untuk Desa Licin Kec. Cimalaka sebesar Rp590.087,00. dan Desa Mekarasih Kec. Jatigede sebesar Rp4.165.320,00. Telah disetor ke Kas Daerah Tanggal 02/01/2024 sebesar Rp590.087,00 STS Nomor : 900/1409/2010/I/2024 dan tanggal 05/01/2024 sebesar Rp4.165.320,00 melalui Aplikasi Dana No. Ref : 631912043152
5	Puskesmas Haurngombong	0,00	5.040.000,00	(5.040.000,00)	Pengembalian Kelebihan Belanja SPJ DAK Non Fisik (BOK) atas Sub Keg. Operasional Pelayanan Puskesmas TA 2022. Telah disetor ke Kas Daerah Tanggal 04/01/2023 STS No : 0001/STS/TUP.DAK/PKM.HAU RINGOMBONG/I/2023
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	0,00	4.202.000,00	(4.202.000,00)	Pengembalian Temuan BPK pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan di Legok Muncang Ds. Cimungkal Kec. Wado. Telah disetor ke Kas Daerah Tanggal 04/01/2023
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	24.818.215,00	(24.818.215,00)	Pengembalian Belanja Modal Jalan Lainnya pada Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian. Telah disetor ke Kas Daerah 1. Tanggal 04/01/2023 senilai Rp9.818.215,16 STS No. 003/05.2.01.02/STS/I/2023 2. Tanggal 10/01/2023 senilai Rp5.000.000 STS No. 004/05.2.01/02/STS/I/2023 3. Tanggal 12/01/2023 senilai Rp5.000.000 STS No. 005/05.2.01/02/STS/I/2023 4. Tanggal 12/01/2023 senilai Rp5.000.000 STS No. 006/05.2.01/02/STS/I/2023
8	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	25.000,00	(25.000,00)	Pengembalian Uang GU dari BPP Perkebunan ke Kas Daerah atas Sub Kegiatan Pengendalian



No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	Keterangan
					Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan TA 2022. Telah disetor ke Kas Daerah Tanggal 11/01/2023 STS No. 001/PembayaranKekurangan Daerah/DPKP/2023
9	Kecamatan Conggeang	0,00	6.499.218,00	(6.499.218,00)	Pengembalian saldo GU Bulan Desember TA 2022. Telah disetor ke Kas Daerah Tanggal 02/01/2023
10	Kecamatan Ujungjaya	0,00	64.658.482,00	(64.658.482,00)	Pengembalian dari Belanja TA 2022. Telah disetor ke Kas Daerah 1. Tanggal 30/01/2023 sebesar Rp6.000.000,00 STS No : 0001/Pengembalian/Kec.Ujungjaya/I/2023 2. Tanggal 01/02/2023 sebesar Rp58.658.482,00 STS No : 0002/Pengembalian/Kec.Ujungjaya/I/2023
11	Kecamatan Sumedang Selatan	0,00	5.442,00	(5.442,00)	Pengembalian Belanja Alat Tulis Kantor pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor TA 2022. Telah disetor ke Kas Daerah Tanggal 18 April 2023 sebesar Rp5.442,00 STS No. 006/STS/BL/KEC.SMDSELATAN/IV/2023
<b>Jumlah</b>		<b>8.240.617,00</b>	<b>105.248.357,00</b>	<b>(97.007.740,00)</b>	

#### 5.1.6.1.1.3. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar (Rp46.800,00) (100,00%) dari Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022.

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	46.800,00	(46.800,00)
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>46.800,00</b>	<b>(46.800,00)</b>

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 tersebut merupakan penambahan kas dari pendapatan retribusi terminal sebesar Rp46.800,00 pada Dinas Perhubungan. Pada tahun 2023 kas tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 3 April 2023 sehingga per 31 Desember 2023 Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan sebesar Rp0,00 (nihil).

### 5.1.6.1.1.3 Kas di Bendahara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.219.061.526,00 mengalami penurunan sebesar (Rp2.579.323.516,00) (17,43%) dari Kas di BLUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp14.798.385.042,00 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Kas di Bendahara BLUD RSUD	2.766.996.443,00	6.006.390.947,00	(3.239.394.504,00)
2	Kas di Bendahara BLUD Puskesmas dan Labkesda	9.452.065.083,00	8.791.994.095,00	660.070.988,00
<b>Jumlah</b>		<b>12.219.061.526,00</b>	<b>14.798.385.042,00</b>	<b>(2.579.323.516,00)</b>

Rincian Kas di BLUD adalah sebagai berikut.

1. Kas di Bendahara BLUD RSUD sebesar Rp2.766.996.443,00 berupa kas non tunai dengan rincian sebagai berikut.

No.	Nama Bank	Nomer Rekening	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Bank Jabar Banten	0007344813001	0,00	0,00	0,00
2	Bank Jabar Banten	0110030030830	846.729.648,00	934.520.668,00	(87.791.020,00)
3	BRI Cabang Sumedang	9401000539309	78.651.171,00	49.665.540,00	28.985.631,00
4	BNI Cabang Sumedang	0066834418	1.770.938.166,00	2.159.617.970,00	(388.679.804,00)
5	Bank Syariah Mandiri	2970505051	7.537.349,00	2.827.334.467,00	(2.819.797.118,00)
6	Bank Mandiri	131-00- 2128888-3	63.140.109,00	34.772.302,00	28.367.807,00
<b>Total</b>			<b>2.766.996.443,00</b>	<b>6.005.910.947,00</b>	<b>(3.238.914.504,00)</b>

2. Kas di Bendahara BLUD Puskesmas serta Labkesda pada Dinkes sebesar Rp9.452.065.083,00. Nilai Kas di Bendahara BLUD Puskesmas dan Labkesda sesuai dengan nilai Kas di Rekening Koran Bank masing-masing Puskesmas dan Labkesda per 31 Desember 2023. Rincian Kas di Bendahara BLUD Puskesmas dan Labkesda dapat dilihat pada **Lampiran 5 – Rincian Kas di Bendahara BLUD Puskesmas dan Labkesda.**

### 5.1.6.1.1.4 Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp379.772.898,00. Rincian Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

No.	Keterangan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Saldo Awal	305.784.351,00	543.112.841,00
2	Penambahan :		
	a) <b>Penerimaan Dana BOS Reguler dan Kinerja yang dianggarkan di BKAD</b>		
	a) <b>Tahun 2023 :</b> dicatat sebagai Dana Alokasi Khusus Non Fisik - BOS Reguler sebesar Rp127.088.635.893,00 dan Kinerja sebesar Rp4.415.000,00;	131.503.635.893,00	126.485.711.005,00
	b) <b>Tahun 2022 :</b> dicatat sebagai Dana Alokasi Khusus Non Fisik - BOS Reguler Rp126.485.711.005,00.		

No.	Keterangan		31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	b	<b>Koreksi tambah Saldo Awal</b> (Berdasarkan nilai di Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (ARKAS) Dinas Pendidikan)	33.638,00	261.101,00
	c	<b>Koreksi administrasi bank yang dikembalikan ke rekening sekolah oleh pihak bank</b> a) <b>Tahun 2023 :</b> Koreksi Kas BOS SDN sebesar Rp2.464.637,00 dan Kas BOS SMPN sebesar Rp247.760,00 yang mengurangi Belanja Barang dan Jasa BOS ( <i>contra post</i> Belanja) b) <b>Tahun 2022 :</b> Penyetoran Kas BOS atas temuan BPK Tahun 2021 yang disetor tahun 2022 dan Koreksi administrasi bank yang dikembalikan ke rekening sekolah oleh pihak bank (Kas BOS SDN sebesar Rp895.784,00 dan Kas BOS SMPN sebesar Rp22.109.128,00) yang dicatat sebagai Lain-lain PAD Yang Sah - Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain di BKAD	2.712.397,00	23.004.912,00
	<b>Jumlah Penambahan</b>		<b>131.506.381.928,00</b>	<b>126.508.977.018,00</b>
<b>3</b>	<b>Pengurangan :</b>			
	a	<b>Pengeluaran Belanja Dana BOS</b> <b>Tahun 2023 :</b> a) Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp104.331.812.377,00; b) Belanja Modal BOS sebesar Rp27.091.085.419,00. <b>Tahun 2022 :</b> a) Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp101.670.151.140,00; b) Belanja Modal BOS sebesar Rp25.046.675.857,00.	(131.422.897.796,00)	(126.716.826.997,00)
	b	Pengeluaran Pajak Bunga dan Administrasi Bank dari Rekening BOS Tahun 2023 dan Tahun 2022 dicatat sebagai penambah Belanja Barang dan Jasa BOS	(9.495.585,00)	(29.478.511,00)
	<b>Jumlah Pengurangan</b>		<b>(131.432.393.381,00)</b>	<b>(126.746.305.508,00)</b>
<b>4</b>	<b>Saldo Akhir Kas BOS</b>		<b>379.772.898,00</b>	<b>305.784.351,00</b>

Adapun Rincian Kas di Bendahara BOS per Sekolah dapat dilihat pada **Lampiran 6 – Rincian Kas di Bendahara BOS dan Kas Lainnya Dinas Pendidikan.**

#### 5.1.6.1.1.5 Kas Lainnya

Kas Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp865.567.697,00 mengalami kenaikan sebesar Rp836.219.644,00 (2.849,32%) dari Kas Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp29.348.053,00. Rincian Kas Lainnya per 31 Desember 2023 dan selisih kenaikan Kas Lainnya dapat dijelaskan pada tabel berikut.

No.	SKPD	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	a. Bunga bank yang dicatat pada Kas di Bendahara BOS Sekolah Dasar per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.123.322,00 yang dikembalikan ke Kasda sebesar Rp11.685.052,00 pada Tahun 2023, sehingga sisa Rp438.270; dan b. Bunga Kas di Bendahara BOS Sekolah Menengah Pertama per 31 Desember 2022 sebesar Rp13.927.432,00 yang dikembalikan ke Kasda sebesar Rp12.376.869,00 pada Tahun 2023, sehingga sisa Rp1.550.563,00.	1.988.833,00	26.050.754,00	(24.061.921,00)

No.	SKPD	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
2.	Kecamatan Buahdua	Saldo kas berupa jasa/bunga rekening giro pada Kecamatan Buahdua yang per 31 Desember 2023 belum disetorkan ke Kasda, baru disetor ke Kasda pada tanggal 03/01/2024 sebesar Rp8.394,00.	8.394,00	0,00	8.394,00
3.	Kecamatan Sumedang Selatan	PPH 21 Kecamatan Sumedang Selatan yang telah disetorkan ke Kasda pada tanggal 19 Januari 2023 a. PPh 21 atas belanja honorarium tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp27.500,00; dan b. PPh 21 atas narasumber Pemilu sebesar Rp3.250.000,00.	0,00	3.277.500,00	(3.277.500,00)
4.	Kecamatan Sumedang Utara	Saldo kas berupa jasa/bunga rekening giro pada Kecamatan Sumedang Utara a. BPP Kelurahan Kotakaler Rp9.952,00 (telah disetor ke Kasda pada tanggal 02/01/2023 sebesar Rp9.952,00); dan b. BPP Kelurahan Talun Rp9.847,00 (telah disetor ke Kasda pada tanggal 10/02/2023 sebesar Rp9.847,00).	0,00	19.799,00	(19.799,00)
5.	BLUD 35 Puskesmas	Sisa Kas Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang merupakan subsidi pemerintah pusat dalam bidang Kesehatan	863.570.470,00	0,00	863.570.470,00
		<b>Total</b>	<b>865.567.697,00</b>	<b>29.348.053,00</b>	<b>836.219.644,00</b>

Adapun rincian Kas Lainnya pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.988.833,00 dapat dilihat pada **Lampiran 6 – Rincian Kas di Bendahara BOS dan Kas Lainnya Dinas Pendidikan** dan rincian Kas Lainnya pada BLUD 35 Puskesmas sebesar Rp863.570.470,00 dapat dilihat pada **Lampiran 7 – Rincian Kas Lainnya BLUD Puskesmas.**

#### 5.1.6.1.2. Piutang

Piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp136.671.197.167,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp24.401.912.316,12 (21,74%) dari piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp112.269.284.850,88. Piutang per 31 Desember 2023 terdiri dari:

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1.	Piutang Pajak	112.102.271.141,00	88.429.348.407,00	23.672.922.734,00
2.	Piutang Retribusi	266.318.564,00	535.689.304,00	(269.370.740,00)
3.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.102.651.020,00	2.065.422.985,88	37.228.034,12
4.	Piutang Pendapatan BLUD	15.974.010.746,00	9.084.798.362,00	6.889.212.384,00
5.	Piutang Transfer Antar Daerah	6.174.445.696,00	12.145.642.492,00	(5.971.196.796,00)
6.	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	51.500.000,00	8.383.300,00	43.116.700,00
	<b>Total</b>	<b>136.671.197.167,00</b>	<b>112.269.284.850,88</b>	<b>24.401.912.316,12</b>

#### 5.1.6.1.2.1. Piutang Pajak

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp112.102.271.141,00 mengalami kenaikan sebesar Rp23.672.922.734,00 (26,77%) dari piutang 31 Desember 2022 sebesar Rp88.429.348.407,00. Rincian Piutang Pajak per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1.	Piutang Pajak Hotel	7.838.665,00	8.175.864,00	(337.199,00)
2.	Piutang Pajak Restoran	376.834.032,00	80.034.226,00	296.799.806,00
3.	Piutang Pajak Hiburan	808.000,00	2.766.000,00	(1.958.000,00)
4.	Piutang Pajak Reklame	548.284.488,00	607.087.590,00	(58.803.102,00)
5.	Piutang Pajak Penerangan Jalan	4.288.610,00	1.473.768,00	2.814.842,00
6.	Piutang Pajak Parkir	164.510.200,00	22.263.375,00	142.246.825,00
7.	Piutang Pajak Air Tanah	1.278.673.989,00	621.882.843,00	656.791.146,00
8.	Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	21.864.375,00	3.766.875,00	18.097.500,00
9.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	109.699.168.782,00	86.903.691.866,00	22.795.476.916,00
10.	Piutang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	178.206.000,00	(178.206.000,00)
	<b>Total</b>	<b>112.102.271.141,00</b>	<b>88.429.348.407,00</b>	<b>23.672.922.734,00</b>

#### 5.1.6.1.2.1 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp266.318.564,00 mengalami penurunan sebesar (Rp269.370.740,00) (50,28%) dari piutang retribusi per 31 Desember 2022 sebesar Rp535.689.304,00. Rincian Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 dan selisih kenaikannya dapat dijelaskan pada tabel berikut.

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1.	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Diskipas)	20.542.410,00	26.495.910,00	(5.953.500,00)
2.	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (BKAD)	182.201.351,00	182.201.351,00	0,00
3.	Piutang Retribusi Parkir Berlangganan (Dishub)	0,00	350.000,00	(350.000,00)
4.	Piutang Retribusi PBG (DPUTR)	63.574.803,00	326.642.043,00	(263.067.240,00)
	<b>Total</b>	<b>266.318.564,00</b>	<b>535.689.304,00</b>	<b>(269.370.740,00)</b>

Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Diskipas mengalami penurunan karena pada tanggal 9 Januari 2023 telah diterima retribusi tersebut dari PT. Centratama Menara Indonesia (Ex. Technindo) sebesar Rp5.953.500,00.

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan sebesar Rp 182.201.351,00 yang awalnya dicatat di Sekretariat Daerah kemudian

pada TA 2022 dimutasikan ke BKAD yang sampai sekarang tercatat di BKAD dengan nilai piutangnya tetap.

Piutang Retribusi Parkir Berlangganan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar (Rp350.000,00) (100%). Piutang tersebut merupakan penerimaan retribusi yang diterima dari Loker Mall Pelayanan Publik pada tanggal 7 Februari 2022 sebesar Rp200.000,00 dan retribusi yang masuk ke rekening Yayasan Sebelas April (UNSAF) pada tanggal 1 Maret 2022 sebesar Rp150.000,00. Retribusi tersebut telah disetorkan ke rekening Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan pada tanggal 30 Maret 2023 kemudian disetorkan ke Kasda pada tanggal 31 Maret 2023 berdasarkan STS Nomor 00198/TBP/Dishub/III/2023 sebesar Rp350.000,00. Dengan telah disetorkannya piutang tersebut ke Kasda, maka tidak dilakukan perhitungan penyisihan piutang.

Piutang Retribusi PBG pada DPUTR mengalami penurunan sebesar (Rp263.067.240,00) (80,54%). Piutang tersebut merupakan penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan yang TA sebelumnya dianggarkan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tetapi untuk TA 2023 dianggarkan di DPUTR.

#### 5.1.6.1.2.2 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.102.651.020,00 mengalami kenaikan sebesar Rp37.228.034,12 (1,80%) dari piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.065.422.985,88. Piutang Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari:

No.	Jenis Piutang	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1.	Piutang Hasil Penjualan Alat Angkutan	87.479.800,00	87.479.800,00	0,00
2.	Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD)	1.962.908.800,00	1.950.000.000,00	12.908.800,00
3.	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	7.915.320,00	7.915.320,00	0,00
4.	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	44.347.100,00	17.300.000,00	27.047.100,00
5.	Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	0,00	2.727.865,88	(2.727.865,88)
<b>Jumlah</b>		<b>2.102.651.020,00</b>	<b>2.065.422.985,88</b>	<b>37.228.034,12</b>

#### 1. Piutang Hasil Penjualan Alat Angkutan sebesar Rp87.479.800,00;

Piutang Hasil Penjualan Alat Angkutan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Piutang atas Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat yang awalnya dicatat pada Sekretariat Daerah yaitu Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat yang dilakukan secara lelang serta dibeli oleh mantan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang periode 2008-2013. Kendaraan tersebut telah terjual pada Tahun 2014, namun tagihan penjualan aset tetap belum dibayar. Rinciannya sebagai berikut.

No.	Jenis Kendaraan	Tahun Pembelian	Harga Pembelian (Rp)	Taksiran Nilai Pasar (Rp)	Harga Jual (Rp)
1.	Toyota Camry	2003	438.000.000,00	110.757.000,00	20% x 110.757.000,00 =22.151.400,00
2.	Nissan X-Trail ST	2008	257.000.000,00	163.321.000,00	40% x 163.321.000,00 =65.328.400,00
<b>Total</b>			<b>695.000.000,00</b>	<b>274.078.000,00</b>	<b>87.479.800,00</b>

Perhitungan harga jual berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Lampiran XII-Pemindahtanganan-Penjualan Kendaraan Dinas dan Rumah Golongan III yang menyebutkan bahwa harga jual kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 5 sampai dengan 7 tahun, harga jualnya adalah 40% dari harga umum/pasaran yang berlaku dan kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 8 tahun atau lebih, harga jualnya 20% dari harga umum/pasaran yang berlaku.

## **2. Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD sebesar Rp1.962.908.800,00;**

Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD mengalami penambahan sebesar Rp12.908.800,00 dari Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.950.000.000,00. Piutang tersebut terdiri dari:

- 1) Piutang Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Sewa WC Umum Pasar Rakyat Tanjungsari sebesar Rp9.919.700 dengan nomor perjanjian kerjasama B/04/KU.03.07/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 dan Pasar Rakyat Wado sebesar Rp2.989.100,00 dengan nomor perjanjian kerjasama B/03/KU.03.07/II/2023 tanggal 20 Februari 2023. Piutang tersebut dicatat di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- 2) Piutang kerjasama pembangunan dan pengelolaan Pasar Pusat Perbelanjaan Kota Sumedang (PPKS) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dengan PT Bangun Jaya Allia (BJA) sejak tahun 2015 yang dicatat pada BKAD. Pada TA 2022, PT BJA telah melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp100.000.000,00 sehingga sisa piutang PT BJA yang dicatat dalam Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD adalah sebesar Rp1.950.000.000,00. Adapun penyerahan kios sebanyak 17 unit senilai Rp1.950.000.000,00 oleh PT BJA kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kios Pasar PPKS Nomor DG.01/8928/2022 semula akan dicatat sebagai pengurang nilai piutang dan menambah persediaan. Namun berdasarkan rekomendasi BPK pada LHP BPK RI atas LKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 21B/LHP/XVIII.BDG/05/2022 tanggal 18 Mei 2022 yang merekomendasikan Bupati Sumedang untuk memerintahkan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian untuk melaksanakan pengawasan dan memastikan PT BJA melaksanakan kewajibannya untuk mengasuransikan PPKS dan membayar piutang atas

kerjasama ke kas daerah minimal sebesar Rp2.050.000.000,00 serta melaporkannya kepada Kepala Bidang Aset BKAD, maka penyerahan kios tersebut tidak dapat dicatat sebagai pengurang piutang dan menambah persediaan dikarenakan pengurangan nilai piutang PT BJA hanya dapat dilakukan apabila terdapat pembayaran/pelunasan dalam bentuk uang yang disetor ke Kas Daerah.

### **3. Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp7.915.320,00**

Piutang tersebut dicatat di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik serta tidak mengalami kenaikan/penurunan dari piutang per 31 Desember 2022. Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan denda atau sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% dari nilai retribusinya berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 76 Tahun 2017. Denda atau sanksi tersebut muncul karena ada delapan Wajib Retribusi yang belum menyelesaikan pembayaran sampai dengan jatuh tempo pembayaran berakhir berdasarkan surat ketetapan retribusi daerahnya. Meskipun tidak terjadi kenaikan/penurunan tetapi sebetulnya ada transaksi yaitu diterima penyetoran pendapatan denda retribusi pengawasan dan pengendalian Menara telekomunikasi dari PT. Centratama Menara Indonesia (Ex. Technindo) pada tanggal 9 Januari 2023 sebesar Rp357.210,00. Tetapi per 31 Desember 2022 belum diakui sebagai piutang sehingga pada awal tahun 2023 dilakukan koreksi pencatatan penambahan piutang sebesar Rp357.210,00 yang kemudian dilakukan pengurangan piutang sebesar Rp357.210,00 berdasarkan bukti setoran tanggal 9 Januari 2023 sehingga nilai piutang per 31 Desember 2023 sama dengan nilai piutang per 31 Desember 2022.

### **4. Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp44.347.100,00**

Piutang Pengembalian Kelebihan Gaji dan Tunjangan (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri/TASPEN) sebesar Rp44.347.100,00 mengalami kenaikan sebesar Rp27.047.100,00 dari Piutang Pengembalian Kelebihan Gaji dan Tunjangan (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri/TASPEN) per 31 Desember 2022 sebesar Rp17.300.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1.	PUPUT TRI LEGOWO	1.900.000,00	10.300.000,00	(8.400.000,00)
2.	SUANGSIH	1.500.000,00	7.000.000,00	(5.500.000,00)
3.	OMOH NUROHMAH	7.447.100,00	0,00	7.447.100,00
4.	SITI MARIYAM	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00
5.	DEDI SURYADI	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>44.347.100,00</b>	<b>17.300.000,00</b>	<b>27.047.100,00</b>



## 5. Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp0,00.

Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp15.136.694.134,12 (-100%) dari 31 Desember 2022 sebesar Rp2.727.865,88. Pada TA 2023 piutang remunerasi Dana Bagi Hasil TDF ini sudah masuk ke Kas Daerah dan dicatat pada realisasi Pendapatan Lain-lain PAD. Piutang ini merupakan giro atas Remunerasi Dana Bagi Hasil Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang tersimpan pada rekening *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Bank Indonesia. Pencatatan piutang ini pada akun Piutang Lain-lain PAD yang Sah berdasarkan Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.14.1/7481/Keuda tanggal 15 Maret 2023. Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) tidak dihitung penyisihan piutangnya dikarenakan tidak terdapat peraturan yang mengatur terkait penyisihan piutang tersebut.

### 5.1.6.1.2.3 Piutang Pendapatan BLUD

Piutang Pendapatan BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp15.974.010.746,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.889.212.384,00 (75,83%) dari nilai piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.084.798.362,00. Rincian piutang terdiri dari:

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
1.	Piutang Pendapatan BLUD RSUD	15.724.018.746,00	8.836.446.362,00	6.887.572.384,00
2.	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas dan Labkesda Unit Dinkes	249.992.000,00	248.352.000,00	1.640.000,00
	<b>Total</b>	<b>15.974.010.746,00</b>	<b>9.084.798.362,00</b>	<b>6.889.212.384,00</b>

#### 1. Piutang Pendapatan BLUD RSUD

Piutang Pendapatan BLUD RSUD sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp15.724.018.746,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.887.572.384,00 (77,95%) dari nilai piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.836.446.362,00. Piutang BLUD RSUD per 31 Desember 2023 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
1	Piutang Pasien Menunggak (2007-2022)	5.020.503.674,00
2	Piutang Pasien Menunggak (2023)	1.006.814.643,00
3	Piutang Pasien Dalam Perawatan 2023	2.789.972.682,00
4	Piutang Jasa Raharja	20.944.430,00
5	Piutang BPJS Kesehatan	6.696.143.505,00
6	BPJS Ketenagakerjaan	24.921.503,00
7	Piutang Pertamina	6.574.941,00
8	Piutang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	185.884,00
9	Piutang Asuransi Jiwa Kresna	76.346.876,00

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
10	Piutang Bumida	2.380.620,00
11	Piutang Pihak Ketiga Lainnya	79.229.988,00
	<b>Jumlah</b>	<b>15.724.018.746,00</b>

Berikut adalah rincian permohonan penghapusan pasien menunggak:

No.	Permohonan Penghapusan Pasien Menunggak	SK Bupati Bersyarat Sudah Keluar Neraca sampai dengan TA 2023	SK Bupati Mutlak Sudah Keluar Dari Neraca
1.	Permohonan Penghapusan secara bersyarat piutang daerah perorangan tanggal 08-01-2016	20.702.980,00	20.702.980,00
2.	Permohonan Penghapusan secara bersyarat piutang daerah perorangan tanggal 20-05-2016	8.926.605,00	8.926.605,00
3.	Permohonan Penghapusan secara bersyarat piutang daerah perorangan tanggal 20-05-2016	27.442.481,00	27.442.481,00
4.	Permohonan Penghapusan secara bersyarat piutang daerah perorangan tanggal 29 September 2016	41.531.921,00	41.531.921,00
5.	Permohonan Penghapusan secara bersyarat piutang daerah perorangan tanggal 09 November 2016	99.933.872,00	99.933.872,00
6.	Permohonan Penghapusan secara bersyarat piutang daerah perorangan tanggal 05 September 2017	42.341.345,00	42.341.345,00
7.	Permohonan Penghapusan secara bersyarat piutang daerah perorangan tanggal 03 September 2019	84.326.474,00	0,00
8.	Permohonan Penghapusan secara bersyarat piutang daerah perorangan tanggal 08 Oktober 2019	88.947.130,00	0,00
9.	Permohonan Penghapusan secara bersyarat piutang daerah perorangan tanggal 07 November 2019	104.065.594,00	0,00
10.	Permohonan Penghapusan secara bersyarat piutang daerah perorangan tanggal 11 Februari 2020	116.705.409,00	0,00
11.	Permohonan Penghapusan secara bersyarat piutang daerah perorangan tanggal 29 September 2020	330.511.111,00	0,00
12.	Permohonan Penghapusan secara bersyarat piutang daerah perorangan tanggal 18 Desember 2020	351.432.611,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.316.867.533,00</b>	<b>240.879.204,00</b>

Piutang Pasien Menunggak yang telah keluar dari Neraca berdasarkan SK Bupati Bersyarat masih memiliki hak tagih, sedangkan Piutang Pasien Menunggak yang telah keluar dari Neraca berdasarkan SK Bupati Mutlak sudah tidak memiliki hak tagih dan mutlak keluar dari Neraca.

## 2. Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas dan Labkesda Unit Dinkes

Puskesmas yang merupakan BLUD Unit Dinkes mempunyai piutang sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp249.992.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.640.000,00 (0,66%) dari nilai piutang 31 Desember 2022 sebesar Rp248.352.000,00. Piutang tersebut berupa piutang BPJS Kesehatan. Berikut Puskesmas yang masih memiliki piutang BPJS Kesehatan per 31 Desember 2023.

No	Nama Puskesmas	Piutang BLUD Puskesmas per 31 Desember 2023 (Rp)	Piutang BLUD Puskesmas per 31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	JATINANGOR	4.725.000,00	0,00	4.725.000,00
2	CIMANGGUNG	6.500.000,00	4.800.000,00	1.700.000,00
3	TANJUNGSARI	3.250.000,00	69.170.000,00	(65.920.000,00)
4	MARGAJAYA	0,00	10.705.000,00	(10.705.000,00)
5	HAURNGOMBONG	5.278.000,00	2.660.000,00	2.618.000,00
6	RANCAKALONG	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00
7	SUMEDANG SELATAN	11.822.000,00	6.900.000,00	4.922.000,00
8	SUKAGALIH	5.220.000,00	0,00	5.220.000,00
9	SITU	38.635.000,00	17.865.000,00	20.770.000,00
10	SITURAJA	4.720.000,00	0,00	4.720.000,00
11	CISITU	2.860.000,00	2.860.000,00	0,00
12	DARMARAJA	4.720.000,00	0,00	4.720.000,00
13	JATINUNGGAL	2.000.000,00	62.875.000,00	(60.875.000,00)
14	JATIGEDE	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15	TOMO	10.805.000,00	0,00	10.805.000,00
16	UJUNGJAYA	5.720.000,00	2.036.000,00	3.684.000,00
17	PASEH	5.520.000,00	0,00	5.520.000,00
18	CIMALAKA	118.285.000,00	58.275.000,00	60.010.000,00
19	CISARUA	0,00	1.736.000,00	(1.736.000,00)
20	HARIANG	2.660.000,00	0,00	2.660.000,00
21	CISEMPUR	7.542.000,00	4.630.000,00	2.912.000,00
22	SAWAHDADAP	0,00	3.840.000,00	(3.840.000,00)
23	PADASUKA	5.960.000,00	0,00	5.960.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>249.992.000,00</b>	<b>248.352.000,00</b>	<b>1.640.000,00</b>

#### 5.1.6.1.2.4 Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.174.445.696,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.971.196.796,00 (49,16%) dari Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.145.642.492,00. Piutang transfer antar daerah per 31 Desember 2023 berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat No.973/Kep.116-Bapenda/2024 atas kurang salur pendapatan tahun 2023 terdiri dari:

1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp1.248.694.140,00;
2. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp741.475.950,00;
3. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp4.167.276.502,00; dan
4. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan besar Rp16.999.104,00.

#### 5.1.6.1.2.5 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) per 31 Desember 2023 sebesar Rp51.500.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp43.116.700,00 (514,32%) dari Piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.383.300,00. Kenaikan Bagian lancar TGR ini karena ada penambahan TGR tahun 2023 atas kehilangan 3 (tiga) kendaraan motor dinas dengan total kerugian sebesar Rp63.700.000,00. Selama TA 2023 telah masuk pembayaran ke Kasda atas

kerugian TGR yang terjadi di tahun 2023 sebesar Rp3.300.000,00, sisanya sebesar Rp51.500.000,00 dicatat sebagai penambah Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2023 dan penambah Aset Lainnya TGR sebesar Rp8.900.000,00.

Bagian Lancar TGR tahun 2023 selain dipengaruhi oleh penambahan tahun berjalan juga dipengaruhi oleh pengurangan saldo tahun 2022 karena ada pembayaran sebesar Rp7.000.000,00 serta reklas ke Aset Lainnya TGR sebesar Rp1.383.300,00 yaitu piutang TGR yang belum tertagih dalam jangka waktu lebih dari masa perjanjian pelunasan piutang.

Rincian lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Uraian	Jumlah Kerugian	Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian	Piutang Bagian Lancar TGR Per 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan di Tahun 2023	Pembayaran di Tahun 2023	Reklas ke Aset Lainnya TGR	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Per 31 Desember 2023 (Rp)
	<b>Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah:</b>							
1	Motor Dinas Kawasaki Type LX 150 F Tahun 2018 Nomor Polisi Z 6736 A Kasubag TU UPTD Balai Benih Hortikultura dan Pembibitan Perkebunan Rancakalong pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang a.n HETTY YULIAH, SP., MP	25.150.000,00	LHP 700/20/Riksus. TPTGR./Inspt/2 021 tanggal 20 September 2021	8.383.300,00	0,00	7.000.000,00	1.383.300,00	0,00
2	Motor Dinas Yamaha NMAX 155 Nomor Polisi Z 2428 CZZ a.n WAWAN GUNAWAN Kepala Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong	25.000.000,00	LHPK R/07/PS.03.02/ Riksus/IV/2023 tanggal 28 April 2023	0,00	25.000.000,00	2.200.000,00	3.000.000,00	19.800.000,00
3	Motor Dinas Yamaha NMAX 155 Nomor Polisi Z 2472 CZZ a.n N. SITI NURAENI SOFA, S.Pd., M.Pd Kepala Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara	25.000.000,00	LHPK R/05/PS.03.02/ Riksus/IV/2023 tanggal 28 April 2023	0,00	25.000.000,00	1.100.000,00	3.000.000,00	20.900.000,00
4	Motor Dinas Merk Kawasaki KLX Tahun 2014 Nomor Polisi Z 3958 A IWAN GUNAWAN Penyuluh	13.700.000,00	LHPK R/10/PS.03.02/ Riksus/VII/202 3 tanggal 14 Juli 2023	0,00	13.700.000,00	0,00	2.900.000,00	10.800.000,00

No.	Uraian	Jumlah Kerugian	Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian	Piutang Bagian Lancar TGR Per 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan di Tahun 2023	Pembayaran di Tahun 2023	Reklas ke Aset Lainnya TGR	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Per 31 Desember 2023 (Rp)
	Pertanian di UPTD PKP Wilayah Jatigede Kabupaten Sumedang							
<b>Jumlah</b>				<b>8.383.300,00</b>	<b>63.700.000,00</b>	<b>10.300.000,00</b>	<b>10.283.300,00</b>	<b>51.500.000,00</b>

### 5.1.6.1.3 Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 sebesar (Rp49.225.746.431,53) mengalami kenaikan sebesar (Rp7.362.991.286,18) (17,59%) dari Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 sebesar (Rp41.862.755.145,35). Rincian penyisihan piutang sebagai berikut.

No	Jenis Piutang	Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2023 (Rp)	Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1.	Piutang Pajak	43.558.382.935,24	36.872.411.527,87	6.685.971.407,37
2.	Piutang Retribusi	190.613.072,31	184.263.298,27	6.349.774,04
3.	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	1.715.737.586,00	1.526.038.332,00	189.699.254,00
4.	Piutang BLUD	3.729.883.109,50	3.220.925.444,75	508.957.664,75
5.	Piutang Transfer Antar Daerah	30.872.228,48	58.278.212,46	(27.405.983,98)
5.	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	257.500,00	838.330,00	(580.830,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>49.225.746.431,53</b>	<b>41.862.755.145,35</b>	<b>7.362.991.286,18</b>

Nilai penyisihan piutang akan mengurangi nilai piutang secara keseluruhan. Perhitungan penyisihan piutang berdasarkan jenis dan umur piutang mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Rincian perhitungan penyisihan piutang dapat dilihat pada **Lampiran 8 – Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang**.

Rincian Penyisihan Piutang per SKPD adalah sebagai berikut.

No	SKPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
<b>1</b>	<b>BAPENDA</b>	<b>43.589.255.163,72</b>	<b>36.930.689.740,33</b>	<b>6.658.565.423,39</b>
	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	52.303,33	53.989,32	(1.685,99)
	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	23.195.727,78	21.545.624,76	1.650.103,02
	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	808.000,00	817.790,00	(9.790,00)
	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	194.153.180,49	44.520.146,25	149.633.034,24
	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	528.283,34	355.618,84	172.664,50
	Penyisihan Piutang Pajak Parkir	7.435.198,50	1.545.941,88	5.889.256,62
	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	118.905.683,56	35.915.639,20	82.990.044,36

No	SKPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	109.321,88	18.834,38	90.487,50
	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	43.213.195.236,36	36.766.746.913,24	6.446.448.323,12
	Penyisihan Piutang Pajak BPHTB	0,00	891.030,00	(891.030,00)
	Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	30.872.228,48	58.278.212,46	(27.405.983,98)
<b>2</b>	<b>DPUTR</b>	<b>6.357.480,31</b>	<b>1.633.210,22</b>	<b>4.724.270,09</b>
	Penyisihan Piutang Retribusi PBG	6.357.480,31	1.633.210,22	4.724.270,09
<b>3</b>	<b>DKPP</b>	<b>64.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.544,00</b>
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	64.544,00	0,00	64.544,00
<b>4</b>	<b>BKAD</b>	<b>1.897.340.361,00</b>	<b>1.708.286.481,00</b>	<b>189.053.880,00</b>
	Penyisihan Piutang Retribusi	182.201.351,00	182.201.351,00	0,00
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Pengelolaan Pasar PPKS	1.625.000.000,00	1.437.500.000,00	187.500.000,00
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Hasil Penjualan Alat Angkutan	87.479.800,00	87.479.800,00	0,00
	Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	257.500,00	838.330,00	(580.830,00)
	Penyisihan Piutang TASPEN	2.401.710,00	267.000,00	2.134.710,00
<b>5</b>	<b>DISKIPAS</b>	<b>2.845.773,00</b>	<b>1.220.269,05</b>	<b>1.625.503,95</b>
	Penyisihan Piutang Retribusi	2.054.241,00	428.737,05	1.625.503,95
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	791.532,00	791.532,00	0,00
<b>6</b>	<b>RSUD</b>	<b>3.729.883.109,50</b>	<b>3.220.925.444,75</b>	<b>508.957.664,75</b>
	Penyisihan Piutang BLUD	3.729.883.109,50	3.220.925.444,75	508.957.664,75
	<b>Jumlah</b>	<b>49.225.746.431,53</b>	<b>41.862.755.145,35</b>	<b>7.362.991.286,18</b>

#### 5.1.6.1.4 Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp57.236.438,36 mengalami penurunan sebesar (Rp74.462.191,78) (56,54%) dari beban dibayar dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp131.698.630,14. Rinciannya adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
1.	Belanja Asuransi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian (Diskop UKMPP)	26.520.547,95
2.	Belanja Sewa Lahan Parkir dan Gudang RSUD	30.715.890,41
	<b>Total</b>	<b>57.236.438,36</b>

Rincian Belanja Dibayar Dimuka pada Diskop UKMPP, sebagai berikut:

No.	Nomor dan Tanggal Polis Asuransi	Aset yang Diasuransikan	Nilai Premi Asuransi (Belanja Asuransi Barang Milik Daerah-LRA) (Rp)	Periode Asuransi	Perusahaan Asuransi	Beban Asuransi-LO (Rp)	Belanja Dibayar Dimuka - Neraca per 31 Desember 2022 (Rp)
1	1006011123 110001 Tanggal 14 November 2023	Bangunan Kios Pasar Darmaraja dan Bangunan Kios Pasar Buahdua	10.000.000,00	14 November 2023 s.d.14 November 2024	PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967	1.287.671,23	8.712.328,77
2	1006011123 050002 Tanggal 10 Mei 2023	Bangunan Kios Pasar Tanjungsari, Pasar Conggeang, Pasar Wado, Pasar INPRES Gemah Ripah dan Pasar Parakan Muncang	50.000.000,00	10 Mei 2023 s.d. 10 Mei 2024	PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967	32.191.780,82	17.808.219,18
<b>Jumlah</b>			<b>60.000.000,00</b>			<b>33.479.452,05</b>	<b>26.520.547,95</b>

Rincian belanja dibayar dimuka pada RSUD, sebagai berikut.

No.	Nomor dan Tanggal Kontrak Sewa	Nilai Sewa (Rp)	Nilai Sewa (Belanja Jasa Sewa - LRA) (Rp)	Periode Sewa	Pihak Yang Menyewakan	Beban Sewa - LO (Rp)	Belanja Dibayar Dimuka - Neraca per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Nomor: 445/021/RSU D/II/2019 Tanggal 01 Februari 2019	387.500.000,00	Sewa Tanah dan Bangunan Lahan Parkir Kend. Roda 4 di Jl. Cipada RT 02/03	01 Februari 2019 s.d. 31 Januari 2024	Drs. H Yayat Ruhiyat	380.917.808,22	6.582.191,78
2	HK.03.01.02/081/2023 Tanggal 30 Mei 2023	57.200.000,00	Sewa Tempat/ Gedung untuk barang Inventaris Tidak Layak Pakai di Blok Lembur Tengah Kel. Situ Kec. Sumedang Utara	03 Juni 2023 s.d. 02 Juni 2024	Tete Trisna Jong	33.066.301,37	24.133.698,63
<b>Jumlah</b>		<b>444.700.000,00</b>				<b>413.984.109,59</b>	<b>30.715.890,41</b>

#### 5.1.6.1.5 Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Nilai

persediaan ini ditentukan berdasarkan *stock opname* yang dilaksanakan oleh pengurus barang pada setiap SKPD. Nilai persediaan tersebut terbentuk dari belanja barang serta pendapatan hibah yang diterima oleh Pemerintah Daerah.

Persediaan akhir TA adalah persediaan yang dikuasakan pada Bendahara Barang di setiap unit kerja. Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp41.135.563.145,36 mengalami kenaikan sebesar Rp6.908.790.699,45 (20,19%) dari persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp34.226.772.445,91. Rekapitulasi persediaan yang terdapat di SKPD, sebagai berikut.

No	Urusan Pemerintahan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Dinas Kesehatan	37.222.333.266,95	30.567.587.081,35	6.654.746.185,60
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.139.460,00	50.171.824,00	(37.032.364,00)
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	15.860.572,00	20.182.072,00	(4.321.500,00)
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.176.931.500,00	757.030.700,00	419.900.800,00
5	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.766.522.419,00	1.525.891.000,00	240.631.419,00
6	Dinas Perhubungan	338.055.865,41	61.264.140,00	276.791.725,41
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	30.819.480,00	21.458.100,00	9.361.380,00
8	Dinas Arsip dan Perpustakaan	211.558.150,00	222.964.175,00	(11.406.025,00)
9	Dinas Perikanan dan Peternakan	86.966.395,00	96.339.275,00	(9.372.880,00)
10	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	111.725.055,00	648.572.585,46	(536.847.530,46)
11	Sekretariat Daerah	30.254.172,00	42.888.309,00	(12.634.137,00)
12	Badan Keuangan dan Aset Daerah	45.363.410,00	9.021.415,00	36.341.995,00
13	Badan Pendapatan Daerah	86.033.400,00	203.401.769,10	(117.368.369,10)
	<b>Jumlah</b>	<b>41.135.563.145,36</b>	<b>34.226.772.445,91</b>	<b>6.908.790.699,45</b>

Persediaan pada Dinas Kesehatan Rp37.222.333.266,95 merupakan jumlah persediaan dari Rumah Sakit Umum, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah serta pada Dinas Kesehatan sendiri, dengan rincian seperti di bawah ini.

No	Urusan Pemerintahan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Dinas Kesehatan	13.765.271.628,63	10.667.464.861,24	3.097.806.767,39
2	Rumah Sakit Umum	15.218.058.914,29	12.864.226.737,00	2.353.832.177,29
3	Puskesmas dan Labkesda	8.239.002.724,03	7.035.895.483,11	1.203.107.240,92
	<b>Jumlah</b>	<b>37.222.333.266,95</b>	<b>30.567.587.081,35</b>	<b>6.654.746.185,60</b>

Sedangkan rekapitulasi kenaikan/penurunan persediaan menurut rinciannya adalah sebagai berikut.



No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
<b>I</b>	<b>Bahan</b>	<b>1.909.239.955,00</b>	<b>2.334.147.932,63</b>	<b>(424.907.977,63)</b>
1	Bahan Kimia	1.818.248.135,00	2.163.271.393,63	(345.023.258,63)
2	Bahan Baku	1.472.400,00	19.661.624,00	(18.189.224,00)
3	Bahan/Bibit Tanaman	6.460.755,00	73.639.900,00	(67.179.145,00)
4	Isi Tabung Gas	26.372.000,00	20.860.000,00	5.512.000,00
5	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	56.686.665,00	56.686.665,00	0,00
6	Bahan Lainnya	0,00	28.350,00	(28.350,00)
<b>II</b>	<b>Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor</b>	<b>3.438.982.708,41</b>	<b>2.910.065.891,10</b>	<b>528.916.817,31</b>
1	Alat Tulis Kantor	360.784.903,00	264.575.108,10	96.209.794,90
2	Kertas dan Cover	26.774.450,00	44.010.340,50	(17.235.890,50)
3	Bahan Cetak	912.852.479,41	763.469.594,50	149.382.884,91
4	Benda Pos	3.070.000,00	840.000,00	2.230.000,00
5	Bahan Komputer	867.713.300,00	530.403.484,00	337.309.816,00
6	Perabot Kantor	194.370,00	23.680.250,00	(23.485.880,00)
7	Alat Listrik	188.875.334,00	143.210.144,00	45.665.190,00
8	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.078.717.872,00	1.139.876.970,00	(61.159.098,00)
<b>III</b>	<b>Obat-obatan</b>	<b>35.657.520.891,95</b>	<b>28.379.061.636,72</b>	<b>7.278.459.255,23</b>
1	Obat	28.650.320.585,80	28.366.328.136,72	283.992.449,08
2	Obat-obatan Lainnya	7.007.200.306,15	12.733.500,00	6.994.466.806,15
<b>IV</b>	<b>Persediaan untuk Dijual/Diserahkan</b>	<b>116.931.360,00</b>	<b>581.762.635,46</b>	<b>(464.831.275,46)</b>
1	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	116.931.360,00	581.762.635,46	(464.831.275,46)
<b>V</b>	<b>Natura dan Pakan</b>	<b>12.888.230,00</b>	<b>21.734.350,00</b>	<b>(8.846.120,00)</b>
1	Natura	3.088.000,00	805.350,00	2.282.650,00
2	Pakan	9.800.230,00	20.929.000,00	(11.128.770,00)
	<b>Total</b>	<b>41.135.563.145,36</b>	<b>34.226.772.445,91</b>	<b>6.908.790.699,45</b>

Rincian pada **Lampiran 9 – Rincian Persediaan.**

Berdasarkan hasil *stock opname* persediaan TA 2023, diketahui bahwa terdapat persediaan kedaluwarsa dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1.	Bahan Cetak	20.387.266,08
2.	Obat	29.806.110,00
3.	Obat-Obatan Lainnya	164.230.515,54
	<b>Jumlah</b>	<b>214.423.891,62</b>

Persediaan kedaluwarsa Bahan Cetak sebesar Rp20.387.266,08 pada Dinas Perhubungan terdiri dari Karcis Angkutan Barang sebesar Rp760.887,91, Karcis Terminal sebesar Rp18.308.589,13 dan Blanko Bongkar Muat sebesar Rp1.317.789,04. Nilai persediaan kedaluwarsa tersebut mengurangi nilai persediaan di Neraca dan menambah Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak. Pencatatan dengan menambah Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak karena persediaan tersebut merupakan persediaan atas pengadaan tahun berjalan dan belum adanya Berita Acara Pemusnahan atas persediaan kedaluwarsa tersebut.

Selanjutnya, persediaan Obat Rp29.806.110,00 pada Dinas Kesehatan merupakan obat kedaluwarsa yang diretur kepada Pihak Ketiga. Nilai persediaan kedaluwarsa tersebut mengurangi nilai persediaan di Neraca dan menambah Beban Obat-Obatan-Obat. Pencatatan dengan menambah Beban Obat-Obatan-Obat karena merupakan persediaan atas pengadaan tahun berjalan dan belum adanya penggantian obat baru dari Pihak Ketiga.

Sementara itu, persediaan kedaluwarsa Obat-Obatan Lainnya sebesar Rp164.230.515,54 merupakan obat kedaluwarsa pada BLUD RSUD dan Puskesmas, masing-masing sebesar Rp29.513.323,00 pada RSUD dan Rp134.717.192,54 pada BLUD Puskesmas. Berbeda dengan pencatatan pada Dinas Kesehatan, obat kedaluwarsa pada BLUD RSUD dan Puskesmas dicatat dengan mengurangi nilai persediaan pada Neraca dan menambah akun Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Hal ini karena pengurangan nilai persediaan obat kedaluwarsa tersebut berdasarkan pada Berita Acara Pemusnahan Obat Kedaluwarsa/Rusak.

#### **5.1.6.2 Investasi Jangka Panjang**

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp155.958.119.420,18 mengalami kenaikan sebesar Rp10.651.241.202,27 (7,33%) dari Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp145.306.878.217,91. Rinciannya adalah sebagai berikut.

No	Jenis Investasi Jangka Panjang	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1.	Investasi Nonpermanen	890.688.754,25	1.000.932.571,62	(110.243.817,37)
2.	Investasi Permanen	155.067.430.665,93	144.305.945.646,29	10.761.485.019,64
	<b>Jumlah</b>	<b>155.958.119.420,18</b>	<b>145.306.878.217,91</b>	<b>10.651.241.202,27</b>

##### **5.1.6.2.1 Investasi Nonpermanen**

Investasi Non Permanen per 31 Desember 2023 sebesar Rp890.688.754,25 mengalami penurunan sebesar (Rp110.243.817,37) atau (11,01%) dari Investasi Non Permanen per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.000.932.571,62. Investasi Nonpermanen ini berupa Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih yang terdiri dari:

1.	<b>Dana Bergulir:</b>	
	1. Paket Kredit Petani, Usaha Kecil dan Koperasi (PAKEPUK)	Rp2.146.846.962,00
	2. Program Kredit Usaha Senyum Manis (KUSUMA)	Rp1.222.954.875,00
	Jumlah Dana Bergulir	Rp3.369.801.837,00
2.	<b>Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih</b>	(Rp2.479.113.082,75)
<b>Total Investasi Non Permanen</b>		<b>Rp 890.688.754,25</b>

#### 5.1.6.2.1.1 Dana Bergulir

Dana Bergulir per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.369.801.837,00 mengalami penurunan sebesar Rp 675.513.963,00 (16,70%) dari Dana Bergulir per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.045.315.800,00. Penurunan ini disebabkan oleh adanya pelunasan tunggakan kredit sebanyak 23 debitur pada Dana Bergulir PAKEPUK melalui *Crash Program* yang diikuti oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian. Terdapat dua jenis Dana Bergulir per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

#### 1. Dana Bergulir Paket Kredit Petani, Usaha Kecil dan Koperasi (PAKEPUK)

Dana Bergulir Paket Kredit Petani, Usaha Kecil dan Koperasi (PAKEPUK) per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.146.846.962,00. Rinciannya adalah sebagai berikut.

<b>Investasi Awal Dana Bergulir PAKEPUK berdasarkan APBD terdiri dari:</b>	
1. APBD 2003 (Keputusan Bupati Sumedang Nomor 4 Tahun 2003) pengelola Bank Jabar	Rp1.000.000.000,00
2. APBD 2004 (Keputusan Bupati Sumedang Nomor 41 Tahun 2004) pengelola Bank BRI	Rp500.000.000,00
3. APBD 2005 (Keputusan Bupati Sumedang Nomor 15 Tahun 2005) pengelola PKPS	Rp600.000.000,00
4. APBD 2006 (Keputusan Bupati Sumedang Nomor 12 Tahun 2006) pengelola PKPS	Rp600.000.000,00
<b>Total Investasi Awal</b>	<b>Rp2.700.000.000,00</b>
Akumulasi Pendapatan Perguliran s.d Tahun 2022	Rp123.907.025,00
Akumulasi Pendapatan Perguliran Tahun Berjalan	Rp 1.162.796,00
Akumulasi Pengurangan Modal s.d 31 Desember 2023	(Rp678.222.859,00)
<b>Total Investasi – Non Permanen (PAKEPUK) per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp2.146.846.962,00</b>
Total Investasi – Non Permanen (PAKEPUK) per 31 Desember 2023 terdiri dari :	
1. Kredit yang disalurkan (Tunggakan)	Rp 1.417.901.80500
2. Saldo kas di rekening pengelola terdiri dari :	Rp728.945.157,00
BRI Rek Nomor 009401000299307	Rp315.063.665,00
BJB Rek Nomor: 0110010038457	Rp383.444.256,00
PKPS Rek Nomor 0113200097913	Rp6.558.737,00
PKPS Rek Nomor 0065285721001	Rp23.878.499,00

Dalam tabel di atas yang dimaksud dengan Akumulasi Pendapatan perguliran yaitu pendapatan yang diperoleh dari awal digulirkannya dana tersebut sampai dengan akhir tahun berjalan diantaranya dari pendapatan bunga dan penerimaan setoran tunggakan kredit. Sedangkan Akumulasi Pengurangan Modal s.d. 31 Desember 2023 yaitu

pengurangan investasi Dana Bergulir PAKEPUK berupa pelunasan utang debitur melalui *Crash Program*.

Program Paket Kredit Petani Usaha Kecil dan Koperasi (PAKEPUK) digagas pada tahun 2003 dan berakhir tahun 2006 dengan total dana sebesar Rp2.700.000.000,00. Program PAKEPUK ini sebagai salah satu upaya dalam memecahkan permasalahan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah dan koperasi yang kesulitan mendapatkan akses permodalan.

Pada TA 2023, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian mengikuti *Crash Program* yaitu optimalisasi penyelesaian piutang negara yang dilakukan secara terpadu dalam bentuk keringanan utang. Sejak awal tahun 2021, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian telah bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung untuk menyerahkan kepengurusan program PAKEPUK yang akan mengikuti *Crash Program*. Melalui program tersebut, utang 23 debitur sebesar Rp528.894.200,00 telah dilunasi dengan dana sebesar Rp85.234.608,00 yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah dari Rekening Penampungan Piutang Negara KPKNL Bandung pada tanggal 7 Juli 2023. Sehingga Dana Bergulir PAKEPUK per 31 Desember 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

## 2. Dana Bergulir Program Kredit Usaha Senyum Manis (KUSUMA)

Dana bergulir kepada kelompok usaha mikro kecil berupa Program Kredit Usaha Senyum Manis (KUSUMA) yang dikelola oleh Perumda BPR Bank Sumedang dengan nomor rekening tabungan 05.01.02082 dan rekening bunga 05.01.02083 atas nama Diskop UKMPP Kabupaten Sumedang per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.222.954.875,00. Rincian dana bergulir Program KUSUMA:

Investasi Awal Dana Bergulir KUSUMA:	Rp1.000.000.000,00
<b>Total Investasi Awal</b>	<b>Rp1.000.000.000,00</b>
Pendapatan Perguliran Tahun Lalu di rekening bunga nomor rekening 05.01.02083	Rp82.671.427,00
Setoran Modal dari Pendapatan Perguliran Tahun Lalu	Rp0,00
Pendapatan Perguliran tahun berjalan di rekening bunga nomor rekening 05.01.02083	Rp1.779.200,00
Penambahan Modal Tahun Lalu	Rp138.504.248,00
<b>Total Investasi – Non Permanen (KUSUMA) per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp1.222.954.875,00</b>
Total Investasi – Non Permanen (KUSUMA) per 31 Desember 2023 terdiri dari :	
1. Saldo kas pendapatan perguliran di rekening bunga nomor rekening 5.01.02083	Rp84.197.527,00
2. Saldo kas tabungan di rekening nomor 05.01.02082	Rp55.060.198,00
3. Kredit yang disalurkan, terdiri dari:	Rp1.083.697.150,00
Lancar (<1tahun)	Rp10.435.550,00

Kurang Lancar (1 s.d 3 thn)	Rp9.450.000,00
Diragukan (> 3 s.d 5 thn)	Rp7.195.000,00
Macet (> 5 thn)	Rp1.056.616.600,00

Dasar pengklasifikasian kategori kredit yang disalurkan yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet tidak berdasarkan umur piutang, tetapi berdasarkan data dari pengelola dana bergulir yaitu berdasarkan kualitas kredit.

#### 5.1.6.2.1.2 Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih

Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih per 31 Desember 2023 sebesar (Rp2.479.113.082,75) mengalami penurunan sebesar (Rp565.270.145,63) (18,57%) dari Penyisihan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp3.044.383.228,38). Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih ini merupakan penyisihan atas Kredit yang disalurkan oleh pengelola dana bergulir. Rincian perhitungan penyisihan dana bergulir adalah sebagai berikut.

Dana Bergulir	Tunggakan Kredit yang disalurkan (Rp)	Lancar (< 1 tahun) (Rp)	Kurang Lancar (>1 s.d 3 tahun) (Rp)	Diragukan (> 3 s.d 5 tahun) (Rp)	Macet (> 5 tahun) (Rp)
PAKEPUK BRI	184.936.335,00	-	-	-	184.936.335,00
PAKEPUK BJB	378.192.570,00	-	-	-	378.192.570,00
PAKEPUK PKPS	854.772.900,00	-	-	-	854.772.900,00
KUSUMA	1.083.697.150,00	10.435.550,00	9.450.000,00	7.195.000,00	1.056.616.600,00
<b>Total Tunggakan Kredit Yang Disalurkan</b>	<b>2.501.598.955,00</b>	<b>10.435.550,00</b>	<b>9.450.000,00</b>	<b>7.195.000,00</b>	<b>2.474.518.405,00</b>
<b>Presentase Penyisihan</b>		<b>0,50%</b>	<b>10%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>
<b>Penyisihan Dana Bergulir</b>		<b>52.177,75</b>	<b>945.000,00</b>	<b>3.597.500,00</b>	<b>2.474.518.405,00</b>
<b>Total Penyisihan Dana Bergulir</b>					<b>2.479.113.082,75</b>

#### 5.1.6.2.2. Investasi Permanen

Investasi Permanen per 31 Desember 2023 sebesar Rp155.067.430.665,93 mengalami kenaikan sebesar Rp10.761.485.019,64 (7,46%) dari Investasi Permanen per 31 Desember 2022 sebesar Rp144.305.945.646,29. Investasi Permanen Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang di Badan Usaha Milik Daerah dengan rincian sebagai berikut :

No	BUMD	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1.	Perumda BPR Bank Sumedang	77.859.520.059,67
2.	PT. LKM Sumedang	1.577.201.807,64
3.	PT. Kampung Makmur (Perseroda)	35.196.531.801,62
4.	PDAM Tirta Medal Sumedang	24.591.335.202,00
5.	Bank Jabar Cabang Sumedang	15.842.841.795,00
	<b>Jumlah</b>	<b>155.067.430.665,93</b>

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dinilai berdasarkan Metode Ekuitas dan Metode Biaya. Berdasarkan PSAP Nomor 6 tentang Akuntansi Investasi dinyatakan bahwa penggunaan Metode Ekuitas dan Metode Biaya didasarkan pada kriteria sebagai berikut.

- (a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- (b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- (c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
- (d) Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Pengukuran nilai investasi permanen dengan menggunakan Metode Ekuitas diterapkan pada Perumda BPR Bank Sumedang, PT. LKM Sumedang dan PT. Kampung Makmur (Perusahaan Daerah/Perseroda) serta PDAM Tirta Medal Sumedang karena kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang lebih dari 20%. Sedangkan untuk pengukuran nilai investasi permanen pada Bank Jabar Cabang Sumedang menggunakan Metode Biaya karena kepemilikan kurang dari 20%. Investasi Permanen per 31 Desember 2023 sebesar Rp155.067.430.665,93 terdiri dari:

**1. Perumda BPR Bank Sumedang**

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda BPR Bank Sumedang per 31 Desember 2023 sebesar Rp77.859.520.059,67. Komposisi kepemilikan saham Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada Perumda BPR Bank Sumedang sebesar Rp100.000.000.000,00 dengan total kepemilikan saham sebesar Rp100.000.000.000,00. Penyertaan modal dinilai berdasarkan metode ekuitas karena kepemilikannya lebih dari 50% dengan persentase kepemilikan akhir sebesar 100%. Perhitungan penyertaan modal dengan melihat Laporan Keuangan (*Audited*) Perumda BPR Bank Sumedang per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

Saldo Awal (Audited 2022 berdasarkan Metode Ekuitas)	Rp67.113.175.360,67
Penyertaan Modal Tahun 2023	Rp5.000.000.000,00
Bagian Laba Tahun Berjalan : 100% x Rp13.085.279.204,00	Rp13.085.279.204,00
Bagian Laba Pemda Tahun Lalu	(7.338.934.505,00)
<b>Total Penyertaan Modal Tahun 2023</b>	<b>Rp77.859.520.059,67</b>

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa Laba TA 2023 Perumda BPR Bank Sumedang berdasarkan hasil audit KAP adalah sebesar Rp13.085.279.204,00 dengan kepemilikan pemda atas laba Perumda BPR Bank Sumedang sebesar 100%. Adapun Bagian Laba Pemda Tahun Lalu sebesar Rp7.338.934.505,00 merupakan bagian laba yang diterima oleh pemda (Deviden) pada TA 2023 atas penyertaan modal tahun 2022.

Nilai Perolehan Investasi Jangka Panjang yang ditanamkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sampai dengan TA 2023 sebesar Rp47.019.740.978,65 dengan rincian sebagai berikut:

Penyertaan Modal sampai dengan tahun 2008	Rp5.762.734.646,65
Penyertaan Modal tahun 2009	Rp1.700.000.000,00
Penyertaan Modal tahun 2010	Rp800.000.000,00
Penyertaan Modal tahun 2011	Rp500.000.000,00
Penyertaan Modal tahun 2012	Rp800.000.000,00
Penyertaan Modal dalam bentuk Tanah dan Bangunan tahun 2012	Rp3.012.700.000,00
Penyertaan Modal tahun 2013	Rp1.400.000.000,00
Penyertaan Modal tahun 2014	Rp1.400.000.000,00
Penyertaan Modal tahun 2015	Rp1.400.000.000,00
Penyertaan Modal tahun 2016	Rp1.400.000.000,00
Penyertaan Modal tahun 2017	Rp2.994.306.332,00
Penyertaan Modal tahun 2018	Rp3.000.000.000,00
Penyertaan Modal tahun 2019	Rp3.000.000.000,00
Penyertaan Modal tahun 2020	Rp5.500.000.000,00
Penyertaan Modal tahun 2021	Rp3.850.000.000,00
Penyertaan Modal tahun 2022	Rp5.500.000.000,00
Penyertaan Modal tahun 2023	Rp5.000.000.000,00
<b>Total Nilai Perolehan Investasi Jangka Panjang</b>	<b>Rp47.019.740.978,65</b>

Dengan demikian sampai dengan TA 2023 secara akumulasi terdapat peningkatan Nilai Investasi Jangka Panjang pada Perumda BPR Bank Sumedang sebesar Rp30.839.779.081,02 (Rp77.859.520.059,67 – Rp47.019.740.978,65).

## 2. PT. LKM Sumedang

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. LKM Sumedang per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.577.201.807,64. Komposisi kepemilikan saham Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada PT. LKM sebesar Rp3.000.000.000,00 dengan total kepemilikan saham sebesar Rp5.000.000.000,00. Penyertaan modal dinilai berdasarkan metode ekuitas dengan persentase kepemilikan akhir sebesar 78,16%. Perhitungan penyertaan modal dengan melihat Laporan Keuangan (*Audited*) PT. LKM per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

Saldo Awal ( <i>Audited</i> 2022 berdasarkan Metode Ekuitas)	Rp2.285.222.871,54
Penyertaan Modal Tahun 2023	Rp0,00
Bagian Laba Tahun Berjalan: 78,16% x (Rp905.861.136,00)	(Rp708.021.063,90)
Bagian Laba Pemda Tahun Lalu	Rp0,00
<b>Total Penyertaan Modal Tahun 2023</b>	<b>Rp1.577.201.807,64</b>

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa berdasarkan hasil audit KAP, PT. LKM Sumedang mengalami rugi pada TA 2023 sebesar (Rp905.861.136,00), sehingga

Pemda menanggung kerugian sebesar (Rp708.021.063,90) atas penyertaan modal ke PT. LKM Sumedang tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 15 Juli 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro menyebutkan bahwa Hak Kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang atas PT. LKM Sumedang sebesar 60% dan Pemerintah Daerah Provinsi paling tinggi 40%. Menurut Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang, perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD PK) Sumedang menjadi PT. LKM Sumedang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro serta untuk tahun 2021 terdapat perubahan hak kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang atas PT. LKM yaitu menjadi 71,15% sedangkan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat hanya 28,85%. Kemudian pada tahun 2022, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Perubahan Komposisi Kepemilikan Saham PT. LKM Sumedang tahun 2022, hak kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang atas PT. LKM tahun 2022 kembali mengalami perubahan menjadi 78,16% sedangkan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat hanya 21,84%.

3. **PT. Kampung Makmur (Perseroda)**

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Kampung Makmur (Perseroda) per 31 Desember 2023 sebesar Rp35.196.531.801,62. Komposisi kepemilikan saham Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada PT. Kampung Makmur (Perseroda) sebesar Rp51.000.000.000,00 dengan total kepemilikan saham sebesar Rp100.000.000.000,00. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perseroan Terbatas Kampung Makmur (Perseroda) sebagai Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten dengan bentuk perusahaan perseroan daerah yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui penyertaan modal yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Namun berdasarkan Akta Berita Acara RUPS LB Nomor 01 Tanggal 2 Februari 2021, Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0024104-AH.01.02 Tahun 2021 dan Laporan Tahunan Tahun 2021 dan 2022, penyertaan modal dinilai berdasarkan metode ekuitas dengan persentase kepemilikan akhir sebesar 99,30%.

Perhitungan penyertaan modal dengan melihat Laporan Keuangan (*Unaudited*) PT. Kampung Makmur (Perseroda) per 31 Desember 2023 sebagai berikut.



Saldo Awal (Audited 2022 berdasarkan Metode Ekuitas)	Rp36.049.800.239,08
Penyertaan Modal Tahun 2023	Rp0,00
Bagian Laba Tahun Berjalan: 99,30% x (Rp859.283.421,41)	(Rp853.268.437,46)
Bagian Laba Pemda Tahun Lalu	Rp0,00
<b>Total Penyertaan Modal Tahun 2023</b>	<b>Rp35.196.531.801,62</b>

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa PT. Kampung Makmur (Perseroda) mengalami rugi pada TA 2023 sebesar (Rp859.283.421,41), sehingga Pemda menanggung kerugian sebesar (Rp853.268.437,46) atas penyertaan modal ke PT. Kampung Makmur (Perseroda) tahun 2023.

Maksud didirikan Perseroan ini yaitu untuk membantu menggerakkan perekonomian daerah dan mempercepat terwujudnya pembangunan daerah melalui pengelolaan potensi dan aset Daerah Kabupaten.

Modal dasar Perseroan ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah). Dimana modal dasar Pemerintah Daerah Kabupaten paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) dan pihak lain paling banyak sebesar 49% (empat puluh sembilan persen). Pemenuhan modal dasar dilakukan dengan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang dan/atau barang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Sumedang pada Perseroan Terbatas Kampung Makmur (Perseroda), kewajiban Modal Disetor Pemerintah Daerah Kabupaten pada Perseroan paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar untuk pemenuhan modal disetor. Pemenuhan modal disetor dilakukan melalui Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang sebesar Rp2.500.000.000,00 dan/atau barang milik daerah yang bernilai sebesar Rp34.501.937.740,00. Barang milik daerah tersebut terdiri dari:

1. Tanah dan bangunan obyek wisata Sekarwangi dengan nilai sebesar Rp2.060.017.740,00;
2. Tanah obyek wisata Sekarwangi dengan nilai sebesar Rp803.700.000,00;
3. Tanah dan Bangunan Graha Insun Medal dengan nilai sebesar Rp27.224.100.000,00;
4. Gudang sistem resi gudang dengan nilai sebesar Rp3.275.400.000,00; dan
5. Tanah dan bangunan eks Kandep Transmigrasi (kantor PT. Kampung Makmur) yang beralamat di Jalan Serma Mughtar Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara dengan nilai sebesar Rp 1.138.720.000,00.

Pada tahun 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah memberikan modal disetor kepada PT. Kampung Makmur (Perseroda) sebagai penyertaan modal daerah dalam bentuk barang berupa Aset Tetap Tanah dan Bangunan Gudang sistem resi gudang dengan nilai sebesar Rp3.275.400.000,00. Pelepasan aset tetap ini sebagai penambah nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang per 31 Desember 2020.

Sedangkan untuk tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah memberikan modal disetor kepada PT. Kampung Makmur (Perseroda) sebagai penyertaan modal daerah dalam bentuk barang berupa Aset Tetap Tanah dan Bangunan yang terdiri dari:

1. Tanah dan bangunan obyek wisata Sekarwangi dengan nilai sebesar Rp2.060.017.740,00;
  2. Tanah obyek wisata Sekarwangi dengan nilai sebesar Rp803.700.000,00; dan
  3. Tanah dan Bangunan Graha Insun Medal dengan nilai sebesar Rp27.224.100.000,00;
- Tanah dan bangunan eks Kantor Departemen Transmigrasi (kantor PT. Kampung Makmur) yang beralamat di Jalan Serma Muchtar Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara dengan nilai sebesar Rp1.138.720.000,00.

#### 4. PDAM Tirta Medal Sumedang

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Medal Sumedang per 31 Desember 2023 sebesar Rp24.591.335.202,00. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Medal Sumedang dinilai dengan metode ekuitas dengan persentase kepemilikan akhir sebesar 100%. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2020.

Komposisi kepemilikan saham Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada PDAM Tirta Medal Sumedang sebesar Rp66.502.868.421,50 dengan total kepemilikan saham sebesar Rp109.813.916.285,12. Perhitungan penyertaan modal dengan melihat Laporan Keuangan (*Audited*) PDAM per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Saldo Awal ( <i>Audited</i> 2022 berdasarkan Metode Ekuitas)	Rp23.014.905.380,00
Penyertaan Modal Tahun 2023	Rp1.000.000.000,00
Bagian Laba (Rugi) Tahun Berjalan 100% x Rp576.429.822,00	Rp576.429.822,00
Bagian Laba Pemda Tahun Lalu	Rp0,00
<b>Total Penyertaan Modal Tahun 2023</b>	<b>Rp24.591.335.202,00</b>

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa Laba TA 2023 PDAM Tirta Medal Sumedang berdasarkan hasil audit KAP adalah sebesar Rp576.429.822,00 dengan kepemilikan pemda atas laba PDAM Tirta Medal Sumedang sebesar 100%. Adapun Bagian Laba Pemda Tahun Lalu sebesar Rp0,00 karena meskipun tahun 2022 mengalami laba, namun PDAM Tirta Medal Sumedang tidak menyetorkan Dividennya kepada Pemda. Nilai Perolehan Investasi Jangka Panjang yang ditanamkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada PDAM sampai dengan tahun 2023 baik berupa kas maupun non kas adalah sebesar Rp45.163.204.583,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Nilai Penyertaan Modal (Rp)
Penyertaan Modal tahun 1998 s.d. 2003	610.175.883,00
Penyertaan Modal tahun 2005	150.000.000,00

Uraian	Nilai Penyertaan Modal (Rp)
Penyertaan Modal tahun 2006	800.000.000,00
Penyertaan Modal Tunai tahun 2010	500.000.000,00
Penyertaan Modal Tunai tahun 2011	1.000.000.000,00
Penyertaan Modal Tunai tahun 2012	1.000.000.000,00
Penyertaan Modal Tunai tahun 2013	2.400.000.000,00
Penyertaan Modal Tunai tahun 2014	1.400.000.000,00
Penyertaan Modal Tunai tahun 2015	3.250.000.000,00
Penyertaan Modal Tunai tahun 2016	2.798.000.000,00
Penyertaan Modal Non Tunai tahun 2016	11.258.109.000,00
Penyertaan Modal Tunai tahun 2017	4.629.000.000,00
Penyertaan Modal Tunai tahun 2018	4.649.367.436,00
Penyertaan Modal Tunai tahun 2019	3.918.552.264,00
Penyertaan Modal Tunai tahun 2020	3.200.000.000,00
Penyertaan Modal Tunai tahun 2021	2.100.000.000,00
Penyertaan Modal Tunai tahun 2022	1.500.000.000,00
Penyertaan Modal Tunai tahun 2023	1.000.000.000,00
<b>Total Nilai Perolehan Investasi Jangka Panjang</b>	<b>46.163.204.583,00</b>

Dengan demikian sampai dengan Tahun 2023 secara akumulasi terdapat penurunan Nilai Investasi Jangka Panjang pada PDAM Sumedang sebesar (Rp21.571.869.381,00) yaitu (Rp24.591.335.202,00 – 46.163.204.583,00).

#### 5. Bank Jabar Cabang Sumedang

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Jabar Cabang Sumedang per 31 Desember 2023 sebesar Rp15.842.841.795,00, dinilai berdasarkan metode biaya yaitu berdasarkan nilai pada lembar saham. Rincian penyertaan berdasarkan nilai pada lembar saham adalah sebagai berikut.

No.	No. Kolektif Saham	Tanggal Penerbitan	Jumlah Lembar Saham	Nominal Saham (Rp)
1	A: II-24/00096743	30 Maret 2000	96.743	967.430.000,00
2	A: II-24/0008342	31 Mei 2000	8.342	83.420.000,00
3	A: II-24/00017796	30 Juni 2000	17.796	177.960.000,00
4	A: II-24/0005436	31 Juli 2000	5436	54.360.000,00
5	A: II-24/0003000	31 Desember 2000	3.000	30.000.000,00
6	A: II-24/00020000	31 Desember 2001	20.000	200.000.000,00
7	A: II-24/00200000	31 Desember 2002	200.000	2.000.000.000,00
8	A: II-24/00650000	31 Desember 2003	650.000	6.500.000.000,00
9	A: II-24/150000	29 Desember 2006	150.000	1.500.000.000,00
<b>Total</b>			<b>1.151.317</b>	<b>11.513.170.000,00</b>

Surat Kolektif Saham Baru (nilai nominal saham Rp250,00/lembar saham)

No.	No. Kolektif Saham	Tanggal Penerbitan	Jumlah Lembar Saham	Nominal Saham (Rp)
1	A: II-24/46052684	31 Desember 2008	46.052.684	11.513.171.000,00

Surat Kolektif Saham Baru (nilai nominal saham Rp1.355,00/lembar saham)

No.	No. SBHMETD / <i>Right Certificates</i>	Tanggal Efektif	Jumlah Lembar Saham	Nominal Saham (Rp)
1	00020	21 Februari 2022	3.195.329	4.329.670.795,00

### 5.1.6.3. Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.445.043.021.626,89 mengalami kenaikan sebesar Rp138.196.185.004,67 (4,18%) dari Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.306.846.836.622,22. Nilai Aset Tetap ini dihasilkan berdasarkan rekonsiliasi antara petugas akuntansi SKPD, pengurus barang SKPD, bidang akuntansi dan bidang aset.

Penyusunan Neraca Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang berpedoman pada PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan rincian barang di neraca telah mengacu pada Pemdagri 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah. Rekap Aset Tetap dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
a. Tanah	779.803.484.596,70	582.116.454.610,77	197.687.029.985,93
b. Peralatan Mesin	1.620.650.976.708,34	1.525.702.360.148,95	94.948.616.559,39
c. Bangunan Gedung	1.669.060.803.578,38	1.541.028.614.238,83	128.032.189.339,55
d. Jalan Irigasi dan Jaringan	3.230.891.609.798,35	3.051.233.809.417,23	179.657.800.381,12
e. Aset Tetap lainnya	231.399.529.043,12	212.813.927.498,19	18.585.601.544,93
f. Kontruksi dalam Pengerjaan	13.664.221.546,00	42.865.020.217,00	(29.200.798.671,00)
g. Akumulasi Penyusutan	(4.100.427.603.644,00)	(3.648.913.349.508,75)	(451.514.254.135,25)
<b>TOTAL</b>	<b>3.445.043.021.626,89</b>	<b>3.306.846.836.622,22</b>	<b>138.196.185.004,67</b>

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023 terbentuk dari mutasi tambah dan mutasi kurang selama periode berjalan, rinciannya pada tabel di bawah ini:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
<b>1.</b>	<b>Saldo Audited 2022</b>	<b>3.306.846.836.622,22</b>
<b>2.</b>	<b>Mutasi Tambah</b>	<b>727.724.993.147,95</b>
	- Belanja Modal di LRA	402.793.517.156,00
	- Atribusi Biaya Umum	9.633.626.012,00
	- Kapitalisasi Aset Tetap dari Belanja Barang Jasa & Pemeliharaan	12.458.371.168,57
	- Koreksi Kurang Pencatatan	114.213.013.289,00
	- Mutasi Masuk SKPD	23.677.942.987,28
	- Hibah/Donasi/Bantuan (Non APBD)	125.836.685.156,73
	- Reklas dari Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin	121.407.800,00
	- Reklas dari Kontruksi Dalam Pengerjaan ke Gedung dan bangunan	17.588.964.026,00
	- Reklas dari Kontruksi Dalam Pengerjaan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	14.129.698.241,00
	- Reklas dari Peralatan dan Mesin ke Gedung dan Bangunan	21.302.227,30
	- Reklas dari Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.517.863.596,00
	- Reklas dari Aset Tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin	328.885.494,07
	- Reklas ke Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	2.539.782.631,00
	- Utang Belanja Modal Tahun 2022	1.863.933.363,00
<b>3.</b>	<b>Mutasi Kurang</b>	<b>589.528.808.143,28</b>
	- Koreksi Aset Tetap <1.000.000 (Ekstrakompatabel)	16.973.281.462,69
	- Hibah/Donasi/Bantuan (Non APBD)	5.819.317.885,00

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	- Koreksi Lebih Pencatatan	822.408.435,00
	- Mutasi Keluar SKPD	23.677.942.987,28
	- Penghapusan	5.630.419.130,44
	- Reklas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan dari JJI	2.517.863.596,00
	- Reklas ke Peralatan dan Mesin dari Gedung dan Bangunan	121.407.800,00
	- Reklas ke Peralatan dan Mesin dari Aset Tetap Lainnya	328.885.494,07
	- Reklas ke Gedung dan Bangunan dari Peralatan dan Mesin	21.302.227,30
	- Reklas ke Gedung dan Bangunan dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	17.588.964.026,00
	- Reklas ke Aset Lainnya dari Peralatan dan Mesin	2.548.141.717,00
	- Reklas ke Aset Lainnya dari Aset Tetap Lainnya	412.343.123,00
	- Reklas ke Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	14.129.698.241,00
	- Beban Penyusutan	452.650.657.100,98
	- Pengurangan Utang Belanja Modal Tahun 2022	44.136.857.970,00
	- Koreksi Penyesuaian Utang Tahun Lalu	292.538,00
	- Koreksi Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	2.149.024.409,52
	<b>Saldo Tahun 2023</b>	<b>3.445.043.021.626,89</b>

Pemindahtanganan Aset Tetap merupakan pengalihan kepemilikan Aset Tetap sebagai tindak lanjut dari penghapusan Aset Tetap dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah. Jika suatu Aset Tetap dijual, maka Aset Tetap tersebut akan diserahkan kepada pembeli Aset Tetap setelah pembeli menyetorkan harga Aset Tetap yang bersangkutan tersebut ke Kas Daerah. Penjualan Aset Tetap ini umumnya dilakukan secara lelang. Aset Tetap tersebut yang secara permanen dihentikan atau dilepas selanjutnya dieliminasi dari Neraca. Penjelasan pembentukan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 10 - Rincian Mutasi Aset Tetap dan Aset Lainnya di Neraca dibandingkan Mutasi Seharusnya di SKPD.**

Aset bersejarah merupakan salah satu aset yang dilindungi oleh negara. Aset tersebut sangat berharga bagi sebuah bangsa karena aset bersejarah merupakan wujud dari budaya, sejarah dan identitas bagi bangsa itu sendiri. Bukan hanya nilai ekonomi yang dapat dihasilkan dari aset tersebut, namun juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti nilai seni, budaya, sejarah, pendidikan, pengetahuan dan lain-lain yang harus dijaga dan dipelihara kelestariannya. Kabupaten Sumedang merupakan salah satu kota bersejarah dibuktikan dengan adanya beberapa peninggalan bersejarah, akan tetapi peninggalan bersejarah tersebut bukan merupakan aset daerah dari Kabupaten Sumedang. Peninggalan bersejarah tersebut merupakan milik yayasan dari Pangeran Sumedang. Dengan demikian aset bersejarah di Kabupaten Sumedang tidak tercantum sebagai Aset Tetap pada KIB.

Sedangkan Aset Kabupaten Sumedang yang bermasalah ada 2 (dua) bidang yaitu tanah di desa Sekarwangi Kecamatan Buahdua dan Bangunan SDN Cisambeng Desa Cipeundeuy

Kecamatan Jatinunggal, akan tetapi kedua aset tersebut tetap tercatat pada Kartu Inventarisasi Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rincian **Lampiran 11 – Rincian Aset Tetap Bermasalah**. Sedangkan dalam pencatatan Aset Tetap Tanah pada Pemerintah Kabupaten Sumedang tidak memiliki tanah yang merupakan tanah wakaf, sehingga tidak tercatat dalam KIB.

#### 5.1.6.3.1. Tanah

Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp779.803.484.596,70 mengalami kenaikan sebesar Rp197.687.029.985,93 (33,96%) dari Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp582.116.454.610,77. Rekap Aset Tetap Tanah dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
Tanah Persil	246.416.189.661,10	170.903.105.256,60	75.513.084.404,50
Tanah Non Persil	44.379.846.070,26	38.420.466.838,26	5.959.379.232,00
Lapangan	489.007.448.865,34	372.792.882.515,91	116.214.566.349,43
<b>Total</b>	<b>779.803.484.596,70</b>	<b>582.116.454.610,77</b>	<b>197.687.029.985,93</b>

Sedangkan rincian Aset Tetap Tanah dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	442.430.784,00	410.924.464,00	31.506.320,00
Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	8.489.805.904,00	6.102.928.914,00	2.386.876.990,00
Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	213.665.163.300,00	158.042.895.645,50	55.622.267.654,50
Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	3.656.631.225,38	3.314.508.260,10	342.122.965,28
Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	3.711.384.856,48	2.071.799.973,00	1.639.584.883,48
Tanah Persil Lainnya	16.450.773.591,24	960.048.000,00	15.490.725.591,24
Tanah Basah	31.452.102.013,08	30.716.102.013,08	736.000.000,00
Tanah Kering	5.711.649.272,00	488.270.040,00	5.223.379.232,00
Tanah Perkebunan	202.582.412,00	202.582.412,00	0,00
Tanah Hutan	49.866.000,00	49.866.000,00	0,00
Tanah Tandus	6.346.992.000,00	6.346.992.000,00	0,00
Tanah Pertanian	616.654.373,18	616.654.373,18	0,00
Tanah Lapangan Olahraga	47.560.507.378,48	5.211.419.378,48	42.349.088.000,00
Tanah Lapangan Parkir	999.164.990,00	999.164.990,00	0,00
Tanah Lapangan Penimbunan Barang	107.474.260,00	107.474.260,00	0,00
Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	859.575.000,00	668.575.000,00	191.000.000,00
Tanah untuk Jalan	342.481.200.122,16	292.916.676.496,90	49.564.523.625,26
Tanah untuk Bangunan Air	41.715.755.322,30	33.025.773.635,25	8.689.981.687,05
Tanah untuk Bangunan Instalasi	6.902.076.432,00	2.340.649.380,00	4.561.427.052,00
Tanah untuk Bangunan Jaringan	579.053.576,55	0,00	579.053.576,55

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
Tanah untuk Bangunan Bersejarah	304.878.000,00	224.878.000,00	80.000.000,00
Tanah untuk Makam	8.794.148.662,24	1.401.396.425,00	7.392.752.237,24
Tanah untuk Taman	37.640.901.169,11	34.834.160.997,78	2.806.740.171,33
Tanah Kampung	1.062.713.952,50	1.062.713.952,50	0,00
<b>Total</b>	<b>779.803.484.596,70</b>	<b>582.116.454.610,77</b>	<b>197.687.029.985,93</b>

Nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 terbentuk dari mutasi tambah dan mutasi kurang selama periode berjalan, rinciannya pada tabel di bawah ini:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
<b>1.</b>	<b>Saldo Audited 2022</b>	<b>582.116.454.610,77</b>
<b>2.</b>	<b>Mutasi Tambah</b>	<b>198.198.493.985,93</b>
	- Realisasi Belanja Modal	3.486.649.000,00
	- Koreksi Karena Pencatatan	108.565.605.000,00
	- Hibah/Donasi/Bantuan (Non APBD)	85.650.975.985,93
	- Mutasi Masuk SKPD	495.264.000,00
<b>3.</b>	<b>Mutasi Kurang</b>	<b>511.464.000,00</b>
	- Koreksi Karena Pencatatan	16.200.000,00
	- Mutasi Keluar SKPD	495.264.000,00
<b>Saldo Tahun 2023</b>		<b>779.803.484.596,70</b>

Mutasi Aset Tetap Tanah selama tahun 2023 terdiri dari:

Mutasi tambah yang berasal dari:

1. Realisasi Belanja Modal yang merupakan penambahan Aset Tetap Tanah sebesar Rp3.486.649.000,00 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
2. Koreksi karena pencatatan sebesar Rp108.565.605.000,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah yang bersumber dari hasil penilaian Aset tahun 2022 dicatat di tahun 2023.
3. Hibah/Donasi/Bantuan (Non APBD) masuk sebesar Rp85.650.975.985,93, terdapat pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp34.727.425.976,39, Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp28.206.088.619,54 dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp22.717.461.390. Rincian penerimaan Hibah Aset Tanah dapat dilihat pada **Lampiran 12 - Rincian Hibah Tanah**.
4. Mutasi Masuk antar SKPD Aset Tetap Tanah sebesar 495.264.000,00, tanah di Dinas Perikanan dan Peternakan sebesar Rp390.264.000,00 mutasi dari Sekretariat Daerah yaitu Tanah Blok Pasar berlokasi di Jl. Pasar Lama No. 13 Desa Tanjungsari seluas 5.620 m<sup>2</sup> dengan nomor Berita Acara No: KU.03.07/5646/2022 dan di Kecamatan Pamulihan sebesar Rp105.000.000,00 mutasi dari Sekretariat Daerah yaitu tanah untuk bangunan tempat kerja di Jl. Tunggug Hiheung Ds Ciptasari Kec. Pamulihan Luas 2100 m<sup>2</sup> dengan nomor Berita Acara KU.03.07/9865/2023.



Mutasi kurang berasal dari:

1. Koreksi karena pencatatan sebesar Rp16.200.000,00 pada Kecamatan Cisarua terjadi setelah dilakukan Pengukuran untuk Pensertifikatan terhadap Aset Tanah dan Bangunan pada Kecamatan Cisarua yang ternyata Aset Tanah yang tercatat pada KIB A Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan kode 1.3.1.01.01.04.001, Nomor Register 000001 seluas 190 m<sup>2</sup>, nilai perolehan Rp16.200.000,00 merupakan satu kesatuan/hamparan dengan Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan kode 1.3.1.01.01.04.001, Nomor Register 000002 seluas 3.500 m<sup>2</sup>, nilai perolehan Rp150.000.000,00, dengan demikian berarti telah terjadi pencatatan ganda.
2. Mutasi keluar antar SKPD Aset Tetap Tanah sebesar 495.264.000,00, tanah di Dinas Perikanan dan Peternakan sebesar Rp390.264.000,00 mutasi dari Sekretariat Daerah yaitu Tanah Blok Pasar berlokasi di Jl. Pasar Lama No. 13 Desa Tanjungsari seluas 5.620 m<sup>2</sup> dengan nomor Berita Acara No: KU.03.07/5646/2022 dan di Kecamatan Pamulihan sebesar Rp105.000.000,00 mutasi dari Sekretariat Daerah yaitu tanah untuk bangunan tempat kerja di Jl. Tunggung Hiheung Ds Ciptasari Kec. Pamulihan Luas 2100 m<sup>2</sup> dengan nomor Berita Acara KU.03.07/9865/2023.

Berdasarkan hasil inventarisasi Aset Tanah yang dilakukan oleh pengurus barang pada DPUPR yaitu dengan menganalisis KIB dan kondisi dilapangan, diketahui terdapat 28 bidang tanah seluas 158.005 m<sup>2</sup> dengan total nilai perolehan sebesar Rp1.811.958.250,00 yang telah terendam Waduk Jatigede dan masih tercatat sebagai Aset Tetap Tanah di Neraca. Seharusnya tanah tersebut tidak lagi dicatat sebagai Aset Tetap. Hasil inventarisasi akan dijadikan dasar bagi pengguna barang untuk mengajukan reklasifikasi ke Aset Lainnya melalui Bidang Aset. Proses selanjutnya akan diajukan kedalam usulan penghapusan barang milik daerah.

Aset Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang disewa oleh pihak lain sebanyak lima bidang tanah seluas 107,5 m<sup>2</sup>, yaitu disewa oleh:

1. PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Sumedang seluas 9 m<sup>2</sup> berlokasi di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang untuk dimanfaatkan sebagai Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 033/PKS.54-KS/2021 dan Nomor 251/SUE-PKS/2021 tanggal 7 Mei 2021 tentang sewa sebagian tanah dan atau bangunan milik Pemerintah Kabupaten Sumedang.
2. PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Sumedang seluas 55 m<sup>2</sup> berlokasi di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang untuk dimanfaatkan sebagai kantor kas PT BPD Jawa Barat dan Banten dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor B/1398/KU.03.07/VI/2023 dan Nomor 017/SUE-PKS/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang sewa sebagian tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

3. PD. BPR Bank Sumedang seluas 15 m<sup>2</sup> berlokasi di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang digunakan sebagai kantor kas PD. BPR Bank Sumedang sesuai Perjanjian Kerja Sama antara Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang selaku Pengelola Barang dengan PD. BPR Bank Sumedang Nomor 030/PKS/45.KS/2019 dan Nomor 20/SPK/BPR-Smd/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang sewa sebagian tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk kantor kas PD. BPR Bank Sumedang dan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama antara Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang dengan PD. BPR Bank Sumedang Nomor 033/PKS.73-KS/2020 dan Nomor 0019/SPK/BPR-Smd01/XII/2020 tentang sewa tanah dan atau bangunan milik Pemda Kabupaten Sumedang dengan luas 9 m<sup>2</sup> untuk dimanfaatkan sebagai ATM.
4. PT BRI (PERSERO) Tbk Sumedang seluas 25 m<sup>2</sup> berlokasi di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang sesuai Perjanjian Kerja Sama antara Pemda Kabupaten Sumedang dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Cabang Sumedang Nomor B/14/KU.03.07/X/2022 dan Nomor B.2491 KC-VI/LYI/10/2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang sewa sebagian tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
5. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk seluas 3,5 m<sup>2</sup> berlokasi di ruang galeri ATM Mal Pelayanan Publik (MPP) Sumedang dimanfaatkan untuk penempatan mesin ATM sesuai Perjanjian Kerja Sama antara Dinas PMPTSP dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sumedang Nomor SDG/1/PKS-ATM/027/2020 tanggal 9 Oktober 2020.

Selain itu juga digunakan oleh pihak ketiga/pihak lain dengan pinjam pakai sebanyak 14 bidang tanah seluas 13.281,20 m<sup>2</sup> yaitu digunakan untuk tujuh Markas Polisi Sektor, Pos Lantas, Pengadilan Agama Kelas 1, UPT DPPKB, Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS), Pondok Pesantren, Lapangan Serbaguna Desa Sindangpakuon dan Kantor Sekretariat Gabungan Organisasi Wanita. Rincian pada **Lampiran 13 – Rincian Tanah Pinjam Pakai**.

Nilai Aset Tanah ini tidak termasuk Aset Tanah yang ada di Neraca Akhir Likuidasi (NAL) PD. BPR dalam likuidasi sebesar Rp288.103.698,00 yang di atasnya berdiri bangunan PD. BPR. Aset Tanah dan Bangunan ini terdapat pada PD. BPR Conggeang sebesar Rp21.712.778,00 PD. BPR (DL) Situraja sebesar Rp159.885.120,00, PD. BPR (DL) Sumedang Utara sebesar Rp45.000.000,00 dan di PD. BPR (DL) Cadasngampar sebesar Rp61.505.800,00. Sementara PD. BPR (DL) Tanjungkerta dan PD. BPR (DL) Sumedang Selatan tidak mempunyai Aset Tanah dan Bangunan berdasarkan NAL. Tanah pada PD. BPR likuidasi merupakan tanah yang berada dalam penguasaan Bank Indonesia sebagai jaminan dana talang PD. BPR likuidasi.

Sedangkan beberapa Aset Tanah yang digunakan untuk sarana kesehatan dan pendidikan tetapi tidak masuk dalam neraca daerah karena bukan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, meskipun di atasnya berdiri bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten

Sumedang yaitu 19 UPT Puskesmas pada Dinkes dan 37 bangunan sekolah pada Disdik. Rincian **Lampiran 14 – Rincian Tanah Bukan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.**

Berdasarkan hasil penilaian tanah pada KIB, Kabupaten Sumedang mempunyai Aset Tetap Tanah yang sudah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat yang seluruhnya dicatat di dalam KIB. Saat ini terdapat 332 bidang tanah yang sudah bersertifikat seluas 1.303.506,45 M<sup>2</sup> dengan nilai sebesar Rp83.448.916.225,41. Rincian **Lampiran 15 – Rincian Tanah Bersertifikat.**

#### 5.1.6.3.2. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.620.650.976.708,34 mengalami kenaikan sebesar Rp94.948.616.559,39 (6,22%) dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.525.702.360.148,95. Rekap Aset Tetap Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
Alat Besar	19.668.128.319,29	19.088.182.992,29	579.945.327,00
Alat Angkutan	184.481.508.872,35	175.466.408.918,35	9.015.099.954,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	18.594.403.692,07	18.569.836.792,07	24.566.900,00
Alat Pertanian	9.525.450.507,87	9.383.231.517,87	142.218.990,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	299.675.853.600,72	278.835.372.715,65	20.840.480.885,07
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	250.399.313.164,48	247.327.761.666,30	3.071.551.498,18
Alat Kedokteran dan Kesehatan	278.277.751.723,87	253.620.391.641,37	24.657.360.082,50
Alat Laboratorium	94.324.083.352,74	93.819.130.308,36	504.953.044,38
Komputer	424.701.133.325,16	398.509.157.961,90	26.191.975.363,26
Alat Pengeboran	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	2.371.084.700,00	2.181.165.700,00	189.919.000,00
Alat Keselamatan Kerja	5.521.801.427,29	4.866.553.099,29	655.248.328,00
Alat Peraga	1.675.932.232,00	1.239.234.732,00	436.697.500,00
Peralatan Proses/Produksi	17.850.000,00	17.850.000,00	0,00
Rambu-rambu	29.992.895.256,62	21.654.742.456,62	8.338.152.800,00
Peralatan Olahraga	1.422.286.533,88	1.121.839.646,88	300.446.887,00
<b>Total</b>	<b>1.620.650.976.708,34</b>	<b>1.525.702.360.148,95</b>	<b>94.948.616.559,39</b>

Sedangkan rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada **Lampiran 16 - Rincian Peralatan dan Mesin.**

Nilai Aset Peralatan dan Mesin ini tidak termasuk Aset Peralatan dan Mesin yang ada di NAL PD. BPR dalam likuidasi yang berupa inventaris sebesar Rp14.959.850,00 dengan nilai akumulasi penyusutannya sebesar Rp14.959.850,00. PD. BPR (DL) yang mempunyai inventaris hanya di PD. BPR (DL) Cadasngampar, sedangkan di lima PD. BPR (DL) lainnya tidak mempunyai Aset Peralatan dan Mesin (inventaris) berdasarkan NAL. Nilai Aset Tetap Peralatan

dan Mesin per 31 Desember 2023 terbentuk dari mutasi tambah dan mutasi kurang selama periode berjalan, rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	<b>Saldo Audited 2022</b>	<b>1.525.702.360.148,95</b>
2.	<b>Mutasi Tambah</b>	<b>135.850.474.994,35</b>
	- Realisasi Belanja Modal	118.167.717.934,00
	- Hibah/Donasi/Bantuan (Non APBD)	596.869.038,00
	- Kapitalisasi	459.050.702,00
	- Mutasi Masuk SKPD	14.312.610.663,28
	- Reklas dari Gedung dan Bangunan	121.407.800,00
	- Reklas dari Aset Tetap Lainnya	328.885.494,07
	- Utang Belanja Modal	1.863.933.363,00
3.	<b>Mutasi Kurang</b>	<b>40.901.858.434,96</b>
	- Di Bawah Rp1.000.000,00 (Ekstrakomptabel)	16.973.281.462,69
	- Hibah/Donasi/Bantuan (Non APBD)	5.381.970.000,00
	- Mutasi Keluar SKPD	14.312.610.663,28
	- Koreksi Karena Pencatatan	806.208.435,00
	- Penghapusan	766.618.374,69
	- Reklas ke Gedung dan Bangunan	21.302.227,30
	- Reklas ke Aset Lainnya	2.548.141.717,00
	- Pengurangan Utang Belanja Modal	91.725.555,00
<b>Saldo Tahun 2023</b>		<b>1.620.650.976.708,34</b>

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama tahun 2023 terdiri dari:

Mutasi tambah berasal dari:

1. Realisasi Belanja Modal yang menambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp118.167.717.934,00 yang terdapat pada 48 SKPD. Rincian pada **Lampiran 17 – Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin.**
2. Hibah masuk terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp596.869.038,00 dari Kementerian Kesehatan.
3. Kapitalisasi pada tahun 2023 sebesar Rp459.050.702,00 yang terdapat pada lima SKPD, yaitu pada Dinas Pendidikan sebesar Rp42.997.000,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp306.004.800,00, Sekretariat Daerah sebesar Rp49.900.000,00, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp49.950.000,00 dan pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp10.198.902,00.
4. Mutasi Masuk antar SKPD merupakan perpindahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin di SKPD yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, yaitu pada 32 SKPD sebesar Rp14.312.610.663,28. Rincian pada **Lampiran 18 – Rincian Mutasi Masuk antar SKPD Peralatan dan Mesin.**
5. Reklas dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp121.407.800,00 pada Dinas Pendidikan.
6. Reklas dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp328.885.494,07 terdapat pada Dinas Pendidikan.

7. Utang Belanja Modal merupakan Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal sebesar Rp1.863.933.363,00 pada Dinas Kesehatan (Rumah Sakit Umum).

Mutasi kurang berasal dari:

1. Ekstrakomptabel merupakan nilai aset di bawah Rp1.000.000,00 pada 30 SKPD sebesar Rp16.959.037.414,69. Rincian pada **Lampiran 19 – Rincian Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin.**
2. Hibah keluar terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp5.381.970.000,00 kepada 28 Sekolah Swasta. Rincian pada **Lampiran 20 – Rincian Hibah Keluar Peralatan dan Mesin.**
3. Mutasi keluar merupakan perpindahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang terdapat pada 18 SKPD sebesar Rp14.312.610.663,28. **Rincian pada Lampiran 21 – Rincian Mutasi Keluar antar SKPD Peralatan dan Mesin.**
4. Koreksi karena pencatatan sebesar Rp806.208.435,00 terdapat pada 6 SKPD, yaitu pada Dinas Pendidikan sebesar Rp676.879.000,00, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp24.649.880,00, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sebesar Rp1.650.000,00, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp45.529.555,00, Kecamatan Darmaraja sebesar Rp47.500.000,00 dan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp10.000.000,00.
5. Penghapusan sebesar Rp766.618.374,69 terdapat pada 4 SKPD, yaitu pada Dinas Kesehatan sebesar Rp137.170.321,71, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sebesar Rp407.123.203,98, Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp208.374.849,00 dan Kecamatan Jatigede sebesar Rp13.950.000,00.
6. Reklas ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp21.302.227,30 terdapat pada Sekretariat Daerah.
7. Reklas ke Aset Lainnya sebesar Rp2.548.141.717,00 terdapat pada lima SKPD, yaitu pada Dinas Pendidikan sebesar Rp132.481.000,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp2.073.832.677,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp315.008.440,00, Dinas Perikanan dan Peternakan sebesar Rp3.500.000,00 dan Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp23.319.600,00.
8. Pengurangan Utang Belanja Modal sebesar Rp91.725.555,00 pada Dinas Kesehatan (Rumah Sakit Umum).

#### **5.1.6.3.3. Gedung dan Bangunan**

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 senilai Rp1.669.060.803.578,38 mengalami kenaikan sebesar Rp128.032.189.339,55 (8,31%) dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 senilai Rp1.541.028.614.238,83. Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.567.393.091.615,50	1.469.174.364.896,95	98.218.726.718,55
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	23.043.505.904,80	22.455.939.984,80	587.565.920,00
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	35.458.403.104,40	35.458.403.104,40	0,00
Bangunan Menara Perambuan	38.721.723.122,00	10.409.766.970,00	28.311.956.152,00
Tugu/Tanda Batas	4.444.079.831,68	3.530.139.282,68	913.940.549,00
<b>Total</b>	<b>1.669.060.803.578,38</b>	<b>1.541.028.614.238,83</b>	<b>128.032.189.339,55</b>

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 terbentuk dari mutasi tambah dan mutasi kurang selama periode berjalan, rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	<b>Saldo Audited 2022</b>	<b>1.541.028.614.238,83</b>
2.	<b>Mutasi Tambah</b>	<b>140.883.349.566,46</b>
	- Realisasi Belanja Modal	86.018.035.799,00
	- Atribusi Biaya Umum	2.635.291.935,00
	- Kapitalisasi	3.814.286.028,57
	- Korekasi Karena Pencatatan	5.639.471.000,00
	- Hibah/Donasi/Bantuan (Non APBD)	12.873.594.008,68
	- Mutasi Masuk antar SKPD	12.292.404.541,91
	- Reklas dari Peralatan dan Mesin	21.302.227,30
	- Reklas dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	17.588.964.026,00
3.	<b>Mutasi Kurang</b>	<b>12.851.160.226,91</b>
	- Hibah/Donasi/Bantuan (Non APBD)	437.347.885,00
	- Mutasi Keluar antar SKPD	12.292.404.541,91
	- Reklas ke Peralatan dan Mesin	121.407.800,00
	<b>Saldo Akhir Tahun 2022</b>	<b>1.669.060.803.578,38</b>

Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2023 terdiri dari:

Mutasi Tambah berasal dari :

1. Realisasi Belanja Modal yang merupakan penambahan nilai Aset Tetap senilai Rp86.018.035.799,00 pada 41 SKPD. Rincian pada **Lampiran 22 – Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan.**
2. Atribusi Biaya Umum merupakan biaya yang menambah Aset Tetap yang diluar belanja modal senilai Rp2.635.291.935,00 pada 13 SKPD. Rincian pada **Lampiran 23 – Rincian Atribusi Biaya Umum Gedung dan Bangunan.**
3. Kapitalisasi belanja pemeliharaan menjadi Aset Tetap sebesar Rp3.814.286.028,57 di 9 SKPD. Rincian pada **Lampiran 24 – Rincian Kapitalisasi Gedung dan Bangunan.**
4. Koreksi karena pencatatan sebesar Rp5.639.471.000,00 terdapat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah yang bersumber dari hasil penilaian aset tahun 2022 dicatat di tahun 2023.

5. Hibah/Donasi/Bantuan (Non APBD) masuk Gedung dan bangunan sebesar Rp12.873.594.008,68, terdapat pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, pada Dinas Perikanan dan Peternakan serta pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Rincian penerimaan Hibah Aset Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada **Lampiran 25 – Rincian Rincian Hibah Gedung dan Bangunan.**
6. Mutasi Masuk antar SKPD merupakan perpindahan Aset Tetap dari SKPD yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada 5 SKPD sebesar Rp12.292.404.541,91, yaitu perpindahan dari Inspektorat ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp918.965.097,00, dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ke Dinas Perikanan dan Peternakan sebesar Rp186.600.000,00, dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ke Inspektorat sebesar Rp9.844.919.000,00, dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ke Kecamatan Cisitu sebesar Rp859.510.444,91 dan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp482.410.000,00.
7. Reklas dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp21.302.227,30 terdapat pada Sekretariat Daerah.
8. Reklas dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp17.588.964.026,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Mutasi kurang berasal dari:

1. Hibah Gedung dan Bangunan sebesar Rp437.347.885,00 terdapat pada Dinas Pendidikan. Rincian pengeluaran Hibah Aset Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada **Lampiran 25 – Rincian Hibah Gedung dan Bangunan.**
2. Mutasi Keluar antar SKPD merupakan perpindahan Aset Tetap dari 4 SKPD sebesar Rp12.292.404.541,91 yaitu perpindahan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ke Inspektorat sebesar Rp9.844.919.000,00, dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp482.410.000,00, dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ke Dinas Perikanan dan Peternakan sebesar Rp186.600.000,00 dan ke Kecamatan Cisitu sebesar 859.510.444,91 serta dari Inspektorat ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp918.965.097,00.
3. Reklas ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp121.407.800,00, terdapat di Dinas Pendidikan.

Aset Tetap Gedung dan Bangunan ini sudah termasuk nilai bangunan yang berdiri diatas tanah bukan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yaitu 19 UPT Pusat Kesehatan pada Dinkes dan 37 bangunan sekolah pada Disdik. Nilai Aset Gedung dan Bangunan ini tidak termasuk Aset Gedung dan Bangunan yang ada di Neraca Akhir Likuidasi (NAL) PD. BPR (DL) sebesar Rp181.597.898,00 yaitu di PD. BPR Conggeang sebesar Rp21.712.778,00 dan PD. BPR Situraja sebesar Rp159.885.120,00. Sementara di empat PD. BPR (DL) lainnya tidak mempunyai Aset Gedung dan Bangunan berdasarkan NAL.

Aset Bangunan dan Gedung Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang disewa oleh pihak lain sebanyak tiga bidang tanah seluas 95 m<sup>2</sup> yaitu oleh:

- a) PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Sumedang seluas 55 m<sup>2</sup> berlokasi di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang untuk dimanfaatkan sebagai kantor kas PT BPD Jawa Barat dan Banten dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor B/1398/KU.03.07/VI/2023 dan Nomor 017/SUE-PKS/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang tentang sewa sebagian tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
- b) PD. BPR Bank Sumedang seluas 15 m<sup>2</sup> sesuai Perjanjian Kerja Sama antara Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang selaku Pengelola Barang dengan PD. BPR Bank Sumedang Nomor 030/PKS/45.KS/2019 dan Nomor 20/SPK/BPR-Smd/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang sewa sebagian tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk kantor kas PD. BPR Bank Sumedang.
- c) PT BRI (PERSERO) Tbk Sumedang seluas 25 m<sup>2</sup> sesuai Perjanjian Kerja Sama antara Pemda Kabupaten Sumedang dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero, TBK Cabang Sumedang Nomor B/14/KU.03.07/X/2022 dan Nomor B.2491 KC-VI/LYI/10/2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang sewa sebagian tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

#### 5.1.6.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.230.891.609.798,35, mengalami kenaikan sebesar Rp179.657.800.381,12 (5,89%) dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.051.233.809.417,23. Rekap Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
Jalan dan Jembatan	2.061.812.837.340,85	1.918.520.413.206,63	143.292.424.134,22
Bangunan Air	1.015.752.849.621,29	986.330.178.693,39	29.422.670.927,90
Instalasi	62.396.460.470,24	62.291.510.470,24	104.950.000,00
Jaringan	90.929.462.365,97	84.091.707.046,97	6.837.755.319,00
<b>Total</b>	<b>3.230.891.609.798,35</b>	<b>3.051.233.809.417,23</b>	<b>179.657.800.381,12</b>

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan lebih lengkapnya pada tabel berikut:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
Jalan	1.795.659.142.904,81	1.682.460.850.420,59	113.198.292.484,22
Jembatan	266.153.694.436,04	236.059.562.786,04	30.094.131.650,00
Bangunan Air Irigasi	818.739.293.935,29	795.490.353.246,29	23.248.940.689,00
Bangunan Pengairan Pasang Surut	2.566.781.166,67	2.566.781.166,67	0,00
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	178.414.071.111,72	173.874.891.583,39	4.539.179.528,33
Bangunan Pengembangan Sumber	1.214.412.451,30	800.412.451,30	414.000.000,00



Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Air dan Air Tanah			
Bangunan Air Bersih/Air Baku	11.452.739.345,94	11.373.328.648,40	79.410.697,54
Bangunan Air Kotor	3.365.551.610,37	2.224.411.597,34	1.141.140.013,03
Instalasi Air Bersih/Air Baku	40.402.900.944,27	40.402.900.944,27	0,00
Instalasi Air Kotor	10.844.772.725,00	10.844.772.725,00	0,00
Instalasi Pengolahan Sampah	576.036.000,00	471.086.000,00	104.950.000,00
Instalasi Pembangkit Listrik	6.775.160.088,77	6.775.160.088,77	0,00
Instalasi Gardu Listrik	3.794.932.585,00	3.794.932.585,00	0,00
Instalasi Pertahanan	2.658.127,20	2.658.127,20	0,00
Jaringan Air Minum	61.851.755.516,00	55.014.000.197,00	6.837.755.319,00
Jaringan Listrik	28.490.982.999,97	28.490.982.999,97	0,00
Jaringan Telepon	586.223.850,00	586.223.850,00	0,00
Jaringan Gas	500.000,00	500.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.230.891.609.798,35</b>	<b>3.051.233.809.417,23</b>	<b>179.657.800.381,12</b>

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 terbentuk dari mutasi tambah dan mutasi kurang selama periode berjalan, rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
<b>1.</b>	<b>Saldo Audited 2022</b>	<b>3.051.233.809.417,23</b>
<b>2.</b>	<b>Mutasi Tambah</b>	<b>231.848.751.430,12</b>
	- Realisasi Belanja Modal	175.796.888.261,00
	- Atribusi Biaya Umum	6.998.334.077,00
	- Kapitalisasi	8.182.430.438,00
	- Koreksi karena Pencatatan	7.937.289,00
	- Hibah/Donasi/Bantuan (Non APBD)	26.715.246.124,12
	- Mutasi Masuk antar SKPD	18.217.000,00
	- Reklas dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	14.129.698.241,00
<b>3.</b>	<b>Mutasi Kurang</b>	<b>52.190.951.049,00</b>
	- Mutasi Keluar antar SKPD	18.217.000,00
	- Penghapusan	5.609.445.500,00
	- Reklas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.517.863.596,00
	- Pengurangan Utang Belanja Modal 2022	44.045.132.415,00
	- Koreksi Penyesuaian Utang Tahun Lalu	292.538,00
	<b>Saldo Akhir Tahun 2023</b>	<b>3.230.891.609.798,35</b>

Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2023 terdiri dari mutasi tambah dan kurang.

Mutasi tambah berasal dari:

1. Realisasi Belanja Modal merupakan penambahan Aset Tetap tahun 2023 sebesar Rp175.796.888.261,00 pada 6 SKPD. Rincian pada **Lampiran 26 – Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**.
2. Atribusi Biaya Umum merupakan biaya penunjang yang menambah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diluar belanja modal sebesar Rp6.998.334.077,00, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp6.986.374.077,00 dan pada Kecamatan Sumedang Selatan sebesar Rp11.960.000,00.
3. Kapitalisasi merupakan belanja pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang di kapitalisasi menjadi Aset Tetap sebesar Rp8.182.430.438,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
4. Koreksi karena pencatatan sebesar Rp7.937.289,00 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
5. Hibah/Donasi/Bantuan (Non APBD) masuk Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp26.715.246.124,12 terdapat pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp23.270.571.545,42 dan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp3.444.674.578,70. Rincian penerimaan Hibah Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi dapat dilihat pada **Lampiran 27 - Rincian Hibah Jalan, Irigasi dan Jaringan**.
6. Mutasi Masuk antar SKPD merupakan perpindahan Aset Tetap dari SKPD yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebesar Rp18.217.000,00, terdapat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
7. Reklas dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp14.129.698.241,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Mutasi kurang berasal dari:

1. Mutasi keluar antar SKPD merupakan perpindahan Aset Tetap dari SKPD yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebesar Rp18.217.000,00, terdapat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Penghapusan sebesar Rp5.609.445.500,00, terdapat pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
3. Reklas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp2.517.863.596,00, terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
4. Pengurangan Utang Belanja Modal 2022 sebesar Rp44.045.132.415,00, terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
5. Koreksi Penyesuaian Utang Tahun Lalu sebesar Rp292.538,00, terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Menurut hasil inventarisasi ulang terhadap Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dilakukan oleh pengurus barang DPUPR yaitu dengan menganalisis KIB dan kondisi dilapangan, diketahui terdapat 41 Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan nilai perolehannya sebesar Rp24.842.472.163,91 yang telah terendam Waduk Jatigede dan masih tercatat sebagai Aset Tetap di Neraca. Dimana seharusnya Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dikeluarkan dari KIB-nya sehingga tidak lagi tercatat sebagai Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Hasil inventarisasi ini akan dijadikan dasar bagi pengguna barang untuk melakukan pengajuan permohonan ke Bidang Aset untuk proses reklasifikasi pencatatan dari Aset Tetap ke Aset Lainnya. Serta proses selanjutnya diteruskan dengan pengajuan usulan penghapusan barang milik daerah sebagai salah satu tahapan dalam alur penghapusan BMD.

#### 5.1.6.3.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp231.399.529.043,12 mengalami kenaikan sebesar Rp18.585.601.544,93 (8,73%) dari Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp212.813.927.498,19. Rekap Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
Bahan Perpustakaan	216.653.489.985,07	198.325.369.224,14	18.328.120.760,93
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	7.187.045.217,25	7.048.442.658,25	138.602.559,00
Hewan	92.045.000,00	92.045.000,00	0,00
Biota Perairan	400.000,00	400.000,00	0,00
Tanaman	536.840.975,00	417.962.750,00	118.878.225,00
Aset Tetap Dalam Renovasi	6.929.707.865,80	6.929.707.865,80	0,00
<b>Total</b>	<b>231.399.529.043,12</b>	<b>212.813.927.498,19</b>	<b>18.585.601.544,93</b>

Rincian Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
Bahan Perpustakaan Tercetak	215.312.644.084,07	197.070.937.123,14	18.241.706.960,93
Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	110.845.960,00	110.845.960,00	0,00
Kartografi, Naskah dan Lukisan	770.666.166,00	753.486.666,00	17.179.500,00
Musik	91.102.700,00	80.739.000,00	10.363.700,00
Karya Grafika (Graphic Material)	92.145.975,00	44.910.575,00	47.235.400,00
Three Dimensional Artifacts and Realita	144.435.100,00	132.799.900,00	11.635.200,00
Tarscalt	131.650.000,00	131.650.000,00	0,00
Barang Bercorak Kesenian	5.119.224.825,31	4.980.622.266,31	138.602.559,00
Alat Bercorak Kebudayaan	1.999.526.691,94	1.999.526.691,94	0,00
Tanda Penghargaan	68.293.700,00	68.293.700,00	0,00
Ternak	92.045.000,00	92.045.000,00	0,00
Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	400.000,00	400.000,00	0,00
Tanaman	536.840.975,00	417.962.750,00	118.878.225,00
Aset Tetap Dalam Renovasi	6.929.707.865,80	6.929.707.865,80	0,00
<b>Total</b>	<b>231.399.529.043,12</b>	<b>212.813.927.498,19</b>	<b>18.585.601.544,93</b>

Nilai Aset Tetap lainnya per 31 Desember 2023 terbentuk dari mutasi tambah dan mutasi kurang selama periode berjalan, rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	<b>Saldo Audited 2022</b>	<b>212.813.927.498,19</b>
2.	<b>Mutasi Tambah</b>	<b>19.326.830.162,00</b>
	- Realisasi Belanja Modal	19.324.226.162,00
	- Kapitalisasi	2.604.000,00
3.	<b>Mutasi Kurang</b>	<b>741.228.617,07</b>
	- Reklas ke Peralatan dan Mesin	328.885.494,07
	- Reklas ke Aset Lainnya	412.343.123,00
<b>Saldo Tahun 2023</b>		<b>231.399.529.043,12</b>

Mutasi Aset Tetap Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 terdiri dari mutasi tambah dan kurang.

Mutasi tambah berasal dari:

1. Realisasi Belanja Modal merupakan penambahan Aset Tetap tahun 2023 sebesar Rp19.324.226.162,00 terdapat pada 10 SKPD. Rincian pada **Lampiran 28 – Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.**
2. Kapitalisasi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.604.000,00 terdapat pada Dinas Pendidikan.

Dan mutasi kurang berasal dari:

1. Reklas ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp328.885.494,07 terdapat pada Dinas Pendidikan.
2. Reklas ke Aset Lainnya sebesar Rp412.343.123,00 yang terdapat di 6 SKPD. Rincian pada **Lampiran 29 - Rincian Reklas ke Aset Lainnya.**

#### 5.1.6.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp13.664.221.546,00 mengalami penurunan sebesar Rp29.200.798.671,00 (-68,13%) dari Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp42.865.020.217,00.

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	13.664.221.546,00	42.865.020.217,00	(29.200.798.671,00)
<b>Total</b>	<b>13.664.221.546,00</b>	<b>42.865.020.217,00</b>	<b>(29.200.798.671,00)</b>

Nilai Kontruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 terbentuk dari mutasi tambah dan mutasi kurang selama periode berjalan. Rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	<b>Saldo Audited Tahun 2022</b>	<b>42.865.020.217,00</b>
2	<b>Mutasi Tambah</b>	<b>2.517.863.596,00</b>
	- Reklas dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.517.863.596,00
3	<b>Mutasi Kurang</b>	<b>31.718.662.267,00</b>
	- Reklas ke Gedung dan Bangunan	17.588.964.026,00
	- Reklas ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	14.129.698.241,00
<b>Total Tahun 2023</b>		<b>13.664.221.546,00</b>

Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2023 terdiri dari mutasi tambah dan kurang.

Mutasi tambah berasal dari Reklas dari Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp2.517.863.596,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Mutasi tambah tersebut merupakan reklas dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan di empat lokasi yang berbeda, yaitu di Kecamatan Ganeas, Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Sumedang Utara Ruas Jalan Cisumur - Nanggerang/Bts. Kab.Subang (Wilayah 8) yang pengerjaannya belum selesai dan belum bisa digunakan.

Mutasi kurang berasal dari:

1. Reklas ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp17.588.964.026,00, terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
2. Reklas ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar 14.129.698.241,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Dengan rincian pada **Lampiran 30 – Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan**.

#### **5.1.6.3.7. Akumulasi Penyusutan**

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar (Rp4.100.427.603.644,00) mengalami kenaikan sebesar (Rp451.514.254.135,25) (12,39%) dari Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp3.648.913.349.508,75). Adapun kenaikan tersebut terdiri dari penyusutan Peralatan dan Mesin naik sebesar (Rp185.913.528.241,25) (17,96%), penyusutan gedung dan bangunan naik sebesar (Rp66.733.043.592,00) (11,68%) dan kenaikan dari akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar (Rp198.867.682.302,00) (9,74%). Rincian akumulasi penyusutan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	Persentase %
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.221.220.007.897,00	1.035.306.479.655,75	185.913.528.241,25	17,96
Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	638.264.549.606,00	571.531.506.014,00	66.733.043.592,00	11,68
Akumulasi Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.240.943.046.141,00	2.042.075.363.839,00	198.867.682.302,00	9,74
<b>Total</b>	<b>4.100.427.603.644,00</b>	<b>3.648.913.349.508,75</b>	<b>451.514.254.135,25</b>	<b>12,37</b>

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 terbentuk dari mutasi tambah dan mutasi kurang selama periode berjalan, rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	<b>Saldo Audited 2022</b>	<b>3.648.913.349.508,75</b>
2.	<b>Mutasi Tambah</b>	<b>473.251.861.293,50</b>
	- Koreksi Akumulasi Penyusutan	7.927.456.824,52
	- Mutasi Masuk SKPD	12.673.747.368,00
	- Beban Penyusutan di LO	452.650.657.100,98
3.	<b>Mutasi Kurang</b>	<b>21.737.607.158,25</b>
	- Mutasi Keluar SKPD	12.673.747.368,00
	- Penghapusan	745.644.744,25
	- Koreksi Akumulasi Penyusutan	5.778.432.415,00
	- Reklas Ke Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	2.539.782.631,00
<b>Saldo Tahun 2023</b>		<b>4.100.427.603.644,00</b>

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2023 terdiri dari mutasi tambah dan kurang.

Mutasi tambah berasal dari:

1. Koreksi akumulasi penyusutan sebesar 7.927.456.824,52 terdapat pada 30 SKPD.
2. Mutasi masuk SKPD sebesar Rp12.673.747.368,00 terdapat pada 31 SKPD.
3. Beban Penyusutan di LO sebesar 452.650.657.100,98 terdapat pada seluruh SKPD.

Mutasi kurang berasal dari:

1. Mutasi keluar SKPD sebesar Rp12.673.747.368,00 terdapat pada 31 SKPD.
2. Penghapusan sebesar Rp745.644.744,25 terdapat pada 4 SKPD, pada Dinas Kesehatan sebesar Rp131.257.456,00, pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sebesar Rp392.916.605,25, pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp207.520.683,00 dan pada Kecamatan Jatigede sebesar Rp13.950.000,00.
3. Koreksi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp5.778.432.415,00 terdapat pada 20 SKPD.
4. Reklas Ke Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain sebesar Rp2.539.782.631,00 terdapat pada 4 SKPD, yaitu pada Dinas Pendidikan sebesar Rp132.481.000,00, pada Dinas

Kesehatan (RSU) sebesar Rp2.068.973.591,00, pada Dinas Perhubungan sebesar Rp315.008.440,00 serta pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp3.319.600,00.

Sedangkan Rincian kenaikan dan penurunan Akumulasi Penyusutan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 31 : Rincian Akumulasi Penyusutan**.

#### 5.1.6.4. Dana Cadangan

Dana Cadangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang per 31 Desember 2023 sebesar Rp40.449.173.049,00 mengalami kenaikan sebesar Rp25.448.235.549,00 (169,64%) dari Dana Cadangan per 31 Desember 2022 sebesar Rp15.000.937.500,00.

Dana Cadangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2024. Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk menyediakan dana guna membiayai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebesar Rp40.000.000.000,00 yang dipenuhi selama dua tahun anggaran dimana setiap tahun anggaran ditetapkan melalui APBD secara bertahap dengan besaran sebagai berikut :

- a. APBD Perubahan TA 2022 sebesar Rp15.000.000.000,00;
- b. APBD TA 2023 sebesar Rp15.000.000.000,00; dan
- c. APBD Perubahan TA 2023 sebesar Rp10.000.000.000,00.

Per 31 Desember 2023, Dana Cadangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 telah terpenuhi sebesar Rp40.000.000.000,00. Pada TA 2022 terdapat pendapatan bunga Dana Cadangan yang menambah nilai dana cadangan sebesar Rp937.500,00, sedangkan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp448.235.549,00 sehingga total pendapatan bunga dana cadangan yang menambah nilai Dana Cadangan adalah sebesar Rp449.173.049,00.

#### 5.1.6.5. Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp36.561.535.044,99 mengalami kenaikan sebesar Rp20.327.291.173,24 (125,21%) dari nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp16.234.243.871,75. Rincian Aset Lainnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	Persentase %
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	346.289.612,00	342.006.312,00	4.283.300,00	1,25
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	69.173.543,00	69.173.543,00	0,00	0,00
Aset Tak Berwujud	49.464.493.935,26	46.127.823.312,26	3.336.670.623,00	7,23
Aset Lain-lain	42.718.990.580,32	43.926.696.727,67	(1.207.706.147,35)	(2,75)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(44.216.328.631,59)	(42.951.089.531,93)	(1.265.239.099,66)	2,95
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(41.397.117.994,00)	(42.527.887.464,25)	1.130.769.470,25	(2,66)
Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	29.576.034.000,00	11.247.520.973,00	18.328.513.027,00	162,96
<b>Total</b>	<b>36.561.535.044,99</b>	<b>16.234.243.871,75</b>	<b>20.327.291.173,24</b>	<b>125,21</b>

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2023 terbentuk dari mutasi tambah dan mutasi kurang selama periode berjalan, rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

o	Uraian	Jumlah
1.	<b>Saldo Audited 2022</b>	<b>16.234.243.871,75</b>
2.	<b>Mutasi Tambah</b>	<b>27.407.842.952,71</b>
	- Realisasi Belanja Modal	2.924.327.500,00
	- Tuntutan Ganti Rugi	4.283.300,00
	- Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	163.405.168,05
	- Reklas dari Peralatan dan Mesin	2.521.322.117,00
	- Reklas dari aset lainnya	2.886.327.500,00
	Reklas dari Aset Tetap lainnya	412.343.123,00
	- Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	18.495.834.244,66
3.	<b>Mutasi Kurang</b>	<b>7.080.551.779,47</b>
	- Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud di LO	1.426.539.559,46
	- Koreksi Pencatatan Amortisasi	7.600.000,00
	- Beban Penyusutan Aset Lain-lain	83.660.609,00
	- Penghapusan	159.961.080,01
	- Reklas ke Aset tidak berwujud	2.886.327.500,00
	- Reklas dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	2.516.463.031,00
	<b>Saldo TA 2023</b>	<b>36.561.535.044,99</b>

#### 5.1.6.5.1. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp346.289.612,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.283.300,00 (1,25%) dari nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp342.006.312,00. Rincian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	346.289.612,00	342.006.312,00	4.283.300,00
<b>Total</b>	<b>346.289.612,00</b>	<b>342.006.312,00</b>	<b>4.283.300,00</b>

Penambahan Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp4.283.300,00 (1,25%), berasal dari penambahan aset lainnya TGR tahun 2023 sebesar Rp8.900.000,00, penyesuaian pengurangan aset lainnya TGR tahun 2023 sebesar Rp6.000.000,00 dan penerimaan dari reklasifikasi bagian lancar TGR sebesar Rp1.383.300,00.

- a) Penambahan asset lainnya TGR Tahun 2023 sebesar Rp8.900.000,00 merupakan nilai yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya (BULTEK SAP No. 16 Tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrual Tahun 2014). Dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	LHPK	Jumlah Kerugian (Rp)	Nilai yang akan dilunasi diatas 12 bulan berikutnya (Rp)
1	WAWAN GUNAWAN (Motor Dinas)	Kepala Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong	LHPK R/07/PS.03.02/Riksus/IV/2023 tanggal 28 April 2023	25.000.000,00	3.000.000,00



No.	Nama	Jabatan	LHPK	Jumlah Kerugian (Rp)	Nilai yang akan dilunasi diatas 12 bulan berikutnya (Rp)
2	N. SITI NUR'AENI SOFA, S.Pd., M.Pd (Motor Dinas)	Kepala Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara	LHPK R/05/PS.03.02/Riksus/IV/2023 tanggal 28 April 2023	25.000.000,00	3.000.000,00
3	IWAN GUNAWAN (Motor Dinas)	Penyuluh Pertanian di UPTD PKP Wilayah Jatigede	LHPK R/10/PS.03.02/Riksus/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023	13.700.000,00	2.900.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>63.700.000,00</b>	<b>8.900.000,00</b>

- b) Penyesuaian pengurangan Aset Lainnya TGR tahun 2023 sebesar Rp6.000.000,00 merupakan setoran ganti rugi yang masuk ke Kas Daerah selama tahun 2023 dari TGR yang macet (lebih dari 5 tahun). Rincian pada **Lampiran 32 – Rincian Aset Lainnya Tuntutan Ganti Rugi.**
- c) Penerimaan dari reklasifikasi Bagian Lancar TGR sebesar Rp1.383.300,00 merupakan nilai Piutang Lancar TGR yang berpindah ke Aset Lainnya TGR karena waktu penyelesaian TGR-nya sudah lebih dari perjanjian pembayaran sehingga masuk kategori kurang lancar. Reklasifikasi nilai TGR ini atas Nama Hetty Yuliah, SP., MP (Kasubag TU UPTD Balai Benih Hortikultura dan Pembibitan Perkebunan Rancakalong pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang) atas LHP 700/20/Riksus.TPTGR./Inspt/ 2021 tanggal 20 September 2021 dengan ketetapan nilai TGR sebesar Rp25.150.000,00, sudah dibayar sebesar Rp11.000.000,00 dan sisanya yang kurang lancar sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp 14.150.000,00.

#### 5.1.6.5.2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga atau BGS/BSG yaitu Tanah yang digunakan untuk Bangunan PPKS. Luas tanah yang tercatat di KIB A (Tanah) yaitu 11.401 m<sup>2</sup>. Perolehan pada tahun 1980 dengan nilai sebesar Rp69.173.543,00. Sesuai perjanjian kerja sama Nomor 511/PKS.50-Huk/2013 tanggal 20 September 2013, PT Bangun Jaya Alia melakukan kerjasama BGS selama 25 tahun.

#### 5.1.6.5.3. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp49.464.493.935,26 mengalami kenaikan sebesar Rp3.336.670.623,00 (7,23%) dari nilai Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp46.127.823.312,26. Aset Tidak Berwujud ini berupa:

- Lisensi dan *Frenchise* sebesar Rp941.479.658,00 pada Dinas Kesehatan (Rumah Sakit Umum) sebesar Rp519.822.755,00 dan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sebesar Rp421.656.903,00.
- *Software* yang berada di 54 SKPD sebesar Rp48.523.014.277,26 mengalami kenaikan sebesar Rp2.949.819.000,00 (6,47%) dari saldo Tahun 2022 sebesar Rp45.573.195.277,26.

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	Persentase %
Lisensi dan <i>Frenchise</i>	941.479.658,00	554.628.035,00	386.851.623,00	69,75
<i>Software</i>	48.523.014.277,26	45.573.195.277,26	2.949.819.000,00	6,47
<b>Total</b>	<b>49.464.493.935,26</b>	<b>46.127.823.312,26</b>	<b>3.336.670.623,00</b>	<b>7,23</b>

Rincian per SKPD-nya dapat dilihat pada **Lampiran 33 – Rincian Aset Tidak Berwujud**.

Nilai Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 terbentuk dari mutasi tambah selama periode berjalan, rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Uraian	Jumlah
1.	<b>Saldo Audited 2022</b>	<b>46.127.823.312,26</b>
2.	<b>Mutasi Tambah</b>	<b>3.336.670.623,00</b>
	- Realisasi Belanja Modal	38.000.000,00
	- Reklas dari Aset Tetap Lainnya	412.343.123,00
	- Reklas dari Aset lainnya	2.886.327.500,00
	<b>Saldo TA 2023</b>	<b>49.464.493.935,26</b>

Mutasi Aset Tidak Berwujud tahun 2023 terdiri dari mutasi tambah yang berasal dari:

1. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp38.000.000,00 terdapat pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.
2. Reklas dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp412.343.123,00 terdapat pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp49.894.000,00, pada Dinas Perhubungan sebesar Rp49.950.000,00, pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sebesar Rp237.524.123,00, pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp25.000.000,00, pada Sekretariat DPRD sebesar Rp25.000.000,00 dan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp24.975.000,00.
3. Reklas dari Aset Lainnya sebesar Rp2.886.327.500,00 terdapat pada Dinas Kesehatan (Rumah Sakit Umum).

#### 5.1.6.5.4. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 dari seluruh SKPD sebesar Rp42.718.990.580,32 mengalami penurunan sebesar Rp1.207.706.147,35 (-2,75%) dari Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp43.926.696.727,67. Rincian Aset Lain-Lain per SKPD dilihat pada

#### Lampiran 34 – Rincian Aset Lain-Lain.

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Aset Rusak Berat/Usang	42.718.990.580,32	43.926.696.727,67	(1.207.706.147,35)
<b>Total</b>	<b>42.718.990.580,32</b>	<b>43.926.696.727,67</b>	<b>(1.207.706.147,35)</b>

Nilai Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 terbentuk dari mutasi selama periode berjalan, rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Uraian	Jumlah
1.	<b>Saldo Audited 2022</b>	<b>43.926.696.727,67</b>
2.	<b>Mutasi Tambah</b>	<b>5.430.969.217,00</b>
	- Realisasi Belanja Modal	2.886.327.500,00
	- Reklas dari Peralatan dan Mesin	2.544.641.717,00
3.	<b>Mutasi Kurang</b>	<b>6.638.675.364,35</b>
	- Penghapusan	3.752.347.864,35
	- Reklas ke Aset Tidak Berwujud	2.886.327.500,00
	<b>Saldo TA 2023</b>	<b>42.718.990.580,32</b>

Mutasi Aset Lain-Lain tahun 2023 terdiri dari mutasi tambah dan mutasi kurang.

Mutasi tambah berasal dari:

1. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp2.886.327.500,00 terdapat pada Dinas Kesehatan (Rumah Sakit Umum).
2. Reklas dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.544.641.717,00 terdapat pada 4 SKPD, yaitu pada Dinas Pendidikan sebesar Rp132.481.000,00, pada Dinas Kesehatan (Rumah Sakit Umum) sebesar Rp2.073.832.677,00, pada Dinas Perhubungan sebesar Rp315.008.440,00, pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp23.319.600,00.

Mutasi kurang berasal dari:

1. Penghapusan sebesar Rp3.752.347.864,35 terdapat pada 15 SKPD. Rincian pada **Lampiran 34 – Rincian Aset Lain-lain.**
2. Reklas ke Aset Tidak Berwujud sebesar Rp2.886.327.500,00 pada Dinas Kesehatan (Rumah Sakit Umum).

#### 5.1.6.5.4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp44.216.328.631,59 mengalami kenaikan sebesar Rp1.265.239.099,66 (2,95%) dari saldo tahun 2022 sebesar Rp42.951.089.531,93.

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	44.216.328.631,59	42.951.089.531,93	1.265.239.099,66
<b>Total</b>	<b>44.216.328.631,59</b>	<b>42.951.089.531,93</b>	<b>1.265.239.099,66</b>

Rincian nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Per SKPD dapat di lihat lebih rinci pada **Lampiran 35 – Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud**.

Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 terbentuk dari mutasi selama periode berjalan, rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Uraian	Jumlah
1.	<b>Saldo Audited 2022</b>	<b>42.951.089.531,93</b>
2.	<b>Mutasi Tambah</b>	<b>1.426.539.559,46</b>
	- Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud di LO	1.426.539.559,46
3.	<b>Mutasi Kurang</b>	<b>161.300.459,80</b>
	- Koreksi Amortisasi	161.300.459,80
	<b>Saldo TA 2023</b>	<b>44.216.328.631,59</b>

Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun 2023 terdiri dari mutasi tambah dan mutasi kurang. Mutasi tambah berasal dari Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud di LO sebesar Rp1.426.539.559,46 terdapat pada seluruh SKPD. Sedangkan mutasi kurang berasal dari Koreksi Amortisasi sebesar 161.300.459,80 terdapat pada Dinas Kesehatan (Rumah Sakit Umum) sebesar Rp33.082.460,00 dan pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp128.217.999,80.

#### 5.1.6.5.4. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain sebesar Rp41.397.117.994,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.130.769.470,25 (-2,66%) dari saldo tahun 2022 sebesar Rp42.527.887.464,25.

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	41.397.117.994,00	42.527.887.464,25	(1.130.769.470,25)
<b>Total</b>	<b>41.397.117.994,00</b>	<b>42.527.887.464,25</b>	<b>(1.130.769.470,25)</b>

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain ini dapat dilihat pada **Lampiran 34 – Rincian Aset Lain-Lain**.

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 terbentuk dari mutasi selama periode berjalan, rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Uraian	Jumlah
1.	<b>Saldo Audited 2022</b>	<b>42.527.887.464,25</b>
2.	<b>Mutasi Tambah</b>	<b>2.547.382.648,27</b>
	- Koreksi karena Pencatatan	7.600.000,00
	- Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	17,27
	- Reklas dari Peralatan dan Mesin	23.319.600,00
	- Reklas dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	2.516.463.031,00
3.	<b>Mutasi Kurang</b>	<b>3.678.152.118,86</b>
	- Penghapusan	3.592.386.784,34
	- Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	2.104.725,52
	- Beban Penyusutan Aset Lain-Lain	83.660.609,00
<b>Saldo TA 2023</b>		<b>41.397.117.993,66</b>

Mutasi akumulasi penyusutan aset lain-lain tahun 2023 terdiri dari mutasi tambah dan mutasi kurang.

Mutasi tambah berasal dari:

1. Koreksi karena Pencatatan sebesar Rp7.600.000,00 terdapat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain sebesar Rp17,27 terdapat pada 5 SKPD, yaitu pada Dinas Sosial sebesar Rp2,00, pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp1,00, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp13,00, pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp1,00 serta pada Kecamatan Sukasari sebesar Rp0,27.
3. Reklas dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp23.319.600,00 terdapat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
4. Reklas Ke Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain sebesar Rp2.516.463.031,00 terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp132.481.000,00, pada Dinas Kesehatan (Rumah Sakit Umum) sebesar Rp2.068.973.591,00 dan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp315.008.440,00.

Mutasi kurang berasal dari:

1. Penghapusan sebesar Rp3.592.386.784,34 terdapat pada 14 SKPD.
2. Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain sebesar Rp2.104.725,52 terdapat pada 4 SKPD, yaitu pada Dinas Kesehatan (Rumah Sakit Umum) sebesar Rp2.103.721,00, pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp0,41, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp0,11 dan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp1.004,00.
3. Beban Penyusutan Aset Lain-Lain sebesar Rp83.660.609,00 terdapat pada 6 SKPD.

#### **5.1.6.5.4. Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)**

Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp29.576.034.000,00 merupakan uang Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang disimpan di rekening transitoris Bank Indonesia, mengacu pada Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-54/PK/PK.2/2024 tanggal 26 Maret 2024 perihal Penyaluran Dana TDF ke RKUD dalam rangka Mendukung Kebutuhan Belanja Daerah TA 2024. Dana Transfer TDF dicatat sebagai Pendapatan di LO yang terdiri dari DBH PBB-LO sebesar Rp2.978.742.000,00, DBH PPh Pasal 21-LO sebesar Rp8.623.677.000,00, DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29-LO sebesar Rp1.141.346.000,00, DBH SDA Minyak Bumi-LO sebesar Rp2.709.342.000,00, DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO sebesar Rp14.024.413.000,00, DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO sebesar Rp98.514.000,00.

### 5.1.7. Kewajiban

Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang per 31 Desember 2023 sebesar Rp54.253.007.721,49 mengalami penurunan sebesar (Rp37.504.725.791,91) (40,87%) dari Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp91.757.733.513,40. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang per 31 Desember 2023 hanya mempunyai Kewajiban Jangka Pendek.

#### 5.1.7.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp54.253.007.721,49 mengalami penurunan sebesar (Rp37.504.725.791,91) (40,87%) dari Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 sebesar Rp91.757.733.513,40. Rincian Kewajiban Jangka Pendek dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Utang PFK	0,00	3.277.500,00	(3.277.500,00)
2	Pendapatan Diterima Dimuka	2.209.452.472,49	2.367.125.480,40	(157.673.007,91)
3	Utang Belanja	51.810.728.979,00	82.764.944.871,00	(30.954.215.892,00)
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	232.826.270,00	6.622.385.662,00	(6.389.559.392,00)
	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>54.253.007.721,49</b>	<b>91.757.733.513,40</b>	<b>(37.504.725.791,91)</b>

##### 5.1.7.1.1. Utang PFK

Utang PFK per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00, sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp3.277.500,00 merupakan Utang PPh 21 pada Kecamatan Sumedang Selatan yang belum disetorkan per 31 Desember 2022. Utang PPh 21 ini terdiri dari utang PPh 21 atas belanja honorarium tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp27.500,00 dan utang PPh 21 atas narasumber Pemilu sebesar Rp3.250.000,00. Kecamatan Sumedang Selatan baru membayar seluruh utang PPh 21 tersebut pada tanggal 19 Januari 2023 sehingga per 31 Desember 2023, utang PPh tersebut telah lunas.

##### 5.1.7.1.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.209.452.472,49 mengalami penurunan sebesar (Rp157.673.007,91) (6,66%) dari nilai per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.367.125.480,40. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan selisih kenaikannya dapat dijelaskan pada tabel berikut:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1.	Pendapatan diterima dimuka atas Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	359.565.140,27	258.526.714,29	101.038.425,98
3.	Pendapatan diterima dimuka atas Pajak Reklame (Bapenda)	1.378.427.272,74	1.101.157.024,68	277.270.248,06

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
4.	Pendapatan Diterima Dimuka dari Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Dishub)	156.941.659,48	443.271.071,43	(286.329.411,95)
5.	Pendapatan diterima dimuka atas retribusi pengawasan menara telekomunikasi (Diskominfo sanditik)	0,00	564.170.670,00	(564.170.670,00)
6.	Pendapatan diterima dimuka atas uang muka pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan (RSUD)	314.518.400,00	0,00	314.518.400,00
	<b>Total</b>	<b>2.209.452.472,49</b>	<b>2.367.125.480,40</b>	<b>(157.673.007,91)</b>

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka atas Pajak Reklame (Bapenda) yang diterima tahun 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1.	Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame Papan/Bilboard/videotron/Megatron	1.366.048.309,89	1.092.940.371,38	273.107.938,51
2.	Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame Kain	4.042.527,72	1.248.024,19	2.794.503,53
3.	Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame Berjalan	8.336.435,13	6.968.629,11	1.367.806,02
	<b>Total</b>	<b>1.378.427.272,74</b>	<b>1.101.157.024,68</b>	<b>277.270.248,06</b>

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa Pendapatan Diterima Dimuka atas Pajak Reklame mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan tertinggi berada pada Pendapatan Diterima Dimuka atas Pajak Reklame Papan/Bilboard/videotron/Megatron.

Selanjutnya, BLUD RSUD mencatat pendapatan bulan berjalan termasuk didalamnya penambahan Pendapatan Diterima Dimuka atas uang muka pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan pada akun Pendapatan dari BLUD-LRA dan Pendapatan dari BLUD-LO. Kemudian, penambahan Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp7.001.509.000,00 dan Rp314.518.400,00 yang sebelumnya dicatat pada Pendapatan dari BLUD-LO dipindahkan ke akun Setoran Kelebihan Pembayaran Pihak Ketiga (Pendapatan Diterima Dimuka dengan cara mengurangi Pendapatan dari BLUD-LO dan menambah Setoran Kelebihan Pembayaran Pihak Ketiga (Pendapatan Diterima Dimuka).

Pada September TA 2023, Pendapatan Diterima Dimuka senilai Rp7.001.509.000,00 telah dikurangi karena habis masa manfaat, sehingga Pendapatan Diterima Dimuka atas uang muka pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan pada RSUD per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp314.518.400,00.



### 5.1.7.1.3. Utang Belanja

Utang Belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp51.810.728.979,00 mengalami penurunan sebesar (Rp30.954.215.892,00) (37,40%) dari Utang Belanja per 31 Desember 2022 sebesar Rp82.764.944.871,00. Rincian Utang Belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

No	SKPD	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Dinas Kesehatan	Utang Belanja Jasa	1.688.721.210,00	34.287.350,00	1.654.433.860,00
2	RSUD	Utang Belanja Barang dan Jasa	43.669.876.247,00	31.571.283.057,00	12.098.593.190,00
		Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.073.004.264,00	300.796.456,00	1.772.207.808,00
3	BLUD Puskesmas Dinkes	Utang Belanja Jasa	4.225.927.606,00	3.539.352.905,00	686.574.701,00
		Utang Belanja Barang	146.917.000,00	117.845.700,00	29.071.300,00
4	DPUTR	Utang Belanja Jasa	0,00	2.713.297.246,00	(2.713.297.246,00)
		Utang Belanja Modal	0,00	44.045.132.415,00	(44.045.132.415,00)
5	BKAD	Utang Belanja Pegawai	6.282.652,00	442.949.742,00	(436.667.090,00)
<b>Jumlah Utang Belanja</b>			<b>51.810.728.979,00</b>	<b>82.764.944.871,00</b>	<b>(30.954.215.892,00)</b>

Rincian Utang Belanja Jasa Dinas Kesehatan berupa Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp1.688.721.210,00 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1.	Utang pelayanan kesehatan program Jamkesda pada Rumah Sakit Pusat Mata Cicendo Bandung	0,00	13.438.400,00	(13.438.400,00)
2.	Utang pelayanan kesehatan program Jamkesda pada RSHS Bandung	0,00	20.848.950,00	(20.848.950,00)
3.	Utang Belanja kepada BPJS berupa Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPB dan BP Kelas 3 yang didaftarkan oleh Pemda (PBPB Pemda)	1.658.100.410,00	0,00	1.658.100.410,00
4.	Utang Belanja kepada BPJS berupa Iuran Jaminan/Asuransi-Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPB dan BP Kelas 3 yang mendaftarkan diri secara mandiri	30.620.800,00	0,00	30.620.800,00
<b>Total</b>		<b>1.688.721.210,00</b>	<b>34.287.350,00</b>	<b>1.654.433.860,00</b>

Utang RSUD Kabupaten Sumedang per 31 Desember 2023 sebesar Rp45.742.880.511,00 merupakan utang operasional BLUD RSUD yang rinciannya dapat dilihat pada **Lampiran 36 – Rincian Utang Belanja BLUD RSUD**.

Utang Belanja Jasa BLUD Puskesmas Dinkes per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.225.927.606,00 merupakan Utang Belanja Jasa Pelayanan, kemudian Utang Belanja Barang BLUD Puskesmas Dinkes sebesar Rp146.917.000,00 merupakan Utang Belanja Makan

Minum pasien. Rincian utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan dapat dilihat pada **Lampiran 37 – Rincian Utang Belanja BLUD Puskesmas.**

Utang Belanja DPUTR per 31 Desember 2022 senilai Rp46.758.429.661,00 merupakan Utang Belanja Jasa sebesar Rp2.713.297.246,00 dan Utang Belanja Modal sebesar Rp44.045.132.415,00 dimana utang tersebut merupakan utang atas 102 paket pekerjaan yang SPM nya sudah dibuat namun SP2D nya tidak terbit dan cair per 31 Desember 2022. Pada TA 2023, utang belanja jasa tersebut telah dibayar dengan SP2D Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.731.004.708,00 dan penyesuaian utang terhadap kapitalisasi Aset Tetap sebesar Rp292.538,00 serta Utang Belanja Modal telah dibayar dengan SP2D Belanja Modal sebesar Rp44.045.132.415,00.

Utang Belanja Pegawai BKAD Per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.282.652,00 merupakan sisa kewajiban Iuran Wajib Pemda sebesar 4% ke BPJS Tahun 2023 yang terdiri dari Tagihan IWP 4% PNS sebesar Rp634.652,00 dan tagihan IWP 4% PPPK sebesar Rp5.648.000,00. Saldo utang ini berdasarkan surat dari BPJS Nomor 38/V-13/0124 tanggal 8 Januari 2024 tentang Jawaban Konfirmasi Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023.

#### 5.1.7.1.4. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp232.826.270,00 mengalami penurunan sebesar (Rp6.389.559.392,00) (96,48%) dari Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.622.385.662,00. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya dan selisih kenaikannya dapat dijelaskan pada tabel berikut:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1.	Sisa Dana Bantuan Keuangan Provinsi tahun 2023 yang tidak digunakan Kembali oleh SKPD sehingga harus dikembalikan ke Kasda Provinsi karena tidak diserap dan tidak dianggarkan lagi di 2024 (BKAD)	232.826.270,00	0,00	232.826.270,00
2.	Penyesuaian Utang Kelebihan transfer dari Pendapatan Bankeu Prov tahun 2015 sd 2021 yang tidak terserap (Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.130-BPKAD/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.876-BPKAD/2022 tentang Penetapan Sisa Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Daerah Kabupaten/Kota)	0,00	6.582.680.462,00	(6.582.680.462,00)
3.	Penyesuaian Penambahan utang bantuan Provinsi yang tidak diserap pada tahun 2022 dan tidak dianggarkan kembali di 2023 (Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.130-BPKAD/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.876-BPKAD/2022 tentang Penetapan Sisa Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Daerah Kabupaten/Kota)	0,00	39.705.200,00	(39.705.200,00)
	<b>Total</b>	<b>232.826.270,00</b>	<b>6.622.385.662,00</b>	<b>(6.389.559.392,00)</b>

### **5.1.8. Ekuitas**

Saldo Ekuitas Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.808.399.630.166,94 mengalami kenaikan sebesar Rp150.457.328.793,14 (4,11%) dari Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.657.942.301.373,80. Ekuitas ini merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023. Penjelasan lengkap Ekuitas bisa dilihat dalam penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas 5.1.17.

### 5.1.9. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran berjalan dan tidak perlu dibayar kembali. Berdasarkan sumber pendapatannya, Pendapatan-LO meliputi Pendapatan Asli Daerah-LO, Pendapatan Transfer-LO serta Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Daerah-LO	542.526.615.342,47	524.153.936.374,47	18.372.678.968,00	3,51
2.	Pendapatan Transfer-LO	2.060.874.161.385,00	2.140.305.228.852,00	(79.431.067.467,00)	(3,71)
3.	Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO	145.985.304.182,18	163.029.389.757,97	(17.044.085.575,79)	(10,45)
<b>Jumlah</b>		<b>2.749.386.080.909,65</b>	<b>2.827.488.554.984,44</b>	<b>(78.102.474.074,79)</b>	<b>(2,76)</b>

Pendapatan-LO Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 sebesar Rp2.749.386.080.909,65, lebih rendah dari Pendapatan-LO tahun 2022 sebesar Rp2.827.488.554.984,44 atau turun sebesar (Rp78.102.474.074,79).

Rincian lebih lanjut terkait Pendapatan-LO berdasarkan sumbernya adalah sebagai berikut:

#### 5.1.9.1. Pendapatan Asli Daerah-LO

Pendapatan Asli Daerah-LO meliputi Pendapatan Pajak Daerah-LO, Pendapatan Retribusi Daerah-LO, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO serta Lain-lain PAD yang Sah –LO dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Pendapatan Pajak Daerah – LO	246.388.065.202,94	231.684.635.720,96	14.703.429.481,98	6,35
2.	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	8.953.215.273,97	8.709.886.272,79	243.329.001,18	2,79
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO	5.153.021.995,00	4.884.459.679,00	268.562.316,00	5,50
4.	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	282.032.312.870,56	278.874.954.701,72	3.157.358.168,84	1,13
<b>Jumlah</b>		<b>542.526.615.342,47</b>	<b>524.153.936.374,47</b>	<b>18.372.678.968,00</b>	<b>3,51</b>

Pendapatan Asli Daerah-LO Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 sebesar Rp542.526.615.342,47, lebih besar dari Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2022 sebesar Rp524.153.936.374,47 atau naik sebesar Rp18.372.678.968,00.

##### 5.1.9.1.1. Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2023 sebesar Rp246.388.065.202,94 lebih besar dari Pendapatan-LO tahun 2022 sebesar Rp231.684.635.720,96 atau naik sebesar Rp14.703.429.481,98 (6,35%).

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Pajak Daerah-LO	246.388.065.202,94	231.684.635.720,96	14.703.429.481,98	6,35

Terdapat selisih sebesar Rp23.596.200.560,94 antara Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp246.388.065.202,94 dengan Pendapatan Pajak Daerah-LRA sebesar Rp222.791.864.642,00, rinciannya sebagai berikut:

Pendapatan Pajak Daerah-LRA 31 Desember 2023  (Rp)	Rincian Selisih				Pendapatan Pajak Daerah – LO 31 Desember 2023  (Rp)
	Pendapatan-LO yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LRA  (Rp) (+)	Pendapatan Pajak-LO yang belum Diterima Kasnya  (Rp) (+)	Pengurangan Pendapatan-LO dari Pengurangan Piutang  (Rp) (-)	Pendapatan yang belum diakui sebagai Pendapatan Pajak-LO  (Rp) (-)	
1	2	3	4	5	6=1+2+3-4-5
222.791.864.642,00	1.101.157.024,68	23.940.013.144,00	66.542.335,00	1.378.427.272,74	246.388.065.202,94

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Pajak Daerah-LRA sebesar Rp222.791.864.642,00, merupakan penerimaan pajak yang telah diterima oleh Kas Daerah pada TA 2023;
2. Pendapatan-LO yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LRA sebesar Rp1.101.157.024,68 merupakan Pengurangan Pendapatan Diterima Di Muka yang menambah Pendapatan Pajak Daerah-LO;
3. Pendapatan Pajak-LO yang belum diterima Kasnya sebesar Rp23.940.013.144,00, merupakan penambahan Piutang Pajak Daerah yang menambah Pendapatan Pajak Daerah-LO;
4. Pengurangan Pendapatan-LO dari Pengurangan Piutang sebesar Rp66.542.335,00, merupakan pengurangan Piutang Pajak Daerah yang mengurangi Pendapatan Pajak Daerah-LO; dan
5. Pendapatan yang belum diakui sebagai Pendapatan Pajak-LO sebesar Rp1.378.427.272,74, merupakan penambahan pendapatan diterima dimuka yang mengurangi Pendapatan Pajak Daerah-LO dan akan menambah pendapatan ketika terjadi pengurangan pendapatan diterima di muka.

Adapun rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO per jenis pajak adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1.	Pajak Hotel -LO	4.470.110.571,00	4.031.464.312,00	438.646.259,00
2.	Pajak Restoran-LO	25.406.098.801,00	20.219.215.048,00	5.186.883.753,00
3.	Pajak Hiburan-LO	3.743.053.842,00	2.723.708.482,00	1.019.345.360,00
4.	Pajak Reklame-LO	2.688.640.014,94	2.321.544.162,96	367.095.851,98
5.	Pajak Penerangan Jalan-LO	77.235.413.294,00	81.202.524.177,00	(3.967.110.883,00)

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
6.	Pajak Parkir-LO	1.551.401.375,00	1.231.723.000,00	319.678.375,00
7.	Pajak Air Tanah-LO	7.136.737.404,00	9.501.365.739,00	(2.364.628.335,00)
8.	Pajak Sarang Burung Walet-LO	2.150.000,00	2.250.000,00	(100.000,00)
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	1.441.454.860,00	1.825.692.079,00	(384.237.219,00)
10.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	85.581.607.613,00	72.493.952.188,00	13.087.655.425,00
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	37.131.397.428,00	36.131.196.533,00	1.000.200.895,00
<b>Jumlah</b>		<b>246.388.065.202,94</b>	<b>231.684.635.720,96</b>	<b>14.703.429.481,98</b>

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2023 lebih besar dibandingkan Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2022. Hampir seluruh komponen Pajak tahun 2023 mengalami kenaikan kecuali Pajak Penerangan Jalan-LO, Pajak Air Tanah-LO dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO yang mengalami penurunan.

#### 5.1.9.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2023 sebesar Rp8.953.215.273,97 lebih besar dari Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2022 sebesar Rp8.709.886.272,79 atau naik sebesar (2,79%).

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
<b>Pendapatan Retribusi Daerah-LO</b>	<b>8.953.215.273,97</b>	<b>8.709.886.272,79</b>	<b>243.329.001,18</b>	<b>2,79</b>

Terdapat selisih sebesar Rp480.090.915,97 antara Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp8.953.215.273,97 dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp8.473.124.358,00, rinciannya sebagai berikut:

Pendapatan Retribusi Daerah-LRA 31 Desember 2023  (Rp)	Rincian Selisih			Pendapatan Retribusi Daerah – LO 31 Desember 2023  (Rp)
	Pendapatan Retribusi-LO yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LRA  (Rp) (+)	Pengurangan Pendapatan LO dari Pengurangan Piutang  (Rp) (-)	Pendapatan yang belum diakui sebagai Pendapatan Retribusi-LO  (Rp) (-)	
1	2	3	4	5=1+2-3-4
8.473.124.358,00	1.265.968.455,72	269.370.740,00	516.506.799,75	8.953.215.273,97

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp8.473.124.358,00, merupakan penerimaan retribusi yang telah diterima oleh Kas Daerah pada TA 2023;
2. Pendapatan Retribusi-LO yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LRA sebesar Rp1.265.968.455,72, merupakan pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka yang menambah Pendapatan Retribusi Daerah-LO;

3. Pengurangan Pendapatan LO dari Pengurangan Piutang sebesar Rp269.370.740,00, merupakan pengurangan Piutang Retribusi Daerah yang mengurangi Pendapatan Retribusi Daerah-LO; dan
4. Pendapatan yang belum diakui sebagai Pendapatan Retribusi-LO sebesar Rp516.506.799,75, merupakan penambahan Pendapatan Diterima Dimuka yang mengurangi Pendapatan Retribusi Daerah-LO dan akan menambah pendapatan ketika terjadi pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka.

Adapun rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO per jenis retribusi adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	1.416.773.160,00	1.258.873.000,00	157.900.160,00
2.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	1.127.941.411,95	1.730.468.928,57	(602.527.516,62)
3.	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	578.376.060,00	466.403.150,00	111.972.910,00
4.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor- LO	217.749.400,00	340.746.000,00	(122.996.600,00)
5.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO	35.022.000,00	12.846.000,00	22.176.000,00
6.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang- LO	83.832.000,00	66.628.500,00	17.203.500,00
7.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi- LO	1.762.280.553,00	587.548.080,00	1.174.732.473,00
8.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	736.198.373,00	330.836.966,00	405.361.407,00
9.	Retribusi Terminal-LO	9.479.000,00	44.936.600,00	(35.457.600,00)
10.	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	30.479.000,00	29.009.000,00	1.470.000,00
11.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	53.400.000,00	51.935.400,00	1.464.600,00
12.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan- LO	2.354.529.542,00	3.325.162.768,00	(970.633.226,00)
13.	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	3.266.700,00	96.714.100,00	(93.447.400,00)
14.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO	543.888.074,02	367.777.780,22	176.110.293,80
<b>Jumlah</b>		<b>8.953.215.273,97</b>	<b>8.709.886.272,79</b>	<b>243.329.001,18</b>

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2023 lebih besar dibandingkan Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2022. Kenaikan tertinggi berada pada Pendapatan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO sebesar Rp1.174.732.473,00 sedangkan penurunan tertinggi berada pada Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO sebesar (Rp970.633.226,00).

### 5.1.9.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2023 sebesar Rp5.153.021.995,00 lebih besar dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2022 sebesar Rp4.884.459.679,00 atau naik sebesar Rp268.562.316,00 (5,50%).

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	5.153.021.995,00	4.884.459.679,00	268.562.316,00	5,50

Terdapat selisih sebesar Rp7.338.934.505,00 antara Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO sebesar Rp5.153.021.995,00 dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA sebesar Rp12.491.956.500,00, rinciannya sebagai berikut:

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA 31 Desember 2023 (Rp)	Pendapatan-LRA yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LO (Rp)	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO 31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3=1-2
12.491.956.500,00	7.338.934.505,00	5.153.021.995,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA sebesar Rp12.491.956.500,00, merupakan penerimaan pendapatan yang telah diterima oleh Kas Daerah TA 2023; dan
2. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LO sebesar Rp7.338.934.505,00, merupakan pengurang Investasi Daerah (Setoran Laba) dari Perumda BPR Bank Sumedang yang mengurangi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO.

Adapun rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
a.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	5.148.879.759,00	4.880.970.568,00	267.909.191,00
	Laba hak Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dari Bank BJB	5.148.879.759,00	4.880.970.568,00	267.909.191,00
	Laba hak Pemerintah Kabupaten Sumedang dari PT LKM Sumedang	0,00	0,00	0,00
	Laba hak Pemerintah Kabupaten Sumedang dari Perumda BPR Bank Sumedang	0,00	0,00	0,00



No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
b.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)-LO	4.142.236,00	3.489.111,00	653.125,00
	Bonus Produksi dari <i>Geothermal Energy</i>	4.142.236,00	3.489.111,00	653.125,00
	<b>Jumlah</b>	<b>5.153.021.995,00</b>	<b>4.884.459.679,00</b>	<b>268.562.316,00</b>

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2023 lebih besar dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2023 terdapat kenaikan Laba hak Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dari Bank BJB sebesar Rp267.909.191,00 dan Bonus Produksi dari *Geothermal Energy* sebesar Rp653.125,00. Selanjutnya, pada Tahun 2023 telah diterima Laba hak Pemerintah Kabupaten Sumedang dari Perumda BPR Bank Sumedang sebesar Rp7.338.934.505,00 sehingga mengurangi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO.

#### 5.1.9.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO tahun 2023 sebesar Rp282.032.312.870,56 lebih besar dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO Tahun 2022 sebesar Rp278.874.954.701,72 atau naik sebesar Rp3.157.358.168,84 (1,13%).

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO	282.032.312.870,56	278.874.954.701,72	3.157.358.168,84	1,13

Terdapat selisih sebesar Rp7.104.266.380,12 antara Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO Tahun 2023 sebesar Rp282.032.312.870,56 dengan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA sebesar Rp274.928.046.490,44. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LRA 31 Desember 2023 (Rp)	Rincian Selisih							Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO 31 Desember 2023 (Rp)
	Pendapatan-LO yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LRA (Rp) (+)	Pendapatan-LO yang belum Diterima Kasnya (Rp) (+)	Pendapatan yang belum Diakui sebagai Pendapatan-LO (Rp) (-)	Pengurangan Pendapatan-LO dari Pengurangan Piutang (Rp) (-)	Pengurangan Pendapatan-LO dari Pengurangan Piutang TGR Tidak Lancar (Rp) (-)	Pengurangan Pendapatan-LO dari Pengurangan Piutang TASPEN (Rp) (-)	Pengurangan Pendapatan-LO dari Koreksi LPE (Rp) (-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=1+2+3-4-5-6-7-8
274.928.046.490,44	448.235.549,00	180.219.272.740,00	7.316.027.400,00	166.155.559.798,88	6.000.000,00	85.297.500,00	357.210,00	282.032.312.870,56

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA sebesar Rp274.928.046.490,44, merupakan penerimaan pendapatan yang telah diterima oleh Kas Daerah TA 2023.

2. Pendapatan-LO yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LRA sebesar Rp448.235.549,00 merupakan Penambahan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang berasal dari penambahan Bunga Dana Cadangan per 31 Desember 2023 yang menambah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO.
3. Pendapatan-LO yang belum diterima Kasnya sebesar Rp180.219.272.740,00, merupakan penambahan Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada Dinas Kesehatan beserta BLUD, BKAD serta DKPP yang menambah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO.
4. Pendapatan yang belum diakui sebagai Pendapatan-LO sebesar Rp7.316.027.400,00, merupakan penambahan Pendapatan Diterima di Muka pada BLUD RSUD yang mengurangi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO.  
BLUD RSUD mencatat pendapatan bulan berjalan termasuk didalamnya penambahan Pendapatan Diterima di Muka pada akun Pendapatan dari BLUD-LRA dan Pendapatan dari BLUD-LO. Kemudian, penambahan Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp7.001.509.000,00 dan Rp314.518.400,00 yang sebelumnya dicatat pada Pendapatan dari BLUD-LO dipindahkan ke akun Setoran Kelebihan Pembayaran Pihak Ketiga (Pendapatan Diterima Dimuka) dengan cara mengurangi Pendapatan dari BLUD-LO dan menambah Setoran Kelebihan Pembayaran Pihak Ketiga (Pendapatan Diterima Dimuka).
5. Pengurangan Pendapatan-LO dari Pengurangan Piutang sebesar Rp166.155.559.798,88 merupakan pengurangan piutang lain-lain PAD yang sah pada BKAD, BLUD Puskesmas dan BLUD RSUD yang mengurangi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO;  
Pengurangan piutang pada BKAD berupa pengurangan piutang remunerasi TDF sebesar Rp2.727.865,88 dan pengurangan Bagian Lancar TGR karena ada setoran ke Kasda sebesar Rp10.300.000,00.  
Pengurangan piutang pada BLUD Puskesmas sebesar Rp245.492.000,00 merupakan Piutang BPJS Kesehatan.  
Pengurangan piutang pada BLUD RSUD sebesar Rp165.897.039.933,00 merupakan pengurangan piutang Tahun 2022 sebesar Rp3.655.397.715,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp162.210.849.738,00, serta koreksi piutang sebesar Rp30.792.480,00.
6. Pengurangan Pendapatan-LO dari Pengurangan Piutang TGR Tidak Lancar sebesar Rp6.000.000,00 merupakan Pengurangan Piutang TGR Tidak Lancar pada BKAD yang mengurangi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO;
7. Pengurangan Pendapatan-LO dari Pengurangan Piutang TASPEN sebesar Rp85.297.500,00 merupakan pengurangan piutang TASPEN pada BKAD.
8. Pengurangan Pendapatan-LO dari Koreksi LPE sebesar Rp357.210,00 merupakan Koreksi Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi pada DiskominfoSanditik yang mengurangi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO;

Adapun rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	913.126.292,00	538.078.382,00	375.047.910,00
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	160.903.000,00	44.700.000,00	116.203.000,00
3.	Jasa Giro-LO	3.533.034.193,34	5.106.541.433,13	(1.573.507.239,79)
4.	Pendapatan Bunga-LO	1.536.361.745,22	2.492.589.446,59	(956.227.701,37)
5.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	63.700.000,00	2.500.000,00	61.200.000,00
6.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	123.114.632,00	268.281.758,00	(145.167.126,00)
7.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	4.309.618.864,00	3.767.794.655,00	541.824.209,00
8.	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	1.726.904.186,00	2.001.823.841,00	(274.919.655,00)
9.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	7.024.614,00	6.793.400,00	231.214,00
10.	Pendapatan dari Pengembalian-LO	263.051.891,00	206.272.520,00	56.779.371,00
11.	Pendapatan dari BLUD-LO	269.395.473.453,00	264.427.728.466,00	4.967.744.987,00
12.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	0,00	11.850.800,00	(11.850.800,00)
<b>Jumlah</b>		<b>282.032.312.870,56</b>	<b>278.874.954.701,72</b>	<b>3.157.358.168,84</b>

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO tahun 2023 lebih besar dibandingkan Tahun 2022. Kenaikan tertinggi berada pada Pendapatan dari BLUD-LO sebesar Rp4.967.744.987,00 sedangkan penurunan tertinggi berada pada Pendapatan Jasa Giro-LO sebesar (Rp1.573.507.239,79).

#### 5.1.9.2. Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer-LO tahun 2023 sebesar Rp2.060.874.161.385,00 lebih rendah dari Pendapatan Transfer-LO tahun 2022 sebesar Rp2.140.305.228.852,00 atau turun sebesar (Rp79.431.067.467,00) (3,71%).

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
<b>Pendapatan Transfer-LO</b>	<b>2.060.874.161.385,00</b>	<b>2.140.305.228.852,00</b>	<b>79.431.067.467,00</b>	<b>(3,71)</b>

Rincian Pendapatan Transfer-LO sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
<b>1.</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan</b>	<b>1.749.684.181.709,00</b>	<b>1.776.380.425.711,00</b>	<b>(26.696.244.002,00)</b>	<b>(1,50)</b>
a.	Bagi Hasil Pajak	82.914.338.000,00	75.404.834.981,00	7.509.503.019,00	9,96
b.	Bagi Hasil Sumber Daya Alam	48.508.907.000,00	39.288.902.605,00	9.220.004.395,00	23,47
c.	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.095.600.984.600,00	1.052.231.192.000,00	43.369.792.600,00	4,12
d.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	522.659.952.109,00	609.455.496.125,00	(86.795.544.016,00)	(14,24)

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
2.	<b>Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya ( Dana Penyesuaian)</b>	<b>12.018.294.000,00</b>	<b>37.001.635.000,00</b>	<b>(24.983.341.000,00)</b>	<b>(67,52)</b>
a.	Dana Penyesuaian	0,00	37.001.635.000,00	(37.001.635.000,00)	100,00
b.	Insentif Fiskal	12.018.294.000,00	0,00	12.018.294.000,00	-
3.	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>299.171.685.676,00</b>	<b>326.923.168.141,00</b>	<b>(27.751.482.465,00)</b>	<b>(8,49)</b>
a.	Bagi Hasil Pajak	164.603.296.820,00	164.694.040.219,00	(90.743.399,00)	(0,06)
b.	Bantuan Keuangan	134.568.388.856,00	162.229.127.922,00	(27.660.739.066,00)	(17,05)
	<b>Jumlah</b>	<b>2.060.874.161.385,00</b>	<b>2.140.305.228.852,00</b>	<b>(79.431.067.467,00)</b>	<b>(2,76)</b>

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa Pendapatan Transfer-LO tahun 2023 lebih rendah dibandingkan Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2022. Hampir seluruh komponen Transfer tahun 2023 mengalami penurunan kecuali Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum serta Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya (Dana Penyesuaian) yang terdiri dari Insentif Fiskal mengalami kenaikan dibanding tahun 2022.

Terdapat selisih sebesar (Rp265.226.152.139,00) antara Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp2.039.560.293.689,00 dengan Pendapatan Transfer-LRA sebesar Rp2.326.100.313.524,00, rinciannya sebagai berikut:

Pendapatan Transfer-LRA 31 Desember 2023  (Rp)	Rincian Selisih					Pendapatan Transfer-LO 31 Desember 2023  (Rp)
	Pendapatan Transfer-LO yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LRA (Rp) (+)	Pendapatan Transfer-LO yang belum diterima Kas nya (Rp) (+)	Pengurangan Pendapatan Transfer-LO dari Pengurangan TDF (Rp) (-)	Pengurangan Pendapatan Transfer LO dari Pengurangan Piutang (Rp) (-)	Pendapatan Transfer - LRA yang tidak Diakui sebagai Pendapatan-LO (Rp) (-)	
1	2	3	4	5	6	7=1+2+3-4-5-6
2.326.100.313.524,00	29.576.034.000,00	6.174.445.696,00	11.247.520.973,00	12.145.642.492,00	277.583.468.370,00	2.060.874.161.385,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Transfer-LRA sebesar Rp2.326.100.313.524,00, merupakan penerimaan pendapatan yang telah diterima oleh Kas Daerah TA 2023;
2. Pendapatan LO yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LRA sebesar Rp29.576.034.000,00, merupakan penambahan pendapatan Dana Bagi Hasil (TDF) yang dicatat sebagai Pendapatan di LO yang terdiri dari DBH PBB-LO sebesar Rp2.978.742.000,00, DBH PPh Pasal 21-LO sebesar Rp8.623.677.000,00, DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29-LO sebesar Rp1.141.346.000,00, DBH SDA Minyak Bumi-LO sebesar Rp2.709.342.000,00, DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO sebesar Rp14.024.413.000,00, DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO sebesar Rp98.514.000,00. Hal ini berdasarkan Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-54/PK/PK.2/2024 tanggal 26 Maret 2024 perihal

Penyaluran Dana TDF ke RKUD dalam rangka Mendukung Kebutuhan Belanja Daerah TA 2024;

3. Pendapatan Transfer-LO yang belum diterima kasnya sebesar Rp6.174.445.696,00 merupakan piutang transfer antar daerah (Provinsi Jawa Barat sesuai SK Gubernur No.973/Kep.116-Bapenda/2024 atas kurang salur pendapatan tahun 2023) yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO sebesar Rp1.248.694.140,00, Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO sebesar Rp741.475.950,00, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO sebesar Rp4.167.276.502,00, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO sebesar Rp16.999.104,00;
4. Pengurangan Pendapatan-LO dari Pengurangan TDF sebesar Rp11.247.520.973,00 merupakan Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2022 yang tersimpan pada rekening *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF-TKD) di Bank Indonesia yang telah dicairkan ke Kas Daerah pada TA 2023 sehingga mengurangi Pendapatan Transfer-LO;
5. Pengurangan Pendapatan-LO dari Pengurangan Piutang sebesar Rp12.145.642.492,00, merupakan pengurangan Piutang Bagi Hasil Pajak pada Bapenda sebesar Rp12.635.642.492,00 dan pengurangan piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi yang mengalami kesalahan transfer ke RKUD Kabupaten Bogor pada TA 2022 sebesar Rp490.000.000,00 sehingga mengurangi Pendapatan Transfer-LO; dan
6. Pendapatan-LRA yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LO, berupa penyesuaian penambahan utang bantuan provinsi yang tidak diserap pada tahun 2023 dan tidak dinggarkan kembali di 2024 sebesar Rp232.826.270,00, serta dari pengurangan Dana Desa yang bukan merupakan beban Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebesar Rp277.350.642.100,00. Berdasar pada Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua bahwa ada jenis transfer yang karena kebijakan Pemerintah Pusat, entitas penerima mempunyai kewajiban untuk meneruskan menyalurkan kepada entitas-entitas yang berhak yang bukan bagian dari entitas penerima sesuai ketentuan, entitas penerima transfer dari Pemerintah Pusat tidak berhak menggunakan dana transfer dimaksud, tetapi memiliki kewajiban untuk segera menyalurkannya kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan. Untuk jenis transfer masuk seperti ini, tidak diakui sebagai pendapatan, namun diakui sebagai utang.

### 5.1.9.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO Tahun 2023 sebesar Rp145.985.304.182,18 lebih rendah dari Pendapatan Transfer-LO tahun 2022 sebesar Rp163.029.389.757,97 atau turun sebesar (Rp17.044.085.575,79) (10,45%).

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO	145.985.304.182,18	163.029.389.757,97	17.044.085.575,79	(10,45)

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO tahun 2023 merupakan Pendapatan Hibah. Pendapatan Hibah yang masuk ke Kas Daerah sebesar Rp537.133.033,00 sedangkan selisihnya sebesar Rp145.448.171.149,18 berasal dari Pendapatan Hibah yang tidak melalui Kas Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	SKPD	Jumlah
<b>1.</b>	<b>Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO</b>		<b>2.789.691.647,00</b>
	a) Hibah untuk Kegiatan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Dinas Pendidikan	150.000.000,00
	b) Hibah Aset Tetap Peralatan Mesin dari Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan	596.869.038,00
	c) Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa Gedung Sentra Kuliner Ikan Tahun 2023 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan dan Peternakan	1.999.707.609,00
	d) Hibah Aset Tetap sebesar Rp43.115.000,00. Terdiri dari: Tanah sebesar Rp18.115.000,00 serta Gedung dan Bangunan sebesar Rp25.000.000,00 yang bersumber dari Pendapatan Hibah Kementerian berupa Penyerahan Kantor BNN Sumedang Tahun 2023	Badan keuangan dan Aset Daerah	43.115.000,00
<b>2.</b>	<b>Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah - LO</b>		<b>19.411.492.492,45</b>
	a) Hibah Obat Tahun 2023 dari Provinsi Jabar	Dinas Kesehatan	17.842.278.537,45
	b) Hibah Obat Tahun 2023 dari BKKBN Provinsi Jabar	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak	1.569.213.955,00
<b>3.</b>	<b>Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO</b>		<b>123.196.993.509,73</b>
	a) Hibah Tanah, Bangunan dan Jalan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	66.791.119.281,38
	b) Hibah Tanah (Tanah Persil Lainnya, Tanah Kering, Tanah untuk Makam)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	22.717.461.390,00
	c) Hibah Aset Tetap sebesar Rp33.688.412.838,35 terdiri dari: Tanah sebesar Rp28.187.973.619,54; Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.055.764.640,11 serta JIJ sebesar Rp3.444.674.578,70 yang bersumber dari Pendapatan Hibah PSU Perumahan Tahun 2023	Badan Keuangan dan Aset Daerah	33.688.412.838,35
<b>4.</b>	<b>Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO</b>		<b>49.993.500,00</b>
	Hibah Uang dari PT. Jabar Laju Transindo untuk Biaya pemeliharaan Bangunan Pengujian Kelaikan	Rumah Sakit Umum Daerah	49.993.500,00
	<b>Jumlah</b>		<b>145.448.171.149,18</b>

### 5.1.10. Beban

Beban meliputi Beban Operasi dan Beban Transfer dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Operasi	2.561.734.107.241,01	2.502.516.222.422,68	59.217.884.818,33	2,37
2.	Beban Transfer	162.354.542.166,00	152.434.501.143,00	9.920.041.023,00	6,51
<b>Jumlah</b>		<b>2.724.088.649.407,01</b>	<b>2.654.950.723.565,68</b>	<b>69.137.925.841,33</b>	<b>2,60</b>

Beban Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 sebesar Rp2.724.088.649.407,01, lebih besar dari Beban Tahun 2022 sebesar Rp2.654.950.723.565,68 atau naik sebesar Rp69.137.925.841,33 (2,60%). Rincian Beban Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 sebagai berikut:

#### 5.1.10.1. Beban Operasi

Beban Operasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 realisasinya sebesar Rp2.561.734.107.241,01, lebih besar dari Beban Operasi tahun 2022 sebesar Rp2.502.516.222.422,68 atau naik sebesar Rp59.217.884.818,33 (2,37%).

Rincian Beban Operasi tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Pegawai	1.135.768.094.390,00	1.158.485.389.412,00	(22.717.295.022,00)	(1,96)
2.	Beban Persediaan	206.171.760.380,80	237.531.836.718,28	(31.360.076.337,48)	(13,20)
3.	Beban Jasa	587.790.403.886,63	498.857.377.442,70	88.933.026.443,93	17,83
4.	Beban Pemeliharaan	10.032.568.800,43	10.960.145.636,50	(927.576.836,07)	(8,46)
5.	Beban Perjalanan Dinas	62.189.508.048,00	57.608.701.050,00	4.580.806.998,00	7,95
6.	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	-
7.	Beban Subsidi	450.000.000,00	95.782.500,00	354.217.500,00	369,81
8.	Beban Hibah	70.710.600.899,00	80.139.680.216,00	(9.429.079.317,00)	(11,77)
9.	Beban Bantuan Sosial	9.839.400.000,00	6.712.957.200,00	3.126.442.800,00	46,57
10.	Beban Penyusutan	454.366.491.394,46	430.731.297.876,10	23.635.193.518,36	5,49
11.	Beban Penyisihan Piutang	7.441.997.979,00	6.089.773.386,43	1.352.224.592,57	22,20
12.	Beban Lain-lain	16.973.281.462,69	15.303.280.984,67	1.670.000.478,02	10,91
<b>Jumlah</b>		<b>2.561.734.107.241,01</b>	<b>2.502.516.222.422,68</b>	<b>59.217.884.818,33</b>	<b>445,38</b>

Rincian Beban Operasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 sebagai berikut:

##### 5.1.10.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai Tahun 2023 sebesar Rp1.135.768.094.390,00 lebih rendah dari Beban Pegawai tahun 2022 sebesar Rp1.158.485.389.412,00 atau turun sebesar (Rp22.717.295.022,00) (1,96%).

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
<b>Beban Pegawai</b>	<b>1.135.768.094.390,00</b>	<b>1.158.485.389.412,00</b>	<b>(22.717.295.022,00)</b>	<b>(1,96)</b>

Terdapat selisih sebesar (Rp436.667.090,00) antara Beban Pegawai sebesar Rp1.135.768.094.390,00 dengan Belanja Pegawai sebesar Rp1.136.204.761.480,00, rinciannya sebagai berikut:

Belanja Pegawai-LRA 31 Desember 2023 (Rp)	Belanja-LRA yang tidak Diakui sebagai Beban (Rp)	Beban Pegawai 31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3=1-2
1.136.204.761.480,00	436.667.090,00	1.135.768.094.390,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai-LRA sebesar Rp1.136.211.048.780,00, merupakan pengeluaran belanja yang telah dikeluarkan oleh Kas Daerah TA 2023; dan
2. Belanja-LRA yang tidak diakui sebagai beban sebesar Rp436.667.090,00 merupakan selisih penyesuaian pengurangan Utang Jaminan Kesehatan PNS sebesar Rp442.315.090,00, penyesuaian Penambahan Utang BPJS 4% PNS sebesar Rp634.652,00 serta PPPK sebesar Rp5.648.000,00 yang mengurangi Beban Pegawai.

#### 5.1.10.1.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan tahun 2023 sebesar Rp206.171.760.380,80 lebih rendah dari Beban Persediaan tahun 2022 sebesar Rp237.531.836.718,28 atau turun sebesar (Rp31.360.076.337,48) (13,20%).

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Persediaan	206.171.760.380,80	237.531.836.718,28	(31.360.076.337,48)	(13,20)

Terdapat selisih sebesar (Rp29.927.330.352,68) antara Beban Persediaan sebesar Rp206.171.760.380,80 dengan Belanja Persediaan sebesar Rp176.244.430.028,12, rinciannya sebagai berikut:

Belanja Persediaan-LRA 31 Desember 2023 (Rp)	Rincian Selisih			Beban Persediaan 31 Desember 2023 (Rp)
	Reklas Beban dari Aset Tetap (Rp) (+)	Beban diluar Belanja- LRA (Rp) (+)	Belanja-LRA yang tidak Diakui sebagai Beban (Rp) (+)	
1	2	3	4	5=1+2+3-4
176.244.430.028,12	5.819.317.885,00	24.513.867.267,68	405.854.800,00	206.171.760.380,80

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Persediaan-LRA sebesar Rp176.244.430.028,12, merupakan pengeluaran belanja yang telah dikeluarkan oleh Kas Daerah TA 2023;



2. Reklas Beban dari Aset Tetap sebesar Rp5.819.317.885,00 pada Dinas Pendidikan merupakan Belanja Modal yang diperuntukan untuk diserahkan kepada Sekolah Swasta, namun pencatatannya dipindahkan ke Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain karena tidak dapat dicatat sebagai Aset Tetap;
3. Beban diluar Belanja-LRA sebesar Rp24.513.867.267,68, berasal dari:
  - 1) Selisih lebih/selisih penambahan Persediaan di Neraca sebesar Rp14.404.194.854,68, terdiri dari:

No.	Uraian	Jumlah Selisih
1.	Beban Bahan-Bahan Baku	15.770.669,00
2.	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	67.179.145,00
3.	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	3.500.000,00
4.	Beban Bahan-Bahan Lainnya	28.350,00
5.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	(98.094.988,90)
6.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	17.235.890,50
7.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	(153.875.784,91)
8.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	140.000,00
9.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	(337.309.816,00)
10.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	23.485.880,00
11.	Beban Obat-Obatan-Obat	25.210.759.241,63
12.	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	(8.460.004.100,00)
13.	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	469.668.385,46
14.	Beban Natura dan Pakan-Natura	(2.418.555,00)
15.	Beban Natura dan Pakan-Pakan	11.128.770,00
16.	Beban Barang dan Jasa BLUD	(2.362.998.232,10)
	<b>Total</b>	<b>14.404.194.854,68</b>

- 2) Selisih kenaikan Utang Persediaan BLUD di neraca sebesar Rp10.109.672.413,00; dan
4. Belanja-LRA yang tidak diakui sebagai beban sebesar Rp405.854.800,00, merupakan kapitalisasi yang menambah Aset Tetap di Neraca.

Berdasarkan hasil *stock opname* persediaan, diketahui bahwa terdapat persediaan kedaluwarsa pada Dinas Perhubungan serta Obat pada Dinas Kesehatan, BLUD RSUD dan Puskesmas. Adapun persediaan kedaluwarsa pada Dinas Perhubungan berupa Bahan Cetak terdiri dari Karcis Angkutan Barang sebesar Rp760.887,91, Karcis Terminal sebesar Rp18.308.589,13 dan Blanko Bongkar Muat sebesar Rp1.317.789,04. Nilai persediaan kedaluwarsa tersebut mengurangi nilai persediaan di Neraca dan menambah Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak. Pencatatan dengan menambah Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak karena persediaan tersebut merupakan persediaan atas pengadaan tahun berjalan dan belum adanya Berita Acara Pemusnahan atas persediaan kedaluwarsa tersebut.

Selanjutnya, persediaan Obat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp29.806.110,00 merupakan obat kedaluwarsa yang diretur kepada Pihak Ketiga. Nilai persediaan kedaluwarsa tersebut mengurangi nilai persediaan di Neraca dan menambah Beban Obat-Obatan-Obat.

Pencatatan dengan menambah Beban Obat-Obatan-Obat karena merupakan persediaan atas pengadaan tahun berjalan dan belum adanya penggantian obat baru dari Pihak Ketiga.

Selain obat kedaluwarsa pada Dinas Kesehatan, terdapat obat kedaluwarsa pada BLUD RSUD dan Puskesmas, masing-masing sebesar Rp29.513.323,00 pada RSUD dan Rp134.717.192,54 pada BLUD Puskesmas. Berbeda dengan pencatatan pada Dinas Kesehatan, obat kedaluwarsa pada BLUD RSUD dan Puskesmas dicatat dengan mengurangi nilai persediaan pada Neraca dan menambah akun Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Hal ini karena pengurangan nilai persediaan obat kedaluwarsa tersebut berdasarkan pada Berita Acara Pemusnahan Obat Kedaluwarsa/Rusak.

Adapun rincian Beban Persediaan per objek beban dapat dilihat pada **Lampiran 38 - Rincian Beban Persediaan LO**.

#### 5.1.10.1.3. Beban Jasa

Beban Jasa tahun 2023 sebesar Rp587.790.403.886,63 lebih besar dari Beban Jasa tahun 2022 sebesar Rp498.857.377.442,70 atau naik sebesar Rp88.933.026.443,93 (17,83%).

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Jasa	587.790.403.886,63	498.857.377.442,70	88.933.026.443,93	17,83

Terdapat selisih sebesar (Rp9.987.888.967,25) antara Beban Jasa sebesar Rp587.790.403.886,63, dengan Belanja Jasa sebesar Rp597.778.292.853,88, rinciannya sebagai berikut:

Belanja Jasa-LRA 31 Desember 2023  (Rp)	Rincian Selisih		Beban Jasa 31 Desember 2023  (Rp)
	Beban diluar Belanja-LRA (Rp) (+)	Belanja-LRA yang tidak Diakui sebagai Beban (Rp) (-)	
1	2	3	4=2-3
597.778.292.853,88	1.993.283.484,75	11.981.172.452,00	587.790.403.886,63

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Jasa-LRA sebesar Rp597.778.292.853,88, merupakan pengeluaran belanja yang telah dikeluarkan oleh Kas Daerah TA 2023;
2. Beban diluar Belanja-LRA sebesar Rp1.993.283.484,75, merupakan penambah nilai beban yang berasal dari pengurangan Beban Dibayar Dimuka, penambahan Utang di Neraca, dan dari hibah/donasi yang mengurangi Aset Tetap di Neraca; dan
3. Belanja-LRA yang tidak diakui sebagai beban sebesar Rp11.981.172.452,00, merupakan biaya umum/kapitalisasi yang menambah Aset Tetap di Neraca dan mengurangi Beban Jasa.

Adapun rincian Beban Jasa per Objek Beban dapat dilihat pada **Lampiran 39 – Rincian Beban Jasa LO**.

#### 5.1.10.1.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2023 sebesar Rp10.032.568.800,43 lebih rendah dari Beban Pemeliharaan tahun 2022 sebesar Rp10.960.145.636,50 atau turun sebesar (Rp927.576.836,07) (8,46%).

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Pemeliharaan	10.032.568.800,43	10.960.145.636,50	(927.576.836,07)	(8,46)

Terdapat selisih sebesar (Rp9.659.368.928,57) antara Beban Pemeliharaan sebesar Rp10.032.568.800,43 dengan Belanja Pemeliharaan TA 2023, rinciannya sebagai berikut:

Belanja Pemeliharaan-LRA 31 Desember 2023 (Rp)	Belanja-LRA yang tidak Diakui sebagai Beban (Rp)	Beban Pemeliharaan 31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3=1-2
19.691.937.729,00	9.659.368.928,57	10.032.568.800,43

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Pemeliharaan-LRA sebesar Rp19.691.937.729,00, merupakan pengeluaran belanja yang telah dikeluarkan oleh Kas Daerah TA 2023;
2. Belanja-LRA yang tidak diakui sebagai beban sebesar Rp9.659.368.928,57, merupakan kapitalisasi yang menambah Aset Tetap di Neraca sehingga mengurangi Beban Pemeliharaan.

Adapun rincian Beban Pemeliharaan per Objek Beban Tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1.	Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0
2.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.065.840.511,00	6.222.909.815,00	1.842.930.696,00
3.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.966.728.289,43	4.438.235.821,50	(2.471.507.532,00)
4.	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	299.000.000,00	(299.000.000,00)
<b>Jumlah</b>		<b>10.032.568.800,43</b>	<b>10.960.145.636,50</b>	<b>(927.576.836,07)</b>

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan sebesar Rp1.842.930.696,00 sementara Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan serta Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi mengalami penurunan.

#### 5.1.10.1.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas tahun 2023 sebesar Rp62.189.508.048,00 lebih besar dari Beban Perjalanan Dinas tahun 2022 sebesar Rp57.608.701.050,00 atau naik sebesar Rp4.580.806.998,00 (7,95%).

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Perjalanan Dinas	62.189.508.048,00	57.608.701.050,00	4.580.806.998,00	7,95

Realisasi Beban Perjalanan Dinas tahun 2023 sebesar Rp62.189.508.048,00 sama dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun 2023, sehingga tidak terdapat selisih. Beban Perjalanan Dinas rinciannya sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	33.439.791.912,00	28.900.441.200,00	4.539.350.712,00
2.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	26.126.206.168,00	27.400.238.850,00	(1.274.032.682,00)
3.	Beban Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	2.623.509.968,00	1.308.021.000,00	1.315.488.968,00
<b>Jumlah</b>		<b>62.189.508.048,00</b>	<b>57.608.701.050,00</b>	<b>4.580.806.998,00</b>

#### 5.1.10.1.6. Beban Bunga

Beban Bunga Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 sebesar Rp0,00, hal ini karena pada TA 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tidak menganggarkan penerimaan pinjaman.

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	-

#### 5.1.10.1.7. Beban Subsidi

Beban Subsidi tahun 2023 sebesar Rp450.000.000,00 lebih besar dari Beban Subsidi tahun 2022 sebesar Rp95.782.500,00 atau naik sebesar Rp354.217.500,00 (369,81%).

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Subsidi	450.000.000,00	95.782.500,00	354.217.500,00	369,81

Beban Subsidi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 sebesar Rp450.000.000,00, merupakan Belanja Alokasi Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA) TA 2023.

#### 5.1.10.1.8. Beban Hibah

Beban Hibah tahun 2023 sebesar Rp70.710.600.899,00 lebih rendah dari Beban Hibah tahun 2022 sebesar Rp80.139.680.216,00 atau turun sebesar (Rp9.429.079.317,00) (11,77%).

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Hibah	70.710.600.899,00	80.139.680.216,00	(9.429.079.317,00)	(11,77)

Beban Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 sebesar Rp70.710.600.899,00 merupakan beban Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 sebesar Rp70.710.600.899,00 berasal dari beban yang dikeluarkan oleh Kas Daerah sebesar Rp65.146.756.399,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Beban Hibah	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)
<b>1</b>	<b>Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat</b>		<b>2.743.468.000,00</b>
a.	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	Sekretariat Daerah	850.000.000,00
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	750.000.000,00
b.	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	946.468.000,00
		Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	197.000.000,00
<b>2</b>	<b>Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia</b>		<b>46.279.208.000,00</b>
a.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Kesehatan	660.000.000,00
		Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	2.900.000.000,00
		Sekretariat Daerah	2.970.508.000,00
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.260.000.000,00
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100.000.000,00
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	190.000.000,00
b.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	Dinas Pendidikan	27.723.700.000,00
		Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	150.000.000,00
		Sekretariat Daerah	1.350.000.000,00
		Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	300.000.000,00
		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak	500.000.000,00
d.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	400.000.000,00
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	200.000.000,00
		Sekretariat Daerah	7.575.000.000,00
<b>3.</b>	<b>Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta</b>		<b>14.269.588.399,00</b>
a.	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	Dinas Pendidikan	14.269.588.399,00
<b>4.</b>	<b>Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik</b>		<b>1.854.492.000,00</b>
a.	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.854.492.000,00
	<b>Jumlah</b>		<b>65.146.756.399,00</b>

Penambah Beban Hibah sebesar Rp5.609.445.500,00, merupakan pengakuan Beban Hibah di LO yang berasal dari pengurangan aset tetap, dengan rincian sebagai berikut:

No	Beban Hibah	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)
<b>1</b>	<b>Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia</b>		<b>5.609.445.500,00</b>
a.	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		
	Pengurang Aset dari Bangunan Sawah Irigasi dan Jalan Lainnya	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	5.609.445.500,00
	<b>Jumlah</b>		<b>5.609.445.500,00</b>

Sementara itu, terdapat pengurang Beban Hibah sebesar Rp45.601.000,00 berupa Kapitalisasi Aset Tetap dan Aset Tetap Lainnya Dinas Pendidikan dengan rincian sebagai berikut:

No	Beban Hibah	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)
<b>1</b>	<b>Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia</b>		<b>45.601.000,00</b>
a.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		
	Penambah Aset Tetap dari Kapitalisasi berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp42.997.000,00 serta Aset Tetap Lainnya (Buku) sebesar Rp2.604.000,00	Dinas Pendidikan	45.601.000,00
	<b>Jumlah</b>		<b>45.601.000,00</b>

#### 5.1.10.1.9. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial tahun 2023 sebesar Rp9.839.400.000,00 lebih besar dari Beban Bantuan Sosial tahun 2022 sebesar Rp6.712.957.200,00 atau naik sebesar Rp3.126.442.800,00 (46,57%).

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
<b>Beban Bantuan Sosial</b>	<b>9.839.400.000,00</b>	<b>6.712.957.200,00</b>	<b>3.126.442.800,00</b>	<b>46,57</b>

Beban Bantuan Sosial sebesar Rp9.839.400.000,00 merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial terdiri dari beban bantuan sosial kepada masyarakat yaitu kepada individu masyarakat atau keluarga dan kepada lembaga non pemerintahan. Rincian Beban Bantuan Sosial tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

No.	Uraian	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)
<b>1.</b>	<b>Beban Bantuan Sosial kepada Individu</b>		<b>7.470.970.000,00</b>
a.	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu		7.070.100.000,00

No.	Uraian	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)
	a. Bantuan untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (PIK) Kecamatan Cisitu, Kecamatan Darmaraja, Kecamatan Tanjungmedar, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Ujungjaya, Kecamatan Paseh, Kecamatan Sumedang Utara b. Bantuan untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) APBD LPM Desa Cibeureum Kulon, Desa Sukawening, Desa Buahdua, Desa Cibeureum Wetan, Desa Kertamekar, Desa Cikoneng	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3.000.000.000,00
	Bantuan untuk Pembayaran Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan dan Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu atas Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dinas Sosial	4.070.100.000,00
<b>b.</b>	<b>Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu</b>		<b>400.870.000,00</b>
	Bantuan untuk penyediaan permakanan, penyediaan alat bantu dan sandang.	Dinas Sosial	400.870.000,00
<b>2.</b>	<b>Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat</b>		<b>699.000.000,00</b>
<b>a.</b>	<b>Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat</b>		<b>699.000.000,00</b>
	Kegiatan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Dinas Sosial	699.000.000,00
<b>3.</b>	<b>Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)</b>		<b>1.669.430.000,00</b>
	Penyediaan permakanan	Dinas Sosial	1.669.430.000,00
	<b>Jumlah</b>		<b>9.839.400.000,00</b>

#### 5.1.10.1.10. Beban Penyusutan

Beban Penyusutan tahun 2023 sebesar Rp454.366.491.394,46 lebih besar dari Beban Penyusutan tahun 2022 sebesar Rp430.731.297.876,10 atau naik sebesar Rp23.635.193.518,36 (5,49%).

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
<b>Beban Penyusutan</b>	<b>454.366.491.394,46</b>	<b>430.731.297.876,10</b>	<b>23.635.193.518,36</b>	<b>5,49</b>

Beban Penyusutan ini merupakan beban penyusutan aset tetap selain tanah yaitu Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 sebesar Rp452.939.951.835,00 dan Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp1.426.539.559,46 yang terdapat diseluruh SKPD. Beban Penyusutan mengalami kenaikan sebesar Rp23.635.193.518,36 atau 5,49% dari tahun 2022.

Pada Beban Penyusutan Aset Tetap ini terdapat nilai Beban Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp35.019.592,00, hal ini akibat tidak adanya rekening Beban Penyusutan Aset Lain-lain, sehingga nilai Beban Penyusutan Lain-lain disimpan pada Beban Penyusutan Aset Tetap. Beban Penyusutan Aset Lain-Lain terdiri dari Beban Penyusutan Aset Lain-lain Peralatan dan Mesin sebesar Rp21.170.917,00 dan Beban Penyusutan Aset Lain-lain Gedung Bangunan sebesar Rp13.848.675,00. Beban Penyusutan Aset Lain-lain merupakan beban penyusutan atas

Aset Rusak Berat/Usang yang masih memiliki masa manfaat sebelum adanya penghapusan. Rincian pada **Lampiran 40 – Rincian Beban Penyusutan LO.**

#### 5.1.10.1.11. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang tahun 2023 sebesar Rp7.441.997.979,00 lebih tinggi dari Beban Penyisihan Piutang tahun 2022 sebesar Rp6.089.773.386,43 atau naik sebesar Rp1.352.224.592,57 (22,20%).

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Penyisihan Piutang	7.441.997.979,00	6.089.773.386,43	1.352.224.592,57	22,20

Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 sebesar Rp7.441.997.979,00 terdiri dari:

1. Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp6.686.873.913,36 pada Bapenda;
2. Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah berupa Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp1.625.503,95 yaitu pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dan Beban Penyisihan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada DPUTR sebesar Rp4.724.270,09;
3. Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp698.656.918,75, yaitu Beban Penyisihan Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD pada BKAD sebesar Rp189.634.710,00 dan Dinas Koperasi UKMPP sebesar Rp64.544,00 serta Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp508.957.664,75;
4. Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah sebesar Rp30.872.228,48 pada Bapenda;
5. Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Masyarakat sebesar Rp18.987.644,37 pada BKAD; dan
6. Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp257.500,00 pada BKAD.

Rekapitulasi realisasi bebannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
<b>a.</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Pendapatan</b>	<b>7.422.752.834,63</b>	<b>5.966.309.754,05</b>	<b>1.456.443.080,58</b>
	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	6.686.873.913,36	5.175.717.095,77	1.511.156.817,59
	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	6.349.774,04	166.779.526,07	(160.429.752,03)
	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	698.656.918,75	565.534.919,75	133.121.999,00
	Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	30.872.228,48	58.278.212,46	(27.405.983,98)
<b>b.</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Lainnya</b>	<b>19.245.144,37</b>	<b>123.463.632,38</b>	<b>(104.218.488,01)</b>



No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	18.987.644,37	122.625.302,38	(103.637.658,01)
	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	257.500,00	838.330,00	(580.830,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>7.441.997.979,00</b>	<b>6.089.773.386,43</b>	<b>1.352.224.592,57</b>

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa Beban Penyisihan Piutang Pajak mengalami kenaikan tertinggi dibanding beban penyisihan lainnya yaitu sebesar Rp1.528.086.387,59 sedangkan Beban Penyisihan Retribusi Daerah mengalami penurunan tertinggi sebesar (Rp165.154.022,12).

#### 5.1.10.1.12. Beban Lain-Lain

Beban Lain-Lain tahun 2023 sebesar Rp16.973.281.462,69 lebih besar dari Beban Lain-Lain tahun 2022 sebesar Rp15.303.280.984,67 atau naik sebesar Rp1.670.000.478,02 (10,91%).

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
<b>Beban Lain-lain</b>	<b>16.973.281.462,69</b>	<b>15.303.280.984,67</b>	<b>1.670.000.478,02</b>	<b>10,91</b>

Beban Lain-Lain tahun 2023 sebesar Rp16.939.878.932,69 merupakan Aset Tetap dibawah nilai Kapitalisasi (Ekstrakomptabel).

#### 5.1.10.2. Beban Transfer

Beban Transfer tahun 2023 sebesar Rp162.354.542.166,00 lebih besar dari Beban Transfer tahun 2022 sebesar Rp152.434.501.143,00 atau naik sebesar Rp9.920.041.023,00 (6,51%).

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
<b>Beban Transfer</b>	<b>162.354.542.166,00</b>	<b>152.434.501.143,00</b>	<b>9.920.041.023,00</b>	<b>6,51</b>

Beban Transfer Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 realisasinya sebesar Rp162.354.542.166,00, lebih tinggi dari Beban Transfer tahun 2022 sebesar Rp152.434.501.143,00. Rincian Beban Transfer Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
<b>1</b>	<b>Beban Bagi Hasil</b>	<b>30.551.038.950,00</b>	<b>29.486.323.500,00</b>	<b>1.064.715.450,00</b>
a.	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	28.867.652.500,00	27.321.453.500,00	1.546.199.000,00
b.	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.683.386.450,00	2.164.870.000,00	(481.483.550,00)
<b>2</b>	<b>Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa</b>	<b>131.803.503.216,00</b>	<b>122.948.177.643,00</b>	<b>8.855.325.573,00</b>
a.	Beban Bantuan Keuangan antar Daerah	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
	Kabupaten/Kota			
b.	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	131.803.503.216,00	122.698.177.643,00	131.553.503.216,00
	<b>Jumlah</b>	<b>162.354.542.166,00</b>	<b>152.434.501.143,00</b>	<b>9.920.041.023,00</b>

Berdasarkan tabel tersebut, Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa mengalami kenaikan tertinggi sebesar Rp131.553.503.216,00 sedangkan Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa mengalami penurunan sebesar (Rp481.483.550,00).

Terdapat selisih sebesar Rp277.350.642.100,00 antara Beban Transfer Rp162.354.542.166,00 dengan Belanja Transfer sebesar Rp439.705.184.266,00, rinciannya sebagai berikut:

Belanja-LRA (Rp)	Belanja-LRA yang tidak Diakui sebagai Beban (Rp)	Beban Transfer 31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3=1-2
439.705.184.266,00	277.350.642.100,00	162.354.542.166,00

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Transfer-LRA sebesar Rp439.705.184.266,00, merupakan pengeluaran belanja yang telah dikeluarkan oleh Kas Daerah TA 2023; dan
2. Belanja-LRA yang tidak diakui sebagai beban sebesar Rp277.350.642.100,00, merupakan pengurangan Dana Desa yang bukan merupakan beban Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Berdasarkan pada Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua bahwa ada jenis transfer yang karena kebijakan Pemerintah Pusat, entitas penerima mempunyai kewajiban untuk meneruskan menyalurkan kepada entitas-entitas yang berhak yang bukan bagian dari entitas penerima sesuai ketentuan, entitas penerima transfer dari Pemerintah Pusat tidak berhak menggunakan dana transfer dimaksud, tetapi memiliki kewajiban untuk segera menyalurkannya kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan.

#### 5.1.11. Surplus/Defisit dari Operasi

Surplus/Defisit Dari Operasi tahun 2023 sebesar Rp25.297.431.502,64 lebih rendah dari Surplus/Defisit Dari Operasi tahun 2022 sebesar Rp172.537.831.418,76 atau turun sebesar (Rp147.240.399.916,12) (85,34%).

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Surplus/ Defisit Dari Operasi	25.297.431.502,64	172.537.831.418,76	(147.240.399.916,13)	(85,34)

Surplus/Defisit dari Operasi sebesar Rp25.297.431.502,64 merupakan selisih dari Jumlah Pendapatan-LO sebesar Rp2.749.386.080.909,65 dan Jumlah Beban-LO sebesar Rp2.724.088.649.407,01.

#### 5.1.12. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 sebesar Rp11.929.614.251,64 lebih besar dari Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 sebesar Rp11.240.459.996,74 atau naik sebesar Rp689.154.254,90 (6,13%).

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	11.929.614.251,64	11.240.459.996,74	689.154.254,90	6,13

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp11.929.614.251,64 merupakan selisih dari Surplus Non Operasional sebesar Rp14.371.776.605,45 dan Defisit Non Operasional sebesar Rp2.442.162.353,81.

##### 5.1.12.1. Surplus Non Operasional

Surplus Non Operasional tahun 2023 sebesar Rp14.371.776.605,45 lebih besar dari Surplus Non Operasional tahun 2022 sebesar Rp13.765.758.429,31 atau naik sebesar Rp606.018.176,14 (4,40%).

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Surplus Non Operasional	14.371.776.605,45	13.765.758.429,31	606.018.176,14	4,40

Surplus Non Operasional ini mempengaruhi nilai Ekuitas di Neraca. Surplus Non Operasional sebesar Rp14.371.776.605,45 berupa Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya yang terdapat di BKAD sebesar Rp14.313.486.917,00, dan di Bapenda sebesar Rp58.289.688,45. Surplus Non Operasional terbentuk dari:

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
1.	<b>BKAD</b>	<b>14.313.486.917,00</b>
	▪ Penyesuaian Penambahan Investasi Permanen dari laba Perumda BPR Sumedang	13.085.279.204,00
	▪ Penyesuaian Penambahan Investasi Permanen dari laba PDAM	576.429.822,00
	▪ Penyesuaian Penambahan Investasi Non Permanen KUSUMA	65.518.975,00
	▪ Penyesuaian Penambahan Investasi Non Permanen PAKEPUK	1.162.796,00
	▪ Penyesuaian Penyisihan Investasi Non Permanen PAKEPUK	584.257.790,00
	▪ Penyesuaian Penyisihan Piutang Lainnya dari Piutang TGR	838.330,00
2.	<b>Bapenda</b>	<b>58.289.688,45</b>
	▪ Penyesuaian Penyisihan Dana Bagi Hasil	58.278.212,46
	▪ Penyesuaian Piutang Pajak	11.475,99

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
	<b>Jumlah</b>	<b>14.371.776.605,45</b>

Pada TA 2023, terdapat penurunan nilai penyisihan Investasi Non Permanen PAKEPUK sebesar Rp584.257.790,00 dari nilai penyisihan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya penghapusan utang 23 debitur pada program PAKEPUK sebesar Rp528.894.200,00 melalui *Crash Program* (penyelesaian piutang negara yang dilakukan secara terpadu dalam bentuk keringanan utang).

#### 5.1.12.2. Defisit Non Operasional

Defisit Non Operasional tahun 2023 sebesar Rp2.442.162.353,81 lebih rendah dari Defisit Non Operasional tahun 2022 sebesar Rp2.525.298.432,57 atau turun sebesar (Rp83.136.078,76) (3,29%).

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
<b>Defisit Non Operasional</b>	<b>2.442.162.353,81</b>	<b>2.525.298.432,57</b>	<b>(83.136.078,76)</b>	<b>(3,29)</b>

Defisit Non Operasional sebesar Rp2.442.162.353,81 mempengaruhi nilai Ekuitas di Neraca. Defisit Non Operasional terbentuk dari Defisit Penjualan Aset Non Lancar sebesar Rp40.810.246,73, dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional lainnya sebesar Rp2.401.352.107,08.

##### 5.1.12.2.1. Defisit Penjualan Aset Non Lancar

Defisit Penjualan Aset Non Lancar Tahun 2023 sebesar Rp40.810.246,73 terdiri dari Defisit Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp18.397.431,40 berupa penghapusan Aset Rusak Berat yang masih berada pada pos Aset Peralatan dan Mesin dan Defisit Penjualan Aset Lainnya sebesar Rp22.412.815,33 berupa penghapusan Aset Rusak Berat yang berada di pos Aset Lainnya.

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
1	Defisit Penjualan Peralatan dan Mesin	18.397.431,40
2	Defisit Penjualan Aset Lainnya	22.412.815,33
	<b>Jumlah</b>	<b>40.810.246,73</b>

##### 5.1.12.2.2. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tahun 2023 sebesar Rp2.401.352.107,08, yaitu pada:

- a. BLUD RSUD dan Puskesmas berupa bahan obat-obatan kadaluarsa sebesar Rp164.230.515,54;
- b. Sekretariat Daerah sebesar Rp2.044.171,30 berupa Penghapusan Aset Lainnya;

- c. BAPPPEDA sebesar Rp16.823.892,88 berupa Penghapusan Aset Lainnya; dan
- d. BKAD sebesar Rp1.700.892.531,55, yaitu:
  - 1) Penyesuaian Investasi Permanen PT LKM Sumedang (rugi) sebesar Rp708.021.063,90;
  - 2) Penyesuaian Investasi Permanen PT Kampung Makmur (rugi) sebesar Rp853.268.437,46; dan
  - 3) Penyesuaian pengurang Investasi Non Permanen sebesar Rp656.964.026,00;

#### 5.1.13. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa tahun 2023 sebesar Rp37.227.045.754,28 lebih rendah dari Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa tahun 2022 sebesar Rp183.778.291.415,50 atau turun sebesar (Rp146.551.245.661,23) (79,74%).

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	37.227.045.754,28	183.778.291.415,50	(146.551.245.661,23)	(79,74)

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa sebesar Rp37.227.045.754,28 merupakan Jumlah dari Surplus/Defisit dari Operasi sebesar Rp25.297.431.502,64 dan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp11.929.614.251,64.

#### 5.1.14. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa tahun 2023 sebesar Rp344.825.737,00 lebih rendah dari Pos Luar Biasa tahun 2022 sebesar Rp9.120.525.832,00 atau turun sebesar (Rp8.775.700.095,00) (96,22%).

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pos Luar Biasa	344.825.737,00	9.120.525.832,00	(8.775.700.095,00)	(96,22)

Pos Luar Biasa terdiri dari Beban Luar Biasa. Terdapat selisih sebesar sebesar (Rp6.622.385.662,00) antara Beban Luar Biasa sebesar Rp344.825.737,00 dengan Belanja Tidak Terduga di LRA sebesar Rp6.967.211.399,00. Selisih rinciannya sebagai berikut:

Belanja Tidak Terduga-LRA 31 Desember 2023 (Rp)	Belanja-LRA yang tidak Diakui sebagai Beban (Rp)	Beban Luar Biasa 31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3=1-2
6.967.211.399,00	(6.622.385.662,00)	344.825.737,00

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Terduga-LRA sebesar Rp6.967.211.399,00, merupakan pengeluaran belanja yang telah dikeluarkan oleh Kas Daerah TA 2023; dan

2. Belanja-LRA yang tidak Diakui sebagai Beban sebesar (Rp6.622.385.662,00), merupakan pengurang beban dari pembayaran utang kelebihan pembayaran sisa Bantuan Keuangan Provinsi TA 2015 s/d 2022.

Beban Luar Biasa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 sebesar Rp344.825.737,00 terdiri dari :

1. Pengembalian sisa Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat TA 2022 (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan) sebesar Rp58.481.700,00;
2. Penanganan kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan tahun 2023 sebesar Rp241.648.000,00;
3. Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah PT. Coca Cola Botling Indonesia sebesar Rp8.946.037,00;
4. Pembayaran kekurangan Pencairan atas Pelaksanaan Eksekusi Gugatan dari Suryadi Wijaya Dkk perkara Nomor : 775 K/Pdt/2017 Jo. Nomor : 330/PDT/2016/PT.BDF Jo Nomor : 33/Pdt.G/2015/PN.Smd sebesar Rp68.750.000,00; dan
5. Pengembalian Uang BTT atas Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Kegiatan Tanggap Darurat Bencana 2023 sebesar Rp33.000.000,00.

#### 5.1.15. Surplus/Defisit Laporan Operasional

Surplus/Defisit Laporan Operasional tahun 2023 sebesar Rp36.882.220.017,28 lebih rendah dari Surplus/Defisit Laporan Operasional tahun 2022 sebesar Rp174.657.765.583,50 atau turun sebesar (Rp137.775.545.566,23) (78,88%).

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Surplus/Defisit Laporan Operasional	36.882.220.017,28	174.657.765.583,50	(137.775.545.566,23)	(78,88)

Surplus/Defisit Laporan Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 sebesar Rp36.882.220.017,28 berasal dari Surplus dari Operasi sebesar Rp25.297.431.502,64 ditambah Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp11.929.614.251,64 ditambah Pos Luar Biasa sebesar (Rp344.825.737,00). Surplus/Defisit Laporan Operasional tersebut akan menambah Ekuitas per 31 Desember 2023.

### 5.1.16. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Investasi Aset Non Keuangan, Pembiayaan dan Non Anggaran.

#### 5.1.16.1. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi tahun 2023 berasal dari Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi dikurangi Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	2.845.322.438.547,44	2.887.971.103.743,84	(42.648.665.196,40)
2	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	(2.514.217.482.203,00)	(2.450.357.715.764,00)	(63.859.766.439,00)
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>331.104.956.344,44</b>	<b>437.613.387.979,84</b>	<b>(106.508.431.635,40)</b>

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 sebesar Rp331.104.956.344,44 lebih rendah dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp437.613.387.979,84 atau turun (Rp106.508.431.635,40).

#### 5.1.16.1.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas ke Kas Daerah dari Aktivitas Operasi dalam tahun 2023 berasal dari:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Penerimaan Pajak Daerah	222.791.864.642,00	221.379.897.839,00	1.411.966.803,00
2	Penerimaan Retribusi Daerah	8.473.124.358,00	9.276.092.781,00	(802.968.423,00)
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.491.956.500,00	12.643.497.231,00	(151.540.731,00)
4	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	274.928.046.490,44	275.687.324.303,84	(759.277.813,40)
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	78.354.987.933,00	67.220.420.048,00	11.134.567.885,00
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	34.739.744.040,00	36.225.796.565,00	(1.486.052.525,00)
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.095.600.984.600,00	1.052.231.192.000,00	43.369.792.600,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	522.659.952.109,00	609.455.496.125,00	(86.795.544.016,00)
9	Penerimaan Dana Penyesuaian	0,00	37.001.635.000,00	(37.001.635.000,00)
10	Penerimaan Dana Desa	277.350.642.100,00	237.420.551.800,00	39.930.090.300,00
11	Penerimaan Insentif Fiskal	12.018.294.000,00	0,00	12.018.294.000,00
12	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	170.084.493.616,00	164.239.295.900,00	5.845.197.716,00
13	Penerimaan Bantuan Keuangan	135.291.215.126,00	161.778.833.122,00	(26.487.617.996,00)
14	Penerimaan Hibah	537.133.033,00	3.411.071.029,00	(2.873.937.996,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>2.845.322.438.547,44</b>	<b>2.887.971.103.743,84</b>	<b>(42.648.665.196,40)</b>

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 sebesar Rp2.845.322.438.547,44 lebih rendah dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp2.887.971.103.743,84 atau turun sebesar (Rp42.648.665.196,40).

#### 5.1.16.1.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Kas Daerah untuk Aktivitas Operasi dalam tahun 2023 dipergunakan untuk:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Pembayaran Pegawai	1.136.204.761.480,00	1.169.624.519.375,00	(33.419.757.895,00)
2	Pembayaran Barang Jasa	855.904.168.659,00	803.235.286.510,00	52.668.882.149,00
3	Pembayaran Bunga	0,00	0,00	-
4	Pembayaran Subsidi	450.000.000,00	95.782.500,00	354.217.500,00
5	Pembayaran Hibah	65.146.756.399,00	78.047.993.016,00	(12.901.236.617,00)
6	Pembayaran Bantuan Sosial	9.839.400.000,00	6.712.957.200,00	3.126.442.800,00
7	Pembayaran Tak Terduga	6.967.211.399,00	2.786.124.220,00	4.181.087.179,00
8	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	28.867.652.500,00	27.321.453.500,00	1.546.199.000,00
9	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	1.683.386.450,00	2.164.870.000,00	(481.483.550,00)
10	Pembayaran Bantuan Keuangan	409.154.145.316,00	360.368.729.443,00	48.785.415.873,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.514.217.482.203,00</b>	<b>2.450.357.715.764,00</b>	<b>63.859.766.439,00</b>

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi tahun 2023 sebesar 2.514.217.482.203,00 lebih besar dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp2.450.357.715.764,00 atau naik sebesar Rp63.859.766.439,00.

#### 5.1.16.2. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 berasal dari Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi dikurangi Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	0,00	0,00	0,00
2	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	(436.717.844.656,00)	(507.908.867.776,00)	71.191.023.120,00
	<b>Jumlah</b>	<b>(436.717.844.656,00)</b>	<b>(507.908.867.776,00)</b>	<b>71.191.023.120,00</b>

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi tahun 2023 sebesar (Rp436.717.844.656,00) lebih rendah dibandingkan tahun 2022 sebesar (Rp507.908.867.776,00) atau turun Rp71.191.023.120,00.

#### 5.1.16.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi dalam tahun 2023 sebesar Rp0,00.



### 5.1.16.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari Kas Daerah untuk Aktivitas Investasi dalam tahun 2023 dipergunakan untuk:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000,00	15.000.937.500,00	9.999.062.500,00
2	Perolehan Tanah	3.486.649.000,00	27.007.255.100,00	(23.520.606.100,00)
3	Perolehan Peralatan dan Mesin	118.167.717.934,00	189.446.017.112,00	(71.278.299.178,00)
4	Perolehan Gedung dan Bangunan	86.018.035.799,00	129.969.430.312,00	(43.951.394.513,00)
5	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	175.796.888.261,00	116.084.739.946,00	59.712.148.315,00
6	Perolehan Aset Tetap Lainnya	19.324.226.162,00	17.526.966.056,00	1.797.260.106,00
7	Perolehan Aset Lainnya	2.924.327.500,00	543.850.955,00	2.380.476.545,00
8	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	6.000.000.000,00	12.329.670.795,00	(6.329.670.795,00)
	<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>436.717.844.656,00</b>	<b>507.908.867.776,00</b>	<b>(71.191.023.120,00)</b>

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi tahun 2023 sebesar Rp436.717.844.656,00 lebih rendah dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp507.908.867.776,00 atau turun sebesar (Rp71.191.023.120,00).

### 5.1.16.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan tahun 2023 berasal dari Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan dikurangi Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	85.231.708,00	0,00	85.231.708,00
2	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>85.231.708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.231.708,00</b>

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan tahun 2023 sebesar Rp85.231.708,00 lebih besar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp0,00 atau naik sebesar Rp85.231.708,00.

#### 5.1.16.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Masuk Kas ke Kas Daerah dari Aktivitas Pendanaan dalam Tahun 2023 berasal dari :

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Masyarakat	85.231.708,00	0,00	85.231.708,00
	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>85.231.708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.231.708,00</b>

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan tahun 2023 sebesar Rp85.231.708,00 lebih besar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp0,00 atau naik sebesar Rp85.231.708,00.

### 5.1.16.3.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan dalam Tahun 2023 sebesar Rp0,00.

### 5.1.16.4. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris tahun 2023 berasal dari Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris dikurangi Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	193.906.538.076,00	202.377.397.679,00	(8.470.859.603,00)
2	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	(193.922.480.938,00)	(202.565.032.145,00)	8.642.551.207,00
	<b>Jumlah</b>	<b>(15.942.862,00)</b>	<b>(187.634.466,00)</b>	<b>171.691.604,00</b>

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris tahun 2023 sebesar (Rp15.942.862,00) lebih rendah dibandingkan tahun 2022 sebesar (Rp187.634.466,00) atau naik sebesar Rp171.691.604,00.

#### 5.1.16.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas ke Kas Daerah dari Aktivitas Transitoris dalam tahun 2023 berasal dari:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	193.906.504.438,00	202.376.656.578,00	(8.470.152.140,00)
2	Penambahan Kas BOS Tahun Lalu	33.638,00	261.101,00	(227.463,00)
3	Penambahan Kas di BLUD	0,00	480.000,00	(480.000,00)
	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>193.906.538.076,00</b>	<b>202.377.397.679,00</b>	<b>(8.470.859.603,00)</b>

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 sebesar Rp193.906.538.076,00 lebih rendah dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp202.377.397.679,00 atau turun sebesar (Rp8.470.859.603,00).

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi Penerimaan PFK sebesar Rp193.906.504.438,00 yang terdiri dari penerimaan potongan Pajak Penghasilan, PPN, Asuransi Tenaga Kerja, Iuran Wajib Pegawai, BPJS Pegawai, Tabungan Perumahan (Taperum) dan Iuran Jaminan Kesehatan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD). Penambahan Kas BOS Tahun Lalu sebesar Rp33.638,00 merupakan Koreksi tambah Saldo Awal berdasarkan nilai di Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (ARKAS) Dinas Pendidikan.

#### 5.1.16.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas ke Kas Daerah dari Aktivitas Transitoris dalam tahun 2023 berasal dari:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Pengeluaran PFK	193.909.781.938,00	202.373.379.078,00	(8.463.597.140,00)
2	Pengembalian Kas Desa Tahun 2022 melalui Pemindahbukuan Kasda tahun 2023	12.699.000,00	0,00	12.699.000,00
3	Pengurangan Kas BOS tahun lalu	0,00	0,00	0,00
4	Pengurangan Kas BLUD Puskesmas tahun lalu	0,00	0,00	0,00
5	Pengurangan Kas BLUD RSUD pengembalian kelebihan pendapatan BPJS Tahun 2021	0,00	191.653.067,00	(191.653.067,00)
	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>193.922.480.938,00</b>	<b>202.565.032.145,00</b>	<b>(8.642.551.207,00)</b>

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris tahun 2023 sebesar Rp193.922.480.938,00 lebih rendah dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp202.565.032.145,00 atau turun sebesar (Rp8.642.551.207,00).

#### Kenaikan/Penurunan Kas

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 sebesar (Rp105.543.599.465,56) berasal dari Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih dari Aktivitas Operasi, Investasi, Pendanaan dan Transitoris dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
5.1.16.1 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	331.104.956.344,44	437.613.387.979,84	(106.508.431.635,40)
5.1.16.2 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(436.717.844.656,00)	(507.908.867.776,00)	71.191.023.120,00
5.1.16.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	85.231.708,00	0,00	85.231.708,00
5.1.16.4 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(15.942.862,00)	(187.634.466,00)	171.691.604,00
<b>Kenaikan/Penurunan Kas</b>	<b>(105.543.599.465,56)</b>	<b>(70.483.114.262,16)</b>	<b>(35.060.485.203,40)</b>

Kenaikan/Penurunan Kas per 31 Desember 2023 sebesar (Rp105.543.599.465,56) mengalami penurunan sebesar (Rp35.060.485.203,40) dari Kenaikan/Penurunan Kas Tahun 2022 sebesar (Rp70.483.114.262,16).

#### 5.1.16.5 Saldo Awal Kas

Saldo Awal Kas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang per 1 Januari 2023 sebesar Rp161.546.137.893,74 sama dengan nilai saldo akhir kas per 31 Desember 2022. Rincian Saldo Awal Kas yaitu:

No	Uraian	1 Januari 2023 (Rp)
1	Kas di BUD	146.307.325.290,74
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	105.248.357,00

3	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	46.800,00
4	Kas di BLUD	14.798.385.042,00
5	Saldo Akhir Kas BOS	305.784.351,00
6	Kas Lainnya	29.348.053,00
7	Setara Kas	0,00
	<b>Saldo Awal Kas</b>	<b>161.546.137.893,74</b>

#### 5.1.16.6 Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp56.002.538.428,18 dapat dilihat dalam rincian sebagai berikut.

NO	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Kas di BUD	42.529.895.690,18	146.307.325.290,74	(103.777.429.600,56)
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	8.240.617,00	105.248.357,00	(97.007.740,00)
3	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	46.800,00	(46.800,00)
4	Kas di BLUD	12.219.061.526,00	14.798.385.042,00	(2.579.323.516,00)
5	Kas Dana BOS	379.772.898,00	305.784.351,00	73.988.547,00
6	Kas Lainnya	865.567.697,00	29.348.053,00	836.219.644,00
7	Setara Kas		0,00	
	<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>56.002.538.428,18</b>	<b>161.546.137.893,74</b>	<b>(105.543.599.465,56)</b>

Saldo Akhir Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Per 31 Desember 2023 sebesar Rp56.002.538.428,18 sama jumlahnya dengan Kas di Neraca per 31 Desember 2023 sebesar Rp56.002.538.428,18. Rincian Saldo Akhir Kas bisa dilihat pada tabel Rincian Saldo Akhir Kas dan Setara Kas.

### 5.1.17. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan rincian Saldo Ekuitas Akhir Per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.808.399.630.166,94 berasal dari Ekuitas awal ditambah Surplus/Defisit-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar. Rincian Laporan Perubahan Ekuitas sebagai berikut.

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Ekuitas Awal	3.657.942.301.373,80	3.482.042.924.068,62	175.899.377.305,18
2	Surplus / Defisit – LO	36.882.220.017,28	174.657.765.583,50	(137.775.545.566,22)
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :	113.575.108.775,86	1.241.611.721,68	112.333.497.054,18
	1) Koreksi Nilai Kas	(12.665.362,00)	741.101,00	(13.406.463,00)
	2) Koreksi Nilai Persediaan	2.135.055.440,19	165.175.121,44	1.969.880.318,75
	3) Koreksi Piutang	(197.256.888,00)	(491.663.082,00)	294.406.194,00
	4) Koreksi Penyisihan Piutang	891.030,00	0,00	891.030,00
	5) Koreksi Pencatatan Aset Tetap	113.392.254.854,50	3.657.150.000,00	109.735.104.854,50
	6) Koreksi Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.898.975.467,12)	5.183.905.470,07	(7.082.880.937,19)
	7) Koreksi Pencatatan Aset Lain-lain	0,00	0,00	0,00
	8) Koreksi Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(5.495.291,51)	1.194.204.889,42	(1.199.700.180,93)
	9) Koreksi Perhitungan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	161.300.459,80	102.405.017,50	58.895.442,30
	10) Koreksi Atas Utang	0,00	133.591.368,00	(133.591.368,00)
	11) Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	(8.703.898.163,75)	8.703.898.163,75
	12) Lain-lain:	0,00	0,00	0,00
4	Ekuitas Akhir	3.808.399.630.166,94	3.657.942.301.373,80	150.457.328.793,13

#### 1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal tahun 2023 sebesar Rp3.657.942.301.373,80 lebih besar dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp3.482.042.924.068,62 atau naik sebesar Rp175.899.377.305,18. Ekuitas Awal tahun 2023 berasal dari Ekuitas Akhir tahun 2022 sebesar Rp3.657.942.301.373,80;

#### 2. Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO tahun 2023 sebesar Rp36.882.220.017,28 lebih rendah dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp174.657.765.583,50 atau turun sebesar (Rp137.775.545.566,23).

Surplus/Defisit LO Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 sebesar Rp36.882.220.017,28 berasal dari Surplus Dari Operasi sebesar Rp25.297.431.502,64 ditambah Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp11.929.614.251,64 ditambah Pos Luar Biasa sebesar (Rp344.825.737,00).

### **3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar tahun 2023 sebesar Rp113.575.108.775,86 lebih besar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1.241.611.721,68 atau naik sebesar Rp112.333.497.054,18.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar tahun 2023 sebesar Rp113.575.108.775,86 terdiri dari:

#### **1) Koreksi Nilai Kas**

Koreksi Nilai Kas tahun 2023 sebesar (Rp12.665.362,00) lebih rendah dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp741.101,00 atau turun sebesar (Rp13.406.463,00).

Koreksi Nilai Kas tahun 2023 sebesar (Rp12.665.362,00) merupakan Koreksi Saldo Awal KAS BOS SDN Rancamulya sebesar Rp33.638,00 dan pemindahbukuan Kas Daerah ke Kas Desa Conggeang sebesar Rp12.699.000,00.

#### **2) Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan tahun 2023 sebesar Rp2.135.055.440,19 lebih besar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp165.175.121,44 atau naik sebesar Rp1.969.880.318,75.

Koreksi Nilai Persediaan tahun 2023 sebesar Rp2.135.055.440,19 merupakan koreksi persediaan saldo awal obat pada Dinas Kesehatan sesuai nilai di Unit Farmasi sebesar Rp2.202.084.790,66 serta koreksi Persediaan Awal Obat pada 6 (enam) BLUD Puskesmas sebesar Rp67.029.350,47.

#### **3) Koreksi Piutang**

Koreksi Piutang tahun 2023 sebesar (Rp197.256.888,00) lebih besar dibandingkan tahun 2022 sebesar (Rp491.663.082,00) atau naik sebesar Rp294.406.194,00.

Koreksi Piutang Tahun 2023 sebesar (Rp197.256.888,00) merupakan:

- a) Koreksi Pencatatan Piutang Tahun Lalu pada RSUD sebesar Rp2.933.977,00;
- b) Koreksi Penghapusan Piutang PBB tahun 2014 s.d. 2022 pada Bapenda sebesar Rp22.342.075,00;
- c) Koreksi lebih catat Piutang Pajak BPHTB-Pemindahan Hak saldo tahun lalu sebesar Rp178.206.000,00 pada Bapenda; serta
- d) Koreksi penambahan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sebesar Rp357.210,00.

#### **4) Koreksi Penyisihan Piutang**

Koreksi Penyisihan Piutang tahun 2023 sebesar Rp891.030,00 lebih besar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp0,00 atau naik sebesar Rp891.030,00. Koreksi

Penyisihan Piutang ini merupakan Koreksi lebih catat Penyisihan Piutang Pajak BPHTB-Pemindahan Hak dari saldo tahun lalu sebesar Rp891.030,00 pada Bapenda.

#### **5) Koreksi Pencatatan Aset Tetap**

Koreksi Pencatatan Aset Tetap tahun 2023 sebesar Rp113.392.254.854,50 lebih besar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp3.657.150.000,00 atau naik sebesar Rp109.735.104.854,50.

Koreksi Pencatatan Aset Tetap tahun 2023 sebesar Rp113.392.254.854,50 terdiri dari:

- a) Koreksi atas penambahan Aset Tetap (Kurang Catat) Jalan, Jaringan dan Irigasi pada DPKPP sebesar Rp7.937.289,00;
- b) Koreksi pengurangan Aset Tetap (Lebih Catat) Sepeda Motor pada DPKP sebesar Rp45.529.555,00 serta Aset Tetap Tanah pada Kecamatan Cisarua sebesar Rp16.200.000,00;
- c) Koreksi pengurangan aset tetap berupa Ekstrakomptabel berdasarkan Temuan BPK tahun 2022 pada DLHK sebesar Rp24.649.880,00, Kecamatan Darmaraja sebesar Rp47.500.000,00 dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sebesar Rp1.650.000,00;
- d) Koreksi penghapusan aset tetap timbangan bayi pada Puskesmas Buahdua sebesar Rp0,50;
- e) Koreksi lebih catat Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2003 karena pencatatan ganda di KIB B sebesar Rp15.000.000,00 dan Peralatan dan Mesin Tahun 2003 s.d 2007 sebesar Rp661.879.000,00 pada Dinas Pendidikan;
- f) Koreksi lebih catat Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2003 karena pencatatan ganda di KIB B sebesar Rp10.000.000,00 pada Kesbangpol; dan
- g) Koreksi kurang catat Aset Tetap sebesar Rp114.205.076.000,00. Terdiri dari: Tanah sebesar Rp108.565.605.000,00 serta Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.639.471.000,00 yang bersumber dari hasil penilaian aset Tahun 2022 dicatat di tahun 2023 pada BKAD.

#### **6) Koreksi Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Koreksi Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2023 sebesar (Rp1.898.975.467,12) lebih rendah dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp5.183.905.470,07 atau turun sebesar (Rp7.082.880.937,19)

Koreksi Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2023 sebesar (Rp1.898.975.467,12) yaitu :

- a) Koreksi atas nilai Akumulasi Penyusutan tahun lalu pada tahun berjalan dengan menyesuaikan pada hasil perhitungan Akumulasi Penyusutan akhir tahun yaitu sebesar Rp2.369.201.106,04;

- b) Koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan pada DPMPTSP sebesar Rp0,46 serta Kecamatan Ujungjaya sebesar Rp17.000.000;
- c) Koreksi pengurangan Akumulasi Penyusutan akibat lebih catat Sepeda Motor pada DPKP sebesar Rp45.529.555,00;
- d) Koreksi Akumulasi Penyusutan dari hibah Jalan, Jaringan dan Irigasi pada DPKP sebesar Rp99.930.379,00;
- e) Koreksi Akumulasi Penyusutan dari penghapusan Aset Tetap Peralatan *Personal Computer* pada Puskesmas Situ sebesar Rp0,38;
- f) Koreksi Akumulasi Penyusutan dari ekstrakomptabel berdasarkan temuan BPK Tahun 2022 pada DLHK sebesar Rp24.649.880,00 dan Kecamatan Darmaraja sebesar Rp33.250.000,00;
- g) Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar (Rp219.644.841,00); Gedung dan Bangunan sebesar Rp622.658.017,00 serta JIJ sebesar (Rp1,00) karena ada penghapusan Aset pada Dinas Pendidikan;
- h) Koreksi lebih catat Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2003 karena pencatatan ganda di KIB B sebesar Rp15.000.000,00 serta Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2003 s.d. 2007 sebesar Rp661.879.000 pada Dinas Pendidikan; dan
- i) Koreksi lebih catat Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2003 karena pencatatan ganda di KIB B sebesar Rp10.000.000,00 pada Kesbangpol.

**7) Koreksi Pencatatan Aset Lain-lain**

Koreksi Pencatatan Aset Lain-lain tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp0,00;

**8) Koreksi Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain**

Koreksi Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar (Rp5.495.291,51) lebih rendah dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1.194.204.889,42 atau turun sebesar (Rp1.199.700.180,93).

Koreksi Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain tahun 2023 sebesar (Rp5.495.291,51) merupakan :

- a) Koreksi atas nilai Akumulasi Penyusutan tahun lalu pada tahun berjalan dengan menyesuaikan pada hasil perhitungan Akumulasi Penyusutan akhir tahun sebesar Rp2.104.706,25;
- b) Koreksi atas penghapusan Akumulasi Penyusutan aset lain-lain sebesar Rp2,24; dan
- c) Koreksi penambahan saldo awal Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp7.600.000,00 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



**9) Koreksi Perhitungan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud**

Koreksi Perhitungan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2023 sebesar Rp161.300.459,80 lebih besar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp102.405.017,50 atau turun sebesar Rp58.895.442,30.

Koreksi Perhitungan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun 2023 sebesar Rp161.300.459,80 merupakan Koreksi atas nilai akumulasi amortisasi tahun lalu pada tahun berjalan dengan menyesuaikan pada hasil perhitungan akumulasi amortisasi akhir tahun sebesar Rp161.300.459,80 terdiri dari koreksi perhitungan akumulasi amortisasi pada RSUD sebesar Rp33.082.460,00 dan Bappenda sebesar Rp128.217.999,80.

**10) Koreksi Atas Utang**

Koreksi Atas Utang tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp0,00.

**11) Koreksi Ekuitas Lainnya**

Koreksi Ekuitas Lainnya tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp0,00.

**4. Ekuitas Akhir**

Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.808.399.630.166,94 lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp3.657.942.301.373,80 atau naik sebesar Rp150.457.328.793,14.

Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.808.399.630.166,94 merupakan nilai hasil penjumlahan dari Ekuitas Awal sebesar Rp3.657.942.301.373,80 ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar Rp36.882.220.017,28 ditambah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp113.575.108.775,86.

## BAB VI INFORMASI NON KEUANGAN

### 6.1. Kondisi Geografis & Administrasi Wilayah

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Barat yang terletak antara 6°44'-70°83' Lintang Selatan dan 107°21'-108°21' Bujur Timur, dengan Luas Wilayah 155.872 Ha yang terdiri dari 26 Kecamatan dengan 272 desa dan 7 Kelurahan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Sumedang berupa perbukitan dan pegunungan kecuali di sebagian kecil wilayah utara Kabupaten Sumedang. Kemudian dataran terendah ketinggiannya mencapai 26 meter di atas permukaan Laut dan yang tertinggi adalah puncak gunung Tampomas dengan ketinggian sekitar 1.684 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan posisi geografisnya, batas-batas wilayah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Tasikmalaya
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Bandung dan Kabupaten Subang



**Gambar 6.1 Peta Administratif Berdasarkan Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Sumedang**

*Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038*

Kondisi topografi kemiringan lahan wilayah Kabupaten Sumedang dapat diklasifikasikan menjadi lima kelas, yaitu:

1. 0–8 %, merupakan daerah datar hingga berombak dengan luas area sekitar 12,24 %. Kemiringan wilayah dominan di bagian timur laut, barat laut, barat daya serta kawasan perkabupatenan;
2. 8–15 %, merupakan daerah berombak sampai bergelombang dengan area sekitar 5,37 %. Kemiringan wilayah dominan di bagian tengah ke utara, barat laut dan bagian barat daya;
3. 15–25 %, merupakan daerah bergelombang sampai berbukit dengan komposisi area mencakup 51,68 %. Kemiringan lereng tipe ini paling dominan di wilayah Kabupaten Sumedang. Persebarannya berada di bagian tengah sampai ke tenggara, bagian selatan sampai barat daya dan bagian barat;
4. 25–40 %, merupakan daerah berbukit sampai bergunung dengan luas area sekitar 31,58 %. Kemiringan lereng tipe ini dominan di wilayah Kabupaten Sumedang bagian tengah, bagian selatan dan bagian timur; dan
5. Lebih dari kemiringan 40 %, merupakan daerah bergunung dengan luas area mencakup sekitar 11,36 %. Kemiringan lereng tipe ini dominan di wilayah Kabupaten Sumedang bagian selatan, bagian timur dan bagian barat daya.

**Tabel 6.1**  
**Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )
1	Wado	84,27
2	Jatinunggal	72,12
3	Darmaraja	49,38
4	Cibugel	59,52
5	Cisitu	65,03
6	Situraja	43,23
7	Conggeang	106,98
8	Paseh	31,62
9	Surian	70,88
10	Buahdua	107,68
11	Tanjungsari	44,86
12	Sukasari	41,82
13	Pamulihan	50,70
14	Cimanggung	55,55
15	Jatinangor	31,60
16	Rancakalong	55,07
17	Sumedang Selatan	92,51
18	Sumedang Utara	30,40
19	Ganeas	22,90
20	Tanjungkerta	43,72
21	Tanjungmedar	60,67
22	Cimalaka	43,29
23	Cisarua	17,71
24	Tomo	84,74
25	Ujungjaya	86,23
26	Jatigede	106,24

Sumber : Badan Pusat Statistik (Kabupaten Sumedang Dalam Angka, 2022)

Kabupaten Sumedang memiliki iklim tropis, suhu rata-rata tahunan adalah 24,7°C, dengan curah hujan rata-rata 2.570 mm, adapun curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember-Januari. Kondisi iklim mikro sangat berpengaruh pada produksi pertanian di Kabupaten Sumedang namun perubahan iklim tersebut tidak dapat diprediksi karena suatu hal yang alami tapi hal tersebut dapat diantisipasi dengan mencermati kondisi siklus iklim sebelumnya dan juga memperhatikan informasi cuaca dari Badan Meteorologi Nasional. Sehingga dengan demikian dapat mencegah terjadinya kegagalan panen produk pertanian di Kabupaten Sumedang.

Potensi bencana alam yang banyak dijumpai di Kabupaten Sumedang pada umumnya berupa gerakan tanah, erosi, banjir, angin puting beliung, dan gempa bumi. Kejadian gerakan tanah disamping akibat kegempaan, sering terjadi akibat hujan yang terus menerus dan cukup besar. Begitu pula erosi yang terjadi pada sungai-sungai setempat sedangkan banjir sering terjadi disebabkan drainase yang kurang memadai dan banyaknya tutupan lahan, seperti di sekitar Jalan Raya Rancaekek (sekitar Kecamatan Cimanggung) dan Kecamatan Jatinangor.

Gerakan tanah yang terjadi di daerah Kabupaten Sumedang pada umumnya banyak dipengaruhi oleh sifat fisik batuan dasar dan tanah pelapukan pembentuk lereng terutama pada daerah-daerah yang dibentuk oleh batuan dasar batu lempung ataupun terdapatnya lapisan batu lempung dalam batuan dasar pembentuk lereng. Sifat fisik batuan/tanah pelapukan merupakan salah satu faktor alam penyebab terjadinya gerakan tanah disamping faktor-faktor alam lainnya seperti curah hujan, struktur geologi (perlipatan, sesar dan kekar), stratigrafi (kedudukan bidang perlapisan terhadap kemiringan lerengnya), tataguna lahan, morfologi, dan kegempaan. Untuk gerakan tanah sering terjadi di bagian utara terutama di sekitar Kecamatan Surian, Kecamatan Buahdua, Kecamatan Tanjungkerta, Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Conggeang, dan Kecamatan Rancakalong. Sedangkan di bagian timur terutama yang berada pada jalur sesar, berada di Kecamatan Tomo, Kecamatan Jatigede, Kecamatan Darmaraja, dan Kecamatan Jatinunggal. Penjelasan lebih rinci disampaikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 6.2**  
**Kawasan Rawan Bencana**

No	Kawasan Bencana	Lokasi
1	Gerakan Tanah	Tersebar di sebagian wilayah Sumedang (Luas kurang lebih 21.612 Ha)
2	Banjir	a. Kecamatan Jatinangor; b. Kecamatan Cimanggung; c. Kecamatan Ujungjaya; d. Kecamatan Tomo; e. Kecamatan Sumedang Utara; dan f. Kecamatan Sumedang Selatan.
3	Puting Beliung	a. Kecamatan Cimanggung; b. Kecamatan Cimalaka; c. Kecamatan Cisarua; d. Kecamatan Ujungjaya; dan e. Kecamatan Wado.

No	Kawasan Bencana	Lokasi
4	Gempa Bumi	a. Kecamatan Jatinangor; b. Kecamatan Cimanggung; c. Kecamatan Pamulihan; d. Kecamatan Tanjungsari; e. Kecamatan Sukasari; f. Kecamatan Rancakalong; g. Kecamatan Sumedang Utara; h. Kecamatan Sumedang Selatan; i. Kecamatan Ganeas; j. Kecamatan Cisarua; k. Kecamatan Cimalaka; l. Kecamatan Paseh; m. Kecamatan Tanjungkerta; n. Kecamatan Tanjungmedar; o. Kecamatan Situraja; p. Kecamatan Cisit;u q. Kecamatan Darmaraja; r. Kecamatan Wado; s. Kecamatan Jatinunggal; t. Kecamatan Jatigede; u. Kecamatan Tomo; v. Kecamatan Ujungjaya; w. Kecamatan Conggeang; x. Kecamatan Buahdua; dan y. Kecamatan Surian.

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038

Jumlah penduduk Kabupaten Sumedang per 31 Desember 2023 adalah sebanyak 1.205.685 yang terdiri dari 607.848 jiwa penduduk laki-laki dan 597.837 jiwa penduduk perempuan.

**Tabel 6.3**  
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tingkat Kecamatan**

NO	Nama Kecamatan	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	Jumlah
		n (jiwa)	n (jiwa)	n (jiwa)
1	Wado	23,463	22,539	46,002
2	Jatinunggal	23,963	23,505	47,468
3	Darmaraja	19,147	18,741	37,888
4	Cibugel	13,101	12,699	25,800
5	Cisitu	15,863	15,580	31,443
6	Situraja	22,020	21,571	43,591
7	Conggeang	14,823	15,018	29,841
8	Paseh	19,737	19,626	39,363
9	Surian	6,158	6,066	12,224
10	Buahdua	16,853	17,168	34,021
11	Tanjungsari	44,579	43,942	88,521
12	Sukasari	17,906	17,306	35,212
13	Pamulihan	33,082	32,600	65,682
14	Cimanggung	47,246	45,616	92,862
15	Jatinangor	47,556	46,080	93,636

NO	Nama Kecamatan	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	Jumlah
		n (jiwa)	n (jiwa)	n (jiwa)
16	Rancakalong	21,389	21,116	42,505
17	Sumedang Selatan	41,782	41,174	82,956
18	Sumedang Utara	51,509	50,670	102,179
19	Ganeas	13,308	12,945	26,253
20	Tanjungkerta	18,126	17,638	35,764
21	Tanjungmedar	13,628	13,758	27,386
22	Cimalaka	32,470	31,832	64,302
23	Cisarua	10,757	10,603	21,360
24	Tomo	11,876	12,076	23,952
25	Ujung Jaya	16,056	16,310	32,366
26	Jatigede	11,450	11,658	23,108
	<b>Total Kab/Kota</b>	<b>607,848</b>	<b>597,837</b>	<b>1,205,685</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2023

Berdasarkan tabel di atas, Kecamatan Sumedang Utara merupakan kecamatan di Kabupaten Sumedang yang memiliki populasi penduduk terbanyak yaitu 102.179 jiwa dan Kecamatan Surian merupakan kecamatan yang memiliki populasi paling sedikit sebanyak 12.224 jiwa.

## 6.2. Penggantian Manajemen Pemerintahan Selama Tahun Berjalan

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah beberapa kali mengalami penggantian Kepala Daerah. Pada tahun 2023, Kabupaten Sumedang dipimpin oleh Bupati Bapak Dr. H. Dony Ahmad Munir, S.T., M.M dan Wakil Bupati Bapak H. Erwan Setiawan, S.E.. Masa jabatan kepemimpinan beliau selama 5 (lima) tahun dimulai sejak tanggal 20 September 2018 dan berakhir pada 20 September 2023.

Untuk mencegah kekosongan jabatan setelah berakhirnya kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 20 September 2023, maka ditunjuklah Bapak Drs. Herman Suryatman, M.,Si. sebagai Penjabat Bupati Sumedang. Sebelum menjadi Penjabat Bupati Sumedang, beliau merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang sejak tanggal 13 Januari 2019. Kepemimpinan Bapak Drs. Herman Suryatman, M.,Si dimulai sejak 20 September 2023 dan berakhir pada 1 April 2024, dimana per 1 April 2024 beliau kemudian dilantik menjadi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

Setelah berakhirnya Bapak Drs. Herman Suryatman, M.,Si sebagai Penjabat Bupati Sumedang, Ibu Hj. Tuti Ruswati, S.Sos, M.Si. ditunjuk menjadi Pelaksana Harian (Plh) Bupati sampai dengan tanggal 20 April 2024, kemudian pada 20 April 2024 sampai dengan sekarang, jabatan Bupati Sumedang diduduki oleh Penjabat Bupati Sumedang Bapak Drs. H. Yudia Ramli, M.Si. hingga adanya Bupati Definitif yang terpilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada akhir tahun 2024. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh)

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) dan Direktur BUMD, BLUD dan BMD Kementerian Dalam Negeri.

### 6.3. Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sumedang pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 6.4**  
**Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023**

NO	SKPD	NO	SKPD
1	Dinas Pendidikan	11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Dinas Kesehatan	12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13	Dinas Perhubungan
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	14	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
5	Satuan Polisi Pamong Praja	15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7	Dinas Sosial	17	Dinas Arsip dan Perpustakaan
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	18	Dinas Perikanan dan Peternakan
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
21	Sekretariat Daerah	38	Kecamatan Tanjungsari
22	Sekretariat DPRD	39	Kecamatan Sukasari
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	40	Kecamatan Pamulihan
24	Badan Keuangan dan Aset Daerah	41	Kecamatan Cimanggung
25	Badan Pendapatan Daerah	42	Kecamatan Jatinangor
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	43	Kecamatan Rancakalong
27	Inspektorat	44	Kecamatan Sumedang Selatan
28	Kecamatan Wado	45	Kecamatan Sumedang Utara
29	Kecamatan Jatinunggal	46	Kecamatan Ganeas
30	Kecamatan Darmaraja	47	Kecamatan Tanjungkerta
31	Kecamatan Cibugel	48	Kecamatan Tanjungmedar
32	Kecamatan Cisituh	49	Kecamatan Cimalaka
33	Kecamatan Situraja	50	Kecamatan Cisarua
34	Kecamatan Conggeang	51	Kecamatan Tomo
35	Kecamatan Paseh	52	Kecamatan Ujungjaya
36	Kecamatan Surian	53	Kecamatan Jatigede
37	Kecamatan Buahdua	54	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang, Wilayah Kecamatan terdiri dari 275 Desa dan 7 Kelurahan dengan rincian jumlah desa per Kecamatan di Kabupaten Sumedang sebagai berikut:

**Tabel 6.5**  
**Jumlah Desa per Kecamatan di Kabupaten Sumedang**

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Wado	10	14	Cimanggung	11
2	Jatinunggal	9	15	Jatinangor	12
3	Darmaraja	16	16	Rancakalong	10
4	Cibugel	7	17	Sumedang Selatan	10/4
5	Cisitu	10	18	Sumedang Utara	10/3
6	Situraja	15	19	Ganeas	8
7	Conggeang	12	20	Tanjungkerta	12
8	Paseh	10	21	Tanjungmedar	9
9	Surian	9	22	Cimalaka	14
10	Buahdua	14	23	Cisarua	7
11	Tanjungsari	12	24	Tomo	9
12	Sukasari	7	25	Ujungjaya	9
13	Pamulihan	11	26	Jatigede	12

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang

Sementara rincian nama-nama Desa dapat dilihat pada **Lampiran 41 - Daftar Desa dan Kelurahan di Wilayah Kecamatan Kabupaten Sumedang.**

Kemudian, dalam melaksanakan urusan pemerintahannya, beberapa Dinas dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yaitu:

**Tabel 6.6**  
**Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) pada Kabupaten Sumedang**

No.	Dinas	UPTD	Regulasi
1.	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Rumah Sakit Umum Daerah</li> <li>35 Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>1 Laboratorium Kesehatan Daerah</li> </ol>	Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 UPTD Peralatan dan Perbengkelan</li> <li>2 UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi</li> </ol>	Peraturan Bupati Sumedang Nomor 175 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan dan Struktural pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
3.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 UPTD Pengendalian Penduduk</li> </ol>	Peraturan Bupati Sumedang Nomor 180 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan dan Struktural pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4.	Dinas Perikanan dan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 UPTD Perikanan dan Peternakan</li> <li>2 UPTD Balai Benih Ikan</li> <li>3 UPTD Rumah Potong Hewan</li> <li>4 UPTD Pembibitan Ternak</li> <li>5 UPTD Pasar Hewan</li> </ol>	Peraturan Bupati Sumedang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perikanan dan Peternakan



No.	Dinas	UPTD	Regulasi
5.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1. UPTD Agrobisnis Tembakau	Peraturan Bupati Sumedang Nomor 100 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
6.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. UPTD Persampahan 2. UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah 3. UPTD Laboratorium Lingkungan 4. UPTD Taman Keanekaragaman Hayati	Peraturan Bupati Sumedang Nomor 181 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. UPTD Balai Pelatihan Kerja	Peraturan Bupati Sumedang Nomor 179 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedangkan rincian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) selaku UPTD pada Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 6.7**  
**Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kabupaten Sumedang Tahun 2023**

NO	BLUD	NO	BLUD
1	Rumah Sakit Umum Daerah	10	Puskesmas Sumedang Selatan
2	Puskesmas Jatinangor	11	Puskesmas Sukagalih
3	Puskesmas Cimanggung	12	Puskesmas Kotakaler
4	Puskesmas Tanjungsari	13	Puskesmas Situ
5	Puskesmas Margajaya	14	Puskesmas Ganeas
6	Puskesmas Sukasari	15	Puskesmas Situraja
7	Puskesmas Haurngombong	16	Puskesmas Cisititu
8	Puskesmas Pamulihan	17	Puskesmas Darmaraja
9	Puskesmas Rancakalong	18	Puskesmas Cibugel
19	Puskesmas Wado	29	Puskesmas Sukamantri
20	Puskesmas Jatinunggal	30	Puskesmas Tanjungmedar
21	Puskesmas Jatigede	31	Puskesmas Buahdua
22	Puskesmas Tomo	32	Puskesmas Hariang
23	Puskesmas Ujungjaya	33	Puskesmas Surian
24	Puskesmas Conggeang	34	Puskesmas Cisempur
25	Puskesmas Paseh	35	Puskesmas Sawahdadap
26	Puskesmas Cimalaka	36	Puskesmas Padasuka
27	Puskesmas Cisarua	37	Laboratorium Kesehatan Daerah
28	Puskesmas Tanjungkerta		

#### 6.4. Kewajiban Kontinjensi

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang memiliki Kewajiban Kontinjensi atas perkara sebagai berikut :

**Tabel 6.8**  
**Kewajiban Kontinjensi per 31 Desember 2023**

No	Perkara	Penggugat	Tergugat	Putusan	Keterangan
1	Pembongkaran bangunan kios yang belum berakhir atau belum habis masa berlakunya atau yang masih berlaku haknya	- Suryadi Wijaya <i>(Penggugat I)</i> - Yuyun Sugandi <i>(Penggugat II)</i>	- Pemerintah Kabupaten Sumedang <i>(Tergugat I)</i> - PT. Bangun Jaya Allia <i>(Tergugat II)</i>	<b><u>Putusan I :</u></b> Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 33/Pdt.G/2015/PN.Smd tanggal 26 April 2016 memutuskan bahwa : - Tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan pembongkaran terhadap Bangunan Kios yang belum habis masa jangka waktunya adalah perbuatan melawan hukum sehingga Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat. - Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul. <b><u>Putusan II :</u></b> Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 330/PDT/2016/PT.BDG tanggal 5 September 2016 memutuskan bahwa: - Pembongkaran kios yang belum berakhir masa berlakunya merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat. - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 26 April 2016 Nomor	Belum diproses lebih lanjut karena belum jelas persentase tanggung renteng masing-masing Tergugat.

No	Perkara	Penggugat	Tergugat	Putusan	Keterangan
				33/Pdt.G/2015/PN.Smd - Membebaskan biaya perkara kepada Para Pembanding.	
				<b><u>Putusan III :</u></b> Putusan Mahkamah Agung Nomor 775 K/Pdt/2017 tanggal 16 Mei 2017 memutuskan bahwa: - Pembongkaran objek sengketa milik Para Penggugat oleh Tergugat berupa kios yang berdiri di atas tanah hak guna bangunan milik Para Penggugat yang belum berakhir masa berlakunya merupakan perbuatan melawan hukum yang mewajibkan Para Tergugat untuk membayar ganti rugi, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (Para Tergugat) ditolak. - Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul.	

#### 6.5. Penjelasan Non Keuangan Lainnya

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 163 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 166 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah diketahui terdapat 213 bidang tanah dan bangunan seluas 19.954,28 m<sup>2</sup> yang disewakan dan ditetapkan tarif sewanya. Berdasarkan hasil analisa KIB pada tahun 2022 ternyata aset-aset yang disewakan tersebut belum masuk dalam KIB sehingga belum tercatat pada Neraca Per 31 Desember 2022 karena belum diketahui besaran nilai perolehannya. Pada saat dilakukan penelusuran atas beberapa blok tanah yang disewakan dalam hal ini sebagai *sampel* penelusuran atas empat blok tanah yang sudah dikenakan tarif sewanya yaitu Blok Samoja, Gelora A. Yani, Jl. Cut Nyak Dhien dan Blok Cijeruk didapatkan hasil penelusuran sebagai berikut:

1. Blok Samoja

Di Blok Samoja ini, tanah yang disewakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang merupakan tanah yang berlokasi di pinggiran jalan provinsi. Tanah tersebut merupakan sisa hasil pembebasan lahan pada saat provinsi ingin membuat jalan.

2. Blok Gelora A. Yani

Di blok ini, merupakan tanah yang disewakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang berlokasi di dalam kompleks Gelora A. Yani. Gelora tersebut masih dipakai oleh masyarakat untuk olahraga sepakbola.

3. Blok Jl. Cut Nyak Dhien

Di blok ini, merupakan tanah yang dulunya dikuasai oleh Kerajaan Sumedang. Sejak merdeka tanah tersebut dihadiahkan kepada pegawai pemerintahan yang dianggap sudah mengabdikan ke pemerintah daerah.

4. Blok Cijeruk

Blok ini merupakan tanah yang dipakai oleh masyarakat korban longsor yang pernah terjadi di Sumedang.

Sedangkan kondisi pada tahun 2023, semua bidang tanah dan bangunan yang disewakan dan telah ditetapkan tarif sewanya termasuk keempat *sample* diatas sudah diketahui nilai perolehannya dan sudah masuk dalam KIB serta tercatat dalam neraca per 31 Desember 2023 Pemerintah Kabupaten Sumedang. Sebagai informasi tambahan, untuk pihak-pihak yang akan melakukan proses penyewaan atas aset tanah dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Sumedang, melakukan transaksi pembayaran serta penagihan kepada pihak penyewa bisa dilakukan secara *online* melalui Aplikasi SEWAPEDIA.

Terkait pencatatan aset tetap tanah dan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum serta berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 620/KEP.226-PUPR/2019 tanggal 9 April 2019 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Kabupaten, diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang memiliki 186 ruas jalan kabupaten dengan panjang 774.368 KM. Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Pengurus Barang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diketahui bahwa ada enam ruas tanah bawah jalan yang belum tercatat sebagai aset tetap di Neraca. Hal ini dikarenakan belum dilakukan penilaian terhadap tanah tersebut sebagai dasar penentuan nilai perolehan. Dimana jalan tersebut merupakan perubahan status dari jalan nasional menjadi jalan kabupaten sebanyak dua ruas, jalan provinsi menjadi jalan kabupaten sebanyak dua ruas dan peningkatan status dua ruas jalan lingkungan menjadi jalan kabupaten. Sebagai tindak lanjutnya akan dilakukan penilaian terhadap ke enam ruas tanah bawah jalan tersebut sehingga diperoleh nilai perolehannya untuk dasar pencatatan dalam aset tetap di Neraca.

Per 31 Desember 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang memiliki 2.371 bidang tanah seluas 47.404.752,65 M2 dengan total nilai Rp779.803.484.596,70. Dari total tersebut, 332 bidang tanah telah memiliki sertifikat dengan luas 1.443.002,75 M2 senilai 82.807.470.539,41 sedangkan 2.039 bidang tanah belum bersertifikat.

**Pj. BUPATI SUMEDANG,**  
  
**Drs. H. YUDIA RAMLI, M.Si**



INSUN MEDICAL

Lampiran 1 - Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa LRA

Rincian Realisasi Belanja Barang Jasa

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	147.366.634.917,00	144.035.418.022,00	(3.331.216.895,00)	107.451.296.133,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	30.167.700,00	30.167.700,00	0,00	182.873.160,00
3	Belanja Jasa Kantor	165.400.907.354,00	159.775.763.692,00	(5.625.143.662,00)	165.625.205.737,00
4	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	57.314.064.153,00	56.492.032.558,00	(822.031.595,00)	56.599.944.588,00
5	Belanja Sewa Tanah	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	20.000.000,00
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.979.037.000,00	3.390.142.500,00	(588.894.500,00)	3.152.419.220,00
7	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	9.447.900.000,00	9.296.586.968,00	(151.313.032,00)	6.543.524.516,00
8	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	146.690.600,00	145.369.500,00	(1.321.100,00)	233.359.000,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	15.715.505.048,00	15.464.190.839,00	(251.314.209,00)	6.638.953.830,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.289.808.000,00	3.010.788.276,00	(279.019.724,00)	3.010.374.197,00
11	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	14.043.463.000,00	13.459.734.764,00	(583.728.236,00)	11.289.342.400,00
12	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	160.312.500,00	0,00	(160.312.500,00)	116.250.000,00
13	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.192.213.320,00	8.065.840.511,00	(126.372.809,00)	6.222.909.815,00
14	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.454.114.500,00	3.443.666.780,00	(10.447.720,00)	10.099.338.354,00
15	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.290.679.000,00	8.182.430.438,00	(108.248.562,00)	727.951.000,00
16	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	62.349.337.000,00	59.565.998.080,00	(2.783.338.920,00)	56.300.680.050,00
17	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	2.691.156.000,00	2.623.509.968,00	(67.646.032,00)	1.308.021.000,00
18	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.431.326.150,00	7.352.259.300,00	(79.066.850,00)	7.193.098.531,00
19	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.289.917.150,00	4.900.485.117,00	(389.432.033,00)	8.020.921.010,00
20	Belanja Barang dan Jasa BOS	92.589.956.420,00	104.338.595.565,00	11.748.639.145,00	101.699.629.651,00
21	Belanja Barang dan Jasa BLUD	276.655.474.946,00	252.303.188.081,00	(24.352.286.865,00)	250.799.194.318,00
<b>Jumlah</b>		<b>883.866.664.758,00</b>	<b>855.904.168.659,00</b>	<b>(27.962.496.099,00)</b>	<b>803.235.286.510,00</b>

**Lampiran 2 - Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin LRA**

**Rincian Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin**

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00	39.787.000,00
2	Belanja Modal Alat Bantu	378.931.070,00	375.926.800,00	(3.004.270,00)	156.330.600,00
3	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	10.207.284.640,00	9.996.048.000,00	(211.236.640,00)	16.034.928.200,00
4	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	100.000.000,00	99.680.000,00	(320.000,00)	0,00
5	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	219.307.000,00
6	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	9.938.140,00	9.931.200,00	(6.940,00)	44.099.550,00
7	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	500.000,00
9	Belanja Modal Alat Pengolahan	227.744.940,00	147.186.940,00	(80.558.000,00)	15.476.455,00
10	Belanja Modal Alat Kantor	2.539.427.340,00	2.519.647.890,00	(19.779.450,00)	2.517.095.774,00
11	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	27.927.522.406,00	27.615.113.000,00	(312.409.406,00)	19.861.646.076,00
12	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	6.269.610,00	6.269.610,00	0,00	0,00
13	Belanja Modal Alat Studio	6.075.506.260,00	5.776.944.689,00	(298.561.571,00)	18.158.425.507,00
14	Belanja Modal Alat Komunikasi	736.327.760,00	733.610.000,00	(2.717.760,00)	680.880.532,00
15	Belanja Modal Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	7.309.350,00
16	Belanja Modal Alat Kedokteran	8.436.091.486,00	8.277.529.058,00	(158.562.428,00)	17.272.931.360,00
17	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	14.342.230.110,00	13.637.669.900,00	(704.560.210,00)	7.992.688.347,00
18	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	4.745.000.000,00	4.713.640.000,00	(31.360.000,00)	53.520.448.482,00
20	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	0,00	0,00	0,00	2.670.000,00
21	Belanja Modal Komputer Unit	6.034.951.230,00	5.809.862.832,00	(225.088.398,00)	11.551.871.003,00
22	Belanja Modal Peralatan Komputer	12.586.212.370,00	12.294.580.630,00	(291.631.740,00)	10.317.887.608,00
23	Belanja Modal Sumur	190.400.000,00	189.919.000,00	(481.000,00)	74.800.000,00



**Lampiran 2 - Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin LRA**

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
24	Belanja Modal Alat Pelindung	1.464.000,00	1.456.000,00	(8.000,00)	0,00
25	Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan	0,00	0,00	0,00	8.622.700,00
26	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	360.000.000,00	352.130.000,00	(7.870.000,00)	824.834.000,00
27	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	8.036.186.900,00	8.036.186.000,00	(900,00)	158.853.000,00
28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	16.459.538.438,00	9.091.230.605,00	(7.368.307.833,00)	11.393.685.864,00
29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	13.343.754.644,00	8.483.155.780,00	(4.860.598.864,00)	18.590.938.704,00
<b>Jumlah</b>		<b>132.744.781.344,00</b>	<b>118.167.717.934,00</b>	<b>(14.577.063.410,00)</b>	<b>189.446.017.112,00</b>

Lampiran 3 - Rincian Realisasi Belanja Dan Transfer Berdasarkan Klasifikasi Organisasi

Realisasi Belanja dan Transfer Berdasarkan Klasifikasi Organisasi

KODE UNIT	NAMA UNIT	BELANJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%
1.01.0.00.0.00.01.	Dinas Pendidikan	957.878.509.928,00	935.252.928.194,00	97,64
1.02.0.00.0.00.01.	Dinas Kesehatan	222.853.766.384,00	219.635.066.909,00	98,56
1.02.0.00.0.00.01.0001.	Rumah Sakit Umum Daerah	225.039.710.297,00	203.957.579.945,00	90,63
1.02.0.00.0.00.01.0002.	Puskesmas Jatinangor	4.424.849.000,00	3.797.162.522,00	85,81
1.02.0.00.0.00.01.0003.	Puskesmas Cimanggung	5.200.495.545,00	4.171.587.145,00	80,22
1.02.0.00.0.00.01.0004.	Puskesmas Tanjungsari	4.626.493.000,00	4.259.703.494,00	92,07
1.02.0.00.0.00.01.0005.	Puskesmas Margajaya	2.284.417.000,00	2.202.304.628,00	96,41
1.02.0.00.0.00.01.0006.	Puskesmas Sukasari	2.321.542.000,00	2.192.103.475,00	94,42
1.02.0.00.0.00.01.0007.	Puskesmas Haurngombong	2.490.312.000,00	2.215.366.675,00	88,96
1.02.0.00.0.00.01.0008.	Puskesmas Pamulihan	2.611.083.000,00	2.402.372.211,00	92,01
1.02.0.00.0.00.01.0009.	Puskesmas Rancakalong	2.545.963.000,00	2.370.599.314,00	93,11
1.02.0.00.0.00.01.0010.	Puskesmas Sumedang Selatan	3.674.853.000,00	3.264.041.294,00	88,82
1.02.0.00.0.00.01.0011.	Puskesmas Sukagalih	1.739.053.000,00	1.686.593.880,00	96,98
1.02.0.00.0.00.01.0012.	Puskesmas Kotakaler	3.509.158.000,00	3.266.571.589,00	93,09
1.02.0.00.0.00.01.0013.	Puskesmas Situ	3.439.799.000,00	3.207.158.170,00	93,24
1.02.0.00.0.00.01.0014.	Puskesmas Ganeas	2.495.644.000,00	2.126.159.571,00	85,19
1.02.0.00.0.00.01.0015.	Puskesmas Situraja	3.536.785.000,00	3.100.064.119,00	87,65
1.02.0.00.0.00.01.0016.	Puskesmas Cisitu	2.874.468.000,00	2.681.167.721,00	93,28
1.02.0.00.0.00.01.0017.	Puskesmas Darmaraja	3.804.295.000,00	3.655.952.448,00	96,10
1.02.0.00.0.00.01.0018.	Puskesmas Cibugel	2.711.745.000,00	2.359.197.151,00	87,00
1.02.0.00.0.00.01.0019.	Puskesmas Wado	4.527.028.744,00	3.812.288.202,00	84,21
1.02.0.00.0.00.01.0020.	Puskesmas Jatinunggal	4.512.150.000,00	3.858.255.338,00	85,51
1.02.0.00.0.00.01.0021.	Puskesmas Jatigede	2.311.693.000,00	1.844.733.354,00	79,80
1.02.0.00.0.00.01.0022.	Puskesmas Tomo	2.278.107.000,00	1.957.079.992,00	85,91
1.02.0.00.0.00.01.0023.	Puskesmas Ujungjaya	2.927.054.000,00	2.802.551.100,00	95,75
1.02.0.00.0.00.01.0024.	Puskesmas Conggeang	3.437.624.000,00	2.977.817.737,00	86,62
1.02.0.00.0.00.01.0025.	Puskesmas Paseh	2.596.760.000,00	2.495.115.216,00	96,09
1.02.0.00.0.00.01.0026.	Puskesmas Cimalaka	4.991.465.000,00	4.966.002.836,00	99,49
1.02.0.00.0.00.01.0027.	Puskesmas Cisarua	2.159.083.000,00	1.706.341.101,00	79,03
1.02.0.00.0.00.01.0028.	Puskesmas Tanjungkerta	1.309.083.000,00	1.260.624.100,00	96,30
1.02.0.00.0.00.01.0029.	Puskesmas Sukamantri	2.991.673.000,00	2.955.321.161,00	98,78
1.02.0.00.0.00.01.0030.	Puskesmas Tanjungmedar	1.861.693.000,00	1.685.525.804,00	90,54
1.02.0.00.0.00.01.0031.	Puskesmas Buahdua	2.673.688.000,00	2.459.562.301,00	91,99
1.02.0.00.0.00.01.0032.	Puskesmas Hariang	1.303.299.000,00	1.165.661.005,00	89,44
1.02.0.00.0.00.01.0033.	Puskesmas Surian	1.433.227.000,00	1.199.290.493,00	83,68
1.02.0.00.0.00.01.0034.	Puskesmas Cisempur	1.588.517.000,00	1.481.634.683,00	93,27
1.02.0.00.0.00.01.0035.	Puskesmas Sawahdadap	1.695.100.000,00	1.459.142.393,00	86,08
1.02.0.00.0.00.01.0036.	Puskesmas Padasuka	1.884.644.000,00	1.716.684.894,00	91,09
1.02.0.00.0.00.01.0037.	Laboratorium Kesehatan Daerah	1.000.000.000,00	919.394.167,00	91,94

**Lampiran 3 - Rincian Realisasi Belanja Dan Transfer Berdasarkan Klasifikasi Organisasi**

KODE UNIT	NAMA UNIT	BELANJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%
1.03.0.00.0.00.10.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	227.661.322.627,00	219.710.420.145,00	96,51
1.04.2.10.1.03.02.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	48.747.368.139,00	48.206.520.762,00	98,89
1.05.0.00.0.00.01.	Satuan Polisi Pamong Praja	21.048.964.836,00	20.815.576.233,00	98,89
1.05.0.00.0.00.04.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.424.454.717,00	6.198.964.596,00	96,49
1.06.0.00.0.00.01.	Dinas Sosial	18.084.175.133,00	16.665.121.443,00	92,15
2.07.3.32.0.00.02.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	12.253.337.363,00	11.784.136.560,00	96,17
2.11.3.28.1.03.12.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	32.154.831.429,00	31.343.287.030,00	97,48
2.12.0.00.0.00.01.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12.371.672.875,00	11.791.129.630,00	95,31
2.13.0.00.0.00.01.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	18.070.498.032,00	17.770.904.738,00	98,34
2.14.2.08.0.00.05.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	28.277.813.065,00	27.511.893.464,00	97,29
2.15.0.00.0.00.01.	Dinas Perhubungan	34.532.014.137,00	33.945.595.517,00	98,30
2.16.2.21.2.20.04.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	20.156.304.526,00	19.164.170.765,00	95,08
2.17.3.30.3.31.07.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	16.413.044.986,00	15.998.948.982,00	97,48
2.18.0.00.0.00.23.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.767.892.497,00	9.135.271.882,00	93,52
2.24.2.23.0.00.02.	Dinas Arsip dan Perpustakaan	9.550.266.332,00	9.225.193.181,00	96,60
3.25.3.27.0.00.02.	Dinas Perikanan dan Peternakan	22.056.860.550,00	20.917.303.329,00	94,83
3.26.2.22.2.19.02.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	18.651.793.832,00	17.919.089.660,00	96,07
3.27.2.09.0.00.10.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	70.399.813.437,00	69.276.190.859,00	98,40
4.01.0.00.0.00.01.	Sekretariat Daerah	79.853.992.851,00	78.190.322.142,00	97,92
4.02.0.00.0.00.01.	Sekretariat DPRD	74.916.840.042,00	72.612.023.291,00	96,92
5.01.5.05.0.00.02.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	18.395.640.592,00	17.641.509.009,00	95,90
5.02.0.00.0.00.05.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	622.883.143.539,00	525.762.028.078,00	84,41
5.02.0.00.0.00.06.	Badan Pendapatan Daerah	21.944.527.914,00	21.128.658.850,00	96,28
5.03.0.00.0.00.01.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.079.869.877,00	13.977.458.067,00	92,69
6.01.0.00.0.00.01.	Inspektorat	20.484.782.063,00	20.119.211.408,00	98,22
7.01.0.00.0.00.01.	Kecamatan Wado	2.822.493.141,00	2.762.130.850,00	97,86
7.01.0.00.0.00.02.	Kecamatan Jatininggal	3.011.386.442,00	2.960.113.263,00	98,30
7.01.0.00.0.00.03.	Kecamatan Darmaraja	3.859.316.405,00	3.771.295.575,00	97,72
7.01.0.00.0.00.04.	Kecamatan Cibugel	3.090.195.098,00	3.001.776.170,00	97,14
7.01.0.00.0.00.05.	Kecamatan Cisitu	3.236.899.333,00	3.152.291.114,00	97,39

**Lampiran 3 - Rincian Realisasi Belanja Dan Transfer Berdasarkan Klasifikasi Organisasi**

KODE UNIT	NAMA UNIT	BELANJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%
7.01.0.00.0.00.06.	Kecamatan Situraja	3.725.158.419,00	3.632.522.649,00	97,51
7.01.0.00.0.00.07.	Kecamatan Conggeang	3.382.417.035,00	3.270.127.845,00	96,68
7.01.0.00.0.00.08.	Kecamatan Paseh	3.402.505.304,00	3.320.660.948,00	97,59
7.01.0.00.0.00.09.	Kecamatan Surian	3.039.051.836,00	2.921.522.300,00	96,13
7.01.0.00.0.00.10.	Kecamatan Buahdua	3.024.593.676,00	2.941.564.134,00	97,25
7.01.0.00.0.00.11.	Kecamatan Tanjungsari	3.760.303.646,00	3.690.138.774,00	98,13
7.01.0.00.0.00.12.	Kecamatan Sukasari	3.372.395.564,00	3.293.597.101,00	97,66
7.01.0.00.0.00.13.	Kecamatan Pamulihan	3.363.990.884,00	3.270.419.210,00	97,22
7.01.0.00.0.00.14.	Kecamatan Cimanggung	3.704.325.742,00	3.621.002.736,00	97,75
7.01.0.00.0.00.15.	Kecamatan Jatinangor	4.215.960.614,00	4.108.264.412,00	97,45
7.01.0.00.0.00.16.	Kecamatan Rancakalong	3.459.364.396,00	3.367.011.969,00	97,33
7.01.0.00.0.00.17.	Kecamatan Sumedang Selatan	10.755.388.049,00	10.606.187.786,00	98,61
7.01.0.00.0.00.18.	Kecamatan Sumedang Utara	9.446.619.392,00	9.267.570.608,00	98,10
7.01.0.00.0.00.19.	Kecamatan Ganeas	2.948.512.802,00	2.889.542.333,00	98,00
7.01.0.00.0.00.20.	Kecamatan Tanjungkerta	3.160.886.302,00	3.070.434.398,00	97,14
7.01.0.00.0.00.21.	Kecamatan Tanjungmedar	2.886.663.032,00	2.804.728.928,00	97,16
7.01.0.00.0.00.22.	Kecamatan Cimalaka	3.553.277.563,00	3.494.335.457,00	98,34
7.01.0.00.0.00.23.	Kecamatan Cisarua	3.436.548.786,00	3.342.956.713,00	97,28
7.01.0.00.0.00.24.	Kecamatan Tomo	2.897.347.484,00	2.769.497.906,00	95,59
7.01.0.00.0.00.25.	Kecamatan Ujungjaya	3.787.026.014,00	3.723.334.718,00	98,32
7.01.0.00.0.00.26.	Kecamatan Jatigede	3.837.131.708,00	3.727.755.757,00	97,15
8.01.0.00.0.00.01.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14.166.890.429,00	13.816.907.252,00	97,53
<b>TOTAL</b>		<b>3.103.072.704.385,00</b>	<b>2.919.935.326.859,00</b>	<b>94,10</b>

## Rincian Kas Daerah

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
<b>I</b>	<b>Kas Dana Spesifik</b>	<b>38.214.733.658,00</b>	<b>84.549.322.878,00</b>	<b>(46.334.589.220,00)</b>
	<b>I.1 Dana Alokasi Khusus Fisik</b>	<b>6.759.112.367,00</b>	<b>32.345.754.244,00</b>	<b>(25.586.641.877,00)</b>
	<b>1 Dana Alokasi Khusus Reguler</b>	<b>3.955.541.779,00</b>	<b>25.030.987.929,00</b>	<b>(21.075.446.150,00)</b>
	a Bidang Pendidikan	898.897.611,00	898.897.611,00	0,00
	b Bidang Kesehatan dan KB	426.803.639,00	426.803.639,00	0,00
	c Bidang Jalan	493.766.517,00	21.569.212.667,00	(21.075.446.150,00)
	d Bidang Perumahan dan Permukiman	22.440.000,00	22.440.000,00	0,00
	e Bidang Air Minum	532.590.312,00	532.590.312,00	0,00
	f Bidang Sanitasi	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00
	g Bidang Sarana Perdagangan/Pasar	460.186.000,00	460.186.000,00	0,00
	h Bidang Pertanian	93.064.800,00	93.064.800,00	0,00
	j Bidang Pariwisata	1.025.242.900,00	1.025.242.900,00	0,00
	<b>2 Dana Alokasi Khusus Penugasan</b>	<b>2.803.570.588,00</b>	<b>7.314.766.315,00</b>	<b>(4.511.195.727,00)</b>
	a Bidang Pendidikan	8.752.682,00	0,00	8.752.682,00
	b Bidang Kesehatan dan KB	34.664.848,00	34.664.848,00	0,00
	c Bidang Irigasi	216.910.570,00	216.910.570,00	0,00
	d Bidang Irigasi-Tematik	75.552.660,00	75.552.660,00	0,00
	e Bidang Kelautan dan perikanan	5.755.000,00	5.755.000,00	0,00
	f Bidang Pertanian	3.995.000,00	3.995.000,00	0,00
	g Bidang Pertanian - Tematik	30.702.100,00	27.326.500,00	3.375.600,00
	h Bidang Pasar	1.519.130.100,00	1.519.130.100,00	0,00
	i Bidang Lingkungan Hidup	1.079.001,00	1.079.001,00	0,00
	j Bidang Jalan - Tematik	0,00	5.089.090.600,00	(5.089.090.600,00)
	k Bidang Sanitasi	5.129.000,00	5.129.000,00	0,00
	l Bidang Air Minum	737.524.871,00	193.643.036,00	543.881.835,00
	m Bidang Air Minum ( Penanggulangan Kemiskinan)	71.180.000,00	71.180.000,00	0,00
	n Bidang Air Minum (Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting)	49.310.000,00	49.310.000,00	0,00
	o Bidang Perumahan dan Permukiman	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00
	<b>I.2 Dana Alokasi Khusus Non Fisik</b>	<b>17.406.981.554,00</b>	<b>8.427.172.428,00</b>	<b>8.979.809.126,00</b>
	1 BOP PAUD	0,00	0,00	0,00
	2 BOP Pendidikan kesetaraan	0,00	0,00	0,00
	3 BOK	4.358.635.805,00	4.063.281.770,00	295.354.035,00
	4 BOK TAMBAHAN	0,00	0,00	0,00
	5 BO KB	116.720.500,00	458.830.400,00	(342.109.900,00)
	6 Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	11.600.000,00	14.100.000,00	(2.500.000,00)
	7 Tamsil	230.374.999,00	816.987.500,00	(586.612.501,00)
	8 TPG	10.950.935.800,00	1.014.122.163,00	9.936.813.637,00
	9 Adminduk	0,00	365.955.400,00	(365.955.400,00)
	10 Akreditasi Puskesmas	417.302.225,00	417.302.225,00	0,00
	11 Jaminan Persalinan	1.204.901.530,00	1.204.901.530,00	0,00
	12 Tunjangan Khusus Guru	0,00	0,00	0,00
	13 Dana Fasilitas Penanaman Modal	33.351.195,00	70.828.690,00	(37.477.495,00)
	14 Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	83.159.500,00	862.750,00	82.296.750,00

Lampiran 4 - Rincian Kas Daerah

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
<b>I.3</b>	<b>Sisa Tahun 2015</b>	<b>423.860.012,00</b>	<b>423.860.012,00</b>	<b>0,00</b>
1	Bidang Pendidikan SMA/SMK 2015	26.996.617,00	26.996.617,00	0,00
2	Keluarga berencana 2015	53.879.089,00	53.879.089,00	0,00
3	Transfortasi perdesaan 2015	24.962.306,00	24.962.306,00	0,00
4	DAK Tambahan -Infrastruktur irigasi 2015	54.867.000,00	54.867.000,00	0,00
5	DAK Tambahan - Perdagangan-Pasar 2015	263.155.000,00	263.155.000,00	0,00
<b>I.4</b>	<b>Dana Alokasi Umum Spesifik Grant</b>	<b>6.554.498.879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.554.498.879,00</b>
<b>I.5</b>	<b>Dana Bagi Hasil Sawit</b>	<b>1.000.414.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.414.000,00</b>
<b>I.6</b>	<b>Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau</b>	<b>3.173.822.697,00</b>	<b>6.699.064.498,00</b>	<b>(3.525.241.801,00)</b>
<b>I.7</b>	<b>Bantuan Keuangan Provinsi</b>	<b>2.885.603.280,00</b>	<b>25.855.276.055,00</b>	<b>(22.969.672.775,00)</b>
<b>I.8</b>	<b>Dana Aset Desa yang dihapuskan atas dampak pembangunan Waduk Jatigede</b>	<b>5.454.000,00</b>	<b>5.454.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.9</b>	<b>Dana Insentif Daerah</b>	<b>4.986.869,00</b>	<b>10.792.741.641,00</b>	<b>(10.787.754.772,00)</b>
<b>II</b>	<b>Kas Diluar Dana Spesifik</b>	<b>4.315.162.032,18</b>	<b>61.758.002.412,74</b>	<b>(57.442.840.380,56)</b>
	<b>Total (I + II)</b>	<b>42.529.895.690,18</b>	<b>146.307.325.290,74</b>	<b>(103.777.429.600,56)</b>

Lampiran 5 - Rincian Kas di Bendahara BLUD Puskesmas dan Labkesda

**Rincian Kas Puskesmas dan Labkesda  
(Dana Kapitasi JKN)**

No.	Nama Puskesmas	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan
1	Kas Puskesmas DTP Jatinangor	475.226.377,00	390.194.285,00	85.032.092,00
2	Kas Puskesmas Cimanggung	1.356.065.453,00	1.509.996.572,00	(153.931.119,00)
3	Kas Puskesmas DTP Tanjungsari	580.556.497,00	557.720.063,00	22.836.434,00
4	Kas Puskesmas Margajaya	161.690.133,00	118.771.362,00	42.918.771,00
5	Kas Puskesmas Sukasari	225.477.137,00	264.475.294,00	(38.998.157,00)
6	Kas Puskesmas Haurngombong	101.966.822,00	198.120.450,00	(96.153.628,00)
7	Kas Puskesmas Pamulihan	291.886.433,00	243.963.813,00	47.922.620,00
8	Kas Puskesmas Rancakalong	125.508.770,00	98.987.095,00	26.521.675,00
9	Kas Puskesmas Sumedang Selatan	359.178.532,00	340.690.353,00	18.488.179,00
10	Kas Puskesmas Sukagalih	103.496.493,00	106.639.672,00	(3.143.179,00)
11	Kas Puskesmas Kotakaler	320.929.873,00	165.233.441,00	155.696.432,00
12	Kas Puskesmas Situ	228.907.622,00	224.980.214,00	3.927.408,00
13	Kas Puskesmas Ganeas	86.509.637,00	261.157.584,00	(174.647.947,00)
14	Kas Puskesmas Situraja	249.017.907,00	150.781.237,00	98.236.670,00
15	Kas Puskesmas Cisitu	209.241.979,00	176.531.015,00	32.710.964,00
16	Kas Puskesmas DTP Darmaraja	425.517.652,00	150.755.148,00	274.762.504,00
17	Kas Puskesmas Cibugel	97.292.670,00	153.821.438,00	(56.528.768,00)
18	Kas Puskesmas Wado	577.242.456,00	621.613.252,00	(44.370.796,00)
19	Kas Puskesmas Jatinunggal	837.933.255,00	689.242.955,00	148.690.300,00
20	Kas Puskesmas Jatigede	224.583.526,00	272.646.789,00	(48.063.263,00)
21	Kas Puskesmas DTP Tomo	152.060.022,00	65.051.711,00	87.008.311,00
22	Kas Puskesmas Ujungjaya	296.301.691,00	257.769.789,00	38.531.902,00
23	Kas Puskesmas DTP Conggeang	202.151.639,00	313.075.163,00	(110.923.524,00)
24	Kas Puskesmas Paseh	251.305.110,00	319.677.828,00	(68.372.718,00)
25	Kas Puskesmas Cimalaka	89.828.568,00	217.268.828,00	(127.440.260,00)
26	Kas Puskesmas Cisarua	144.400.434,00	184.035.713,00	(39.635.279,00)
27	Kas Puskesmas Tanjungkerta	47.546.180,00	30.641.692,00	16.904.488,00
28	Kas Puskesmas DTP Sukamantri	246.363.009,00	131.911.907,00	114.451.102,00
29	Kas Puskesmas Tanjungmedar	105.267.489,00	80.980.383,00	24.287.106,00
30	Kas Puskesmas Buahdua	104.538.229,00	115.483.111,00	(10.944.882,00)
31	Kas Puskesmas Hariang	35.111.006,00	28.865.063,00	6.245.943,00
32	Kas Puskesmas Surian	55.066.393,00	36.347.601,00	18.718.792,00
33	Kas Puskesmas Cisempur	66.287.471,00	82.635.012,00	(16.347.541,00)
34	Kas Puskesmas Sawahdadap	82.453.853,00	49.071.880,00	33.381.973,00
35	Kas Puskesmas Padasuka	22.757.630,00	118.154.597,00	(95.396.967,00)
36	Kas di LABKESDA	512.397.135,00	64.701.785,00	447.695.350,00
	<b>Total</b>	<b>9.452.065.083,00</b>	<b>8.791.994.095,00</b>	<b>660.070.988,00</b>

**RINCIAN KAS DI BENDAHARA BOS DAN KAS LAINNYA SD  
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023	Saldo Kas BOS per 31 Desember 2023
1	SD NEGERI BOJONGLOA I	Kec. Buahdua		362.078,00
2	SD NEGERI BOJONGLOA II	Kec. Buahdua		791.432,00
3	SD NEGERI BUAHDUA I	Kec. Buahdua		441.547,00
4	SD NEGERI BUAHDUA II	Kec. Buahdua		435.419,00
5	SD NEGERI CIAWITALI	Kec. Buahdua		961.274,00
6	SD NEGERI CIBITUNG	Kec. Buahdua		1.018.767,00
7	SD NEGERI CIGALAGAH	Kec. Buahdua		681.544,00
8	SD NEGERI CIKURUBUK	Kec. Buahdua		650.668,00
9	SD NEGERI CILANGKAP I	Kec. Buahdua		618.225,00
10	SD NEGERI CILANGKAP II	Kec. Buahdua		1.472.399,00
11	SD NEGERI CILUMPING	Kec. Buahdua		986.035,00
12	SD NEGERI CINANGSI	Kec. Buahdua		769.623,00
13	SD NEGERI CIPATAT	Kec. Buahdua		817.989,00
14	SD NEGERI CITALEUS I	Kec. Buahdua		311.341,00
15	SD NEGERI CITALEUS II	Kec. Buahdua		164.205,00
16	SD NEGERI DARONGDONG	Kec. Buahdua		1.355.181,00
17	SD NEGERI GENDEREH	Kec. Buahdua		963.420,00
18	SD NEGERI HARIANG	Kec. Buahdua		1.051.102,00
19	SD NEGERI KARANGBUNGUR	Kec. Buahdua		213.580,00
20	SD NEGERI NAGRAK I	Kec. Buahdua		1.751.288,00
21	SD NEGERI NAGRAK II	Kec. Buahdua		1.361.568,00
22	SD NEGERI PASIRIPIS	Kec. Buahdua		368.485,00
23	SD NEGERI RAHARJA	Kec. Buahdua		774.751,00
24	SD NEGERI SAMPORA	Kec. Buahdua		897.633,00
25	SD NEGERI SANEPA	Kec. Buahdua		1.154.820,00
26	SD NEGERI TONJONG	Kec. Buahdua		292.181,00
27	SD NEGERI ANTARA I	Kec. Cibugel		284.781,00
28	SD NEGERI ANTARA II	Kec. Cibugel		483.305,00
29	SD NEGERI BABAKANDESA	Kec. Cibugel		14.715,00
30	SD NEGERI CIBUGEL	Kec. Cibugel		504.037,00
31	SD NEGERI CICADAS	Kec. Cibugel		332.994,00
32	SD NEGERI CIDOMAS	Kec. Cibugel		286.581,00
33	SD NEGERI CIJAHA	Kec. Cibugel		246.611,00
34	SD NEGERI CIPASANG	Kec. Cibugel		160.567,00
35	SD NEGERI GUNUNGSANGIANG	Kec. Cibugel		149.249,00
36	SD NEGERI KURNIA	Kec. Cibugel		239.562,00
37	SD NEGERI MARGAMULYA	Kec. Cibugel		737.930,00
38	SD NEGERI NAGRAK	Kec. Cibugel		287.722,00
39	SD NEGERI PAGELARAN	Kec. Cibugel		275.688,00
40	SD NEGERI PARAKANPANJANG	Kec. Cibugel		109.915,00
41	SD NEGERI SARANG TENGAH	Kec. Cibugel		219.049,00
42	SD NEGERI SUKARAJA	Kec. Cibugel		547.820,00
43	SD NEGERI SUKASARI	Kec. Cibugel		1.666.951,00
44	SD NEGERI CIBEUREUM I	Kec. Cimalaka		537.918,00
45	SD NEGERI CIBEUREUM II	Kec. Cimalaka		164.705,00
46	SD NEGERI CIBEUREUM III	Kec. Cimalaka		1.000,00
47	SD NEGERI CIBEUREUM IV	Kec. Cimalaka		41.893,00
48	SD NEGERI CIKOLE	Kec. Cimalaka		331.703,00
49	SD NEGERI CILIMBANGAN	Kec. Cimalaka		513.484,00
50	SD NEGERI CIMALAKA I	Kec. Cimalaka		223.603,00
51	SD NEGERI CIMALAKA II	Kec. Cimalaka		148.501,00
52	SD NEGERI CIMALAKA III	Kec. Cimalaka		208.276,00
53	SD NEGERI CIMUJA	Kec. Cimalaka		178.050,00
54	SD NEGERI CITIMUN I	Kec. Cimalaka		51.066,00
55	SD NEGERI CITIMUN II	Kec. Cimalaka		201.328,00



**Lampiran 6 - Rincian Kas di Bendahara BOS Dan Kas Lainnya Dinas Pendidikan**

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023	Saldo Kas BOS per 31 Desember 2023
56	SD NEGERI GAJAHDEPA	Kec. Cimalaka		210.492,00
57	SD NEGERI GALUDRA	Kec. Cimalaka		112.533,00
58	SD NEGERI KARANGPAWULANG	Kec. Cimalaka		75.215,00
59	SD NEGERI LICIN	Kec. Cimalaka		177.109,00
60	SD NEGERI MALANGBONG	Kec. Cimalaka		343.876,00
61	SD NEGERI MANDALAHERANG I	Kec. Cimalaka		164.560,00
62	SD NEGERI MANDALAHERANG II	Kec. Cimalaka		154.281,00
63	SD NEGERI MANDALAHERANG III	Kec. Cimalaka		-
64	SD NEGERI MARGAMUKTI	Kec. Cimalaka		464.722,00
65	SD NEGERI MARGAMULYA	Kec. Cimalaka		340.711,00
66	SD NEGERI MULYASARI	Kec. Cimalaka		234.869,00
67	SD NEGERI NYALINDUNG I	Kec. Cimalaka		318.972,00
68	SD NEGERI NYALINDUNG II	Kec. Cimalaka		194.816,00
69	SD NEGERI PALASAH	Kec. Cimalaka		686.687,00
70	SD NEGERI PANORAMA	Kec. Cimalaka		235.417,00
71	SD NEGERI SUKALERANG I	Kec. Cimalaka		76.949,00
72	SD NEGERI SUKALERANG II	Kec. Cimalaka		187.701,00
73	SD NEGERI BANGKIR	Kec. Cimanggung	101.240,00	1.696.866,00
74	SD NEGERI BUNTER I	Kec. Cimanggung		604.694,00
75	SD NEGERI BUNTER II	Kec. Cimanggung		478.373,00
76	SD NEGERI BUNTER III	Kec. Cimanggung		(56.200,00)
77	SD NEGERI CIBENDA	Kec. Cimanggung		66.515,00
78	SD NEGERI CIKAHURIPAN	Kec. Cimanggung		139.650,00
79	SD NEGERI CIKANDANG	Kec. Cimanggung		663.694,00
80	SD NEGERI CILAKU	Kec. Cimanggung		132.608,00
81	SD NEGERI CIMANGGUNG I	Kec. Cimanggung		361.000,00
82	SD NEGERI CIMANGGUNG II	Kec. Cimanggung		629.169,00
83	SD NEGERI CIMANGGUNG III	Kec. Cimanggung		253.130,00
84	SD NEGERI CIMANGGUNG IV	Kec. Cimanggung		197.901,00
85	SD NEGERI CIPAREUAG	Kec. Cimanggung		3.382.604,00
86	SD NEGERI LEBAKGEDE	Kec. Cimanggung		23.836,00
87	SD NEGERI LEUWILIANG	Kec. Cimanggung		290.467,00
88	SD NEGERI MARGAMULYA	Kec. Cimanggung		158.400,00
89	SD NEGERI PANGSOR	Kec. Cimanggung		1.864.500,00
90	SD NEGERI PARAKANMUNCANG I	Kec. Cimanggung		1.010.621,00
91	SD NEGERI PARAKANMUNCANG II	Kec. Cimanggung		171.539,00
92	SD NEGERI PARAKANMUNCANG III	Kec. Cimanggung		266.740,00
93	SD NEGERI PASIRHUNI	Kec. Cimanggung		332.401,00
94	SD NEGERI SANTAKA	Kec. Cimanggung		427.547,00
95	SD NEGERI SAWAHDADAP I	Kec. Cimanggung		38.534,00
96	SD NEGERI SAWAHDADAP II	Kec. Cimanggung		-
97	SD NEGERI SAWAHDADAP III	Kec. Cimanggung		-
98	SD NEGERI SINDULANG	Kec. Cimanggung		86.000,00
99	SD NEGERI TANJUNGSANG	Kec. Cimanggung		155.800,00
100	SD NEGERI CIKURUBUK	Kec. Cisarua		431.143,00
101	SD NEGERI CISALAK I	Kec. Cisarua		51.630,00
102	SD NEGERI CISALAK II	Kec. Cisarua		342.010,00
103	SD NEGERI CISALAK III	Kec. Cisarua		189.856,00
104	SD NEGERI CISALAK IV	Kec. Cisarua		387.980,00
105	SD NEGERI CIUYAH I	Kec. Cisarua		519.242,00
106	SD NEGERI CIUYAH II	Kec. Cisarua		410.975,00
107	SD NEGERI CIUYAH III	Kec. Cisarua		343.490,00
108	SD NEGERI JAMBU	Kec. Cisarua		331.595,00
109	SD NEGERI PAMEULAH	Kec. Cisarua		3.608.692,00
110	SD NEGERI BABAKAN CIPEUNDEUY	Kec. Cisit		238.519,00
111	SD NEGERI BANTARJAMBE	Kec. Cisit		121.985,00
112	SD NEGERI CIGINTUNG	Kec. Cisit		411.028,00
113	SD NEGERI CILOPANG	Kec. Cisit		56.765,00
114	SD NEGERI CIMARGA	Kec. Cisit		162.112,00
115	SD NEGERI CISITU	Kec. Cisit		108.696,00

**Lampiran 6 - Rincian Kas di Bendahara BOS Dan Kas Lainnya Dinas Pendidikan**

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023	Saldo Kas BOS per 31 Desember 2023
116	SD NEGERI CORENDA	Kec. Cisit		97.248,00
117	SD NEGERI JATIPUTRI	Kec. Cisit		-
118	SD NEGERI KAWUNGLUWUK I	Kec. Cisit		210.729,00
119	SD NEGERI KAWUNGLUWUK II	Kec. Cisit		917.829,00
120	SD NEGERI LINGGASARI	Kec. Cisit		348.865,00
121	SD NEGERI MALINGPING	Kec. Cisit		357.860,00
122	SD NEGERI MARGALUYU	Kec. Cisit		240.470,00
123	SD NEGERI NANGGERANG	Kec. Cisit		225.630,00
124	SD NEGERI PABUARAN	Kec. Cisit		468.820,00
125	SD NEGERI PANGLUYU	Kec. Cisit		123.844,00
126	SD NEGERI RANJENG	Kec. Cisit		(115.873,00)
127	SD NEGERI SADANGSARI	Kec. Cisit		89.909,00
128	SD NEGERI SALAMJAJAR	Kec. Cisit		985.167,00
129	SD NEGERI SUDAPATI	Kec. Cisit		23.804,00
130	SD NEGERI SUKAJAYA	Kec. Cisit		85.512,00
131	SD NEGERI TANJUNGJAYA	Kec. Cisit		49.227,00
132	SD NEGERI BABAKANASEM	Kec. Conggeang		200.505,00
133	SD NEGERI CACABAN	Kec. Conggeang		2.654.697,00
134	SD NEGERI CIBAPA	Kec. Conggeang		193.068,00
135	SD NEGERI CIBUBUAN I	Kec. Conggeang		456.094,00
136	SD NEGERI CIBUBUAN II	Kec. Conggeang		398.147,00
137	SD NEGERI CIDEMPET	Kec. Conggeang		580.202,00
138	SD NEGERI CONGGEANG I	Kec. Conggeang		144.988,00
139	SD NEGERI CONGGEANG II	Kec. Conggeang		1.010.610,00
140	SD NEGERI CONGGEANG IV	Kec. Conggeang		426.898,00
141	SD NEGERI KAWUNGLUWUK	Kec. Conggeang		228.192,00
142	SD NEGERI MARGAASIH	Kec. Conggeang		288.355,00
143	SD NEGERI MARGALUYU	Kec. Conggeang		310.763,00
144	SD NEGERI MARGAMULYA	Kec. Conggeang		201.061,00
145	SD NEGERI MEKARJAYA	Kec. Conggeang		505.568,00
146	SD NEGERI NARIMBANG I	Kec. Conggeang		3.763.691,00
147	SD NEGERI NARIMBANG II	Kec. Conggeang		336.427,00
148	SD NEGERI NEGLASARI	Kec. Conggeang		292.474,00
149	SD NEGERI SIRAHCIPELANG	Kec. Conggeang		601.988,00
150	SD NEGERI UNGKAL	Kec. Conggeang		341.255,00
151	SD NEGERI ANCOL	Kec. Darmaraja		253.215,00
152	SD NEGERI CAKRAWATI	Kec. Darmaraja		981.099,00
153	SD NEGERI CIDUGING	Kec. Darmaraja		4.987.806,00
154	SD NEGERI CIEUNTEUNG	Kec. Darmaraja		81.771,00
155	SD NEGERI CIKEUSI I	Kec. Darmaraja		51.259,00
156	SD NEGERI CIKEUSI II	Kec. Darmaraja		87.757,00
157	SD NEGERI CIPEUNDEUY	Kec. Darmaraja		1.444.989,00
158	SD NEGERI CIPEUTEUY	Kec. Darmaraja		101.304,00
159	SD NEGERI CIPICUNG	Kec. Darmaraja		314.051,00
160	SD NEGERI CISEMA	Kec. Darmaraja		469.479,00
161	SD NEGERI DARMARAJA I	Kec. Darmaraja		526.214,00
162	SD NEGERI DARMARAJA II	Kec. Darmaraja		72.516,00
163	SD NEGERI DARMARAJA III	Kec. Darmaraja		75.570,00
164	SD NEGERI DARMARAJA IV	Kec. Darmaraja		421.218,00
165	SD NEGERI KAMENTENG	Kec. Darmaraja		404.347,00
166	SD NEGERI KARANGANYAR	Kec. Darmaraja		146.113,00
167	SD NEGERI KEBONBUAH	Kec. Darmaraja		168.228,00
168	SD NEGERI KEBONKOPI	Kec. Darmaraja		850.768,00
169	SD NEGERI MUNJUL	Kec. Darmaraja		457.850,00
170	SD NEGERI PATARUMAN	Kec. Darmaraja		229.283,00
171	SD NEGERI RANGGON	Kec. Darmaraja		1.960.223,00
172	SD NEGERI SUKAHAJI	Kec. Darmaraja		314.476,00
173	SD NEGERI SUKAMANAH	Kec. Darmaraja		1.091.785,00
174	SD NEGERI SUKANAGARA	Kec. Darmaraja		1.646.843,00
175	SD NEGERI SUKARATU	Kec. Darmaraja		127.900,00

**Lampiran 6 - Rincian Kas di Bendahara BOS Dan Kas Lainnya Dinas Pendidikan**

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023	Saldo Kas BOS per 31 Desember 2023
176	SD NEGERI BOJONGKONENG	Kec. Ganeas		59.645,00
177	SD NEGERI CIBOGO	Kec. Ganeas		54.220,00
178	SD NEGERI CIBUNGUR	Kec. Ganeas		252.483,00
179	SD NEGERI CIGOBANG	Kec. Ganeas		99.015,00
180	SD NEGERI CIKONDANG II	Kec. Ganeas		48.205,00
181	SD NEGERI CIKONDANG III	Kec. Ganeas		44.076,00
182	SD NEGERI CIKONENG I	Kec. Ganeas		87.569,00
183	SD NEGERI CILEUWEUNG	Kec. Ganeas		57.668,00
184	SD NEGERI DAYEUHLUHUR	Kec. Ganeas		5.178,00
185	SD NEGERI GANEAS I	Kec. Ganeas		60.704,00
186	SD NEGERI GANEAS II	Kec. Ganeas		18.373,00
187	SD NEGERI HEGARMANAH	Kec. Ganeas		3.231,00
188	SD NEGERI WARGALUYU	Kec. Ganeas		80.228,00
189	SD NEGERI CIAWI	Kec. Jatigede		264.884,00
190	SD NEGERI CIBEBER	Kec. Jatigede		203.046,00
191	SD NEGERI CIBOBOKO	Kec. Jatigede		103.066,00
192	SD NEGERI CIHIDEUNG	Kec. Jatigede		124.030,00
193	SD NEGERI CIJEUNGJING I	Kec. Jatigede		318.862,00
194	SD NEGERI CIJEUNGJING II	Kec. Jatigede		258.390,00
195	SD NEGERI CIKANDANG	Kec. Jatigede		92.056,00
196	SD NEGERI CIMUKTI	Kec. Jatigede		307.125,00
197	SD NEGERI CIRANGGEM	Kec. Jatigede		276.451,00
198	SD NEGERI CISAMPIH	Kec. Jatigede		107.457,00
199	SD NEGERI HEGARMANAH	Kec. Jatigede		202.960,00
200	SD NEGERI KADU	Kec. Jatigede		161.228,00
201	SD NEGERI KAREDOK	Kec. Jatigede		167.537,00
202	SD NEGERI LEBAKSIUH	Kec. Jatigede		136.658,00
203	SD NEGERI LEUWIHIEUM	Kec. Jatigede		144.161,00
204	SD NEGERI LONTONG	Kec. Jatigede		103.809,00
205	SD NEGERI PAMOYANAN	Kec. Jatigede		154.672,00
206	SD NEGERI PARAKANKONDANG	Kec. Jatigede		321.499,00
207	SD NEGERI PARISKALIKI	Kec. Jatigede		255.958,00
208	SD NEGERI TALAGADATAR	Kec. Jatigede		289.818,00
209	SD NEGERI MEKARSARI	Kec. Jatinangor	175.909,00	80.234,00
210	SD NEGERI CIAWI	Kec. Jatinangor		336.118,00
211	SD NEGERI CIBEUSI	Kec. Jatinangor		699.103,00
212	SD NEGERI CIKERUH I	Kec. Jatinangor		624.872,00
213	SD NEGERI CIKERUH II	Kec. Jatinangor		456.579,00
214	SD NEGERI CIKOPO I	Kec. Jatinangor		278.511,00
215	SD NEGERI CIKOPO II	Kec. Jatinangor		1.554.002,00
216	SD NEGERI CIKUDA	Kec. Jatinangor		499.770,00
217	SD NEGERI CILELES	Kec. Jatinangor		155.274,00
218	SD NEGERI CIPACING I	Kec. Jatinangor		121.786,00
219	SD NEGERI CIPACING II	Kec. Jatinangor		108.285,00
220	SD NEGERI CISEMPUR	Kec. Jatinangor		631.287,00
221	SD NEGERI HEGARMANAH	Kec. Jatinangor	50.525,00	24.475,00
222	SD NEGERI HEGARMANAH I	Kec. Jatinangor		301.361,00
223	SD NEGERI JATINANGOR	Kec. Jatinangor		656.291,00
224	SD NEGERI JATIROKE I	Kec. Jatinangor		79.256,00
225	SD NEGERI JATIROKE II	Kec. Jatinangor		272.232,00
226	SD NEGERI KANANGA	Kec. Jatinangor		82.166,00
227	SD NEGERI KARANGMULYA	Kec. Jatinangor		43.697,00
228	SD NEGERI MEKARWANGI	Kec. Jatinangor		32.606,00
229	SD NEGERI NEGLASARI	Kec. Jatinangor		11.230,00
230	SD NEGERI PARIPURNA	Kec. Jatinangor		541.885,00
231	SD NEGERI SAYANG	Kec. Jatinangor		512.622,00
232	SD NEGERI SINARJATI	Kec. Jatinangor		304.112,00
233	SD NEGERI SIRAHCAI	Kec. Jatinangor		190.122,00
234	SD NEGERI SIRNAGALIH	Kec. Jatinangor		818.428,00
235	SD NEGERI TALAGAMUKTI	Kec. Jatinangor		72.922,00

**Lampiran 6 - Rincian Kas di Bendahara BOS Dan Kas Lainnya Dinas Pendidikan**

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023	Saldo Kas BOS per 31 Desember 2023
236	SD NEGERI PANGANGINAN	Kec. Jatinunggal		25.558,00
237	SD NEGERI SINDANGASIH	Kec. Jatinunggal		16.150,00
238	SD NEGERI BANJARASIH	Kec. Jatinunggal		409.449,00
239	SD NEGERI BOJONGJATI	Kec. Jatinunggal		32.750,00
240	SD NEGERI BOJONGSALAM	Kec. Jatinunggal		431.189,00
241	SD NEGERI BUNIASIH	Kec. Jatinunggal		82.150,00
242	SD NEGERI BUNISARI	Kec. Jatinunggal		128.798,00
243	SD NEGERI CIBALA	Kec. Jatinunggal		99.346,00
244	SD NEGERI CIBAREUBEU	Kec. Jatinunggal		256.676,00
245	SD NEGERI CIMANINGTIN	Kec. Jatinunggal		64.480,00
246	SD NEGERI CIPEUNDEUY	Kec. Jatinunggal		77.454,00
247	SD NEGERI CIPEUTEUY	Kec. Jatinunggal		-
248	SD NEGERI CIRAYUN	Kec. Jatinunggal		236.745,00
249	SD NEGERI CISAMBENG	Kec. Jatinunggal		171.680,00
250	SD NEGERI JAGATAPA	Kec. Jatinunggal		365.902,00
251	SD NEGERI KARANGANYAR	Kec. Jatinunggal		61.050,00
252	SD NEGERI KEBONBARU	Kec. Jatinunggal		178.250,00
253	SD NEGERI KIRISIK	Kec. Jatinunggal		263.897,00
254	SD NEGERI LANGENSARI	Kec. Jatinunggal		642.560,00
255	SD NEGERI NAGRAK	Kec. Jatinunggal		27.514,00
256	SD NEGERI PAJAGAN	Kec. Jatinunggal		1.431.048,00
257	SD NEGERI PALASARI	Kec. Jatinunggal		101.203,00
258	SD NEGERI PAWENANG	Kec. Jatinunggal		248.809,00
259	SD NEGERI SALADO	Kec. Jatinunggal		177.904,00
260	SD NEGERI SIRNASARI	Kec. Jatinunggal		133.293,00
261	SD NEGERI SUKAHERANG	Kec. Jatinunggal		48.163,00
262	SD NEGERI SUKAJAYA	Kec. Jatinunggal		75.000,00
263	SD NEGERI SUKAMAJU	Kec. Jatinunggal		203.674,00
264	SD NEGERI TARIKOLOT	Kec. Jatinunggal		607.018,00
265	SD NEGERI CIAKAR	Kec. Pamulihan		40.931,00
266	SD NEGERI CIGENDEL	Kec. Pamulihan		5.805.811,00
267	SD NEGERI CIHERANG	Kec. Pamulihan		82.914,00
268	SD NEGERI CIJERUK	Kec. Pamulihan		205.912,00
269	SD NEGERI CIKAWAO	Kec. Pamulihan		993.990,00
270	SD NEGERI CIKUBANG	Kec. Pamulihan		126.490,00
271	SD NEGERI CILEMBU	Kec. Pamulihan		555.612,00
272	SD NEGERI CIMASUK	Kec. Pamulihan		381.310,00
273	SD NEGERI CINANGGERANG I	Kec. Pamulihan		54.243,00
274	SD NEGERI CINANGGERANG II	Kec. Pamulihan		185.296,00
275	SD NEGERI CIPACING	Kec. Pamulihan		17.272,00
276	SD NEGERI CIRENGGANIS	Kec. Pamulihan		306.677,00
277	SD NEGERI CITALI	Kec. Pamulihan		80.000,00
278	SD NEGERI HAURNGOMBONG I	Kec. Pamulihan		108.072,00
279	SD NEGERI HAURNGOMBONG II	Kec. Pamulihan		655.976,00
280	SD NEGERI LEMBANG	Kec. Pamulihan		195.428,00
281	SD NEGERI MEKARBAKTI	Kec. Pamulihan		195.396,00
282	SD NEGERI PAMULIHAN	Kec. Pamulihan		3.134,00
283	SD NEGERI SIRNASARI	Kec. Pamulihan		132.505,00
284	SD NEGERI SUKAHURIP	Kec. Pamulihan		-
285	SD NEGERI SUKALILAH	Kec. Pamulihan		426.911,00
286	SD NEGERI SUKAWANGI	Kec. Pamulihan		185.735,00
287	SD NEGERI BABAKANBUAH	Kec. Paseh		54.500,00
288	SD NEGERI BONGKOK	Kec. Paseh		122.000,00
289	SD NEGERI CIJAMBE I	Kec. Paseh		59.914,00
290	SD NEGERI CIJAMBE II	Kec. Paseh		211.340,00
291	SD NEGERI CILEUKSA	Kec. Paseh		50.000,00
292	SD NEGERI CITEPOK	Kec. Paseh		109.504,00
293	SD NEGERI HAURKUNING	Kec. Paseh		90.353,00
294	SD NEGERI LEGOK I	Kec. Paseh		1.375.120,00
295	SD NEGERI LEGOK II	Kec. Paseh		109.606,00

**Lampiran 6 - Rincian Kas di Bendahara BOS Dan Kas Lainnya Dinas Pendidikan**

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023	Saldo Kas BOS per 31 Desember 2023
296	SD NEGERI NYALINDUNG	Kec. Paseh		80.981,00
297	SD NEGERI PARUMASAN	Kec. Paseh		60.000,00
298	SD NEGERI PASEH I	Kec. Paseh		265.172,00
299	SD NEGERI PASEH II	Kec. Paseh		69.342,00
300	SD NEGERI SIDARAJA	Kec. Paseh		928.954,00
301	SD NEGERI SINDANGJATI	Kec. Paseh		114.920,00
302	SD NEGERI SUKAMULYA	Kec. Paseh		96.373,00
303	SD NEGERI SUKASIRNA	Kec. Paseh		102.972,00
304	SD NEGERI TALUN	Kec. Paseh		60.000,00
305	SD NEGERI BABAKAN	Kec. Rancakalong		404.779,00
306	SD NEGERI CIBUNAR	Kec. Rancakalong		644.022,00
307	SD NEGERI CIBUNGUR	Kec. Rancakalong		808.144,00
308	SD NEGERI CIKEUSIK	Kec. Rancakalong		255.645,00
309	SD NEGERI CISUGAN	Kec. Rancakalong		374.742,00
310	SD NEGERI CITUNGKU	Kec. Rancakalong		93.343,00
311	SD NEGERI CUPUWANGI	Kec. Rancakalong		566.629,00
312	SD NEGERI MEKARSARI	Kec. Rancakalong		843.049,00
313	SD NEGERI PAKUWANGI	Kec. Rancakalong		151.590,00
314	SD NEGERI PANGADEGAN	Kec. Rancakalong		221.392,00
315	SD NEGERI PASIR	Kec. Rancakalong		255.253,00
316	SD NEGERI PASIRBENTENG I	Kec. Rancakalong		415.043,00
317	SD NEGERI PASIRBENTENG II	Kec. Rancakalong		15.227,00
318	SD NEGERI PASIRBIRU	Kec. Rancakalong		540.797,00
319	SD NEGERI PASIRLAJA	Kec. Rancakalong		154.578,00
320	SD NEGERI RANCAKALONG	Kec. Rancakalong		127.038,00
321	SD NEGERI RANCAMEDALWANGI	Kec. Rancakalong		135.846,00
322	SD NEGERI SELAAWI	Kec. Rancakalong		671.539,00
323	SD NEGERI SIRNALUYU	Kec. Rancakalong		245.250,00
324	SD NEGERI SIRNAMANAH	Kec. Rancakalong		760.743,00
325	SD NEGERI SUKAHAYU	Kec. Rancakalong		37.570,00
326	SD NEGERI SUKAMAJU	Kec. Rancakalong		1.219.997,00
327	SD NEGERI SUKAMANAH I	Kec. Rancakalong		162.154,00
328	SD NEGERI SUKAMANAH II	Kec. Rancakalong		803.749,00
329	SD NEGERI SUKANANDUR	Kec. Rancakalong		119.345,00
330	SD NEGERI SUKANEGLA	Kec. Rancakalong		420.563,00
331	SD NEGERI SUKAWANGI	Kec. Rancakalong		816.986,00
332	SD NEGERI TEGALENDAH	Kec. Rancakalong		1.506.546,00
333	SD NEGERI CICARIMANAH	Kec. Situraja		438.389,00
334	SD NEGERI AMBIT	Kec. Situraja		695.510,00
335	SD NEGERI BABAKANBANDUNG	Kec. Situraja		738.824,00
336	SD NEGERI BANGBAYANG	Kec. Situraja		115.609,00
337	SD NEGERI CIJATI	Kec. Situraja		144.677,00
338	SD NEGERI CIJELER I	Kec. Situraja		131.529,00
339	SD NEGERI CIJELER II	Kec. Situraja		286.098,00
340	SD NEGERI CIJELER III	Kec. Situraja		28.900,00
341	SD NEGERI CIKADU	Kec. Situraja		106.388,00
342	SD NEGERI CIPELANG	Kec. Situraja		279.705,00
343	SD NEGERI JATISARI	Kec. Situraja		391.535,00
344	SD NEGERI KARANGMULYA	Kec. Situraja		719.800,00
345	SD NEGERI KARANGNANGKA I	Kec. Situraja		1.027.087,00
346	SD NEGERI KARANGNANGKA II	Kec. Situraja		102.234,00
347	SD NEGERI MALAKA	Kec. Situraja		352.350,00
348	SD NEGERI NEGLASARI	Kec. Situraja		259.261,00
349	SD NEGERI PAKEMITAN II	Kec. Situraja		101.986,00
350	SD NEGERI PAMULIHAN	Kec. Situraja		487.248,00
351	SD NEGERI PASIRIMPUN	Kec. Situraja		995.653,00
352	SD NEGERI SINDANGWANGI	Kec. Situraja		419.758,00
353	SD NEGERI SITURAJA	Kec. Situraja		318.284,00
354	SD NEGERI SUKAJADI	Kec. Situraja		131.016,00
355	SD NEGERI SUKASARI	Kec. Situraja		67.464,00

**Lampiran 6 - Rincian Kas di Bendahara BOS Dan Kas Lainnya Dinas Pendidikan**

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023	Saldo Kas BOS per 31 Desember 2023
356	SD NEGERI SUKATALI	Kec. Situraja		668.762,00
357	SD NEGERI TEGALSARI	Kec. Situraja		55.145,00
358	SD NEGERI WARUNGKETAN	Kec. Situraja		539.019,00
359	SD NEGERI GENTENG	Kec. Sukasari		1.020.492,00
360	SD NEGERI MANGLAYANG I	Kec. Sukasari		701.163,00
361	SD NEGERI MANGLAYANG II	Kec. Sukasari		473.494,00
362	SD NEGERI MARGALUYU	Kec. Sukasari		1.003.992,00
363	SD NEGERI MULYASARI	Kec. Sukasari		136.926,00
364	SD NEGERI NANGGERANG	Kec. Sukasari		1.224.124,00
365	SD NEGERI NEGLASARI	Kec. Sukasari		956.069,00
366	SD NEGERI PADASUKA	Kec. Sukasari		648.074,00
367	SD NEGERI PUNCAK	Kec. Sukasari		423.277,00
368	SD NEGERI SUKAMULYA	Kec. Sukasari		601.945,00
369	SD NEGERI SUKASARI	Kec. Sukasari		1.071.332,00
370	SD NEGERI BABAKAN	Kec. Sumedang Selatan		188.534,00
371	SD NEGERI BAGINDA I	Kec. Sumedang Selatan		526.800,00
372	SD NEGERI BAGINDA II	Kec. Sumedang Selatan		456.844,00
373	SD NEGERI CADASPANGERAN	Kec. Sumedang Selatan		357.275,00
374	SD NEGERI CIAWI	Kec. Sumedang Selatan		553.764,00
375	SD NEGERI CIKAMUNING	Kec. Sumedang Selatan		504.040,00
376	SD NEGERI CIKONDANG I	Kec. Sumedang Selatan		318.941,00
377	SD NEGERI CILOA	Kec. Sumedang Selatan		364.024,00
378	SD NEGERI CIPAMEUNGPEUK	Kec. Sumedang Selatan		574.408,00
379	SD NEGERI CIPANCAR	Kec. Sumedang Selatan		355.020,00
380	SD NEGERI CITENGAH	Kec. Sumedang Selatan		72.706,00
381	SD NEGERI CITRARESMI	Kec. Sumedang Selatan		375.305,00
382	SD NEGERI DARANGDAN	Kec. Sumedang Selatan		422.051,00
383	SD NEGERI DARANGDAN TINGKAT	Kec. Sumedang Selatan		2.177.612,00
384	SD NEGERI GUDANG KOPI II	Kec. Sumedang Selatan		325.085,00
385	SD NEGERI GUDANGKOPI I	Kec. Sumedang Selatan		133.870,00
386	SD NEGERI GUNASARI	Kec. Sumedang Selatan		146.747,00
387	SD NEGERI GUNUNGGADUNG	Kec. Sumedang Selatan		767.000,00
388	SD NEGERI KARANGMULYA	Kec. Sumedang Selatan		185.096,00
389	SD NEGERI KEBONSEUREUH	Kec. Sumedang Selatan		136.824,00
390	SD NEGERI MALATI	Kec. Sumedang Selatan		418.585,00
391	SD NEGERI MANANGGA	Kec. Sumedang Selatan		75.516,00
392	SD NEGERI MARGACINTA	Kec. Sumedang Selatan		1.750,00
393	SD NEGERI MARGAPALA	Kec. Sumedang Selatan		852.697,00
394	SD NEGERI MARGASUKA I	Kec. Sumedang Selatan		1.478.027,00
395	SD NEGERI MARGASUKA II	Kec. Sumedang Selatan		1.550.971,00
396	SD NEGERI PAKUWON I	Kec. Sumedang Selatan		2.023.849,00
397	SD NEGERI PAKUWON II	Kec. Sumedang Selatan		907.768,00
398	SD NEGERI PALASARI	Kec. Sumedang Selatan		1.515.508,00
399	SD NEGERI PASANGGRAHAN I	Kec. Sumedang Selatan		704.863,00
400	SD NEGERI PASANGGRAHAN II	Kec. Sumedang Selatan		5.768.819,00
401	SD NEGERI PASANGGRAHAN III	Kec. Sumedang Selatan		367.273,00
402	SD NEGERI PASAREAN	Kec. Sumedang Selatan		923.705,00
403	SD NEGERI PEUSAR	Kec. Sumedang Selatan		691.323,00
404	SD NEGERI SABAGI	Kec. Sumedang Selatan		139.000,00
405	SD NEGERI SINDANGPALAY	Kec. Sumedang Selatan		154.949,00
406	SD NEGERI SUKAMANAH	Kec. Sumedang Selatan		70.000,00
407	SD NEGERI SUKARAJA I	Kec. Sumedang Selatan		3.310.259,00
408	SD NEGERI SUKARAJA II	Kec. Sumedang Selatan		955.318,00
409	SD NEGERI SUKASIRNA I	Kec. Sumedang Selatan		3.527.099,00
410	SD NEGERI SUKASIRNA II	Kec. Sumedang Selatan		105.770,00
411	SD NEGERI TENJOLAYA	Kec. Sumedang Selatan		521.870,00
412	SD NEGERI TENJONAGARA	Kec. Sumedang Selatan		-
413	SD NEGERI BABAKANHURIP	Kec. Sumedang Utara		2.494.835,00
414	SD NEGERI BENDUNGAN I	Kec. Sumedang Utara		98.069,00
415	SD NEGERI BENDUNGAN II	Kec. Sumedang Utara		78.320,00

**Lampiran 6 - Rincian Kas di Bendahara BOS Dan Kas Lainnya Dinas Pendidikan**

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023	Saldo Kas BOS per 31 Desember 2023
416	SD NEGERI CILENGKRANG	Kec. Sumedang Utara		1.054.932,00
417	SD NEGERI GUNUNGSARI	Kec. Sumedang Utara		129.782,00
418	SD NEGERI JATIHURIP	Kec. Sumedang Utara		92.647,00
419	SD NEGERI KARAPYAK I	Kec. Sumedang Utara		46.643,00
420	SD NEGERI KETIB	Kec. Sumedang Utara		2.662.095,00
421	SD NEGERI LEMBURSITU	Kec. Sumedang Utara		72.026,00
422	SD NEGERI MARGAMULYA	Kec. Sumedang Utara		-
423	SD NEGERI PADAMULYA	Kec. Sumedang Utara		88.349,00
424	SD NEGERI PADASUKA I	Kec. Sumedang Utara		65.924,00
425	SD NEGERI PADASUKA II	Kec. Sumedang Utara		51.870,00
426	SD NEGERI PADASUKA III	Kec. Sumedang Utara		105.555,00
427	SD NEGERI PADASUKA IV	Kec. Sumedang Utara		67.096,00
428	SD NEGERI PAMARISEN	Kec. Sumedang Utara		89.172,00
429	SD NEGERI PANYINGKIRAN I	Kec. Sumedang Utara		60.892,00
430	SD NEGERI PANYINGKIRAN II	Kec. Sumedang Utara		77.091,00
431	SD NEGERI PANYINGKIRAN III	Kec. Sumedang Utara		94.680,00
432	SD NEGERI RANCAMULYA	Kec. Sumedang Utara		135.600,00
433	SD NEGERI RANCAPURUT	Kec. Sumedang Utara		747.680,00
434	SD NEGERI SINDANG I	Kec. Sumedang Utara		79.797,00
435	SD NEGERI SINDANG II	Kec. Sumedang Utara		49.927,00
436	SD NEGERI SINDANG III	Kec. Sumedang Utara		102.979,00
437	SD NEGERI SINDANG IV	Kec. Sumedang Utara		55.526,00
438	SD NEGERI SINDANG V	Kec. Sumedang Utara		60.478,00
439	SD NEGERI SINDANGRAJA	Kec. Sumedang Utara		65.983,00
440	SD NEGERI SUKAKERTA	Kec. Sumedang Utara		60.290,00
441	SD NEGERI SUKALUYU	Kec. Sumedang Utara		50.015,00
442	SD NEGERI SUKAMAJU	Kec. Sumedang Utara		29.565,00
443	SD NEGERI SUKAMULYA	Kec. Sumedang Utara		133.551,00
444	SD NEGERI SUKAWENING	Kec. Sumedang Utara		147.076,00
445	SD NEGERI TALUN	Kec. Sumedang Utara		484.472,00
446	SD NEGERI TEGALKALONG	Kec. Sumedang Utara		489.619,00
447	SD NEGERI CIMUNCANG	Kec. Surian		179.500,00
448	SD NEGERI NANGGERANG	Kec. Surian		320.978,00
449	SD NEGERI PARI	Kec. Surian		1.075.991,00
450	SD NEGERI PASIRWARENG	Kec. Surian		626.769,00
451	SD NEGERI SARWIRU	Kec. Surian		338.738,00
452	SD NEGERI SINDANG	Kec. Surian		224.582,00
453	SD NEGERI SITUBATU	Kec. Surian		142.613,00
454	SD NEGERI SURIAN	Kec. Surian		549.152,00
455	SD NEGERI TANJUNG	Kec. Surian		4.025.922,00
456	SD NEGERI WANASARI I	Kec. Surian		271.058,00
457	SD NEGERI WANASARI II	Kec. Surian		113.000,00
458	SD NEGERI AWILEGA	Kec. Tanjungkerta		152.110,00
459	SD NEGERI BOROS	Kec. Tanjungkerta		141.987,00
460	SD NEGERI BUDIASIH	Kec. Tanjungkerta		61.792,00
461	SD NEGERI CIBODAS I	Kec. Tanjungkerta		250.290,00
462	SD NEGERI CIBODAS II	Kec. Tanjungkerta		234.856,00
463	SD NEGERI CIGENTUR	Kec. Tanjungkerta		277.629,00
464	SD NEGERI CIMUNCANG	Kec. Tanjungkerta		634.951,00
465	SD NEGERI CINARENGTA	Kec. Tanjungkerta		122.460,00
466	SD NEGERI CIPANAS	Kec. Tanjungkerta		242.469,00
467	SD NEGERI GUNUNGDATAR	Kec. Tanjungkerta		96.104,00
468	SD NEGERI KADUJAJAR I	Kec. Tanjungkerta		161.319,00
469	SD NEGERI KADUJAJAR II	Kec. Tanjungkerta		305.000,00
470	SD NEGERI KADUJAJAR III	Kec. Tanjungkerta		240.335,00
471	SD NEGERI KERTAMULYA	Kec. Tanjungkerta		105.648,00
472	SD NEGERI PANIIS	Kec. Tanjungkerta		99.451,00
473	SD NEGERI PASIRHUNI I	Kec. Tanjungkerta		95.867,00
474	SD NEGERI PASIRHUNI II	Kec. Tanjungkerta		710.039,00
475	SD NEGERI SAMPORA	Kec. Tanjungkerta		179.104,00

**Lampiran 6 - Rincian Kas di Bendahara BOS Dan Kas Lainnya Dinas Pendidikan**

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023	Saldo Kas BOS per 31 Desember 2023
476	SD NEGERI SUKADANA	Kec. Tanjungkerta		758.635,00
477	SD NEGERI TANJUNGKERTA	Kec. Tanjungkerta		2.054.000,00
478	SD NEGERI TANJUNGMEKAR	Kec. Tanjungkerta		81.624,00
479	SD NEGERI TANJUNG MULYA	Kec. Tanjungkerta		100.011,00
480	SD NEGERI CIBURUAN	Kec. Tanjungmedar		808.903,00
481	SD NEGERI CIKARAMAS I	Kec. Tanjungmedar		417.306,00
482	SD NEGERI CIKARAMAS II	Kec. Tanjungmedar		117.333,00
483	SD NEGERI CINANGSI	Kec. Tanjungmedar		175.518,00
484	SD NEGERI CIOMAS	Kec. Tanjungmedar	56.680,00	110.478,00
485	SD NEGERI CIRANJANG	Kec. Tanjungmedar		228.822,00
486	SD NEGERI CISEMPAK	Kec. Tanjungmedar		1.704.034,00
487	SD NEGERI JINGKANG	Kec. Tanjungmedar		44.938,00
488	SD NEGERI KAMAL	Kec. Tanjungmedar		451.018,00
489	SD NEGERI KERTAMUKTI	Kec. Tanjungmedar		6.282,00
490	SD NEGERI NEGLASARI	Kec. Tanjungmedar		54.916,00
491	SD NEGERI PADAMULYA	Kec. Tanjungmedar		36.290,00
492	SD NEGERI RANCAGOONG	Kec. Tanjungmedar		73.471,00
493	SD NEGERI SALAM	Kec. Tanjungmedar		187.838,00
494	SD NEGERI SINDANGKERTA	Kec. Tanjungmedar		187.698,00
495	SD NEGERI SUKAMUKTI	Kec. Tanjungmedar		125.760,00
496	SD NEGERI SUKAMULYA	Kec. Tanjungmedar		33.741,00
497	SD NEGERI SUKATANI	Kec. Tanjungmedar		180.592,00
498	SD NEGERI BABAKAN BANDUNG	Kec. Tanjungsari		218.061,00
499	SD NEGERI CIJAMBU I	Kec. Tanjungsari		282.614,00
500	SD NEGERI CIJAMBU II	Kec. Tanjungsari		271.901,00
501	SD NEGERI CIJOLANG	Kec. Tanjungsari		481.855,00
502	SD NEGERI CIKANDANG	Kec. Tanjungsari		771.862,00
503	SD NEGERI CILEUTIK	Kec. Tanjungsari		329.442,00
504	SD NEGERI CILULUK I	Kec. Tanjungsari		461.522,00
505	SD NEGERI CILULUK II	Kec. Tanjungsari		337.174,00
506	SD NEGERI GUDANG I	Kec. Tanjungsari		363.770,00
507	SD NEGERI GUDANG II	Kec. Tanjungsari		256.000,00
508	SD NEGERI HEGARMAHAH	Kec. Tanjungsari		510.963,00
509	SD NEGERI JAYASARI	Kec. Tanjungsari		1.981.224,00
510	SD NEGERI KARANGLAYUNG	Kec. Tanjungsari		597.338,00
511	SD NEGERI KEBONHUI	Kec. Tanjungsari		46.646,00
512	SD NEGERI LEBAKGEDE	Kec. Tanjungsari		464.700,00
513	SD NEGERI MARGAJAYA	Kec. Tanjungsari		2.638.624,00
514	SD NEGERI MARIUK	Kec. Tanjungsari		477.051,00
515	SD NEGERI MARUYUNG I	Kec. Tanjungsari		898.131,00
516	SD NEGERI MARUYUNG II	Kec. Tanjungsari		1.632.572,00
517	SD NEGERI SUKAMANTRI	Kec. Tanjungsari		235.143,00
518	SD NEGERI TANJUNGSARI I	Kec. Tanjungsari		46.102,00
519	SD NEGERI TANJUNGSARI II	Kec. Tanjungsari		545.512,00
520	SD NEGERI TANJUNGSARI III	Kec. Tanjungsari		1.056.410,00
521	SD NEGERI TANJUNGSARI IV	Kec. Tanjungsari		1.791,00
522	SD NEGERI BANTARGINTUNG	Kec. Tomo		621.976,00
523	SD NEGERI BUGEL	Kec. Tomo		1.439.337,00
524	SD NEGERI CARICANGKAS	Kec. Tomo		212.860,00
525	SD NEGERI CIJELAG	Kec. Tomo		22.545,00
526	SD NEGERI CIPELES	Kec. Tomo		59.483,00
527	SD NEGERI DARMAJAYA	Kec. Tomo		416.373,00
528	SD NEGERI DARMAWANGI	Kec. Tomo		105.051,00
529	SD NEGERI GANDAWESI	Kec. Tomo		368.807,00
530	SD NEGERI JAYAGIRI	Kec. Tomo		95.500,00
531	SD NEGERI MARONGGE	Kec. Tomo		150.378,00
532	SD NEGERI NEGLASARI	Kec. Tomo		148.572,00
533	SD NEGERI SUGIHHARTI	Kec. Tomo		121.377,00
534	SD NEGERI SUKARESMI	Kec. Tomo		203.477,00
535	SD NEGERI TOLENGAS	Kec. Tomo		74.475,00



**Lampiran 6 - Rincian Kas di Bendahara BOS Dan Kas Lainnya Dinas Pendidikan**

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023	Saldo Kas BOS per 31 Desember 2023
536	SD NEGERI TOMO	Kec. Tomo		234.867,00
537	SD NEGERI WARUNGBUNGUR	Kec. Tomo		329.440,00
538	SD NEGERI CIBULUH	Kec. Ujungjaya		517.116,00
539	SD NEGERI CIMANUK	Kec. Ujungjaya		687.438,00
540	SD NEGERI CIPANAS	Kec. Ujungjaya		10.986,00
541	SD NEGERI CIPELANG	Kec. Ujungjaya		1.798.249,00
542	SD NEGERI GIRIJAYA	Kec. Ujungjaya		183.103,00
543	SD NEGERI KRAMATJAYA	Kec. Ujungjaya		136.428,00
544	SD NEGERI KULINYAR	Kec. Ujungjaya		143.823,00
545	SD NEGERI MARGAJAYA	Kec. Ujungjaya		403.538,00
546	SD NEGERI MARGAMULYA	Kec. Ujungjaya		205.726,00
547	SD NEGERI PALASARI	Kec. Ujungjaya		318.578,00
548	SD NEGERI PANDE	Kec. Ujungjaya		117.094,00
549	SD NEGERI SUKAMULYA	Kec. Ujungjaya		86.101,00
550	SD NEGERI SUKARASA I	Kec. Ujungjaya		629.195,00
551	SD NEGERI SUKARASA II	Kec. Ujungjaya		58.243,00
552	SD NEGERI SUKARATU	Kec. Ujungjaya		182.742,00
553	SD NEGERI TRIJAYA	Kec. Ujungjaya		329.083,00
554	SD NEGERI UJUNGJAYA I	Kec. Ujungjaya		192.457,00
555	SD NEGERI UJUNGJAYA II	Kec. Ujungjaya		538.094,00
556	SD NEGERI UJUNGJAYA III	Kec. Ujungjaya		476.816,00
557	SD NEGERI WANAJAYA	Kec. Ujungjaya		524.641,00
558	SD NEGERI BANJARSARI	Kec. Wado		368.731,00
559	SD NEGERI BATULAWANG	Kec. Wado		346.321,00
560	SD NEGERI BUAHNGARIUNG I	Kec. Wado		204.438,00
561	SD NEGERI BUNTER	Kec. Wado		377.102,00
562	SD NEGERI CIKAREO I	Kec. Wado		208.812,00
563	SD NEGERI CIKAREO II	Kec. Wado		150.519,00
564	SD NEGERI CIKAWUNG	Kec. Wado		95.170,00
565	SD NEGERI CILANDAK	Kec. Wado		67.565,00
566	SD NEGERI CILANGKAP	Kec. Wado		98.450,00
567	SD NEGERI CILENGKRANG	Kec. Wado		143.635,00
568	SD NEGERI CIMALELA	Kec. Wado		74.041,00
569	SD NEGERI CIMIRUN	Kec. Wado		158.762,00
570	SD NEGERI CIMUNGKAL	Kec. Wado	41.230,00	317.914,00
571	SD NEGERI CIPAMANYOAN	Kec. Wado		188.838,00
572	SD NEGERI CIPUNAGARA	Kec. Wado		87.416,00
573	SD NEGERI CISURAT	Kec. Wado		192.754,00
574	SD NEGERI GALEMO	Kec. Wado		787.654,00
575	SD NEGERI GANJARTEMU	Kec. Wado		580.000,00
576	SD NEGERI NYALINDUNG	Kec. Wado	12.686,00	2.679.934,00
577	SD NEGERI PASIRMASIGIT	Kec. Wado		147.522,00
578	SD NEGERI SUKAMANAH	Kec. Wado		303.019,00
579	SD NEGERI SUKANYIRU	Kec. Wado		478.801,00
580	SD NEGERI SUKASARI	Kec. Wado		238.855,00
581	SD NEGERI TANJUNGJAYA	Kec. Wado		3.312.766,00
582	SD NEGERI WADO	Kec. Wado		226.321,00
<b>JUMLAH</b>			<b>438.270,00</b>	<b>259.417.246,00</b>

Lampiran 6 - Rincian Kas di Bendahara BOS dan Kas Lainnya Dinas Pendidikan

RINCIAN KAS DI BENDAHARA DAN KAS LAINNYA SMP  
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023	Saldo Kas BOS per 31 Desember 2023
1	SMP NEGERI 1 BUAHDUA	Kec. Buahdua	394.350,00	101.109,00
2	SMP NEGERI 1 CIBUGEL	Kec. Cibugel		1.635.767,00
3	SMP NEGERI 1 CIMALAKA	Kec. Cimalaka		1.946.791,00
4	SMP NEGERI 1 CIMANGGUNG	Kec. Cimanggung		3.364.078,00
5	SMP NEGERI 1 CISARUA	Kec. Cisarua		3.145.737,00
6	SMP NEGERI 1 CISITU	Kec. Cisit	596.811,00	547.287,00
7	SMP NEGERI 1 CONGGEANG	Kec. Conggeang		3.653.996,00
8	SMP NEGERI 1 DARMARAJA	Kec. Darmaraja		5.127.995,00
9	SMP NEGERI 1 GANEAS	Kec. Ganeas		605.425,00
10	SMP NEGERI 1 JATIGEDE	Kec. Jatigede		1.965.262,00
11	SMP NEGERI 1 JATINANGOR	Kec. Jatinangor		2.114.267,00
12	SMP NEGERI 1 JATINUNGGAL	Kec. Jatinunggal		2.157.208,00
13	SMP NEGERI 1 PAMULIHAN	Kec. Pamulihan		1.851.855,00
14	SMP NEGERI 1 PASEH	Kec. Paseh		2.827.131,00
15	SMP NEGERI 1 RANCAKALONG	Kec. Rancakalong		405.276,00
16	SMP NEGERI 1 SITURAJA	Kec. Situraja		1.776.823,00
17	SMP NEGERI 1 SUKASARI	Kec. Sukasari		3.448.080,00
18	SMP NEGERI 1 SUMEDANG	Kec. Sumedang Selatan		807.625,00
19	SMP NEGERI 1 SURIAN	Kec. Surian		879.953,00
20	SMP NEGERI 1 TANJUNGKERTA	Kec. Tanjungkerta		369.367,00
21	SMP NEGERI 1 TANJUNGMEDAR	Kec. Tanjungmedar		479.503,00
22	SMP NEGERI 1 TANJUNGSARI	Kec. Tanjungsari	280.202,00	169.798,00
23	SMP NEGERI 1 TOMO	Kec. Tomo		321.844,00
24	SMP NEGERI 1 UJUNGJAYA	Kec. Ujungjaya		2.850.003,00
25	SMP NEGERI 1 WADO	Kec. Wado		403.632,00
26	SMP NEGERI 10 SUMEDANG	Kec. Sumedang Selatan		73.348,00
27	SMP NEGERI 2 BUAHDUA	Kec. Buahdua		311.306,00
28	SMP NEGERI 2 CIBUGEL	Kec. Cibugel		425.523,00
29	SMP NEGERI 2 CIMALAKA	Kec. Cimalaka		355.076,00
30	SMP NEGERI 2 CIMANGGUNG	Kec. Cimanggung		1.006.969,00
31	SMP NEGERI 2 CISITU	Kec. Cisit		184.933,00
32	SMP NEGERI 2 CONGGEANG	Kec. Conggeang		806.154,00
33	SMP NEGERI 2 DARMARAJA	Kec. Darmaraja		1.202.965,00
34	SMP NEGERI 2 GANEAS	Kec. Ganeas		388.151,00
35	SMP NEGERI 2 JATIGEDE	Kec. Jatigede		312.944,00
36	SMP NEGERI 2 JATINANGOR	Kec. Jatinangor		611.511,00
37	SMP NEGERI 2 JATINUNGGAL	Kec. Jatinunggal		270.877,00
38	SMP NEGERI 2 PAMULIHAN	Kec. Pamulihan		1.015.290,00
39	SMP NEGERI 2 PASEH	Kec. Paseh		1.836.589,00
40	SMP NEGERI 2 RANCAKALONG	Kec. Rancakalong		-
41	SMP NEGERI 2 SITURAJA	Kec. Situraja		1.978.925,00
42	SMP NEGERI 2 SUMEDANG	Kec. Sumedang Utara		114.609,00
43	SMP NEGERI 2 TANJUNGKERTA	Kec. Tanjungkerta		365.989,00
44	SMP NEGERI 2 TANJUNGSARI	Kec. Tanjungsari		3.914.437,00
45	SMP NEGERI 2 TOMO	Kec. Tomo		6.720.553,00
46	SMP NEGERI 2 UJUNGJAYA	Kec. Ujungjaya		319.421,00
47	SMP NEGERI 2 WADO	Kec. Wado		2.377.680,00
48	SMP NEGERI 3 CIMALAKA	Kec. Cimalaka		926.318,00
49	SMP NEGERI 3 CISITU	Kec. Cisit		22.126.507,00
50	SMP NEGERI 3 JATIGEDE	Kec. Jatigede		155.619,00
51	SMP NEGERI 3 JATINANGOR	Kec. Jatinangor		3.132.655,00
52	SMP NEGERI 3 JATINUNGGAL	Kec. Jatinunggal		67.200,00
53	SMP NEGERI 3 PAMULIHAN	Kec. Pamulihan		5.588.244,00
54	SMP NEGERI 3 RANCAKALONG	Kec. Rancakalong		1.535.424,00
55	SMP NEGERI 3 SITURAJA	Kec. Situraja		673.201,00
56	SMP NEGERI 3 SUMEDANG	Kec. Sumedang Selatan		1.843.079,00
57	SMP NEGERI 3 TANJUNGSARI	Kec. Tanjungsari		578.494,00
58	SMP NEGERI 3 WADO	Kec. Wado		905.690,00
59	SMP NEGERI 4 JATINANGOR	Kec. Jatinangor		1.646.540,00
60	SMP NEGERI 4 PAMULIHAN	Kec. Pamulihan		278.439,00
61	SMP NEGERI 4 SITURAJA	Kec. Situraja		2.053.763,00
62	SMP NEGERI 4 SUMEDANG	Kec. Sumedang Selatan		192.690,00
63	SMP NEGERI 4 WADO	Kec. Wado		222.896,00
64	SMP NEGERI 5 SUMEDANG	Kec. Sumedang Utara		1.654.586,00

**Lampiran 6 - Rincian Kas di Bendahara BOS dan Kas Lainnya Dinas Pendidikan**

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023	Saldo Kas BOS per 31 Desember 2023
65	SMP NEGERI 6 SUMEDANG	Kec. Sumedang Utara	240.540,00	7.503,00
66	SMP NEGERI 7 SUMEDANG	Kec. Sumedang Selatan		4.039.361,00
67	SMP NEGERI 8 SUMEDANG	Kec. Sumedang Utara		111.369,00
68	SMP NEGERI 9 SUMEDANG	Kec. Sumedang Selatan		204.705,00
69	SMP NEGERI SATU ATAP CIKAWAO	Kec. Pamulihan		442.510,00
70	SMP NEGERI SATU ATAP CIMANGGUNG	Kec. Cimanggung		2.267.579,00
71	SMP NEGERI SATU ATAP SUKANYIRU	Kec. Wado		2.119.518,00
72	SMP NEGERI SATU ATAP TAMANSARI	Kec. Cibugel	38.660,00	32.700,00
<b>JUMLAH</b>			<b>1.550.563,00</b>	<b>120.355.652,00</b>

Lampiran 7 - Rincian Kas Lainnya BLUD Puskesmas

Rincian Kas Lainnya BLUD Puskesmas

No.	Nama Puskesmas	Saldo Per 31 Desember 2023
1	Kas Puskesmas Jatinangor	49.634.909,00
2	Kas Puskesmas Cimanggung	17.867.161,00
3	Kas Puskesmas Tanjungsari	18.564.351,00
4	Kas Puskesmas Margajaya	23.711.894,00
5	Kas Puskesmas Sukasari	9.283.363,00
6	Kas Puskesmas Haurngombong	9.363.908,00
7	Kas Puskesmas Pamulihan	14.624.685,00
8	Kas Puskesmas Rancakalong	17.892.080,00
9	Kas Puskesmas Sumedang Selatan	8.826.389,00
10	Kas Puskesmas Sukagalih	1.322.069,00
11	Kas Puskesmas Kotakaler	7.372.071,00
12	Kas Puskesmas Situ	30.689.378,00
13	Kas Puskesmas Ganeas	35.448.636,00
14	Kas Puskesmas Situraja	22.721.420,00
15	Kas Puskesmas Cisitu	9.696.397,00
16	Kas Puskesmas Darmaraja	114.372.678,00
17	Kas Puskesmas Cibugel	17.934.268,00
18	Kas Puskesmas Wado	13.396.100,00
19	Kas Puskesmas Jatinunggal	52.940.670,00
20	Kas Puskesmas Jatigede	97.961.848,00
21	Kas Puskesmas Tomo	5.623.810,00
22	Kas Puskesmas Ujungjaya	52.359.900,00
23	Kas Puskesmas Conggeang	12.108.929,00
24	Kas Puskesmas Paseh	24.796.280,00
25	Kas Puskesmas Cimalaka	219.868,00
26	Kas Puskesmas Cisarua	17.831.062,00
27	Kas Puskesmas Tanjungkerta	9.027.036,00
28	Kas Puskesmas Sukamantri	30.254.306,00
29	Kas Puskesmas Tanjungmedar	5.170.432,00
30	Kas Puskesmas Buahdua	30.730.015,00
31	Kas Puskesmas Hariang	31.700.899,00
32	Kas Puskesmas Surian	7.189.058,00
33	Kas Puskesmas Cisempur	26.461.154,00
34	Kas Puskesmas Sawahdadap	22.555.689,00
35	Kas Puskesmas Padasuka	13.917.757,00
36	Kas di LABKESDA	0,00
	<b>Total</b>	<b>863.570.470,00</b>

Lampiran 8 - Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang

Rincian Piutang Berdasarkan Jenis dan Umur

NO	JENIS PIUTANG 2023	UMUR PIUTANG								TOTAL	
		< 1 Tahun		> 1 s.d 2 Tahun		> 2 s.d 5 Tahun		> 5 Tahun		Saldo Piutang	Penyisihan Piutang
		Saldo Piutang	Penyisihan Piutang (0,5%)	Saldo Piutang	Penyisihan Piutang (10%)	Saldo Piutang	Penyisihan Piutang (50%)	Saldo Piutang	Penyisihan Piutang (100%)		
1	Piutang Pajak	30.563.648.482,00	152.818.242,41	27.621.064.248,00	2.762.106.424,80	26.548.200.286,00	13.274.100.143,00	27.369.358.125,00	27.369.358.125,00	112.102.271.141,00	43.558.382.935,24
2	Piutang Retribusi	0,00	0,00	84.117.213,00	8.411.721,30	0,00	0,00	182.201.351,00	182.201.351,00	266.318.564,00	190.613.072,31
3	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	34.308.800,00	171.544,00	30.862.420,00	3.086.242,00	650.000.000,00	325.000.000,00	1.387.479.800,00	1.387.479.800,00	2.102.651.020,00	1.715.737.586,00
4	Piutang Transfer Pemerintah Provinsi (Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi)	6.174.445.696,00	30.872.228,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.174.445.696,00	30.872.228,48
5	Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (BKAD)	51.500.000,00	257.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500.000,00	257.500,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>36.823.902.978,00</b>	<b>184.119.514,89</b>	<b>27.736.043.881,00</b>	<b>2.773.604.388,10</b>	<b>27.198.200.286,00</b>	<b>13.599.100.143,00</b>	<b>28.939.039.276,00</b>	<b>28.939.039.276,00</b>	<b>120.697.186.421,00</b>	<b>45.495.863.322,03</b>

Rincian Piutang BLUD Berdasarkan Jenis dan Umur

NO	JENIS PIUTANG 2023	UMUR PIUTANG								TOTAL	
		< 1 Tahun		> 1 s.d 2 Tahun		> 2 s.d 3 Tahun		> 3 Tahun		Saldo Piutang	Penyisihan Piutang
		Saldo Piutang	Penyisihan Piutang (0%)	Saldo Piutang	Penyisihan Piutang (25%)	Saldo Piutang	Penyisihan Piutang (50%)	Saldo Piutang	Penyisihan Piutang (100%)		
1	Piutang BLUD RSUD	10.540.036.122,00	0,00	1.731.933.368,00	432.983.342,00	310.298.977,00	155.149.488,50	3.141.750.279,00	3.141.750.279,00	15.724.018.746,00	3.729.883.109,50
2	Piutang BLUD Puskesmas	249.992.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.992.000,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>10.540.036.122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731.933.368,00</b>	<b>432.983.342,00</b>	<b>310.298.977,00</b>	<b>155.149.488,50</b>	<b>3.141.750.279,00</b>	<b>3.141.750.279,00</b>	<b>15.974.010.746,00</b>	<b>3.729.883.109,50</b>

## REKAPITULASI PERSEDIAAN SKPD TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SKPD	BAHAN				
		SALDO AWAL	MUTASI		JUMLAH MUTASI	SALDO AKHIR
			MASUK	KELUAR		
1	2	3	4	5	6	7
1	DINAS KESEHATAN	2.184.131.393,63	9.099.258.683,00	9.438.769.941,63	(339.511.258,63)	1.844.620.135,00
2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	19.661.624,00	136.815.200,00	155.004.424,00	(18.189.224,00)	1.472.400,00
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	DINAS PERHUBUNGAN	28.350,00	0,00	28.350,00	(28.350,00)	0,00
7	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	56.686.665,00	17.084.990,00	17.084.990,00	0,00	56.686.665,00
10	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	73.639.900,00	832.500,00	68.011.645,00	(67.179.145,00)	6.460.755,00
11	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	BADAN PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>2.334.147.932,63</b>	<b>9.253.991.373,00</b>	<b>9.678.899.350,63</b>	<b>(424.907.977,63)</b>	<b>1.909.239.955,00</b>

## Lampiran 9 - Rincian Persediaan

NO	SKPD	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR				
		SALDO AWAL	MUTASI		JUMLAH MUTASI	SALDO AKHIR
			MASUK	KELUAR		
1	2	3	4	5	6	7
1	DINAS KESEHATAN	1.548.203.311,00	4.573.026.328,00	4.617.123.480,00	(44.097.152,00)	1.504.106.159,00
2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	23.680.250,00	113.065.000,00	136.745.250,00	(23.680.250,00)	0,00
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	20.182.072,00	157.433.780,00	161.755.280,00	(4.321.500,00)	15.860.572,00
4	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	757.030.700,00	1.999.266.418,00	1.579.365.618,00	419.900.800,00	1.176.931.500,00
5	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	DINAS PERHUBUNGAN	61.235.790,00	694.189.835,00	417.369.759,59	276.820.075,41	338.055.865,41
7	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	21.458.100,00	272.979.550,00	263.618.170,00	9.361.380,00	30.819.480,00
8	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	222.964.175,00	151.287.500,00	162.693.525,00	(11.406.025,00)	211.558.150,00
9	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SEKRETARIAT DAERAH	42.888.309,00	1.004.825.835,00	1.017.459.972,00	(12.634.137,00)	30.254.172,00
12	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	9.021.415,00	1.181.110.702,00	1.144.768.707,00	36.341.995,00	45.363.410,00
13	BADAN PENDAPATAN DAERAH	203.401.769,10	1.228.644.970,00	1.346.013.339,10	(117.368.369,10)	86.033.400,00
<b>JUMLAH</b>		<b>2.910.065.891,10</b>	<b>11.375.829.918,00</b>	<b>10.846.913.100,69</b>	<b>528.916.817,31</b>	<b>3.438.982.708,41</b>

## Lampiran 9 - Rincian Persediaan

NO	SKPD	OBAT-OBATAN				
		SALDO AWAL	MUTASI		JUMLAH MUTASI	SALDO AKHIR
			MASUK	KELUAR		
1	2	3	4	5	6	7
1	DINAS KESEHATAN	26.834.447.026,72	162.600.525.978,67	155.564.454.032,44	7.036.071.946,23	33.870.518.972,95
2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.525.891.000,00	1.569.213.955,00	1.328.582.536,00	240.631.419,00	1.766.522.419,00
6	DINAS PERHUBUNGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	18.723.610,00	40.942.000,00	39.186.110,00	1.755.890,00	20.479.500,00
10	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	BADAN PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>28.379.061.636,72</b>	<b>164.210.681.933,67</b>	<b>156.932.222.678,44</b>	<b>7.278.459.255,23</b>	<b>35.657.520.891,95</b>



## Lampiran 9 - Rincian Persediaan

NO	SKPD	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT				
		SALDO AWAL	MUTASI		JUMLAH MUTASI	SALDO AKHIR
			MASUK	KELUAR		
1	2	3	4	5	6	7
1	DINAS KESEHATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6.829.950,00	153.756.680,00	148.919.570,00	4.837.110,00	11.667.060,00
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	DINAS PERHUBUNGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	574.932.685,46	0,00	469.668.385,46	(469.668.385,46)	105.264.300,00
11	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	BADAN PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>581.762.635,46</b>	<b>153.756.680,00</b>	<b>618.587.955,46</b>	<b>(464.831.275,46)</b>	<b>116.931.360,00</b>

## Lampiran 9 - Rincian Persediaan

NO	SKPD	NATURA DAN PAKAN				
		SALDO AWAL	MUTASI		JUMLAH MUTASI	SALDO AKHIR
			MASUK	KELUAR		
1	2	3	4	5	6	7
1	DINAS KESEHATAN	805.350,00	638.625.000,00	636.342.350,00	2.282.650,00	3.088.000,00
2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	DINAS PERHUBUNGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	20.929.000,00	194.468.480,00	205.597.250,00	(11.128.770,00)	9.800.230,00
10	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	BADAN PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>21.734.350,00</b>	<b>833.093.480,00</b>	<b>841.939.600,00</b>	<b>(8.846.120,00)</b>	<b>12.888.230,00</b>

## Lampiran 9 - Rincian Persediaan

NO	SKPD	REKAPITULASI				
		SALDO AWAL	MUTASI		JUMLAH MUTASI	SALDO AKHIR
			MASUK	KELUAR		
1	2	3	4	5	6	7
1	DINAS KESEHATAN	30.567.587.081,35	176.911.435.989,67	170.256.689.804,07	6.654.746.185,60	37.222.333.266,95
2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	50.171.824,00	403.636.880,00	440.669.244,00	(37.032.364,00)	13.139.460,00
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	20.182.072,00	157.433.780,00	161.755.280,00	(4.321.500,00)	15.860.572,00
4	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	757.030.700,00	1.999.266.418,00	1.579.365.618,00	419.900.800,00	1.176.931.500,00
5	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.525.891.000,00	1.569.213.955,00	1.328.582.536,00	240.631.419,00	1.766.522.419,00
6	DINAS PERHUBUNGAN	61.264.140,00	694.189.835,00	417.398.109,59	276.791.725,41	338.055.865,41
7	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	21.458.100,00	272.979.550,00	263.618.170,00	9.361.380,00	30.819.480,00
8	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	222.964.175,00	151.287.500,00	162.693.525,00	(11.406.025,00)	211.558.150,00
9	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	96.339.275,00	252.495.470,00	261.868.350,00	(9.372.880,00)	86.966.395,00
10	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	648.572.585,46	832.500,00	537.680.030,46	(536.847.530,46)	111.725.055,00
11	SEKRETARIAT DAERAH	42.888.309,00	1.004.825.835,00	1.017.459.972,00	(12.634.137,00)	30.254.172,00
12	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	9.021.415,00	1.181.110.702,00	1.144.768.707,00	36.341.995,00	45.363.410,00
13	BADAN PENDAPATAN DAERAH	203.401.769,10	1.228.644.970,00	1.346.013.339,10	(117.368.369,10)	86.033.400,00
<b>JUMLAH</b>		<b>34.226.772.445,91</b>	<b>185.827.353.384,67</b>	<b>178.918.562.685,23</b>	<b>6.908.790.699,45</b>	<b>41.135.563.145,36</b>

## LAPORAN MUTASI ASET TETAP DI NERACA DIBANDINGKAN MUTASI ASET SEHARUSNYA DI SKPD

No.	URAIAN	NERACA			PERHITUNGAN MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAINNYA SKPD					
		Tahun 2023	Tahun 2022 (Saldo Awal)	Mutasi 5 = (3-4)	Belanja Modal di LRA (+)  2023	Koreksi Aset Tetap < 1.000.000 (Ekstrakompatabel) (-)  2023	Atribusi Biaya Umum (diluar Belanja Modal) (+)  2023	Kapitalisasi Aset Tetap dari Belanja Barang Jasa & Pemeliharaan (+)  2023	Koreksi + / - karena Pencatatan  2023	Hibah/Donasi/Ba ntuan (Non APBD) (+ / -)  2023
1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9	10	11
1	TANAH	779.803.484.596,70	582.116.454.610,77	197.687.029.985,93	3.486.649.000,00	0,00	0,00	0,00	108.549.405.000,00	85.650.975.985,93
2	PERALATAN DAN MESIN	1.620.650.976.708,34	1.525.702.360.148,95	94.948.616.559,39	118.167.717.934,00	(16.973.281.462,69)	0,00	459.050.702,00	(806.208.435,00)	(4.785.100.962,00)
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.669.060.803.578,38	1.541.028.614.238,83	128.032.189.339,55	86.018.035.799,00	0,00	2.635.291.935,00	3.814.286.028,57	5.639.471.000,00	12.436.246.123,68
4	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	3.230.891.609.798,35	3.051.233.809.417,23	179.657.800.381,12	175.796.888.261,00	0,00	6.998.334.077,00	8.182.430.438,00	7.937.289,00	26.715.246.124,12
5	ASET TETAP LAINNYA	231.399.529.043,12	212.813.927.498,19	18.585.601.544,93	19.324.226.162,00	0,00	0,00	2.604.000,00	0,00	0,00
6	KONTRUKSI DALAM Pengerjaan	13.664.221.546,00	42.865.020.217,00	(29.200.798.671,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	AKUMULASI PENYUSUTAN	4.100.427.603.644,00	3.648.913.349.508,75	451.514.254.135,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>3.445.043.021.626,89</b>	<b>3.306.846.836.622,22</b>	<b>138.196.185.004,67</b>	<b>402.793.517.156,00</b>	<b>(16.973.281.462,69)</b>	<b>9.633.626.012,00</b>	<b>12.458.371.168,57</b>	<b>113.390.604.854,00</b>	<b>120.017.367.271,73</b>
8	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>6.570.037.889,99</b>	<b>4.575.543.043,41</b>	<b>1.994.494.846,58</b>	<b>2.924.327.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.600.000,00)</b>	<b>0,00</b>
	ASET TIDAK BERWUJUD	49.464.493.935,26	46.127.823.312,26	3.336.670.623,00	38.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASET LAIN-LAIN	42.718.990.580,32	43.926.696.727,67	(1.207.706.147,35)	2.886.327.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTISASI	44.216.328.631,59	42.951.089.531,93	1.265.239.099,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN	41.397.117.994,00	42.527.887.464,59	(1.130.769.470,59)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600.000,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.451.613.059.516,88</b>	<b>3.311.422.379.665,63</b>	<b>140.190.679.851,25</b>	<b>405.717.844.656,00</b>	<b>(16.973.281.462,69)</b>	<b>9.633.626.012,00</b>	<b>12.458.371.168,57</b>	<b>113.383.004.854,00</b>	<b>120.017.367.271,73</b>

## LAPORAN MUTASI ASET TETAP DI NERACA DIBANDINGKAN MUTASI ASET SEHARUSNYA DI SKPD

No.	URAIAN	PERHITUNGAN MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAINNYA SKPD									
		Mutasi Masuk SKPD (+)	Mutasi Keluar SKPD (-)	Penghapusan (-)	Reklas ke KDP	Reklas ke Aset Lainnya	Reklas ke Peralatan dan Mesin	Reklas ke Gedung Bangunan	Reklas ke Jalan, Jaringan dan Irigasi	Reklas dari Gedung dan Bangunan	Reklas dari KDP
		2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	TANAH	495.264.000,00	(495.264.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PERALATAN DAN MESIN	14.312.610.663,28	(14.312.610.663,28)	(766.618.374,69)	0,00	(2.548.141.717,00)	0,00	(21.302.227,30)	0,00	121.407.800,00	0,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	21.525.598.692,00	(21.525.598.692,00)	0,00	0,00	0,00	(121.407.800,00)	0,00	0,00	0,00	17.588.964.026,00
4	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	18.217.000,00	(18.217.000,00)	(5.609.445.500,00)	(2.517.863.596,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.129.698.241,00
5	ASET TETAP LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00	(412.343.123,00)	(328.885.494,07)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	KONTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.588.964.026,00)	(14.129.698.241,00)	0,00	0,00
7	AKUMULASI PENYUSUTAN	12.673.747.368,00	(12.673.747.368,00)	(745.644.744,25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>23.677.942.987,28</b>	<b>(23.677.942.987,28)</b>	<b>(5.630.419.130,44)</b>	<b>(2.517.863.596,00)</b>	<b>(2.960.484.840,00)</b>	<b>(450.293.294,07)</b>	<b>(17.610.266.253,30)</b>	<b>(14.129.698.241,00)</b>	<b>121.407.800,00</b>	<b>31.718.662.267,00</b>
8	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(159.961.080,01)</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.886.327.500,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	ASET TIDAK BERWUJUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASET LAIN-LAIN	0,00	0,00	(3.752.347.864,35)	0,00	(2.886.327.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTISASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN	0,00	0,00	(3.592.386.784,34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>23.677.942.987,28</b>	<b>(23.677.942.987,28)</b>	<b>(5.790.380.210,45)</b>	<b>(2.517.863.596,00)</b>	<b>(5.846.812.340,00)</b>	<b>(450.293.294,07)</b>	<b>(17.610.266.253,30)</b>	<b>(14.129.698.241,00)</b>	<b>121.407.800,00</b>	<b>31.718.662.267,00</b>

## LAPORAN MUTASI ASET TETAP DI NERACA DIBANDINGKAN MUTASI ASET SEHARUSNYA DI SKPD

No.	URAIAN	PERHITUNGAN MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAINNYA SKPD									
		Reklas dari Peralatan dan Mesin	Reklas dari Aset Lainnya	Reklas dari JIJ	Reklas dari Aset Tetap Lainnya	Utang Belanja Modal (+)	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud di LO	Beban Penyusutan di LO	Koreksi Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan Aset Lain-lain	Pengurangan Utang Belanja Modal 2022
		2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	TANAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PERALATAN DAN MESIN	0,00	0,00	0,00	328.885.494,07	1.863.933.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(91.725.555,00)
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	21.302.227,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(44.045.132.415,00)
5	ASET TETAP LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	KONTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00	0,00	2.517.863.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	AKUMULASI PENYUSUTAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.650.657.100,98	2.149.024.409,52	0,00	0,00
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>21.302.227,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.517.863.596,00</b>	<b>328.885.494,07</b>	<b>1.863.933.363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(452.650.657.100,98)</b>	<b>(2.149.024.409,52)</b>	<b>0,00</b>	<b>(44.136.857.970,00)</b>
8	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>2.521.322.117,00</b>	<b>2.886.327.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.343.123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.426.539.559,46)</b>	<b>0,00</b>	<b>163.405.168,05</b>	<b>83.660.609,00</b>	<b>0,00</b>
	ASET TIDAK BERWUJUD	0,00	2.886.327.500,00	0,00	412.343.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASET LAIN-LAIN	2.544.641.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTISASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426.539.559,46	0,00	(161.300.459,80)	0,00	0,00
	PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN	23.319.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.104.708,25)	(83.660.609,00)	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.542.624.344,30</b>	<b>2.886.327.500,00</b>	<b>2.517.863.596,00</b>	<b>741.228.617,07</b>	<b>1.863.933.363,00</b>	<b>(1.426.539.559,46)</b>	<b>(452.650.657.100,98)</b>	<b>(1.985.619.241,47)</b>	<b>83.660.609,00</b>	<b>(44.136.857.970,00)</b>

## LAPORAN MUTASI ASET TETAP DI NERACA DIBANDINGKAN MUTASI ASET SEHARUSNYA DI SKPD

No.	URAIAN	PERHITUNGAN MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAINNYA SKPD			
		Reklas Ke Akumulasi Penyusutan Aset LainLain	Koreksi Penyesuaian Utang Tahun Lalu	Jumlah Mutasi Aset Tetap di SKPD	Selisih Neraca & Mutasi SKPD
		2023	2023	2023	2023
		32	33	34=SUM(6:33)	35=(5-34)
1	TANAH	0,00	0,00	197.687.029.985,93	0,00
2	PERALATAN DAN MESIN	0,00	0,00	94.948.616.559,39	0,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	0,00	0,00	128.032.189.339,55	0,00
4	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	0,00	(292.538,00)	179.657.800.381,12	0,00
5	ASET TETAP LAINNYA	0,00	0,00	18.585.601.544,93	0,00
6	KONTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00	0,00	(29.200.798.671,00)	0,00
7	AKUMULASI PENYUSUTAN	(2.539.782.631,00)	0,00	451.514.254.135,25	0,00
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>2.539.782.631,00</b>	<b>(292.538,00)</b>	<b>138.196.185.004,67</b>	<b>0,00</b>
8	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>(2.516.463.031,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994.494.846,58</b>	0,00
	ASET TIDAK BERWUJUD	0,00	0,00	3.336.670.623,00	0,00
	ASET LAIN-LAIN	0,00	0,00	(1.207.706.147,35)	0,00
	AMORTISASI	0,00	0,00	1.265.239.099,66	0,00
	PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN	2.516.463.031,00	0,00	(1.130.769.470,59)	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>23.319.600,00</b>	<b>(292.538,00)</b>	<b>140.190.679.851,25</b>	<b>0,00</b>

## DATA ASET TETAP BERMASALAH/DIKUASAI PIHAK KETIGA

No	SKPD	Nama dan Alamat Aset	Satuan/ Luas M2/ Unit	Nilai	Permasalahan	Sudah/Belum asa SKK Kejaksaan	Perogres Penyelesaian
1	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	Tanah dan Bangunan di Desa Sekanwangi Kec. Buahdua	<b>Bidang/ 2.590/ 1 Bidang</b>	Tanah Rp505.000.000,00 Bangunan Rp3.973.576.582,26	Ada pengakuan dari Yayasan Pangeran Sumedang (YPS)	Sedang dalam Proses di Kejaksaan dan sudah ada dokumen pendukung lainnya	Klarifikasi data aset ke pihak Yayasan dan telah dilaksanakan pengukuran selanjutnya dilakukan mediasi
2	Dinas Pendidikan	Bangunan SDN Cisambeng Desa Cipeundeuy Kec. Jatinunggal	<b>Bidang/ 2.024/ 1 Bidang</b>	Bangunan Rp1.161.841.738,36	Adanya gugatan dari yang mengatasmakan ahli waris	Sedang dalam proses pembahasan dengan Kejaksaan dan Bagian Hukum SETDA	Melakukan rapat di Bagian Hukum Setda, Kejaksaan Negeri Sumedang, proses belum selesai



**Rincian Hibah Tanah**  
**Aset Tetap : Tanah**

No	Uraian	Luas M <sup>2</sup>	Alamat	Jumlah (Rp)
<b>I</b>	<b>Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan</b>			<b>34.727.425.976,39</b>
1	Tanah untuk Jalan	3.282,01	Perumahan Giri Mukti Indah	101.085.908,00
2	Tanah untuk Bangunan Instalasi	374,19	Perumahan Giri Mukti Indah	11.525.052,00
3	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	234,00	Perumahan Giri Mukti Indah	7.207.200,00
4	Tanah untuk Lapangan Olahraga	260,00	Perumahan Giri Mukti Indah	8.008.000,00
5	Tanah untuk Jalan	6.041,15	Perumahan villa mutiara I	217.481.400,00
6	Tanah Bangunan Air	891,90	Perumahan villa mutiara I	32.108.400,00
7	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	540,00	Perumahan villa mutiara I	19.440.000,00
8	Tanah untuk Bangunan Tempat kerja	19,00	Perumahan villa mutiara I	684.000,00
9	Tanah untuk Taman	117,04	Perumahan villa mutiara I	4.214.142,24
10	Tanah untuk Jalan	10.615,85	Perumahan villa mutiara 2	382.170.600,00
11	Tanah untuk Jalan	435,40	Perumahan villa mutiara 2	15.674.835,40
12	Tanah Bangunan Air	2.997,45	Perumahan villa mutiara 2	107.914.194,90
13	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	339,08	Perumahan villa mutiara 2	12.208.236,32
14	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	5,94	Perumahan villa mutiara 2	213.869,70
15	Tanah Persil Lainnya	117,04	Perumahan villa mutiara 2	4.214.142,24
16	Tanah Persil Lainnya	24,00	Perumahan villa mutiara 2	864.168,00
17	Tanah Persil Lainnya	18,00	Perumahan villa mutiara 2	648.144,00
18	Tanah untuk Bangunan Tempat kerja	7,79	Perumahan villa mutiara 2	280.510,11
19	Tanah untuk Jalan	37.834,02	Perumahan Parakan Muncang (SBG)	9.193.666.860,00
20	Tanah Bangunan Air	5.087,96	Perumahan Parakan Muncang (SBG)	1.236.374.280,00
21	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	782,00	Perumahan Parakan Muncang (SBG)	190.026.000,00
22	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	60,00	Perumahan Parakan Muncang (SBG)	14.580.000,00
23	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	220,00	Perumahan Parakan Muncang (SBG)	53.460.000,00
24	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	34.900,00	Perumahan Parakan Muncang (SBG)	84.807.000,00
25	Tanah untuk Bangunan Tempat kerja	489,00	Perumahan Parakan Muncang (SBG)	118.827.000,00
26	Tanah untuk Bangunan Tempat kerja	165,00	Perumahan Parakan Muncang (SBG)	40.095.000,00
27	Tanah untuk Bangunan Tempat kerja	15,00	Perumahan Parakan Muncang (SBG)	3.645.000,00
28	Tanah Persil Lainnya	200,00	Perumahan Parakan Muncang (SBG)	48.600.000,00
29	Tanah untuk Jalan	1.360,50	Perumahan Mekarsari Regency 4	39.182.400,00
30	Tanah untuk Bangunan Air	158,40	Perumahan Mekarsari Regency 5	4.561.920,00
31	Tanah untuk Jalan	16.645,35	Perumahan Ambar Tanjungsari Residence	1.539.694.875,00
32	Tanah untuk Bangunan Air	6.659,93	Perumahan Ambar Tanjungsari Residence	616.043.525,00
33	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	824,00	Perumahan Ambar Tanjungsari Residence	76.220.000,00
34	Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	333,00	Perumahan Ambar Tanjungsari Residence	30.802.500,00
35	Tanah untuk Bangunan Tempat kerja	15,81	Perumahan Ambar Tanjungsari Residence	1.462.425,00
36	Tanah untuk Jalan	4.462,29	Perumahan Anggrek Regency	3.365.610.835,86
37	Tanah untuk Bangunan Air	964,71	Perumahan Anggrek Regency	727.617.082,14
38	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	201,14	Perumahan Anggrek Regency	151.706.626,76
39	Tanah untuk Bangunan Tempat kerja	10,03	Perumahan Anggrek Regency	7.564.967,02
40	Tanah untuk Jalan	7.795,68	Perumahan Bumi Ciptasari Kencana Asri	3.210.720.969,12
41	Tanah untuk Bangunan Air	740,78	Perumahan Bumi Ciptasari Kencana Asri	305.096.910,02
42	Tanah Kering	756,00	Perumahan Bumi Ciptasari Kencana Asri	311.365.404,00
43	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	350,00	Perumahan Bumi Ciptasari Kencana Asri	144.150.650,00
44	Tanah untuk Bangunan Tempat kerja	37,50	Perumahan Bumi Ciptasari Kencana Asri	15.444.712,50
45	Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	200,00	Perumahan Bumi Ciptasari Kencana Asri	82.371.800,00
46	Tanah untuk Jalan	7.104,31	Perumahan Bumi Mekarjaya Indah (BMI)	1.927.903.709,01
47	Tanah untuk Bangunan Jaringan	1.658,05	Perumahan Bumi Mekarjaya Indah (BMI)	449.946.686,55
48	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	162,00	Perumahan Bumi Mekarjaya Indah (BMI)	43.962.102,00
49	Tanah untuk Bangunan Tempat kerja	25,50	Perumahan Bumi Mekarjaya Indah (BMI)	6.919.960,50
50	Tanah untuk Jalan	5.611,11	Perumahan Griya Pesona Alam	681.749.865,00
51	Tanah untuk Bangunan Air	726,46	Perumahan Griya Pesona Alam	88.264.890,00
52	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	273,99	Perumahan Griya Pesona Alam	33.289.785,00
53	Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	220,00	Perumahan Griya Pesona Alam	26.730.000,00
54	Tanah untuk Bangunan Tempat kerja	7,92	Perumahan Griya Pesona Alam	962.280,00

No	Uraian	Luas M <sup>2</sup>	Alamat	Jumlah (Rp)
55	Tanah untuk Jalan	460,26	Perumahan Kiara Pesona	101.947.590,00
56	Tanah untuk Bangunan Jaringan	136,26	Perumahan Kiara Pesona	30.181.590,00
57	Tanah untuk Jalan	11.560,20	Perumahan Korpri Jatinangor	2.560.584.300,00
58	Tanah untuk Bangunan Air	3.468,08	Perumahan Korpri Jatinangor	768.179.720,00
59	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	624,00	Perumahan Korpri Jatinangor	138.216.000,00
60	Tanah untuk Jalan	8.262,46	Perumahan Lembu Asri Endah	660.996.800,00
61	Tanah untuk Bangunan Air	2.558,95	Perumahan Lembu Asri Endah	204.716.000,00
62	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	324,00	Perumahan Lembu Asri Endah	25.920.000,00
63	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	81,00	Perumahan Lembu Asri Endah	6.480.000,00
64	Tanah Persil Lainnya	67,20	Perumahan Lembu Asri Endah	5.376.000,00
65	Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	432,00	Perumahan Lembu Asri Endah	34.560.000,00
66	Tanah untuk Jalan	8.614,07	Perumahan Puri Bhayangkara Elok	2.262.916.189,00
67	Tanah untuk Bangunan Air	2.256,04	Perumahan Puri Bhayangkara Elok	592.661.708,00
68	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	544,63	Perumahan Puri Bhayangkara Elok	143.074.301,00
69	Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	355,50	Perumahan Puri Bhayangkara Elok	93.389.850,00
70	Tanah Persil Lainnya	77,25	Perumahan Puri Bhayangkara Elok	20.293.575,00
71	Tanah bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	181,60	Perumahan Puri Bhayangkara Elok	47.706.320,00
72	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	17,55	Perumahan Puri Bhayangkara Elok	4.610.385,00
73	Tanah untuk Jalan	9.130,35	Perumahan Kelapa Gading Permai	1.109.337.525,00
74	Tanah untuk Bangunan Jaringan	814,20	Perumahan Kelapa Gading Permai	98.925.300,00
75	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	140,00	Perumahan Kelapa Gading Permai	17.010.000,00
76	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	8,00	Perumahan Kelapa Gading Permai	972.000,00
<b>II</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b>			<b>22.717.461.390,00</b>
1	Tanah Persil Lainnya	33,00	Perumahan Griya Pesona Alam	4.009.500,00
2	Tanah Persil Lainnya	1.365,00	Perumahan Angker Regency	1.029.529.410,00
3	Tanah Persil Lainnya	6.307,00	Perumahan Ambar Tanjungsari Residence	583.397.500,00
4	Tanah Persil Lainnya	260,00	Perumahan Villa Mutiara I	9.360.000,00
5	Tanah Persil Lainnya	1.173,00	Perumahan Bumi Cipta Sari Kencana Asri	483.110.607,00
6	Tanah Persil Lainnya	280,00	Perumahan Bumi Cipta Sari Kencana Asri	115.320.520,00
7	Tanah Persil Lainnya	200,00	Perumahan Puri Bayangkara Elok	52.540.000,00
8	Tanah Persil Lainnya	55,00	Perumahan Villa Mutiara II	1.980.165,00
9	Tanah Persil Lainnya	54.039,02	Perumahan Parakan Muncang ( SBG )	13.131.481.860,00
10	Tanah Tegalan	700,00	Perumahan Giri Mukti Indah	21.560.000,00
11	Tanah Tegalan	4.545,00	Perumahan Kelapa Gading Permai	552.217.500,00
12	Tanah Tegalan	323,52	Perumahan Mekar Sari	9.317.376,00
13	Tanah Tegalan	256,00	Perumahan Puri Bayangkara Elok	67.251.200,00
14	Tanah Tegalan	280,00	Perumahan Bumi Mekarjaya Indah ( BMI )	75.983.880,00
15	Tanah Tegalan	32,00	Perumahan Bumi Mekarjaya Indah ( BMI )	8.683.872,00
16	Tanah Untuk Makam Muslim	1.246,00	Perumahan Villa Mutiara I	44.856.000,00
17	Tanah Untuk Makam Umum	700,00	Warga	155.050.000,00
18	Tanah Untuk Makam Umum	4.000,00	Perumahan Bumi Cipta Sari Kencana Asri	1.647.436.000,00
19	Tanah Untuk Makam Umum	624,00	Perumahan Lembu Sari Endah	49.920.000,00
20	Tanah Untuk Makam Umum	1.596,00	Perumahan Villa Mutiara II	57.456.000,00
21	Tanah Untuk Makam Umum	19.000,00	Perumahan Parakan Muncang ( SBG )	4.617.000.000,00
<b>III</b>	<b>Badan Keuangan dan Aset Daerah</b>			<b>28.206.088.619,54</b>
1	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	306,28	Perumahan Mekarsari 1	83.115.509,88
2	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	30,60	Perumahan Griya Jatinangor II	17.634.780,00
3	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	42,00	Perumahan Griya Jatinangor II	24.204.600,00
4	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	114,30	Perumahan Mekarsari 1	31.017.705,30
5	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	40,89	Perumahan Mekarsari 2	11.096.360,19
6	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	13,68	Perumahan Griya Jatinangor II	7.883.784,00
7	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	265,00	Jln. Koseran I,II dan III RT/RW 04/08 Kelurahan Kota Kaler Kecamatan Sumedang Selatan	1.229.070,00
8	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	5,00	Perumahan Sindang Amanah	1.776.915,00
9	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	6,60	Perumahan Mekarsari 3	1.791.048,60
10	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	8,22	Perumahan Mekarsari 1	2.230.669,62
11	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	15,18	Perumahan Mekarsari 1	4.119.411,78
12	Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga Terbuka	273,68	Perumahan Mekarsari 1	74.268.815,28

No	Uraian	Luas M <sup>2</sup>	Alamat	Jumlah (Rp)
13	Tanah Untuk Bangunan Masjid	651,00	Perumahan Mekarsari 2	176.662.521,00
14	Tanah Untuk Bangunan Masjid	647,00	Perumahan Sindang Amanah	229.932.801,00
15	Tanah Untuk Bangunan Masjid	261,70	Perumahan Mekarsari 1	71.017.790,70
16	Tanah Lapangan Lainnya	1.600,00	Perumahan Griya Jatinangor II	922.080.000,00
17	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	2.334,40	Perumahan Mekarsari 2	633.488.462,40
18	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	1.663.822,00	Perumahan Griya Jatinangor II	9.588.606.186,00
19	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	3.196,30	Perumahan Dano Permai	1.482.443.940,00
20	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	2.178,80	Jln. Koseran I,II dan III RT/RW 04/08 Kelurahan Kota Kaler Kecamatan Sumedang Selatan	1.010.527.440,00
21	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	4.995,48	Perumahan Sindang Amanah	1.775.308.668,84
22	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	498,00	Perumahan Rancamulya Indah	205.105.782,00
23	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	269.624,00	Perumahan Mekarsari 3	731.681.345,04
24	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	6.460,06	Perumahan Mekarsari 1	1.753.072.942,26
25	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	4.657,46	Perumahan Griya Medal Raharja	1.131.762.780,00
26	Tanah untuk Jalan lainnya	158,23	Perumahan Mekarsari 2	42.939.033,33
27	Tanah untuk Jalan lainnya	16.538,00	Perumahan Griya Jatinangor II	95.308.494,00
28	Tanah untuk Jalan lainnya	1.843,23	Perumahan Griya Medal Raharja	447.904.890,00
29	Tanah Untuk Bangunan Air Irigasi	197,04	Perumahan Mekarsari 2	53.470.941,84
30	Tanah Untuk Bangunan Air Irigasi	368.318,00	Perumahan Griya Jatinangor II	2.122.616.634,00
31	Tanah Untuk Bangunan Air Irigasi	904,26	Perumahan Dano Permai	419.395.788,00
32	Tanah Untuk Bangunan Air Irigasi	394,84	Jln. Koseran I,II dan III RT/RW 04/08 Kelurahan Kota Kaler Kecamatan Sumedang Selatan	183.126.792,00
33	Tanah Untuk Bangunan Air Irigasi	941,68	Perumahan Sindang Amanah	334.657.063,84
34	Tanah Untuk Bangunan Air Irigasi	135,00	Perumahan Rancamulya Indah	55.600.965,00
35	Tanah Untuk Bangunan Air Irigasi	521,52	Perumahan Mekarsari 3	141.525.403,92
36	Tanah Untuk Bangunan Air Irigasi	1.855,09	Perumahan Mekarsari 1	503.417.628,39
37	Tanah Untuk Bangunan Air Irigasi	791,73	Perumahan Griya Medal Raharja	192.390.390,00
38	Tanah Untuk Makam Umum	231.028,00	Perumahan Sindang Amanah	821.034.237,24
39	Tanah Lapangan Taman lainnya	458.712,00	Perumahan Griya Jatinangor II	2.643.557.256,00
40	Tanah Lapangan Taman lainnya	345,23	Perumahan Sindang Amanah	122.688.873,09
41	Tanah Lapangan Taman lainnya	149,30	Perumahan Griya Medal Raharja	36.279.900,00
42	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	800,00	Jln. Pangeran Sugih Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan	18.115.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>85.650.975.985,93</b>

## TANAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG YANG DIPINJAM PAKAIKAN KE PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN

No	Nama Pemilik	Lokasi/ Alamat	Luas M2	No. SPHAT/Persil/Akta	Batas Tanah				Intansi/ Lembaga Pemakai	Mulai Tahun Perjanjian	Lama Masa Perjanjian	No. Perjanjian	Masa Berlaku	Keterangan /Tercatat
					Utara	Selatan	Timur	Barat						
1	Pemda Sumedang	Blok Babakan Picung Desa Wargaluyu no Percil 043/013 kohir 863 Kec.Tanjungmedar	840	593.82/15/SPHT/DPPK AD/Aset/XII/2012	Jln.Provinsi	Tanah Milik Epon Nia Partini	Jln. Desa Wargaluyu	Tanah Pesantren Pagelaran II	Markas Komando polisi Sektor Tanjungmedar	2013	8 Tahun	028/387/PBD-Setda/2018-B/32/IX/2018	6-9-2018 sd.6-9-2023	BKAD
2	Pemda Sumedang	Dusun Awiluar RT 01 / Rw 01 Ciuyah Kec.Cisarua	700	590/92/Kec	Jln.Kabupaten	Eks.Jalan Kabupaten	Jln .Milik Adang	Tanah Milik Mustofa	Markas Komando polisi Sektor Cisarua	2013	8 Tahun	028/387/PBD-Setda/2018-B/32/IX/2018	6-9-2018 sd.6-9-2023	Setda
3	Pemda Sumedang	Dusun Puncak Desa Genteng Kec.Sukasari	970	593.82/14/SPHT/DPPK AD/Aset/XII/2012	Tanah Milik Sukarya	Tanah Milik Koncod	Tanah Milik Nanan Sukandar	Jln.PUK	Markas Komando polisi Sektor Sukasari	2013	8 Tahun	028/387/PBD-Setda/2018-B/32/IX/2018	6-9-2018 sd.6-9-2023	BKAD
4	Pemda Sumedang	Dusun Kebon Kalapa RT 03 RW 05 Persil 001 Desa Rancamulya Kec.Sumedang Utara	560	Persil 011	Jln.Dusun Kebon Kalapa	Jln. Raya Rancamulya - Dano	Tanah Milik Cristy	Jln.Dusun Kebon Kalapa	Markas Komando polisi Sektor Sumedang Utara	2013	8 Tahun	028/387/PBD-Setda/2018-B/32/IX/2018	6-9-2018 sd.6-9-2023	Setda
5	Pemda Sumedang	Blok Cijambe Desa Situmekar Kec.Cisitu	700	Akta 594.4/60/2005	Kantor Kecamatan Cisitu	Tanah Milik Entis Sutisna	Jln.Rd.Umar Wirahadikusumah	UPTD Pertanian	Markas Komando polisi Sektor Cisitu	2013	8 Tahun	028/387/PBD-Setda/2018-B/32/IX/2018	6-9-2018 sd.6-9-2023	Kec. Cisitu
6	Pemda Sumedang	Blok Kampung Nagrak Desa Cikareo Utara Kec.Wado	602	594/47/Kec	Tanah Milik Novianti Dan Thomas	Tanah Milik Hj.Cucu Dan H.Oom	Jln.Raya Wado-Malangbong	Selokan	Markas Komando polisi Sektor Wado	2013	8 Tahun	028/387/PBD-Setda/2018-B/32/IX/2018	6-9-2018 sd.6-9-2023	BKAD
7	Pemda Sumedang	Blok Karang Nangka Desa Ciptasari Kec. Pamulihan	700	591/92/Kec	Tanah Kas Desa Ciptasari	Jln.Raya Bandung Sumedang	Tanah Milik Hj,Ai Wastilah	Tanah Kas Desa Ciptasari	Markas Komando polisi Sektor Pamulihan	2010	11 Tahun	028/387/PBD-Setda/2018-B/32/IX/2018	6-9-2018 sd.6-9-2023	Setda
8	Pemda Sumedang	Blok Gentramanah Kelas D.I Persil 15 Desa Gentramanah Kec. Jatinangor	108	Persil 15	Jln. Raya Provinsi	Kantor Kec, Jatinangor	Kantor Kec, Jatinangor	Selokan	Pos lantas Jatinangor	2013	8 Tahun	028/387/PBD-Setda/2018-B/32/IX/2018	6-9-2018 sd.6-9-2023	Kec.Jatiangor

No	Nama Pemilik	Lokasi/ Alamat	Luas M2	No. SPHAT/Persil/Akta	Batas Tanah				Intansi/ Lembaga Pemakai	Mulai Tahun Perjanjian	Lama Masa Perjanjian	No. Perjanjian	Masa Berlaku	Keterangan /Tercatat
					Utara	Selatan	Timur	Barat						
9	Pemda Sumedang	Jalan raya Parakanmuncang-Smpang Dsn. Cicabe Rt03 Rw 05 Desa Sindang Galih Kec. Cimanggung Kab. Sumedang	50	-	-	-	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk daan KB Kab. Sumedang	04/02/2019	2 Tahun	028 /1740/PBD-Setda/2019-028/25/DPPK B/2019	2-4-2019 sd.24-2024	BKAD
10	Pemda Sumedang	Dusun Lebaktulang Desa Nagarawangi Kec. Rancakalong (belakang Kec. Rancakalong	50	-	-	-	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk daan KB Kab. Sumedang	04/02/2019	2 Tahun	028 /1740/PBD-Setda/2019-028/25/DPPK B/2019	2-4-2019 sd.24-2024	Kec. Rancakalong
11	Pemda Sumedang	Dusun Cihegar Mekar Rt19 RW05 Desa Mekar Asih Kecamatan Jatigede Kab. Sumedang	7000	-	-	-	-	-	Sekolah Menegah Pertama Swasta (SMPS) Bina harapan Jatigede	04/02/2019	2 Tahun	KU.03.07/3428/2021-081/SK.YPBHJ/01D/V/2021	27 -5-2021 sd. 27-5-2023	Setda
12	Pemda Sumedang	Blok Kaca-kaca Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka	1,195	-	-	-	-	-	Pondok Pesantren Darul Qur'an Al-Islami Cimalaka Sumedang	31-5-2021 sd. 30-5-2026	5 Tahun	B/3515/KU.03.07/V/2021-017/PPDQ-Sm/U/2021	31-5-2021 sd. 30-5-2026	Setda
13	Pemda Sumedang	Blok Lebak Panglay Desa Sindang pakuon Kec. Cimanggung Kab. Sumedang	5.616,80	-	-	-	-	-	Desa Sindangpakuon	28-4-2021 sd. 28-4-2023	2 Tahun	Ku/03.07./2873/IV/2021	28-4-2021 sd. 28-4-2023	Setda
14	Pemda Sumedang	Jln. Serma Muhtar No 98 Kel.Situ Kec.Sumedang Utara	1000	-	Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumedang	Jln. Serma Muhtar Kelurahan Situ	Pemukiman	Pemukiman	Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kab. Sumedang	B/3513/KU.03.07/V/2021	5 Tahun	B/3513/KU.03.07/V/2021	31-5-2021 sd. 30-5-2026	Setda

**DAFTAR TANAH BUKAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG  
YANG DIGUNAKAN UNTUK SEKOLAH DAN PUSKESMAS  
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	SD AMBIT	MILIK DESA AMBIT
2	SD BANGBAYANG	MILIK DESA BANGBAYANG
3	SD CIJELER I	MILIK DESA CIJELER
4	SD CIJELER II	MILIK DESA CIJELER
5	SD CIJELER III	MILIK DESA CIJELER
6	SD CIKADU	MILIK DESA CIKADU
7	SD CIPELANG	MILIK DESA SUKATALI
8	SD JATISARI	MILIK DESA SITURAJA
9	SD KARANGMULYA	MILIK DESA KADUWULUNG
10	SD KARANGNANGKA I	MILIK DESA KARANGHEULEUT
11	SD KARANGNANGKA II	MILIK DESA KARANGHEULEUT
12	SD MALAKA	MILIK DESA MALAKA
13	SD NEGLASARI	MILIK DESA MEKARMULYA
14	SD PAMULIHAN	MILIK DESA WANAKERTA
15	SD PASIR IMPUN	MILIK DESA SITURAJA
16	SD SINDANGWANGI	MILIK DESA CIKADU
17	SD SITURAJA	MILIK DESA SITURAJA
18	SD SUKASARI	MILIK DESA MEKARMULYA
19	SD SUKATALI	MILIK DESA SUKATALI
20	SD TEGALSARI	MILIK DESA CIJATI
21	SD WARUNGKETAN	MILIK DESA JATIMEKAR
22	SD MANGLAYANG II	MILIK DESA SINDANGSARI
23	SD BANTARJAMBE	MILIK DESA CIGINTUNG
24	SD CIMUNGKAL	MILIK DESA CIMUNGKAL
25	SD SUKAMAJU	MILIK DESA PAMEKARAN
26	SDN SABAGI	MILIK DESA CIHERANG
27	SD LICIN	MILIK DESA LICIN
28	SD MANDALAHERANG III	MILIK DESA MANDALAHERANG
29	SD MARGAMUKTI	MILIK DESA LICIN
30	SD MEKARSARI	MILIK DESA
31	SD SAYANG	MILIK DESA SAYANG
32	SMP SATU ATAP CIMANGGUNG	MILIK DESA
33	SMP SATU ATAP SUKANYIRU	MILIK DESA (SEBAGIAN MILIK PEMDA)
34	SMP SATU ATAP CIKAWAO	MILIK DESA
35	SMPN 1 JATINANGOR	MILIK PEMPROV JABAR
36	SMPN 4 WADO	TANAH MILIK MASYARAKAT
37	SMPN 4 WADO	TANAH MILIK DESA CIMUNGKAL
38	PUSKESMAS RAWAT INAP JATINANGOR	TANAH DESA
39	PUSKESMAS CIMANGGUNG	TANAH DESA
40	PUSKESMAS PAMULIHAN	TANAH DESA
41	PUSKESMAS HAURGOMBONG	TANAH DESA
42	PUSKESMAS RANCAKALONG	TANAH DESA

**Lampiran 14 - Rincian Tanah Bukan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
43	PUSKESMAS SUMEDANG SELATAN	TANAH DESA
44	PUSKESMAS SUKAGALIH	TANAH DESA
45	PUSKESMAS MAMPU PONED SITURAJA	TANAH DESA
46	PUSKESMAS MAMPU PONED CIBUGEL	TANAH DESA
47	PUSKESMAS RAWAT INAP WADO	TANAH DESA
48	PUSKESMAS RAWAT INAP TOMO	TANAH DESA
49	PUSKESMAS RAWAT INAP UJUNGJAYA	TANAH DESA
50	PUSKESMAS MAMPU PONED PASEH	TANAH DESA
51	PUSKESMAS CIMALAKA	TANAH DESA
52	PUSKESMAS RAWAT INAP CONGGEANG	TANAH DESA
53	PUSKESMAS HARIANG	TANAH DESA
54	PUSKESMAS TANJUNGKERTA	TANAH DESA
55	PUSKESMAS TANJUNGMEDAR	TANAH DESA
56	PUSKESMAS MAMPU PONED SURIAN	TANAH DESA

**DAFTAR TANAH BERSERTIFIKAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG  
PER DESEMBER 2023**

NO	BIDANG/PERSIL	SERTIFIKAT		KIB	NILAI PEROLEHAN	SKPD PENCATAT	ID BARANG	KETERANGAN	
		NOMOR	LUAS	LUAS					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			(M2)	(M2)	(Rp)				
1	DESA TARUNAJAYA KECAMATAN DARMARAJA	00001	187,00			BELUM TERCATAT			
2	DESA TANJUNGMEKAR KECAMATAN TANJUNGKERTA	00007	4.204,00			BELUM TERCATAT			
3	DESA CIPANAS KECAMATAN TANJUNGKERTA	00001	3.460,45			BELUM TERCATAT			
4	KELURAHAN KOTAKALER KECAMATAN SUMEDANG UTARA	00006	617,00			BELUM TERCATAT			
5	DESA CIJERUK KECAMATAN PAMULIHAN (AKSES JALAN KE TPSA CIJERUK)	00001	307,00		192,00	36.150.434,14	DINAS PERKIMTAN	86	MENJADI 1 SERTIFIKAT
					18,00	3.331.577,76	DINAS PERKIMTAN	87	
					12,00	2.327.194,86	DINAS PERKIMTAN	103	
					60,00	24.351.223,36	DINAS PERKIMTAN	104	
					11,00	2.136.081,96	DINAS PERKIMTAN	112	
			14,00	2.787.086,29	DINAS PERKIMTAN	137			
6	DESA CINANGSI KECAMATAN CISITU BLOK GUNUNG TANJUNG	00001	700,00		29.999.994,00	KECAMATAN CISITU	1892		
7	DESA JATIMULYA KECAMATAN SUMEDANG UTARA BLOK BOJONGHILIR	00001	921,00		14.736.000,00	SETDA	471		
8	DESA CIBEUREUM KULON KECAMATAN CIMALAKA	00001	11.115,00		487.816.000,00	DLHK	287		
9	DESA CIEUNTEUNG KECAMATAN DARMARAJA	00001	196,00			BELUM TERCATAT			
10	DESA CIKARAMAS KECAMATAN TANJUNGKERTA (TANJUNGMEDAR)	00001	148,00			BELUM TERCATAT			
11	DESA CINANJUNG KECAMATAN TANJUNGSARI BLOK CIJANGGEL	00001	25.000,00		6.075.000.000,00	DINAS KESEHATAN	434		
12	DESA KEBONJATI KECAMATAN SUMEDANG UTARA BLOK CIMAYOR (MAKAM PAHLAWAN)	00001	1.260,00		33.390.000,00	SETDA	517		
13	DESA RANCAKALONG KECAMATAN RANCAKALONG BLOK AWISURAT	00001	2.055,00		280.000.000,00	DISPARBUDPORA	423		
14	DESA SINDANGPAKUON KECAMATAN CIMANGGUNG BLOK CIMANDE	00001	2.305,00		627.994.674,00	SETDA	484		
15	DESA SINDANGPAKUON KECAMATAN CIMANGGUNG BLOK PARAKANMUNCANG (PASAR PARAKANMUNCANG)	00001	1.768,00						
16	DESA SINDANGPAKUON KECAMATAN CIMANGGUNG BLOK PARAKANMUNCANG (PASAR PARAKANMUNCANG)	00004	2.122,00	3.446,00	45.886.606,00	DISKOPERINDAG	386	MENJADI 2 SERTIFIKAT	
17	DESA SUKASARI KECAMATAN TANJUNGSARI (SUKASARI) BLOK CIBOGO (PUSKESMAS SUKASARI)	00001	544,00	480,00	9.100.000,00	DINAS KESEHATAN	436		
18	KELURAHAN KOTAKALER KECAMATAN SUMEDANG UTARA BLOK SINDANGRAJA (PERPUSTAKAA SAMPING BCA)	00001	595,00			BELUM TERCATAT			
19	KELURAHAN CIPAMEUNGPEUK KECAMATAN SUMEDANG SELATAN BLOK CIPAMEUNGPEUK	00001	1.695,00		14.000.000,00	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	312		
20	KELURAHAN KOTAKULON KECAMATAN SUMEDANG SELATAN BLOK JALAN GEUSAN ULUN	00001	2.995,00		1.180.030.000,00	RSUD	520		
21	BLOK SERMA MUKHTAR KELURAHAN SITU KEC. SUMEDANG UTARA (EKS KANTOR TRANSMIGRASI)	00001	500,00			BELUM TERCATAT			
22	DESA CIJERUK KECAMATAN PAMULIHAN (AKSES JALAN KE TPSA CIJERUK)	00002	558,00		51,00	27.810.533,34	DINAS PERKIMTAN	89	MENJADI 1 SERTIFIKAT
					16,00	3.787.447,23	DINAS PERKIMTAN	93	
					119,00	22.732.865,98	DINAS PERKIMTAN	95	
					53,00	10.410.937,82	DINAS PERKIMTAN	101	
					37,00	9.584.353,71	DINAS PERKIMTAN	122	
					18,00	3.437.674,55	DINAS PERKIMTAN	124	
					20,00	4.417.370,89	DINAS PERKIMTAN	125	
					19,00	3.516.588,37	DINAS PERKIMTAN	126	
					66,00	12.585.852,59	DINAS PERKIMTAN	127	
					15,00	2.776.268,58	DINAS PERKIMTAN	136	
					81,00	25.462.812,56	DINAS PERKIMTAN	139	
					3,00	555.170,50	DINAS PERKIMTAN	140	
	44,00	8.143.795,13	DINAS PERKIMTAN	187					
	16,00	3.578.720,87	DINAS PERKIMTAN	188					
23	DESA CIBEUSI KECAMATAN CIKERUH (JATINANGOR) BLOK CIBEUSI (TUGU BATAS)	00002	350,00		85.050.000,00	SETDA	514		
24	DESA CIBEUREUM WETAN KECAMATAN CIMALAKA (TPSA)	00002	100.000,00		6.255.960.000,00	DLHK	280		
25	DESA CILENGKRANG KEC. WADO (BBI WADO)	00002	15.815,00	15.810,00	564.000.000,00	DISKANAK	415		



NO	BIDANG/PERSIL	SERTIFIKAT		KIB	NILAI PEROLEHAN (Rp)	SKPD PENCATAT	ID BARANG	KETERANGAN	
		NOMOR	LUAS	LUAS					
			(M2)	(M2)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
26	DESA KARANGLAYUNG KECAMATAN CONGGEANG BLOK JUMBUH	00002	3.525,00			BELUM TERCATAT			
27	KELURAHAN TALUN KECAMATAN SUMEDANG UTARA BLOK TALUN	00002	590,00		3.513.600,00	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	360		
28	DESA CIJERUK KECAMATAN PAMULIHAN (AKSES JALAN KE TPSA CIJERUK)	00003	205,00		66,00	12.220.408,10	DINAS PERKIMTAN	96	MENJADI 1 SERTIFIKAT
					62,00	11.475.511,58	DINAS PERKIMTAN	129	
					56,00	9.896.957,83	DINAS PERKIMTAN	141	
29	DESA CIMANINTIN KECAMATAN JATINUNGGAL BLOK KANDAGA (SMP 3 JATINUNGGAL)	00003	1.318,00		112.091.400,00	DINAS PERKIMTAN	63		
30	DESA CISEMPUR KECAMATAN JATINANGOR BLOK KARASAK (PUSKESMAS)	00003	1.435,00		987,00	634.789.867,80	DINAS PERKIMTAN	67	MENJADI 1 SERTIFIKAT
					448,00	288.131.571,20	DINAS PERKIMTAN	68	
31	DESA KERTAHARJA KECAMATAN TANJUNGPURA BLOK CIHAUR (SD CIBODAS 1)	00003	2.018,00		136.075.500,00	DINAS PENDIDIKAN	1926		
32	DESA SUKADANA KECAMATAN CIMANGGUNG BLOK MONGGOR (PUSKESMAS)	00003	1.290,00		552.560.011,01	DINAS PERKIMTAN	69		
33	DESA SITUMEKAR KECAMATAN CISITU BLOK CIJAMI	00003	9.994,00		503.600.000,00	SETDA	489		
34	DESA PASEHKIDUL KECAMATAN PASEH BLOK BATUKARUT	00003	650,00		3.450.000,00	KECAMATAN PASEH	1908		
35	DESA BUAHDUA KECAMATAN BUAHDUA BLOK SAWAH LEGA	00003	3.183,00		33.660.225,00	DISKOPERINDAG	394		
36	DESA CIBULUH KECAMATAN UJUNGJAYA BLOK SARNYERE	00003	4.155,00		222.132.860,00	DPKP	459		
37	DESA CILEMBU KECAMATAN TANJUNGSARI BLOK MULYA (TPU)	00003	7.580,00		658.901.000,00	DLHK	288		
38	DESA HARIANG KECAMATAN BUAHDUA BLOK HARIANG (PASAR HARIANG)	00003	700,00		150.000.000,00	DISKOPERINDAG	391		
39	DESA SUKASARI KECAMATAN TANJUNGSARI (SUKASARI) BLOK CIBOGO (KANTOR KECAMATAN SUKASARI)	00003	2.010,00		10.500.000,00	KECAMATAN SUKASARI	1945		
40	DESA TARUNAJAYA KECAMATAN DARMARAJA (SMPN 1 DARMARAJA)	00003	2.000,00	1.190,00	136.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	204		
41	KELURAHAN SITU KECAMATAN SUMEDANG UTARA BLOK SINDANGRAJA	00003	250,00		50.000.000,00	DISKOMINFO	378		
42	DESA CIJERUK KECAMATAN PAMULIHAN (AKSES JALAN KE TPSA CIJERUK)	00004	46,00		16,00	3.784.396,08	DINAS PERKIMTAN	109	MENJADI 1 SERTIFIKAT
					30,00	12.583.494,88	DINAS PERKIMTAN	110	
43	DESA CONGGEANG KULON KECAMATAN CONGGEANG BLOK KOGONGO (PASAR CONGGEANG)	00004	4.000,00		11.096.590,00	DISKOPERINDAG	387		
44	DESA DARMAJAYA KECAMATAN DARMARAJA BLOK CIPICUNG (KANTOR KECAMATAN DARMARAJA)	00004	4.620,00	7.446,00	2.820.500,00	KECAMATAN DARMARAJA	593		
45	BLOK CIPADA KELURAHAN KOTAKULON KECAMATAN SUMEDANG SELATAN (RSUD)	00028	472,00		3.302.360.000,00	RSUD	528		
46	DESA KEBONCAU KECAMATAN UJUNGJAYA (PERSEMAIAN PADI)	00004	10.732,00		125.391.960,00	DPKP	456		
47	DESA RANCAMULYA KECAMATAN SUMEDANG UTARA BLOK JUBLENG (UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR)	00004	2.800,00		105.000.000,00	SETDA	466		
48	DESA WADO KECAMATAN WADO BLOK KAUM (PASAR WADO)	00004	3.710,00		4.300.044,00	DISKOPERINDAG	388		
49	KEURAHAN TALUN KECAMATAN SUMEDANG UTARA BLOK TEGALKALONG	00004	6.150,00		490.000.000,00	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	1971		
50	DESA CIJERUK KECAMATAN PAMULIHAN (AKSES JALAN KE TPSA CIJERUK)	00005	67,00		56,00	9.841.898,45	DINAS PERKIMTAN	94	MENJADI 1 SERTIFIKAT
					11,00	2.058.693,71	DINAS PERKIMTAN	100	
51	DESA KEBONCAU KECAMATAN UJUNGJAYA BLOK GEMPOL (PERSEMAIAN PADI)	00005	6.545,00		67.518.748,00	DPKP	457		
52	DESA PASEHKIDUL KECAMATAN PASEH BLOK BATUKARUT (KANTOR KECAMATAN PASEH)	00005	880,00		6.000.000,00	KECAMATAN PASEH	1907		
53	DESA CIJERUK KECAMATAN PAMULIHAN (AKSES JALAN KE TPSA CIJERUK)	00006	16,00		10,00	2.606.375,03	DINAS PERKIMTAN	138	MENJADI 1 SERTIFIKAT
					6,00	1.110.479,69	DINAS PERKIMTAN	97	
54	DESA BUAHDUA KECAMATAN BUAHDUA (PUSKESMAS BUAHDUA)	00006	1.075,00		29.025.000,00	DINAS KESEHATAN	293		
55	DESA CIMALAKA KECAMATAN CIMALAKA BLOK KACA KACA KULON (SUB. TERMINAL CIMALAKA)	00006	1.195,00		73.492.500,00	SETDA	467		
56	DESA GANEAS KECAMATAN GANEAS BLOK TONGGOH (KANTOR LAMA KECAMATAN GANEAS)	00006	357,00		2.188.700,00	KECAMATAN GANEAS	1977		
57	DESA TOMO KECAMATAN TOMO BLOK TOMO	00006	1.370,00		1.386,00	15.036.714,00	DPMD	295	
					55,00	10.943.918,14	DINAS PERKIMTAN	115	
58	DESA CIJERUK KECAMATAN PAMULIHAN (AKSES JALAN KE TPSA CIJERUK)	00007	262,00		145,00	25.569.602,79	DINAS PERKIMTAN	116	MENJADI 1 SERTIFIKAT
					62,00	13.949.438,99	DINAS PERKIMTAN	123	
						276.450.000,00	SETDA/KECAMATAN BUAHDUA	480	
59	DESA BUAHDUA KECAMATAN BUAHDUA (KANTOR KECAMATAN BUAHDUA)	00007	1.860,00			164.500.000,00	KECAMATAN BUAHDUA	1936	DOBEL CATAT
60	DESA LICIN KECAMATAN CIMALAKA (DEPO ARSIP)	00007	5.146,00	10.675,00	83.393.647,00	ARPUSDA	410	LUAS TOTAL 10000 M <sup>2</sup> -	
61	DESA TANJUNGSARI KECAMATAN TANJUNGSARI BLOK SITU (PUSAT PEMERINTAHAN)	00007	5.035,00		19.520.697,00	KECAMATAN TANJUNGSARI	1944		
62	DESA WADO KECAMATAN WADO BLOK PASAR (PASAR WADO)	00007	813,00			BELUM TERCATAT			
63	DESA CIJERUK KECAMATAN PAMULIHAN (AKSES JALAN KE TPSA CIJERUK)	00008	1.553,00		49,00	10.089.873,69	DINAS PERKIMTAN	88	
					130,00	58.737.122,34	DINAS PERKIMTAN	90	
					158,00	27.020.424,33	DINAS PERKIMTAN	91	

NO	BIDANG/PERSIL	SERTIFIKAT		KIB	NILAI PEROLEHAN (Rp)	SKPD PENCATAT	ID BARANG	KETERANGAN
		NOMOR	LUAS	LUAS				
			(M2)	(M2)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				191,00	34.953.551,46	DINAS PERKIMTAN	92	MENJADI 1 SERTIFIKAT
				62,00	10.557.392,99	DINAS PERKIMTAN	105	
				540,00	44.954.387,06	DINAS PERKIMTAN	106	
				305,00	55.099.736,19	DINAS PERKIMTAN	107	
				104,00	17.889.721,06	DINAS PERKIMTAN	114	
				128,00	26.061.531,29	DINAS PERKIMTAN	120	
				135,00	24.052.488,10	DINAS PERKIMTAN	131	
				20,00	3.701.737,66	DINAS PERKIMTAN	132	
				7,00	1.621.269,84	DINAS PERKIMTAN	135	
64	DESA WADO KECAMATAN WADO BLOK BEREGUD (SMPN 1 WADO)	00008	674,00	520,00	80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	232	
65	DESA TANJUNGSARI KECAMATAN TANJUNGSARI BLOK PASAR (EKS. KANTOR KOTATIF JATINANGOR)	00008	3.210,00	5.620,00	719.360.000,00	SETDA	476	MENJADI 2 SERTIFIKAT
66	DESA TANJUNGSARI KECAMATAN TANJUNGSARI BLOK PASAR (EKS. KANTOR KOTATIF JATINANGOR)	00009	2.410,00					
67	KELURAHAN SITU KECAMATAN SUMEDANG UTARA BLOK SINDANGRAJA (RUMAH DINAS DISKOP)	00008	299,00		1.933.967,00	DISKOPERINDAG	381	
68	DESA CIJERUK KECAMATAN PAMULIHAN (AKSES JALAN KE TPSA CIJERUK)	00009	405,00	13,00	2.372.546,04	DINAS PERKIMTAN	98	MENJADI 1 SERTIFIKAT
				127,00	22.003.641,27	DINAS PERKIMTAN	99	
				43,00	8.145.043,32	DINAS PERKIMTAN	108	
				38,00	8.617.694,10	DINAS PERKIMTAN	111	
				24,00	4.410.436,46	DINAS PERKIMTAN	113	
				62,00	10.793.718,38	DINAS PERKIMTAN	117	
				11,00	1.872.989,67	DINAS PERKIMTAN	118	
				44,00	8.528.656,02	DINAS PERKIMTAN	121	
21,00	3.575.808,41	DINAS PERKIMTAN	130					
				22,00	3.783.009,19	DINAS PERKIMTAN	133	
69	DESA TOLENGAS KECAMATAN TOMO BLOK GEMPOL	00009	9.820,00	92.402,00	300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	376	DI PECAH JADI 2 SERTIFIKAT (NO. 00010 LUAS 3669 DAN NO. 00011 LUAS 6151)
70	DESA WADO KECAMATAN WADO BLOK BEREGUD (SMPN 1 WADO)	00009	7.132,00	7.806,00	1.089.964.314,00	DINAS PENDIDIKAN	233	
71	DESA GUDANG KECAMATAN TANJUNGSARI BLOK GUDANG (EKS. KANTOR KECAMATAN TANJUNGSARI)	00009	3.110,00		199.040.000,00	SETDA	475	DOBEL CATAT
					1.455.686,00	KECAMATAN TANJUNGSARI	1943	
72	DESA CIJERUK KECAMATAN PAMULIHAN (AKSES JALAN KE TPSA CIJERUK)	00010	124,00	29,00	5.764.592,03	DINAS PERKIMTAN	84	MENJADI 1 SERTIFIKAT
				15,00	2.554.228,10	DINAS PERKIMTAN	85	
				9,00	1.695.052,18	DINAS PERKIMTAN	102	
				71,00	13.685.930,63	DINAS PERKIMTAN	134	
73	DESA WADO KECAMATAN WADO BLOK BEREGUD (SMPN 1 WADO)	00010	2.223,00		366.142.843,00	DINAS PENDIDIKAN	234	
74	KELURAHAN KOTAKALER KECAMATAN SUMEDANG UTARA BLOK SUKARAME	00010	4.230,00			BELUM TERCATAT		
75	KELURAHAN KOTAKULON KECAMATAN SUMEDANG SELATAN BLOK BEBEDAHAN/CIGUGUR (LAPANG SEPAK BOLA)	00010	24.855,00		4.518.821.500,00	DISPARBUDPORA	421	
76	KELURAHAN PASANGGRAHAN KECAMATAN SUMEDANG SELATAN BLOK PABRIK ES (KANTOR KETAHANAN PANGAN)	00011	3.490,00		76.000.000,00	DPKP	439	
77	DESA SUKAJAYA KECAMATAN SUMEDANG SELATAN BLOK GUNUNGPUYUH	00011	17,00			BELUM TERCATAT		
78	KELURAHAN KOTAKALER KECAMATAN SUMEDANG UTARA BLOK CIMAYOR-CIAKAR	00011	5.060,00			BELUM TERCATAT		
79	KELURAHAN KOTAKULON KECAMATAN SUMEDANG SELATAN BLOK RAGADIEM	00011	2.890,00		256.208.909,00	DINAS KESEHATAN	431	
80	DESA CIHERANG KECAMATAN SUMEDANG SELATAN BLOK CIHERANG (GAPURA)	00012	100,00			BELUM TERCATAT		
81	DESA SUKAJAYA KECAMATAN SUMEDANG SELATAN BLOK GUNUNGPUYUH	00012	105,00			BELUM TERCATAT		
82	KELURAHAN KOTAKULON KECAMATAN SUMEDANG SELATAN BLOK CIPADA	00012	11.250,00		1.797.900.000,00	RSUD	521	
83	KELURAHAN KOTAKALER KECAMATAN SUMEDANG UTARA	00013	423,00		525.500,00	DISKOPERINDAG	392	
84	KELURAHAN KOTAKULON KECAMATAN SUMEDANG SELATAN BLOK RAGADIEM	00013	420,00		30.000.000,00	DINAS KESEHATAN	432	
85	KELURAHAN REGOLWETAN KECAMATAN SUMEDANG SELATAN BLOK DESA (KANTOR KELURAHAN REGOL WETAN)	00013	1.350,00	100,00	77.012.500,00	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	305	MENJADI 1 SERTIFIKAT
				1.250,00	77.012.500,00	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	306	

NO	BIDANG/PERSIL	SERTIFIKAT		KIB	NILAI PEROLEHAN (Rp)	SKPD PENCATAT	ID BARANG	KETERANGAN
		NOMOR	LUAS	LUAS				
			(M2)	(M2)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
86	KELURAHAN KOTAKULON KECAMATAN SUMEDANG SELATAN BLOK PASAREAN (TPSS)	00014	570,00		7.372.000,00	DLHK	282	
87	KELURAHAN KOTAKALER KECAMATAN SUMEDANG UTARA BLOK PATUNG (BANK SUMEDANG)	00014	962,00			BELUM TERCATAT		
88	KELURAHAN KOTAKALER KECAMATAN SUMEDANG UTARA BLOK CILENGKRANG (SDN CILENGKRANG)	00015	750,00		22.253.000,00	DINAS PENDIDIKAN	328	
89	KELURAHAN PASANGGRAHAN KECAMATAN SUMEDANG SELATAN BLOK WARUNG JAMBU	00015	1.500,00		123.000.000,00	DISNAKERTRANS	272	
90	DESA CIJEUNGIJING KECAMATAN CADASNGAMPAR (JATIGEDE) (KANTOR KECAMATAN JATIGEDE)	00016	1.050,00					
91	DESA CIJEUNGIJING KECAMATAN CADASNGAMPAR (JATIGEDE) BLOK PASIRTASBE (KANTOR KECAMATAN JATIGEDE)	00022	420,00	1.470,00	43.120.000,00	KECAMATAN JATIGEDE	210	MENJADI 2 SERTIFIKAT
92	KELURAHAN KOTAKULON KECAMATAN SUMEDANG SELATAN BLOK CIPADA	00016	700,00		35.000.000,00	RSUD	522	
93	KELURAHAN KOTAKALER KECAMATAN SUMEDANG UTARA BLOK CIPADUNG (PUSKESMAS KOTAKALER)	00018	1.840,00	1.635,00	200.210.440,00	DINAS KESEHATAN	437	
94	KELURAHAN KOTAKULON KECAMATAN SUMEDANG SELATAN BLOK CIPADA	00018	700,00		60.000.000,00	RSUD	523	
95	KELURAHAN PASANGGRAHAN KECAMATAN SUMEDANG SELATAN BLOK SAMOJA	00019	1.185,00		3.199.590,00	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	296	
96	KELURAHAN KOTAKALER KECAMATAN SUMEDANG UTARA BLOK PASAR (PASAR INPRES)	00020	15.383,00	19.600,00	104.533.233,00	DISKOPERINDAG	383	MENJADI 2 SERTIFIKAT
97	KELURAHAN KOTAKALER KECAMATAN SUMEDANG UTARA BLOK PASAR (PASAR INPRES)	00021	1.986,00					
98	DESA CIJEUNGIJING KECAMATAN CADASNGAMPAR (JATIGEDE) BLOK CIJEUNGIJING (PUSKESMAS JATIGEDE)	00020	250,00			BELUM TERCATAT		
99	DESA HEGARMAHA KECAMATAN JATINANGOR BLOK CIKUDA (TPSS)	00022	304,00		215.883.000,00	DINAS PERKIMTAN	81	
100	KELURAHAN KOTAKULON KECAMATAN SUMEDANG SELATAN BLOK CIPADA	00022	906,00		150.000.000,00	RSUD	526	
101	KELURAHAN REGOLWETAN KECAMATAN SUMEDANG SELATAN BLOK LEGOK (JALAN DESA)	00023	78,00			BELUM TERCATAT		
102	KELURAHAN KOTAKULON KECAMATAN SUMEDANG SELATAN BLOK CIPADA	00023	280,00		40.000.000,00	RSUD	527	
103	KELURAHAN SITU KECAMATAN SUMEDANG UTARA (KANTOR LLAJR) (PUSKESMAS SITU)	00023	1.900,00		7.408.900,00	DINAS KESEHATAN	430	
104	DESA CIJEUNGIJING KECAMATAN CADASNGAMPAR BLOK CIJEUNGIJING (PUSKESMAS JATIGEDE)	00024	998,00		13.972.000,00	DINAS KESEHATAN	274	
105	KELURAHAN SITU KECAMATAN SUMEDANG UTARA BLOK LEMBUR TENGAH (SDN PANYINGKIRAN I, II, III)	00024	4.910,00	1.556,00	2.032.000,00	DINAS PENDIDIKAN	601	MENJADI 1 SERTIFIKAT
				1.487,00	1.665.440,00	DINAS PENDIDIKAN	602	
				969,00	1.182.180,00	DINAS PENDIDIKAN	603	
106	BLOK PANGADUAN HEUBEUL KEL. SITU KEC. SUMEDANG UTARA (KANTOR SATPOL.PP)	00029	1.820,00		6.622.000,00	SATPOL. PP	269	
107	KELURAHAN SITU KECAMATAN SUMEDANG UTARA BLOK REUNGHAS	00030	2.660,00		171.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	374	
108	KELURAHAN SITU KECAMATAN SUMEDANG UTARA (KANTOR DLHK)	00031	4.125,00		357.143.000,00	DLHK	277	
109	KELURAHAN SITU KECAMATAN SUMEDANG UTARA BLOK CIHAUR (SMPN 2 SUMEDANG)	00032	9.945,00		636.480.000,00	SETDA	506	
110	KELURAHAN SITU KECAMATAN SUMEDANG UTARA BLOK CIMAYOR (TPSS)	00033	270,00		3.883.000,00	DLHK	281	
111	KELURAHAN SITU KECAMATAN SUMEDANG UTARA BLOK KOSONG (PENGADILAN AGAMA)	00034	2.655,00		132.750.000,00	SETDA	477	HIBAH KE PENGADILAN AGAMA
112	DESA CIKONENG KECAMATAN SUMEDANG UTARA (GANEAS) BLOK TANJUNG (KANTOR KECAMATAN GANEAS)	00037	1.835,00		529.989.000,00	KECAMATAN GANEAS	1976	
113	KELURAHAN SITU KECAMATAN SUMEDANG UTARA (IPP)	00045	2.930,00			BELUM TERCATAT		
114	KELURAHAN SITU KECAMATAN SUMEDANG UTARA (IPP)	00046	18.397,00			BELUM TERCATAT		
115	KELURAHAN SITU KECAMATAN SUMEDANG UTARA (IPP)	00047	82.532,00			BELUM TERCATAT		
116	KELURAHAN SITU KECAMATAN SUMEDANG UTARA (IPP)	00048	4.516,00			BELUM TERCATAT		
117	DESA JATISARI KECAMATAN TANJUNGSARI BLOK KEBON GANAS	00143	638,00			BELUM TERCATAT		
118	KELURAHAN KOTAKULON KECAMATAN SUMEDANG SELATAN BLOK CURUG (KANTOR KEMENAG)	00194	1.278,00			BELUM TERCATAT		HIBAH KE KEMENAG
119	DESA SUKAMANTRI KECAMATAN TANJUNGGERTA BLOK SUKAMANTRI (KANTOR KECAMATAN TANJUNGGERTA)	00226	5.830,00		583.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGGERTA	1981	
120	DESA MARGAJAYA KECAMATAN TANJUNGSARI BLOK CILULUK (PUSKESMAS MARGAJAYA)	00290	1.000,00		5.888.500,00	DINAS KESEHATAN	435	
121	KELURAHAN KOTAKULON KECAMATAN SUMEDANG SELATAN BLOK CIPADA	01354	700,00		295.500.000,00	RSUD	524	
122	KELURAHAN KOTAKULON KECAMATAN SUMEDANG SELATAN BLOK CURUG (KANTOR KEMENAG)	01545	1.360,00			BELUM TERCATAT		HIBAH KE KEMENAG
123	DESA BANJARSARI KECAMATAN WADO (JATINUNGGAL) BLOK CIMAHU (SDN BUNISARI)	00048	1.680,00		214.264,00	DINAS PENDIDIKAN	404	
124	DESA PAJAGAN KECAMATAN SITURAJA (CISITU) BLOK KABANDUNGAN (SMPN 2 CISITU)	00001	12.360,00		15.326.400,00	DINAS PENDIDIKAN	257	
125	DESA JATISARI KECAMATAN TANJUNGSARI BLOK PAMAGERSARI KIDUL (SMPN 2 TANJUNGSARI)	00001	6.440,00		16.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN	2014	
126	DESA SUKATALI KECAMATAN SITURAJA BLOK SUKAMULYA (SMPN 3 SITURAJA)	00001	10.010,00		10.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN	240	
127	DESA CIRANGGEM KECAMATAN CADASNGAMPAR (JATIGEDE) BLOK LEGOK PEUNDEUY (SMPN 2 JATIGEDE)	00002	9.040,00	6.500,00	41.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	263	
128	DESA SURIAN KECAMATAN BUAHDUA (SURIAN) BLOK CARINGIN SMP 3 BUAHDUA	00002	6.385,00			BELUM TERCATAT		
129	DESA TANJUNGGEMAR KECAMATAN TANJUNGGERTA BLOK WARUNG ASEM (SMPN 2 TANJUNGGERTA)	00002	6.000,00	7.078,00	16.920.000,00	DINAS PENDIDIKAN	216	

NO	BIDANG/PERSIL	SERTIFIKAT		KIB	NILAI PEROLEHAN (Rp)	SKPD PENCATAT	ID BARANG	KETERANGAN
		NOMOR	LUAS	LUAS				
			(M2)	(M2)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
130	DESA TARIKOLOT KECAMATAN WADO (JATINUNGGAL) BLOK SUKAMAJU (SMPN 2 JATINUNGGAL)	00002	3.000,00	3.434,00	80.384.751,62	DINAS PENDIDIKAN	262	
131	DESA SINDULANG KECAMATAN CIMANGGUNG BLOK JAMUJU (SMPN 2 CIMANGGUNG)	00003	6.140,00		30.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN	2012	
132	DESA MEKARIYA KECAMATAN SUMEDANG UTARA BLOK SAWAHLEGA (SMPN 8 SUMEDANG)	00005	6.330,00		20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	2030	
133	DESA GUDANG KECAMATAN TANJUNGSARI BLOK GUDANG (SMPN 1 TANJUNGSARI)	00006	10.640,00		12.129.600,00	DINAS PENDIDIKAN	2013	
134	DESA PASEH KECAMATAN PASEH BLOK BATUKARUT (SMPN 2 PASEH)	00006	7.825,00		15.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN	247	
135	KELURAHAN REGOLWETAN KECAMATAN SUMEDANG SELATAN BLOK KEBONKOL (SMP 1 SUMEDANG)	00015	5.500,00			BELUM TERCATAT		
136	KELURAHAN KOTAKULON KECAMATAN SUMEDANG SELATAN BLOK CIPADA (SMP 4 SUMEDANG)	00020	3.350,00		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	2026	
137	DESA SUKAMULYA KECAMATAN TOMO (UJUNGJAYA) BLOK SUKAMULYA (SDN SUKAMULYA)	00220	1.590,00		5.240.000,00	DINAS PENDIDIKAN	1978	
138	DESA GANJARESIK KECAMATAN WADO BLOK SUKASARI	00301	1.830,00			BELUM TERCATAT		
139	DESA JATISARI RT.04 RW.08 KECAMATAN TANJUNGSARI (SMPN 2 TANJUNGSARI)	00933	397,00		15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	2015	
140	DESA JATISARI RT.04 RW.08 KECAMATAN TANJUNGSARI	00934	769,00			BELUM TERCATAT		
141	DESA TANJUNGSARI RT.04 RW.06 KECAMATAN TANJUNGSARI	00940	675,00			BELUM TERCATAT		
142	DESA BANJARSARI KECAMATAN WADO (JATINUNGGAL) BLOK CIRAYUN (SDN CIRAYUN)	00044	895,00		1.020.300,00	DINAS PENDIDIKAN	403	
143	DESA RAHARJA KECAMATAN TANJUNGSARI BLOK CIKANDANG KEUSAL (SDN HEGARMANAH)	00128	1.555,00	1.540,00	1.878.800,00	DINAS PENDIDIKAN	532	
144	DESA PALASARI KECAMATAN UJUNGJAYA (SDN UJUNGJAYA III)	00120	2.210,00		2.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN	936	
145	DESA GANJARESIK KECAMATAN WADO BLOK GANJARESIK (SMPN 3 WADO)	00001	7.670,00		5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	236	
146	DESA CIBEUREUYEH KECAMATAN CONGGEANG (SMUN 1 CONGGEANG)	00001	18.950,00			BELUM TERCATAT		
147	BLOK CILIMBANGAN DESA MEKAR RAHAYU KEC. SUMEDANG SELATAN	00002	89.209,00			BELUM TERCATAT		
148	BLOK BOJONG DESA PADASUKA KECAMATAN SUMEDANG UTARA (PUSKESMAS PADASUKA)	00004	1.181,00		708.600.000,00	DINAS KESEHATAN		
149	BLOK LEMBANG PAMULIHAN KEC. RANCAKALONG (SDN LEMBANG)	00111	2.230,00		2.586.800,00	DINAS PENDIDIKAN	546	
150	JL. RAJA DARI BANDUNG KE SUMEDANG KEL. PASANGGRAHAN KES. SUMEDANG SELATAN (SD PASANGGRAHAN 1 & 2)	00001	4.710,00			BELUM TERCATAT		
151	KEL. SITU KEC. SUMEDANG UTARA (GUDANG FARMASI)	00022	1.120,00		115.360.000,00	DINAS KESEHATAN	267	
152	BLOK LAPANG DESA GUDANG KEC. TANJUNGSARI (SKB)	00004	6.860,00			BELUM TERCATAT		
153	BLOK GOROWONG DESA RANCAMULYA KEC. SUMEDANG UTARA (BLK)	00001	20.000,00		55.000.000,00	DISNAKERTRANS	273	
154	BLOK GUDANG UYAH KEL. REGOL WETAN KEC. SUMEDANG SELATAN (GEDUNG KREATIF CENTRE)	00012	1.590,00		477.000.000,00	PUTR	632	
155	BLOK PAKEMITAN DESA SITURAJA KEC. SITURAJA (BPR SITURAJA)	00004	410,00		117.160.000,00	SETDA	472	
156	BLOK BUAH_ANGKREK KEL. SITU KEC. SUMEDANG UTARA (EKS. PD. BPR_PSC)	00027	325,00	169,00	84.500.000,00	SETDA	474	EKS. PD. BPR SUMEDANG UTARA (PERUBAHAN LUAS DARI 325 JADI 169)
157	BLOK LICIN DESA LICIN KEC. CIMALAKA (MAN 1 CIMALAKA)	00005	6.475,00		389.212.500,00	SETDA	500	
158	BLOK LICIN DESA LICIN KEC. CIMALAKA (SMAN 1 CIMALAKA)	00004	10.545,00			BELUM TERCATAT		
159	BLOK PANGUPUKAN DESA PAKUALAM KEC. DARMARAJA (TAKE OFF PARALAYANG)	00001	32.447,00			BELUM TERCATAT		
160	BLOK LIO KEL. CIPAMEUNGPEUK KEC. SUMEDANG SELATAN (SAWAH)	00005	3.914,00			BELUM TERCATAT		
161	BLOK LIO KEL. CIPAMEUNGPEUK KEC. SUMEDANG SELATAN (SAWAH)	00006	3.677,00			BELUM TERCATAT		
162	BLOK TALUN KEL. TALUN KEC. SUMEDANG UTARA (BALAI PERTEMUAN)	00006	422,00	304,00	1.810.400,00	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	361	
163	BLOK KEBONSEUREUH KEL. CIPAMEUNGPEUK KEC. SUMEDANG SELATAN (SDN TENJONAGARA)	00007	1.276,00	1.610,00	3.430.000,00	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	314	
164	BLOK TALUN KIDUL KEL. TALUN KEC. SUMEDANG UTARA (SDN TALUN)	00007	2.755,00	1.775,00	2.201.000,00	DINAS PENDIDIKAN	610	
165	BLOK KEBONCAU KEL. CIPAMEUNGPEUK KEC. SUMEDANG SELATAN (SDN CIPAMEUNGPEUK)	00008	1.122,00	1.400,00	28.000.000,00	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	315	
166	KEL. TALUN KEC. SUMEDANG UTARA (TPU DAN TAMAN)	00008	6.338,00			BELUM TERCATAT		
167	BLOK KEBONSEUREUH KEL. CIPAMEUNGPEUK KEC. SUMEDANG SELATAN (SDN KEBONSEUREUH)	00009	1.854,00	1.400,00	1.600.000,00	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	313	
168	BLOK GEMPOL DESA TOLENGAS KEC. TOMO (GUDANG SRG)	00010	3.669,00		649.059.750,00	DINAS PERKIMTAN	5	
169	BLOK GEMPOL DESA TOLENGAS KEC. TOMO (GUDANG SRG)	00011	6.151,00		300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	376	
170	BLOK SUKAMAJU KELURAHAN KOTAKALER KEC. SUMEDANG UTARA (RUMDIN GURU)	00026	133,00		3.501.000,00	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	320	
171	BLOK SUKAMAJU KELURAHAN KOTAKALER KEC. SUMEDANG UTARA (KOLAM)	00027	748,00		6.484.000,00	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	335	
172	BLOK SUKAMAJU KELURAHAN KOTAKALER KEC. SUMEDANG UTARA (BEKAS KCD PENDIDIKAN)	00028	134,00		29.040.000,00	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	329	
173	BLOK SUKAMAJU KELURAHAN KOTAKALER KEC. SUMEDANG UTARA (GEDUNG KORPRI)	00029	4.304,00		98.981.000,00	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	322	
174	BLOK SUKAMAJU KELURAHAN KOTAKALER KEC. SUMEDANG UTARA (SAWAH)	00030	947,00		65.350.000,00	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	336	
175	BLOK SUKAMAJU KELURAHAN KOTAKALER KEC. SUMEDANG UTARA (SDN BABAKAN HURIP)	00031	825,00		10.893.000,00	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	327	

NO	BIDANG/PERSIL	SERTIFIKAT		KIB	NILAI PEROLEHAN (Rp)	SKPD PENCATAT	ID BARANG	KETERANGAN
		NOMOR	LUAS	LUAS				
			(M2)	(M2)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
176	BLOK KETIB KELURAHAN KOTAKALER KEC. SUMEDANG UTARA (SDN KETIB)	00032	768,00		9.150.000,00	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	330	
177	BLOK SUKAMAJU KELURAHAN KOTAKALER KEC. SUMEDANG UTARA (SDN SUKAMAJU)	00033	1.061,00		11.743.000,00	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	325	
178	BLOK SUKAMAJU KELURAHAN KOTAKALER KEC. SUMEDANG UTARA (KANTOR KELURAHAN KOTAKALER DAN GOR)	00034	1.392,00		16.660.000,00	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	321	
179	BLOK JL. PRABU GAJAH AGUNG KEL. SITU KEC. SUMEDANG UTARA (IPP A)	00050	799,00		3.843.500.000,00	DINAS PERKIMTAN	24	
180	BLOK JL. PRABU GAJAH AGUNG KEL. SITU KEC. SUMEDANG UTARA (IPP B)	00051	329,00		655.077.000,00	DINAS PERKIMTAN	26	
181	BLOK KARAPYAK KEL.SITU KEC. SUMEDANG UTARA (IPP G)	00052	3.165,00		4.283.105.000,00	DINAS PERKIMTAN	27	
182	KEL. CIPAMEUNGPEUK KEC. SUMEDANG SELATAN (TPU)	00010	2.396,00	1.400,00	980.000,00	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	318	
183	KELURAHAN KOTAKALER KEC. SUMEDANG UTARA (TK AL HIDAYAH + MESJID)	00035	394,00		5.848.000,00	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	326	
184	KEL. SITU KEC. SUMEDANG UTARA (IPP H)	00053	1.595,00		2.192.435.000,00	DINAS PERKIMTAN	29	
185	KEL. SITU KEC. SUMEDANG UTARA (IPP I)	00054	2.800,00		3.748.386.000,00	DINAS PERKIMTAN	31	
186	KEL. SITU KEC. SUMEDANG UTARA (IPP J)	00055	2.870,00			BELUM TERCATAT		
187	BLOK GUDANG UYAH KEL. REGOLWETAN KEC. SUMEDANG SELATAN (BINOKASIH B)	00029	144,00	185,00	444.981.143,08	DINAS PERKIMTAN	156	
188	DESA MARGALUYU KEC. TANJUNGSARI (SDN CIJOLANG)	00005	234,00			BELUM TERCATAT		
189	KEL. TALUN KEC. SUMEDANG UTARA (DARAT PERTANIAN)	00009	2.749,00			BELUM TERCATAT		
190	KEL. KOTAKULON KEC. SUMEDANG SELATAN (KANTOR KELURAHAN KOTAKULON)	00031	624,00	610,00	9.964.725,00	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	301	
191	KEL. KOTAKULON KEC. SUMEDANG SELATAN (SDN PASAREAN)	00030	1.822,00			BELUM TERCATAT		
192	BLOK NYANGEGENG DESA PADASUKA KEC. SUMEDANG UTARA (BBI)	00005	22.223,00		200.000.000,00	DISKANAK	416	
193	DESA MARGAMEKAR KEC. SUMEDANG SELATAN (SAWAH REGOLWETAN)	00001	3.624,00	4.215,00	81.000.000,00	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	308	
194	KEL. CIPAMEUNGPEUK KEC. SUMEDANG SELATAN (TPU REGOL WETAN)	00011	2.420,00			BELUM TERCATAT		
195	KEL. KOTAKULON KEC. SUMEDANG SELATAN (SDN GUDANG KOPI 1)	00034	690,00			BELUM TERCATAT		
196	KEL. KOTAKULON KEC. SUMEDANG SELATAN (KOLAM DARANGDAN)	00032	415,00			BELUM TERCATAT		
197	KEL. KOTAKULON KEC. SUMEDANG SELATAN (GEDUNG SILAT DARANGDAN)	00033	645,00			BELUM TERCATAT		
198	DESA TRUNAMANGGALA KEC. CIMALAKA (SMP 3 CIMALAKA)	00001	6.984,00			BELUM TERCATAT		
199	KEL. CIPAMEUNGPEUK KEC. SUMEDANG SELATAN (TPU REGOL_BELAKANG SDN CIPAMEUNGPEUK)	00012	743,00			BELUM TERCATAT		
200	KEL. REGOLWETAN KEC. SUMEDANG SELATAN (SDN MANANGGA)	00030	2.500,00			BELUM TERCATAT		
201	KEL. REGOLWETAN KEC. SUMEDANG SELATAN (SMPN 9 SUMEDANG)	00031	3.020,00			BELUM TERCATAT		
202	KEL. REGOLWETAN KEC. SUMEDANG SELATAN (DINAS PUPR)	00032	2.750,00	2.729,00	1.500.950.000,00	PUTR	631	
203	KEL. KOTAKULON KEC. SUMEDANG SELATAN (UPTD PERTANIAN SUMEDANG SELATAN)	00035	213,00	205,30	9.840.000,00	DPKP	450	
204	BLOK BEBEDAHAN KEL. KOTAKULON KEC. SUMEDANG SELATAN (GOR TADJIMALELA)	00036	3.677,00		1.260.840.000,00	DISPARBUDPORA	419	
205	KEL. KOTAKULON KEC. SUMEDANG SELATAN (SDN GUDANGKOPI 2)	00037	508,00			BELUM TERCATAT		
206	KEL. KOTAKULON KEC. SUMEDANG SELATAN (SDN DARANGDAN LAMA)	00038	1.716,00			BELUM TERCATAT		
207	KEL. KOTAKULON KEC. SUMEDANG SELATAN (EKS PDAM_RUMDIN WABUP)	00039	671,00	755,00	808.928.571,00	SETDA	495	
208	BLOK KARAPYAK KEL. SITU KEC. SUMEDANG UTARA (SDN KARAPYAK)	00056	931,00	1012,50	1.215.000,00	DINAS PENDIDIKAN	604	
209	KELURAHAN KOTAKULON KECAMATAN SUMEDANG SELATAN (SDN DARANGDAN TINGKAT)	00040	1.413,00	2.793,00	2.094.408,00	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	304	
210	KELURAHAN SITU KECAMATAN SUMEDANG UTARA (SMPN 5 SUMEDANG)	00057	3.685,00	3.640,00	15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	2027	
211	DESA KARANGLAYUNG KECAMATAN CONGGEANG (SMPN 2 CONGGEANG)	00003	5.928,00	6.510,00	110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	224	
212	DESA JINGKANG KECAMATAN TANJUNGMEDAR (SMPN 1 TANJUNGMEDAR)	00003	6.169,00	6.444,00	60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	266	
213	KELURAHAN CIPAMEUNGPEUK KECAMATAN SUMEDANG SELATAN (SAWAH)	00013	4.127,00	4.900,00	108.000.000,00	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	307	
214	BLOK SUKAHARJA DESA KEBONJATI KEC. SUMEDANG UTARA (UPTD PERTANIAN SUMEDANG UTARA)	00004	1.154,00	1.148,00	11.254.902,00	DPKP	268	
215	BLOK DARMAJAYA DESA DARMAJAYA KEC. DARMARAJA (KANTOR KECAMATAN DARMARAJA)	00006	2.269,00	7.446,00	2.820.500,00	KECAMATAN DARMARAJA	593	
216	BLOK LEBAKTULANG DESA NAGARAWANGI KEC. RANCAKALONG (KANTOR KECAMATAN)	00005	2.653,00	3.280,00	243.700.000,00	KECAMATAN RANCAKALONG	1951	
217	BLOK CITUNGKU DESA NAGARAWANGI KEC. RANCAKALONG (UPTD PERTANIAN RANCAKALONG)	00006	601,00	693,00	6.483.660,00	DPKP	441	
218	BLOK CITUNGKU DESA NAGARAWANGI KEC. RANCAKALONG (PUSKESMAS)	00007	627,00	360,00	1.038.500,00	KECAMATAN RANCAKALONG	1950	
219	BLOK LEBAKTULANG DESA NAGARAWANGI KEC. RANCAKALONG (UPTD HOLTIKULTURA)	00008	3.335,00	2595,80	20.949.274,50	DPKP	458	
220	BLOK LEBAK OPAT DESA CIGENDEL KEC. PAMULIHAN (TPSA)	00009	3.645,00					
221	BLOK LEBAK OPAT DESA CIGENDEL KECAMATAN PAMULIHAN (TPSA)	00010	1.852,00	57.284,00	777.300.000,00	SETDA	512	MENJADI 3 SERTIFIKAT
222	BLOK KEBON OPAT DESA CIJERUK KECAMATAN PAMULIHAN (TPSA)	00011	50.353,00					
223	BLOK KARASAK DESA CISEMPUR KEC. JATINANGOR (TPSS)	00021	135,00					
224	BLOK CIKERUH LIO DESA CIKERUH KEC. JATINANGOR (TPSS)	00023	224,00	1.068,00	230.000.200,00	DLHK	276	MENJADI 3 SERTIFIKAT

NO	BIDANG/PERSIL	SERTIFIKAT		KIB	NILAI PEROLEHAN (Rp)	SKPD PENCATAT	ID BARANG	KETERANGAN
		NOMOR	LUAS	LUAS				
			(M2)	(M2)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
225	BLOK BOJONG REUNGIT DESA JATIMUKTI KEC. JATINANGOR (TPSS)	00029	207,00					
226	BLOK SAMOJA KEL. PASANGGRAHAN BARU KEC. SUMEDANG SELATAN (TUGU KUDA SILAT)	00034	77,00		2.472.000,00	DLHK	290	
227	BLOK KARAPYAK KEL. SITU KEC. SUMEDANG UTARA (TUGU TAHU)	00058	95,00		2.922.500,00	DLHK	291	
228	BLOK GEMPOL DESA MEKARMULYA KECAMATAN SITURAJA (UPTD PERTANIAN SITURAJA)	00008	5.976,00	6.175,00	6.278.140,00	DPKP	445	
229	BLOK SUKAMANAH DESA SERANG KECAMATAN CIMALAKA (UPTD PERIKANAN DAN PETERNAKAN)	00007	271,00		3.000.000,00	DISKANAK	413	
230	BLOK PAKEMITAN DESA CIMALAKA KECAMATAN CIMALAKA (UPTD PERTANIAN CIMALAKA)	00008	493,00	472,00	1.262.120,00	DPKP	443	
231	BLOK POGOR DESA HARIANG KECAMATAN BUAHDUA (UPTD PERTANIAN BUAHDUA)	00004	1.718,00	1.918,00	901.890,00	DPKP	444	
232	BLOK SINDANGRAJA KEL. KOTAKALER KEC. SUMEDANG UTARA (DINAS SOSIAL)	00036	1.931,00	1.943,00	90.588.000,00	DINAS SOSIAL	271	
233	BLOK BUNUT DESA PASEH KALER KEC. PASEH (UPTD PERTANIAN PASEH)	00006	4.466,00	5.230,00	6.545.460,00	DPKP	442	
234	BLOK CIKUKULU DESA GANEAS KEC. GANEAS (UPTD PERTANIAN GANEAS)	00006	327,00	308,00	33.000.000,00	DPKP	2781148	
235	BLOK CIRENGGANIS DESA HAURNGOMBONG KEC. PAMULIHAN (SMPN 1 PAMULIHAN)	00017	2.851,00	8.898,00	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	206	
236	BLOK GEMPOL DESA MEKARMULYA KEC. SITURAJA (SMPN 2 SITURAJA)	00009	4.785,00	1.350,00	28.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN	239	
237	BLOK MENTENG DESA CIMALAKA KEC. CIMALAKA (SMPN 1 CIMALAKA)	00009	2.776,00			BELUM TERCATAT		
238	BLOK CISARUA DESA CISARUA KEC. CISARUA (SMPN 1 CISARUA)	00002	5.571,00	6.000,00	16.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	265	
239	BLOK CIBEUBEUR DESAJATIMUKTI KEC. JATINANGOR (SMPN 4 JATINANGOR)	00030	3.554,00	3.814,00	3.051.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN	2010	
240	BLOK CIJAMBU DESA KADAKAJAYA KEC. TANJUNGSARI (SMPN 3 TANJUNGSARI)	00002	5.995,00	6.228,00	42.857.000,00	DINAS PENDIDIKAN	2023	
241	BLOK CIGEMBONG DESA HAURNGOMBONG KEC. PAMULIHAN (SDN HAURNGOMBONG 2)	00018	1.417,00	1.388,00	3.150.000,00	DINAS PENDIDIKAN	551	
242	BLOK SDN CIMUNCANG DESA BANYUASIH KEC. TANJUNGKERTA (SDN CIMUNCANG)	00002	2.219,00	2.450,00	3.420.000,00	DINAS PENDIDIKAN	1922	
243	BLOK BARU DESA CISARUA KEC. CISARUA (ALUN ALUN CISARUA)	00003	2.875,00	3.500,00	150.000.000,00	KECAMATAN CISARUA	2009	
244	BLOK PAKEMITAN DESA CIMALAKA KEC. CIMALAKA (KANTOR KECAMATAN CIMALAKA)	00010	4.260,00	5.726,00	14.969.930,00	KECAMATAN CIMALAKA	1998	
245	BLOK SDN CIPANAS DESA CIPANAS KEC. TANJUNGKERTA (SDN CIPANAS)	00003	1.019,00	1.121,00	3.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	1917	
246	BLOK BOJONG INONG DESA JATIMULYA KEC. SUMEDANG UTARA (SDN SINDANG IV)	00005	1.637,00	1.800,00	225.000,00	DINAS PENDIDIKAN	1900	
247	BLOK JAISARI DESA JATIROKE KEC. JATINANGOR (SDN SINARJATI)	00043	2.510,00			BELUM TERCATAT		
248	BLOK LEMAH LUHUR DESA CINANJUNG KEC. TANJUNGSARI (SDN SUKAMANTRI)	00010	926,00	840,00	8.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN	533	
249	BLOK CIPELAH DESA MEKARBAKTI KEC. PAMULIHAN (SDN MEKARBAKTI)	00001	1.244,00	1.400,00	1.736.000,00	DINAS PENDIDIKAN	558	
250	BLOK WELING DESA CIBULUH KEC. UJUNGJAYA (SMPN 2 UJUNGJAYA)	00004	5.695,00	6.000,00	27.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	228	
251	BLOK PARAKANMUNCANG DESA SINDANGGALIH KEC. CIMANGGUNG (SMPN 1 CIMANGGUNG)	00005	7.349,00	7.450,00	4.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN	2011	
252	BLOK CAMPAKA DESA SUNDAMEKAR KEC. CISITU (SDN LINGGASARI)	00002	890,00			BELUM TERCATAT		
253	BLOK GADOG DESA JATIHURIP KEC. SUMEDANG UTARA (SDN SINDANG II)	00007	1.440,00	1.450,00	6.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	1897	
254	BLOK CINTAMULYA DESA CILEMBU KEC. PAMULIHAN (SMPN 3 PAMULIHAN)	00007	5.678,00	6.000,00	7.680.000,00	DINAS PENDIDIKAN	208	
255	BLOK SINDANGTAMAN DESA CIPANAS KEC. TANJUNGKERTA (SDN KADUJJAJAR III)	00004	488,00	380,00	16.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN	1915	MENJADI 1 SERTIFIKAT
				367,00	15.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN	1916	
256	BLOK CIBENDA DESA GIRIMUKTI KEC. SUMEDANG UTARA (SDN PADASUKA I)	00002	273,00	286,00	2.154.000,00	DINAS PENDIDIKAN	616	
257	BLOK LEMBUR SITU KEL. SITU KEC. SUMEDANG UTARA (SDN LEMBUR SITU)	00059	1.526,00	1.400,00	8.974.358,00	DINAS PENDIDIKAN	605	
258	BLOK NAGRAK KIDUL DESA NAGRAK KEC. BUAHDUA (RUMAH DINAS CAMAT BUAHDUA)	00008	565,00	604,00	45.000.000,00	KECAMATAN BUAHDUA	1935	
259	BLOK PASUNG DESA SAWAHDADAP KEC. CIMANGGUNG (SDN SAWAHDADAP III)	00003	1.591,00			BELUM TERCATAT		
260	BLOK CIGENTUR DESA CIGENTUR KEC. TANJUNGKERTA (SDN CIGENTUR)	00004	1.476,00	1.010,00	32.200,00	DINAS PENDIDIKAN	1927	MENJADI 1 SERTIFIKAT
				60,00	3.220.000,00	DINAS PENDIDIKAN	1928	
261	BLOK BABAKAN DESA GANEAS KEC. GANEAS (SDN GANEAS II)	00007	583,00			BELUM TERCATAT		
262	BLOK CIBUNGUR GEDE DESA TANJUNGHURIP KEC. GANEAS (SDN CIBUNGUR)	00004	226,00			BELUM TERCATAT		
263	BLOK CIBUNGUR GEDE DESA TANJUNGHURIP KEC. GANEAS (SDN CIBUNGUR)	00005	981,00			BELUM TERCATAT		
264	BLOK CIKONDANG DESA CIKONDANG KEC. GANEAS (SDN CIKONDANG III)	00007	704,00	810,00	2.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN	1905	
265	BLOK CIGOBANG DESA CIKONDANG KEC. GANEAS (SDN CIGOBANG)	00005	943,00			BELUM TERCATAT		
266	BLOK KEBON GANAS DESA JATISARI KEC. TANJUNGSARI (PASAR TANJUNGSARI)	00007	11.360,00					
267	DES JATISARI KEC. TANJUNGSARI (PASAR TANJUNGSARI)	00008	425,00	14.000,00	150.987.355,00	DISKOPERINDAG	385	MENJADI 2 SERTIFIKAT
268	BLOK LANJUNG DESA TANJUNGSARI KEC. TANJUNGSARI (PUSKESMAS TANJUNGSARI)	00014	1.701,00	1.701,00	3.657.150.000,00	DINAS KESEHATAN	3021307	
269	BLOK CITALI DESA CIPTASARI KEC. PAMULIHAN (SDN CITALI)	00001	1.821,00	1.905,00	1.905.000,00	DINAS PENDIDIKAN	561	
270	BLOK CIBENDA DESA GIRIMUKTI KEC. SUMEDANG UTARA (SDN PADASUKA I)	00003	630,00	625,00	643.000,00	DINAS PENDIDIKAN	615	
271	BLOK PAKEMITAN DESA CIMALAKA KEC. CIMALAKA (UPTD PERTANIAN CIMALAKA)	00011	1.220,00			BELUM TERCATAT		
272	BLOK CIPACING DESA MEKARBAKTI KEC. PAMULIHAN ( SDN CIPACING)	00002	1.849,00	1823,70	12.563.690,00	DINAS PENDIDIKAN	557	

NO	BIDANG/PERSIL	SERTIFIKAT		KIB	NILAI PEROLEHAN (Rp)	SKPD PENCATAT	ID BARANG	KETERANGAN
		NOMOR	LUAS	LUAS				
			(M2)	(M2)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
273	BLOK CILEMBU DESA CILEMBU KEC. PAMULIHAN (SDN CILEMBU)	00009	1.397,00	1.369,00	7.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN	552	
274	BLOK CILEMBU DESA CILEMBU KEC. PAMULIHAN ( PERPUSTAKAAN SDN CILEMBU)	00008	456,00	462,00	49.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN	553	
275	BLOK SAMPORA DESA AWILEGA KEC. TANJUNGPURA (SDN SAMPORA)	00001	1.194,00	1.194,00	1.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	1933	
276	BLOK SIMADU DESA CISITU KEC. CISITU (SDN CISITU)	00005	1.180,00	1.130,00	2.260.000,00	DINAS PENDIDIKAN	412	
277	BLOK KENANGAN DESA TANJUNGPURA KEC. TANJUNGPURA (SLB DO'A BUNDA)	00015	1.117,00	1.120,00	20.000.000,00	SETDA	499	
278	BLOK CIATEUL KEL. SITU KEC. SUMEDANG UTARA (TPSS SITU)	00060	331,00	542,00	17.019.000,00	DLHK	284	HIBAH KE MUI
279	BLOK GUNUNGPURA DESA JATIMULYA KEC. SUMEDANG UTARA (SDN GUNUNGPURA)	00006	1.359,00	1.515,00	3.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	1901	
280	BLOK ANDIR DESA TANJUNGPURA KEC. GANEAS (SMPN 2 GANEAS)	00006	6.041,00	1.833,00	4.255.204,40	DINAS PENDIDIKAN	252	MENJADI 1 SERTIFIKAT
				2.000,00	4.642.885,30	DINAS PENDIDIKAN	253	
				900,00	2.089.298,40	DINAS PENDIDIKAN	254	
				1.852,00	4.299.311,80	DINAS PENDIDIKAN	255	
281	BLOK CIBOGO DESA SUKASARI KEC. SUKASARI (SMPN 1 SUKASARI)	00004	6.190,00	5.800,00	129.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	248	MENJADI 1 SERTIFIKAT
				126,00	3.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	249	
				560,00	40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	250	
282	BLOK WADO GIRANG DESA WADO KEC. WADO (KANTOR KECAMATAN WADO)	00011	1.644,00	1.200,00	342.857.142,00	KECAMATAN WADO	587	
283	BLOK BUGEL DESA DARMAWANGI KEC. TOMO (SMPN 2 TOMO)	00045	5.985,00	6.000,00	24.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	231	
284	BLOK SUKASARI DESA SUKASARI KEC. SUKASARI (SDN SUKASARI)	00005	1.232,00			BELUM TERCATAT		
285	BLOK GANEAS DESA GANEAS KEC. GANEAS (SDN GANEAS I)	00008	1.210,00			BELUM TERCATAT		
286	BLOK CIGOBANG DESA CIKONDANG KEC. GANEAS (SDN CIGOBANG)	00008	503,00			BELUM TERCATAT		
287	BLOK KARASAK DESA SUKARAPIH KEC. SUKASARI (SDN MARGALUYU)	00002	128,00			BELUM TERCATAT		
288	BLOK PASIR KEPUH DESA CIPASANG KEC. CIBUGEL (SDN CIPASANG)	00004	3.139,00			BELUM TERCATAT		
289	BLOK CIENDOG DESA CIHANJUANG KEC. CIMANGGUNG (SDN BUNTER III)	00008	760,00			BELUM TERCATAT		
290	BLOK CIENDOG DESA CIHANJUANG KEC. CIMANGGUNG (RUMAH DINAS SDN BUNTER III)	00007	109,00			BELUM TERCATAT		
291	JL. PLTA PARAKANKONDANG DESA CIJEUNJING KEC. JATIGEDE (SMPN 1 JATIGEDE)	00079	8.121,00			BELUM TERCATAT		
292	BLOK PASIR TASBE DESA CIJEUNJING KEC. JATIGEDE (PASAR JATIGEDE)	00080	6.546,00			BELUM TERCATAT		
293	BLOK CIGALUMPIT DESA KERTAMEKAR KEC. TANJUNGPURA (SDN KERTAMULYA)	00002	1.330,00	1.367,00	2.840.000,00	DINAS PENDIDIKAN	1924	
294	DESA TARUNAJAYA KEC. DARMARAJA (UPTD PERTANIAN DARMARAJA 1)	00006	627,00					
295	DESA TARUNAJAYA KEC. DARMARAJA (UPTD PERTANIAN DARMARAJA 2)	00005	75,00	3.400,00	1.885.110,00	DPKP	446	MENJADI 3 SERTIFIKAT
296	DESA TARUNAJAYA KEC. DARMARAJA (UPTD PERTANIAN DARMARAJA 3)	00004	2.310,00					
297	BLOK CILENGKRANG KEL. KOTAKALER KEC. SUMEDANG UTARA (SDN CILENGKRANG)	00037	719,00	750,00	22.253.000,00	DINAS PENDIDIKAN	328	
298	BLOK SINDANG PALAY KEL. PASANGGRAHAN BARU KEC. SUMEDANG SELATAN (SDN SINDANG PALAY)	00038	1.172,00			BELUM TERCATAT		
299	BLOK CILIPUNG KEL. PASANGGRAHAN BARU KEC. SUMEDANG SELATAN (SDN CITRA RESMI)	00035	425,00			BELUM TERCATAT		
300	BLOK CILIPUNG KEL. PASANGGRAHAN BARU KEC. SUMEDANG SELATAN (SDN CITRA RESMI)	00036	194,00			BELUM TERCATAT		
301	BLOK CILIPUNG KEL. PASANGGRAHAN BARU KEC. SUMEDANG SELATAN (SDN CITRA RESMI)	00037	906,00			BELUM TERCATAT		
302	BLOK LEUWILIANG DESA SINDULANG KEC. CIMANGGUNG (SDN LEUWILIANG)	00004	1.277,00			BELUM TERCATAT		
303	BLOK PASAR DESA SUKARATU KEC. DARMARAJA (UPT PU DARMARAJA)	00004	1.339,00	229,00	57.250.000,00	PUTR	633	
304	BLOK CIPUNAGARA DESA CISURAT KEC. WADO (SDN CIPUNAGARA)	00004	1.786,00			BELUM TERCATAT		
305	BLOK BATU KORSI DESA MARGALAKSANA KEC. SUMEDANG SELATAN (UPTD KEANEKARAGAMAN HAYATI)	00001	11.887,00	10.000,00	95.237.000,00	DLHK	278	
306	BLOK PAMUNDURAN DESA CIBUGEL KEC. CIBUGEL (SDN CIJAH)	00005	3.255,00			BELUM TERCATAT		
307	BLOK PASAR DESA CIMALAKA KEC. CIMALAKA (TERMINAL CIMALAKA)	00012	1.237,00			BELUM TERCATAT		
308	BLOK CISITU DESA SITUMEKAR KEC. CISITU (SMPN 1 CISITU)	00004	7.167,00	12.320,00	439.824.000,00	DINAS PENDIDIKAN	256	
309	BLOK TALUN KELURAHAN TALUN KEC. SUMEDANG UTARA (EKS KANTOR KB)	00010	839,00			BELUM TERCATAT		
310	BLOK PONDOK DESA KERTAMUKTI KECAMATAN TANJUNGPURA (KANTOR KECAMATAN TANJUNGPURA)	00001	4.800,00	14.875,00	233.750.064,00	KECAMATAN TANJUNGPURA	1990	
311	BLOK BENTENG DESA TOMO KECAMATAN TOMO (ALUN ALUN TOMO)	00013	6.726,00		35.695.424,00	KECAMATAN TOMO	2022	
312	KELURAHAN REGOLWETAN KECAMATAN SUMEDANG SELATAN (SDN PAKUWON I & II)	00033	1.395,00			BELUM TERCATAT		
313	BLOK LUNJUK DESA CISEMPUR KEC. JATINANGOR (SMPN 2 JATINANGOR)	00022	5.021,00			BELUM TERCATAT		
314	BLOK KEBON KALAPA KEL. PASANGGRAHAN BARU KEC. SUMEDANG SELATAN (KANTOR DINAS PERTANIAN)	00039	2.339,00	1205.80	24.114.496,00	DPKP	452	
315	BLOK KARET KEL. SITU KEC. SUMEDANG UTARA (IPP SUMEDANG)	00061	1.849,00			BELUM TERCATAT		
316	BLOK GIM KEL. KOTAKULON KEC. SUMEDANG SELATAN (GIM)	00041	3.028,00			BELUM TERCATAT		
317	BLOK SUKARATU DESA SUKARATU KEC. DARMARAJA (SDN SUKARATU)	00003	1.845,00			BELUM TERCATAT		

NO	BIDANG/PERSIL	SERTIFIKAT		KIB	NILAI PEROLEHAN (Rp)	SKPD PENCATAT	ID BARANG	KETERANGAN
		NOMOR	LUAS (M2)	LUAS (M2)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
318	BLOK SAWAHLUHUR KELURAHAN SITU KECAMATAN SUMEDANG UTARA (SAWAH)	00062	2.427,00	1400.00 540.00 373.00	928.706.856,00 343.494.000,00 238.720.000,00	DINAS PERKIMTAN DINAS PERKIMTAN DINAS PERKIMTAN	13 25 36	MENJADI 1 SERTIFIKAT
319	KELURAHAN SITU KECAMATAN SUMEDANG UTARA (SAWAH)	00063	4.080,00	700.00 658.00 1733.00	871.196.000,00 1.006.740.000,00 2.651.490.000,00	DINAS PERKIMTAN DINAS PERKIMTAN DINAS PERKIMTAN	44 2798524 2998127	MENJADI 1 SERTIFIKAT
320	KELURAHAN SITU KECAMATAN SUMEDANG UTARA (SAWAH)	00064	3.377,00	1377.00 2000.00	1.735.020.000,00 2.440.000.000,00	DINAS PERKIMTAN DINAS PERKIMTAN	2798523 41	MENJADI 1 SERTIFIKAT
321	BLOK CIRUYUK DESA SUKAJADI KECAMATAN WADO (KEBUN/TPSA PASAR WADO)	00010	11.102,00	12.300,00	13.224.510,00	DISKOPERINDAG	397	
322	BLOK SITUMEKAR DESA SITUMEKAR KECAMATAN CISITU (SMPN 1 CISITU)	00005	550,00			DINAS PENDIDIKAN	256	
323	BLOK JINGKANG DESA JINGKANG KECAMATAN TANJUNGMEDAR (SDN JINGKANG)	00004	163,00			BELUM TERCATAT		
324	BLOK CIKONDANG DESA CIKONDANG KECAMATAN GANEAS (SDN CIKONDANG III)	00009	484,00		2.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN	1905	
325	BLOK DUSUN JATIHURIP DESA JATIHURIP KECAMATAN SUMEDANG UTARA (SDN SINDANG III)	00008	1.182,00			BELUM TERCATAT		
326	BLOK III WARUNG JAMBU KELURAHAN PASANGGRAHAN BARU KECAMATAN SUMEDANG SELATAN (SDN PASANGGRAHAN 2)	00040	1.415,00			BELUM TERCATAT		
327	BLOK LEGOK PACING DESA PASIGARAN KEC. TANJUNGSARI (RUMDIN PENGAIRAN)	00003	84,00	84,00	735.000,00	PUTR	619	
328	BLOK JL. MAYOR ABDURAHMAN KEL. KOTAKALER KEC. SUMEDANG UTARA (TAMAN TELOR)	00038	1.985,00	5.000,00	49.866.000,00	SETDA	510	
329	BLOK JL. PALASARI KEL. KOTAKULON KEC. SUMEDANG SELATAN (KANTOR SDK)	00042	379,00	11.250,00	1.440.000.000,00	DINAS KESEHATAN	433	
330	BLOK JL. P. SUGIH KEL. KOTAKULON KEC. SUMEDANG SELATAN (BNN)	00043	733,00	800,00	18.115.000,00	PENGELOLA BARANG		
331	BLOK KAUM DESA SITURAJA UTARA KEC. SITURAJA (KANTOR KECAMATAN SITURAJA)	00005	761,00	1.264,00	225.000.000,00	KECAMATAN SITURAJA	1899	
332	BLOK CIATEUL KEL. SITU KEC. SUMEDANG UTARA (TPSS SITU)	00066	542,00		17.019.000,00	DLHK	284	
			<b>1.303.506,45</b>		<b>83.448.916.225,41</b>			



**Rincian Peralatan dan Mesin**  
**Aset Tetap : Peralatan dan Mesin**

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Alat Besar Darat	15.722.756.752,77	15.710.900.752,77	11.856.000,00
2	Alat Besar Apung	136.100.000,00	136.100.000,00	0,00
3	Alat Bantu	3.809.271.566,52	3.241.182.239,52	568.089.327,00
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	181.187.541.435,66	172.277.265.531,66	8.910.275.904,00
5	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.795.930.660,65	1.691.106.610,65	104.824.050,00
6	Alat Angkutan Apung Bermotor	882.400.000,00	882.400.000,00	0,00
7	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	615.636.776,04	615.636.776,04	0,00
8	Alat Bengkel Bermesin	1.116.290.206,97	1.102.918.006,97	13.372.200,00
9	Alat Bengkel Tak Bermesin	558.124.097,18	534.242.597,18	23.881.500,00
10	Alat Ukur	16.919.989.387,92	16.932.676.187,92	(12.686.800,00)
11	Alat Pengolahan	9.525.450.507,87	9.383.231.517,87	142.218.990,00
12	Alat Kantor	114.394.407.485,06	106.381.118.514,91	8.013.288.970,15
13	Alat Rumah Tangga	173.551.788.892,74	161.110.396.183,29	12.441.392.709,45
14	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	11.729.657.222,92	11.343.858.017,45	385.799.205,47
15	Alat Studio	232.534.735.660,53	231.213.538.817,36	1.321.196.843,17
16	Alat Komunikasi	17.083.436.306,55	15.337.631.651,54	1.745.804.655,01
17	Peralatan Pemancar	755.971.197,40	751.421.197,40	4.550.000,00
18	Peralatan Komunikasi Navigasi	25.170.000,00	25.170.000,00	0,00
19	Alat Kedokteran	255.165.447.605,00	244.225.934.130,50	10.939.513.474,50
20	Alat Kesehatan Umum	23.112.304.118,87	9.394.457.510,87	13.717.846.608,00
21	Unit Alat Laboratorium	28.942.503.459,26	28.871.882.329,26	70.621.130,00
22	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	13.300.690,00	13.300.690,00	0,00
23	Alat Peraga Praktik Sekolah	59.990.770.989,38	59.556.439.075,00	434.331.914,38
24	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	294.332.385,42	294.332.385,42	0,00
25	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	23.672.730,00	23.672.730,00	0,00
26	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	35.061.984,82	35.061.984,82	0,00
27	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.750.342.294,54	1.750.342.294,54	0,00
28	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	3.180.368.819,32	3.180.368.819,32	0,00
29	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	93.730.000,00	93.730.000,00	0,00
30	Komputer Unit	276.577.720.245,86	254.871.202.705,56	21.706.517.540,30
31	Peralatan Komputer	148.123.413.079,30	143.637.955.256,34	4.485.457.822,96
32	Alat Pengeboran Mesin	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
33	Sumur	2.340.084.700,00	2.150.165.700,00	189.919.000,00
34	Produksi	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00
35	Alat Pelindung	59.978.000,00	59.978.000,00	0,00
36	Alat SAR	5.424.423.427,29	4.769.175.099,29	655.248.328,00
37	Alat Kerja Penerbangan	37.400.000,00	37.400.000,00	0,00
38	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	1.675.932.232,00	1.239.234.732,00	436.697.500,00
39	Unit Peralatan Proses/Produksi	17.850.000,00	17.850.000,00	0,00
40	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	29.992.895.256,62	21.654.742.456,62	8.338.152.800,00
41	Peralatan Olahraga	1.422.286.533,88	1.121.839.646,88	300.446.887,00
	<b>Total</b>	<b>1.620.650.976.708,34</b>	<b>1.525.702.360.148,95</b>	<b>94.948.616.559,39</b>

**BELANJA MODAL DI LRA**  
**Aset Tetap : Peralatan dan Mesin**

NO	SKPD	BELANJA MODAL DI LRA		
		2023	2022	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN	48.556.448.009,00	111.703.443.546,00	(63.146.995.537,00)
2	DINAS KESEHATAN	31.074.158.938,00	47.358.545.331,00	(16.284.386.393,00)
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	425.880.500,00	355.095.482,00	70.785.018,00
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	350.516.095,00	1.163.684.003,00	(813.167.908,00)
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3.002.097.660,00	280.508.710,00	2.721.588.950,00
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	527.946.000,00	422.774.000,00	105.172.000,00
7	DINAS SOSIAL	230.377.590,00	286.853.396,00	(56.475.806,00)
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	150.842.620,00	717.185.300,00	(566.342.680,00)
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	5.447.220.740,00	14.670.040,00	5.432.550.700,00
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.057.554.890,00	545.198.090,00	1.512.356.800,00
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	126.166.900,00	279.265.601,00	(153.098.701,00)
12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	884.059.000,00	932.404.580,00	(48.345.580,00)
13	DINAS PERHUBUNGAN	8.275.247.275,00	378.846.000,00	7.896.401.275,00
14	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	837.614.294,00	1.666.429.996,00	(828.815.702,00)
15	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	71.477.110,00	173.565.387,00	(102.088.277,00)
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	231.228.600,00	474.078.580,00	(242.849.980,00)
17	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	804.928.074,00	111.693.750,00	693.234.324,00
18	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	54.109.800,00	12.055.600,00	42.054.200,00
19	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	523.651.320,00	509.954.020,00	13.697.300,00
20	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	600.388.000,00	2.153.282.520,00	(1.552.894.520,00)
21	SEKRETARIAT DAERAH	6.464.845.376,00	1.589.388.672,00	4.875.456.704,00
22	SEKRETARIAT DPRD	1.919.478.170,00	2.496.196.700,00	(576.718.530,00)
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	860.815.600,00	417.438.575,00	443.377.025,00
24	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	534.378.150,00	1.834.970.575,00	(1.300.592.425,00)
25	BADAN PENDAPATAN DAERAH	719.678.680,00	947.856.950,00	(228.178.270,00)
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	518.302.533,00	549.688.500,00	(31.385.967,00)
27	INSPEKTORAT	936.226.000,00	309.602.315,00	626.623.685,00
28	KECAMATAN WADO	0,00	408.013.315,00	(408.013.315,00)
29	KECAMATAN JATINUNGGAL	0,00	382.774.350,00	(382.774.350,00)
30	KECAMATAN DARMARAJA	26.050.000,00	505.100.000,00	(479.050.000,00)
31	KECAMATAN CIBUGEL	0,00	272.995.000,00	(272.995.000,00)
32	KECAMATAN CISITU	0,00	365.454.000,00	(365.454.000,00)
33	KECAMATAN SITURAJA	39.900.000,00	597.450.000,00	(557.550.000,00)
34	KECAMATAN CONGGEANG	32.400.000,00	486.000.000,00	(453.600.000,00)
35	KECAMATAN PASEH	0,00	409.200.000,00	(409.200.000,00)
36	KECAMATAN SURIAN	10.288.000,00	365.488.600,00	(355.200.600,00)
37	KECAMATAN BUAHDUA	13.700.000,00	510.551.200,00	(496.851.200,00)
38	KECAMATAN TANJUNGSARI	76.160.000,00	514.995.000,00	(438.835.000,00)
39	KECAMATAN SUKASARI	34.060.500,00	320.036.780,00	(285.976.280,00)
40	KECAMATAN PAMULIHAN	107.325.800,00	435.387.500,00	(328.061.700,00)
41	KECAMATAN CIMANGGUNG	116.365.000,00	399.500.000,00	(283.135.000,00)
42	KECAMATAN JATINANGOR	176.782.980,00	559.710.000,00	(382.927.020,00)
43	KECAMATAN RANCAKALONG	15.500.000,00	414.966.035,00	(399.466.035,00)
44	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	259.541.980,00	676.732.999,00	(417.191.019,00)
45	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	145.280.000,00	645.528.784,00	(500.248.784,00)
46	KECAMATAN GANEAS	23.180.000,00	391.141.880,00	(367.961.880,00)
47	KECAMATAN TANJUNGPURA	22.700.000,00	511.184.374,00	(488.484.374,00)
48	KECAMATAN TANJUNGMEDAR	19.500.000,00	343.000.000,00	(323.500.000,00)

## Lampiran 17 - Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

NO	SKPD	BELANJA MODAL DI LRA		
		2023	2022	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
49	KECAMATAN CIMALAKA	44.700.000,00	490000000,00	(445.300.000,00)
50	KECAMATAN CISARUA	93.483.560,00	389.904.500,00	(296.420.940,00)
51	KECAMATAN TOMO	23.200.000,00	384.872.520,00	(361.672.520,00)
52	KECAMATAN UJUNGJAYA	0,00	382.432.856,00	(382.432.856,00)
53	KECAMATAN JATIGEDE	103.550.000,00	430.500.000,00	(326.950.000,00)
54	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	598.412.190,00	168.421.200,00	429.990.990,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>118.167.717.934,00</b>	<b>189.446.017.112,00</b>	<b>(71.278.299.178,00)</b>

**MUTASI MASUK ANTAR SKPD**  
**Aset Tetap : Peralatan dan Mesin**

NO	SKPD	Mutasi Masuk Antar SKPD		
		2023	2022	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN	219.350.000,00	3.849.998,90	215.500.001,10
2	DINAS KESEHATAN	468.348.465,90	7.699.997,80	460.648.468,10
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	289.306.259,00	277.532.978,90	11.773.280,10
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	811.832.500,00	310.181.440,90	501.651.059,10
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	287.519.998,90	(287.519.998,90)
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	213.099.998,90	(213.099.998,90)
7	DINAS SOSIAL	372.758.254,00	414.849.998,90	(42.091.744,90)
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	372.690.600,00	3.849.998,90	368.840.601,10
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	17.160.090,00	668.220.376,90	(651.060.286,90)
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	879.573.792,80	380.183.625,00	499.390.167,80
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	525.238.784,00	414.849.998,90	110.388.785,10
12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	193.600.000,00	315.670.339,90	(122.070.339,90)
13	DINAS PERHUBUNGAN	500.530.750,00	373.321.634,01	127.209.115,99
14	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	300.150.000,00	1.113.766.286,13	(813.616.286,13)
15	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	601.759.998,90	669.363.719,90	(67.603.721,00)
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	35.079.848,90	(35.079.848,90)
17	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	723.895.345,90	207.745.126,90	516.150.219,00
18	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	423.643.235,11	241.826.749,42	181.816.485,69
19	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	960.074.979,52	376.540.598,90	583.534.380,62
20	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	0,00	22.412.561,90	(22.412.561,90)
21	SEKRETARIAT DAERAH	2.415.266.689,91	1.306.106.083,81	1.109.160.606,10
22	SEKRETARIAT DPRD		249.008.147,90	(249.008.147,90)
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0,00	229.904.998,90	(229.904.998,90)
24	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	847.520.234,00	846.670.500,41	849.733,59
25	BADAN PENDAPATAN DAERAH	296.360.694,00	3.849.998,90	292.510.695,10
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	3.849.998,90	(3.849.998,90)
27	INSPEKTORAT	338.190.793,00	3.849.998,90	334.340.794,10
28	KECAMATAN WADO	12.048.510,00	12.509.998,90	(461.488,90)
29	KECAMATAN JATINUNGGAL	0,00	12.509.998,90	(12.509.998,90)
30	KECAMATAN DARMARAJA	0,00	12.509.998,90	(12.509.998,90)
31	KECAMATAN CIBUGEL	0,00	56.559.499,90	(56.559.499,90)
32	KECAMATAN CISITU	0,00	12.509.998,90	(12.509.998,90)
33	KECAMATAN SITURAJA	0,00	12.509.998,90	(12.509.998,90)
34	KECAMATAN CONGGEANG	0,00	12.509.998,90	(12.509.998,90)
35	KECAMATAN PASEH	0,00	12.509.998,90	(12.509.998,90)
36	KECAMATAN SURIAN	0,00	12.509.998,90	(12.509.998,90)
37	KECAMATAN BUAHDUA	21.208.806,00	12.509.998,90	8.698.807,10
38	KECAMATAN TANJUNGSARI	0,00	12.509.998,90	(12.509.998,90)
39	KECAMATAN SUKASARI	0,00	12.509.998,90	(12.509.998,90)
40	KECAMATAN PAMULIHAN	72.050.000,00	177.509.998,90	(105.459.998,90)
41	KECAMATAN CIMANGGUNG	536.390.000,00	12.509.998,90	523.880.001,10
42	KECAMATAN JATINANGOR	627.715.000,00	12.509.998,90	615.205.001,10
43	KECAMATAN RANCAKALONG	7.935.392,00	12.509.998,90	(4.574.606,90)
44	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	141.540.000,00	43.223.990,90	98.316.009,10
45	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	72.873.236,00	45.623.981,90	27.249.254,10
46	KECAMATAN GANEAS	0,00	29.535.181,90	(29.535.181,90)
47	KECAMATAN TANJUNGPURBA	0,00	12.509.998,90	(12.509.998,90)
48	KECAMATAN TANJUNGMEDAR	0,00	12.509.998,90	(12.509.998,90)

## Lampiran 18 - Rincian Mutasi Masuk Antar SKPD Peralatan Dan Mesin

NO	SKPD	Mutasi Masuk Antar SKPD		
		2023	2022	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
49	KECAMATAN CIMALAKA	0,00	12.509.998,90	(12.509.998,90)
50	KECAMATAN CISARUA	85.000.000,00	12.509.998,90	72.490.001,10
51	KECAMATAN TOMO	57.892.000,00	12.509.998,90	45.382.001,10
52	KECAMATAN UJUNGJAYA	10.935.859,00	29.509.998,90	(18.574.139,90)
53	KECAMATAN JATIGEDE	0,00	12.509.998,90	(12.509.998,90)
54	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	615.545.394,24	648.182.877,80	(32.637.483,56)
	<b>JUMLAH</b>	<b>13.818.385.663,28</b>	<b>10.261.150.514,78</b>	<b>3.557.235.148,50</b>

**KOREKSI ASET TETAP <1.000.000 (EKSTRAKOMPTABEL)****Aset Tetap : Peralatan dan Mesin**

NO	SKPD	Koreksi Aset Tetap < 1.000.000 (Ekstrakompatabel)		
		2023	2022	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN	15.463.587.790,69	13.593.012.204,99	1.870.575.585,70
2	DINAS KESEHATAN	609.372.589,00	755.741.561,00	(146.368.972,00)
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	2.534.500,00	30.493.000,00	(27.958.500,00)
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	21.108.000,00	975.000,00	20.133.000,00
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	12.236.000,00	33.687.500,00	(21.451.500,00)
6	DINAS SOSIAL	38.865.800,00	0,00	38.865.800,00
7	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	33.384.920,00	51.266.082,00	(17.881.162,00)
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	1.990.340,00	4.204.680,00	(2.214.340,00)
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	27.862.380,00	7.425.000,00	20.437.380,00
10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10.798.600,00	11.811.900,00	(1.013.300,00)
11	DINAS PERHUBUNGAN	12.763.000,00	0,00	12.763.000,00
12	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	62.690.825,00	31.518.450,00	31.172.375,00
13	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	19.980.000,00	7.401.450,00	12.578.550,00
14	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	3.394.720,00	1.887.000,00	1.507.720,00
15	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	1.433.450,00	42.356.500,00	(40.923.050,00)
16	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	60.450.600,00	31.191.350,00	29.259.250,00
17	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	22.750.000,00	178.568.041,07	(155.818.041,07)
18	SEKRETARIAT DAERAH	445.375.800,00	249.088.656,11	196.287.143,89
19	SEKRETARIAT DPRD	7.351.400,00	-	7.351.400,00
20	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.022.500,00	12.900.420,00	(9.877.920,00)
21	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	4.200.000,00	5.477.600,00	(1.277.600,00)
22	BADAN PENDAPATAN DAERAH	11.050.000,00	1.165.500,00	9.884.500,00
23	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	19.192.685,24	(19.192.685,24)
24	INSPEKTORAT	745.000,00	1.500.000,00	(755.000,00)
25	KECAMATAN JATINUNGGAL	0,00	952.625,79	(952.625,79)
26	KECAMATAN DARMARAJA	0,00	9.700.000,00	(9.700.000,00)
27	KECAMATAN CIBUGEL	0,00	500.000,00	(500.000,00)
28	KECAMATAN TANJUNGSARI	1.247.000,00	0,00	1.247.000,00
29	KECAMATAN SUKASARI	1.190.800,00	382.014,93	808.785,07
30	KECAMATAN CIMANGGUNG	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00
31	KECAMATAN JATINANGOR	0,00	9.906.844,54	(9.906.844,54)
32	KECAMATAN RANCAKALONG	0,00	16.196.852,00	(16.196.852,00)
33	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	47.206.400,00	0,00	47.206.400,00
34	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	21.450.000,00	0,00	21.450.000,00
35	KECAMATAN GANEAS	6.930.000,00	200.000,00	6.730.000,00
36	KECAMATAN TANJUNGGERTA	0,00	1.950.000,00	(1.950.000,00)
37	KECAMATAN TANJUNGMEDAR	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
38	KECAMATAN UJUNGJAYA	0,00	975.000,00	(975.000,00)
	<b>JUMLAH</b>	<b>16.959.037.414,69</b>	<b>15.111.627.917,67</b>	<b>1.847.409.497,02</b>

**HIBAH KELUAR PERALATAN DAN MESIN**  
Aset Tetap : Peralatan dan Mesin

NO	NAMA SEKOLAH	TWIN MIRROR INTERACTIVE FLAT PANEL	TWIN MIRROR MOBILE STAND BRAKCET	VOLTAGEN WEB CAMERA	VOLTAGEN LINE INTERACTIVE UPS LIVE	TP LINK	VOLTAGEN CONFERENCE CAMERA	TWIN MIRROR WIRELESS MULTIMEDIA HUB	VOLTAGEN MOBILE TRIPOD	ALAT PRAMUKA	JUMLAH
1	TK PGRI TUNAS DHARMA MEKAR	183.600.000,00	5.240.000,00	1.960.000,00	2.190.000,00	550.000,00	12.960.000,00	4.400.000,00	1.690.000,00	-	212.590.000,00
2	TK PGRI MANDALA MEKAR	183.600.000,00	5.240.000,00	1.960.000,00	2.190.000,00	550.000,00	12.960.000,00	4.400.000,00	1.690.000,00	-	212.590.000,00
3	TK PGRI MEKARHARAPAN	183.600.000,00	5.240.000,00	1.960.000,00	2.190.000,00	550.000,00	12.960.000,00	4.400.000,00	1.690.000,00	-	212.590.000,00
4	TK DANGNIANG DANA RASA	183.600.000,00	5.240.000,00	1.960.000,00	2.190.000,00	550.000,00	12.960.000,00	4.400.000,00	1.690.000,00	-	212.590.000,00
5	TK PGRI TERATAI	183.600.000,00	5.240.000,00	1.960.000,00	2.190.000,00	550.000,00	12.960.000,00	4.400.000,00	1.690.000,00	-	212.590.000,00
6	TK PGRI HARAPAN BANGSA	183.600.000,00	5.240.000,00	1.960.000,00	2.190.000,00	550.000,00	12.960.000,00	4.400.000,00	1.690.000,00	-	212.590.000,00
7	TK YAYASAN PENDIDIKAN 17	183.600.000,00	5.240.000,00	1.960.000,00	2.190.000,00	550.000,00	12.960.000,00	4.400.000,00	1.690.000,00	-	212.590.000,00
8	TK AJ MUHAJIDIN	183.600.000,00	5.240.000,00	1.960.000,00	2.190.000,00	550.000,00	12.960.000,00	4.400.000,00	1.690.000,00	-	212.590.000,00
9	TK PGRI MUKTI MANDIRI	183.600.000,00	5.240.000,00	1.960.000,00	2.190.000,00	550.000,00	12.960.000,00	4.400.000,00	1.690.000,00	-	212.590.000,00
10	TK AL IKHLAS II	183.600.000,00	5.240.000,00	1.960.000,00	2.190.000,00	550.000,00	12.960.000,00	4.400.000,00	1.690.000,00	-	212.590.000,00
11	TK PGRI NUSAHATI	183.600.000,00	5.240.000,00	1.960.000,00	2.190.000,00	550.000,00	12.960.000,00	4.400.000,00	1.690.000,00	-	212.590.000,00
12	TK PGRI MEKARMUKTI	183.600.000,00	5.240.000,00	1.960.000,00	2.190.000,00	550.000,00	12.960.000,00	4.400.000,00	1.690.000,00	-	212.590.000,00
13	TK PGRI JATIPUTRI	183.600.000,00	5.240.000,00	1.960.000,00	2.190.000,00	550.000,00	12.960.000,00	4.400.000,00	1.690.000,00	-	212.590.000,00
14	TK GIRIASIH	183.600.000,00	5.240.000,00	1.960.000,00	2.190.000,00	550.000,00	12.960.000,00	4.400.000,00	1.690.000,00	-	212.590.000,00
15	TK PGRI TRIBAKTI	183.600.000,00	5.240.000,00	1.960.000,00	2.190.000,00	550.000,00	12.960.000,00	4.400.000,00	1.690.000,00	-	212.590.000,00
16	TK AR RAHMAN WADO	183.600.000,00	5.240.000,00	1.960.000,00	2.190.000,00	550.000,00	12.960.000,00	4.400.000,00	1.690.000,00	-	212.590.000,00
17	TK PGRI CAKRA MEKAR	183.600.000,00	5.240.000,00	1.960.000,00	2.190.000,00	550.000,00	12.960.000,00	4.400.000,00	1.690.000,00	-	212.590.000,00
18	TK PGRI MEKARASIH	183.600.000,00	5.240.000,00	1.960.000,00	2.190.000,00	550.000,00	12.960.000,00	4.400.000,00	1.690.000,00	-	212.590.000,00
19	TK PGRI PURWAWINAYA	183.600.000,00	5.240.000,00	1.960.000,00	2.190.000,00	550.000,00	12.960.000,00	4.400.000,00	1.690.000,00	-	212.590.000,00
20	TK AL AMANDA	183.600.000,00	5.240.000,00	1.960.000,00	2.190.000,00	550.000,00	12.960.000,00	4.400.000,00	1.690.000,00	-	212.590.000,00
21	TK BUAH WARNA	183.600.000,00	5.240.000,00	1.960.000,00	2.190.000,00	550.000,00	12.960.000,00	4.400.000,00	1.690.000,00	-	212.590.000,00
22	TK AZKIA	183.600.000,00	5.240.000,00	1.960.000,00	2.190.000,00	550.000,00	12.960.000,00	4.400.000,00	1.690.000,00	-	212.590.000,00
23	TK BPP ANGGREK	183.600.000,00	5.240.000,00	1.960.000,00	2.190.000,00	550.000,00	12.960.000,00	4.400.000,00	1.690.000,00	-	212.590.000,00
24	SMPN 2 WADO	-	-	-	-	-	-	-	-	98.400.000,00	98.400.000,00
25	SMPN 9 SUMEDANG	-	-	-	-	-	-	-	-	98.520.000,00	98.520.000,00
26	SMPN 2 SUMEDANG	-	-	-	-	-	-	-	-	98.440.000,00	98.440.000,00
27	SMPN 1 DARMARAJA	-	-	-	-	-	-	-	-	98.360.000,00	98.360.000,00
28	SMPN 4 PAMULIHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	98.680.000,00	98.680.000,00
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>4.222.800.000,00</b>	<b>120.520.000,00</b>	<b>45.080.000,00</b>	<b>50.370.000,00</b>	<b>12.650.000,00</b>	<b>298.080.000,00</b>	<b>101.200.000,00</b>	<b>38.870.000,00</b>	<b>492.400.000,00</b>	<b>5.381.970.000,00</b>

**MUTASI KELUAR SKPD**  
**Aset Tetap : Peralatan dan Mesin**

NO	SKPD	Mutasi Keluar SKPD		
		2023	2022	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN	0,00	477.578.108,00	(477.578.108,00)
2	DINAS KESEHATAN	952.140.136,00	0,00	952.140.136,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	644.180.500,00	0,00	644.180.500,00
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.349.601.942,00	810793544,14	538.808.397,86
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	165.000.000,00	(165.000.000,00)
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	329.457.000,00	0,00	329.457.000,00
7	DINAS SOSIAL	176.301.820,00	461.000.000,00	(284.698.180,00)
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	964.590.000,00	415.200.000,00	549.390.000,00
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	683.771.975,00	411.000.000,00	272.771.975,00
10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	416.209.375,00	466.933.625,00	(50.724.250,00)
11	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	378.184.992,76	(378.184.992,76)
12	DINAS PERHUBUNGAN	394.817.174,13	0,00	394.817.174,13
13	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	553.260.848,90	1.005.967.935,62	(452.707.086,72)
14	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	611.612.895,90	291.100.824,00	320.512.071,90
15	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	0,00	437.760.263,00	(437.760.263,00)
16	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	250.221.750,52	161.560.000,00	88.661.750,52
17	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	624.487.350,52	197.198.619,13	427.288.731,39
18	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	0,00	25.415.115,00	(25.415.115,00)
19	SEKRETARIAT DAERAH	4.228.710.476,70	2.860.021.951,51	1.368.688.525,19
20	SEKRETARIAT DPRD	0,00	356.828.400,00	(356.828.400,00)
21	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	514.907.646,61	0,00	514.907.646,61
22	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	771.556.192,00	950.189.367,51	(178.633.175,51)
23	BADAN PENDAPATAN DAERAH	232.673.580,00	80.279.351,00	152.394.229,00
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	279.470.000,00	(279.470.000,00)
25	INSPEKTORAT	119.885.000,00	0,00	119.885.000,00
26	KECAMATAN BUAHDUA	0,00	12.643.235,11	(12.643.235,11)
27	KECAMATAN GANEAS	0,00	17025183,00	(17.025.183,00)
	<b>JUMLAH</b>	<b>13.818.385.663,28</b>	<b>10.261.150.514,78</b>	<b>3.557.235.148,50</b>



**Belanja Modal di LRA**  
**Aset Tetap : Gedung dan Bangunan**

NO	SKPD	Belanja Modal di LRA		
		2023	2022	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN	47.719.632.656,00	49.335.523.780	(1.615.891.124,00)
2	DINAS KESEHATAN	9.331.097.900,00	7.258.567.636	2.072.530.264,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	16.394.274.127,00	57.006.115.346,00	(40.611.841.219,00)
4	DINAS SOSIAL	230.853.408,00	0,00	230.853.408,00
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	0,00	609.206.000	(609.206.000,00)
6	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.248.690.642,00	139.611.000	1.109.079.642,00
7	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	199.084.000,00	0,00	199.084.000,00
8	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	290.500.000,00	920.295.886	(629.795.886,00)
9	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	94.711.000,00	0,00	94.711.000,00
10	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	0,00	8.753.900.014,00	(8.753.900.014,00)
11	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	835.320.000,00	197.966.219	637.353.781,00
12	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	24.996.700,00	222.084.714	(197.088.014,00)
13	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	2.086.085.000,00	3.035.272.996	(949.187.996,00)
14	SEKRETARIAT DAERAH	1.502.924.044,00	0,00	1.502.924.044,00
15	SEKRETARIAT DPRD	1.098.920.000,00	199.800.000,00	899.120.000,00
16	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0,00	369.312.000	(369.312.000,00)
17	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	149.554.000,00	0,00	149.554.000,00
18	BADAN PENDAPATAN DAERAH	512.832.000,00	49.521.540	463.310.460,00
19	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	56.000.000,00	154.350.000,00	(98.350.000,00)
20	INSPEKTORAT	912.010.000,00	0,00	912.010.000,00
21	KECAMATAN WADO	96.200.000,00	0,00	96.200.000,00
22	KECAMATAN JATINUNGGAL	96.500.000,00	0,00	96.500.000,00
23	KECAMATAN DARMARAJA	99.173.000,00	0,00	99.173.000,00
24	KECAMATAN CIBUGEL	94.833.000,00	0,00	94.833.000,00
25	KECAMATAN CISITU	95.328.000,00	0,00	95.328.000,00
26	KECAMATAN SITURAJA	99.800.000,00	0,00	99.800.000,00
27	KECAMATAN CONGGEANG	95.059.000,00	0,00	95.059.000,00
28	KECAMATAN PASEH	96.440.000,00	9.887.300	86.552.700,00
29	KECAMATAN BUAHDUA	196.625.000,00	0,00	196.625.000,00
30	KECAMATAN TANJUNGSARI	273.386.130,00	229.267.000,00	44.119.130,00
31	KECAMATAN SUKASARI	95.839.000,00	0,00	95.839.000,00
32	KECAMATAN PAMULIHAN	95.099.000,00	69.700.000,00	25.399.000,00
33	KECAMATAN CIMANGGUNG	142.483.000,00	69.721.000,00	72.762.000,00
34	KECAMATAN JATINANGOR	280.908.386,00	39.989.000	240.919.386,00
35	KECAMATAN RANCAKALONG	89.836.000,00	192.678.000,00	(102.842.000,00)
36	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	432.380.942,00	652.664.340	(220.283.398,00)
37	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	253.631.000,00	334.748.000	(81.117.000,00)
38	KECAMATAN GANEAS	95.000.000,00	39.779.000,00	55.221.000,00
39	KECAMATAN TANJUNGPURA	99.823.000,00	0,00	99.823.000,00
40	KECAMATAN TANJUNGMEDAR	94.888.000,00	39.995.541	54.892.459,00
41	KECAMATAN CIMALAKA	142.938.650,00	0,00	142.938.650,00
42	KECAMATAN CISARUA	118.349.000,00	0,00	118.349.000,00
43	KECAMATAN TOMO	99.675.000,00	0,00	99.675.000,00
44	KECAMATAN JATIGEDE	46.355.214,00	39.474.000,00	6.881.214,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>86.018.035.799,00</b>	<b>129.969.430.312,00</b>	<b>(43.951.394.513,00)</b>

**Atribusi Biaya Umum**  
**Aset Tetap : Gedung dan Bangunan**

NO	SKPD	Atribusi Biaya Umum (diluar Belanja Modal)		
		2023	2022	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN	1.305.062.118,00	1.081.505.781,00	223.556.337,00
2	DINAS KESEHATAN	0,00	187771500,00	(187.771.500,00)
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	1.298.799.817,00	1.960.916.430,00	(662.116.613,00)
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0,00	680000,00	(680.000,00)
5	DINAS SOSIAL	0,00	7890000,00	(7.890.000,00)
6	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00	3.080.000,00	(3.080.000,00)
7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	4060000,00	(4.060.000,00)
8	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	3180000,00	(3.180.000,00)
9	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	8.250.000,00	65.384.000,00	(57.134.000,00)
10	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	3280000,00	(3.280.000,00)
11	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	0,00	1880000,00	(1.880.000,00)
12	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	0,00	14450000,00	(14.450.000,00)
13	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	3.380.000,00	(3.380.000,00)
14	BADAN PENDAPATAN DAERAH	3500000,00	0,00	3.500.000,00
15	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	3180000,00	(3.180.000,00)
16	KECAMATAN DARMARAJA	3.180.000,00	2680000,00	500.000,00
17	KECAMATAN SITURAJA	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
18	KECAMATAN PASEH	1.750.000,00	3080000,00	(1.330.000,00)
19	KECAMATAN SURIAN	1.650.000,00	3230000,00	(1.580.000,00)
20	KECAMATAN BUAHDUA	0,00	2.630.000,00	(2.630.000,00)
21	KECAMATAN TANJUNGSARI	3.850.000,00	6.460.000,00	(2.610.000,00)
22	KECAMATAN PAMULIHAN	1.750.000,00	4000000,00	(2.250.000,00)
23	KECAMATAN CIMANGGUNG	0,00	9.340.000,00	(9.340.000,00)
24	KECAMATAN JATINANGOR	0,00	6.460.000,00	(6.460.000,00)
25	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	1.850.000,00	14.250.000,00	(12.400.000,00)
26	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	0,00	24020000,00	(24.020.000,00)
27	KECAMATAN GANEAS	1.750.000,00	3080000,00	(1.330.000,00)
28	KECAMATAN TANJUNGMEDAR	0,00	3.180.000,00	(3.180.000,00)
29	KECAMATAN TOMO	2250000,00	0,00	2.250.000,00
30	KECAMATAN JATIGEDE	0,00	3.080.000,00	(3.080.000,00)
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.635.291.935,00</b>	<b>3.426.127.711,00</b>	<b>(790.835.776,00)</b>

**Kapitalisasi Aset Tetap dari Belanja Barang Jasa & Pemeliharaan**  
**Aset Tetap : Gedung dan Bangunan**

NO	SKPD	Kapitalisasi Aset Tetap dari Belanja Barang Jasa & Pemeliharaan		
		2023	2022	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN	0,00	399.490.000,00	(399.490.000,00)
2	DINAS KESEHATAN	2.596.308.040,00	4.703.291.988,00	(2.106.983.948,00)
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	273.811.500,00	189.827.000,00	83.984.500,00
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	97.754.926,86	84.171.206,24	13.583.720,62
5	DINAS SOSIAL	0,00	398.766.000,00	(398.766.000,00)
6	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	52.273.000,00	34.954.000,00	17.319.000,00
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	0,00	256.755.354,00	(256.755.354,00)
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	159.100.000,00	(159.100.000,00)
9	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	0,00	437.826.000,00	(437.826.000,00)
10	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	75.827.927,26	(75.827.927,26)
11	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	98.423.700,00	278.953.000,00	(180.529.300,00)
12	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	172.500.000,00	0,00	172.500.000,00
13	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	139.900.000,00	(139.900.000,00)
14	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	270.975.000,00	119.666.000,00	151.309.000,00
15	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	309.090.000,00	(309.090.000,00)
16	BADAN PENDAPATAN DAERAH	99.989.861,71	56.943.000,00	43.046.861,71
17	KECAMATAN DARMARAJA	0,00	49.698.000,00	(49.698.000,00)
18	KECAMATAN SITURAJA	49.900.000,00	0,00	49.900.000,00
19	KECAMATAN SURIAN	102.350.000,00	29.834.000,00	72.516.000,00
20	KECAMATAN BUAHDUA	0,00	39.900.000,00	(39.900.000,00)
21	KECAMATAN TANJUNGSARI	0,00	0,00	0,00
22	KECAMATAN CIMANGGUNG	0,00	84.584.000,00	(84.584.000,00)
23	KECAMATAN JATINANGOR	0,00	62.700.000,00	(62.700.000,00)
24	KECAMATAN RANCAKALONG	0,00	49.980.000,00	(49.980.000,00)
25	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	0,00	189.385.000,00	(189.385.000,00)
26	KECAMATAN JATIGEDE	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.814.286.028,57</b>	<b>8.150.642.475,50</b>	<b>(4.336.356.446,93)</b>

**Rincian Hibah Gedung dan Bangunan**  
**Aset Tetap : Gedung dan Bangunan**

No	Uraian	Luas M <sup>2</sup>	Alamat	Jumlah (Rp)
<b>HIBAH MASUK</b>				
<b>I</b>	<b>Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan</b>			<b>8.793.121.759,57</b>
1	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	234,00	Perumahan Giri Mukti Indah	612.612.000,00
2	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	260,00	Perumahan Giri Mukti Indah	11.677.901,66
3	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	81,00	Perumahan villa mutiara I	274.428.000,00
4	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	19,00	Perumahan villa mutiara I	64.372.000,00
5	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	115,00	Perumahan villa mutiara II	407.330.000,00
6	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	5,94	Perumahan villa mutiara II	21.039.480,00
7	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	117,04	Perumahan villa mutiara 2	20.147.003,34
8	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	7,79	Perumahan villa mutiara 2	27.592.180,00
9	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	438,20	Perumahan Parakanmuncang (SBG)	776.052.200,00
10	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	45,00	Perumahan Parakanmuncang (SBG)	79.695.000,00
11	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	98,63	Perumahan Parakanmuncang (SBG)	174.673.730,00
12	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	270,00	Perumahan Parakanmuncang (SBG)	478.170.000,00
13	Bangunan Kesehatan	90,00	Perumahan Parakanmuncang (SBG)	159.390.000,00
14	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	5,00	Perumahan Parakanmuncang (SBG)	8.855.000,00
15	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	336,00	Perumahan Ambar Tanjungsari Residence	1.060.752.000,00
16	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	5,94	Perumahan Ambar Tanjungsari Residence	66.423.280,00
17	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	7,79	Perumahan Ambar Tanjungsari Residence	24.308.900,00
18	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	216,00	Perumahan Ambar Tanjungsari Residence	11.699.038,14
19	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	117,12	Perumahan Anggrek Regency	315.638.400,00
20	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	10,03	Perumahan Anggrek Regency	27.030.850,00
21	Bangunan Gedung Kantor	24,62	Perumahan Anggrek Regency	66.350.900,00
22	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	136,00	Perumahan Anggrek Regency	6.288.100,90
23	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	350,00	Perumahan Bumi Ciptasari Kencana Asri	646.800.000,00
24	Bangunan Kesehatan	37,50	Perumahan Bumi Ciptasari Kencana Asri	69.300.000,00
25	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	51,90	Perumahan Bumi Mekar Jaya Indah (BMI)	171.840.900,00
26	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	8,00	Perumahan Bumi Mekar Jaya Indah (BMI)	26.488.000,00
27	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	131,14	Perumahan Griya Pesona Alam	353.422.300,00
28	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	84,50	Perumahan Griya Pesona Alam	227.727.500,00
29	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	220,00	Perumahan Griya Pesona Alam	10.171.927,92
30	Bangunan Gedung Kantor	24,00	Perumahan Griya Pesona Alam	64.680.000,00
31	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	7,92	Perumahan Griya Pesona Alam	21.344.400,00
32	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	198,00	Perumahan Korpri Jatiningor	747.054.000,00
33	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	324,00	Perumahan Lembu Sari Endah	623.700.000,00
34	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	81,00	Perumahan Lembu Sari Endah	155.925.000,00
35	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	142,00	Perumahan Bhayangkara Elok	338.954.000,00
36	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	355,50	Perumahan Bhayangkara Elok	14.558.406,71
37	Bangunan Gedung Kantor	78,00	Perumahan Bhayangkara Elok	186.186.000,00
38	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	10,53	Perumahan Bhayangkara Elok	25.135.110,00
39	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	117,12	Perumahan Kelapa Gading Permai	315.638.400,00
40	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	10,03	Perumahan Kelapa Gading Permai	27.030.850,00
41	Bangunan Gedung Kantor	24,62	Perumahan Kelapa Gading Permai	66.350.900,00
42	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	136,00	Perumahan Kelapa Gading Permai	6.288.100,90
<b>II</b>	<b>Dinas Perikanan dan Peternakan</b>			<b>1.999.707.609,00</b>
1	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	284,00	Kecamatan Jatigede	1.999.707.609,00
<b>III</b>	<b>Badan Keuangan dan Aset Daerah</b>			<b>2.080.764.640,11</b>
1	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	45,00	Perumahan Griya Jatiningor II	27.572.237,20
2	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	19,00	Perumahan Griya Jatiningor II	1.393.452,83
3	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	761,00	Perumahan Mekarsari 1	1.115.580,34
4	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	4.884,00	Perumahan Mekarsari 1	71.596.509,60
5	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	34,00	perumahan griya medal raharja	17.800.700,00
6	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	41,00	perumahan griya medal raharja	2.904.981,42
7	Bangunan Posyandu	27,00	Perumahan Mekarsari 2	84.764.552,40
8	Bangunan Posyandu	31,00	Perumahan Griya Jatiningor II	84.515.976,00
9	Bangunan Posyandu	12,00	Perumahan Griya Jatiningor II	33.143.520,00
10	Bangunan Posyandu	3.162,00	Perumahan Mekarsari 1	21.080.421,60
11	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	180,00	Perumahan Mekarsari 2	564.688.436,40
12	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	149,00	perumahan sindang amanah	525.058.120,00
13	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	11.646,00	Perumahan Mekarsari 1	77.641.552,80
14	Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain (dst)	58,00	perumahan sindang amanah	205.794.592,00
15	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2.232,00	Perumahan Mekarsari 1	148.802.976,00
16	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	27.368,00	Perumahan Mekarsari 1	2.628.834,23
17	Gedung Pos Jaga Permanen	11,00	Perumahan Mekarsari 2	34.226.398,80
18	Gedung Pos Jaga Permanen	14,00	Perumahan Griya Jatiningor II	37.783.612,80

No	Uraian	Luas M <sup>2</sup>	Alamat	Jumlah (Rp)
19	Gedung Pos Jaga Permanen	3,00	Jln. Kosera I,II dan III RT/RW 04/08 Kelurahan Kota Kaler Kecamatan Sumedang Selatan	280.047,50
20	Gedung Pos Jaga Permanen	5,00	perumahan sindang amanah	17.619.400,00
21	Gedung Pos Jaga Permanen	5,00	Perumahan Mekarsari 3	17.619.400,00
22	Gedung Pos Jaga Permanen	822,00	Perumahan Mekarsari 1	5.480.109,60
23	Gedung Pos Jaga Permanen	1.518,00	Perumahan Mekarsari 1	1.604.196,59
24	Gedung Pos Jaga Permanen	2,00	perumahan griya medal raharja	4.762.000,00
25	Gedung Menara Peninjau Permanen	10,00	Perumahan Mekarsari 2	32.057.784,00
26	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	10,00	perumahan sindang amanah	33.829.248,00
27	Bangunan Gedung Kantor Permanen	64,00	Jl. Pangeran Sugih Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan	25.000.000,00
<b>TOTAL HIBAH MASUK</b>				<b>12.873.594.008,68</b>
<b>HIBAH KELUAR</b>				
<b>I</b>	<b>Dinas Pendidikan</b>			
1	TK CIJATI Kec. Situraja	64	Dusun Cijati RT 02 RW 05 Desa Cijati Kec Situraja	145.451.000,00
2	TK Bunga Dewi Kec. Tanjungsari	64	Perum Tanjungsari Permai Desa Raharja Kec. Tanjungsari	145.963.885,00
3	TK MELATI Kec. Tanjungsar	64	Jl. Lapangan Gudang Desa Gudang Kec. Tanjungsari	145.933.000,00
<b>TOTAL HIBAH KELUAR</b>				<b>437.347.885,00</b>

**Belanja Modal di LRA**  
**Aset Tetap : Jalan, Irigasi dan Jaringan**

NO	SKPD	Belanja Modal di LRA		
		2023	2022	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	DINAS KESEHATAN	0,00	8.300.000,00	(8.300.000,00)
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	151.007.232.305,00	100.394.546.661,00	50.612.685.644,00
3	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	21.184.378.956,00	8.394.096.785,00	12.790.282.171,00
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	104.950.000,00	0,00	104.950.000,00
4	DINAS PERHUBUNGAN	0,00	303495000,00	(303.495.000,00)
5	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	0,00	99967000,00	(99.967.000,00)
6	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1.875.419.000,00	5609445500,00	(3.734.026.500,00)
7	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	1.003.488.000,00	815.703.000,00	187.785.000,00
8	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	621.420.000,00	389.436.000,00	231.984.000,00
9	KECAMATAN UJUNGJAYA	0,00	69750000,00	(69.750.000,00)
	<b>JUMLAH</b>	<b>175.796.888.261,00</b>	<b>116.084.739.946,00</b>	<b>59.712.148.315,00</b>

**Rincian Hibah Jalan, Irigasi dan Jaringan  
Aset Tetap : Jalan, Irigasi dan Jaringan**

No	Uraian	Luas M <sup>2</sup>	Alamat	Jumlah (Rp)
<b>I</b>	<b>Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan</b>			<b>23.270.571.545,42</b>
1	Jalan khusus	169.105,98	Perumahan Giri Mukti Indah	227.516.403,06
2	Jalan khusus	187.106,26	Perumahan Giri Mukti Indah	61.745.814,23
3	Jalan khusus	327.616,63	Perumahan Giri Mukti Indah	101.536.125,39
4	Jalan khusus	169.105,98	Perumahan Villa Mutiara I	311.921.526,79
5	Jalan khusus	187.106,26	Perumahan Villa Mutiara I	154.774.298,27
6	Jalan khusus	327.616,63	Perumahan Villa Mutiara I	390.938.372,25
7	Jalan khusus	53.005,15	Perumahan Villa Mutiara I	5.130.898,52
8	Jalan khusus	169.105,98	Perumahan Villa Mutiara 2	169.027.176,61
9	Jalan khusus	53.005,15	Perumahan Villa Mutiara 3	20.890.813,76
10	Jalan khusus	327.616,63	Perumahan Parakanmuncang (SBG)	5.075.245.307,28
11	Jalan khusus	327.616,63	Perumahan Mekarsari Regency 4	436.807.976,61
12	Jalan khusus	327.616,63	Perumahan Ambar Tanjungsari Residence	4.327.349.287,27
13	Jalan khusus	222.243,90	Perumahan Anggrek Regency	694.201.712,77
14	Jalan khusus	327.616,63	Perumahan Bumi Ciptasari Kencana Asri	346.151.868,46
15	Jalan khusus	347.924,54	Perumahan Bumi Ciptasari Kencana Asri	12.625.485,71
16	Jalan khusus	187.106,26	Perumahan Bumi Ciptasari Kencana Asri	6.865.153,21
17	Jalan khusus	53.005,15	Perumahan Bumi Ciptasari Kencana Asri	45.862.600,03
18	Jalan khusus	327.616,63	Perumahan Bumi Mekar Jaya Indah (BMI)	1.607.920.797,34
19	Jalan khusus	53.005,15	Perumahan Bumi Mekar Jaya Indah (BMI)	63.737.060,32
20	Jalan khusus	327.616,63	Perumahan Griya Pesona Alam	6.735.470,30
21	Jalan khusus	187.106,26	Perumahan Griya Pesona Alam	628.904.929,02
22	Jalan khusus	327.616,63	Perumahan Kiara Pesona	117.615.287,50
23	Jalan khusus	53.005,15	Perumahan Korpri Jatinangor	25.722.339,19
24	Jalan khusus	53.005,15	Perumahan Korpri Jatinangor	41.376.244,13
25	Jalan khusus	327.616,63	Perumahan Lembu Sari Endah	1.232.880.349,68
26	Jalan khusus	169.105,98	Perumahan Bhayangkara Elok	903.148.264,47
27	Jalan khusus	222.243,90	Perumahan Kelapa Gading Permai	694.201.712,77
28	Bangunan pembuang pengaman sungai	52,00	Perumahan Giri Mukti Indah	32.923.342,40
29	Bangunan pembuang pengaman sungai	181,84	Perumahan villa mutiara I	148.992.276,93
30	Bangunan pembuang pengaman sungai	50,40	Perumahan villa mutiara II	43.172.781,12
31	Bangunan pembuang pengaman sungai	354,09	Perumahan villa mutiara II	332.611.024,67
32	Bangunan pelengkap air bersih/air baku	12,00	Perumahan villa mutiara 2	25.637.638,79
33	Bangunan pelengkap air bersih/air baku	5,53	Perumahan villa mutiara 2	11.814.678,54
34	Bangunan pengaman pengaman sungai/pantai	23,65	Perumahan villa mutiara 2	20.258.656,22
35	Bangunan pembuang pengaman sungai	1.012,46	Perumahan Parakanmuncang (SBG)	433.638.035,44
36	Bangunan pengambilan pengembangan sumber air	3,00	Perumahan Parakanmuncang (SBG)	414.000.000,00
37	Bangunan pembuang pengaman sungai	39,60	Perumahan Mekarsari Regency 4	36.133.740,72
38	Bangunan pembuang pengaman sungai	1.098,92	Perumahan Ambar Tanjungsari Residence	839.018.606,70
39	Bangunan pembuang pengaman sungai	389,63	Perumahan Anggrek Regency	253.946.581,33
40	Bangunan pelengkap air kotor	796,49	Perumahan Anggrek Regency	569.263.735,85
41	Bangunan pembuang pengaman sungai	43,18	Perumahan Bumi Ciptasari Kencana Asri	19.298.143,78
42	Bangunan pelengkap air bersih/air baku	26,96	Perumahan Bumi Ciptasari Kencana Asri	11.928.380,21
43	Bangunan pembuang pengaman sungai	326,56	Perumahan Bumi Mekar Jaya Indah (BMI)	261.488.973,85
44	Bangunan pembuang pengaman sungai	726,46	Perumahan Griya Pesona Alam	473.479.748,98
45	Bangunan pembuang pengaman sungai	30,74	Perumahan Kiara Pesona	22.324.931,15
46	Bangunan pembuang pengaman sungai	86,40	Perumahan Korpri Jatinangor	12.871.388,16
47	Bangunan pembuang pengaman sungai	881,68	Perumahan Lembu Sari Endah	410.461.715,60
48	Bangunan pelengkap air bersih/air baku	15,60	Perumahan Lembu Sari Endah	30.030.000,00
49	Bangunan pembuang pengaman sungai	570,71	Perumahan Bhayangkara Elok	329.457.071,82
50	Bangunan pembuang pengaman sungai	389,63	Perumahan Kelapa Gading Permai	253.946.581,33
51	Bangunan pelengkap air kotor	796,49	Perumahan Kelapa Gading Permai	569.263.735,85
52	Bangunan pengaman pengaman sungai/pantai	5,20	Perumahan Kiara Pesona	3.776.501,04
<b>II</b>	<b>Badan Keuangan dan Aset Daerah</b>			<b>3.444.674.578,70</b>
1	Jalan Khusus Kompleks	1,29	Perumahan Mekarsari 2	108.352.969,82
2	Jalan Khusus Kompleks	929,00	Perumahan Mekarsari 2	76.276.561,97

No	Uraian	Luas M <sup>2</sup>	Alamat	Jumlah (Rp)
3	Jalan Khusus Kompleks	101,00	Perumahan Mekarsari 2	7.560.191,46
4	Jalan Khusus Kompleks	6,24	Perumahan Griya Jatinangor II	798.098.678,85
5	Jalan Khusus Kompleks	7,52	Perumahan Griya Jatinangor II	554.526.395,66
6	Jalan Khusus Kompleks	2,64	Perumahan Griya Jatinangor II	173.190.358,07
7	Jalan Khusus Kompleks	63,00	Perumahan Dano Permai	1.922.003,90
8	Jalan Khusus Kompleks	2,13	Perumahan Dano Permai	57.829.974,49
9	Jalan Khusus Kompleks	98,00	Jln. Kosera I,II dan III RT /RW 04/08 Kelurahan Kota Kaler Kecamatan Sumedang Selatan	1.736.922,04
10	Jalan Khusus Kompleks	689,00	Perumahan Sindang Amanah	115.119.459,14
11	Jalan Khusus Kompleks	1,31	Perumahan Sindang Amanah	158.916.332,40
12	Jalan Khusus Kompleks	2,89	Perumahan Sindang Amanah	241.675.272,65
13	Jalan Khusus Kompleks	498,00	Perumahan Rancamulya Indah	25.878.439,13
14	Jalan Khusus Kompleks	2,70	Perumahan Mekarsari 3	225.393.387,48
15	Jalan Khusus Kompleks	5,46	Perumahan Mekarsari 1	125.221.392,20
16	Jalan Khusus Kompleks	1,18	Perumahan Mekarsari 1	37.134.489,60
17	Jalan Khusus Kompleks	132,00	Perumahan Mekarsari 1	710.868,25
18	Jalan Khusus Kompleks	1,17	Perumahan Griya Medal Raharja	66.082.765,53
19	Jalan Khusus Pejalan Kaki(Trotoar)	65,00	Perumahan Mekarsari 2	9.495.967,72
20	Jalan lainnya	79,00	Perumahan Mekarsari 2	3.573.288,51
21	Jalan lainnya	50,00	Perumahan Griya Jatinangor II	6.445.747,79
22	Jalan lainnya	298,00	Perumahan Dano Permai	4.907.040,12
23	Jalan lainnya	178,00	Perumahan Sindang Amanah	29.090.361,85
24	Jalan lainnya	45,00	Perumahan Griya Medal Raharja	1.543.741,65
25	Saluran Drainage	82,00	Perumahan Mekarsari 2	56.682.873,72
26	Saluran Drainage	448,00	Perumahan Griya Jatinangor II	272.090.610,36
27	Saluran Drainage	56,00	Perumahan Dano Permai	14.168.519,52
28	Saluran Drainage	82,00	Jln. Kosera I,II dan III RT /RW 04/08 Kelurahan Kota Kaler Kecamatan Sumedang Selatan	12.010.446,42
29	Saluran Drainage	330,00	Jln. Kosera I,II dan III RT /RW 04/08 Kelurahan Kota Kaler Kecamatan Sumedang Selatan	3.165.109,49
30	Saluran Drainage	149,00	Perumahan Sindang Amanah	115.127.807,32
31	Saluran Drainage	18,00	Perumahan Rancamulya Indah	8.429.155,00
32	Saluran Drainage	61,00	Perumahan Mekarsari 3	47.025.889,26
33	Saluran Drainage	178,00	Perumahan Mekarsari 1	26.057.083,50
34	Saluran Drainage	108,00	Perumahan Griya Medal Raharja	56.621.932,50
35	Bangunan Plat Deker	10,00	Perumahan Sindang Amanah	2.612.541,33
<b>TOTAL HIBAH MASUK</b>				<b>26.715.246.124,12</b>



**Belanja Modal di LRA**  
**Aset Tetap : Aset Tetap Lainnya**

NO	SKPD	Belanja Modal di LRA		
		2023	2022	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN	17.999.854.814,00	15.256.577.993,00	2.743.276.821,00
2	DINAS KESEHATAN	0,00	1.350.000,00	(1.350.000,00)
3	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	49.894.000,00	0,00	49.894.000,00
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	118.878.225,00	0,00	118.878.225,00
5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	89.910.000,00	(89.910.000,00)
6	DINAS PERHUBUNGAN	49.950.000,00		49.950.000,00
7	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	237.524.123,00	216556780,00	20.967.343,00
8	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
9	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	779.650.000,00	1.537.795.033,00	(758.145.033,00)
10	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	0,00	73815000,00	(73.815.000,00)
11	SEKRETARIAT DAERAH	13.500.000,00	62.493.000,00	(48.993.000,00)
12	SEKRETARIAT DPRD	25.000.000,00	50000000,00	(25.000.000,00)
13	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	24.975.000,00	89.993.250,00	(65.018.250,00)
14	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)
15	BADAN PENDAPATAN DAERAH	0,00	24975000,00	(24.975.000,00)
16	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	49000000,00	(49.000.000,00)
17	INSPEKTORAT	0,00	49500000,00	(49.500.000,00)
18	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	0,00	20000000,00	(20.000.000,00)
	<b>JUMLAH</b>	<b>19.324.226.162,00</b>	<b>17.526.966.056,00</b>	<b>1.797.260.106,00</b>

**Reklas ke Aset Lainnya**  
**Aset Tetap : Aset Tetap Lainnya**

NO	SKPD	Belanja Modal di LRA		
		2023	2022	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	49.894.000,00	0,00	49.894.000,00
4	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	89.910.000,00	(89.910.000,00)
	DINAS PERHUBUNGAN	49.950.000,00	0,00	49.950.000,00
5	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	237.524.123,00	216.556.780,00	20.967.343,00
6	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
7	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	0,00	73.815.000,00	(73.815.000,00)
8	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	29.970.000,00	(29.970.000,00)
9	SEKRETARIAT DPRD	25.000.000,00	50.000.000,00	(25.000.000,00)
10	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	24.975.000,00	89.993.250,00	(65.018.250,00)
11	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)
12	BADAN PENDAPATAN DAERAH	0,00	24.975.000,00	(24.975.000,00)
13	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	49.000.000,00	(49.000.000,00)
14	INSPEKTORAT	0,00	49.500.000,00	(49.500.000,00)
15	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	0,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)
	<b>JUMLAH</b>	<b>412.343.123,00</b>	<b>698.720.030,00</b>	<b>(286.376.907,00)</b>

## RINCIAN KONTRAK KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan (KDP) TA 2023

NO	SUB KEGIATAN	NAMA PEKERJAAN	NAMA PENYEDIA	NILAI KONTRAK	URAIAN	REALISASI				SISA KONTRAK	Jangka Waktu Penyelesaian	Tingkat Penyelesaian (%)
						1	2	3	JUMLAH			
1	Rekonstruksi Jalan	Pekerjaan rekonstruksi ruas jalan Cisumur - Nangerang/Bts Kab Subang (wilayah 8)	PT. BUMI MARGA KONSTRUKSI	1.534.205.437,00	Pekerjaan rekonstruksi ruas jalan Cisumur - Nangerang/Bts Kab Subang (wilayah 8) sub kegiatan rekonstruksi jalan, sesuai SP no: 32/01.08/SP/PPK-BM/DPUTR /IX/2023 tanggal 12 September 2023 nilai kontrak Rp. 1.534.205.437 atas nama PT. BUMI MARGA KONSTRUKSI	460.261.631,00	779.553.408,00	-	1.239.815.039,00	294.390.398,00	100 hari	68,78 %
2	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pekerjaan pembangunan baru SPAM jaringan perpipaan Desa Licin Kecamatan Cimilaka	CV. Karang Mulya	575.186.326,00	Pembayaran termyn (42,99%) Pekerjaan pembangunan baru SPAM jaringan perpipaan Desa Licin Kecamatan Cimilaka sub kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan sesuai SP no: 04/SP/PPK/SPAM-LICIN/DPU TR/2023 tanggal 20 Juli 2023 Nilai Kontrak Rp. 575.186.326 atas nama CV. Karang Mulya	103.493.109,00	143.796.582,00	-	247.289.691,00	327.896.635,00	120 Hari	42,99%
3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pekerjaan pembangunan baru SPAM jaringan perpipaan Desa Padasuka Kecamatan Sumedang Utara	CV. PRATAMA SAKTI INTERNUSA	582.625.696,00	Pembayaran termyn (87,47%) Pekerjaan pembangunan baru SPAM jaringan perpipaan Desa Padasuka Kecamatan Sumedang Utara sub kegiatan pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasa perdesaan, sesuai SP no: 04/SP/PPK/SPAM-PADASUKA /DPUTR/2023 tanggal 20 Juli 2023 nilai kontrak Rp. 582.625.696,00 atas nama CV. PRATAMA SAKTI INTERNUSA	509.644.619,00	-	-	509.644.619,00	72.981.077,00	120 Hari	87,47%
4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pekerjaan pembangunan baru SPAM jaringan perpipaan Desa Cikondang Kecamatan Ganeas	CV. KARANG MULYA	654.485.570,00	Pekerjaan pembangunan baru SPAM jaringan perpipaan Desa Cikondang Kecamatan Ganeas sub kegiatan pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasa perdesaan, sesuai SP no: 04/SP/PPK/SPAM-CIKONDAN G/DPUTR/2023 tanggal 20 Juli 2023 dan ADD no: 014/ADD/SP/PPK/SPAM-CIKO NDANG/DPUTR/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 nilai kontrak Rp 654.485.570 atas nama CV. KARANG MULYA	294.518.507,00	226.595.740,00	-	521.114.247,00	133.371.323,00	120 Hari	79,63%
5	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Pembangunan Lanjutan Menara Panenjoan Jatigede	PT. Intimas Energi Utama	18.371.828.135,00	Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Menara Panenjoan Jatigede, sesuai SP No. : 04/SP/PPK/PEM-MPANENJOAN/DPUTR/2022, tanggal 15 Juni 2022, Nilai Kontrak Rp. 18.371.828.135,- atas nama PT. Intimas Energi Utama	4.086.629.400,00	2.724.419.600,00	3.405.524.500,00	10.216.573.500,00	8.155.254.635,00	196 Hari	92,5%
6	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Pengadaan Lift Menara Al-Kamil Panenjoan Kecamatan Jatigede	PT. IMTEK TRIVISHAKA HADITHAMA	929.784.450,00	Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan pengadaan lift Menara Al-Kamil Panenjoan Kecamatan Jatigede sub kegiatan penataan bangunan dan lingkungannya, sesuai Sp no: 04/SP/PPK/LIFT-MPANENJOAN/DPUTR/2022 tanggal 28 November 2022 nilai Kontrak Rp. 924.624.450,00	929.784.450,00	-	-	929.784.450,00	-	35 Hari	100% (administrasi tidak lengkap)
<b>JUMLAH</b>				<b>22.648.115.614,00</b>		<b>6.384.331.716,00</b>	<b>3.874.365.330,00</b>	<b>3.405.524.500,00</b>	<b>13.664.221.546,00</b>	<b>8.983.894.068,00</b>		

**Akumulasi Penyusutan**  
**Aset Tetap : Akumulasi Penyusutan**

NO	SKPD	PERALATAN MESIN			GEDUNG DAN BANGUNAN			JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI			T O T A L		
		2023	2022	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	2023	2021	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN	569.905.044.481,00	454.726.042.993,00	115.179.001.488,00	338.500.144.671,00	306.471.166.822,00	32.028.977.849,00	679.737.215,00	638.064.145,00	41.673.070,00	909.084.926.367,00	761.835.273.960,00	147.249.652.407,00
2	DINAS KESEHATAN	313.311.140.326,00	278.733.298.920,00	34.577.841.406,00	113.907.152.483,00	106.983.354.692,00	6.923.797.791,00	6.614.127.172,00	5.472.983.416,00	1.141.143.756,00	433.832.419.981,00	391.189.637.028,00	42.642.782.953,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	19.926.894.493,00	19.289.799.122,00	637.095.371,00	8.788.651.961,00	5.851.483.060,00	2.937.168.901,00	1.977.959.864.828,00	1.814.460.691.915,00	163.499.172.913,00	2.006.675.411.282,00	1.839.601.974.097,00	167.073.437.185,00
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	5.319.449.710,00	4.716.536.797,00	602.912.913,00	18.599.241.502,00	12.964.188.703,00	5.635.052.799,00	207.428.026.221,00	177.406.526.376,00	30.021.499.845,00	231.346.717.433,00	195.087.251.876,00	36.259.465.557,00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	10.200.008.361,00	9.702.456.645,00	497.551.716,00	2.336.185.762,00	2.279.200.332,00	56.985.430,00	0,00	0,00	0,00	12.536.194.123,00	11.981.656.977,00	554.537.146,00
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.140.671.930,00	3.931.219.248,00	209.452.682,00	444.124.973,00	391.356.024,00	52.768.949,00	2.809.115.950,00	2.216.190.267,00	592.925.683,00	7.393.912.853,00	6.538.765.539,00	855.147.314,00
7	DINAS SOSIAL	4.354.300.503,00	3.744.285.911,00	610.014.592,00	1.059.419.221,00	916.838.997,00	142.580.224,00	288.927.298,00	253.044.548,00	35.882.750,00	5.702.647.022,00	4.914.169.456,00	788.477.566,00
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	8.019.226.170,00	7.275.769.129,00	743.457.041,00	4.314.056.332,00	3.704.310.807,00	609.745.525,00	29.004.000,00	27.504.000,00	1.500.000,00	12.362.286.502,00	11.007.583.936,00	1.354.702.566,00
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	20.846.810.179,00	18.825.893.851,00	2.020.916.328,00	12.275.197.827,00	10.528.449.771,00	1.746.748.056,00	4.549.916.042,00	4.389.825.275,00	160.090.767,00	37.671.924.048,00	33.744.168.897,00	3.927.755.151,00
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.713.151.338,00	6.452.587.720,00	1.260.563.618,00	352.137.433,00	310.868.724,00	41.268.709,00	0,00	0,00	0,00	8.065.288.771,00	6.763.456.444,00	1.301.832.327,00
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.840.029.427,00	3.336.992.353,00	503.037.074,00	1.024.912.368,00	508.951.454,00	515.960.914,00	0,00	8.197.650,00	(8.197.650,00)	4.864.941.795,00	3.854.141.457,00	1.010.800.338,00
12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	11.639.359.879,00	10.569.117.626,00	1.070.242.253,00	2.094.632.708,00	1.826.191.901,00	268.440.807,00	0,00	0,00	0,00	13.733.992.587,00	12.395.309.527,00	1.338.683.060,00
13	DINAS PERHUBUNGAN	30.054.388.264,00	25.180.193.193,00	4.874.195.071,00	5.628.315.252,00	4.985.641.485,00	642.673.767,00	24.320.338.743,00	22.507.116.849,00	1.813.221.894,00	60.003.042.259,00	52.672.951.527,00	7.330.090.732,00
14	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	9.649.992.824,00	8.208.442.014,00	1.441.550.810,00	867.674.500,00	678.290.208,00	189.384.292,00	7.750.000,00	6.250.000,00	1.500.000,00	10.525.417.324,00	8.892.982.222,00	1.632.435.102,00
15	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	6.798.923.122,00	6.264.843.242,59	534.079.879,41	15.841.093.365,00	14.655.174.128,00	1.275.919.237,00	4.587.907.947,00	4.278.116.518,00	309.791.429,00	27.227.924.434,00	25.108.133.888,59	2.119.790.545,41
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	8.071.780.923,00	7.324.685.397,89	747.095.525,11	1.389.761.988,00	1.079.241.874,00	310.520.114,00	88.529.298,00	80.041.454,00	8.487.844,00	9.550.072.209,00	8.483.968.725,89	1.066.103.483,11
17	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	6.751.489.755,00	5.352.423.101,00	1.399.066.654,00	1.790.332.725,00	1.251.738.715,00	538.594.010,00	0,00	0,00	0,00	8.541.822.480,00	6.604.161.816,00	1.937.660.664,00
18	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	8.315.251.630,00	6.416.805.110,00	1.898.446.520,00	5.779.377.007,00	4.519.381.003,00	1.259.996.004,00	3.122.308.946,00	2.919.170.862,00	203.138.084,00	17.216.937.583,00	13.855.356.975,00	3.361.580.608,00
19	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA	6.070.254.156,00	5.123.629.529,00	946.624.627,00	18.825.086.875,00	15.031.206.068,00	3.793.880.807,00	3.703.102.619,00	3.230.216.821,00	472.885.798,00	28.598.443.650,00	23.385.052.418,00	5.213.391.232,00
20	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	14.588.151.911,00	13.261.911.434,00	1.326.240.477,00	9.697.006.381,00	8.482.936.895,00	1.214.069.486,00	1.098.863.466,00	998.466.704,00	100.396.762,00	25.384.021.758,00	22.743.315.033,00	2.640.706.725,00
21	SEKRETARIAT DAERAH	47.907.252.230,00	45.294.819.870,00	2.612.432.360,00	29.960.675.657,00	29.438.868.386,00	521.807.271,00	1.016.351.591,00	1.355.876.503,00	(339.524.912,00)	78.884.279.478,00	76.089.564.759,00	2.794.714.719,00
22	SEKRETARIAT DPRD	10.889.245.842,00	9.668.044.774,00	1.221.201.068,00	2.613.230.250,00	2.457.582.790,00	155.647.460,00	75.688.544,00	75.688.544,00	0,00	13.578.164.636,00	12.201.316.108,00	1.376.848.528,00
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	10.360.120.463,00	9.796.489.439,00	563.631.024,00	4.470.034.549,00	4.077.160.403,00	392.874.146,00	98.234.574,00	93.034.862,00	5.199.712,00	14.928.389.586,00	13.966.684.704,00	961.704.882,00
24	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	13.989.278.558,00	12.463.546.581,00	1.525.731.977,00	4.430.949.660,00	3.541.735.325,00	889.214.335,00	255.339.741,00	168.816.999,00	86.522.742,00	18.675.567.959,00	16.174.098.905,00	2.501.469.054,00
25	BADAN PENDAPATAN DAERAH	10.507.211.107,00	9.665.191.843,00	842.019.264,00	4.699.838.934,00	4.207.431.790,00	492.407.144,00	10.739.167,00	8.109.167,00	2.630.000,00	15.217.789.208,00	13.880.732.800,00	1.337.056.408,00
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.113.135.539,00	2.747.007.489,00	366.128.050,00	3.325.497.215,00	3.072.107.924,00	253.389.291,00	9.475.000,00	9.475.000,00	0,00	6.448.107.754,00	5.828.590.413,00	619.517.341,00
27	INSPEKTORAT	4.915.608.065,00	4.120.396.116,00	795.211.949,00	658.584.958,00	590.761.790,00	67.823.168,00	0,00	0,00	0,00	5.574.193.023,00	4.711.157.906,00	863.035.117,00
28	KECAMATAN WADO	1.417.438.618,00	1.253.979.054,00	163.459.564,00	1.158.270.734,00	1.077.846.384,00	80.424.350,00	8.982.171,00	6.145.696,00	2.836.475,00	2.584.691.523,00	2.337.971.134,00	246.720.389,00
29	KECAMATAN JATINUNGAL	1.540.879.397,00	1.341.347.641,00	199.531.756,00	645.912.924,00	415.530.518,00	230.382.406,00	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	2.196.042.321,00	1.766.128.159,00	429.914.162,00
30	KECAMATAN DARMARAJA	1.719.653.248,00	1.563.698.266,00	155.954.982,00	799.640.615,00	713.033.694,00	86.606.921,00	8.505.667,00	5.819.667,00	2.686.000,00	2.527.799.530,00	2.282.551.627,00	245.247.903,00
31	KECAMATAN CIBUGEL	1.503.774.942,00	1.358.656.931,00	145.118.011,00	303.462.012,00	275.791.740,00	27.670.272,00	0,00	0,00	0,00	1.807.236.954,00	1.634.448.671,00	172.788.283,00
32	KECAMATAN CISITU	1.382.133.796,00	1.222.308.210,00	159.825.586,00	1.606.607.497,00	1.077.183.187,00	529.424.310,00	0,00	0,00	0,00	2.988.741.293,00	2.299.491.397,00	689.249.896,00
33	KECAMATAN SITURAJA	1.930.010.606,00	1.702.946.443,00	227.064.163,00	1.285.449.018,00	1.213.102.784,00	72.346.234,00	0,00	0,00	0,00	3.215.459.624,00	2.916.049.227,00	299.410.397,00
34	KECAMATAN CONGGANG	1.832.242.641,00	1.610.078.588,00	222.164.053,00	1.122.840.348,00	971.204.876,00	151.635.472,00	0,00	0,00	0,00	2.955.082.989,00	2.581.283.464,00	373.799.525,00
35	KECAMATAN PASEH	1.542.956.605,00	1.351.012.044,00	191.944.561,00	866.915.997,00	780.588.391,00	86.327.606,00	150.621.192,00	133.073.092,00	17.548.100,00	2.560.493.794,00	2.264.673.527,00	295.820.267,00
36	KECAMATAN SURIAN	1.583.720.788,00	1.388.972.998,00	194.747.790,00	689.939.078,00	647.676.828,00	42.262.250,00	0,00	0,00	0,00	2.273.659.866,00	2.036.649.826,00	237.010.040,00
37	KECAMATAN BUAHDUA	1.351.159.601,00	1.143.588.668,00	207.570.933,00	1.287.838.023,00	1.178.577.939,00	109.260.084,00	11.351.042,00	9.748.542,00	1.602.500,00	2.650.348.666,00	2.331.915.149,00	318.433.517,00
38	KECAMATAN TANJUNGSARI	1.664.716.586,00	1.429.388.761,00	235.327.825,00	725.350.821,00	614.648.085,00	110.702.736,00	0,00	0,00	0,00	2.390.067.407,00	2.046.036.846,00	346.030.561,00
39	KECAMATAN SUKASARI	1.344.293.632,00	1.159.946.036,27	184.347.595,73	865.078.804,00	789.464.203,00	75.614.601,00	0,00	0,00	0,00	2.209.372.436,00	1.949.410.239,27	259.962.196,73
40	KECAMATAN PAMULIHAN	1.589.342.485,00	1.364.994.076,00	224.348.409,00	774.725.075,00	682.678.002,00	92.047.073,00	0,00	0,00	0,00	2.364.067.560,00	2.047.672.078,00	316.395.482,00
41	KECAMATAN CIMANGGUNG	1.918.391.715,00	1.603.583.244,00	314.808.471,00	847.487.209,00	495.226.995,00	352.260.214,00	88.899.999,00	88.899.999,00	0,00	2.854.778.923,00	2.187.710.238,00	667.068.685,00
42	KECAMATAN JATINANGOR	2.228.668.074,00	1.827.988.549,00	400.679.525,00	513.906.064,00	332.558.090,00	181.347.974,00	9.188.333,00	6.208.333,00	2.980.000,00	2.751.762.471,00	2.166.754.972,00	585.007.499,00
43	KECAMATAN RANCAKALONG	1.495.371.393,00	1.320.661.454,00	174.709.939,00	630.733.103,00	574.400.628,00	56.332.475,00	0,00	0,00	0,00	2.126.104.496,00	1.895.062.082,00	231.042.414,00
44	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	3.528.491.407,00	3.101.171.506,00	427.319.901,00	2.148.457.487,00	1.901.896.868,00	246.560.619,00	1.243.755.411,00	759.461.117,00	484.294.294,00	6.920.704.305,00	5.762.529.491,00	1.158.174.814,00
45	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	4.571.477.369,00	4.059.612.415,00	511.864.954,00	2.326.162.169,00	2.012.711.301,00	313.450.868,00	403.376.344,00	230.297.565,00	173.078.776,00	7.301.015.879,00	6.302.621.281,00	998.394.598,00
46	KECAMATAN GANEAS	1.407.045.844,00	1.226.742.347,00	180.303.497,00	1.008.127.289,00	925.111.828,00	83.015.461,00	0,00	0,00	0,00	2.415.173.133,00	2.151.854.175,00	263.318.958,00
47	KECAMATAN TANJUNGPURA	1.462.039.455,00	1.244.020.944,00	218.018.511,00	838								

NO	SKPD	PERALATAN MESIN			GEDUNG DAN BANGUNAN			JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI			T O T A L		
		2023	2022	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	2023	2021	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
48	KECAMATAN TANJUNGMEDAR	1.627.544.407,00	1.479.986.680,00	147.557.727,00	1.158.343.135,00	1.044.748.164,00	113.594.971,00	0,00	0,00	0,00	2.785.887.542,00	2.524.734.844,00	261.152.698,00
49	KECAMATAN CIMALAKA	1.750.245.378,00	1.511.282.098,00	238.963.280,00	783.940.594,00	623.022.895,00	160.917.699,00	19.874.000,00	19.874.000,00	0,00	2.554.059.972,00	2.154.178.993,00	399.880.979,00
50	KECAMATAN CISARUA	1.573.432.560,00	1.279.093.454,00	294.339.106,00	445.759.636,00	378.809.283,00	66.950.353,00	0,00	0,00	0,00	2.019.192.196,00	1.657.902.737,00	361.289.459,00
51	KECAMATAN TOMO	1.371.140.299,00	1.175.284.305,00	195.855.994,00	434.060.471,00	377.298.050,00	56.762.421,00	0,00	0,00	0,00	1.805.200.770,00	1.552.582.355,00	252.618.415,00
52	KECAMATAN UJUNGJAYA	1.855.590.528,00	1.606.389.355,00	249.201.173,00	649.493.343,00	573.509.108,00	75.984.235,00	41.187.350,00	30.255.750,00	10.931.600,00	2.546.271.221,00	2.210.154.213,00	336.117.008,00
53	KECAMATAN JATIGEDE	1.569.225.825,00	1.378.471.847,00	190.753.978,00	528.882.532,00	434.396.728,00	94.485.804,00	184.686.923,00	172.922.203,00	11.764.720,00	2.282.795.280,00	1.985.790.778,00	297.004.502,00
54	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.260.849.512,00	2.408.844.293,00	852.005.219,00	145.014.776,00	0,00	145.014.776,00	10.019.350,00	0,00	10.019.350,00	3.415.883.638,00	2.408.844.293,00	1.007.039.345,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.221.220.007.897,00</b>	<b>1.035.306.479.655,75</b>	<b>185.913.528.241,25</b>	<b>638.264.549.606,00</b>	<b>571.531.506.014,00</b>	<b>66.733.043.592,00</b>	<b>2.240.943.046.141,00</b>	<b>2.042.075.363.839,00</b>	<b>198.867.682.302,00</b>	<b>4.100.427.603.644,00</b>	<b>3.648.913.349.508,75</b>	<b>451.514.254.135,25</b>

## PENYESUAIAN PENGURANGAN ASET LAINNYA TGR TAHUN 2023

No.	Nama	Jabatan	LHPK	Jumlah Kerugian	Sisa TGR per 31 Desember 2022	Sisa TGR per 31 Desember 2023	Nilai yang dibayar pada 2023
1	ANDRY SUTISNA SUDRAJAT,S.Pd (Mobil Dinas)	Pengelola pada BPMPDKBPP Sumedang	-	60.000.000,00	54.000.000,00	51.000.000,00	3.000.000,00
2	AA SUJANA (Motor Dinas)	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD Sumedang	-	14.026.000,00	12.026.000,00	10.026.000,00	2.000.000,00
3	SARJONO S. Hut., MM. (Motor Dinas)	Kepala UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan Wilayah Ujungjaya pada DPKP Sumedang	LHP No: 700/01/Riksus- TGR/Inspektorat/2020, tanggal 15 Juni 2020	16.250.000,00	14.250.000,00	13.250.000,00	1.000.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>90.276.000,00</b>	<b>80.276.000,00</b>	<b>74.276.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>

**Aset Tidak Berwujud (Lisensi/Frenchise dan Software)**  
**Aset Lainnya : Aset Tak Berwujud**

NO	SKPD	Aset Tidak Berwujud (Lisensi/Frenchise dan Software)		
		2023	2022	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN	34.628.446.664,39	34.628.446.664,39	0,00
2	DINAS KESEHATAN	4.763.364.243,60	1.877.036.743,60	2.886.327.500,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	481.836.999,80	481.836.999,80	0,00
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	105.922.344,80	56.028.344,80	49.894.000,00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12.628.344,80	12628344,80	0,00
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	12.628.344,80	12628344,80	0,00
7	DINAS SOSIAL	178.028.344,80	178.028.344,80	0,00
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	325.333.344,80	325.333.344,80	0,00
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	22.628.344,80	22.628.344,80	0,00
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	296.208.344,80	296.208.344,80	0,00
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	28.478.344,80	28.478.344,80	0,00
12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	12.628.344,80	12628344,80	0,00
13	DINAS PERHUBUNGAN	135.878.344,80	85.928.344,80	49.950.000,00
14	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	510.629.247,80	235105124,80	275.524.123,00
15	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	395.304.844,80	370.304.844,80	25.000.000,00
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	12.628.344,80	12628344,80	0,00
17	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	117.354.510,50	117.354.510,50	0,00
18	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	19.628.344,80	19.628.344,80	0,00
19	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	418.994.844,80	418.994.844,80	0,00
20	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	424.618.344,80	424.618.344,80	0,00
21	SEKRETARIAT DAERAH	487.315.250,17	487.315.250,17	0,00
22	SEKRETARIAT DPRD	369.678.344,80	344.678.344,80	25.000.000,00
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	917.649.844,80	892.674.844,80	24.975.000,00
24	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.911.812.452,80	1.911.812.452,80	0,00
25	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1.258.629.318,80	1.258.629.318,80	0,00
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	144.408.344,80	144.408.344,80	0,00
27	INSPEKTORAT	262.273.244,80	262.273.244,80	0,00
28	KECAMATAN WADO	40.526.728,90	40.526.728,90	0,00
29	KECAMATAN JATINUNGGAL	12.626.728,90	12626728,90	0,00
30	KECAMATAN DARMARAJA	52.426.728,90	52.426.728,90	0,00
31	KECAMATAN CIBUGEL	32.626.728,90	32.626.728,90	0,00
32	KECAMATAN CISITU	42.626.728,90	42.626.728,90	0,00
33	KECAMATAN SITURAJA	54.626.728,90	54.626.728,90	0,00
34	KECAMATAN CONGGEANG	50.556.728,90	50.556.728,90	0,00
35	KECAMATAN PASEH	42.121.728,90	42.121.728,90	0,00
36	KECAMATAN SURIAN	12.626.728,90	12626728,90	0,00
37	KECAMATAN BUAHDUA	12.626.728,90	12626728,90	0,00
38	KECAMATAN TANJUNGSARI	64.306.728,90	64.306.728,90	0,00
39	KECAMATAN SUKASARI	53.176.728,90	53.176.728,90	0,00
40	KECAMATAN PAMULIHAN	57.156.728,90	57.156.728,90	0,00
41	KECAMATAN CIMANGGUNG	42.626.728,90	42.626.728,90	0,00
42	KECAMATAN JATINANGOR	59.326.728,90	59.326.728,90	0,00
43	KECAMATAN RANCAKALONG	12.626.728,90	12626728,90	0,00
44	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	148.376.728,90	148.376.728,90	0,00
45	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	101.776.728,90	101.776.728,90	0,00
46	KECAMATAN GANEAS	52.226.728,90	52226728,90	0,00
47	KECAMATAN TANJUNGPURA	23.926.728,90	23.926.728,90	0,00
48	KECAMATAN TANJUNGMEDAR	31.476.728,90	31.476.728,90	0,00
49	KECAMATAN CIMALAKA	38.451.728,90	38.451.728,90	0,00
50	KECAMATAN CISARUA	28.926.728,90	28.926.728,90	0,00

## Lampiran 33 - Rincian Aset Tidak Berwujud

NO	SKPD	Aset Tidak Berwujud (Lisensi/Frenchise dan Software)		
		2023	2022	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
51	KECAMATAN TOMO	12.626.728,90	12626728,90	0,00
52	KECAMATAN UJUNGJAYA	69.801.728,90	69.801.728,90	0,00
53	KECAMATAN JATIGEDE	46.726.728,90	46.726.728,90	0,00
54	BADAN KESATUAN BANGSA	12.628.344,80	12628344,80	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>49.464.493.935,26</b>	<b>46.127.823.312,26</b>	<b>3.336.670.623,00</b>



Aset Lain-lain (Kondisi Rusak Berat)  
Aset Lainnya : Aset Lain-lain

NO	SKPD	NILAI PEROLEHAN													Total Saldo Akhir Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	NILAI BUKU
		PERALATAN DAN MESIN				GEDUNG DAN BANGUNAN			JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN			ASET TETAP LAINNYA					
		Saldo Awal (Harga Perolehan)	Reklas dari Peralatan dan Mesin	Penghapusan	Saldo Akhir	Saldo Awal (Harga Perolehan)	Penghapusan	Saldo Akhir	Saldo Awal (Harga Perolehan)	Penghapusan	Saldo Akhir	Saldo Awal (Harga Perolehan)	Penghapusan	Saldo Akhir			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	DINAS PENDIDIKAN	3.511.730.890,35	132.481.000,00	0,00	3.644.211.890,35	19.141.872.945,28	0,00	19.141.872.945,28	0,00	0,00	0,00	752.100.486,30	0,00	752.100.486,30	23.538.185.321,93	(22.451.109.587,00)	1.087.075.734,93
2	DINAS KESEHATAN	4.168.784.570,00	2.073.832.677,00	26.500.000,00	6.216.117.247,00	107.002.168,00	0,00	107.002.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.323.119.415,00	(4.195.905.931,00)	2.127.213.484,00	
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	547.467.580,00	0,00	0,00	547.467.580,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.467.580,00	(622.467.579,00)	1,00
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	16.790.000,00	0,00	0,00	16.790.000,00	197.711.000,00	0,00	197.711.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.501.000,00	(57.155.996,00)	157.345.004,00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	111.359.000,00	0,00	0,00	111.359.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.359.000,00	(111.359.000,00)	0,00
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	12.050.000,00	0,00	0,00	12.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.050.000,00	(12.050.000,00)	0,00
7	DINAS SOSIAL	171.479.779,66	0,00	71.428.779,66	100.051.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.051.000,00	(100.051.000,00)	0,00
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	316.156.108,00	0,00	0,00	316.156.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.086.000,00	0,00	10.086.000,00	326.242.108,00	(316.156.107,00)	10.086.001,00
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	4.727.052.382,50	0,00	1.493.156.755,50	3.233.895.627,00	0,00	0,00	0,00	194.000.000,00	0,00	194.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.427.895.627,00	(3.427.895.627,00)	0,00
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	578.706.686,18	0,00	544.684.686,18	34.022.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.022.000,00	(34.022.000,00)	0,00
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	150.505.000,00	0,00	0,00	150.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.505.000,00	(150.505.000,00)	0,00
13	DINAS PERHUBUNGAN	692.677.119,04	315.008.440,00	0,00	1.007.685.559,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.685.559,04	(1.007.685.558,00)	1,04
14	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	24.155.900,00	0,00	17.850.000,00	6.305.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305.900,00	(6.305.900,00)	0,00
15	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	1.090.065.252,41	0,00	19.500.000,00	1.070.565.252,41	237.925.660,00	0,00	237.925.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.490.912,41	(1.300.894.922,00)	7.595.990,41
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	319.333.590,11	0,00	0,00	319.333.590,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.333.590,11	(319.333.590,00)	0,11
17	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	44.607.207,00	0,00	0,00	44.607.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.607.207,00	(44.607.207,00)	0,00
18	DINAS PERIKAMAN DAN PETERNAKAN	171.337.251,49	0,00	123.433.630,49	47.903.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965.200.000,00	0,00	1.965.200.000,00	2.013.103.621,00	(2.013.103.617,00)	4,00
19	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	221.397.550,00	0,00	0,00	221.397.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.397.550,00	(221.397.550,00)	0,00
20	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	879.588.961,47	0,00	0,00	879.588.961,47	0,00	0,00	0,00	138.087.000,00	0,00	138.087.000,00	0,00	0,00	0,00	1.017.675.961,47	(1.017.675.961,00)	0,47
21	SEKRETARIAT DAERAH	811.283.039,10	0,00	396.961.111,30	414.321.927,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.321.927,80	(414.321.928,00)	(0,20)
22	SEKRETARIAT DPRD	35.115.000,00	0,00	0,00	35.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.115.000,00	(35.115.000,00)	-
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	368.292.216,88	0,00	273.871.216,88	94.421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.421.000,00	(94.421.002,00)	(2,00)
24	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.297.312.820,66	23.319.600,00	562.084.884,00	1.758.547.536,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758.547.536,66	(1.758.547.536,00)	0,66
25	BADAN PENDAPATAN DAERAH	276.829.144,00	0,00	11.113.184,00	265.715.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.715.960,00	(265.715.960,00)	-
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	240.189.965,56	0,00	0,00	240.189.965,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.189.965,56	(240.189.965,00)	0,56
27	INSPEKTORAT	33.909.100,00	0,00	0,00	33.909.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.909.100,00	(33.909.100,00)	0,00
28	KECAMATAN WADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	KECAMATAN JATINUNGGAL	47.148.400,00	0,00	0,00	47.148.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.148.400,00	(47.148.400,00)	0,00

NO	SKPD	NILAI PEROLEHAN													Total Saldo Akhir Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	NILAI BUKU	
		PERALATAN DAN MESIN				GEDUNG DAN BANGUNAN			JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN			ASET TETAP LAINNYA						
		Saldo Awal (Harga Perolehan)	Reklas dari Peralatan dan Mesin	Penghapusan	Saldo Akhir	Saldo Awal (Harga Perolehan)	Penghapusan	Saldo Akhir	Saldo Awal (Harga Perolehan)	Penghapusan	Saldo Akhir	Saldo Awal (Harga Perolehan)	Penghapusan	Saldo Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
30	KECAMATAN DARMARAJA	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	(8.500.000,00)	0,00
31	KECAMATAN CIBUGEL	13.101.000,00	0,00	0,00	13.101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.101.000,00	(13.101.000,00)	0,00
32	KECAMATAN CISITU	9.495.100,00	0,00	0,00	9.495.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.495.100,00	(9.495.100,00)	0,00
33	KECAMATAN SITURAJA	38.668.000,00	0,00	0,00	38.668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.668.000,00	(38.668.000,00)	0,00
34	KECAMATAN CONGGEANG	55.050.000,00	0,00	0,00	55.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.050.000,00	(55.050.000,00)	0,00
35	KECAMATAN PASEH	172.757.967,00	0,00	0,00	172.757.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.757.967,00	(166.368.923,00)	6.389.044,00
36	KECAMATAN SURIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	KECAMATAN BUAHDUA	190.605.486,34	0,00	81.805.486,34	108.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.800.000,00	(108.800.000,00)	0,00
38	KECAMATAN TANJUNGSARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	KECAMATAN SUKASARI	32.323.230,73	0,00	0,00	32.323.230,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.323.230,73	(32.323.231,00)	(0,27)
40	KECAMATAN PAMULIHAN	23.600.300,00	0,00	20.600.300,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	0,00
41	KECAMATAN CIMANGGUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	KECAMATAN JATINANGOR	22.330.000,00	0,00	0,00	22.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.330.000,00	(22.330.000,00)	0,00
43	KECAMATAN RANCAKALONG	59.285.810,00	0,00	0,00	59.285.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.285.810,00	(59.285.810,00)	0,00
44	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	69.449.500,00	0,00	0,00	69.449.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.449.500,00	(69.449.500,00)	0,00
45	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	69.984.524,61	0,00	0,00	69.984.524,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.984.524,61	(69.984.525,00)	(0,39)
46	KECAMATAN GANEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	KECAMATAN TANJUNGPURBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	KECAMATAN TANJUNGMEDAR	206.616.468,00	0,00	0,00	206.616.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.616.468,00	(206.616.468,00)	0,00
49	KECAMATAN CIMALAKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	KECAMATAN CISARUA	19.949.614,00	0,00	0,00	19.949.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.949.614,00	(19.949.614,00)	0,00
51	KECAMATAN TOMO	116.152.630,00	0,00	109.057.830,00	7.094.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094.800,00	(7.094.800,00)	0,00
52	KECAMATAN UJUNGJAYA	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	0,00
53	KECAMATAN JATIGEDE	43.500.000,00	0,00	300.000,00	43.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200.000,00	(43.200.000,00)	0,00
54	BADAN KESATUAN BANGSA	149.850.000,00	0,00	0,00	149.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.850.000,00	(149.850.000,00)	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>23.181.544.145,09</b>	<b>2.544.641.717,00</b>	<b>3.752.347.864,35</b>	<b>21.973.837.997,74</b>	<b>19.759.511.773,28</b>	<b>0,00</b>	<b>19.759.511.773,28</b>	<b>332.087.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.087.000,00</b>	<b>2.727.386.486,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.727.386.486,30</b>	<b>44.792.823.257,32</b>	<b>(41.397.117.994,00)</b>	<b>3.395.705.263,32</b>	

**Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud**  
**Aset Lainnya : Amortisasi**

NO	SKPD	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
		2023	2022	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan	34.625.289.578,34	34.376.077.555,84	249.212.022,50
2	Dinas Kesehatan	1.242.304.157,00	1.081.343.169,00	160.960.988,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	444.639.913,75	411.550.327,50	33.089.586,25
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	52.871.258,75	49.714.172,50	3.157.086,25
5	Satuan Polisi Pamong Praja	9.471.258,75	6314172,50	3.157.086,25
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.471.258,75	6314172,50	3.157.086,25
7	Dinas Sosial	135.121.258,75	112.089.172,50	23.032.086,25
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	238.285.008,75	201.901.672,50	36.383.336,25
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19.471.258,75	16.314.172,40	3.157.086,35
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	209.571.258,75	160.189.172,50	49.382.086,25
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	25.321.258,75	22.164.172,50	3.157.086,25
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.471.258,75	6314172,50	3.157.086,25
13	Dinas Perhubungan	82.771.258,75	79.614.172,50	3.157.086,25
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	43.170.536,75	6.314.172,50	36.856.364,25
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	284.634.133,75	205.257.922,50	79.376.211,25
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.471.258,75	6314172,50	3.157.086,25
17	Dinas Arsip dan Perpustakaan	98.215.883,25	79.077.255,50	19.138.627,75
18	Dinas Perikanan dan Peternakan	16.471.258,75	11.564.172,50	4.907.086,25
19	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	360.476.508,75	326.440.672,50	34.035.836,25
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	421.461.258,75	368.994.172,49	52.467.086,26
21	Sekretariat Daerah	432.030.485,00	395.639.172,50	36.391.312,50
22	Sekretariat DPRD	304.021.258,75	288.364.172,50	15.657.086,25
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	759.522.821,25	689.918.422,50	69.604.398,75
24	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.828.392.366,75	1.774.603.780,50	53.788.586,25
25	Badan Pendapatan Daerah	1.188.203.482,75	1.258.483.146,70	(70.279.663,95)
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	103.428.758,75	87.664.172,50	15.764.586,25
27	Inspektorat	195.741.158,75	136.653.447,50	59.087.711,25
28	Kecamatan Wado	37.370.046,75	27.238.364,50	10.131.682,25
29	Kecamatan Jatininggal	9.470.046,75	6313364,50	3.156.682,25
30	Kecamatan Darmaraja	49.270.046,75	36.163.364,50	13.106.682,25
31	Kecamatan Cibugel	24.470.046,75	16313364,50	8.156.682,25
32	Kecamatan Cisit	39.470.046,75	28.813.364,50	10.656.682,25
33	Kecamatan Situraja	40.970.046,75	27313364,50	13.656.682,25
34	Kecamatan Conggeang	47.400.046,75	34.760.864,50	12.639.182,25
35	Kecamatan Paseh	35.052.546,75	24.522.114,50	10.530.432,25
36	Kecamatan Surian	9.470.046,75	6313364,50	3.156.682,25
37	Kecamatan Buahdua	9.470.046,75	6313364,50	3.156.682,25
38	Kecamatan Tanjungsari	61.150.046,75	45.073.364,50	16.076.682,25
39	Kecamatan Sukasari	50.020.046,75	36.725.864,50	13.294.182,25
40	Kecamatan Pamulihan	54.000.046,75	39.710.864,50	14.289.182,25
41	Kecamatan Cimanggung	39.470.046,75	28.813.364,50	10.656.682,25
42	Kecamatan Jatininggor	56.170.046,75	41.338.364,50	14.831.682,25
43	Kecamatan Rancakalong	9.470.046,75	6313364,50	3.156.682,25
44	Kecamatan Sumedang Selatan	130.220.046,75	95.000.864,50	35.219.182,25
45	Kecamatan Sumedang Utara	85.632.546,75	64.025.864,50	21.606.682,25
46	Kecamatan Ganeas	39.170.046,75	26113364,50	13.056.682,25
47	Kecamatan Tanjungkerta	20.770.046,75	14.788.364,50	5.981.682,25
48	Kecamatan Tanjungsari	28.320.046,75	20.450.864,50	7.869.182,25
49	Kecamatan Cimalaka	35.295.046,75	32.138.364,50	3.156.682,25

## Lampiran 35 - Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

NO	SKPD	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
		2023	2022	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
50	Kecamatan Cisarua	25.770.046,75	18.538.364,50	7.231.682,25
51	Kecamatan Tomo	9.470.046,75	6313364,50	3.156.682,25
52	Kecamatan Ujungjaya	66.645.046,75	58.288.364,50	8.356.682,25
53	Kecamatan Jatigede	43.570.046,75	31.888.364,50	11.681.682,25
54	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.471.258,75	6314172,50	3.157.086,25
	<b>JUMLAH</b>	<b>44.216.328.631,59</b>	<b>42.951.089.531,93</b>	<b>1.265.239.099,66</b>

**Rekapitulasi Utang Operasional RSUD Kabupaten Sumedang  
Per 31 Desember 2023**

No.	Nama Rekanan	Nilai Transaksi (Rp)
1	ADYA ARTHA ABADI	79.032.000,00
2	ALPHA PRIMERA INDO	628.365.880,00
3	ANUGRAH ARGON MEDIKA	1.999.242.838,00
4	ANUGRAH PHARMINDO LESTARI	380.955.216,00
5	ANEKA MEDIKA INDONESIA	580.571.625,00
6	ANUGERAH PRIMA MEDIKA	254.972.972,00
7	AIRINDO SENTRA MEDIKA	272.800.000,00
8	AQILLA HUMAENI INDONESIA	155.142.636,00
9	BERSEDA	27.700.000,00
10	BAYU MEDIKA KHATULISTIWA	114.999.996,00
11	BINA SAN PRIMA	1.190.914.682,00
12	BISMILLAH UTAMA HADE AKHYAAR	50.949.000,00
13	BUANA MEDITAMA	539.221.418,00
14	BUMI SEKAR PRAJA	2.063.576.455,00
15	CENTRAL BANDUNG RAYA	421.105.723,00
16	CV AQILLA	1.331.999.304,00
17	CV AURA VETRA	296.175.635,00
18	CV BELMAS	231.160.000,00
19	CV CAHAYA	170.556.650,00
20	CV JAYA MANDIRI	179.500.000,00
21	CV LAILA JAYA	121.858.000,00
22	CV PRIMA PUTRA	15.950.000,00
23	CV SUGIH MULKTI PRIMA	152.262.720,00
24	CV PUTRA MANDIRI	224.207.258,00
25	CV RAGHA MAULANA	96.993.060,00
26	CV RIZAL	38.073.555,00
27	DIAN LANGGENG PRATAMA	53.280.000,00
28	DIPA PRASADA HUSADA	24.014.246,00
29	DISTRIVERSA BUANAMAS	1.153.845,00
30	DEMKA SAKTI	49.583.367,00
31	DOCARE LARAS INDONESIA	42.027.966,00
32	DOS NI ROHA	294.054.708,00
33	EDISON DUTA SARANA	18.462.558,00
34	ENSEVAL PUTERA	1.865.158.009,00
35	EUREKA SUKSES ABDI	84.249.000,00
36	EZZY GEMILANG JAYA	1.775.296.973,00
37	FRINSANHA	443.317.434,00
38	GIRI SAKTI UTAMA	677.124.200,00
39	GLOBAL BAGJA	616.042.016,00
40	GRIYA NUTRISI	1.142.928.967,00
41	HARMONI PRIMA MEDIKA	362.140.916,00
42	IKRA BERSAMA SEJAHTERA	6.837.600,00

## Lampiran 36 – Rincian Utang Belanja BLUD RSUD

No.	Nama Rekanan	Nilai Transaksi (Rp)
43	IKRA BERSAMA SEJAHTERA	58.147.600,00
44	INTISUMBER HASIL SEMPURNA	1.764.900,00
45	JEMA INDO MANDIRI	346.100.000,00
46	KIMIA JAYA UTAMA	29.000.000,00
47	KIMIA FARMA	2.943.277.645,00
48	KPRI	478.385.840,00
49	KONEKSI INSAN PERSADA	95.349.000,00
50	MECA MED INDONESIA	25.514.044,00
51	MEDLICIN INDO RAYA	256.992.750,00
52	MEGAH MEDIKA P.	306.330.782,00
53	MEGAH PARAMA MEDIKA	328.653.040,00
54	MENSA BINA SUKSES	73.116.593,00
55	MERAPI	569.157.101,00
56	MILLENIUM PHARMA INT.	836.104.002,00
57	MILLENIUM PHARMA INT.	960.154.443,00
58	MUARA SAKTI	351.052.754,00
59	MULYA HUSADA JAYA	335.577.500,00
60	NASA JAYA ABADI	70.551.600,00
61	NIMBU SEJAHTERA MANDIRI	153.521.344,00
62	NUGRA KARSERA	255.402.093,00
63	NUSA KHARISMA RAYA	284.522.574,00
64	PALANG MERAH INDONESIA	499.535.000,00
65	PANCARAYA K	216.812.616,00
66	PARIT PADANG	1.885.825.702,00
67	PDAM	37.114.700,00
68	PENTAVALENT	282.354.841,00
69	PLN	158.803.780,00
70	PRIMA DAYA SENTOSA	35.750.000,00
71	PRO HEALT INTERNAIONAL	408.041.732,00
72	PURWA ANUGERAH SETIA	23.143.500,00
73	PURWA ANUGERAH SETIA	993.450,00
74	PUTRA DAFARA	31.271.370,00
75	POLARIS ALKES STARINDO	174.785.040,00
76	RAJAWALI MEDIKA	610.393.396,00
77	RAJAWALI NUSINDO	1.258.930.473,00
78	RASHA MEDIKA TEKNOLOGI	13.325.550,00
79	REKAMILENIUMINDO	171.441.357,00
80	REVASS UTAMA MEDIKA	1.052.924.843,00
81	SAPTA SARITAMA	302.603.835,00
82	SENJA DWI PUTRA	207.822.275,00
83	SENTRA ASIA GEMILANG	76.663.704,00
84	SINAR PANCA MEDIKA	1.510.637.942,00
85	SINAR RODA	3.389.409.531,00
86	SINERGI TRIDATA MEDICAL	34.425.540,00
87	SUPRA PRIMATA NUSANTARA	7.780.000,00
88	SUKAPURA	123.894.038,00

## Lampiran 36 – Rincian Utang Belanja BLUD RSUD

No.	Nama Rekanan	Nilai Transaksi (Rp)
89	SUMANTA MITRA MULYA	193.120.901,00
90	SURGIKA ALKESINDO	1.150.338.387,00
91	SOLOCONE INDUSTRY	5.772.000,00
92	TAWADA HEALT CARE	143.000.000,00
93	TELKOM	14.653.431,00
94	PT TIGA	36.212.501,00
95	THOMASONG NIRMALA	36.666.000,00
96	TOTAL MEDEKA PERSADA	105.432.972,00
97	TRIMITRA GARMEDINDO	222.000.000,00
98	TRIJAYA GASENDO	1.267.598.073,00
99	TUNAS BANGUN P.	1.974.240.281,00
100	UNITED DICO CITAS	191.638.217,00
101	WADYA PRIMA MULIA	18.925.500,00
102	WEGO MEDIKA INDONESIA	35.964.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>45.742.880.511,00</b>

**Rekapitulasi Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan  
Per 31 Desember 2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA PUSKESMAS</b>	<b>JASA PELAYANAN</b>	<b>MAMIN PASIEN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	JATINANGOR	218.126.423,00	6.150.000,00	224.276.423,00
2	CIMANGGUNG	158.018.288,00	0,00	158.018.288,00
3	TANJUNGSARI	159.807.145,00	7.850.000,00	167.657.145,00
4	MARGAJAYA	102.767.227,00	0,00	102.767.227,00
5	SUKASARI	85.854.362,00	0,00	85.854.362,00
6	HAURNGOMBONG	76.308.016,00	0,00	76.308.016,00
7	PAMULIHAN	119.057.043,00	0,00	119.057.043,00
8	RANCAKALONG	111.896.554,00	0,00	111.896.554,00
9	SUMEDANG SELATAN	190.349.130,00	0,00	190.349.130,00
10	SUKAGALIH	69.921.257,00	0,00	69.921.257,00
11	KOTAKALER	240.740.161,00	13.400.000,00	254.140.161,00
12	SITU	145.237.009,00	19.701.000,00	164.938.009,00
13	GANEAS	107.254.553,00	0,00	107.254.553,00
14	SITURAJA	133.455.578,00	0,00	133.455.578,00
15	CISITU	102.372.858,00	2.700.000,00	105.072.858,00
16	DARMARAJA	225.656.155,00	5.850.000,00	231.506.155,00
17	CIBUGEL	92.992.211,00	0,00	92.992.211,00
18	WADO	142.685.965,00	11.715.000,00	154.400.965,00
19	JATINUNGGAL	95.961.391,00	0,00	95.961.391,00
20	JATIGEDE	62.307.318,00	0,00	62.307.318,00
21	TOMO	73.627.062,00	672.000,00	74.299.062,00
22	UJUNGJAYA	120.186.413,00	12.950.000,00	133.136.413,00
23	CONGGEANG	92.773.133,00	0,00	92.773.133,00
24	PASEH	99.354.754,00	0,00	99.354.754,00
25	CIMALAKA	263.949.933,00	1.900.000,00	265.849.933,00
26	CISARUA	65.815.600,00	1.079.000,00	66.894.600,00
27	TANJUNGKERTA	46.160.400,00	0,00	46.160.400,00
28	SUKAMANTRI	141.243.681,00	62.950.000,00	204.193.681,00
29	TANJUNGMEDAR	58.416.265,00	0,00	58.416.265,00
30	BUAHDUA	127.208.972,00	0,00	127.208.972,00
31	HARIANG	31.272.212,00	0,00	31.272.212,00
32	SURIAN	39.300.358,00	0,00	39.300.358,00
33	CISEMPUR	47.359.195,00	0,00	47.359.195,00
34	SAWAHDADAP	45.147.666,00	0,00	45.147.666,00
35	PADASUKA	62.221.318,00	0,00	62.221.318,00
36	LABKESDA	271.122.000,00	0,00	271.122.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>4.225.927.606,00</b>	<b>146.917.000,00</b>	<b>4.372.844.606,00</b>



## Rincian Beban Persediaan

No	Uraian	Beban Persediaan TA 2023	Belanja Persediaan TA 2023	Selisih
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.695.189.249,00	2.001.194.049,00	(306.004.800,00)
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	141.680.030,00	141.680.030,00	0,00
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9.073.649.056,00	9.073.649.056,00	0,00
4	Beban Bahan-Bahan Baku	693.390.278,00	677.619.609,00	15.770.669,00
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	228.873.045,00	161.693.900,00	67.179.145,00
6	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	27.981.800,00	24.481.800,00	3.500.000,00
7	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	331.212.370,00	331.212.370,00	0,00
8	Beban Bahan-Bahan Lainnya	75.800.060,00	75.771.710,00	28.350,00
9	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	283.560.392,00	283.560.392,00	0,00
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	-	0,00	0,00
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	0,00	0,00
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	-	0,00	0,00
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.332.133.491,10	3.430.228.480,00	(98.094.988,90)
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.528.555.052,50	3.511.319.162,00	17.235.890,50
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.090.308.403,09	7.244.184.188,00	(153.875.784,91)
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	517.608.000,00	517.468.000,00	140.000,00
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	3.041.721.962,00	3.379.031.778,00	(337.309.816,00)
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	1.465.817.419,00	1.442.331.539,00	23.485.880,00
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.471.748.907,00	1.471.748.907,00	0,00
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	968.936.840,00	968.936.840,00	0,00
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	19.022.100,00	118.872.100,00	(99.850.000,00)
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.507.422.273,00	1.507.422.273,00	0,00
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.099.000,00	1.099.000,00	0,00
24	Beban Obat-Obatan-Obat	29.809.002.166,63	4.598.242.925,00	25.210.759.241,63
25	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	128.879.450,00	8.588.883.550,00	(8.460.004.100,00)
26	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	44.025.071.624,46	43.555.403.239,00	469.668.385,46
27	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	14.846.519.894,00	9.027.202.009,00	5.819.317.885,00
28	Beban Natura dan Pakan-Natura	3.441.234.953,00	3.443.653.508,00	(2.418.555,00)
29	Beban Natura dan Pakan-Pakan	19.409.770,00	8.281.000,00	11.128.770,00
30	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	307.533.000,00	307.533.000,00	0,00
31	Beban Komponen-Komponen Peralatan	0,00	0,00	0,00
32	Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu	-	0,00	0,00

**Lampiran 38 - Rincian Beban Persediaan LO**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Beban Persediaan TA 2023</b>	<b>Belanja Persediaan TA 2023</b>	<b>Selisih</b>
33	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	30.167.700,00	30.167.700,00	0,00
34	Beban Barang dan Jasa BLUD	78.068.232.095,02	70.321.557.914,12	7.746.674.180,90
<b>Jumlah</b>		<b>206.171.760.380,80</b>	<b>176.244.430.028,12</b>	<b>29.927.330.352,68</b>

## Rincian Beban Jasa

No	Uraian	Beban Jasa TA 2023	Belanja Jasa TA 2023	Selisih
1	Beban Makanan dan Minuman Rapat	24.268.541.900,00	24.268.541.900,00	0,00
2	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.255.034.590,00	3.255.034.590,00	0,00
3	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0,00	0,00	0,00
4	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	62.650.000,00	62.650.000,00	0,00
5	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	7.170.380.000,00	7.170.380.000,00	0,00
6	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	363.700.000,00	363.700.000,00	0,00
7	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	0,00	0,00	0,00
8	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	0,00	0,00
9	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	73.975.000,00	73.975.000,00	0,00
10	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	240.997.800,00	240.997.800,00	0,00
11	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.399.745.443,00	1.399.745.443,00	0,00
12	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	88.975.000,00	88.975.000,00	0,00
13	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	10.380.000,00	10.380.000,00	0,00
14	Beban Pakaian Penyelamatan	217.072.000,00	217.072.000,00	0,00
15	Beban Pakaian Siaga	13.020.000,00	13.020.000,00	0,00
16	Beban Pakaian Teknik	0,00	0,00	0,00
17	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00
18	Beban Pakaian KORPRI	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
19	Beban Pakaian Adat Daerah	207.570.000,00	207.570.000,00	0,00
20	Beban Pakaian Batik Tradisional	163.744.675,00	163.744.675,00	0,00
21	Beban Pakaian Olahraga	576.627.200,00	576.627.200,00	0,00
22	Beban Pakaian Paskibraka	0,00	0,00	0,00
23	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas. Moderator. Pembawa Acara. dan Panitia	12.873.892.500,00	12.873.892.500,00	0,00
24	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10.166.477.500,00	11.301.417.500,00	(1.134.940.000,00)
25	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli. Saksi Ahli. dan Beracara	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00
26	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	3.505.000.000,00	3.505.000.000,00	0,00
27	Beban Honorarium Rohaniwan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00
28	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal. Buletin. Majalah. Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	111.000.000,00	111.000.000,00	0,00
29	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	147.600.000,00	147.600.000,00	0,00
30	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	60.150.000,00	60.150.000,00	0,00
31	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	670.000.000,00	670.000.000,00	0,00
32	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	17.182.800.000,00	17.182.800.000,00	0,00
33	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	4.797.929.513,00	4.797.929.513,00	0,00

Lampiran 39 - Rincian Beban Jasa LO

No	Uraian	Beban Jasa TA 2023	Belanja Jasa TA 2023	Selisih
34	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	421.959.000,00	421.959.000,00	0,00
35	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	0,00	0,00	0,00
36	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.827.500.000,00	1.827.500.000,00	0,00
37	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.024.000.000,00	2.024.000.000,00	0,00
38	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	1.217.910.000,00	1.217.910.000,00	0,00
39	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	2.108.130.000,00	2.108.130.000,00	0,00
40	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	2.940.750.000,00	2.940.750.000,00	0,00
41	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	0,00	0,00	0,00
42	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
43	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
44	Beban Jasa Tenaga Administrasi	4.778.257.000,00	4.778.257.000,00	0,00
45	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	10.967.500.000,00	10.967.500.000,00	0,00
46	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	13.596.700.000,00	13.596.700.000,00	0,00
47	Beban Jasa Tenaga Ahli	1.570.750.900,00	1.570.750.900,00	0,00
48	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	8.635.890.175,00	8.635.890.175,00	0,00
49	Beban Jasa Tenaga Keamanan	10.792.826.574,00	10.792.826.574,00	0,00
50	Beban Jasa Tenaga Supir	1.535.198.388,00	1.535.198.388,00	0,00
51	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	0,00	0,00	0,00
52	Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	98.512.500,00	98.512.500,00	0,00
53	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	63.500.000,00	63.500.000,00	0,00
54	Beban Jasa Tata Rias	0,00	0,00	0,00
55	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	890.000.000,00	890.000.000,00	0,00
56	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	253.293.469,00	253.293.469,00	0,00
57	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	52.450.000,00	52.450.000,00	0,00
58	Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan	0,00	0,00	0,00
59	Beban Jasa Pelayanan Kearsipan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
60	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	2.143.424.170,00	2.168.424.170,00	(25.000.000,00)
61	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	9.993.845.800,00	10.093.495.800,00	(99.650.000,00)
62	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	194.000.000,00	194.000.000,00	0,00
63	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	89.873.500,00	89.873.500,00	0,00
64	Beban Jasa Kalibrasi	168.691.887,00	168.691.887,00	0,00
65	Beban Jasa Pengolahan Sampah	9.025.000,00	9.025.000,00	0,00
66	Beban Jasa Pengukuran Tanah	111.650.000,00	111.650.000,00	0,00
67	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan	5.729.525.878,00	5.729.525.878,00	0,00

Lampiran 39 - Rincian Beban Jasa LO

No	Uraian	Beban Jasa TA 2023	Belanja Jasa TA 2023	Selisih
	Pemotretan			
68	Beban Tagihan Telepon	940.997.177,00	940.997.177,00	0,00
69	Beban Tagihan Air	306.697.754,00	306.697.754,00	0,00
70	Beban Tagihan Listrik	11.956.369.411,00	11.956.369.411,00	0,00
71	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.058.460.400,00	1.058.460.400,00	0,00
72	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.585.294.296,00	6.585.294.296,00	0,00
73	Beban Paket/Pengiriman	3.092.000,00	3.092.000,00	0,00
74	Beban Registrasi/Keanggotaan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
75	Beban Pembayaran Pajak. Bea. dan Perizinan	596.363.400,00	596.363.400,00	0,00
76	Beban Pengolahan Air Limbah	0,00	0,00	0,00
77	Beban Lembur	5.184.385.500,00	5.184.385.500,00	0,00
78	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	0,00	0,00	0,00
79	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.689.178.418,00	4.689.178.418,00	0,00
80	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBU dan BP Kelas 3	45.615.267.650,00	43.991.454.590,00	1.623.813.060,00
81	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBU dan BP Kelas 3	5.672.052.400,00	5.641.431.600,00	30.620.800,00
82	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	0,00	0,00	0,00
83	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	986.738.474,00	986.738.474,00	0,00
84	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.123.229.476,00	1.123.229.476,00	0,00
85	Beban Asuransi Barang Milik Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
86	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
87	Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00
88	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.065.250.000,00	2.065.250.000,00	0,00
89	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	302.600.000,00	302.600.000,00	0,00
90	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	808.063.000,00	808.063.000,00	0,00
91	Beban Sewa Mebel	69.564.500,00	69.564.500,00	0,00
92	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	144.665.000,00	144.665.000,00	0,00
93	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	0,00		0,00
94	Beban Sewa Peralatan Umum	0,00	0,00	0,00
95	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	460.056.500,00	460.056.500,00	0,00
96	Beban Sewa Bangunan Gudang	415.000.000,00	415.000.000,00	0,00
97	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	7.573.104.185,00	7.573.104.185,00	0,00
98	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
99	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00
100	Beban Sewa Bangunan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00

Lampiran 39 - Rincian Beban Jasa LO

No	Uraian	Beban Jasa TA 2023	Belanja Jasa TA 2023	Selisih
101	Beban Sewa Rumah Negara Golongan III	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
102	Beban Sewa Hotel	792.926.283,00	792.926.283,00	0,00
103	Beban Sewa Rumah Tidak Bersusun	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
104	Beban Sewa Alat Peraga Kesenian	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
105	Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	0,00	0,00	0,00
106	Beban Sewa Hewan Pengangkut	0,00	0,00	0,00
107	Beban Sewa Tanaman	130.369.500,00	130.369.500,00	0,00
108	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	99.358.000,00	99.358.000,00	0,00
109	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	522.109.118,00	(522.109.118,00)
110	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	457.811.900,00	667.497.900,00	(209.686.000,00)
111	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	188.916.000,00	188.916.000,00	0,00
112	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	906.925.452,00	6.407.773.719,00	(5.500.848.267,00)
113	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-jasa Perencanaan dan	205.648.000,00	205.648.000,00	0,00
114	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	519.588.800,00	519.588.800,00	0,00
115	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	1.121.884.817,00	1.505.137.817,00	(383.253.000,00)
116	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	543.883.000,00	4.617.603.335,00	(4.073.720.335,00)
117	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	0,00	397.424.000,00	(397.424.000,00)
118	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
119	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	69.763.500,00	69.763.500,00	0,00
120	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	0,00	0,00	0,00
121	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	263.370.650,00	263.370.650,00	0,00
122	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	0,00	0,00	0,00
123	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	49.800.150,00	49.800.150,00	0,00
124	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	1.410.593.575,00	1.410.593.575,00	0,00
125	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	240.943.000,00	240.943.000,00	0,00
126	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	183.210.000,00	183.210.000,00	0,00
127	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.126.241.551,00	1.126.241.551,00	0,00

Lampiran 39 - Rincian Beban Jasa LO

No	Uraian	Beban Jasa TA 2023	Belanja Jasa TA 2023	Selisih
128	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	3.749.251.714,00	3.749.251.714,00	0,00
129	Beban Sosialisasi	6.442.500.000,00	6.442.500.000,00	0,00
130	Beban Bimbingan Teknis	2.638.114.050,00	2.488.114.050,00	150.000.000,00
131	Beban Diklat Kepemimpinan	779.869.000,00	779.869.000,00	0,00
132	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	0,00	0,00	0,00
133	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.561.159.300,00	1.561.159.300,00	0,00
134	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	88.400.000,00	88.400.000,00	0,00
135	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	59.100.000,00	59.100.000,00	0,00
136	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	5.505.000.000,00	5.505.000.000,00	0,00
137	Beban Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian	138.600.000,00	138.600.000,00	0,00
138	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	4.900.485.117,00	4.900.485.117,00	0,00
139	Beban Barang dan Jasa BOS	104.338.595.565,00	104.338.595.565,00	0,00
140	Beban Barang dan Jasa BLUD	182.535.938.059,63	181.981.630.166,88	554.307.892,75
<b>Jumlah</b>		<b>587.790.403.886,63</b>	<b>597.778.292.853,88</b>	<b>(9.987.888.967,25)</b>

## Rincian Beban Penyusutan

No	SKPD	Beban Penyusutan Aset Tetap TA 2023			Beban Amortisasi TA 2023	Total
		Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Jalan, Irigasi & Jaringan		
1	Dinas Pendidikan	115.988.656.329,00	31.406.319.832,00	41.673.071,00	249.212.022,50	147.685.861.254,50
2	Dinas Kesehatan	37.296.715.825,00	11.368.068.550,00	1.146.452.087,00	194.043.448,00	50.005.279.910,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	991.969.612,00	2.834.450.171,00	161.229.972.931,00	33.089.586,25	165.089.482.300,25
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	904.320.936,00	4.736.785.695,00	29.445.205.923,00	3.157.086,25	35.089.469.640,25
5	Satuan Polisi Pamong Praja	497.551.715,00	56.985.431,00	0,00	3.157.086,25	557.694.232,25
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	221.210.399,00	52.768.948,00	592.925.683,00	3.157.086,25	870.062.116,25
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	428.633.302,00	129.272.890,00	35.882.749,00	23.032.086,25	616.821.027,25
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	370.766.439,00	381.892.556,00	1.500.000,00	36.383.336,25	790.542.331,25
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.041.581.117,00	1.742.836.018,00	160.090.766,00	3.157.086,35	3.947.664.987,35
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.084.024.632,00	40.004.450,00	0,00	49.382.086,25	1.173.411.168,25
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	235.445.299,00	46.093.401,00	0,00	3.157.086,25	284.695.786,25
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	876.642.251,00	267.524.279,00	0,00	3.157.086,25	1.147.323.616,25
13	Dinas Perhubungan	5.388.694.037,00	642.076.122,00	1.813.221.894,00	3.157.086,25	7.847.149.139,25
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	1.842.333.413,00	157.586.927,00	1.500.000,00	36.856.364,25	2.038.276.704,25
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	565.021.946,00	1.098.540.481,00	309.791.428,00	79.376.211,25	2.052.730.066,25
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	748.729.944,00	296.425.093,00	8.487.844,00	3.157.086,25	1.056.799.967,25
17	Dinas Arsip dan Perpustakaan	689.162.971,00	538.594.010,00	0,00	19.138.627,75	1.246.895.608,75
18	Dinas Perikanan dan Peternakan	388.421.922,00	542.704.012,00	199.138.085,00	4.907.086,25	1.135.171.105,25
19	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	842.215.167,00	3.250.193.815,00	472.885.797,00	34.035.836,25	4.599.330.615,25
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.371.770.035,00	1.074.859.417,00	198.885.955,00	52.467.086,26	2.697.982.493,26
21	Sekretariat Daerah	4.654.957.961,00	1.607.855.030,00	77.145.823,00	36.391.312,50	6.376.350.126,50
22	Sekretariat DPRD	1.221.201.069,00	155.647.460,00	0,00	15.657.086,25	1.392.505.615,25
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	803.114.630,00	392.874.145,00	5.199.713,00	69.604.398,75	1.270.792.886,75
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.349.100.226,00	893.721.128,00	86.522.742,00	53.788.586,25	2.383.132.682,25
25	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.094.421.175,00	438.127.564,00	2.630.000,00	57.938.335,85	1.593.117.074,85



Lampiran 40 – Rincian Beban Penyusutan LO

No	SKPD	Beban Penyusutan Aset Tetap TA 2023			Beban Amortisasi TA 2023	Total
		Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Jalan, Irigasi & Jaringan		
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	366.128.052,00	252.207.466,00	0,00	15.764.586,25	634.100.104,25
27	Inspektorat	546.182.844,00	510.053.074,00	0,00	59.087.711,25	1.115.323.629,25
28	Kecamatan Wado	158.439.355,00	89.085.881,00	2.836.475,00	10.131.682,25	260.493.393,25
29	Kecamatan Jatinunggal	199.531.757,00	52.880.955,00	0,00	3.156.682,25	255.569.394,25
30	Kecamatan Darmaraja	211.038.149,00	85.255.755,00	2.686.000,00	13.106.682,25	312.086.586,25
31	Kecamatan Cibugel	145.118.015,00	27.670.272,00	0,00	8.156.682,25	180.944.969,25
32	Kecamatan Cisitu	159.825.589,00	158.186.732,00	0,00	10.656.682,25	328.669.003,25
33	Kecamatan Situraja	227.064.164,00	72.346.234,00	0,00	13.656.682,25	313.067.080,25
34	Kecamatan Conggeang	222.164.053,00	142.145.869,00	0,00	12.639.182,25	376.949.104,25
35	Kecamatan Paseh	191.944.561,00	83.322.853,00	17.548.100,00	10.530.432,25	303.345.946,25
36	Kecamatan Surian	194.747.792,00	39.341.790,00	0,00	3.156.682,25	237.246.264,25
37	Kecamatan Buahdua	195.926.641,00	77.472.497,00	1.602.500,00	3.156.682,25	278.158.320,25
38	Kecamatan Tanjungsari	235.327.830,00	107.522.736,00	0,00	16.076.682,25	358.927.248,25
39	Kecamatan Sukasari	184.347.599,00	75.614.601,00	0,00	13.294.182,25	273.256.382,25
40	Kecamatan Pamulihan	224.702.145,00	90.797.074,00	0,00	14.289.182,25	329.788.401,25
41	Kecamatan Cimanggung	314.808.470,00	80.271.876,00	0,00	10.656.682,25	405.737.028,25
42	Kecamatan Jatinangor	390.703.776,00	90.274.352,00	2.980.000,00	14.831.682,25	498.789.810,25
43	Kecamatan Rancakalong	167.322.396,00	56.332.476,00	0,00	3.156.682,25	226.811.554,25
44	Kecamatan Sumedang Selatan	333.344.903,00	235.824.711,00	484.294.293,00	35.219.182,25	1.088.683.089,25
45	Kecamatan Sumedang Utara	444.917.414,00	310.776.407,00	173.078.777,00	21.606.682,25	950.379.280,25
46	Kecamatan Ganeas	180.303.499,00	99.601.928,00	0,00	13.056.682,25	292.962.109,25
47	Kecamatan Tanjungkerta	218.018.512,00	133.964.920,00	0,00	5.981.682,25	357.965.114,25
48	Kecamatan Tanjungmedar	172.913.688,00	112.609.649,00	0,00	7.869.182,25	293.392.519,25
49	Kecamatan Cimalaka	238.963.279,00	76.943.464,00	0,00	3.156.682,25	319.063.425,25
50	Kecamatan Cisarua	209.339.107,00	66.950.355,00	0,00	7.231.682,25	283.521.144,25
51	Kecamatan Tomo	192.196.528,00	56.762.423,00	0,00	3.156.682,25	252.115.633,25
52	Kecamatan Ujungjaya	221.265.315,00	75.434.040,00	10.931.600,00	8.356.682,25	315.987.637,25
53	Kecamatan Jatigede	204.703.979,00	64.150.159,00	12.949.720,00	11.681.682,25	293.485.540,25
54	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	252.029.940,00	24.120.501,00	1.821.700,00	3.157.086,25	281.129.227,25
<b>Jumlah</b>		<b>188.899.981.704,00</b>	<b>67.500.128.475,00</b>	<b>196.539.841.656,00</b>	<b>1.426.539.559,46</b>	<b>454.366.491.394,46</b>

**Daftar Desa dan Kelurahan di Wilayah  
Kecamatan Kabupaten Sumedang**

<b>1 KECAMATAN WADO</b>	
1	CIMUNGKAL
2	GANJARRESIK
3	CILENGKRANG
4	CIKAREO SELATAN
5	CIKAREO UTARA
6	WADO
7	MULYAJAYA
8	SUKAJADI
9	CISURAT
10	SUKAPURA
<b>2 KECAMATAN JATINUNGGAL</b>	
1	JATINUNGGAL
2	TARIKOLOT
3	PAWENANG
4	SARIMEKAR
5	BANJARSARI
6	KIRISIK
7	SUKAMANAH
8	CIPEUNDEUY
9	CIMANINTIN
<b>3 KECAMATAN DARMARAJA</b>	
1	DARMARAJA
2	DARMAJAYA
3	SUKAMENAK
4	LEUWIHIDEUNG
5	SUKARATU
6	CIKEUSI
7	CIPEUTEUY
8	JATIBUNGUR
9	CIEUNTEUNG
10	KARANGPAKUAN
11	PAKUALAM
12	CIBOGO
13	NEGLASARI
14	CIPAKU
15	TARUNAJAYA
16	RANGGON
<b>4 KECAMATAN CIBUGEL</b>	
1	JAYAMEKAR
2	BUANAMEKAR
3	CIBUGEL
4	SUKARAJA
5	CIPASANG
6	TAMANSARI
7	JAYAMANDIRI

<b>5 KECAMATAN CISITU</b>	
1	CISITU
2	SITUMEKAR
3	PAJAGAN
4	CIGINTUNG
5	SUNDAMEKAR
6	LINGGAJAYA
7	RANJENG
8	CILOPANG
9	CIMARGA
10	CINANGSI
<b>6 KECAMATAN SITURAJA</b>	
1	SITURAJA UTARA
2	SITURAJA
3	MEKARMULYA
4	CIKADU
5	BANGBAYANG
6	KADUWULUNG
7	KARANGHEULEUT
8	CIJELER
9	AMBIT
10	JATIMEKAR
11	CIJATI
12	PAMULIHAN
13	MALAKA
14	SUKATALI
15	CICARIMANAH
<b>7 KECAMATAN CONGGEANG</b>	
1	CONGGEANG KULON
2	CONGGEANG WETAN
3	CIPAMEKAR
4	CIBEUREUYEUH
5	JAMBU
6	BABAKAN ASEM
7	PADAASIH
8	UNGKAL
9	KARANGLAYUNG
10	CACABAN
11	NARIMBANG
12	CIBUBUAN
<b>8 KECAMATAN PASEH</b>	
1	PASEH KIDUL
2	PASEH KALER
3	LEGOK KIDUL
4	LEGOK KALER
5	BONGKOK
6	PADANAAN
7	PASIREUNGIT
8	CIJAMBE
9	HAURKUNING
10	CITEPOK

Lampiran 41 - Daftar Desa Dan Kelurahan Di Wilayah Kecamatan Kabupaten Sumedang

<b>9</b>	<b>KECAMATAN SURIAN</b>	
	1	WANASARI
	2	WANAJAYA
	3	PAMEKARSARI
	4	TANJUNG
	5	SURIAN
	6	SURIAMUKTI
	7	SURIAMEDAL
	8	RANGGASARI
	9	NANJUNGWANGI
<b>10</b>	<b>KECAMATAN BUAHDUA</b>	
	1	BUAHDUA
	2	HARIANG
	3	KARANGBUNGUR
	4	MEKARMUKTI
	5	CITALEUS
	6	NAGRAK
	7	CIBITUNG
	8	SEKARWANGI
	9	GENDEREH
	10	PANYINDANGAN
	11	CILANGKAP
	12	BOJONGLOA
	13	CIKURUBUK
	14	CIAWITALI
<b>11</b>	<b>KECAMATAN TANJUNGSARI</b>	
	1	GUDANG
	2	TANJUNGSARI
	3	JATISARI
	4	MARGALUYU
	5	KUTAMANDIRI
	6	MARGAJAYA
	7	RAHARJA
	8	CIJAMBU
	9	PASIGARAN
	10	GUNUNGMANIK
	11	KADAKAJAYA
	12	CINANJUNG
<b>12</b>	<b>KECAMATAN SUKASARI</b>	
	1	SUKASARI
	2	GENTENG
	3	BANYURESMI
	4	NANGGERANG
	5	MEKARSARI
	6	SINDANGSARI
	7	SUKARAPIH

<b>13</b>	<b>KECAMATAN PAMULIHAN</b>	
	1	CIGENDEL
	2	CIJERUK
	3	PAMULIHAN
	4	HAURNGOMBONG
	5	CILEMBU
	6	CIMARIAS
	7	CINANGGERANG
	8	MEKARBAKTI
	9	SUKAWANGI
	10	CIPTASARI
	11	CITALI
<b>14</b>	<b>KECAMATAN CIMANGGUNG</b>	
	1	CIMANGGUNG
	2	SINDANGPAKUON
	3	TEGALMANGGUNG
	4	SINDULANG
	5	SINDANGGALIH
	6	SAWAHDADAP
	7	CIKAHURIPAN
	8	SUKADANA
	9	MANGUNARGA
	10	CIHANJUANG
	11	PASIRNANJUNG
<b>15</b>	<b>KECAMATAN JATINANGOR</b>	
	1	CIKERUH
	2	HEGARMANAH
	3	CIBEUSI
	4	CIPACING
	5	SAYANG
	6	MEKARGALIH
	7	CINTAMULYA
	8	JATIMUKTI
	9	CISEMPUR
	10	JATIROKE
	11	CILELES
	12	CILAYUNG
<b>16</b>	<b>KECAMATAN RANCAKALONG</b>	
	1	NAGARAWANGI
	2	CIBUNAR
	3	PANGADEGAN
	4	SUKAHAYU
	5	SUKAMAJU
	6	PAMEKARAN
	7	RANCAKALONG
	8	SUKASIRNARASA
	9	CIBUNGUR
	10	PASIRBIRU

Lampiran 41 - Daftar Desa Dan Kelurahan Di Wilayah Kecamatan Kabupaten Sumedang

<b>17</b>	<b>KECAMATAN SUMEDANG SELATAN</b>		<b>21</b>	<b>KECAMATAN TANJUNGMEDAR</b>	
	1	KELURAHAN PASANGGRAHAN BARU		1	CIKARAMAS
	2	KELURAHAN KOTA KULON		2	WARGALUYU
	3	KELURAHAN REGOL WETAN		3	JINGKANG
	4	KELURAHAN CIPAMEUNGPEUK		4	KAMAL
	5	SUKAGALIH		5	KERTAMUKTI
	6	BAGINDA		6	TANJUNGWANGI
	7	CIPANCAR		7	SUKAMUKTI
	8	CITENGAH		8	SUKATANI
	9	GUNASARI		9	TANJUNGMEDAR
	10	SUKAJAYA	<b>22</b>	<b>KECAMATAN CIMALAKA</b>	
	11	MARGAMEKAR		1	CIMALAKA
	12	CIHERANG		2	GALUDRA
	13	MARGALAKSANA		3	CIBEUREUM KULON
	14	MEKAR RAHAYU		4	NALUK
<b>18</b>	<b>KECAMATAN SUMEDANG UTARA</b>			5	NYALINDUNG
	1	KELURAHAN KOTAKALER		6	TRUNAMANGGALA
	2	KELURAHAN SITU		7	CIKOLE
	3	KELURAHAN TALUN		8	CIBEUREUM WETAN
	4	PADASUKA		9	MANDALAHERANG
	5	MULYASARI		10	LICIN
	6	GIRIMUKTI		11	CITIMUN
	7	MEKARJAYA		12	SERANG
	8	MARGAMUKTI		13	PADASARI
	9	SIRNAMULYA		14	CIMUJA
	10	KEBONJATI	<b>23</b>	<b>KECAMATAN CISARUA</b>	
	11	JATIHURIP		1	CISARUA
	12	JATIMULYA		2	CIUYAH
	13	RANCAMULYA		3	CIMARA
<b>19</b>	<b>KECAMATAN GANEAS</b>			4	BANTARMARA
	1	GANEAS		5	CIPANDANWANGI
	2	DAYEUHLUHUR		6	CISALAK
	3	CIKONENG		7	KEBONKALAPA
	4	SUKALUYU	<b>24</b>	<b>KECAMATAN TOMO</b>	
	5	SUKAWENING		1	TOMO
	6	TANJUNGHURIP		2	TOLENGAS
	7	CIKONDANG		3	DARMAWANGI
	8	CIKONENG KULON		4	MARONGGE
<b>20</b>	<b>KECAMATAN TANJUNGKERTA</b>			5	JEMBARWANGI
	1	SUKAMANTRI		6	BUGEL
	2	CIPANAS		7	CIPELES
	3	GUNTURMEKAR		8	KARYAMUKTI
	4	MULYAMEKAR		9	MEKARWANGI
	5	BANYUASIH			
	6	KERTAMEKAR			
	7	KERTAHARJA			
	8	CIGENTUR			
	9	TANJUNGMEKAR			
	10	TANJUNGMULYA			
	11	BOROS			
	12	AWILEGA			

Lampiran 41 - Daftar Desa Dan Kelurahan Di Wilayah Kecamatan Kabupaten Sumedang

<b>25</b>	<b>KECAMATAN UJUNGJAYA</b>	
	1	UJUNGJAYA
	2	PALABUAN
	3	PALASARI
	4	KEBONCAU
	5	SAKURJAYA
	6	KUDANGWANGI
	7	SUKAMULYA
	8	CIPELANG
	9	CIBULUH
<b>26</b>	<b>KECAMATAN JATIGEDE</b>	
	1	CIJEUNGJING
	2	KADUJAYA
	3	LEBAKSIUH
	4	CINTAJAYA
	5	CIPICUNG
	6	MEKARASIH
	7	SUKAKERSA
	8	CIRANGGEM
	9	CISAMPIH
	10	JEMAH
	11	KAREDOK
	12	KADU

*Sumber : Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang*

**TAHUN ANGGARAN 2023**

# **Laporan Keuangan BUMD**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG**

- 1. PDAM Tirta Medal**
- 2. PD BPR Sumedang**
- 3. LKM Sumedang**
- 4. PT Kampung Makmur**



**BKAD  
KABUPATEN SUMEDANG**

# PDAM Tirta Medal



**BKAD**  
**KABUPATEN SUMEDANG**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG**

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN  
DAN  
LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
31 DESEMBER 2023**



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG**

---

**DAFTAR ISI**

---

	<b>Halaman</b>
<b>SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN</b>	
<b>LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN</b>	
<b>LAPORAN KEUANGAN POKOK</b>	
- Laporan Posisi Keuangan (Neraca)	1
- Laporan Laba Rugi	2
- Laporan Perubahan Ekuitas	3
- Laporan Arus Kas	4
<b>CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN</b>	<b>5 - 18</b>



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

JALAN RAYA SUMEDANG – CIREBON KM. 4,5 DS. SERANG CIMALAKA  
Telp. (0261) 202627 Fax. (0261) 2138910 Email : [perumdaairminumsumedang@gmail.com](mailto:perumdaairminumsumedang@gmail.com) SUMEDANG 45353



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT  
PERUMDA AIR MINUM TIRTA MEDAL**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Rd. Moch. Taufik Suriakusumah, S.E.  
Alamat Kantor : Jalan Raya Sumedang – Cirebon KM. 4,5 Desa Serang  
Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat  
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Deni Rochendi S., S.T., M.M.  
Alamat Kantor : Jalan Raya Sumedang – Cirebon KM. 4,5 Desa Serang  
Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat  
Jabatan : Direktur Teknik
3. Nama : Hj. Imas Permasih, S.Sos., M.Si.  
Alamat Kantor : Jalan Raya Sumedang – Cirebon KM. 4,5 Desa Serang  
Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat  
Jabatan : Direktur Umum dan Keuangan

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang Tahun Buku 2023;
2. Laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang telah dimuat secara lengkap dan benar;  
b. Laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern pada Perumda Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Sumedang, 23 Februari 2024



**Rd. Moch. Taufik Suriakusumah, S.E.**  
Direktur Utama

**Deni Rochendi S., S.T., M.M.**  
Direktur Teknik

**Hj. Imas Permasih, S.Sos., M.Si.**  
Direktur Umum dan Keuangan

## LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor : 00021/3.0410/AU.2/04/1624-2/1/II/2024

Yth,

**Pimpinan**

**Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang**

### **Opini Wajar Tanpa Pengecualian**

Kami telah mengaudit laporan keuangan **Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang** ("Perusahaan"), yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

### **Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

## Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

**Kantor Akuntan Publik  
Jojo Sunarjo & Rekan**



**Danang Rahmat Surono, CPA**  
No.Reg. Izin AP.1624

23 Februari 2024

---

---

## LAPORAN KEUANGAN POKOK

---

---

**PERUMDA AIR MINUM TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)**  
**PER 31 DESEMBER 2023**

NO.	URAIAN	CATATAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
			Rp	Rp
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>ASET LANCAR</b>			
	Kas Bank	5.3.1	3.927.714.397	5.198.097.224
	Deposito Berjangka	5.3.2	4.500.000.000	1.700.000.000
	Piutang Langganan	5.3.3	8.720.829.387	8.089.805.831
	Penyisihan Piutang	5.3.3	(2.750.065.404)	(2.436.487.836)
	<b>Nilai Buku</b>		<b>5.970.763.983</b>	<b>5.653.317.995</b>
	Persediaan	5.3.4	1.197.062.536	2.067.948.090
	Pembayaran Dimuka	5.3.5	3.130.864.517	1.766.340.464
	<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>18.726.405.433</b>	<b>16.385.703.774</b>
<b>II</b>	<b>ASET TETAP</b>			
	Aset Tetap	5.3.6	90.762.841.940	87.315.173.799
	Akumulasi Penyusutaan	5.3.6	(66.193.336.432)	(62.005.276.037)
	<b>Nilai Buku</b>		<b>24.569.505.507</b>	<b>25.309.897.762</b>
<b>III</b>	<b>ASET LAINNYA</b>			
	Aset Tetap Dalam Penyelesaian	5.3.7	1.335.516.127	1.380.919.626
	Aset Tak Berwujud	5.3.8	1.760.448.249	1.895.358.443
	Aset Tetap Yang Tidak dan Belum Digunakan	5.3.9	723.201.826	723.201.826
	Akm Penyusutan Aset Tetap tdk/blm Digunakan	5.3.9	(231.088.991)	(231.088.991)
	<b>Nilai Buku</b>		<b>492.112.835</b>	<b>492.112.835</b>
	Piutang Lain-lain	5.3.10	-	99.349.190
	Biaya Ditangguhkan	5.3.11	1.067.028.906	603.407.381
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		<b>4.655.106.117</b>	<b>4.471.147.475</b>
	<b>JUMLAH ASET</b>		<b>47.951.017.057</b>	<b>46.166.749.011</b>
<b>IV</b>	<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			
	Hutang Usaha	5.3.12	724.810.102	259.445.502
	Hutang Lain-lain	5.3.13	2.022.925.216	2.280.451.591
	<b>JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>		<b>2.747.735.318</b>	<b>2.539.897.093</b>
<b>V</b>	<b>E K U I T A S</b>			
	Modal Pemerintah Daerah	5.3.14	46.163.204.582	45.163.204.582
	PMP Yang Belum Ditetapkan Statusnya	5.3.15	24.093.536.254	24.093.536.254
	Modal Donasi	5.3.16	4.273.158.197	4.273.158.197
	Cadangan Umum	5.3.17	88.560.318	88.560.318
	<b>Saldo Laba (Rugi) :</b>	5.3.18		
	Saldo (Rugi) Tahun Lalu		(29.991.607.433)	(30.234.785.854)
	Laba (Rugi) Tahun Berjalan		576.429.822	243.178.421
	<b>Saldo Laba (Rugi)</b>		<b>(29.415.177.612)</b>	<b>(29.991.607.433)</b>
	<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>45.203.281.739</b>	<b>43.626.851.918</b>
	<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>47.951.017.057</b>	<b>46.166.749.010</b>

(Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan)

**PERUMDA AIR MINUM TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG**  
**LAPORAN LABA RUGI**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

NO.	URAIAN	CATATAN	31 Desember 2023 Rp	31 Desember 2022 Rp
1	2	3	5	6
I	<b>PENDAPATAN USAHA</b>	5.4.1		
1)	Pendapatan Air		44.389.943.000	42.309.459.600
2)	Pendapatan Non Air		3.198.805.700	2.112.168.380
3)	Pendapatan Lain-Lain		345.944.339	144.730.026
	<b>SUB JUMLAH PENDAPATAN USAHA</b>		<b>47.934.693.039</b>	<b>44.566.358.006</b>
II	<b>BEBAN USAHA</b>	5.4.2		
1)	Beban Operasi Air		2.430.590.007	1.902.780.304
2)	Beban Pegawai		25.909.091.730	25.564.769.814
3)	Beban Listrik		4.418.643.719	3.668.020.272
4)	Beban Pemeliharaan		2.395.480.339	1.431.792.391
5)	Beban Umum Kantor		707.106.949	513.549.688
6)	Beban Hubungan Langganan		1.009.668.631	519.441.590
7)	Beban Penelitian dan Pengembangan		452.116.838	285.538.500
8)	Beban Umum Keuangan		48.439.900	52.810.100
9)	Rupa-Rupa Beban Umum		4.513.698.609	3.845.492.418
10)	Beban penyisihan Piutang		313.577.568	165.007.526
11)	Beban Penyusutan dan Amortisasi		4.920.212.520	6.358.829.023
12)	Beban Pajak		222.793.125	-
13)	Beban Lain-Lain		16.843.282	15.147.960
	<b>SUB JUMLAH BEBAN USAHA</b>		<b>47.358.263.217</b>	<b>44.323.179.585</b>
14)	<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK</b>		<b>576.429.822</b>	<b>243.178.421</b>
	<b>PAJAK BADAN</b>		-	-
	<b>LABA (RUGI) BERSIH</b>		<b>576.429.822</b>	<b>243.178.421</b>



**PERUMDA AIR MINUM TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

No	Keterangan	Modal Pemerintah	PMP, Yang Belum Ditetapkan Statusnya	Modal Donasi	Cadangan Umum	Labas (Rugi) Ditahan	Jumlah Ekuitas
		(Rp) 3	(Rp) 4	(Rp) 5	(Rp) 6	(Rp) 7	(Rp) 8
1	2						
	Per 01 Januari 2022	43.663.204.583	24.093.536.254	4.273.158.197	88.560.317	(29.744.044.920)	42.374.414.431
	Mutasi 2022:						
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.500.000.000	-	-	-	-	1.500.000.000
	Penyesuaian Laba/Rugi Tahun Lalu	-	-	-	-	(490.740.934)	(490.740.934)
	Labas/(Rugi) tahun Berjalan	-	-	-	-	243.178.421	243.178.421
	Per 31 Desember 2022	45.163.204.583	24.093.536.254	4.273.158.197	88.560.317	(29.991.607.433)	43.626.851.918
	Mutasi 2023:						
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.000.000.000	-	-	-	-	1.000.000.000
	Penyesuaian Laba/Rugi Tahun Lalu	-	-	-	-	-	-
	Labas/(Rugi) tahun Berjalan	-	-	-	-	576.429.822	576.429.822
	Per 31 Desember 2023	46.163.204.582	24.093.536.254	4.273.158.197	88.560.318	(29.415.177.612)	45.203.281.739

(Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan)

**PERUMDA AIR MINUM TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

KETERANGAN	Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
1	2	3
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
Laba Tahun Berjalan	576.429.822	243.178.421
<b>Penyesuaian</b>		
Penyisihan Piutang Langganan	313.577.568	165.007.526
Penyusutan & Amortisasi	4.920.212.519	6.358.829.022
<b>Arus Kas Sebelum Perubahan Modal Kerja</b>	<b>5.810.219.909</b>	<b>6.767.014.969</b>
<b>Perubahan Modal Kerja</b>		
Piutang Langganan	(631.023.556)	(536.055.029)
Persediaan	870.885.554	(1.044.906.558)
Pembayaran Di Muka	(1.364.524.053)	(1.219.343.506)
Piutang Lain-lain	99.349.190	12.409.083
Biaya Ditangguhkan	(778.585.458)	(166.910.422)
Hutang Usaha	465.364.600	(1.205.979.318)
Hutang Lain-lain	(257.526.371)	591.259.075
Hutang Iuran Dana Pensiun	-	(713.436.253)
<b>Arus Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Operasi</b>	<b>(1.596.060.094)</b>	<b>(4.282.962.928)</b>
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Investasi</b>		
Perolehan Aset Tetap	(3.447.668.141)	(1.230.665.728)
Aset Tetap dim Penyelesaian	45.403.498	(99.919.909)
Aset Tidak Berwujud	(282.278.000)	-
<b>Arus Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi</b>	<b>(3.684.542.642)</b>	<b>(1.330.585.638)</b>
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan</b>		
Modal Pemerintah	1.000.000.000	1.500.000.000
Penyesuaian Laba/Rugi Tahun Lalu	-	(490.740.934)
<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.009.259.066</b>
<b>Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas</b>	<b>1.529.617.172</b>	<b>2.162.725.469</b>
<b>Kas dan Setara Kas Awal Tahun</b>	<b>6.898.097.224</b>	<b>4.735.371.755</b>
<b>Kas dan Setara Kas Akhir Tahun</b>	<b>8.427.714.397</b>	<b>6.898.097.224</b>

(Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan)

---

---

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

---

---

**PERUMDA AIR MINUM TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

---

**5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**5.1 Umum**

**5.1.1 Pendirian Perusahaan**

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1985 tanggal 20 Maret 1985 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum. Sesuai perkembangan peran PDAM, telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang tanggal 12 Agustus 2020.

**a. Tujuan Perusahaan**

Tujuan pendirian PERUMDA Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang adalah :

- Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
- Tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dengan Perumda Air Minum;
- Tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum; dan
- Terwujudnya salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

**b. Kegiatan Usaha Pokok**

Kegiatan utama Perumda Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang adalah perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan air minum, penyelenggaraan penyediaan dan pengelolaan pelayanan air minum dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**c. Permodalan**

Modal sebagai hak pemilik harus dilaporkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundangan dan akta pendirian yang berlaku.

Penyetoran modal dalam bentuk kas oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten dicatat dalam klasifikasi Modal Disetor.

Penyerahan aset tetap, barang persediaan atau barang lainnya oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan sebagai penyertaan dicatat dalam klasifikasi Penyertaan Pemerintah, sedangkan untuk yang belum ditetapkan statusnya diklasifikasikan dalam Penyertaan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya.

Pembayaran dimuka bagian laba kepada pemerintah daerah dicatat dalam kelompok ekuitas dengan klasifikasi Pembayaran Dimuka Kepada Pemerintah.

**5.1.2 Susunan Dewan Pengawas dan Direksi**

Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang periode tahun 2021-2025 diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 346 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang Periode Tahun 2021-2025 tanggal 25 Agustus 2021.

Susunan Dewan Pengawas adalah sebagai berikut :

- |           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| - Ketua   | : Maman Nurachman, S.E., Ak., M.Ak. |
| - Anggota | : Ginan Wibawa, S.HI., S.H., M.H.   |

**PERUMDA AIR MINUM TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

**5.1.2 Susunan Dewan Pengawas dan Direksi (lanjutan)**

Direksi Perumda Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur Teknik masa jabatan tahun 2020-2025 diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Sumedang Nomor:539/KEP.427-HUK/2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang Masa Jabatan Tahun 2020-2025 tanggal 23 Oktober 2020, serta Direktur Umum & Keuangan masa jabatan tahun 2023-2028 diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 377 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Direktur Umum & Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang Periode Tahun 2023-2028 tanggal 13 September 2023.

Susunan Direksi adalah sebagai berikut :

- Direktur Utama : Rd. Moch. Taufik Suriakusumah.,S.E.
- Direktur Teknik : Deni Rochendi S.,S.T.,M.M
- Direktur Umum dan Keuangan : Hj. Imas Permasih, S.Sos., M.Si.

Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang, diangkat seorang sekretaris berdasarkan Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang Nomor 800/16/Kep.DP-Perumda.AM/2021 tentang Penunjukkan Sekretaris Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang Periode Tahun 2021-2025 tanggal 27 Agustus 2021, yaitu:

Tati Kusmiati, S.E. : Pelaksana Sub Bagian Pendayagunaan BUMD dan Lembaga Keuangan pada  
Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang

**5.1.3 Data Pegawai Tahun 2023**

Jumlah pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang per 31 Desember 2023 sebanyak 486 orang. Jumlah tersebut menurun jika dibandingkan dengan jumlah pegawai per 31 Desember 2022 sebanyak 506 orang dikarenakan sebanyak 20 orang memasuki masa pensiun dan lain-lain.

**a. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan :**

No.	Tingkat Pendidikan	31-Des-2022	31-Des-2023	Perubahan
1	Pasca Sarjana	10	9	1
2	Sarjana	143	151	8
3	Sarjana Muda	14	16	2
4	SLTA	331	303	28
5	SLTP	5	4	1
6	SD	3	3	-
	<b>Jumlah</b>	<b>506</b>	<b>486</b>	

**b. Menurut status kepegawaian :**

No.	Status Kepegawaian	31-Des-2022	31-Des-2023	Perubahan
1	Pegawai Tetap	504	485	19
2	Calon Pegawai	-	-	-
3	Honorar	-	-	-
4	Honor Tetap	2	1	1
	<b>Jumlah</b>	<b>506</b>	<b>486</b>	<b>-</b>

**PERUMDA AIR MINUM TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

**5.1.4 Data Pelanggan Tahun 2023**

Jumlah pelanggan air bersih yang terlayani oleh PERUMDA Tirta Medal Kabupaten Sumedang per 31 Desember 2023 sebanyak 35.938 sambungan langganan. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan jumlah sambung langganan per 31 Desember 2022 sebanyak 35.465 sambungan langganan, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Golongan	31-Des-2022	31-Des-2023	Perubahan
1	Rumah Tangga	33.837	34.302	465
2	Pemerintah	390	384	6
3	Niaga	796	808	12
4	Industri	9	9	0
5	Sosial (Umum & Khusus)	433	431	2
6	Kesepakatan	-	4	4
	<b>Jumlah</b>	<b>35.465</b>	<b>35.938</b>	

**5.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI**

**5.2.1 Penyajian Laporan Keuangan**

Kebijakan Akuntansi PERUMDA d/h PDAM Tirta Medal Kabupaten Sumedang didasarkan kepada Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 08 Tahun 2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum dan mulai 1 Januari 2011 telah dilakukan mutasi/perubahan ke Standar Akuntansi Keuangan Entitas Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

**5.2.2 Periode Pembukuan**

Periode pembukuan (Accounting period) adalah tanggal 01 Januari sampai 31 Desember.

**5.2.3 Pengakuan Pendapatan dan Beban**

- a. Pendapatan penjualan air diakui pada saat rekening tagihan air diterbitkan setiap bulan (Basis Akrual).
- b. Pendapatan sambungan baru dan pendapatan penjualan non air lainnya yang dibayar secara tunai diakui pada saat pembayaran (Basis kas), sedangkan jika pembayaran dilakukan dengan cara mencicil diakui pada saat dokumen tagihan cicilan diterbitkan sesuai jatuh tempo tiap-tiap cicilan (Basis Akrual).
- c. Pendapatan AMDK dan pendapatan tanki air dibayar secara tunai diakui pada saat pembayaran (Basis kas),
- d. Pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran oleh pelanggan dicatat pada saat denda tersebut diterima (Basis Kas).
- e. Biaya diakui pada periode terjadinya transaksi (Basis Akrual).

**5.2.4 Penilaian Piutang**

Piutang disajikan dalam laporan keuangan dengan nilai tunai yang dapat direalisasikan. Besarnya penyisihan piutang usaha ditetapkan berdasarkan Daftar Saldo Rata-rata (DSR) piutang tak tertagih untuk 3 (tiga) tahun yang berakhir pada masing-masing kelompok dengan perhitungan :

1.  $(\text{Nilai DSR untuk 3 tahun terakhir Piutang} \times 100\%) / 3$  atau Rata-rata % DSR untuk 3 (tiga) tahun x Saldo Piutang Akhir Tahun
2. Piutang yang telah berumur lebih dari dua tahun disisihkan sebesar 100% selanjutnya diusulkan untuk dihapuskan kepada Dewan Pengawas, (kecuali untuk instansi Pemerintah dan TNI/POLRI). Untuk Piutang yang telah dihapus tetap dicatat secara *ekstra comptable* dan terus diupayakan penagihannya.

**PERUMDA AIR MINUM TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

**5.2.5 Persediaan**

Pencatatan persediaan dilakukan dengan metode sebagai berikut :

- a. Untuk Penilaian bahan operasi kimia dan bahan instalasi menggunakan *Perpetual inventory method*; persediaan dicatat berdasarkan setiap mutasi (penerimaan maupun pengeluaran) sehingga nilai dan kualitasnya dapat diketahui setiap saat.
- b. Untuk penilaian persediaan ATK dan bahan operasi lainnya, persediaan awal dan pembelian di catat sebagai biaya dan pada akhir tahun dikoreksi oleh persediaan akhir hasil dari opname fisik.

Penilaian persediaan menggunakan metode *first in first out (FIFO)*, yaitu pemakaian bahan dibebankan sebagai biaya sebesar harga beli awal atas saldo persediaan yang ada.

**5.2.5 Pengeluaran Barang Modal**

Pengeluaran barang modal adalah pengeluaran untuk pembelian barang berwujud siap pakai dalam operasi dan tidak untuk dijual, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan nilai harga satuan di atas Rp 200.000,00.

**5.2.6 Aset Tetap dan Penyusutan**

Aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehannya, sedangkan penyusutannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009.

No	Kelompok	Masa Manfaat	Metode Penyusutan	Tarif Penyusutan
		(Tahun)		
1	Harta Berwujud			
1.1	Bukan Bangunan			
	a Kelompok 1	4	Garis Lurus	25%
	b Kelompok 2	8	Garis Lurus	12,50%
	c Kelompok 3	16	Garis Lurus	6,25%
	d Kelompok 4	20	Garis Lurus	5%
1.2	Bangunan			
	a Permanen	20	Garis Lurus	5%
	b Tidak Permanen	10	Garis Lurus	10%

**5.2.7 Aset Tetap Dalam penyelesaian**

Aset tetap dalam penyelesaian adalah pekerjaan bangunan dan atau pemasangan sambungan/instalasi air yang belum selesai.

Terhadap Aset Tetap yang sudah selesai pengerjaannya dipindahkan ke Akun Aset Tetap sesuai dengan kelompok Akunnya dengan dilampiri Berita Acara Serah Terima. Terhadap Aset Tetap dalam penyelesaian tidak dilaksanakan penyusutan.

**5.2.8 Aset Tak Berwujud**

Aset tak berwujud merupakan aset non moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud/fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan operasional, aset tidak berwujud diamortisasi selama masa manfaat aset tersebut. Aset tidak berwujud disajikan sebesar nilai netto yaitu biaya perolehan setelah dikurangi amortisasi sebesar jumlah alokasi yang sistematis sesuai dengan masa manfaatnya.

Jenis Aset tidak berwujud antar lain berupa biaya riset dan pengembangan, *software*, paten, hak cipta. Untuk biaya riset dan pengembangan serta *software* diamortisasi selama 8 (Delapan) tahun dengan metode garis lurus.

**PERUMDA AIR MINUM TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

---

**5.2.9 Aset Tetap tidak dan belum Digunakan**

- **Aset tetap tidak digunakan** adalah Aset Tetap yang sudah usang/rusak tidak dapat digunakan lagi dalam operasi PERUMDA d/h PDAM Tirta Medal Kabupaten Sumedang, dan untuk aset tetap ini disusutkan penuh (100%). Terhadap Aset Tetap yang tidak digunakan tersebut yang telah disusutkan seluruhnya (100%), selanjutnya diusulkan untuk dihapuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- **Aset tetap belum digunakan** adalah Aset Tetap yang ada di PDAM Tirta Medal Kabupaten Sumedang, yang belum digunakan sehubungan belum ada air untuk mengalir, dan belum ada bukti Berita Acara Serah Terima atas barang tersebut dari Pemda Kabupaten Sumedang kepada PERUMDA d/h PDAM Tirta Medal Kabupaten Sumedang.

**5.2.10 Pencatatan Hutang/Kewajiban**

Pada dasarnya seluruh kewajiban/hutang dicatat tanpa memperhatikan apakah jumlahnya sudah dapat ditentukan secara tepat atau tidak. Namun, atas kewajiban yang timbul dan jumlahnya belum dapat ditentukan secara pasti, dicatat berdasarkan jumlah taksiran yang wajar.



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM (PERUMDA AM)**  
**TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023**

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
<b>3. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)</b>		
<b>5.3.1 KAS / BANK</b>		
Jumlah tersebut terdiri dari:		
<b>Kas</b>		
- Kas Rekonsiliasi Bank	-	2.983.092
<b>Jumlah Kas</b>	<b>-</b>	<b>2.983.092</b>
<b>Saldo Bank terdiri dari:</b>		
BJB Kantor Pusat (PMP)	2.849.270.909	3.313.236.960
BRI Untuk Kantor Pusat	322.267.662	324.389.596
BJB Kantor Pusat	174.190.256	270.196.981
Bank Sumedang AMDK	166.735.014	68.986.919
Bank Sumedang Tanki Air	126.243.780	101.463.130
Bank BJB Syariah - Tasedo	126.186.043	1.000.838.322
Kas in Transit PPOB	60.977.850	32.268.800
BRI Untuk Kantor Pusat BP	40.966.434	13.913.550
Bank Sumedang Bunga Deposito	39.574.185	31.493.799
Bank Bjb Syariah	8.415.369	31.602.601
BJB Cabang Sumedang	6.783.911	6.723.474
PT. LKM Sumedang	6.008.984	-
Bank BJB - Bunga Deposito	94.000	-
<b>Jumlah Bank</b>	<b>3.927.714.397</b>	<b>5.195.114.132</b>
<b>Jumlah Kas dan Bank</b>	<b>3.927.714.397</b>	<b>5.198.097.224</b>
<b>5.3.2 DEPOSITO BERJANGKA</b>		
Jumlah tersebut terdiri dari:		
- Deposito Bank BJB	2.000.000.000	-
- Deposito BPR Sumedang	2.000.000.000	1.700.000.000
- Deposito PT. LKM Cabang Paseh	500.000.000	-
<b>Jumlah Deposito Berjangka</b>	<b>4.500.000.000</b>	<b>1.700.000.000</b>
<b>5.3.3 PIUTANG LANGGANAN</b>		
Jumlah tersebut merupakan saldo piutang langganan yang terdiri dari:		
- Piutang Air	8.477.663.387	7.844.224.831
- Piutang Non Air	243.166.000	245.581.000
<b>Jumlah Piutang Langganan</b>	<b>8.720.829.387</b>	<b>8.089.805.831</b>
- Penyisihan Piutang Langganan	(2.750.065.404)	(2.436.487.836)
<b>Jumlah Piutang Langganan - bersih</b>	<b>5.970.763.983</b>	<b>5.653.317.995</b>
<b>5.3.4 PERSEDIAAN</b>		
Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan terdiri dari:		
- Persediaan Bahan Instalasi	1.012.396.787	1.751.401.944
- Persediaan bahan kimia	184.665.749	303.761.946
- Persediaan alat-alat tulis & barang cetakan	-	12.784.200
<b>Jumlah Persediaan</b>	<b>1.197.062.536</b>	<b>2.067.948.090</b>

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM (PERUMDA AM)**  
**TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023**

	<u>31 Desember 2023</u> (Rp)	<u>31 Desember 2022</u> (Rp)
<b>5.3.5 PEMBAYARAN DIMUKA</b>		
Jumlah tersebut merupakan saldo pembayaran dimuka terdiri dari:		
- Uang Muka Operasi	1.529.966.248	1.748.340.464
- Uang Muka Kerja Proyek	1.398.479.193	-
- Uang Muka Kerja Kas Operasional	202.419.076	-
- Uang Pembelian Kendaraan	-	18.000.000
<b>Jumlah Pembayaran Dimuka</b>	<b><u>3.130.864.517</u></b>	<b><u>1.766.340.464</u></b>
<b>5.3.6 ASET TETAP</b>		
Jumlah tersebut merupakan nilai buku terdiri dari:		
<b>Nilai Perolehan Aset Tetap</b>		
- Tanah	1.979.502.679	1.979.502.679
- Instalasi Sumber Air	7.471.128.838	7.464.128.837
- instalasi Pompa	4.422.368.595	4.071.020.817
- Instalasi Pengolahan	7.556.431.464	14.435.555.617
- Instalasi Transdist	62.789.174.769	53.165.938.143
- Instalasi Non Pabrik Air	6.544.235.595	6.199.027.706
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b><u>90.762.841.940</u></b>	<b><u>87.315.173.799</u></b>
<b>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</b>		
- Instalasi Sumber Air	(3.552.288.592)	(3.208.273.679)
- Instalasi Pompa	(3.373.340.997)	(3.218.424.594)
- Instalasi Pengolahan	(9.805.484.057)	(9.525.885.200)
- Instalasi Transdist	(44.245.071.167)	(41.369.042.109)
- Instalasi Non Pabrik Air	(5.217.151.619)	(4.683.650.455)
<b>Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</b>	<b><u>(66.193.336.432)</u></b>	<b><u>(62.005.276.037)</u></b>
<b>Nilai Aset Tetap - Bersih</b>	<b><u>24.569.505.507</u></b>	<b><u>25.309.897.762</u></b>
<b>5.3.7 ASET TETAP DALAM PENYELESAIAN</b>		
Jumlah tersebut merupakan jumlah aset tetap dalam penyelesaian terdiri dari:		
- Penyempurnaan jaringan pipa trans & distribusi	520.526.920	208.607.455
- Bangunan dan Gedung	451.447.933	451.447.933
- Sambungan Langganan	306.971.274	485.498.988
- Instalasi Pompa	56.570.000	-
- Instalasi Sumber	-	171.976.000
- Instalasi Pengolahan	-	63.389.250
<b>Jumlah Aset Tetap dalam Penyelesaian</b>	<b><u>1.335.516.127</u></b>	<b><u>1.380.919.626</u></b>
<b>5.3.8 ASET TAK BERWUJUD</b>		
<b>Nilai Perolehan Aset Tak Berwujud</b>		
- Riset dan Pengembangan	4.079.814.020	4.029.636.020
- Perizinan	188.500.000	66.000.000
- Sistem Informasi Integrasi	109.600.000	-
<b>Jumlah Aset Tak Berwujud</b>	<b><u>4.377.914.020</u></b>	<b><u>4.095.636.020</u></b>
<b>Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud</b>		
- Riset dan Pengembangan	(2.597.698.062)	(2.200.277.577)
- Perizinan	(14.630.209)	-
- Sistem Informasi Integrasi	(5.137.500)	-
<b>Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud</b>	<b><u>(2.617.465.771)</u></b>	<b><u>(2.200.277.577)</u></b>
<b>Nilai Aset Tak Berwujud - Bersih</b>	<b><u>1.760.448.249</u></b>	<b><u>1.895.358.443</u></b>

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM (PERUMDA AM)  
TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023**

	<u>31 Desember 2023</u> (Rp)	<u>31 Desember 2022</u> (Rp)
<b>5.3.9 ASET TETAP YANG TIDAK DAN BELUM DIGUNAKAN</b>		
Jumlah tersebut merupakan jumlah aset yang tidak digunakan yang dipisahkan dari aset tetap dalam tahun 1999 dan aset tetap eks proyek yang belum dioperasikan terdiri dari:		
- 2 unit pompa genset BEARWARD	59.919.200	59.919.200
- 9 unit panel listrik Cabang Wado	75.336.242	75.336.242
- Bangunan BPT Cimalela Cab. Wado	18.740.175	18.740.175
- 1 buah rumah genset Cabang Wado	52.760.807	52.760.807
- Bangunan Workshop Cimalela Wado	24.332.566	24.332.566
<b>Jumlah Aset Tetap Tidak Digunakan</b>	<u><b>231.088.991</b></u>	<u><b>231.088.991</b></u>
<b>Aset tetap belum digunakan</b>		
Instalasi Transmisi dan Distribusi:		
- Jlr. Distr. PVC 100mm Cikoneng-R.Purut	107.016.543	107.016.543
- Jlr. Distr. PVC 150mm Jatihurip-Asabri	42.612.033	42.612.033
- Jlr. Distr. PVC 200mm Kt Kulon-B.Asih	316.937.530	316.937.530
- Jlr. Distr. PVC 50mm Cikoneng-Ganeas	25.546.730	25.546.730
<b>Jumlah Aset Tetap Belum Digunakan</b>	<u><b>492.112.835</b></u>	<u><b>492.112.835</b></u>
<b>Jumlah Aset Tetap Yang Tidak dan Belum Digunakan</b>	<u><b>723.201.826</b></u>	<u><b>723.201.826</b></u>
- Akumulasi Penyusutan	(231.088.991)	(231.088.991)
<b>Nilai Buku Aset Tetap Yang Tidak dan Belum Digunakan</b>	<u><u><b>492.112.835</b></u></u>	<u><u><b>492.112.835</b></u></u>
Disamping Mengelola aset sendiri, PDAM juga diberi aset pengelolaan oleh instansi pemerintah Pusat maupun daerah yang untuk dikelola PDAM		
<b>5.3.10 PIUTANG LAIN-LAIN</b>		
Jumlah tersebut merupakan saldo piutang non-operasional yang terdiri dari:		
- Piutang Cabang/Pelaksana	-	94.504.697
- Piutang Pegawai	-	4.844.493
<b>Jumlah Piutang Lain-lain</b>	<u><u><b>-</b></u></u>	<u><u><b>99.349.190</b></u></u>
<b>5.3.11 BIAJA DITANGGUHKAN</b>		
Jumlah tersebut merupakan biaya ditangguhkan Perumda d/h PDAM Tirta Medal Kabupaten Sumedang Per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:		
- Nilai Perolehan	5.233.345.489	4.454.760.030
- Amortisasi	(4.166.316.583)	(3.851.352.649)
<b>Nilai Buku</b>	<u><b>1.067.028.906</b></u>	<u><b>603.407.381</b></u>
<b>5.3.12 HUTANG USAHA</b>		
Jumlah tersebut merupakan saldo hutang usaha terdiri dari:		
- CV Karya Purna Abadi	557.319.725	1,44
- PT. Multi Instrumentasi	85.192.500	-
- PT. Guna Hasil Mandiri	57.820.000	-
- PT. Indah Cipta Karya Gemilang	24.477.877	82.906.215
- PT. Brataco	1,50	1,50
- CV. Jaya Abadi	0,40	0,40
- CV. Garuda Mas	-	101.975.859
- CV. Maju Jaya Abadi	-	74.563.425
<b>Jumlah Hutang Usaha</b>	<u><u><b>724.810.104</b></u></u>	<u><u><b>259.445.502</b></u></u>

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM (PERUMDA AM)**  
**TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023**

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>5.3.13 HUTANG LAIN-LAIN</b>		
Jumlah tersebut terdiri dari:		
- Hutang lain-lain	1.759.816.216	1.614.936.491
- Pembiayaan jangka pendek	263.109.000	665.515.100
<b>Jumlah Hutang Lain-Lain</b>	<b>2.022.925.216</b>	<b>2.280.451.591</b>
<b>5.3.14 MODAL PEMERINTAH DAERAH</b>		
Modal Pemerintah daerah berasal dari:		
- Penetapan Modal Awal	610.175.882	610.175.882
- Penyertaan Kabupaten Sumedang 2010	500.000.000	500.000.000
- Penyertaan Kabupaten Sumedang 2011 dan 2012	2.950.000.000	2.950.000.000
- Penyertaan Kabupaten Sumedang 2013	2.400.000.000	2.400.000.000
- Penyertaan Kabupaten Sumedang 2014	1.400.000.000	1.400.000.000
- Penyertaan Kabupaten Sumedang 2015	3.250.000.000	3.250.000.000
- Penyertaan Kabupaten Sumedang 2016	2.798.000.000	2.798.000.000
- Penyertaan Kabupaten Sumedang 2017	4.629.000.000	4.629.000.000
- Penyertaan Kabupaten Sumedang 2018	4.649.367.436	4.649.367.436
- Penyertaan Kabupaten Sumedang 2019	3.918.552.264	3.918.552.264
- Penyertaan Kabupaten Sumedang 2020	3.200.000.000	3.200.000.000
- Penyertaan Kabupaten Sumedang 2021	2.100.000.000	2.100.000.000
- Penyertaan Kabupaten Sumedang 2022	1.500.000.000	1.500.000.000
- Penyertaan Kabupaten Sumedang 2023	1.000.000.000	-
<b>Jumlah Modal Penyertaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang</b>	<b>34.905.095.582</b>	<b>33.905.095.582</b>
- Penyertaan Modal berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang (Eks ADB)	11.258.109.000	11.258.109.000
<b>Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang</b>	<b>46.163.204.582</b>	<b>45.163.204.582</b>
<b>5.3.15 PENYERTAAN PEMERINTAH PUSAT / DAERAH YANG BELUM DITENTUKAN STATUSNYA</b>		
<b>Penyertaan Pemerintah Pusat</b>		
- Sejak 1997 s/d 2004	7.845.810.807	7.845.810.807
- Prasedimentasi Genteng, Tanjungsari tahun 2009	892.071.000	892.071.000
- WTP Tomo tahun 2010	2.720.092.000	2.720.092.000
- No. S-1549/HK.03/1992 tanggal 23-12-1992	1.012.446.949	1.012.446.949
- No. 5-1897/A/52/0597 tanggal 05-05-1997	8.605.926.498	8.605.926.498
- Penyertaan Modal Asal Proyek WJUDSP Tahun 2003	1.333.396.000	1.333.396.000
<b>Jumlah Penyertaan Pemerintah Pusat</b>	<b>22.409.743.254</b>	<b>22.409.743.254</b>
<b>Penyertaan Modal Propinsi Jawa Barat</b>	<b>285.329.000</b>	<b>285.329.000</b>
<b>Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang</b>		
Saldo penyertaan Pemerintah Kabupaten Sumedang yang belum ditetapkan statusnya sebesar Rp.1.398.464.000,00 merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada proyek pengeboran sumur dalam (Arthesis) yang dikelola oleh Dinas PU Kabupaten Sumedang.	1.398.464.000	1.398.464.000
<b>Jumlah Penyertaan Pemerintah Pusat / Daerah yang Belum Ditetapkan Statusnya</b>	<b>24.093.536.254</b>	<b>24.093.536.254</b>

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM (PERUMDA AM)  
TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023**

	<u>31 Desember 2023</u> (Rp)	<u>31 Desember 2022</u> (Rp)
<b>5.3.16 MODAL DONASI</b>		
Modal Donasi / Hibah terdiri dari:		
Modal Donasi s.d. 31 Desember 2016	3.789.765.197	3.789.765.197
Mutasi donasi dari kementerian PUPR tahun 2017, terdiri dari :		
- Pengadaan dan pemasangan accessories di intake cgendel kec. Tanjungsari		
No. 030/005/25, 002/NPHD/DCKTRPP/2016	113.705.000	113.705.000
- Pengadaan dan pemasangan accessories di WTP cigendel kec. Tanjungsari		
No. 030/009/25, 002/NPHD/DCKTRPP/perkim2016	50.703.000	50.703.000
- Pengadaan dan pemasangan accessories di BPS lebak jati kec. Tanjungsari		
No. 030/008/25, 002/NPHD/DCKTRPP/perkim2016	53.687.000	53.687.000
- Pengadaan dan pemasangan accessories perpompaan dan pipa dilingkungan unpad jatinangor		
No. 030/008/25, 002/NPHD/DCKTRPP/perkim2016	189.864.000	189.864.000
- Pengadaan dan pemasangan accessories perpompaan dan pipa dilingkungan perumahan griya jatinangor		
No. 030/008/25, 002/NPHD/DCKTRPP/perkim2016	75.434.000	75.434.000
<b>Jumlah penambahan Modal Donasi</b>	<u><b>483.393.000</b></u>	<u><b>483.393.000</b></u>
<b>Jumlah Modal Donasi</b>	<u><b>4.273.158.197</b></u>	<u><b>4.273.158.197</b></u>

Modal Hibah Dari Kementerian PUPR yang dikeluarkan Pencatatan Neraca Senilai **Rp. 28.983.614.000,-** dikarenakan Perumda Air Minum Tirta Medal Kab. Sumedang belum menerima BA Serah Terima Aset dari Pemerintah Kab. Sumedang (BA Serah Terima Aset baru sebatas penyerahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah) hasil rekomendasi Audit KAP Tahun Buku 2020, terdiri dari:

- SPAM ikk sumedang selatan (PKPAM -jabar-61) TA 2014 senilai Rp. 7.009.129.000,-
- SPAM ikk sukasari (PKPAM -jabar-19) TA 2015 senilai Rp. 15.050.360.000
- SPAM ikk di kawasan kumuh sumedang utara (PKPAM -jabar-40) TA 2015 senilai Rp. 1.752.459.000
- SPAM MBR IKK sumedang selatan (PKPAM-Jabar-09) TA 2015 senilai Rp. 2.418.279.000
- SPAM MBR IKK sukasari (PKPAM-Jabar-45) TA 2015 senilai Rp. 2.753.387.000

**5.3.17 CADANGAN UMUM**

Cadangan Umum sebesar Rp. 53.567.240,16 berasal dari pembagian laba sesuai Perda Nomor: 6 Tahun 1985 tanggal 20 Maret 1985 yaitu:

Pembagian Laba	Cad. Umum	Dansospen		
- Tahun 1989 s.d 1998	8.239.353	4.774.486	13.013.840	13.013.840
- Tahun 1990	4.711.602	3.141.067	7.852.669	7.852.669
- Tahun 1991	7.966.426	5.310.951	13.277.377	13.277.377
- Tahun 1992	17.684.694	11.789.796	29.474.490	29.474.490
- Tahun 1993	5.060.398	3.373.599	8.433.997	8.433.997
- Tahun 1994	9.904.767	6.603.178	16.507.945	16.507.945
<b>Jumlah Cadangan</b>	<u><b>53.567.240</b></u>	<u><b>34.993.077</b></u>	<u><b>88.560.318</b></u>	<u><b>88.560.318</b></u>

**5.3.18 SALDO LABA**

Jumlah tersebut adalah akumulasi laba/rugi sebagai berikut:

- Akumulasi rugi sampai dengan tahun lalu	(29.991.607.433)	(30.234.785.855)
- Laba/rugi Tahun Berjalan	576.429.822	243.178.421
<b>Jumlah Saldo Laba/(Rugi)</b>	<u><b>(29.415.177.612)</b></u>	<u><b>(29.991.607.434)</b></u>

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM (PERUMDA AM)**  
**TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023**

	<u>Tahun 2023</u> <u>(Rp)</u>	<u>Tahun 2022</u> <u>(Rp)</u>
<b>5.4. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN LABA RUGI</b>		
<b>5.4.1 PENDAPATAN USAHA</b>		
<b>1). Pendapatan Air</b>		
Jumlah tersebut merupakan pendapatan air terdiri dari:		
- Penjualan Air	39.399.374.900	37.636.079.100
- Jasa Administrasi	4.282.105.000	4.261.950.000
- Tangki Air	699.950.000	410.480.500
- Pendapatan Kemitraan	7.523.100	-
- Pendapatan Air Lainnya	990.000	950.000
<b>Jumlah Pendapatan Air</b>	<b><u>44.389.943.000</u></b>	<b><u>42.309.459.600</u></b>
<b>2). Pendapatan Non Air</b>		
Jumlah tersebut merupakan pendapatan non air tahun 2023 dan 2022 yang terdiri dari:		
- Sambungan Baru	1.900.608.700	1.279.489.000
- Denda Rekening Air	667.260.000	261.205.000
- Air Kemasan	545.574.500	391.354.630
- Penyambungan kembali dan BBN	32.300.000	35.320.000
- Biaya Izin	23.388.000	8.502.000
- Pendaftaran dan Penelitian	23.232.000	8.590.000
- Penggantian Meter Air	3.272.500	6.077.500
- Non Air Lainnya	3.170.000	121.630.250
<b>Jumlah Pendapatan Non Air</b>	<b><u>3.198.805.700</u></b>	<b><u>2.112.168.380</u></b>
<b>3). Pendapatan Lain-Lain</b>		
Jumlah tersebut merupakan pendapatan lain- lain tahun 2023 dan 2022 yang terdiri dari:		
- Pendapatan Atas Penghapusan Utang Usaha	176.539.284	-
- Pendapatan Lainnya	169.405.055	144.730.026
<b>Jumlah Pendapatan Lain-lain</b>	<b><u>345.944.339</u></b>	<b><u>144.730.026</u></b>
<b>5.4.2 BEBAN USAHA</b>		
<b>1). Operasi Air</b>		
Jumlah tersebut merupakan biaya operasi air yang terdiri dari pajak/retribusi air, pemakaian bahan kimia, dan pembelian air curah serta beban usaha pemasangan, dengan uraian sebagai berikut:		
- Beban bahan Kimia	1.516.096.132	1.333.776.379
- Beban Kontribusi Air	407.198.475	215.400.000
- Beban Kemitraan	259.407.900	179.684.425
- Beban Operasi Transdist Lainnya	125.005.000	55.695.000
- Beban Pemeriksaan kualitas Air	89.266.500	81.948.500
- Beban Pajak Air Permukaan Sumber	33.616.000	28.611.000
- Beban Operaasi Pengolahan Air Lainnya	-	7.665.000
<b>Jumlah Operasi Air</b>	<b><u>2.430.590.007</u></b>	<b><u>1.902.780.304</u></b>

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM (PERUMDA AM)**  
**TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023**

	<u>Tahun 2023</u> (Rp)	<u>Tahun 2022</u> (Rp)
<b>2). Beban Pegawai</b>		
Jumlah tersebut merupakan biaya pegawai yang terdiri dari gaji, tunjangan, kesejahteraan, rupa-rupa beban pegawai, dengan uraian sebagai berikut:		
- Beban Pegawai Umum	16.619.378.154	17.021.591.575
- Beban Pegawai Transmisi Dan Distribusi	5.251.983.295	4.771.613.370
- Beban Pegawai Pengolahan	4.037.730.281	3.771.564.869
<b>Jumlah Beban Pegawai</b>	<b><u>25.909.091.730</u></b>	<b><u>25.564.769.814</u></b>
<b>3). Beban Listrik</b>		
Jumlah tersebut merupakan biaya listrik sumber, pembangkit listrik sumber, pengolahan, transmisi dan distribusi, umum, dan penerangan. Dengan uraian sebagai berikut:		
- Beban Listrik Sumber	3.883.010.264	3.260.020.004
- Beban Listrik Transmisi Dan Distribusi	296.628.482	204.131.230
- Beban Listrik Umum	130.745.697	143.247.969
- Beban Listrik Pengolahan	108.259.276	60.621.069
<b>Jumlah Beban Listrik</b>	<b><u>4.418.643.719</u></b>	<b><u>3.668.020.272</u></b>
<b>4). Beban Pemeliharaan</b>		
Jumlah tersebut merupakan biaya pemeliharaan, instalasi sumber pengolahan, pipa transmisi dan distribusi, pipa dinas, water meter, kendaraan, dll. Dengan uraian sebagai berikut:		
- Pemeliharaan Instalasi Transmisi & Distribusi	1.926.340.181	1.188.964.001
- Pemeliharaan Instalasi Pengolahan	168.896.517	98.712.890
- Pemeliharaan Instalasi Sumber	156.231.640	58.178.000
- Pemeliharaan Instalasi Umum	144.012.000	85.937.500
<b>Jumlah Beban Pemeliharaan</b>	<b><u>2.395.480.339</u></b>	<b><u>1.431.792.391</u></b>
<b>5). Beban Umum Kantor</b>		
Jumlah tersebut merupakan biaya ATK, cetakan, foto copy, telepon dan faximile, beban rapat dan tamu, dan rupa-rupa beban kantor. Dengan uraian sebagai berikut:		
- Beban ATK dan Fotocopy	240.814.617	214.692.547
- Beban telepon & faximile	114.623.767	91.674.956
- Beban Barang Cetak	54.205.540	36.822.050
- Beban rapat dan tamu	36.185.600	18.968.250
- Beban Perlengkapan komputer	18.968.000	6.965.000
- Benda Pos Dan Materai	10.796.000	4.654.000
- Beban Komunikasi Data	5.250.000	-
- Beban rupa-rupa kantor	226.263.425	139.772.885
<b>Jumlah Beban Umum Kantor</b>	<b><u>707.106.949</u></b>	<b><u>513.549.688</u></b>
<b>6). Beban Hubungan Langgan</b>		
Jumlah tersebut merupakan biaya pembacaan meter penagihan rekening, penyusunan Perda, iklan, sosialisasi, dsb. Dengan uraian sebagai berikut:		
- Beban Air Minum Dalam Kemasan	423.289.701	264.615.589
- Beban Tanki Air	392.821.180	147.205.351
- Beban Promosi (Iklan)	91.728.850	40.700.000
- Beban Pembuatan DIL	49.124.900	875.150
- Beban Pembacaan Meter	33.704.000	27.660.000
- Beban Penyusunan Perda	10.000.000	22.500.000
- Beban Humas Dan Pembinaan Masyarakat	5.000.000	11.129.000
- Beban Pencetakan Formulir Rekening	3.000.000	3.756.500
- Beban Sosialisasi	1.000.000	-
- Rupa-Rupa Beban Urusan Langgan	-	1.000.000
<b>Jumlah Beban Hubungan Langgan</b>	<b><u>1.009.668.631</u></b>	<b><u>519.441.590</u></b>

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM (PERUMDA AM)**  
**TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023**

	<u>Tahun 2023</u> <u>(Rp)</u>	<u>Tahun 2022</u> <u>(Rp)</u>
<b>7). Beban Penelitian dan Pengembangan</b>		
Jumlah tersebut merupakan biaya penelitian dan survey perencanaan teknik, perencanaan bidang usaha dan keuangan dan sebagainya.		
- Beban Kajian, Analisa Dan Anggaran Aspek SDM	302.760.500	-
- Beban Kajian, Analisa Dan Anggaran Aspek Keuangan	90.895.400	-
- Beban Survey Dan Penelitian	26.211.000	20.063.000
- Beban Kajian, Analisa Dan Anggaran Aspek Eksternal	20.229.938	-
- Beban Kajian, Analisa Dan Anggaran Aspek Operasional	8.020.000	-
- Rupa-Rupa Penelitian Dan Pengembangan	4.000.000	-
- Beban Litbang Bid. Usaha & Keuangan	-	9.000.000
- Beban Litbang Teknik Produksi	-	5.467.500
- Beban Litbang Sumber Daya Manusia	-	251.008.000
<b>Jumlah Beban Penelitian dan Pengembangan</b>	<b><u>452.116.838</u></b>	<b><u>285.538.500</u></b>
<b>8). Beban Umum Keuangan</b>		
- Beban Bunga Pinjaman	38.562.400	19.894.100
- Beban Administrasi	7.890.000	26.300.000
- Beban Asuransi	1.987.500	6.616.000
<b>Jumlah Beban Penelitian dan Pengembangan</b>	<b><u>48.439.900</u></b>	<b><u>52.810.100</u></b>
<b>9). Rupa-Rupa Beban Umum</b>		
Rupa-rupa beban umum tahun 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:		
- Beban Koordinasi	1.272.658.386	761.410.301
- Beban Gaji Direksi	360.762.776	301.894.428
- Beban Tunjangan Operasional Direksi	292.624.287	207.207.218
- Beban Bantuan Dan Sumbangan	279.671.500	146.468.000
- Beban Perjalanan Dinas Pegawai	265.074.591	182.882.326
- Beban Pajak Penghasilan	254.999.442	360.000.000
- Beban Bahan Bakar Operasional	128.738.839	17.433.900
- Beban Audit	101.224.520	91.300.000
- Beban Honor Dewan Pengawas	97.816.377	109.799.767
- Beban Sewa	79.683.333	116.200.000
- Beban Keamanan	69.750.000	66.750.000
- Beban Ongkos Angkut Bahan Bakar	52.650.000	16.000.000
- Beban Langganan Media Cetak	33.944.000	19.250.000
- Beban Honor Anggota Dewan Pengawas	33.393.432	-
- Beban Pajak Bumi Dan Bangunan	29.971.985	23.679.909
- Beban Tunjangan Hari Raya Direksi	26.628.350	24.586.691
- Beban Iuran Keanggotaan	22.000.000	-
- Beban Pajak Kendaraan	10.875.800	9.899.600
- Beban Thr Dewan Pengawas	10.727.421	8.429.723
- Beban Buku	6.505.000	-
- Beban Proses Perijinan	2.702.000	98.600.000
- Rupa-rupa Beban Umum Lainnya	1.081.296.570	1.283.700.555
<b>Jumlah Rupa-rupa Beban Umum</b>	<b><u>4.513.698.609</u></b>	<b><u>3.845.492.418</u></b>



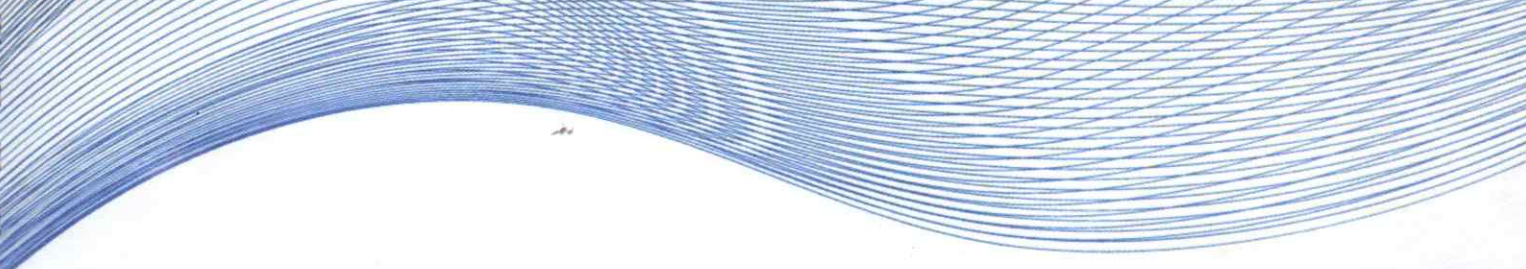
**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM (PERUMDA AM)**  
**TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023**

	<u>Tahun 2023</u> (Rp)	<u>Tahun 2022</u> (Rp)
<b>10). Beban Penyisihan Piutang</b>		
Beban Penyisihan Piutang Usaha tahun 2023 dan 2022		
- Beban penyisihan Piutang Air	313.577.568	165.007.526
- Beban penyisihan Piutang Non Air	-	-
<b>Jumlah Beban Penyisihan Piutang</b>	<b><u>313.577.568</u></b>	<b><u>165.007.526</u></b>
<b>11). Beban Penyusutan Dan Amortisasi</b>		
Beban Penyusutan Aset Tetap tahun 2023 dan 2022, terdiri dari		
- Beban Penyusutan Transmisi & Distribusi	2.876.029.058	3.427.432.227
- Beban Penyusutan Sumber Air	344.014.912	351.171.476
- Beban Penyusutan Kendaraan	283.075.182	212.199.882
- Beban Penyusutan Pengolahan Air	279.598.857	1.380.162.775
- Beban Penyusutan Inventaris Kantor	176.706.896	180.406.002
- Beban Penyusutan Pompa Air	154.916.403	239.068.253
- Beban Penyusutan Bangunan / Gedung	37.911.617	37.391.884
- Beban Penyusutan Peralatan / Perlengkapan	35.807.468	30.724.048
<b>Jumlah Beban Penyusutan</b>	<b><u>4.188.060.392</u></b>	<b><u>5.858.556.547</u></b>
- Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	417.188.194	391.148.236
- Beban Amortisasi Biaya Ditangguhkan	314.963.934	109.124.240
<b>Jumlah Beban Amortisasi</b>	<b><u>732.152.128</u></b>	<b><u>500.272.476</u></b>
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b><u>4.920.212.520</u></b>	<b><u>6.358.829.023</u></b>
<b>12). Beban Pajak</b>	<b><u>222.793.125</u></b>	<b><u>-</u></b>
Merupakan beban pajak atas denda keterlambatan dan pajak badan yang ditanggung perusahaan tahun 2023 dan 2022		
<b>13). Beban Lain-Lain</b>		
Beban lain-lain adalah beban diluar usaha perusahaan tahun 2023 dan 2022 terdiri dari:		
- Beban Pajak Bank	10.051.576	11.365.460
- Beban Bank Lainnya	2.400.000	1.912.500
- Beban Bank Buku Cek Dan Giro	1.360.000	1.558.000
- Beban Administrasi Bank	336.000	312.000
- Beban Lainnya	2.695.706	-
<b>Jumlah Beban Lain-lain</b>	<b><u>16.843.282</u></b>	<b><u>15.147.960</u></b>
<b>14). Laba/(Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak Penghasilan Pajak Penghasilan</b>	<b><u>576.429.822</u></b>	<b><u>243.178.421</u></b>
<b>Laba/(Rugi) Tahun Berjalan</b>	<b><u>576.429.822</u></b>	<b><u>243.178.421</u></b>

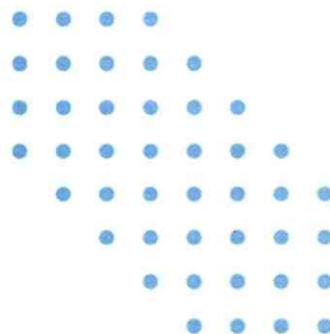
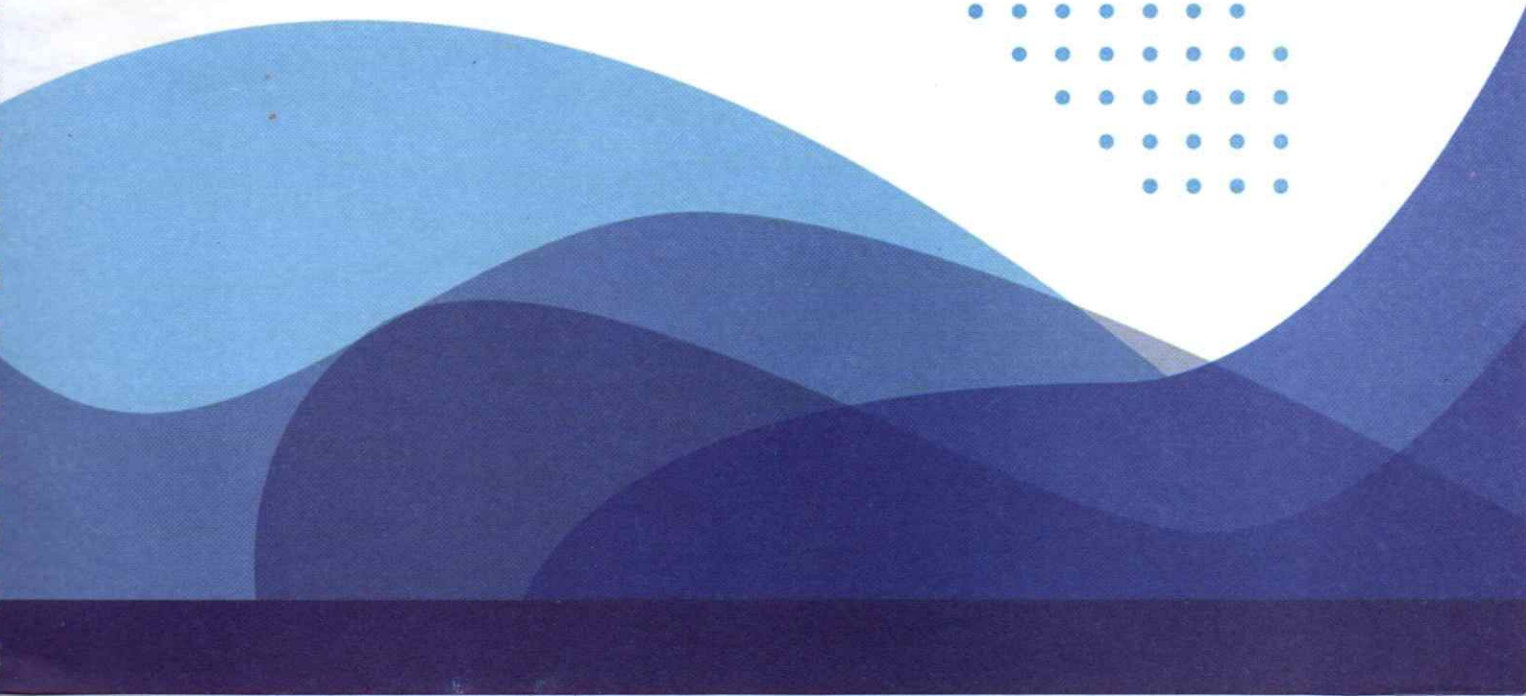
# PD BPR Sumedang



**BKAD**  
**KABUPATEN SUMEDANG**



Perusahaan Umum Daerah  
Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang  
Laporan Keuangan  
31 Desember 2023 dan  
untuk Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal Tersebut  
serta  
Laporan Auditor Independen



## DAFTAR ISI

### Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan Laporan Auditor Independen

	<b>Halaman</b>
<b>Laporan Keuangan</b>	
Neraca	1
Laporan Laba Rugi	3
Laporan Perubahan Ekuitas	4
Laporan Arus Kas	5
Catatan atas Laporan Keuangan	7

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2023  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SUMEDANG**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Yanti Krisyana Dewi, S.E.  
Alamat kantor : Jalan Mayor Abdurachman No. 78, Sumedang  
Alamat rumah : Perum Parigi Asri RT 003 RW 011 Kel. Kotakulon Kec. Sumedang Selatan  
No Telp : 081386828753  
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Bangbang Yoyon Hernayawan  
Alamat kantor : Jalan Mayor Abdurachman No. 78, Sumedang  
Alamat rumah : Jalan Serma Muhtar RT 04 RW 05 Kel. Situ Kec. Sumedang Selatan  
No Telp : 08122447345  
Jabatan : Direktur Operasional
3. Nama : Budi Kamsin  
Alamat kantor : Jalan Mayor Abdurachman No. 78, Sumedang  
Alamat rumah : Dusun Bojong Jati RT 05 RW 03 Desa Kebonjati Kec. Sumedang Utara  
No Telp : 089656124081  
Jabatan : Direktur Kepatuhan

menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang;
2. Laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP);
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang telah dimuat secara lengkap dan benar;  
b. Laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Sumedang, 7 Februari 2024



H. Bangbang Yoyon H, S.H.  
Direktur Operasional

Yanti Krisyana Dewi, S.E.  
Direktur Utama

Budi Kamsin, S.E.  
Direktur Kepatuhan

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH BPR BANK SUMEDANG**

Jalan Mayor Abdurachman No. 78 Sumedang Telp. 0261-202667 Fax. 0261-205049 Email: [pusat.bprsm@gmail.com](mailto:pusat.bprsm@gmail.com)

Bank Sumedang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



No. : 00010/2.0923/AU.2/07/0005-1/1/II/2024

### Laporan Auditor Independen

Direksi dan Pemegang Saham  
**Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat  
Bank Sumedang**  
Sumedang

#### **Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang ("BPR") yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2023 serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan BPR tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

#### **Basis Opini**

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap BPR berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

#### **Hal lain**

Laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang per 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang dalam laporannya No. LAI 00014/2.0570/AU.2/07/1371-2/1/II/2023 tanggal 6 Februari 2023 menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian.

#### **Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

### **Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan (Lanjutan)**

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan BPR dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi BPR atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan BPR.

### **Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal BPR.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan BPR untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan BPR tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (Lanjutan)**

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kantor Akuntan Publik Sabar & Rekan



Dr. Sabar., S.E., M.Ak., Ak., CA., CPI., CPA., ASEAN CPA.  
Izin Akuntan Publik No. AP.0005  
Izin Usaha No. Kep. 1038/KM.1/2012

7 Februari 2024





**PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK SUMEDANG  
NERACA  
31 Desember 2023**

**A S E T**

	Catatan	2 0 2 3	2 0 2 2
		Rp	Rp
Kas	3c, 4	6.568.446.835	5.987.019.388
Pendapatan bunga yang akan diterima	3d, 5	2.372.964.952	2.204.368.631
Penempatan pada bank lain	3e, 6		
Giro		20.577.952.342	14.859.975.506
Tabungan		39.561.131.844	31.691.138.650
Deposito		24.750.000.000	26.500.000.000
Penempatan pada bank lain Penyisihan penghapusan	3i, 6	84.889.084.186 (303.367.953)	73.051.114.156 (241.610.118)
Jumlah		84.585.716.233	72.809.504.038
Kredit yang diberikan			
Jumlah kredit yang diberikan	3f, 7	288.258.337.158	270.262.357.790
Provisi		(4.344.812.808)	(4.290.036.902)
Penyisihan kerugian kredit	3i, 7g	(11.904.747.407)	(11.320.582.583)
Bersih		272.008.776.943	254.651.738.305
Agunan yang diambil alih	3h, 8	754.080.850	745.855.850
Aset tetap – bersih	3j, 9	6.033.649.561	6.461.132.018
Aset tak berwujud – bersih	3l, 10	282.703.337	1
Aset lain-lain	11	415.990.247	3.685.838.325
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>373.022.328.958</b>	<b>346.545.456.556</b>

Sumedang, 7 Februari 2024

H. Bangbang Yoyon .H, S.H.  
Direktur Operasional



Yanti Krisyana Dewi, S.E.  
Direktur Utama

Budi Kamsin, S.E.  
Direktur Kepatuhan

**Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang  
tidak terpisahkan dari laporan keuangan**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK SUMEDANG  
NERACA (Lanjutan)  
31 Desember 2023**

**KEWAJIBAN DAN EKUITAS**

	Catatan	2023	2022
		Rp	Rp
<b>KEWAJIBAN</b>			
Kewajiban segera	3m, 12	1.586.416.899	1.145.028.604
Utang bunga	13	195.325.534	172.176.387
Utang pajak	16a	311.494.280	3.816.904.207
Simpanan	3n, 14	245.134.867.707	224.919.512.597
Simpanan dari bank lain	3n, 15	15.927.482.330	17.110.018.020
Pinjaman yang diterima	17	12.438.109.982	10.440.964.985
Kewajiban imbalan kerja	3o, 18	4.168.817.735	3.846.669.139
Kewajiban lain-lain	19	12.153.836.619	11.398.670.124
Jumlah kewajiban		291.916.351.086	272.849.944.063
<b>EKUITAS</b>			
Modal			
Modal disetor	20	47.019.740.979	42.019.740.979
Cadangan	3p, 21	21.000.957.689	18.332.254.233
Belum ditentukan tujuannya	22	13.085.279.204	13.343.517.281
Jumlah ekuitas		81.105.977.872	73.695.512.493
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>373.022.328.958</b>	<b>346.545.456.556</b>

Sumedang, 7 Februari 2024

H. Bangbang Yoyon .H, S.H.  
Direktur Operasional



Yanti Krisyana Dewi, S.E.  
Direktur Utama

Budi Kamsin, S.E.  
Direktur Kepatuhan

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang  
tidak terpisahkan dari laporan keuangan

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK SUMEDANG  
LAPORAN LABA RUGI  
Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2023**

	Catatan	2023	2022
		Rp	Rp
Pendapatan operasional :			
Bunga	3q, 23	53.317.221.301	50.659.831.348
Provisi dan administrasi	3r, 24	4.306.786.530	4.274.811.595
Jumlah pendapatan bunga		57.624.007.831	54.934.642.943
Beban bunga	3q, 25	(12.035.924.256)	(12.015.504.877)
Pendapatan bunga, bersih		45.588.083.575	42.919.138.066
Pendapatan operasional lainnya	26	2.681.213.704	2.919.185.519
Beban operasional:			
Beban penyisihan kerugian aset produktif	27	4.286.168.241	3.180.419.455
Beban penyusutan dan amortisasi	28	714.156.356	857.533.154
Beban pemasaran	29	641.389.973	511.382.716
Beban administrasi dan umum	30	25.439.262.732	23.931.224.123
Jumlah beban operasional		31.080.977.302	28.480.559.448
Laba operasional		17.188.319.977	17.357.764.137
Pendapatan (beban) non operasional :	31		
Pendapatan non operasional		356.683.856	301.332.903
Beban non operasional		(691.856.349)	(498.675.552)
Jumlah pendapatan (beban) non operasional		(335.172.493)	(197.342.649)
Laba sebelum pajak penghasilan		16.853.147.484	17.160.421.488
Pajak penghasilan :			
Kini	3s, 16a	(3.767.868.280)	(3.816.904.207)
Laba bersih tahun berjalan		<b>13.085.279.204</b>	<b>13.343.517.281</b>

Sumedang, 7 Februari 2024

H. Bangbang Yoyon .H, S.H.  
Direktur Operasional



Yanti Krisyana Dewi, S.E.  
Direktur Utama

Budi Kamsin, S.E.  
Direktur Kepatuhan

**Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang  
tidak terpisahkan dari laporan keuangan**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK SUMEDANG**

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada**

**Tanggal 31 Desember 2023**

	Modal Disetor	Cadangan Tujuan	Cadangan Umum	Belum Ditentukan Tujuannya	Jumlah Ekuitas
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>36.519.740.979</b>	<b>9.025.342.824</b>	<b>6.513.337.257</b>	<b>13.967.870.763</b>	<b>66.026.291.823</b>
Setoran modal	5.500.000.000	-	-	-	5.500.000.000
Pembagian dividen	-	-	-	(7.682.328.920)	(7.682.328.920)
Pembentukan (penggunaan) cadangan	-	1.396.787.076	1.396.787.076	(2.793.574.152)	-
Pembagian dana penguatan lembaga dan CSR	-	-	-	(3.491.967.691)	(3.491.967.691)
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	13.343.517.281	13.343.517.281
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>42.019.740.979</b>	<b>10.422.129.900</b>	<b>7.910.124.333</b>	<b>13.343.517.281</b>	<b>73.695.512.493</b>
Setoran modal	5.000.000.000	-	-	-	5.000.000.000
Pembagian dividen	-	-	-	(7.338.934.505)	(7.338.934.505)
Pembentukan (penggunaan) cadangan	-	1.334.351.728	1.334.351.728	(2.668.703.456)	-
Pembagian dana kesejahteraan, jasa produksi, tantiem, dan CSR	-	-	-	(3.335.879.320)	(3.335.879.320)
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	13.085.279.204	13.085.279.204
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>47.019.740.979</b>	<b>11.756.481.628</b>	<b>9.244.476.061</b>	<b>13.085.279.204</b>	<b>81.105.977.872</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang  
tidak terpisahkan dari laporan keuangan

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK SUMEDANG  
LAPORAN ARUS KAS  
Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2023**

	2023	2022
	Rp	Rp
<b>Arus kas dari aktivitas operasi</b>		
Laba bersih tahun berjalan	13.085.279.204	13.343.517.281
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih tahun berjalan menjadi kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi:		
Penyusutan dan amortisasi	714.156.356	857.533.154
Penyisihan penghapusan (pemulihan) untuk:		
Penempatan pada bank lain	61.757.835	23.781.288
Kredit yang diberikan	638.940.730	1.506.766.033
Laba operasi sebelum perubahan dalam aset dan kewajiban operasi	14.500.134.125	15.731.597.756
Perubahan aset dan kewajiban operasi:		
Kenaikan penempatan pada bank lain	(11.837.970.031)	(5.966.845.533)
Kenaikan pendapatan bunga yang akan diterima	(168.596.321)	(244.535.523)
Kenaikan kredit yang diberikan	(17.995.979.368)	(22.246.154.440)
Penurunan (kenaikan) agunan yang diambil alih	(8.225.000)	92.500.000
Penurunan (kenaikan) aset lain-lain	3.269.848.078	(36.626.279)
Kenaikan kewajiban segera	441.388.295	12.211.541
Kenaikan (penurunan) utang bunga	23.149.147	(7.696.315)
Penurunan utang pajak	(3.505.409.927)	(149.784.933)
Kenaikan simpanan	20.215.355.110	12.931.546.657
Kenaikan (penurunan) simpanan dari bank lain	(1.182.535.690)	7.960.942.344
Kenaikan (penurunan) pinjaman yang diterima	1.997.144.997	(3.076.730.004)
Kenaikan kewajiban imbalan kerja	322.148.596	514.427.048
Kenaikan kewajiban lain-lain	755.166.495	1.759.485.551
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	6.825.618.506	7.274.337.870

**Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK SUMEDANG  
LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)  
Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2023**

	<b>2 0 2 3</b>	<b>2 0 2 2</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
<b>Arus kas dari aktivitas investasi</b>		
Pembelian aset tetap dan inventaris	(245.007.234)	(315.330.846)
Pembelian aset tidak berwujud	(324.370.000)	-
 Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	 (569.377.234)	 (315.330.846)
<b>Arus kas dari aktivitas pendanaan</b>		
Setoran modal	5.000.000.000	5.500.000.000
Penambahan cadangan	2.668.703.456	2.793.574.152
Pembagian dividen	(7.338.934.505)	(7.682.328.920)
Pembagian dana kesejahteraan dan jasa produksi, tantiem, dan CSR	(3.335.879.320)	(3.491.967.691)
Pembentukan (penggunaan) cadangan	(2.668.703.456)	(2.793.574.152)
 Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	 (5.674.813.825)	 (5.674.296.611)
<b>Kenaikan bersih kas dan setara kas</b>	<b>581.427.447</b>	<b>1.284.710.413</b>
<b>Kas dan setara kas pada awal tahun</b>	<b>5.987.019.388</b>	<b>4.702.308.975</b>
<b>Kas dan setara kas pada akhir tahun</b>	<b>6.568.446.835</b>	<b>5.987.019.388</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang  
tidak terpisahkan dari laporan keuangan

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK SUMEDANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 Desember 2023**

**1. UMUM**

**a. Pendirian Perusahaan**

Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang ("BPR") berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Sumedang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang tanggal 6 April 2015 dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dan Bupati Sumedang, PD BPR melakukan perubahan nama menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang tanggal 9 Januari 2019 dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dan Bupati Sumedang, BPR berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang.

BPR telah memiliki izin kegiatan usaha atas perubahan nama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang tanggal 30 Juli 2019 dengan NIB 9120005773702 dan telah terdaftar sebagai wajib pajak dengan NPWP: 21.131.772.2-441.000.

**b. Maksud dan Tujuan**

Maksud didirikannya BPR adalah meningkatkan peran dan fungsi badan usaha milik daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang jasa perbankan.

Tujuan didirikannya BPR adalah:

1. memberikan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di bidang perbankan dengan prinsip tata kelola yang baik;
2. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
3. mendorong peningkatan usaha mikro, kecil, dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. memperoleh laba dan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

**c. Kedudukan Kantor**

Kantor Pusat Perumda BPR Bank Sumedang berkedudukan di Jl. Mayor Abdurahman No. 78 RT 003 RW 003 Kota Kaler, Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat serta mempunyai: 1 (satu) Kantor Pusat Non Operasional, 7 (tujuh) Kantor Cabang, dan 8 (delapan) Kantor Kas.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK SUMEDANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)  
31 Desember 2023**

1. **UMUM (Lanjutan)**

c. **Kedudukan Kantor**

Kantor Cabang :

1. Kantor Cabang Cimalaka
2. Kantor Cabang Tanjungsari
3. Kantor Cabang Ranca Kalong
4. Kantor Cabang Buah Dua
5. Kantor Cabang Tomo
6. Kantor Cabang Darmaraja
7. Kantor Cabang Wado

Kantor Kas :

1. Kantor pelayanan kas Sumedang Utara
2. Kantor pelayanan kas IPP
3. Kantor pelayanan kas MPP
4. Kantor pelayanan kas Cisarua
5. Kantor pelayanan kas Tanjungkerta
6. Kantor pelayanan kas Conggeang
7. Kantor pelayanan kas Jatigede
8. Kantor pelayanan kas Jatinangor

Susunan Organisasi BPR terdiri dari :

- a. Kantor Pusat
- b. Unit Operasional Kantor Pusat
- c. Kantor Cabang
- d. Kantor Pelayanan Kas
- e. *Payment Point*

d. **Kepengurusan**

Berdasarkan keputusan Bupati Sumedang Nomor 900/KEP.261-HUK/2020 dan Nomor 539/KEP.476-HUK/2020 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas periode 2022-2024 tanggal 1 Desember 2020, yaitu Pengangkatan Nurdin Zein, S.E. dan Sdr. Taufik Hidayat, S.H., M.H, sebagai anggota Dewan Pengawas.



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK SUMEDANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)  
31 Desember 2023**

1. **UMUM (Lanjutan)**

d. **Kepengurusan (Lanjutan)**

Susunan Dewan Pengawas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut :

Ketua : Nasam, S.E., Ak  
Anggota : Nurdin Zein, S.E.  
Anggota : Taufik Hidayat, S.H., M.H.

Berdasarkan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 245 tahun 2021 tentang Pengangkatan Kembali Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang Periode 2021 – 2026 tanggal 22 Juni 2021 dan berdasarkan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 539/KEP-HUK/2020 tentang Pengangkatan Sdr. H. Bangbang Yoyon Hernayawan, S.H. sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang Masa Jabatan 2020 – 2025 tanggal 25 September 2020, susunan Direksi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut :

Direktur utama : Yanti Krisyana Dewi, S.E.  
Direktur operasional : H. Bangbang Yoyon Hernayawan, S.H.  
Direktur kepatuhan : Budi Kamsin, S.E.

2. **PERNYATAAN KEPATUHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Direksi BPR menyatakan bahwa Laporan Keuangan tahun 2023 dengan informasi komparatif pendekatan angka koresponding untuk tahun 2022 disajikan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dan telah memenuhi semua persyaratannya.

3. **IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Catatan atas laporan keuangan khususnya yang berkaitan dengan ikhtisar kebijakan akuntansi BPR Periode 31 Desember 2023, sebagai berikut:

a. **Dasar Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha (*going concern*) serta mengikuti konversi harga historis (*historical cost*). Kebijakan akuntansi ini diterapkan secara konsisten.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK SUMEDANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)  
31 Desember 2023**

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)**

**a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (Lanjutan)**

Laporan keuangan disusun berdasarkan dasar akrual (*accrual basis*), kecuali tagihan bunga atas aktiva produktif yang digolongkan sebagai *non performing* dan dicatat secara dasar kas (*cash basis*).

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan SAK-ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik).

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan.

**b. Transaksi dengan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa**

- i. Perusahaan mengungkapkan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Suatu pihak mempunyai hubungan istimewa dengan entitas jika :
  - a. Mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama dengan entitas (termasuk entitas induk, entitas anak dan *fellow subsidiaris*);
  - b. Memiliki kepemilikan di entitas yang memberikan pengaruh signifikan atas entitas; atau
  - c. Memiliki pengendalian bersama atas entitas;
- ii. Pihak tersebut adalah entitas asosiasi dari entitas;
- iii. Pihak tersebut adalah *joint ventures* dimana entitas tersebut merupakan *venture*;
- iv. Pihak tersebut adalah personil manajemen kunci entitas atau entitas induknya;
- v. Pihak tersebut adalah keluarga dekat dari setiap orang yang diuraikan dalam (i) atau (iv);
- vi. Pihak tersebut adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh, atau dimiliki hak suara secara signifikan, secara langsung atau tidak langsung, setiap orang yang diuraikan dalam (iv) atau (v); atau
- vii. Pihak tersebut adalah program imbalan kerja untuk imbalan pekerja entitas, atau setiap entitas yang mempunyai hubungan istimewa dengan entitas tersebut.

Perusahaan menetapkan bahwa personil manajemen kunci meliputi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Sedangkan anggota keluarga dekat meliputi suami, istri, anak atau tanggungannya.

Perusahaan mengungkapkan saldo dan transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yaitu jenis dan jumlah transaksi, saldo termasuk syarat dan kondisi serta sifat pembayaran dan rincian jaminan yang diberikan atau diterima, penyisihan kerugian piutang tidak tertagih terkait jumlah saldo piutang, dan beban yang diakui dalam periode yang berkaitan dengan piutang ragu-ragu yang jatuh tempo dari pihak hubungan istimewa. Hubungan entitas anak dan induk diungkapkan baik ada atau tidak terdapat transaksi antar hubungan istimewa. Kompensasi personil manajemen kunci diungkap secara total.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK SUMEDANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)  
31 Desember 2023**

3. **IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)**

b. **Transaksi dengan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa (Lanjutan)**

Dalam kegiatan usahanya, BPR melakukan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Yang dimaksud dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sesuai dengan SK Direksi BI No. 31/61/KEP/DIR adalah sebagai berikut:

- a. Pemegang saham 10% atau lebih dari modal disetor bank.
- b. Anggota dewan komisaris.
- c. Anggota dewan direksi.
- d. Keluarga dari pihak-pihak pada huruf a s/d c.
- e. Pejabat bank lainnya yang mempunyai fungsi eksekutif.
- f. Perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak dimaksud dalam huruf a sampai e yang kepemilikannya baik individual maupun keseluruhan 25% atau lebih dari modal disetor perusahaan.

c. **Kas**

Kas meliputi seluruh uang kertas dan logam rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah yang berada di kas.

d. **Pendapatan Bunga yang Akan Diterima**

Pendapatan bunga yang akan diterima dari kredit dengan kualitas lancar atau *performing* yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengakuan pendapatan bunga dari bank lain.

e. **Penempatan pada Bank Lain**

Penempatan pada bank lain terdiri dari giro pada bank umum, tabungan pada bank lain, deposito berjangka pada bank lain, dan sertifikat deposito pada bank umum diakui sebagai nilai nominal. Penyisihan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian atas penempatan tersebut disajikan sebagai pengurang (*offsetting account*) dari saldo penempatan tersebut (jika ada penurunan nilai atau kemungkinan kerugian).

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK SUMEDANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)  
31 Desember 2023**

3. **IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)**

f. **Kredit yang Diberikan**

Kredit yang diberikan dinyatakan berdasarkan jumlah bruto tagihan BPR yang belum dilunasi oleh nasabah setelah dikurangi penyisihan kerugian kredit dan amortisasi provisi kredit serta ditambah biaya kredit. Kredit yang diberikan dihapus bukukan pada saat kredit tersebut dipastikan memenuhi persyaratan hapus buku dan telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Seluruh penerimaan yang berhubungan dengan kredit diragukan dan macet diakun terlebih dahulu sebagai pengurang pokok kredit. Kelebihan penerimaan dari pokok kredit diakui sebagai pendapatan bunga. Penerimaan dari kredit *performing* diakui melunasi bunga terlebih dahulu. Akan tetapi, untuk kredit *non performing* yang digolongkan diragukan dan macet, penerimaan ini dipergunakan terlebih dahulu untuk mengurangi pokok kredit karena kemungkinan ketertagihannya sangat tipis.

g. **Restrukturisasi Kredit**

Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan BPR dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban. Berdasarkan pertimbangan ekonomi atau hukum, BPR memberikan konsensi khusus kepada debitur, yaitu konsensi yang tidak akan diberikan apabila tidak terdapat kesulitan keuangan di pihak debitur.

Restrukturisasi kredit dilakukan apabila BPR mempunyai keyakinan bahwa debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan masih memenuhi kewajibannya setelah kredit direstrukturisasi. Cara restrukturisasi yaitu:

- a. Modifikasi persyaratan kredit: penurunan suku bunga, perpanjangan, pengurangan tunggakan.
- b. Penambahan fasilitas kredit: *fresh money* atau konversi tunggakan bunga.

h. **Agunan yang Diambil Alih**

Agunan yang Diambil Alih atau AYDA adalah aset yang diperoleh BPR, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan suka rela pemilik agunan berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada BPR (*debt to asset swap*).

Penyelesaian kredit terkait agunan:

1. Penyerahan agunan sebagai penyelesaian kredit. Pengambilalihan agunan merupakan penyelesaian kredit. AYDA dicatat hanya yang berasal dari penyelesaian kredit.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK SUMEDANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)  
31 Desember 2023**

3. **IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)**

h. **Agunan yang Diambil Alih (Lanjutan)**

2. Penjualan agunan (bersama atau dengan persetujuan debitur) untuk melunasi kewajiban merupakan bagian dari proses penyelesaian kredit.

Pengambilalihan agunan:

1. Jika hasil penjualan agunan melebihi kewajiban debitur, BPR tidak mengembalikan kelebihan kepada debitur atau jika hasil penjualan agunan kurang dari kewajiban debitur, debitur tidak membayar kekurangannya maka perjanjian kredit selesai dan kemudian dicatat sebagai AYDA.
2. Jika hasil penjualan agunan melebihi kewajiban debitur, BPR mengembalikan kelebihan kepada debitur atau jika hasil penjualan agunan kurang dari kewajiban debitur, debitur membayar kekurangannya maka perjanjian kredit belum selesai dan kemudian dicatat dalam rekening administratif.

i. **Penyisihan Kerugian**

Penyisihan kerugian aset produktif serta estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi dibentuk berdasarkan penelaahan manajemen terhadap kualitas masing-masing aset produktif pada akhir tahun dengan mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia mengenai pembentukan penyisihan kerugian aset produktif.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa keuangan RI Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Bank Perkreditan Rakyat Pasal 16 bahwa BPR wajib membentuk PPAP berupa PPAP umum dan PPAP khusus untuk masing-masing aset produktif. Adapun besarnya pembentukan penyisihan untuk masing-masing aktiva produktif menurut Peraturan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

**Cadangan Umum**

0,50% dari seluruh aktiva produktif yang digolongkan lancar.

**Cadangan Khusus**

- a) 3% dari seluruh aktiva produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan (Perlakuan berlaku sejak Desember 2021).
- b) 10% dari seluruh aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurang dengan nilai agunan.
- c) 50% dari seluruh aktiva produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurang dengan nilai agunan.
- d) 100% dari seluruh aktiva produktif yang digolongkan macet.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK SUMEDANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)  
31 Desember 2023**

3. **IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)**

i. **Penyisihan Kerugian (Lanjutan)**

**Penyisihan Kerugian Aktiva Produktif serta Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi**

Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP sebagai berikut:

- a) 100% (seratus perseratus) dari agunan yang bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan dan logam mulia;
- b) 85% (delapan puluh lima perseratus) dari nilai pasar untuk agunan berupa emas perhiasan;
- c) 80 (delapan puluh persen) dari nilai hak tanggungan atau fidusia untuk agunan tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat yang dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia.
- d) 70% (tujuh puluh perseratus) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan sejalan dengan undang-undang serta ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- e) 60% (enam puluh perseratus) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk agunan berupa tanah, bangunan dan/atau rumah yang memiliki sertifikat yang tidak diikat dengan hak tanggungan;
- f) 50%, (lima puluh perseratus) dari NJOP untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (*letter C*) atau yang dipersamakan dengan itu termasuk Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh notaris atau pejabat lainnya yang berwenang yang dilampiri Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pada satu tahun terakhir;
- g) 50% (lima puluh perseratus) dari harga pasar, harga sewa atau harga pengalihan, untuk agunan berupa tempat usaha/los/kios/lapak/hak pakai/hak garap yang disertai bukti kepemilikan atau surat ijin pemakaian tempat usaha/los/kios/lapak/hak pakai/hak garap yang dikeluarkan oleh pengelola yang sah dan disertai dengan surat kuasa menjual atas pengalihan hak yang dibuat/disahkan oleh notaris atau dibuat oleh pejabat lainnya yang berwenang;
- h) 50% (lima puluh perseratus) dari nilai pasar untuk agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- i) 50% (lima puluh perseratus) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan dan sejalan dengan undang-undang serta ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- j) 50% (lima puluh perseratus) untuk bagian dana yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit;
- k) 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai pasar untuk agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan disertai dengan surat kuasa menjual yang dibuat/disahkan oleh notaris; dan
- l) 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 30 (tiga puluh) bulan dan sejalan dengan undang-undang serta ketentuan dan prosedur yang berlaku.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK SUMEDANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)  
31 Desember 2023**

3. **IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)**

j. **Aset Tetap**

Aset tetap dibukukan berdasarkan nilai perolehannya. Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 (Pasal 1), kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ke-13 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/KMK.04/1995 tanggal 7 Februari 1995 tentang jenis-jenis harta berwujud yang termasuk dalam kelompok masa manfaat untuk keperluan penyusutan, pengelompokan aktiva tetap bukan bangunan berdasarkan SK Menteri Keuangan Nomor 138/KMK-03/2002, dan aset tetap dan inventaris kecuali tanah diamortisasi pada bulan dilakukan pengeluaran dan atau selesainya pekerjaan.

Persentase penyusutan/amortisasi sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Masa Manfaat Ekonomis	Penyusutan Tarif/Tahun
Bangunan dan Gedung	20 Tahun	5,00 %
Kendaraan Roda 2	4 Tahun	25,00%
Kendaraan Roda 4	8 Tahun	12,50%
Peralatan Kantor 1	4 Tahun	25,00%
Peralatan Kantor 2	8 Tahun	12,50%

Pengeluaran untuk perbaikan atau perawatan aktiva tetap untuk menjaga manfaat keekonomian masa yang akan datang dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Penyempurnaan yang menambah nilai (kegunaan) dan masa manfaat, dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual, dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap berikut akumulasi penyusutan yang bersangkutan dan keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan suatu aset tetap diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

Aset tetap yang terjual dikeluarkan dari kelompok aset yang bersangkutan dan laba atau rugi yang diperoleh dari penjualan tersebut dilaporkan dalam laporan aktivitas tahun yang bersangkutan.

Aset tetap yang dibuat sendiri dan sampai akhir periode akuntansi belum selesai dibukukan ke aset dalam proses.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK SUMEDANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)  
31 Desember 2023**

3. **IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)**

k. **Biaya Dibayar Dimuka**

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

l. **Aset Tidak Berwujud**

Aktiva tidak berwujud diakui pada saat terjadinya sebesar biaya perolehan dan diamortisasi selama 8 tahun atau dengan tarif sebesar 12,5% per tahun.

m. **Kewajiban Segera**

Kewajiban segera adalah kewajiban yang telah jatuh tempo dan atau yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar antara lain: pajak, biaya yang masih harus dibayar, titipan dan lainnya.

n. **Simpanan**

Tabungan dan deposito dinyatakan sebesar nilai kewajiban bank kepada nasabah. Sertifikat deposito dinyatakan sebesar nilai nominal dikurangi dengan bunga yang belum diamortisasi.

o. **Kewajiban Imbalan Kerja**

Imbalan kerja merupakan seluruh bentuk imbalan yang diberikan BPR atas jasa yang diberikan oleh pekerja. Besarnya imbalan pasca kerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan besarnya kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja. Pada dasarnya imbalan kerja yang diterapkan BPR berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti.

Kewajiban imbalan kerja adalah saldo kewajiban yang timbul dari imbalan kerja. Kewajiban imbalan kerja jangka pendek disajikan dalam pos kewajiban segera sebesar jumlah yang terutang dan tidak didiskontokan. Kewajiban imbalan kerja jangka panjang disajikan dalam pos yang di diskontokan.

Kewajiban imbalan kerja diakui pada saat pegawai telah memberikan jasanya kepada BPR dalam suatu periode tertentu. Kewajiban imbalan kerja berkurang pada saat dibayarkan. Kewajiban imbalan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah tidak didiskonto (*undiscounted amount*). Kewajiban imbalan kerja jangka panjang diakui sebesar jumlah telah diskonto (*discounted amount*).



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK SUMEDANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)  
31 Desember 2023**

3. **IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)**

o. **Kewajiban Imbalan Kerja (Lanjutan)**

BPR sampai saat ini mengadopsi ketentuan pemberian imbalan pasca kerja sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ke dalam peraturan intern BPR. Undang-Undang ini merupakan perubahan dari ketentuan Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003.

p. **Cadangan**

Akun ini dipergunakan untuk mencatat perkiraan cadangan umum dan tujuan yang berkaitan dengan penyisihan dari laba yang diperoleh pada akhir tahun sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017.

q. **Pengakuan Pendapatan dan Beban Bunga**

Pendapatan dan beban bunga diakui dengan menggunakan metode akrual, pendapatan bunga atas aktiva produktif yang digolongkan sebagai *non performing* (kurang lancar, diragukan, dan macet) dicatat sebagai tagihan kontinjensi dan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima secara tunai (*cash basis*).

Pendapatan bunga yang akan diterima dari kredit dengan kualitas lancar (*performing*) yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya. Termasuk pendapatan bunga dari penempatan pada bank lain.

Pendapatan bunga yang ditangguhkan dari kredit yang direstrukturisasi diakui sebagai pendapatan secara proporsional pada saat diterima pembayaran angsuran pokok.

r. **Pendapatan Provisi dan Komisi**

Pendapatan provisi dan komisi yang jumlahnya signifikan yang berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan dan/atau mempunyai jangka waktu tertentu ditangguhkan dan diamortisasi berdasarkan metode garis lurus sesuai dengan jangka waktunya. Untuk kredit yang dilunasi sebelum jatuh temponya, saldo pendapatan provisi dan/atau komisi ditangguhkan, diakui pada saat kredit dilunasi pendapatan provisi dan komisi lainnya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan atau jangka waktu tertentu diakui pada saat terjadinya transaksi.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK SUMEDANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)  
31 Desember 2023**

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)**

**s. Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan ditentukan berdasarkan pendapatan yang sudah melebihi angka Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar), berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, sesuai dengan peraturan perpajakan tarif yang dikenakan adalah 22% sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku pada tahun 2020.

**4. KAS**

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Kantor Pusat Non Operasional	3.399.940.400	2.646.253.084
Kantor Cabang Cimalaka	637.443.735	582.294.504
Kantor Cabang Tanjungsari	606.021.200	1.050.601.800
Kantor Cabang Ranca Kalong	258.474.700	88.836.800
Kantor Cabang Buah Dua	421.225.000	289.200.000
Kantor Cabang Tomo	234.067.700	443.863.600
Kantor Cabang Darmaraja	475.856.600	557.087.100
Kantor Cabang Wado	535.417.500	328.882.500
Jumlah	<u>6.568.446.835</u>	<u>5.987.019.388</u>

Kas diasuransikan pada PT Asuransi Sinar Mas terhadap risiko kebongkaran dengan total nilai pertanggungan sebesar Rp 7.400.000.000, manajemen menyatakan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas kas yang dipertanggungan.

**5. PENDAPATAN BUNGA YANG AKAN DITERIMA**

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Cabang Cimalaka	546.601.610	532.627.437
Cabang Tanjungsari	450.669.839	377.214.302
Cabang Darmaraja	362.979.994	289.649.370
Cabang Wado	274.097.573	255.791.451
Cabang Tomo	253.228.572	208.192.650
Cabang Buah Dua	245.344.895	295.414.494
Cabang Ranca Kalong	240.042.469	245.478.927
Jumlah	<u>2.372.964.952</u>	<u>2.204.368.631</u>

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK SUMEDANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)  
31 Desember 2023**

**6. PENEMPATAN PADA BANK LAIN**

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Giro:		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk	16.331.595.826	8.567.666.882
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk	1.565.309.495	1.506.954.009
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	1.327.591.356	1.570.717.310
PT Bank JTRUST Indonesia, Tbk	778.507.136	2.717.420.763
PT Bank Permata, Tbk	513.892.670	434.643.968
Bank KB Bukopin	37.547.295	38.552.916
PT Bank Oke Indonesia, Tbk	23.508.564	24.019.658
Jumlah giro	<u>20.577.952.342</u>	<u>14.859.975.506</u>
Tabungan:		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk	25.718.321.023	14.639.445.521
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	6.956.694.659	10.029.056.140
PT Bank Mega, Tbk	4.306.854.395	2.773.217.155
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk	535.749.920	262.785.550
PT BPR Intan Jabar	530.249.645	512.098.549
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	513.618.043	651.247.864
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	448.778.357	1.171.485.690
PT Bank Muamalat, Tbk	328.726.988	206.634.964
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk	221.138.814	1.445.167.217
PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk	1.000.000	-
Jumlah tabungan	<u>39.561.131.844</u>	<u>31.691.138.650</u>
Deposito:		
PT Bank Muamalat, Tbk	13.250.000.000	13.000.000.000
PT BPR Kerta Raharja (Perseroda)	3.000.000.000	3.000.000.000
PT Bank Oke Indonesia, Tbk	2.000.000.000	2.000.000.000
Perumda BPR Garut	2.000.000.000	-
PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk	2.000.000.000	-
PD BPR Serang	1.000.000.000	2.000.000.000
PD BPR Cipatujah Jabar (Perseroda)	1.000.000.000	1.000.000.000
PD BPR Raharja Wanayasa	500.000.000	500.000.000
PT Bank Permata, Tbk	-	5.000.000.000
Jumlah deposito	<u>24.750.000.000</u>	<u>26.500.000.000</u>
Jumlah penempatan pada bank lain	84.889.084.186	73.051.114.156
Dikurangi :		
Penyisihan kerugian penempatan pada bank lain	(303.367.953)	(241.610.118)
Jumlah	<u>84.585.716.233</u>	<u>72.809.504.038</u>

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK SUMEDANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)  
31 Desember 2023**

**6. PENEMPATAN PADA BANK LAIN (Lanjutan)**

Tingkat suku bunga giro pada bank lain pada tahun 2023 dan 2022 sebesar 1% - 4%.

Tingkat suku bunga tabungan pada bank lain pada tahun 2023 dan 2022 sebesar 0,5% - 3,5%

Tingkat suku bunga deposito pada bank lain pada tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar 4,5% - 7% dan 4,5% - 6,75%.

Perubahan penyisihan kerugian penempatan pada bank lain adalah sebagai berikut :

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Saldo awal tahun	241.610.118	217.828.830
Penyisihan kerugian – tahun berjalan	251.821.627	267.746.616
Pemulihan kerugian – tahun berjalan	(190.063.792)	(243.965.328)
Saldo akhir tahun	<u>303.367.953</u>	<u>241.610.118</u>

Berdasarkan hasil penelaahan manajemen BPR pada tanggal pelaporan, kolektibilitas atas seluruh penempatan pada bank lain tanggal 31 Desember 2023 digolongkan lancar. Manajemen BPR menyatakan bahwa jumlah penyisihan penghapusan penempatan pada bank lain cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya penempatan pada bank lain tersebut.

**7. KREDIT YANG DIBERIKAN**

**a. Jenis kredit**

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Kredit usaha konsumtif (kreatif)	224.812.688.460	224.377.430.768
Kredit usaha mikro	37.743.924.049	33.536.328.524
Kredit usaha menengah	10.758.195.000	1.688.332.800
Kredit usaha kecil	8.639.082.617	8.760.265.698
Kredit usaha <i>fintech</i>	5.554.447.032	1.900.000.000
Kredit usaha sindikasi	750.000.000	-
Jumlah	288.258.337.158	270.262.357.790
Provisi kredit	<u>(4.344.812.808)</u>	<u>(4.290.036.902)</u>
Jumlah kredit yang diberikan	283.913.524.350	265.972.320.888
Dikurangi:		
Penyisihan kerugian kredit	(11.904.747.407)	(11.320.582.583)
Jumlah bersih	<u>272.008.776.943</u>	<u>254.651.738.305</u>

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK SUMEDANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)  
31 Desember 2023**

**7. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)**

**b. Berdasarkan sektor ekonomi**

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Perdagangan	22.808.109.779	18.726.978.306
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	18.697.934.561	9.353.151.554
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	4.561.950.432	1.818.438.956
Konstruksi	3.493.500.000	6.728.332.800
Pertanian	965.825.189	1.322.669.872
Transportasi, pergudangan, dan komunikasi	418.722.500	1.100.000.000
Lain-lain	<u>237.312.294.697</u>	<u>231.212.786.302</u>
 Jumlah	 288.258.337.158	 270.262.357.790
Provisi kredit	<u>(4.344.812.808)</u>	<u>(4.290.036.902)</u>
 Jumlah kredit yang diberikan	 283.913.524.350	 265.972.320.888
Dikurangi:		
Penyisihan kerugian kredit	(11.904.747.407)	(11.320.582.583)
 Jumlah bersih	 <u>272.008.776.943</u>	 <u>254.651.738.305</u>

**c. Berdasarkan penggunaan**

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Modal kerja	54.186.772.133	40.139.077.610
Investasi	2.777.008.328	2.791.708.625
Konsumsi lainnya	231.294.556.697	227.331.571.555
 Jumlah	 288.258.337.158	 270.262.357.790
Provisi kredit	<u>(4.344.812.808)</u>	<u>(4.290.036.902)</u>
 Jumlah kredit yang diberikan	 283.913.524.350	 265.972.320.888
Dikurangi:		
Penyisihan kerugian kredit	(11.904.747.407)	(11.320.582.583)
 Jumlah bersih	 <u>272.008.776.943</u>	 <u>254.651.738.305</u>

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK SUMEDANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)  
31 Desember 2023**

**7. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)**

**d. Berdasarkan jangka waktu**

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Sampai dengan 1 tahun	40.637.071.243	27.031.105.290
Lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun	29.285.587.162	31.022.226.177
Lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun	116.019.722.188	119.542.275.838
Lebih dari 5 tahun	<u>102.315.956.565</u>	<u>92.666.750.485</u>
 Jumlah	 288.258.337.158	 270.262.357.790
Provisi kredit	<u>(4.344.812.808)</u>	<u>(4.290.036.902)</u>
 Jumlah kredit yang diberikan	 283.913.524.350	 265.972.320.888
Dikurangi:		
Penyisihan kerugian kredit	(11.904.747.407)	(11.320.582.583)
 Jumlah bersih	 <u>272.008.776.943</u>	 <u>254.651.738.305</u>

**e. Berdasarkan kolektibilitas**

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Lancar	265.857.844.333	247.936.160.970
Dalam perhatian khusus	7.440.487.634	8.352.108.273
Kurang lancar	1.261.472.064	1.897.808.272
Diragukan	2.787.317.980	1.429.345.234
Macet	<u>10.911.215.147</u>	<u>10.646.935.041</u>
 Jumlah	 288.258.337.158	 270.262.357.790
Provisi kredit	<u>(4.344.812.808)</u>	<u>(4.290.036.902)</u>
 Jumlah kredit yang diberikan	 283.913.524.350	 265.972.320.888
Dikurangi:		
Penyisihan kerugian kredit	(11.904.747.407)	(11.320.582.583)
 Jumlah bersih	 <u>272.008.776.943</u>	 <u>254.651.738.305</u>

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK SUMEDANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)  
31 Desember 2023**

**7. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)**

**f. Kredit bermasalah**

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, rincian kredit bermasalah dan penyisihannya menurut sektor ekonomi dan jenis penggunaan kredit.

Sektor ekonomi:

	Kurang lancar Rp	2 0 Diragukan Rp	2 3 Macet Rp	Jumlah Rp
Pertanian	3.464.900	22.642.200	350.930.089	377.037.189
Perdagangan	366.799.500	625.314.817	3.747.075.099	4.739.189.416
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	181.620.700	372.409.613	1.361.779.191	1.915.809.504
Lain-lain	709.586.964	1.766.951.350	5.451.430.768	7.927.969.082
<b>Jumlah</b>	<b>1.261.472.064</b>	<b>2.787.317.980</b>	<b>10.911.215.147</b>	<b>14.960.005.191</b>
Penyisihan kerugian kredit	(79.325.476)	(1.057.438.747)	(9.259.309.534)	(10.396.073.757)
<b>Jumlah bersih</b>	<b><u>1.182.146.588</u></b>	<b><u>1.729.879.233</u></b>	<b><u>1.651.905.613</u></b>	<b><u>4.563.931.434</u></b>

	Kurang lancar Rp	2 0 Diragukan Rp	2 2 Macet Rp	Jumlah Rp
Pertanian	68.034.200	24.343.600	456.709.089	549.086.889
Perdagangan	376.658.250	613.354.701	4.366.569.368	5.356.582.319
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	179.264.857	51.052.000	1.627.552.383	1.857.869.240
Lain-lain	1.273.850.965	740.594.933	4.196.104.201	6.210.550.099
<b>Jumlah</b>	<b>1.897.808.272</b>	<b>1.429.345.234</b>	<b>10.646.935.041</b>	<b>13.974.088.547</b>
Penyisihan kerugian kredit	(161.503.264)	(481.098.604)	(9.236.664.588)	(9.879.266.456)
<b>Jumlah bersih</b>	<b><u>1.736.305.008</u></b>	<b><u>948.246.630</u></b>	<b><u>1.410.270.453</u></b>	<b><u>4.094.822.091</u></b>

Penggunaan:

	Kurang lancar Rp	2 0 Diragukan Rp	2 3 Macet Rp	Jumlah Rp
Modal kerja	576.800.100	1.087.844.050	5.202.562.238	6.867.206.388
Investasi	-	26.089.530	366.641.991	392.731.521
Konsumsi lainnya	684.671.964	1.673.384.400	5.342.010.918	7.700.067.282
<b>Jumlah</b>	<b>1.261.472.064</b>	<b>2.787.317.980</b>	<b>10.911.215.147</b>	<b>14.960.005.191</b>
Penyisihan kerugian kredit	(79.325.476)	(1.057.438.747)	(9.259.309.534)	(10.396.073.757)
<b>Jumlah bersih</b>	<b><u>1.182.146.588</u></b>	<b><u>1.729.879.233</u></b>	<b><u>1.651.905.613</u></b>	<b><u>4.563.931.434</u></b>

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK SUMEDANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)  
31 Desember 2023**

7. **KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)**

f. **Kredit bermasalah (Lanjutan)**

Penggunaan: (Lanjutan)

	Kurang lancar Rp	Diragukan Rp	Macet Rp	Jumlah Rp
Modal kerja	510.393.430	668.747.301	5.940.650.938	7.119.791.669
Investasi	134.215.527	20.003.000	531.235.799	685.454.326
Konsumsi lainnya	<u>1.253.199.315</u>	<u>740.594.933</u>	<u>4.175.048.304</u>	<u>6.168.842.552</u>
Jumlah	1.897.808.272	1.429.345.234	10.646.935.041	13.974.088.547
Penyisihan kerugian kredit	(161.503.264)	(481.098.604)	(9.236.664.588)	(9.879.266.456)
Jumlah bersih	<u>1.736.305.008</u>	<u>948.246.630</u>	<u>1.410.270.453</u>	<u>4.094.822.091</u>

Rasio *Non Performing Loan* (NPL) pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023 %	2022 %
NPL Gross	5,19	5,17
NPL Net	1,58	1,55

g. **Penyisihan kerugian kredit yang diberikan**

Perubahan penyisihan kerugian kredit yang diberikan adalah sebagai berikut :

	2023 Rp	2022 Rp
Saldo awal tahun	11.320.582.583	9.730.975.279
Penyisihan kerugian selama tahun berjalan	4.034.346.614	2.913.917.501
Pemulihan selama tahun berjalan	(591.547.132)	(1.324.310.197)
Penghapusan selama tahun berjalan	(2.858.634.658)	-
Saldo akhir tahun	<u>11.904.747.407</u>	<u>11.320.582.583</u>

Penyisihan kerugian kredit dibentuk berdasarkan hasil penelaahan manajemen BPR terhadap kualitas masing-masing kredit yang diberikan pada akhir tahun. Manajemen BPR menyatakan bahwa jumlah penyisihan kerugian kredit cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya kredit yang diberikan tersebut.



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK SUMEDANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)  
31 Desember 2023**

**7. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)**

**g. Penyisihan kerugian kredit yang diberikan (Lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, BPR membentuk penyisihan kerugian kredit dengan penjelasan sebagai berikut:

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Penyisihan kerugian yang wajib dibentuk sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	11.904.747.407	11.320.582.583
Penyisihan kerugian yang dibentuk BPR	11.904.747.407	11.320.582.583
Kelebihan (kekurangan) pembentukan penyisihan kerugian kredit	-	-

**h. Kredit yang dihapus buku**

Mutasi kredit yang dihapus buku pada tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Saldo awal tahun	24.335.751.145	24.995.320.829
Penghapusan kredit dalam tahun berjalan	2.858.634.658	-
Penerimaan kredit yang dihapus buku	(628.159.308)	(659.569.684)
Saldo akhir tahun	26.566.226.495	24.335.751.145

**i. Kredit yang direstrukturisasi**

Saldo pada tanggal 31 Desember 2023 atas kredit yang direstrukturisasi adalah sebesar Rp 12.672.514.361, jenis restrukturisasi berupa penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali.

Berikut adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan:

- a. Kredit yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 984.676.450 dan Rp 1.549.741.770.
- b. Tingkat suku bunga per tahun untuk kredit yang diberikan adalah sebesar flat 3% - 18% dan efektif 10% - 35,4%.
- c. Pendapatan bunga selama tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 51.487.109.498 dan Rp 49.385.263.570.
- d. Jumlah baki debit pihak terkait per 31 Desember 2023 sebesar Rp 986.676.450 atau sebanyak 20 debitor.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK SUMEDANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)  
31 Desember 2023**

**7. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)**

e. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang diperkenankan, sebagai berikut:

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	7.612.459.499	6.737.471.182
Pihak ketiga	15.224.918.998	13.474.942.364

Pada tanggal 31 Desember 2023 tidak ada kredit yang melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

**8. AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH**

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Tanah dan bangunan	<u>754.080.850</u>	<u>745.855.850</u>

**9. ASET TETAP**

	2 0 2 3			
	Saldo awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo akhir Rp
Biaya perolehan:				
Tanah	3.025.092.050	-	-	3.025.092.050
Bangunan	5.429.880.498	47.552.500	-	5.477.432.998
Kendaraan	4.857.971.385	-	(780.855.500)	4.077.115.885
Peralatan/perlengkapan kantor	5.935.146.764	197.454.734	-	6.132.601.498
<b>Jumlah</b>	<u>19.248.090.697</u>	<u>245.007.234</u>	<u>(780.855.500)</u>	<u>18.712.242.431</u>
Akumulasi penyusutan:				
Bangunan	2.673.794.888	245.411.228	-	2.919.206.116
Kendaraan	4.452.461.637	193.784.717	(780.855.500)	3.865.390.853
Peralatan/perlengkapan kantor	5.660.702.154	233.293.747	-	5.893.995.901
<b>Jumlah</b>	<u>12.786.958.678</u>	<u>672.489.692</u>	<u>(780.855.500)</u>	<u>12.678.592.870</u>
Nilai buku	<u>6.461.132.018</u>			<u>6.033.649.561</u>

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK SUMEDANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)  
31 Desember 2023**

**9. ASET TETAP (Lanjutan)**

2 0 2 2

	Saldo awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo akhir Rp
Biaya perolehan:				
Tanah	3.025.092.050	-	-	3.025.092.050
Bangunan	5.362.411.517	67.468.981	-	5.429.880.498
Kendaraan	4.826.651.385	31.320.000	-	4.857.971.385
Peralatan/perlengkapan kantor	5.718.604.900	216.541.865	-	5.935.146.764
<b>Jumlah</b>	<u>18.932.759.852</u>	<u>315.330.846</u>	<u>-</u>	<u>19.248.090.697</u>
Akumulasi penyusutan:				
Bangunan	2.396.477.515	277.317.373	-	2.673.794.888
Kendaraan	4.195.703.375	256.758.262	-	4.452.461.637
Peralatan/perlengkapan kantor	5.337.244.635	323.457.519	-	5.660.702.154
<b>Jumlah</b>	<u>11.929.425.525</u>	<u>857.533.154</u>	<u>-</u>	<u>12.786.958.679</u>
Nilai buku	<u>7.003.334.327</u>			<u>6.461.132.018</u>

Penyusutan aset tetap dibebankan pada beban penyusutan aset tetap masing-masing sebesar Rp 672.489.692 untuk tahun 2023 dan Rp 857.533.154 untuk tahun 2022.

Aset tetap diasuransikan kepada PT Asuransi Sinar Mas dengan Nomor 12.300.0031.92939 tanggal 15 Desember 2023 dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 5.171.680.597.

**10. ASET TAK BERWUJUD**

2 0 2 3

	Saldo awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo akhir Rp
Biaya perolehan:				
Perangkat lunak	60.500.000	324.370.000	-	384.870.000
<b>Jumlah</b>	<u>60.500.000</u>	<u>324.370.000</u>	<u>-</u>	<u>384.870.000</u>
Akumulasi penyusutan:				
Perangkat lunak	60.499.999	41.666.664	-	102.166.663
<b>Jumlah</b>	<u>60.499.999</u>	<u>41.666.664</u>	<u>-</u>	<u>102.166.663</u>
Nilai buku	<u>1</u>			<u>282.703.337</u>

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK SUMEDANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)  
31 Desember 2023**

**10. ASET TAK BERWUJUD (Lanjutan)**

	2 0 2 2			
	Saldo awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo akhir Rp
Biaya perolehan:				
Perangkat lunak	60.500.000	-	-	60.500.000
Jumlah	<u>60.500.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>60.500.000</u>
Akumulasi penyusutan:				
Perangkat lunak	60.499.999	-	-	60.499.999
Jumlah	<u>60.499.999</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>60.499.999</u>
Nilai buku	<u>1</u>			<u>1</u>

**11. ASET LAIN-LAIN**

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Pajak dibayar dimuka:		
PPh pasal 25 dibayar dimuka	-	3.335.424.500
Lainnya:		
Titipan <i>Elektronik Data Capture</i> (EDC)	285.642.823	202.336.747
Persediaan administrasi (alat tulis dan barang cetak)	68.664.425	76.774.525
Persediaan barang promosi	44.523.000	62.677.500
Penampung Qris	5.846.899	1.739.737
Persediaan elektronik toll	5.748.100	428.316
Persediaan meterai	5.565.000	6.457.000
Jumlah	<u>415.990.247</u>	<u>3.685.838.325</u>

**12. KEWAJIBAN SEGERA**

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Utang pajak:		
PPh pasal 25	366.331.000	-
PPh pasal 21	285.618.072	361.763.561
PPh pasal 4 ayat 2	122.710.295	113.357.163
PPh pasal 23	620.000	-
Jumlah	<u>775.279.367</u>	<u>475.120.724</u>

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK SUMEDANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)  
31 Desember 2023**

**12. KEWAJIBAN SEGERA (Lanjutan)**

	2 0 2 3	2 0 2 2
	Rp	Rp
Titipan:		
Titipan notaris	27.028.631	39.803.631
Titipan jamsostek	6.132.942	6.262.765
Titipan bunga deposito/TDP/IBS Mobile	848.544	84.376
Titipan premi asuransi	130.400	-
Lainnya	776.997.015	623.757.108
Jumlah	<u>811.137.532</u>	<u>669.907.880</u>
Jumlah kewajiban segera	<u>1.586.416.899</u>	<u>1.145.028.604</u>

**13. UTANG BUNGA**

	2 0 2 3	2 0 2 2
	Rp	Rp
Bunga yang masih harus dibayar	<u>195.325.534</u>	<u>172.176.387</u>

**14. SIMPANAN**

	2 0 2 3	2 0 2 2
	Rp	Rp
Tabungan:		
Tabungan tandang	116.683.256.422	110.144.852.576
Tabungan simapan	33.042.164.222	27.538.761.205
Tabungan kotak	16.687.958.435	15.720.158.331
Tabungan cahaya	3.344.056.004	3.070.632.211
Tabungan anak sekolah	1.071.778.795	1.038.928.697
Tabungan simpel	640.503.829	236.529.577
Jumlah tabungan	<u>171.469.717.707</u>	<u>157.749.862.597</u>
Deposito:		
1 bulan	6.713.000.000	5.697.000.000
3 bulan	10.144.450.000	11.352.950.000
6 bulan	13.400.500.000	14.594.500.000
9 bulan	10.000.000	93.000.000
12 bulan	43.397.200.000	35.432.200.000
Jumlah deposito	<u>73.665.150.000</u>	<u>67.169.650.000</u>
Jumlah simpanan	<u>245.134.867.707</u>	<u>224.919.512.597</u>

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK SUMEDANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)  
31 Desember 2023**

**14. SIMPANAN (Lanjutan)**

Tingkat suku bunga tabungan untuk tahun 2023 dan 2022 berkisar sebesar 1,5% - 4,5% per tahun. Beban bunga yang dibayarkan selama tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 4.239.119.684 dan Rp 6.141.326.454.

Tingkat suku bunga deposito untuk tahun 2023 dan 2022 berkisar masing-masing sebesar 5,00% - 6,75% dan 5,00% - 7,00%. Beban bunga yang dibayarkan selama tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 2.630.900.695 dan Rp 3.794.835.551.

Simpanan berdasarkan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga :

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Tabungan:		
Pihak ketiga	169.929.245.774	156.786.691.415
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	1.540.471.933	963.171.181
Jumlah	<u>171.469.717.707</u>	<u>157.749.862.596</u>
Deposito:		
Pihak ketiga	73.270.150.000	67.019.650.000
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	395.000.000	150.000.000
Jumlah	<u>73.665.150.000</u>	<u>67.169.650.000</u>
Jumlah simpanan	<u>245.134.867.707</u>	<u>224.919.512.596</u>

**15. SIMPANAN DARI BANK LAIN**

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Tabungan:		
PT BPR Mitra Kanaka Santosa	<u>1.177.482.330</u>	<u>1.110.018.020</u>
Deposito:		
PD BPR Bank Sleman	3.000.000.000	3.000.000.000
Perumda BPR Bank Kota Bogor	2.500.000.000	2.500.000.000
PT BPR Gunung Rizki Pusaka Utama	2.000.000.000	2.000.000.000
Perumda BPR Garut	2.000.000.000	2.000.000.000
PT BPR Kerta Raharja	1.000.000.000	1.000.000.000
PD BPR Bank Sleman	1.000.000.000	1.000.000.000
PD BPR Bank Sleman	1.000.000.000	1.000.000.000
PT BPR Kerta Raharja	1.000.000.000	1.000.000.000
PT BPR Mitra Kanaka Santosa	750.000.000	-
PT BPR Gunadharma Mitrasembada	500.000.000	2.500.000.000
Jumlah	<u>15.927.482.330</u>	<u>17.110.018.020</u>

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK SUMEDANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)  
31 Desember 2023**

**16. UTANG PAJAK**

**a. Taksiran Pajak Penghasilan Badan**

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perhitungan laba menurut laporan laba rugi sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Laba sebelum pajak penghasilan	16.853.147.484	17.160.421.488
Koreksi Positif:		
Beban yang tidak dapat dikurangkan:		
Partisipasi atau undangan	370.356.133	338.138.640
Sumbangan	223.565.145	128.800.650
Rekreasi atau olah raga	194.250.000	198.750.000
Denda atau sanksi	17.700.000	2.920.000
Pendapatan provisi/komisi/administrasi yang ditangguhkan	-	82.841.271
Biaya transaksi kredit	-	23.269.996
Jumlah	<u>805.871.278</u>	<u>774.720.557</u>
Koreksi Negatif:		
Penghasilan yang dikenakan PPh Final:		
Jasa giro dan tabungan	<u>(532.343.798)</u>	<u>(585.577.466)</u>
Laba kena pajak	<u>17.126.674.964</u>	<u>17.349.564.579</u>
Taksiran pajak penghasilan badan	3.767.868.280	3.816.904.207
Dikurangi: Pajak dibayar dimuka	(3.456.374.000)	-
Pajak penghasilan nihil/kurang bayar	<u>311.494.280</u>	<u>3.816.904.207</u>

**b. Administrasi**

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, wajib pajak menghitung, menetapkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK SUMEDANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)  
31 Desember 2023**

**17. PINJAMAN YANG DITERIMA**

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Pinjaman pokok		
PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk	<u>12.499.999.999</u>	<u>10.499.999.999</u>
Biaya transaksi	(32.790.017)	(14.035.013)
Provisi	(29.100.000)	(45.000.001)
Jumlah pinjaman yang diterima - bersih	<u>12.438.109.982</u>	<u>10.440.964.985</u>

**PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk**

Berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 22 tanggal 18 September 2019 oleh Notaris Anne Srie Arryannie, S.H., BPR memperoleh fasilitas kredit *cash collateral* dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, jumlah plafond kredit sebesar Rp 15.000.000.000 (lima milyar rupiah), tingkat suku bunga sebesar 11,00% per tahun *effective rate*, jangka waktu 72 bulan terhitung sejak tanggal 18 September 2019 dan akan berakhir tanggal 18 September 2025. Jaminan yang diberikan oleh BPR berupa *cash collateral* di Bank BJB sebesar 1 (satu) kali angsuran, pemenuhan *cash collateral* dapat berdasarkan penarikan fasilitas (*draw down*) dan piutang sektor konsumtif BPR sebesar minimal 100% dari *outstanding* fasilitas.

Berdasarkan Perjanjian Kredit BJB *Back to Back Loan* Nomor 000.616/KOM-BPR/2023 tanggal 29 September 2023, BPR memperoleh fasilitas kredit *cash collateral* dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, jumlah plafond kredit sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah), tingkat suku bunga sebesar 3,0% per tahun *effective rate* dengan *spread* 1,5%, jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal 29 September 2023 dan akan berakhir tanggal 30 September 2024. Jaminan yang diberikan oleh BPR berupa tabungan/giro dengan nomor rekening 0008483231100 sebesar Rp 5.264.000.000 (lima miliar dua ratus enam puluh empat juta rupiah) berdasarkan Perjanjian Gadai Nomor 000.617/GADAI/2023 tanggal 29 September 2019.

Berdasarkan Perjanjian Kredit BJB *Back to Back Loan* Nomor 000.897/KOM-BPR/2023 tanggal 27 Desember 2023, BPR memperoleh fasilitas kredit *cash collateral* dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, jumlah plafond kredit sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah), tingkat suku bunga sebesar 2,5% per tahun *effective rate* dengan *spread* 1,5%, jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal 27 Desember 2023 dan akan berakhir tanggal 27 Desember 2024. Jaminan yang diberikan oleh BPR berupa bilyet giro umum dengan nomor rekening 0016786365001 sebesar Rp 5.264.000.000 (lima miliar dua ratus enam puluh empat juta rupiah) berdasarkan Perjanjian Gadai Nomor 000.898/GADAI/2023 tanggal 27 Desember 2023.

Saldo pinjaman yang diterima pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 12.499.999.999 dan Rp 10.499.999.999.



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK SUMEDANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)  
31 Desember 2023**

**18. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11/2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja serta Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik BAB 23 tentang "Imbalan Kerja", BPR diwajibkan untuk mengakui Kewajiban Imbalan Pasca Kerja untuk karyawan tetapnya. Besarnya cadangan imbalan kerja tersebut dihitung berdasarkan masa kerja, tingkat diskonto dan ekspektasi tingkat kenaikan gaji pada tanggal pelaporan. Jumlah karyawan tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebanyak 116 dan 118 orang.

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Kewajiban imbalan pasca kerja	<u>4.168.817.735</u>	<u>3.846.669.139</u>

BPR telah mengikutsertakan karyawannya pada program pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Jumlah premi yang telah disetor serta hasil pengembangannya pada program pensiun tersebut sebesar Rp 8.912.309.670. Kewajiban imbalan kerja yang telah dibentuk per 31 Desember 2023 sebesar Rp 4.168.817.735, sehingga jumlah kewajiban imbalan kerja yang telah dibentuk keseluruhannya sebesar Rp 13.081.127.405.

**19. KEWAJIBAN LAIN-LAIN**

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Bunga tabungan <i>point</i>	9.785.316.600	9.243.815.100
Biaya yang masih harus dibayar lainnya :		
Dana penghargaan masa kerja direksi dan DP	1.379.630.526	1.212.317.526
Dana pendidikan	575.929.590	391.911.703
Titipan EDC	285.642.824	202.336.747
Dana cuti pengurus	84.456.611	74.456.610
Dana CSR	11.492.484	131.186.966
Dana seragam karyawan	-	78.590.000
Lainnya	31.367.984	64.055.472
Jumlah	<u>12.153.836.619</u>	<u>11.398.670.124</u>

**20. MODAL DISETOR**

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Modal dasar	100.000.000.000	100.000.000.000
Masih harus disetor	(52.980.259.021)	(57.980.259.021)
Modal disetor	<u>47.019.740.979</u>	<u>42.019.740.979</u>

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK SUMEDANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)  
31 Desember 2023**

**20. MODAL DISETOR (Lanjutan)**

Modal dasar BPR ditetapkan sebesar Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang tanggal 9 Januari 2019 dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dan Bupati Sumedang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 tahun 2019 BAB V Pasal 21 ayat 1 dinyatakan bahwa "Pernyataan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, yaitu kekayaan yang tidak dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal dasar daerah Bank Sumedang yang ditetapkan sebesar Rp Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah)." Modal dasar yang telah disetor Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebesar Rp 42.019.740.979. Pemerintah Kabupaten Sumedang menambahkan penyertaan modal disetor sebesar Rp 5.000.000.000.

Penambahan modal tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 350 tahun 2023 tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang Tahun Anggaran 2023. Penambahan modal tersebut telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat OJK Nomor S-344/KO.0202/2023 tanggal 17 Oktober 2023 sebesar Rp 5.000.000.000 perihal Penambahan Modal Disetor BPR, sehingga jumlah modal disetor per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp 47.019.740.979.

**21. CADANGAN**

	2023 Rp	2022 Rp
Cadangan tujuan	11.756.481.628	10.422.129.900
Cadangan umum	9.244.476.061	7.910.124.333
Jumlah	21.000.957.689	18.332.254.233

**22. PEMBAGIAN LABA**

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang tahun 2022 tanggal 13 Februari 2023, sebagaimana telah diatur dalam pasal 117 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019, bahwa pembagian laba bersih BPR setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Bupati meliputi:

No.	Penggunaan Laba Bersih	Proporsi %	Jumlah Rp
1	Pemerintah Daerah	55	7.338.934.505
2	Cadangan	20	2.668.703.456
3	Dana Kesejahteraan	10	1.334.351.728
4	Jasa produksi	8	1.067.481.383
5	Tantiem	4	533.740.691
6	<i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	3	400.305.518
	Jumlah	100	13.343.517.281

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK SUMEDANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)  
31 Desember 2023**

**23. PENDAPATAN BUNGA**

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Bunga penempatan pada bank lain :		
Deposito	1.297.768.004	688.990.312
Tabungan	329.617.762	429.380.020
Giro	202.726.035	156.197.446
	<u>1.830.111.801</u>	<u>1.274.567.778</u>
Bunga kontraktual :		
Kredit yang diberikan	51.487.109.500	49.385.263.570
	<u>53.317.221.301</u>	<u>50.659.831.348</u>

**24. PENDAPATAN PROVISI**

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Provisi kredit yang diberikan pihak ketiga bukan bank	<u>4.306.786.530</u>	<u>4.274.811.595</u>

**25. BEBAN BUNGA**

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Bunga simpanan dari bank lain :		
Bunga tabungan dari bank lain	1.769.501.648	60.942.344
Bunga deposito dari bank lain	2.293.447.435	662.767.914
Bunga pinjaman yang dibayarkan	559.529.516	857.480.557
Bunga lainnya kepada bank	48.144.997	48.269.996
	<u>4.670.623.596</u>	<u>1.629.460.811</u>
Bunga dari simpanan kepada pihak ketiga bukan bank :		
Beban bunga tabungan	4.239.119.684	6.141.326.454
Beban bunga deposito	2.630.900.695	3.794.835.551
	<u>6.870.020.379</u>	<u>9.936.162.005</u>
Premi Penjaminan Simpanan / LPS	<u>495.280.281</u>	<u>449.882.061</u>
Jumlah	<u>12.035.924.256</u>	<u>12.015.504.877</u>

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK SUMEDANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)  
31 Desember 2023**

**26. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA**

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Kelebihan pembentukan PPAP	781.610.924	1.567.030.864
Administrasi tabungan	706.120.417	526.686.379
Angsuran kredit hapus buku	628.159.308	677.372.039
Denda penarikan deposito belum jatuh tempo	25.362.044	29.597.655
Raksa desa	1.596.000	1.210.000
Lainnya	538.365.011	117.288.582
Jumlah	2.681.213.704	2.919.185.519

**27. BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN ASET PRODUKTIF**

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Kredit yang diberikan	4.034.346.614	2.913.917.500
Penempatan pada bank lain	251.821.627	266.501.955
Jumlah	4.286.168.241	3.180.419.455

**28. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI**

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Penyusutan aset tetap:		
Gedung	245.411.228	277.317.373
Peralatan/perlengkapan kantor	233.293.747	323.457.519
Kendaraan	193.784.717	256.758.262
Amortisasi aset tak berwujud:		
Perangkat lunak	41.666.664	-
Jumlah	714.156.356	857.533.154

**29. BEBAN PEMASARAN**

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Hadiah dan iklan untuk promosi	641.389.973	511.382.716

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK SUMEDANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)  
31 Desember 2023**

**30. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM**

	2 0 2 3	2 0 2 2
	Rp	Rp
Beban tenaga kerja:		
Tunjangan perbaikan penghasilan	3.703.273.846	2.491.512.756
Jasa pengabdian karyawan	2.019.630.000	1.388.172.000
Gaji pokok	1.813.149.380	1.836.992.491
Uang makan dan transportasi	1.671.792.700	1.693.525.000
Tunjangan hari raya	1.377.730.017	1.303.424.153
Tunjangan pajak penghasilan pasal 21	835.071.409	737.679.945
Tunjangan jabatan	798.582.480	804.582.480
Tunjangan lainnya	742.257.269	747.664.550
Tunjangan asuransi	521.863.486	503.013.683
Tunjangan pangan	412.470.000	422.460.000
Honor dewan pengawas	346.641.204	320.393.787
Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)	307.912.182	296.991.124
Perawatan kesehatan	302.485.870	243.020.637
Tunjangan perumahan	295.500.000	286.250.000
Upah tenaga kontrak	213.500.000	190.750.000
Tunjangan suami/istri	166.233.766	163.828.659
Insentif penyelesaian kredit bermasalah	138.651.972	170.837.012
Tunjangan anak	112.865.531	122.424.813
Jasa pengabdian direksi	111.541.500	368.000.000
Lembur karyawan	109.930.764	103.726.557
Tunjangan cuti tahunan pegawai	104.565.000	-
Jasa pengabdian dewan pengawas	55.771.500	144.000.000
Tunjangan cuti besar direksi	10.000.000	33.000.000
Tunjangan kemahalan	-	800.152.545
Lainnya	4.690.684.499	5.023.863.266
Jumlah beban tenaga kerja	<u>20.862.104.375</u>	<u>20.196.265.458</u>
Beban pendidikan	<u>1.009.812.000</u>	<u>396.624.000</u>
Beban sewa:		
Sewa gedung	22.846.600	49.478.282
Sewa peralatan	-	1.200.000
Jumlah beban sewa	<u>22.846.600</u>	<u>50.678.282</u>
Beban premi asuransi	<u>137.152.867</u>	<u>59.743.607</u>
Beban pemeliharaan dan perbaikan:		
Pemeliharaan kendaraan bermotor	93.570.280	107.577.604
Pemeliharaan gedung	36.331.200	33.072.691
Pemeliharaan komputer	23.139.805	23.355.000
Pemeliharaan inventaris lainnya	13.314.000	27.313.400
Jumlah beban pemeliharaan dan perbaikan	<u>166.355.285</u>	<u>191.318.695</u>

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK SUMEDANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)  
31 Desember 2023**

30. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM (Lanjutan)	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Beban pajak:		
Pajak kendaraan bermotor	72.259.200	84.156.352
Pajak bumi dan bangunan	4.972.329	-
Jumlah beban pajak	<u>77.231.529</u>	<u>84.156.352</u>
Beban barang dan jasa:		
Beban jasa telekomunikasi	526.906.835	448.851.565
Bensin dan transportasi	261.684.060	257.733.596
Biaya administrasi	252.147.690	175.554.262
Listrik, air, telepon, dan retribusi sampah	237.574.430	217.079.155
Percetakan	211.279.700	197.543.205
Alat rumah tangga	211.266.386	177.963.009
Alat tulis kantor	159.630.308	133.495.046
Perjalanan dinas (direksi dan pegawai)	104.620.000	103.988.500
Beban tenaga ahli atau audit	55.000.000	55.000.000
Photo copy dan jilid	22.969.400	21.761.500
Koran dan majalah	14.374.250	14.695.000
Benda pos dan meterai	13.373.850	15.106.300
Lainnya	47.444.190	41.113.995
Jumlah beban barang dan jasa	<u>2.118.271.099</u>	<u>1.859.885.133</u>
Beban operasional lainnya:		
Pakaian seragam karyawan	210.890.000	204.500.000
Rekreasi	194.250.000	198.750.000
Jamuan tamu	84.683.728	96.763.164
Insentif kolektor	36.464.090	45.915.807
Pengawasan uang	300.000	500.000
Penyelesaian kredit	200.000	500.000
Lainnya	518.701.159	545.623.625
Jumlah beban operasional lainnya	<u>1.045.488.977</u>	<u>1.092.552.596</u>
Jumlah beban administrasi dan umum	<u>25.439.262.732</u>	<u>23.931.224.123</u>

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK SUMEDANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)  
31 Desember 2023**

**31. PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL**

	2 0 2 3	2 0 2 2
	Rp	Rp
Pendapatan non operasional:		
Lainnya	<u>356.683.856</u>	<u>301.332.903</u>
Beban non operasional:		
Partisipasi kegiatan	320.806.133	265.238.640
Sumbangan	248.635.145	128.800.650
Undangan	49.550.000	72.900.000
Denda atau sanksi pelanggaran	48.020.398	2.920.000
Lainnya	24.844.673	28.816.262
Jumlah beban non operasional	<u>691.856.349</u>	<u>498.675.552</u>

**32. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA**

Dalam kegiatan usaha normal, BPR melakukan transaksi usaha dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, transaksi tersebut meliputi :

Pihak berelasi	Sifat hubungan	Sifat dari transaksi
Nasam, S.E., Ak	Ketua Dewan Pengawas	Kredit dan Tabungan
Taufik Hidayat, S.H., M.H	Anggota Dewan Pengawas	Kredit dan Tabungan
Nurdin Zein, S.E	Anggota Dewan Pengawas	Kredit dan Tabungan
Yanti Krisyana Dewi	Direktur Utama	Tabungan
Budi Kamsin, S.E.	Direktur Kepatuhan	Tabungan
H. Bangbang Yoyon .H, S.H	Direktur Operasional	Kredit dan Tabungan
Risnawati Djaenudin, S.E.	Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko, APU PPT dan Kepatuhan	Kredit dan Tabungan
Dudi Setiadi	Kepala Divisi Bisnis	Kredit dan Tabungan
Dedeh Kurniasih	Ketua Satuan Kerja Audit Internal	Kredit dan Tabungan
Dewangsih	Kepala Divisi Umum dan SDM	Kredit dan Tabungan
Tahyudin, S.E.	Pemimpin Kantor Cabang Cimalaka	Kredit dan Tabungan
Dadang Sugesti	Pemimpin Kantor Cabang Tanjungsari	Kredit dan Tabungan
Eva Mulyani	Pemimpin Kantor Cabang Rancakalong	Deposito dan Tabungan
Dadang	Pemimpin Kantor Cabang Buah Dua	Kredit, Tabungan, dan Deposito
Deden Gusmawan, S.E.	Pemimpin Kantor Cabang Tomo	Kredit dan Tabungan
Iis Siti Asiyah	Pemimpin Kantor Cabang Darmaraja	Kredit dan Tabungan
Joni Mulyana	Pemimpin Kantor Cabang Wado	Kredit dan Tabungan

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK SUMEDANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)  
31 Desember 2023**

**32. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (Lanjutan)**

- a. Kredit yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 984.676.450 dan Rp 1.549.741.770 (lihat Catatan 7).
- b. Penempatan dana dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa dalam bentuk simpanan tabungan dan deposito berjangka. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 1.540.471.933 dan Rp 963.171.181, dan Rp 395.000.000 dan Rp 150.000.000 (lihat Catatan 14).

**33. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK PERKREDITAN RAKYAT**

Berdasarkan Peraturan LPS Nomor 1 tanggal 9 Maret 2006, simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan simpanan dari bank lain.

Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Berdasarkan Undang-Undang tersebut, LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah sampai dengan Rp 100.000.000 (nilai penuh) dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Undang-Undang tersebut berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005 dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi.

Pada tanggal 13 Oktober 2008, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2008 tentang besaran nilai simpanan yang dijamin LPS. Berdasarkan peraturan tersebut, nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank yang semula berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 ditetapkan maksimum Rp 100.000.000 (nilai penuh) diubah menjadi maksimum Rp 2.000.000.000 (nilai penuh).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan simpanan, LPS menetapkan tingkat bunga penjaminan 3 (tiga) kali dalam satu tahun yaitu pada minggu kedua bulan Januari, Mei, dan September, kecuali terjadi perubahan pada kondisi perekonomian dan perbankan yang signifikan. Untuk bulan-bulan di luar periode penetapan tersebut, dilakukan evaluasi terhadap tingkat bunga penjaminan. Berkenaan dengan hal tersebut, LPS menetapkan tingkat bunga yang wajar untuk simpanan di Bank Perkreditan Rakyat periode 1 Oktober 2022 sampai dengan 31 Januari 2023 adalah sebesar 6,25%.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, BPR adalah peserta dari program penjaminan tersebut. Beban premi penjaminan LPS yang dibayar selama tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 495.280.281 dan Rp 449.882.061 (lihat Catatan 25).



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK SUMEDANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)  
31 Desember 2023**

**34. RASIO KECUKUPAN MODAL**

Tabel berikut ini menunjukkan modal dan rasio kecukupan modal (KPM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

	2023 Rp	2022 Rp
<b>I. ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR)</b>		
<b>1. ASET NERACA</b>		
1.1. Kas	-	-
1.2. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	-	-
1.3. Kredit yang diberikan dengan agunan bersifat liquid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan berdasarkan perjanjian antara BPR dan nasabah disertai dengan surat kuasa pencairan, dan logam mulia, sebesar nilai terendah antara agunan dan baki debit	-	-
1.4. Agunan yang Diambil Alih (AYDA) yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan	-	-
1.5. Kredit yang diberikan dengan agunan berupa emas perhiasan yang disimpan atau di bawah pengawasan BPR	-	-
1.6. Penempatan pada bank lain dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan tagihan lainnya kepada bank lain	16.917.143.247	14.561.900.808
1.7. Kredit kepada atau yang dijamin oleh bank lain atau Pemerintah Daerah	-	-
1.8. Bagian dari kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit	-	-
1.9. Kredit dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat yang dibebani hak tanggungan atau fidusia	850.415.933	969.112.888
1.10. Kredit kepada BUMN/BUMD atau kredit yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha penjaminan kredit namun tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan bobot risiko sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana tersebut di atas	-	-
1.11. Kredit kepada pegawai/pensiunan yang memenuhi persyaratan	69.498.530.864	67.109.137.631
1.12. Kredit dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat namun tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia	24.481.801.260	18.214.674.930
1.13. Kredit yang diberikan kepada usaha mikro dan kecil yang memenuhi seluruh kriteria	2.967.316.785	1.920.543.426
1.14. Kredit dengan agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan secara fidusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-
1.15. Tagihan atau kredit lainnya yang tidak memenuhi kriteria bobot risiko diatas	78.635.838.117	80.000.143.821
1.16. Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo atau dengan kualitas macet.	2.031.063.520	1.749.294.539
1.17. Aset tetap dan inventaris (nilai buku) dan aset tidak berwujud	6.316.352.898	6.461.132.020
1.18. Agunan yang Diambil Alih (AYDA) yang belum melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan	369.125.000	-
1.19. Aset lainnya selain tersebut diatas	1.534.185.392	1.600.170.054
Jumlah ATMR sebelum perhitungan selisih lebih PPAP umum	<u>203.601.773.016</u>	<u>192.586.110.114</u>

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK SUMEDANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)  
31 Desember 2023**

34. **RASIO KECUKUPAN MODAL (Lanjutan)**

	2023 Rp	2022 Rp
<b>I. MODAL</b>		
1.1. Modal inti utama		
1.1.1. Modal disetor	47.019.740.979	42.019.740.979
1.1.2. Cadangan tambahan modal		
1.1.2.1. Agio	-	-
1.1.2.2. Dana setoran modal	-	-
1.1.2.3. Modal sumbangan	-	-
1.1.2.4. Cadangan umum	11.756.481.628	10.422.129.900
1.1.2.5. Cadangan tujuan	9.244.476.061	7.910.124.333
1.1.2.6. Laba tahun-tahun lalu	-	-
1.1.2.7. Laba tahun berjalan setelah dikurangi kekurangan PPAP dan taksiran utang PPh atau rugi tahun berjalan setelah dikurangi kekurangan PPAP	6.542.639.602	6.671.758.640
1.1.2.8. Pajak tangguhan ( <i>deferred tax</i> )	-	-
1.1.2.9. <i>Goodwill</i>	-	-
1.1.2.10. AYDA berupa tanah dan/ bangunan		
1.1.2.10.1. melampaui jangka waktu 1 s.d 3 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR	(192.477.925)	(372.927.925)
1.1.2.10.2. melampaui jangka waktu 3 s.d 5 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR	-	-
1.1.2.10.3. melampaui jangka waktu 5 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR	-	-
Jumlah modal inti utama	<u>74.370.860.345</u>	<u>66.650.825.928</u>
1.2 Modal inti tambahan	-	-
1.3 Jumlah modal inti	<u>74.370.860.345</u>	<u>66.650.825.928</u>
<b>II. Modal Pelengkap</b>		
2.1. Komponen modal yang memenuhi persyaratan tertentu (paling tinggi sebesar 50% dari modal inti)	-	-
2.2. Surplus revaluasi aset tetap	-	-
2.3. Penyisihan penghapusan aktiva produktif umum (Max. 1,25% dari ATMR)	1.753.734.643	1.604.936.376
Jumlah modal pelengkap	<u>1.753.734.643</u>	<u>1.604.936.376</u>
<b>III. Jumlah modal</b>	<u>76.124.594.988</u>	<u>68.255.762.304</u>
Jumlah ATMR sebelum perhitungan selisih lebih PPAP umum	203.601.773.016	192.586.110.114
Jumlah kelebihan modal untuk mencapai rasio modal inti sebesar 8% dari ATMR	58.082.718.504	52.848.873.495
Jumlah kelebihan modal untuk mencapai rasio KPMM sebesar 12% dari ATMR	51.692.382.226	45.145.429.090

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK SUMEDANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)  
31 Desember 2023**

**35. INFORMASI LAINNYA**

	2023	2022
	%	%
<b>Rasio</b>		
<b>I. Permodalan</b>		
Rasio kecukupan modal	37,39	35,44
<b>II. Aktiva Produktif</b>		
Aktiva produktif yang diklasifikasikan	3,65	3,69
Pemenuhan PPAP	100,00	100,00
<b>III. Rentabilitas</b>		
Return On Assets (ROA)	4,52	4,95
Return On Equity (ROE)	16,13	31,76
Net Interest Margin (NIM)	12,22	12,38
Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO)	71,50	70,00
<b>IV. Likuiditas</b>		
Loan Deposit Rasio (LDR)	85,96	88,01
Cash Rasio	26,56	22,70

**36. KOMITMEN DAN KONTINJENSI**

	(dalam ribuan rupiah)	
	2023	2022
	Rp	Rp
Komitmen dan kontinjensi:		
Bunga kredit yang diberikan	6.705.184	7.310.344
Penelusuran kredit <i>channeling</i>	8.896.968	8.881.980
Aktiva produktif yang dihapuskan	26.625.873	24.394.975
Agunan dalam proses penyelesaian kredit	359.700	-
Jumlah	42.587.725	40.587.299

**37. MANAJEMEN RISIKO**

Pengelolaan risiko mengacu kepada kepentingan strategis BPR secara keseluruhan. Pengelolaan risiko juga bukan semata-mata pemantauan, pelaporan, dan evaluasi risiko-risiko yang telah terjadi, namun juga mendeteksi dan mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi di masa mendatang.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK SUMEDANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)  
31 Desember 2023**

37. **MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)**

**Risiko Kredit**

Risiko kredit adalah risiko yang disebabkan oleh kegagalan pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya terhadap BPR. Risiko kredit dapat timbul dari aktivitas fungsional BPR yaitu perkreditan (penyediaan dana) serta *treasury* dan investasi.

**Risiko Operasional**

Risiko operasional adalah potensi timbulnya kerugian sebagai akibat dari kejadian-kejadian yang melibatkan manusia, proses, sistem, dan kejadian-kejadian di luar BPR.

Seluruh aktivitas kegiatan BPR senantiasa dihadapkan pada kemungkinan terjadinya 4 (empat) permasalahan tersebut diatas, sehingga dengan sendirinya potensial terjadinya risiko operasional memiliki kesempatan lebih tinggi dibanding dengan risiko-risiko yang lain.

Dalam pengelolaan risiko operasional, masing-masing bagian bertanggung jawab untuk risiko yang terjadi pada kegiatan operasional sehari-hari dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur, pengendalian dan pengawasan rutin. Selain itu, pengelolaan risiko operasional juga meliputi hal-hal yang terkait dengan pengembangan produk, sistem, sumber daya manusia sebagai aspek pencegahan terhadap kemungkinan adanya hal-hal yang tidak diinginkan.

**Risiko Kepatuhan**

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang timbul ketika BPR tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Risiko kepatuhan, jika tidak dikelola dengan baik berpotensi pada pengenaan denda, hukuman atau bahkan rusaknya reputasi.

**Risiko Likuiditas**

Risiko likuiditas adalah potensi timbulnya kerugian akibat dari ketidakmampuan BPR dalam membayar penarikan oleh nasabah, mendanai pertumbuhan aktiva, dan memenuhi kewajiban sesuai kontrak melalui akses tak terbatas untuk pendanaan pada tingkat suku bunga pasar yang layak pada umumnya. Risiko likuiditas juga timbul dari situasi dimana BPR tidak dapat mencairkan atau menjual aset karena pasar tidak bisa memperdagangkan aset tersebut.

Risiko ini melekat pada aktivitas perkreditan, khususnya pada kemampuan BPR dalam memenuhi komitmen kredit dan aktivitas pendanaan. Likuiditas BPR mempunyai peran yang sangat penting karena apabila BPR gagal dalam mengelola likuiditasnya, maka kepercayaan masyarakat akan turun. Atas dasar tersebut diperlukan strategi khusus untuk menghindari kegagalan penyediaan likuiditas tersebut.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK SUMEDANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)  
31 Desember 2023**

**37. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)**

**Risiko Reputasi**

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif mengenai BPR. Risiko reputasi BPR dapat ditimbulkan akibat pengaruh dari kejadian reputasi pada anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, dan/atau pihak yang berasosiasi dengan BPR. BPR juga harus memerhatikan frekuensi dan signifikansi pengaduan nasabah. Selain itu, mitra bisnis juga dapat berperan dalam meningkatkan risiko reputasi BPR. Kerja sama yang dilakukan BPR dengan mitra bisnis yang sedang mengalami gangguan reputasi dapat berdampak pada kegiatan operasional BPR, terutama jika mitra bisnis dimaksud mendukung kegiatan operasional BPR antara lain penyedia jasa teknologi informasi yang secara berkesinambungan mengoperasikan aplikasi inti perbankan BPR.

**Risiko Strategik**

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan BPR dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan BPR dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko strategik dapat bersumber antara lain dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, sistem informasi manajemen yang kurang memadai, hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang kurang memadai, penetapan tujuan strategis yang terlalu agresif, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Manajemen risiko atas strategik yang dijalankan oleh BPR dengan cara melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko strategik dan penetapan limit.

**38. PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME**

Dalam rangka penyempurnaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) bagi Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan perkembangan produk serta pelayanan yang berbasis teknologi informasi, risiko pemanfaatan BPR dalam pencucian uang dan pendanaan teroris semakin tinggi maka Otoritas Jasa Keuangan membuat Peraturan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 18 September 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sedikitnya mencakup:

- a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris.
- b. Kebijakan prosedur.
- c. Pengendalian intern.
- d. Sistem informasi manajemen.
- e. Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelatihan.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK SUMEDANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)  
31 Desember 2023**

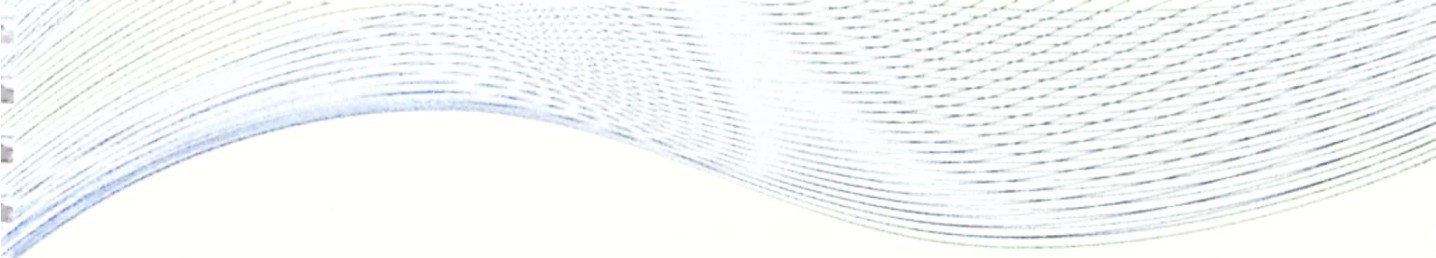
**39. TANGGAL PENYELESAIAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan per 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi pada tanggal 7 Februari 2024.

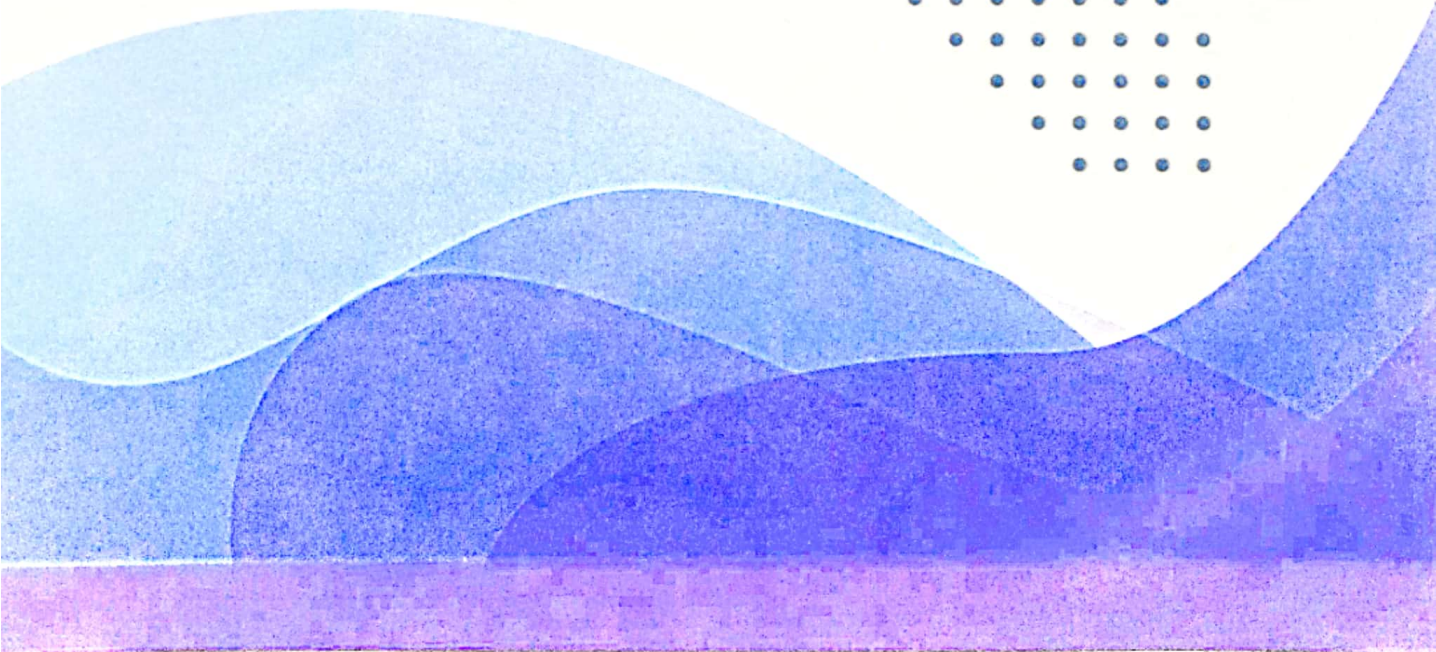
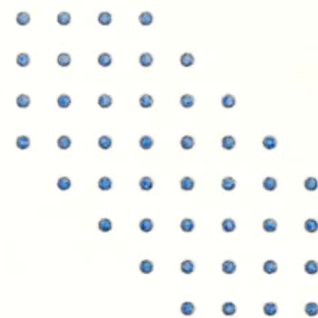
# LKM Sumedang



**BKAD**  
**KABUPATEN SUMEDANG**



PT Lembaga Keuangan Mikro  
Sumedang  
Laporan Keuangan  
31 Desember 2023  
dan Untuk Tahun Yang Berakhir  
Pada Tanggal tersebut  
serta  
Laporan Auditor Independen





## DAFTAR ISI

### Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan

### Laporan Auditor Independen

	<b>Halaman</b>
<b>Laporan Keuangan</b>	
Neraca	1
Laporan Laba Rugi	3
Laporan Perubahan Ekuitas	4
Laporan Arus Kas	5
Catatan atas Laporan Keuangan	7



**PT. LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SUMEDANG  
( PT. LKM SUMEDANG )**

Milik Pemda Kab. Sumedang

Milik Pemprop Jawa Barat

Kantor Pusat : Jln. Raya Ujungjaya No. 25 HP. 087755777494 Email: lkmsumedang01@gmail.com Kode pos 45383 Sumedang

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023  
PT LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SUMEDANG**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irwan Tedja Purnawan, S.E  
Alamat kantor : Jalan Raya Ujung Jaya No. 25 RT.001 RW.002 Sumedang  
Alamat rumah : Jalan Gending No. 7 Kelurahan Kota Kulon Sumedang  
Nomor Telepon Kantor : 087718084980  
Jabatan : Direktur Utama

Untuk dan atas nama PT LKM Sumedang menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT LKM Sumedang;
2. Laporan keuangan PT LKM Sumedang tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP);
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan PT LKM Sumedang telah dimuat secara lengkap dan benar;  
b. Laporan Keuangan PT LKM Sumedang tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;  
c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh PT LKM Sumedang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal, pencegahan dan penanggulangan kecurangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan bagi PT LKM Sumedang.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Sumedang, 28 Maret 2024



Irwan Tedja Purnawan, S.E  
Direktur Utama



No. : 00086/2.0923/AU.2/09/1531-2/1/III/2024

### Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Dewan Komisari dan Direksi  
**PT Lembaga Keuangan Mikro Sumedang**  
Sumedang

#### Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Lembaga Keuangan Mikro Sumedang ("LKM"), yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan LKM tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

#### Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap LKM berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

#### **Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan LKM dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan LKM.

### **Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan 12 tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kantor Akuntan Publik Sabar & Rekan



Darwansah, SE., M.Ak., Ak., CA., CPA., CPI  
Ijin Akuntan Publik No. AP.1531  
Ijin Usaha No. Kep. 1038/KM.1/2012

28 Maret 2024



**PT LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SUMEDANG**  
**NERACA**  
**31 Desember 2023**

**A S E T**

	Catatan	2 0 2 3	2 0 2 2
		Rp	Rp
Kas	4	83.413.100	219.346.000
Pendapatan bunga yang akan diterima	3c,5	192.331.924	194.830.927
Penempatan pada Bank lain Pihak ketiga	3d,6	1.479.480.815	1.753.402.823
Kredit yang diberikan			
Jumlah kredit yang diberikan	3e,7	9.972.828.923	9.585.529.934
Penyisihan penghapusan kredit	3e,7	(2.475.912.560)	(1.595.774.937)
Jumlah kredit yang diberikan		7.496.916.363	7.989.754.997
Jumlah bersih		9.252.142.202	10.157.334.747
Aset tetap, bersih	3g,8	298.916.661	321.383.938
Aset lain-lain	10	9.128.550	9.060.247
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>9.560.187.413</b>	<b>10.487.778.932</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

**PT LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SUMEDANG**  
**NERACA (Lanjutan)**  
**31 Desember 2023**

**KEWAJIBAN DAN EKUITAS**

	Catatan	2023	2022
		Rp	Rp
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Kewajiban segera	11	48.669.963	53.955.760
Utang bunga	12	22.145.379	21.015.014
Simpanan	3j,13	6.469.749.299	6.332.087.622
Kewajiban Imbalan kerja	3k,15	25.000.000	190.507.628
Kewajiban lain-lain	14	110.353.042	100.082.042
Jumlah kewajiban jangka pendek		6.675.917.683	6.697.648.066
<b>EKUITAS</b>			
Modal			
Modal saham			
Modal dasar 50.000 saham dengan nilai nominal Rp 100.000 per saham. Ditempatkan dan disetor Sebesar 41.200 saham	17	4.120.000.000	4.120.000.000
Saldo laba (rugi)			
Cadangan	3m	1.033.972.579	1.033.972.579
Akumulasi defisit		(1.363.841.713)	(1.363.841.713)
Laba (rugi) tahun berjalan		(905.861.136)	(1.363.841.713)
Jumlah ekuitas		2.884.269.730	3.790.130.866
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>9.560.187.413</b>	<b>10.487.778.932</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

**PT LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SUMEDANG**  
**LAPORAN LABA RUGI**  
 Untuk tahun yang berakhir pada  
 tanggal 31 Desember 2023

	Catatan	2023	2022
		Rp	Rp
Pendapatan bunga :			
Pendapatan bunga	3n,18	2.648.727.216	2.083.964.530
Beban bunga	3n,19	(845.681.477)	(438.570.998)
Pendapatan bunga, bersih		1.803.045.739	1.645.393.532
Pendapatan operasional lainnya	20	140.734.673	86.154.169
Beban operasional :			
Penyisihan kerugian kredit	21	(1.271.564.483)	(1.124.259.503)
Pemasaran	22	(70.883.421)	(70.249.199)
Administrasi dan umum	23	(1.502.443.644)	(1.893.980.712)
Jumlah beban operasional		(2.844.891.548)	(3.088.489.414)
Rugi operasional		(901.111.136)	(1.356.941.713)
Pendapatan non operasional	24	-	4.000.000
Beban non operasional	24	(4.750.000)	(10.900.000)
Rugi sebelum pajak penghasilan		(905.861.136)	(1.363.841.713)
Taksiran pajak penghasilan	3l.16a	-	-
Rugi bersih		(905.861.136)	(1.363.841.713)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang  
 tidak terpisahkan dari laporan keuangan



**PT LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SUMEDANG**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
 Untuk tahun yang berakhir pada  
 tanggal 31 Desember 2023

	Modal Saham	Saldo laba		Jumlah
		Yang ditentukan penggunaannya	Yang tidak ditentukan tujuannya	
	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo Per 31 Desember 2021	3.120.000.000	196.012.230	994.770.133	4.310.782.363
Modal disetor	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
Deviden	-	(107.806.727)	-	(107.806.727)
Cadangan	-	(39.202.446)	39.202.446	-
CSR/tanggungjawab sosial	-	(5.880.367)	-	(5.880.367)
Tantiem	-	(7.840.489)	-	(7.840.489)
Jasa produksi	-	(15.680.978)	-	(15.680.978)
Dana kesejahteraan	-	(19.601.223)	-	(19.601.223)
Rugi bersih	-	(1.363.841.713)	-	(1.363.841.713)
Saldo per 31 Desember 2022	4.120.000.000	(1.363.841.713)	1.033.972.579	3.790.130.866
Rugi bersih	-	(905.861.136)	-	(905.861.136)
Saldo per 31 Desember 2023	4.120.000.000	(2.269.702.849)	1.033.972.579	2.884.269.730

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

**PT LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SUMEDANG**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
 Untuk tahun yang berakhir pada  
 tanggal 31 Desember 2023

	2023	2022
	Rp	Rp
<b>Arus kas dari aktivitas operasi</b>		
Laba (rugi) bersih	(905.861.136)	(1.363.841.713)
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih tahun berjalan menjadi kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi :		
Penyusutan aset tetap	58.507.277	62.315.959
Laba penjualan aset tetap	-	4.000.000
Laba (rugi) operasi sebelum perubahan dalam aset dan kewajiban operasi	(847.353.859)	(1.297.525.754)
Penurunan pendapatan bunga yang akan diterima	2.499.003	43.278.548
Penurunan (kenaikan) kredit yang diberikan	492.838.634	(279.502.788)
Kenaikan aset lain-lain	(68.303)	(7.647.597)
Kenaikan (penurunan) kewajiban segera	(5.285.797)	20.217.464
Kenaikan (penurunan) utang bunga	1.130.365	(2.750.846)
Kenaikan (penurunan) utang pajak	-	(50.690.383)
Kenaikan simpanan	137.661.677	715.961.984
Kenaikan (penurunan) imbalan kerja	(190.507.628)	45.787.708
Kenaikan (penurunan) kewajiban lain-lain	35.271.000	(12.474.410)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	(373.814.908)	(825.346.074)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

**PT LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SUMEDANG**  
**LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)**  
 Untuk tahun yang berakhir pada  
 tanggal 31 Desember 2023

	2023	2022
	Rp	Rp
<b>Arus kas dari aktivitas investasi</b>		
Pembelian aset tetap	(36.040.000)	(16.175.000)
Penjualan aset tetap	-	13.500.000
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(36.040.000)	(2.675.000)
<b>Arus kas dari aktivitas pendanaan</b>		
Setoran tambahan modal	-	1.000.000.000
Pembagian deviden	-	(107.806.727)
Pembagian CSR	-	(5.880.367)
Pembagian tantiem	-	(7.840.978)
Pembagian jasa produksi	-	(15.680.978)
Dana kesejahteraan	-	(19.601.223)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	-	843.189.727
Kenaikan (penurunan) kas setara kas	(409.854.908)	15.168.653
Kas pada awal tahun	1.972.748.823	1.957.580.170
Kas dan setara kas pada akhir tahun	1.562.893.915	1.972.748.823

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang  
 tidak terpisahkan dari laporan keuangan

**PT LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SUMEDANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 Desember 2023**

**1. U M U M**

PT Lembaga Keuangan Mikro Sumedang didirikan berdasarkan akta notaris Upi Bestul Mardiah Zulkamain, SH., M.Kn Nomor 11 tanggal 13 November 2015 dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2471482.AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 11 Desember 2015.

Anggaran dasar telah mengalami perubahan, dengan akta notaris Gunawan Wibisana, S.H., M.Kn. No. 02 tanggal 9 September 2021 mengenai Pernyataan keputusan rapat perseroan terbatas. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0157861.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 15 September 2021.

Kegiatan utama PT LKM Sumedang adalah berusaha dalam bidang lembaga keuangan mikro dengan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan serta memberikan kredit kepada pengusaha kecil dan masyarakat pedesaan. LKM Sumedang berkedudukan di Jalan Raya Ujung Jaya No. 25 RT.001 RW.002 Sumedang. Perusahaan telah terdaftar sebagai wajib pajak dengan NPWP : 74.932.600.5-446.000. Jumlah karyawan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebanyak 21 dan 22 orang.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 13 November 2023, Susunan Dewan Komisaris dan Direksi LKM Sumedang per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

	2 0 2 3	2 0 2 2
Dewan Komisaris		
Komisaris Utama	: -----	Dadan Sugilar, S.E
Anggota	: -----	Dadan Kuswandana
Direktur Utama	: Irwan Tedja Purnawan, S.E	Irwan Tedja Purnawan, S.E
Direktur Operasional	: H. Maman Rahman, S.Pd	H. Maman Rahman, S.Pd

**2. PERNYATAAN KEPATUHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Direksi PT LKM Sumedang menyatakan bahwa laporan keuangan tahun 2023 dengan informasi komparatif pendekatan angka koresponding dengan tahun 2022 telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan telah memenuhi semua persyaratannya.

**PT LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SUMEDANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)  
31 Desember 2023**

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN**

**a. Penyajian Laporan Keuangan**

PT LKM Sumedang menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Laporan Keuangan entitas disusun sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) ini mengatur tentang penyajian dan pengungkapan informasi keuangan. Penyajian laporan keuangan tahun berjalan telah di modifikasi sesuai dengan ketentuan standar tersebut.

Laporan arus kas disajikan dengan menggunakan metode tidak langsung yang menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Kas dan setara kas terdiri dari giro/tabungan pada bank lain.

**b. Transaksi Dengan Pihak-Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa**

Dalam usahanya, Bank melakukan transaksi-transaksi dengan beberapa pihak yang mempunyai hubungan istimewa, sesuai dengan SAK ETAP, yang dianggap sebagai pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut :

- i. Dua entitas yang memiliki satu direktur atau anggota personel manajemen kunci secara umum, tetapi tidak memenuhi ketentuan (d) dan (f) dalam definisi “pihak yang mempunyai hubungan istimewa”.
- ii. Dua ventura karena mereka berbagi pengendalian bersama atas joint venture.
- iii. Pihak-pihak berikut dalam pelaksanaan urusan normal dengan entitas (meskipun pihak-pihak tersebut dapat mempengaruhi kebebasan entitas atau ikut serta dalam proses pengambilan keputusan).
  1. Penyandang dana
  2. Serikat dagang
  3. Departemen dan instansi pemerintahan.

Hubungan istimewa yang berkenaan dengan beberapa akun dalam laporan keuangan yaitu kredit yang diberikan, tabungan, deposito berjangka, dan sewa. Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa diperlakukan sama dengan transaksi dengan pihak ketiga.

**c. Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima**

Pendapatan bunga yang akan diterima adalah pendapatan bunga dari kredit dengan kualitas lancar (*performing*) yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengakuan pendapatan bunga dari penempatan pada bank lain.

**PT LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SUMEDANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**31 Desember 2023**

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (Lanjutan)**

**d. Penempatan Pada Bank Lain**

Penempatan pada bank lain dinyatakan sebesar nilai nominal penyetoran atau nilai yang diperjanjikan sesuai jenis penempatan. Saldo penempatan pada bank lain disajikan terpisah dengan penyisihan kerugian atas penempatan pada bank lain. Penyisihan tersebut ditetapkan berdasarkan penelaahan pada masing-masing saldo penempatan pada akhir periode tertentu.

**e. Kredit Yang Diberikan**

Kredit yang diberikan dinyatakan berdasarkan jumlah bruto tagihan bank yang belum dilunasi oleh nasabah setelah dikurangi penyisihan kerugian kredit dan amortisasi provisi kredit serta ditambah biaya kredit. Kredit yang diberikan dihapusbukukan pada saat piutang tersebut dipastikan tidak akan tertagih dan telah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Seluruh penerimaan yang berhubungan dengan kredit diragukan dan macet diakui terlebih dahulu sebagai pengurang pokok kredit. Kelebihan penerimaan dari pokok kredit diakui sebagai pendapatan bunga. Penerimaan dari kredit *performing* diakui melunasi bunga terlebih dahulu. Akan tetapi, untuk kredit *non-performing* yang digolongkan diragukan dan macet, penerimaan ini dipergunakan terlebih dahulu untuk mengurangi pokok dari kredit karena kemungkinan tertagihnya sangat diragukan.

**Penyisihan penghapusan Pinjaman**

Penyisihan Penghapusan Pinjaman adalah penyisihan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan risiko kerugian yang timbul sebagai akibat dari tidak dapat diterima kembali sebagian atau seluruh pinjaman yang diberikan. Dalam hal terjadi peningkatan penyisihan, maka penyisihan harus dibebankan pada laporan kinerja keuangan LKM sebelum menggunakan cadangan untuk menutup kerugian. Penyisihan penghapusan pinjaman dibentuk berdasarkan penelaahan dan penilaian manajemen terhadap masing-masing kualitas pinjaman pada akhir tahun, dengan mengacu pada ketentuan POJK Nomor 13/POJK.05/2014 yang telah dirubah dengan POJK Nomor 62/POJK.05/2015 tentang penyelenggaraan usaha LKM pasal 8 yang menyatakan bahwa LKM Wajib melakukan penilaian kualitas pinjaman atau pembiayaan yang disalurkan.

Penyisihan Penghapusan Pinjaman diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori dengan besarnya persentase penyisihan sebagai berikut :

Kolektabilitas	% Penyisihan
Lancar	: 0%
Diragukan	: 50%
Macet	: 100%

**PT LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SUMEDANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**31 Desember 2023**

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (Lanjutan)**

**f. Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)**

Agunan yang diambil alih merupakan aset bank yang diperoleh sehubungan dengan penyelesaian kredit bermasalah (disajikan dalam akun "Agunan Yang Diambil Alih" – AYDA). Agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu nilai wajar agunan setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan. Selisih antara nilai agunan yang telah diambil alih dan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan agunan. Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan.

**g. Aset Tetap**

Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Biaya perolehan meliputi harga beli aset tetap termasuk biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang siap digunakan serta estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan aset dan biaya restorasi relokasi. Pajak-pajak yang dapat dikreditkan dan semua diskon dikurangkan dalam menentukan biaya perolehan. Penyusutan dimulai pada saat aset tetap tersedia untuk digunakan dan berhenti ketika aset tetap dihapuskan atau dijual. Penyusutan tidak berhenti ketika aset tidak digunakan. Penyusutan diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi, kecuali memenuhi syarat untuk dikapitalisasi sebagai perolehan suatu aset berdasarkan SAK ETAP.

Aset tetap disajikan sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Tarif penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap dengan rincian sebagai berikut :

	Pengelompokan aset	Masa manfaat Tahun	% per tahun
Bangunan		20	5
Kendaraan	Golongan 1	4	25
Peralatan kantor	Golongan 1	4	25
Peralatan kantor	Golongan 2	8	12,5

Pengeluaran untuk perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja dikapitalisasi.

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Biaya perpanjangan hak pemilikan tanah ditangguhkan dan diamortisasi sepanjang periode hak atas tanah dan umur ekonomis tanah.

**PT LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SUMEDANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)  
31 Desember 2023**

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (Lanjutan)**

**h. Biaya Dibayar Di Muka**

Biaya dibayar di muka diamortisasi berdasarkan periode penggunaannya dengan metode garis lurus (*straight line method*).

**i. Beban Ditangguhkan**

Beban yang ditangguhkan diamortisasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).

**j. Simpanan**

Tabungan dan deposito dinyatakan sebesar nilai kewajiban bank kepada nasabah. Sertifikat deposito dinyatakan sebesar nilai nominal dikurangi dengan bunga yang belum diamortisasi.

**k. Kewajiban Imbalan Kerja**

Perusahaan diwajibkan untuk membentuk penyisihan imbalan kerja sebagaimana diatur dalam SAK ETAP Bab 23 “Imbalan kerja”. Pengakuan kewajiban tersebut didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan tersebut perusahaan diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat mereka berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan kerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan besarnya kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja. Pada dasarnya imbalan kerja menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti.

**l. Pajak Penghasilan**

Perusahaan mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, Perusahaan harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. Perusahaan tidak mengakui pajak tangguhan.

**m. Cadangan Umum**

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007, Perusahaan wajib, setiap tahun menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan, sampai cadangan sekurang-kurangnya 20% dari modal yang ditempatkan. Penentuan jumlah penyisihan sebagaimana yang dimaksud akan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.



**PT LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SUMEDANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**31 Desember 2023**

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (Lanjutan)**

**n. Pengakuan Pendapatan dan Beban Bunga**

Pendapatan dan beban bunga diakui secara akrual, kecuali pendapatan bunga atas kredit dan aktiva produktif lainnya yang diklasifikasikan sebagai diragukan dan macet (*non-performing*). Pendapatan bunga yang diakui tetapi belum tertagih harus dibatalkan pada saat kredit diklasifikasikan *non-performing*. Pendapatan bunga atas aktiva *non-performing* yang belum diterima dilaporkan sebagai tagihan kontijensi dalam akun administratif.

Pendapatan bunga atas kredit yang diklasifikasikan sebagai aktiva produktif lainnya yang diklasifikasikan *non-performing* diakui pada saat pendapatan tersebut telah diterima. Seluruh penerimaan yang berhubungan dengan kredit *non-performing* yang diklasifikasikan diragukan dan macet diakui terlebih dahulu sebagai pengurang pokok kredit. Kelebihan penerimaan dari pokok kredit diakui sebagai pendapatan bunga dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

**4. K A S**

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Kas	<u>83.413.100</u>	<u>219.346.000</u>

**5. PENDAPATAN BUNGA YANG AKAN DITERIMA**

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Kredit Kresda Sukro	146.249.255	164.801.316
Kredit KUTETAP	41.370.404	25.038.955
Kredit Sejahteraku	4.712.265	4.990.656
Jumlah	<u>192.331.924</u>	<u>194.830.927</u>

**6. PENEMPATAN PADA BANK LAIN**

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Tabungan		
PT Bank Pembangunan Dearah Jawa Barat dan Banten, Tbk	809.218.053	1.580.599.984
PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk	589.431.826	141.289.489
Perumda BPR Bank Sumedang	66.127.846	31.513.350
PT BPRS Al Masoem	14.703.090	-
Jumlah	<u>1.479.480.815</u>	<u>1.753.402.823</u>

**PT LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SUMEDANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**31 Desember 2023**

**7. KREDIT YANG DIBERIKAN**

**a. Berdasarkan Jenis kredit**

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Kredit Kresda Sukro	7.028.640.750	8.041.911.437
Kredit KUTETAP	2.573.941.000	1.270.548.000
Kredit Sejahteraku	395.391.935	395.297.500
	<u>9.997.973.685</u>	<u>9.707.756.937</u>
Jumlah kredit yang diberikan	9.997.973.685	9.707.756.937
Provisi	(25.144.762)	(122.227.003)
Penyisihan kerugian	(2.475.912.560)	(1.595.774.937)
	<u>7.496.916.363</u>	<u>7.989.754.997</u>
Jumlah bersih	<u>7.496.916.363</u>	<u>7.989.754.997</u>

**b. Berdasarkan kolektibilitas**

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Lancar	6.394.877.435	7.000.181.000
Diragukan	1.100.616.000	586.227.000
Macet	2.502.480.250	2.121.348.937
	<u>9.997.973.685</u>	<u>9.707.756.937</u>
Jumlah	9.997.973.685	9.707.756.937
Provisi	(25.144.762)	(122.227.003)
Penyisihan kerugian	(2.475.912.560)	(1.595.774.937)
	<u>7.496.916.363</u>	<u>7.989.754.997</u>
Jumlah bersih	<u>7.496.916.363</u>	<u>7.989.754.997</u>

Berikut adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan :

- a. Tingkat suku bunga per tahun untuk kredit yang diberikan adalah sebesar 18% - 24% (2023) dan (2022).
- b. Pendapatan bunga selama tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 2.309.440.172 dan Rp 1.838.883.916 (lihat Catatan 18).

**PT LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SUMEDANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**31 Desember 2023**

**S. ASET TETAP**

	Saldo awal Rp	2 0 2 3		Saldo akhir Rp
		Penambahan Rp	Pengurangan Rp	
Biaya perolehan :				
Tanah	22.222.500	-	-	22.222.500
Bangunan	354.428.455	-	-	354.428.455
Kendaraan	141.385.000	-	-	141.385.000
Peralatan dan perlengkapan	286.917.100	36.040.000	-	322.957.100
<b>Jumlah</b>	<u>804.953.055</u>	<u>36.040.000</u>	<u>-</u>	<u>840.993.055</u>
Akumulasi penyusutan :				
Bangunan	147.107.335	12.044.580	-	159.151.915
Kendaraan	84.663.169	23.646.216	-	108.309.385
Peralatan dan perlengkapan	251.798.613	22.816.481	-	274.615.094
<b>Jumlah</b>	<u>483.569.117</u>	<u>58.507.277</u>	<u>-</u>	<u>542.076.394</u>
<b>Nilai buku</b>	<u>321.383.938</u>			<u>298.916.661</u>

	Saldo awal Rp	2 0 2 2		Saldo akhir Rp
		Penambahan Rp	Pengurangan Rp	
Biaya perolehan :				
Tanah	22.222.500	-	-	22.222.500
Bangunan	354.428.455	-	-	354.428.455
Kendaraan	154.885.000	-	(13.500.000)	141.385.000
Peralatan dan perlengkapan	270.742.100	16.175.000	-	286.917.100
<b>Jumlah</b>	<u>802.278.055</u>	<u>16.175.000</u>	<u>(13.500.000)</u>	<u>804.953.055</u>
Akumulasi penyusutan :				
Bangunan	135.062.755	12.044.580	-	147.107.335
Kendaraan	74.516.953	23.646.216	(13.500.000)	84.663.169
Peralatan dan perlengkapan	225.173.450	26.625.163	-	251.798.613
<b>Jumlah</b>	<u>434.753.158</u>	<u>62.315.959</u>	<u>(13.500.000)</u>	<u>483.569.117</u>
<b>Nilai buku</b>	<u>367.524.897</u>			<u>321.383.938</u>

Beban penyusutan aset tetap yang dibebankan pada beban umum dan administrasi masing-masing sebesar Rp 58.507.277 untuk tahun 2023 dan Rp 62.315.959 untuk tahun 2022.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap aset tetap pada tanggal 31 Desember 2023, manajemen menyatakan bahwa tidak terdapat indikasi adanya penurunan nilai.

**PT LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SUMEDANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**31 Desember 2023**

**9. ASET TIDAK BERWUJUD**

	2 0 2 3	2 0 2 2 Rp
Software – nilai perolehan	92.500.000	92.500.000
Amortisasi software	(92.500.000)	(92.500.000)
Jumlah	-	-

**10. ASET LAIN-LAIN**

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Pajak dibayar di muka	7.639.737	7.639.752
Internet	-	790.485
Lainnya	1.488.813	630.010
Jumlah	9.128.550	9.060.247

Aset lain-lain tersebut merupakan pengeluaran tahun - tahun sebelumnya yang belum dibebankan dalam laporan keuangan, Aset lain-lain tersebut tidak dapat memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang.

**11. KEWAJIBAN SEGERA**

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Pajak bunga deposito dan tabungan	40.451.709	36.675.174
Titipan Nasabah	8.218.254	17.280.586
Jumlah	48.669.963	53.955.760

**12. UTANG BUNGA**

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Bunga deposito yang masih harus dibayar	21.810.533	20.680.168
Bunga tabungan yang masih harus dibayar	334.846	334.846
Jumlah	22.145.379	21.015.014

**PT LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SUMEDANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**31 Desember 2023**

**13. SIMPANAN**

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Tabungan	1.778.249.299	2.046.137.622
Deposito	4.691.500.000	4.285.950.000
	<u>6.469.749.299</u>	<u>6.332.087.622</u>
Rincian simpanan menurut jenis tabungan :		
Tabungan Wajib	1.804.587	688.508
Tabungan Masa Depan	1.512.859.512	2.038.151.377
Tabungan Simpel	1.746.296	7.297.737
Tabungan Titipan	2.671.720	-
Tabungan Si Paket	101.255	-
Tabungan Simpanan Mitra LKM	259.065.929	-
	<u>1.778.249.299</u>	<u>2.046.137.622</u>
Rincian simpanan dalam bentuk deposito :		
Deposito 3 bulan	25.000.000	108.000.000
Deposito 6 bulan	1.235.500.000	728.000.000
Deposito 9 bulan	-	100.000.000
Deposito 12 bulan	3.431.000.000	3.349.950.000
	<u>4.691.500.000</u>	<u>4.285.950.000</u>

Tingkat suku bunga tabungan rata-rata untuk tahun 2023 sebesar 1,00% - 4,00% per tahun. Beban bunga yang dibayarkan selama tahun 2023 sebesar Rp 23.591.516 (lihat catatan 19).

Tingkat suku bunga deposito untuk tahun 2023 berkisar antara 5,25% sampai dengan 9,00%. Beban bunga yang dibayarkan selama tahun 2023 sebesar Rp 359.249.237 (lihat catatan 19).

**14. KEWAJIBAN LAIN-LAIN**

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Cadangan	<u>110.353.042</u>	<u>100.082.042</u>

**PT LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SUMEDANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**31 Desember 2023**

**15. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA**

Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 13/2003 tentang "Ketenagakerjaan", Undang-Undang Cipta Kerja No. 11/2020 ("UUCK"), Peraturan Pemerintah No. 35/2021 dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Bab 23 tentang "Imbalan Kerja", Perusahaan diwajibkan untuk mencadangkan kewajiban imbalan kerja untuk karyawan yang telah memenuhi kualifikasi. Besarnya imbalan kerja tersebut dihitung berdasarkan lama bekerja dan kompensasi karyawan pada saat berhenti.

Berikut adalah mutase kewajiban imbalan kerja untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 :

	2 0 2 3	2 0 2 2
	Rp	Rp
Saldo awal tahun lalu	190.507.628	144.719.920
Penambahan	25.000.000	186.084.800
Pengurangan	(190.507.628)	(140.297.092)
<b>Jumlah</b>	<u>25.000.000</u>	<u>190.507.628</u>

**16. PERPAJAKAN**

**a. Pajak penghasilan badan**

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perhitungan laba menurut laporan keuangan sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut :

	2 0 2 3	2 0 2 2
	Rp	Rp
Rugi sebelum pajak penghasilan	<u>(905.861.136)</u>	<u>(1.363.841.713)</u>
Perbedaan waktu	<u>-</u>	<u>-</u>
Perbedaan tetap :		
Beban yang tidak dapat dikurangkan :	5.919.500	8.116.000
Penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final	-	-
	<u>5.919.500</u>	<u>8.116.000</u>
Rugi Fiskal	<u>(899.941.636)</u>	<u>(1.355.725.713)</u>
Taksiran pajak penghasilan badan	<u>NIHIL</u>	<u>NIHIL</u>

Taksiran Perhitungan Pajak Penghasilan Badan tahun 2023, dihitung berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, pasal 31E ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

**PT LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SUMEDANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**31 Desember 2023**

16. **PERPAJAKAN (Lanjutan)**

b. **Administrasi**

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, perusahaan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

17. **MODAL**

Berdasarkan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 242 Tahun 2021, pemilikan saham pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut :

Pemegang saham	2 0 2 3	
	Persentase kepemilikan %	Jumlah modal disetor Rp
Pemerintah Daerah Kab. Sumedang	78,15	3.220.000.000
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	21,85	900.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>4.120.000.000</b>
Pemegang saham	2 0 2 2	
	Persentase kepemilikan %	Jumlah modal disetor Rp
Pemerintah Daerah Kab. Sumedang	78,15	3.220.000.000
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	21,85	900.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>4.120.000.000</b>

18. **PENDAPATAN BUNGA**

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Penempatan pada bank lain		
Tabungan	9.441.303	15.653.852
Pendapatan kredit		
Kredit yang diberikan	2.309.440.172	1.838.883.916
<b>Jumlah</b>	<b>2.318.881.475</b>	<b>1.854.537.768</b>
Pendapatan provisi dan administrasi		
Provisi kredit	329.845.741	229.426.762
<b>Jumlah</b>	<b>2.648.727.216</b>	<b>2.083.964.530</b>

**PT LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SUMEDANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**31 Desember 2023**

**19. BEBAN BUNGA**

	2023 Rp	2022 Rp
Bunga simpanan :		
Deposito	359.249.237	306.367.534
Tabungan	23.591.516	38.538.048
Lainnya	462.840.724	93.665.416
Jumlah	<u>845.681.477</u>	<u>438.570.998</u>

**20. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA**

	2023 Rp	2022 Rp
Pemulihan PPAP kredit	58.284.100	45.688.000
Administrasi simpanan	31.500.281	28.981.642
Penerimaan kredit hapus buku	20.793.000	2.336.800
BPRS AL-MASOEM	14.379.011	-
Asuransi	8.650.988	5.980.232
Imbal jasa posfin	426.141	1.073.459
Lainnya	6.701.152	2.094.036
Jumlah	<u>140.734.673</u>	<u>86.154.169</u>

**21. BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN**

	2023 Rp	2022 Rp
Kredit yang diberikan	<u>1.271.564.483</u>	<u>1.124.259.503</u>

**22. PEMASARAN**

	2023 Rp	2022 Rp
Aktifitas <i>marketing</i>	68.883.421	70.099.199
Insentif <i>marketing</i>	2.000.000	150.000
Jumlah	<u>70.883.421</u>	<u>70.249.199</u>



**PT LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SUMEDANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**31 Desember 2023**

**23. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM**

	2023 Rp	2022 Rp
Beban tenaga kerja :		
Gaji dan tunjangan direksi	882.691.123	1.278.603.739
Honorarium dewan pengawas	95.090.468	99.067.776
Tunjangan hari raya	82.337.199	85.358.358
Lainnya (imbalan lainnya)	57.709.091	29.981.819
Jumlah	<u>1.117.827.881</u>	<u>1.493.011.692</u>
Beban pajak :		
Kendaraan bermotor	237.500	2.173.300
Pajak bumi dan bangunan	3.110.000	322.000
Pajak lainnya	1.458.500	-
	<u>4.806.000</u>	<u>2.495.300</u>
Biaya Pelatihan	-	1.000.000
BPJS Kesehatan	<u>26.906.861</u>	<u>18.285.460</u>
Sewa Kantor	-	<u>333.336</u>
Beban pemeliharaan dan perbaikan :		
Pemeliharaan dan perbaikan gedung/rumah/gudang	6.000	100.000
Pemeliharaan kendaraan	5.437.500	5.229.500
Pemeliharaan dan perbaikan inventaris kantor	2.939.500	2.200.000
Pemeliharaan dan perbaikan lainnya	4.087.500	4.165.000
	<u>12.470.500</u>	<u>11.694.500</u>
Beban penyusutan dan amortisasi :		
Bangunan	12.044.580	12.044.580
Kendaraan	23.646.216	23.646.216
Mesin-mesin dan komputer	22.816.481	26.625.163
	<u>58.507.277</u>	<u>62.315.959</u>
Jumlah beban administrasi dan umum dilanjutkan	<u>1.220.518.519</u>	<u>1.589.136.247</u>

**PT LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SUMEDANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**31 Desember 2023**

**23. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM (Lanjutan)**

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Jumlah beban administrasi dan umum dilanjutkan	<u>1.220.518.519</u>	<u>1.589.136.247</u>
Beban barang dan jasa :		
Pengurusan jasa pihak ketiga	45.842.380	39.708.150
BBM	19.347.500	18.523.508
Telepon, faxsimili & internet	16.601.700	13.510.000
Rumah tangga kantor	14.928.300	15.162.200
Alat tulis dan kantor	11.925.600	15.916.800
Barang cetakan	8.897.000	11.467.000
Biaya perjalanan dinas	7.855.500	7.007.000
Listrik	7.646.944	7.452.114
Air minum (PDAM)	4.524.300	3.573.100
Biaya adm. bank	2.169.450	4.233.299
Poto copy	1.604.000	1.951.500
Kirim surat/transfer	778.500	491.500
Promosi	694.000	366.500
Benda & jasa pos/materai	490.000	310.000
Seragam dinas	-	5.600.000
Lain-lainnya	459.867	250.000
Jumlah	<u>143.765.041</u>	<u>145.522.671</u>
Beban operasional lainnya :		
Insentif bendahara gaji	16.653.435	1.726.540
Transport Komisaris	13.900.000	22.600.000
Jamuan - jamuan	5.919.500	6.299.500
Promosi lainnya	2.730.500	8.725.500
Transport direksi	1.823.000	2.080.500
Keamanan	550.000	1.200.000
Promosi/iklan	500.000	-
Operasional penagihan	230.000	2.888.500
Lainnya transport survey	146.000	159.000
Selisih kas kurang	7.649	276
Beban pengakuan PYAD offer estimasi	-	62.735.978
Operasional kantor lainnya	-	2.019.000
Promosi/hadiah/insentif	-	1.816.500
Rapat-rapat	-	1.250.000
Iuran-iuran	-	50.000
Lain-lainnya	95.700.000	45.770.500
Jumlah	<u>138.160.084</u>	<u>159.321.794</u>
Jumlah beban administrasi dan umum	<u>1.502.443.644</u>	<u>1.607.528.590</u>

**PT LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SUMEDANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**31 Desember 2023**

**24. PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL LAINNYA**

	2023 Rp	2022 Rp
Pendapatan non operasional		
Penjualan aset tetap	-	4.000.000
Jumlah	<u>-</u>	<u>4.000.000</u>
Beban non operasional		
Lain-lain	<u>(4.750.000)</u>	<u>(10.900.000)</u>
Jumlah	<u>(4.750.000)</u>	<u>(6.900.000)</u>

**25. INFORMASI RASIO KEUANGAN**

Rasio	2023 %	2022 %
<b>I. Aktiva Produktif</b>		
<i>Non Performing Loan (NPL) - Gross</i>	36,04	27,89
<i>Non Performing Loan (NPL) - Net</i>	11,27	11,45
Rasio KAP	26,64	21,07
<b>II. Rentabilitas</b>		
<i>Return On Assets (ROA)</i>	-9,48	-13,00
Beban Operasi terhadap pendapatan (BOPO)	146,36	178,37
<b>III. Likuiditas</b>		
<i>Loan Deposit Rasio (LDR)</i>	154,53	153,31
<i>Cash Rasio</i>	23,41	29,45

**PT LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SUMEDANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**31 Desember 2023**

**26. MANAJEMEN RISIKO**

Pengelolaan risiko mengacu kepada kepentingan strategis Perusahaan secara keseluruhan. Pengelolaan risiko juga bukan semata-mata pemantauan, pelaporan dan evaluasi risiko-risiko yang telah terjadi, namun juga mendeteksi dan mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi di masa mendatang.

**Risiko Likuiditas**

Risiko likuiditas adalah potensi timbulnya kerugian akibat dari ketidakmampuan Perusahaan dalam membayar penarikan oleh nasabah, mendanai pertumbuhan aktiva dan memenuhi kewajiban sesuai kontrak melalui akses tak terbatas untuk pendanaan pada tingkat suku bunga pasar yang layak pada umumnya. Risiko Likuiditas juga timbul dari situasi di mana Perusahaan tidak dapat mencairkan atau menjual aset karena pasar tidak bisa memperdagangkan aset tersebut.

Risiko ini melekat pada aktivitas perkreditan, khususnya pada kemampuan Perusahaan dalam memenuhi komitmen kredit dan aktivitas pendanaan. Likuiditas Perusahaan mempunyai peran yang sangat penting karena apabila Perusahaan gagal dalam mengelola likuiditasnya, maka kepercayaan masyarakat akan turun. Atas dasar tersebut diperlukan strategi khusus untuk menghindari kegagalan penyediaan likuiditas tersebut.

**Risiko Kredit**

Risiko Kredit adalah risiko yang disebabkan oleh kegagalan pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya terhadap Perusahaan. Risiko kredit dapat timbul dari aktivitas fungsional perusahaan yaitu perkreditan (penyediaan dana) serta *treasury* dan investasi.

Manajemen risiko atas kredit yang dijalankan oleh Perusahaan antara lain dengan cara :

1. Membuat dan memantau posisi Risiko di seluruh aktivitas fungsional secara keseluruhan (*composite*) berdasarkan jenis Risiko;
2. Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional (*risk taking unit*) dalam rangka melakukan mitigasi risiko pada ruang lingkup kegiatan bank.
3. Mendesain perangkat (*tools*) yang dibutuhkan dalam penerapan Manajemen Risiko
4. Melakukan pengawasan terhadap Pelanggaran BMPK.

**Risiko Operasional**

Risiko operasional adalah potensi timbulnya kerugian sebagai akibat dari kejadian-kejadian yang melibatkan manusia, proses, sistem.

Seluruh aktivitas kegiatan Perusahaan senantiasa dihadapkan pada kemungkinan terjadinya 4 (empat) permasalahan tersebut di atas, sehingga dengan sendirinya potensial terjadinya risiko operasional memiliki kesempatan lebih tinggi dibanding dengan risiko-risiko yang lain.

**PT LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SUMEDANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)  
31 Desember 2023**

26. **MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)**

**Risiko Operasional (Lanjutan)**

Dalam pengelolaan risiko operasional, masing-masing bagian bertanggung jawab untuk risiko yang terjadi pada kegiatan operasional sehari-hari dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur, pengendalian dan pengawasan rutin. Selain itu, pengelolaan risiko operasional juga meliputi hal-hal yang terkait dengan pengembangan produk, sistem, sumber daya manusia sebagai aspek pencegahan terhadap kemungkinan adanya hal-hal yang tidak diinginkan.

27. **TANGGAL PENYELESAIAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang diselesaikan pada tanggal 28 Maret 2024.

# PT Kampung Makmur



**BKAD**  
**KABUPATEN SUMEDANG**



**BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN SUMEDANG**  
**PT. KAMPUNG MAKMUR (PERSERODA)**



Jl. Serma Muhtar No. 121 RT 01 RW 07 Kel Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang  
Telp. 0261 2401346 e-mail: [kampungmakmur.bumd@gmail.com](mailto:kampungmakmur.bumd@gmail.com)

Sumedang, 4 Januari 2024

Nomor : 002/PT.KM/Dir/I/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) bundel  
Perihal : **Pemenuhan Laporan Keuangan**

**Kepada Yth:**

**Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Sumedang**

**di Tempat**

Dipermaklumkan dengan hormat, menanggapi surat saudara Nomor: B/5736/KU.10./XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 perihal permintaan laporan keuangan, yang kami terima tanggal 3 Januari 2024. Bersama ini kami sampaikan Laporan Keuangan Perusahaan PT. Kampung Makmur (Perseroda) tahun 2023 *unaudited* yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
**PT. Kampung Makmur (Perseroda)**

**Dr. Ir. ANNE HADIYANE, S.Hut., M.Si., IPM.**  
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Komisarsi PT. Kampung Makmur (Perseroda) sebagai laporan;
2. Arsip.

Kampung  
Makmur

## PT. KAMPUNG MAKMUR (PERSERODA)

## Neraca (Standar)

Per Tgl. 31 Dec 2023

Description	Balance
<b>Aktiva</b>	
<b>Aktiva Lancar</b>	
<b>Kas dan Bank</b>	
<b>KAS &amp; BANK</b>	<b>62.612.456,96</b>
<b>Kas Kecil</b>	<b>1.332.250,00</b>
<b>Kas Kecil</b>	<b>252.190,00</b>
Kas Kecil	252.190,00
Kas Kecil GIM	248.137,00
Kas Besar	613.723,00
Kas Kecil Burnong	218.200,00
Giro BNI Pusat 2011002999	35.970.520,00
Giro BJB Pusat 0000020112999	4.319.999,00
BNI Taplus Burnong 2011002296	1.881.603,00
Giro BNI Burnong 2011000298	390.758,00
Tabungan Mandiri GIM 1310017794837	17.266.182,36
BNI Taplus Pusat 2011002988	111.357,00
Giro BRI Burnong 009401002645300	956.833,60
Giro BRI Opr. Burnong 009401002644304	382.954,00
<b>Jumlah Kas dan Bank</b>	<b>62.612.456,96</b>
<b>Piutang Dagang</b>	
<b>PIUTANG</b>	<b>352.006.296,00</b>
<b>Piutang Usaha IDR</b>	<b>263.195.023,00</b>
<b>Piutang Usaha IDR</b>	<b>306.703.123,00</b>
Piutang Usaha IDR	306.703.123,00
<b>Pendapatan Yang Masih Harus Diterima</b>	<b>-43.508.100,00</b>
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	-43.508.100,00
Piutang Karyawan	88.811.273,00
<b>Jumlah Piutang Dagang</b>	<b>352.006.296,00</b>
<b>Persediaan</b>	
<b>PERSEDIAAN</b>	<b>30.317.500,82</b>
<b>Persediaan Barang Dagang</b>	<b>30.317.500,82</b>
Persediaan Barang Dagang	30.317.500,82
<b>Jumlah Persediaan</b>	<b>30.317.500,82</b>
<b>Aktiva lancar lainnya</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Aktiva lancar lainnya</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Aktiva Lancar</b>	<b>444.936.253,78</b>
<b>Aktiva Tetap</b>	
<b>Nilai historis</b>	<b>34.783.927.466,00</b>
<b>Aktiva Tetap</b>	<b>28.581.400.000,00</b>
<b>Tanah</b>	<b>820.000.000,00</b>
Tanah Kantor Pusat	820.000.000,00
Tanah SRG Tomo	1.515.297.000,00
Tanah Sekarwangi	1.627.320.000,00
Tanah GIM	24.618.783.000,00
<b>Bangunan</b>	<b>5.974.084.040,00</b>
Bangunan Kantor Pusat	372.266.300,00
Bangunan SRG Tomo	1.760.103.000,00
Bangunan Sekarwangi	1.236.397.740,00
Bangunan GIM	2.605.317.000,00
Kendaraan	-7.000.000,00
<b>Peralatan</b>	<b>235.123.426,00</b>
Peralatan Kantor Pusat	175.335.826,00
Peralatan GIM	48.695.600,00
Peralatan SRG	5.750.000,00
Peralatan Burnong	5.342.000,00
Perlengkapan Kantor	320.000,00
<b>Jumlah Nilai historis</b>	<b>34.783.927.466,00</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>	
<b>AKUMULASI PENYUSUTAN</b>	<b>-1.035.345.134,09</b>
<b>Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap</b>	<b>-1.035.345.134,09</b>
Akumulasi Penyusutan Bangunan Kantor Pusat	-52.075.795,83
Akumulasi Penyusutan Bangunan SRG Tomo	-271.349.212,50
Akumulasi Penyusutan Bangunan Sekarwangi	-170.004.689,25
Akumulasi Penyusutan Bangunan GIM	-358.231.087,50
Akumulasi Penyusutan Kendaraan	2.041.666,72
Akumulasi Penyusutan Peralatan	-185.726.015,73



PT. KAMPUNG MAKMUR (PERSERODA)

**Neraca (Standar)**

Per Tgl. 31 Dec 2023

Description	Balance
Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor	-145.834.835,17
Akumulasi Penyusutan Peralatan GIM	-33.537.791,67
Akumulasi Penyusutan Peralatan SRG	-4.472.222,22
Akumulasi Penyusutan Peralatan Burnong	-1.881.166,67
<b>Jumlah Akumulasi Penyusutan</b>	<b>-1.035.345.134,09</b>
<b>Jumlah Aktiva Tetap</b>	<b>33.748.582.331,91</b>
<b>OTHER ASSETS</b>	
<b>PROYEK DALAM PROSES</b>	<b>124.936.161,93</b>
<b>UNIT USAHA PEMANDIAN CIPANAS SEKARWANGI</b>	<b>7.326.786,00</b>
Biaya Perizinan Sekarwangi & Konsultan Publik Sekarwangi	469.499,00
Biaya Perjalanan Dinas Sekarwangi	647.000,00
Operasional Sekarwangi	1.710.287,00
Biaya Sewa Kendaraan Sekarwangi	4.500.000,00
<b>UNIT USAHA TAKE OFF PARALAYANG/ TAMAN SERIBU CAHAYA</b>	<b>19.748.986,90</b>
Biaya Perizinan & Konsultan Publik Proyek Burnong	17.525.000,00
Biaya Perjalanan Dinas Burnong	2.223.986,90
<b>UNIT USAHA GEDUNG GRAHA INSUN MENDAL (GIM)</b>	<b>88.924.772,08</b>
Biaya Pembangunan Fasilitas GIM	88.868.650,00
Operasional GIM	56.122,08
<b>UNIT USAHA GEDUNG SISTEM RESI GUDANG TOMO</b>	<b>8.935.616,95</b>
Biaya Managemen Gudang Tomo	8.935.616,95
<b>Intangible Asset</b>	<b>26.969.400,00</b>
Lisensi Software Accurate	13.200.000,00
Biaya Pelatihan & Training Software	13.769.400,00
<b>Jumlah OTHER ASSETS</b>	<b>151.905.561,93</b>
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>34.345.424.147,62</b>
<b>Kewajiban dan Ekuitas</b>	
<b>Kewajiban</b>	
<b>Kewajiban lancar</b>	
<b>Hutang Dagang</b>	
<b>HUTANG</b>	<b>120.781.500,00</b>
Hutang Usaha IDR	120.221.500,00
Pendapatan Diterima Dimuka IDR	560.000,00
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka GIM	560.000,00
<b>Jumlah Hutang Dagang</b>	<b>120.781.500,00</b>
<b>Kewajiban lancar lain</b>	
<b>Hutang Pajak</b>	<b>-625.443,00</b>
PPn Keluaran	5.602.107,00
Hutang PPh 23	175.000,00
Hutang Pajak PPN	4.458.190,00
Hutang PPh Badan 26/29	-10.860.740,00
<b>Biaya Yang Masih Harus Dibayar</b>	<b>162.235.307,00</b>
<b>Hutang Gaji</b>	<b>162.235.307,00</b>
Hutang Gaji Komisaris	140.000.000,00
Hutang Gaji Direktur	11.750.000,00
<b>Hutang Gaji Management Perumahan</b>	<b>8.126.300,00</b>
Hutang Gaji GM Perumahan	8.126.300,00
<b>Hutang Gaji Management Agribisnis</b>	<b>2.359.007,00</b>
Hutang Gaji GM Agribisnis	2.359.007,00
<b>Hutang Lain-Lain</b>	<b>1.393.828.970,00</b>
Hutang Imbal Jasa	7.808.227,00
Hutang BPJS	-5.367.220,00
Hutang Pihak Ke 3	1.391.387.963,00
<b>Jumlah Kewajiban lancar lain</b>	<b>1.555.438.834,00</b>
<b>Jumlah Kewajiban lancar</b>	<b>1.676.220.334,00</b>
<b>Kewajiban jangka panjang</b>	
<b>Jumlah Kewajiban jangka panjang</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>1.676.220.334,00</b>
<b>Ekuitas</b>	
<b>EKUITAS</b>	<b>33.528.487.235,03</b>
<b>Modal Disetor</b>	<b>37.251.937.740,00</b>
<b>Modal Disetor</b>	<b>37.251.937.740,00</b>
Modal Tunai	2.750.000.000,00
Modal Aset	34.501.937.740,00
Dana CSR	2.696.040,00
Dana Talangan	109.773.800,00

**PT. KAMPUNG MAKMUR (PERSERODA)**

**Neraca (Standar)**

Per Tgl. 31 Dec 2023

<u>Description</u>	<u>Balance</u>
Laba Ditahan	-3.490.033.431,58
Investasi Kujang Sapasang(The Lodge)	95.257.989,00
Investasi TSC (The Lodge)	60.000.000,00
OPENING BALANCE EQUITY	-501.144.902,39
Laba tahun ini	-859.283.421,41
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>32.669.203.813,62</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>34.345.424.147,62</b>

**PT. KAMPUNG MAKMUR (PERSERODA)**

**Laba/Rugi (Standar)**

**Dari 01 Jan 2023 ke 31 Dec 2023**

Description	1 Jan-31 Des 2023
<b>Pendapatan</b>	
<b>PENDAPATAN</b>	<b>414.832.258,00</b>
<b>PENDAPATAN SEKTOR PARIWISATA</b>	<b>186.520.627,00</b>
<b>Pendapatan Unit Usaha Take Off Paralayang/TamanSeribuCahaya</b>	<b>111.192.644,00</b>
Pendapatan Unit Usaha Take Off Paralayang/Taman SeribuCahaya	111.192.644,00
<b>Unit Usaha Menara Kujang Sapasang</b>	<b>75.327.983,00</b>
Pendapatan Menara Kujang Sapasang	75.327.983,00
<b>PENDAPATAN JASA</b>	<b>220.196.352,00</b>
<b>Pendapatan Unit Usaha Gedung Graha Insun Medal</b>	<b>191.593.552,00</b>
Pendapatan Sewa Gedung Utama GIM	117.880.000,00
Pendapatan Sewa Ruangan GIM	29.581.400,00
Pendapatan Sewa Tenant GIM	13.993.600,00
Pendapatan Parkir GIM	18.888.189,00
Pendapatan Event GIM	922.000,00
Pendapatan GIM Lainnya	28.363,00
Pendapatan Sewa Tempat Roda	8.600.000,00
<b>Pendapatan Peralatan Gedung Graha Insun Medal</b>	<b>1.000.000,00</b>
Pendapatan Pinjam Kursi/Pinjam alat lainnya	1.000.000,00
Pendapatan Di Luar Usaha GIM	700.000,00
<b>Pendapatan Unit Usaha Gedung Sistem Resi Gudang Tomo</b>	<b>28.602.800,00</b>
Pendapatan Sewa Gudang	28.602.800,00
<b>PENDAPATAN SEKTOR PERDAGANGAN</b>	<b>1.065.279,00</b>
Pendapatan Produk UMKM	1.065.279,00
Pendapatan Lainnya	7.050.000,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>414.832.258,00</b>
<b>Harga Pokok Penjualan</b>	
<b>BEBAN POKOK</b>	<b>980.000,00</b>
<b>Hpp Perdagangan Retail</b>	<b>980.000,00</b>
Hpp Retail	980.000,00
<b>Jumlah Harga Pokok Penjualan</b>	<b>980.000,00</b>
<b>LABA KOTOR</b>	<b>413.852.258,00</b>
<b>Beban Operasi</b>	
<b>BEBAN POKOK</b>	<b>333.854.376,00</b>
<b>Biaya Unit Usaha Gedung Sistem Resi Gudang Tomo</b>	<b>8.862.750,00</b>
Biaya Gaji Management Gedung Sistem Resi Gudang Tomo	7.900.000,00
Biaya Perjalanan Dinas Gedung Sistem Resi Gudang Tomo	529.000,00
Biaya Pemeliharaan & Perbaikan Gedung Sistem Resi GudangTomo	130.000,00
Biaya Listrik & Bahan Bakar Gedung Sistem Resi Gudang Tomo	53.750,00
Biaya air PDAM Gedung Sistem Resi Gudang Tomo	250.000,00
<b>Biaya Unit Usaha Gedung Graha Insun Medal (GIM)</b>	<b>140.226.120,00</b>
Biaya Sumbangan GIM	300.000,00
Biaya Gaji Management GIM	70.820.000,00
<b>Biaya Operasional Gedung Graha Insun Medal (GIM)</b>	<b>15.865.884,00</b>
Biaya Listrik GIM	11.791.584,00
Biaya PDAM GIM	743.800,00
Biaya Rumah Tangga GIM	2.005.500,00
Biaya BBM GIM	1.325.000,00
Biaya Perbaikan & Pemeliharaan GIM	5.859.500,00
Biaya Marketing (Cash Back)	8.150.000,00
Biaya Kebersihan & Keamanan GIM	7.337.000,00
Biaya Perlengkapan GIM	1.522.300,00
Biaya Tenaga Kerja Harian GIM	1.515.000,00
Biaya Pinjam Pakai GIM	7.800.000,00
Biaya Makan dan Minum (Konsumsi) GIM	1.459.500,00
Biaya Jasa Produksi GIM	10.900.000,00
Biaya GIM Lainnya	1.555.708,00
Biaya BPJS GIM	473.228,00
<b>Biaya Event GIM</b>	<b>2.203.000,00</b>
Biaya Koordinasi Event	2.203.000,00
Biaya Insentif GIM	2.285.000,00
Biaya Fee Marketing GIM	2.180.000,00
<b>Unit Usaha Take Off Paralayang/Taman Seribu Cahaya</b>	<b>12.067.348,00</b>
Biaya Gaji Management Take Off Paralayang/Taman Seribu Cahay	4.267.000,00
Biaya Gaji Burnong	4.267.000,00
Uang makan pegawai Burnong	1.455.000,00
Biaya Perjalanan Dinas Take Off Paralayang/TamanSeribuCahaya	200.000,00

**PT. KAMPUNG MAKMUR (PERSERODA)****Laba/Rugi (Standar)**

Dari 01 Jan 2023 ke 31 Dec 2023

Description	1 Jan-31 Des 2023
BBM Perjalanan Dinas Take Off Paralayang/TamanSeribuCahaya	100.000,00
Biaya Makan Perjalanan Dinas Take Off Paralayang/TamanSeribu	100.000,00
Biaya Iklan & Promosi New Take Off Paralayang/TamanSeribuCah	54.000,00
Biaya Perbaikan & Pemeliharaan New Take Off Paralayang/Taman	62.500,00
Biaya Kebersihan New Take Off Paralayang/TamanSeribuCahaya	525.000,00
Biaya Sosial (CSR)	171.000,00
Biaya Bagi Hasil Bumdes Take OffParalayang/TamanSeribuCahaya	2.169.680,00
<b>Biaya Operasional Take Off Paralayang/Taman Seribu Cahaya</b>	<b>2.833.400,00</b>
Biaya Operasional Take Off Paralayang/TamanSeribuCahaya	1.060.000,00
BBM New Burnong	790.000,00
Biaya Makan & Minum (konsumsi) New Burnong	774.400,00
Biaya Listrik Burnong	209.000,00
<b>Biaya ATK dan perlengkapan Take Off Paralayang/Taman Seribu</b>	<b>668.000,00</b>
Biaya ATK dan perlengkapan Burnong	60.000,00
Biaya Pembuatan Tiket	608.000,00
Biaya Burnong Lainnya	-945.600,00
Bagi Hasil Perhutani (Burnong/TSC)	318.768,00
Bagi Hasil Ansuransi (Burnong/TSC)	75.000,00
Biaya Cetak Tiket Forest (Burnong/TSC)	-736.400,00
Biaya Operasional LO TSC	950.000,00
<b>Biaya Unit Usaha Pemandian Cipanas Sekarwangi</b>	<b>120.532.300,00</b>
Biaya Listrik Pemandian Cipanas Sekarwangi	532.300,00
Biaya Sewa Bangunan Pemandian Cipanas Sekarwangi	120.000.000,00
<b>Biaya Unit Usaha Menara Kujang Sapasang</b>	<b>52.165.858,00</b>
Biaya Bagi Hasil Pemda (Menara KS)	-16.456.093,00
Kontribusi Tetap Menara KS	68.221.951,00
Biaya Koordinasi Kujang Sapasang	-50.000,00
Biaya Operasional LO Kujang Sapasang	450.000,00
<b>BIAYA PEMASARAN</b>	<b>1.375.000,00</b>
<b>Biaya Promosi dan Iklan</b>	<b>1.375.000,00</b>
Biaya Promosi dan Iklan	300.000,00
Biaya Honor	1.075.000,00
<b>BIAYA UMUM &amp; ADM</b>	<b>54.287.850,00</b>
<b>Biaya Alat Tulis Kantor</b>	<b>4.678.450,00</b>
Biaya Fotocopy	2.178.050,00
Biaya ATK	2.089.400,00
Biaya Materai	411.000,00
Biaya Rumah Tangga Kantor	3.763.490,00
Biaya Listrik, PDAM, Telepon/Internet	9.941.607,00
Biaya Ekspedisi	127.900,00
Biaya Konsumsi Kantor	5.950.503,00
Biaya Seragam Karyawan	1.480.000,00
Biaya Kebersihan & Keamanan	740.000,00
Biaya Perlengkapan Kantor	200.900,00
<b>Biaya Pajak</b>	<b>5.688.784,00</b>
Biaya Pajak Kendaraan, STNK dan KIR	3.545.000,00
Biaya Pajak PPN	2.143.784,00
<b>Biaya Sewa</b>	<b>200.000,00</b>
Biaya Sewa Kendaraan	200.000,00
Biaya Sumbangan	300.000,00
<b>Biaya Jasa Konsultan</b>	<b>21.216.216,00</b>
Biaya Notaris	5.000.000,00
<b>Biaya Akuntan Publik</b>	<b>16.216.216,00</b>
Biaya Fee Audit	16.216.216,00
Biaya Umum & Adm Lainnya	4.443.060,00
Biaya Koordinasi	3.444.100,00
<b>BIAYA GAJI &amp; TUNJANGAN KARYAWAN</b>	<b>491.378.818,00</b>
<b>Biaya Gaji &amp; Tunjangan</b>	<b>441.963.588,00</b>
Biaya Gaji Komisaris	27.000.000,00
Biaya Gaji Karyawan	339.713.588,00
Biaya Gaji Direktur	75.250.000,00
Biaya Lembur Karyawan	1.000.000,00
<b>Biaya Kesejahteraan Kayawan</b>	<b>22.415.230,00</b>
Biaya Suka Duka	300.000,00
Biaya BPJS	22.115.230,00
<b>Biaya THR</b>	<b>26.000.000,00</b>

PT. KAMPUNG MAKMUR (PERSERODA)

**Laba/Rugi (Standar)**

Dari 01 Jan 2023 ke 31 Dec 2023

Description	1 Jan-31 Des 2023
Biaya THR Manager	18.500.000,00
Biaya THR Staff	7.500.000,00
<b>BIAYA OPERASIONAL</b>	<b>19.058.316,00</b>
<b>Biaya Perjalanan Dinas</b>	<b>6.414.800,00</b>
Biaya BBM Perjalanan Dinas	3.108.000,00
Biaya Parkir & Tol Perjalanan Dinas	530.500,00
Biaya Makan/Minum Perjalanan Dinas	2.706.300,00
Biaya Transport Perjalanan Dinas	70.000,00
Biaya BBM Kantor	3.500.116,00
Biaya Parkir & Tol Kantor	298.300,00
Biaya Rapat & Koordinasi Kantor Pusat	3.211.100,00
Biaya Tenaga Kerja Harian	100.000,00
Beban Pemindahan Penyewa GIM	5.534.000,00
<b>BIAYA PENYUSUTAN</b>	<b>355.688.021,74</b>
Biaya Penyusutan Bangunan Kantor	18.673.970,00
Biaya Penyusutan Bangunan SRG Tomo	88.005.150,00
Beban Penyusutan Bangunan Sekarwangi	61.819.887,00
Beban Penyusutan Bangunan GIM	130.265.850,00
<b>Biaya Penyusutan Peralatan/Mesin</b>	<b>1.916.666,67</b>
Biaya Penyusutan Peralatan/Mesin SRG Tomo	1.916.666,67
<b>Biaya Penyusutan Peralatan Unit Usaha</b>	<b>55.006.498,08</b>
Biaya Penyusutan Peralatan GIM	14.177.166,67
Biaya Penyusutan Peralatan Burnong	1.446.000,00
Biaya Penyusutan Peralatan/Perlengkapan Kantor Pusat	39.383.331,41
<b>BIAYA PERBAIKAN &amp; PEMELIHARAAN</b>	<b>4.046.500,00</b>
<b>Biaya Perbaikan</b>	<b>4.046.500,00</b>
Biaya Perbaikan Kantor	76.500,00
Biaya Perbaikan Kendaraan	3.970.000,00
<b>Jumlah Beban Operasi</b>	<b>1.267.576.041,74</b>
<b>PENDAPATAN OPERASI</b>	<b>-853.723.783,74</b>
<b>Pendapatan dan Beban Lain</b>	
<b>Pendapatan lain</b>	
<b>PENDAPATAN DILUAR USAHA</b>	<b>4.203.088,00</b>
Pendapatan Jasa Giro	1.078.088,00
<b>Pendapatan Lain-Lain</b>	<b>3.125.000,00</b>
Pendapatan Lain-Lain	3.125.000,00
<b>Jumlah Pendapatan lain</b>	<b>4.203.088,00</b>
<b>Beban lain-lain</b>	
<b>BIAYA DILUAR USAHA</b>	<b>9.762.725,67</b>
<b>Biaya Adm Bank</b>	<b>2.641.254,00</b>
Biaya Adm Bank	2.616.254,00
Biaya Administrasi Kartu	25.000,00
Pajak Jasa Giro	1.552,00
Gain/Loss Disposal F.A	785.416,67
Beban Lain-Lain	6.334.503,00
<b>Jumlah Beban lain-lain</b>	<b>9.762.725,67</b>
<b>Jumlah Pendapatan dan Beban Lain</b>	<b>-5.559.637,67</b>
<b>LABA(RUGI) BERSIH (Before Tax)</b>	<b>-859.283.421,41</b>
<b>LABA(RUGI) BERSIH (After Tax)</b>	<b>-859.283.421,41</b>

**PT. KAMPUNG MAKMUR (PERSERODA)**  
**Rincian Laporan Arus Kas (Metode Tak Langsung)**

**Period Januari 2023 to Desember 2023**

No. No. Akun	Nama No. Akun	Saldo
<b>Aktivitas Operasi</b>		
Laba Bersih	(Dari Laporan Laba & Rugi)	-859.283.421,41
<b>Tambah</b>		
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		
1700.002.001	Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor	37.268.748,08
1700.002.002	Akumulasi Penyusutan Peralatan GIM	14.177.166,67
1700.002.003	Akumulasi Penyusutan Peralatan SRG	1.916.666,67
1700.002.004	Akumulasi Penyusutan Peralatan Burnong	1.446.000,00
1700.001.001.1	Akumulasi Penyusutan Bangunan Kantor Pusat	18.673.970,00
1700.001.001.2	Akumulasi Penyusutan Bangunan SRG Tomo	88.005.150,00
1700.001.001.3	Akumulasi Penyusutan Bangunan Sekarwangi	61.819.887,00
1700.001.001.4	Akumulasi Penyusutan Bangunan GIM	130.265.850,00
<b>Total dari Akumulasi Penyusutan</b>		<b>353.573.438,41</b>
<b>Selain Penyusutan</b>		
2000.001	Hutang Usaha IDR	120.000.000,00
2000.002.002	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka GIM	2.060.000,00
1100.002	Piutang Karyawan	9.962.608,00
1100.001.007.001	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	43.508.100,00
2100.001	PPn Keluaran	111.410,00
1200.001.001	Persediaan Barang Dagang	980.000,00
2200.002.001	Hutang Gaji Komisaris	2.000.000,00
2200.002.002	Hutang Gaji Direktur	11.750.000,00
2200.002.008.01	Hutang Gaji GM Agribisnis	1.179.338,00
1300.001	Pembiayaan Project	40.550.000,00
<b>Total dari Selain Penyusutan</b>		<b>232.101.456,00</b>
<b>Total dari Tambah</b>		<b>585.674.894,41</b>
<b>Kurang</b>		
<b>Selain Penyusutan</b>		
1100.001.001.1	Piutang Usaha IDR	-56.781.396,00
2200.007.005	Hutang Pihak Ke 3	-53.000.000,00
<b>Total dari Selain Penyusutan</b>		<b>-109.781.396,00</b>
<b>Total dari Kurang</b>		<b>-109.781.396,00</b>
<b>Total dari Aktivitas Operasi</b>		<b>-383.389.923,00</b>
<b>Investasi</b>		
<b>Tambah</b>		
<b>Investasi</b>		
1600.004.001	Peralatan Kantor Pusat	2.362.500,00
<b>Total dari Investasi</b>		<b>2.362.500,00</b>
<b>Total dari Tambah</b>		<b>2.362.500,00</b>
<b>Kurang</b>		
<b>Investasi</b>		
1600.005	Perlengkapan Kantor	-320.000,00
1990.002	Biaya Pelatihan & Training Software	-3.600.000,00
<b>Total dari Investasi</b>		<b>-3.920.000,00</b>
<b>Total dari Kurang</b>		<b>-3.920.000,00</b>
<b>Total dari Investasi</b>		<b>-1.557.500,00</b>
<b>Pendanaan</b>		
<b>Tambah</b>		
<b>Pendanaan</b>		
3000.012	Investasi Kujang Sapasang(The Lodge)	95.257.989,00
3000.013	Investasi TSC (The Lodge)	60.000.000,00
3000.004	Dana CSR	2.696.040,00
<b>Total dari Pendanaan</b>		<b>157.954.029,00</b>
<b>Total dari Tambah</b>		<b>157.954.029,00</b>
<b>Kurang</b>		
<b>Pendanaan</b>		
3000.007	Dana Talangan	-1.825.000,00
<b>Total dari Pendanaan</b>		<b>-1.825.000,00</b>
<b>Total dari Kurang</b>		<b>-1.825.000,00</b>
<b>Total dari Pendanaan</b>		<b>156.129.029,00</b>
<b>Total dari Arus Kas Bersih yang digunakan (dipakai) di periode ini</b>		<b>-228.818.394,00</b>
<b>Total dari Kas &amp; Setara Kas di Awal period</b>		<b>291.430.850,96</b>
<b>Total dari Kas &amp; Setara Kas di Akhir period</b>		<b>62.612.456,96</b>

**PT. KAMPUNG MAKMUR (PERSERODA)**

**Perubahan Ekuitas Pemilik**

**Dari 01 Jan 2023 ke 31 Dec 2023**

<u>Keterangan</u>	<u>Saldo</u>	
Ekuitas pemilik awal periode		33.372.358.206,03
Pendapatan Bersih	-859.283.421,41	
Investasi kurun periode	160.429.029,00	
Penarikan	4.300.000,00	
Penambahan Ekuitas pemilik		-703.154.392,41
Ekuitas pemilik di akhir periode		<u>32.669.203.813,62</u>

**TAHUN ANGGARAN 2023**

# **Ikhtisar Laporan Keuangan Desa**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG**



**BKAD  
KABUPATEN SUMEDANG**



**RINGKASAN LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
<b>1.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>6.391.546.098,00</b>	<b>5.713.399.141,00</b>	<b>678.146.957,00</b>
1.1.1.	Hasil Usaha Desa	1.340.187.980,00	1.131.655.280,00	208.532.700,00
1.1.2.	Hasil Aset Desa	2.931.136.635,00	2.644.666.622,00	286.470.013,00
1.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	536.934.200,00	404.515.000,00	132.419.200,00
1.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	1.583.287.283,00	1.532.562.239,00	50.725.044,00
<b>1.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>480.444.805.900,00</b>	<b>481.523.747.600,00</b>	<b>(1.078.941.700,00)</b>
1.2.1.	Dana Desa	276.302.718.000,00	277.324.743.860,00	(1.022.025.860,00)
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	30.434.245.900,00	30.551.058.400,00	(116.812.500,00)
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	118.405.842.000,00	118.130.945.340,00	274.896.660,00
1.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	42.277.000.000,00	42.557.000.000,00	(280.000.000,00)
1.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	13.025.000.000,00	12.960.000.000,00	65.000.000,00
<b>1.3.</b>	<b>Pendapatan Lain-lain</b>	<b>1.689.162.227,00</b>	<b>2.057.116.091,00</b>	<b>(367.953.864,00)</b>
1.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ke	97.690.910,00	87.170.910,00	10.520.000,00
1.3.3.	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlok	188.600.000,00	182.600.000,00	6.000.000,00
1.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelum	867.786.644,00	1.052.284.982,00	(184.498.338,00)
1.3.6.	Bunga Bank	28.072.113,00	193.572.626,00	(165.500.513,00)
1.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	507.012.560,00	541.487.573,00	(34.475.013,00)
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>488.525.514.225,00</b>	<b>489.294.262.832,00</b>	<b>(768.748.607,00)</b>
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>			
<b>2.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>122.520.537.119,55</b>	<b>121.676.099.085,55</b>	<b>844.438.034,00</b>
2.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	15.679.216.295,00	15.629.612.081,40	49.604.213,60
2.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	86.127.634.219,00	85.269.105.626,60	858.528.592,40
2.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	7.582.370.605,55	7.591.740.377,55	(9.369.772,00)
2.1.4.	Tunjangan BPD	13.131.316.000,00	13.185.641.000,00	(54.325.000,00)
<b>2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>137.928.066.170,45</b>	<b>136.451.468.632,45</b>	<b>1.476.597.538,00</b>
2.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	26.470.651.650,45	25.993.910.206,45	476.741.444,00
2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	56.421.696.933,00	56.021.771.154,00	399.925.779,00
2.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.942.190.475,00	2.860.736.055,00	81.454.420,00
2.2.4.	Belanja Jasa Sewa	2.464.776.108,00	2.424.101.108,00	40.675.000,00
2.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	15.273.653.356,00	15.301.550.345,00	(27.896.989,00)
2.2.6.	Belanja Pemeliharaan	1.908.232.908,00	1.830.053.819,00	78.179.089,00
2.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	32.446.864.740,00	32.019.345.945,00	427.518.795,00
<b>2.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>184.532.098.810,98</b>	<b>183.524.103.077,00</b>	<b>1.007.995.733,98</b>
2.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	77.150.000,00	77.150.000,00	0,00
2.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al	12.020.840.273,00	11.819.585.097,00	201.255.176,00
2.3.3.	Belanja Modal Kendaraan	2.592.127.000,00	2.584.789.562,00	7.337.438,00
2.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	45.537.906.560,00	45.441.417.122,00	96.489.438,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5
2.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	92.645.202.021,98	91.778.467.316,00	866.734.705,98
2.3.6.	Belanja Modal Jembatan	1.252.365.242,00	1.262.476.242,00	(10.111.000,00)
2.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah	20.410.328.264,00	20.460.155.997,00	(49.827.733,00)
2.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	5.267.063.080,00	5.397.795.080,00	(130.732.000,00)
2.3.9.	Belanja Modal Lainnya	4.729.116.370,00	4.702.266.661,00	26.849.709,00
<b>2.4.</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>39.972.576.317,00</b>	<b>38.399.767.816,00</b>	<b>1.572.808.501,00</b>
2.4.1.	Belanja Tidak Terduga	39.972.576.317,00	38.399.767.816,00	1.572.808.501,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>484.953.278.417,98</b>	<b>480.051.438.611,00</b>	<b>4.901.839.806,98</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>3.572.235.807,02</b>	<b>9.242.824.221,00</b>	<b>5.670.588.413,98</b>
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>3.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>8.965.820.643,00</b>	<b>6.362.723.173,00</b>	<b>2.603.097.470,00</b>
3.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	6.271.686.835,00	6.180.757.744,00	90.929.091,00
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	234.335.981,00	0,00	234.335.981,00
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	2.451.316.500,00	180.000.000,00	2.271.316.500,00
3.1.9.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	8.481.327,00	1.965.429,00	6.515.898,00
<b>3.2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>10.152.740.355,00</b>	<b>9.501.806.938,00</b>	<b>650.933.417,00</b>
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	386.459.373,00	43.000.000,00	343.459.373,00
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa	9.727.410.143,00	9.420.636.990,00	306.773.153,00
3.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	38.870.839,00	38.169.948,00	700.891,00
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>(1.186.919.712,00)</b>	<b>3.139.083.765,00</b>	<b>1.952.164.053,00</b>
	<b>SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN</b>	<b>2.385.316.095,02</b>	<b>6.103.740.456,00</b>	<b>(3.718.424.360,98)</b>



**LAPORAN REKAPITULASI**  
**REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

PROVINSI : 32 PROVINSI JAWA BARAT

KABUPATEN/KOTA : 32.11 PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

REALISASI S/D 31/12/2023

KODE	NAMA DESA	KODE POSTING	PENDAPATAN			BELANJA DESA			PEMBIAYAAN NETTO			SILPA TAHUN BERJALAN		
			ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>01</b>	<b>KECAMATAN WADO</b>		20.021.385.992	19.950.701.005	99,6	19.458.972.134	19.364.147.070	99,5	(562.413.858)	(579.914.304)	103,1	0	6.639.631	0,0
01.2001.	PEMERINTAH DESA CIMUNGKAL	4	2.272.241.930	2.267.632.514	99,8	2.272.241.930	2.267.704.060	99,8	0	0	0,0	0	(71.546)	0,0
01.2002.	PEMERINTAH DESA GANJARESİK	4	2.456.032.095	2.450.617.179	99,8	2.456.032.095	2.450.335.084	99,8	0	0	0,0	0	282.095	0,0
01.2003.	PEMERINTAH DESA CILENGKRANG	4	2.289.944.000	2.285.840.880	99,8	2.289.944.000	2.287.996.340	99,9	0	0	0,0	0	(2.155.460)	0,0
01.2004.	PEMERINTAH DESA CIKAREO SELATAN	4	2.267.135.908	2.261.766.775	99,8	2.167.135.908	2.161.808.614	99,8	(100.000.000)	(100.000.000)	100,0	0	(41.839)	0,0
01.2005.	PEMERINTAH DESA CIKAREO UTARA	4	1.770.442.095	1.765.959.969	99,7	1.630.673.541	1.626.091.689	99,7	(139.768.554)	(140.245.000)	100,3	0	(376.720)	0,0
01.2006.	PEMERINTAH DESA WADO	4	2.038.110.964	2.004.040.282	98,3	1.770.764.964	1.736.183.112	98,0	(267.346.000)	(267.346.000)	100,0	0	511.170	0,0
01.2007.	PEMERINTAH DESA MULYAJAYA	4	1.666.196.000	1.662.236.386	99,8	1.646.670.846	1.641.105.526	99,7	(19.525.154)	(19.525.154)	100,0	0	1.605.706	0,0
01.2009.	PEMERINTAH DESA SUKAJADI	4	1.991.790.000	1.986.168.479	99,7	1.961.010.000	1.955.317.396	99,7	(30.780.000)	(30.780.000)	100,0	0	71.083	0,0
01.2010.	PEMERINTAH DESA CISURAT	4	1.655.556.000	1.651.390.644	99,7	1.633.537.850	1.629.372.494	99,7	(22.018.150)	(22.018.150)	100,0	0	0	0,0
01.2011.	PEMERINTAH DESA SUKAPURA	4	1.613.937.000	1.615.047.897	100,1	1.630.961.000	1.608.232.755	98,6	17.024.000	0	0,0	0	6.815.142	0,0
<b>02</b>	<b>KECAMATAN JATINUNGGAL</b>		18.206.986.400	18.189.822.723	99,9	17.949.974.089	17.816.816.597	99,3	(257.012.311)	(257.012.311)	100,0	0	115.993.815	0,0
02.2001.	PEMERINTAH DESA SIRNASARI	4	2.045.217.000	2.045.711.659	100,0	2.055.276.456	2.054.310.988	100,0	10.059.456	10.059.456	100,0	0	1.460.127	0,0
02.2002.	PEMERINTAH DESA TARIKOLOT	5	1.994.205.000	1.994.904.305	100,0	1.992.273.616	1.979.743.096	99,4	(1.931.384)	(1.931.384)	100,0	0	13.229.825	0,0
02.2003.	PEMERINTAH DESA PAWENANG	4	1.953.540.000	1.937.778.146	99,2	1.942.900.294	1.903.762.648	98,0	(10.639.706)	(10.639.706)	100,0	0	23.375.792	0,0
02.2004.	PEMERINTAH DESA SARIMEKAR	4	2.047.850.000	2.048.676.820	100,0	2.067.131.380	2.061.219.000	99,7	19.281.380	19.281.380	100,0	0	6.739.200	0,0
02.2005.	PEMERINTAH DESA BANJARSARI	4	2.067.330.000	2.067.699.733	100,0	1.883.414.251	1.872.514.816	99,4	(183.915.749)	(183.915.749)	100,0	0	11.269.168	0,0
02.2006.	PEMERINTAH DESA KIRISIK	4	1.988.362.400	1.983.248.923	99,7	2.005.653.308	1.998.804.000	99,7	17.290.908	17.290.908	100,0	0	1.735.831	0,0
02.2007.	PEMERINTAH DESA SUKAMANAH	4	2.124.583.000	2.125.205.156	100,0	2.101.525.203	2.091.619.984	99,5	(23.057.797)	(23.057.797)	100,0	0	10.527.375	0,0
02.2008.	PEMERINTAH DESA CIPEUNDEUY	5	1.939.323.000	1.939.594.893	100,0	1.914.349.215	1.902.651.104	99,4	(24.973.785)	(24.973.785)	100,0	0	11.970.004	0,0
02.2009.	PEMERINTAH DESA CIMANINTIN	4	2.046.576.000	2.047.003.088	100,0	1.987.450.366	1.952.190.961	98,2	(59.125.634)	(59.125.634)	100,0	0	35.686.493	0,0
<b>03</b>	<b>KECAMATAN DARMARAJA</b>		20.901.699.015	20.866.507.981	99,8	20.690.799.874	20.576.303.295	99,4	(210.899.141)	(190.013.727)	90,1	0	100.190.959	0,0
03.2001.	PEMERINTAH DESA DARMARAJA	4	1.743.509.000	1.739.564.808	99,8	1.744.410.950	1.739.060.630	99,7	901.950	901.950	100,0	0	1.406.128	0,0
03.2002.	PEMERINTAH DESA DARMAJAYA	4	1.691.168.000	1.687.507.911	99,8	1.683.455.480	1.661.826.660	98,7	(7.712.520)	2.287.480	29,7	0	27.968.731	0,0
03.2003.	PEMERINTAH DESA SUKAMENAK	4	1.691.218.336	1.697.989.629	100,4	1.681.999.948	1.672.988.804	99,5	(9.218.388)	781.612	(8,5)	0	25.782.437	0,0

PROVINSI : 32 PROVINSI JAWA BARAT

KABUPATEN/KOTA : 32.11 PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

REALISASI S/D 31/12/2023

KODE	NAMA DESA	KODE POSTING	PENDAPATAN			BELANJA DESA			PEMBIAYAAN NETTO			SILPA TAHUN BERJALAN		
			ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
03.2005.	PEMERINTAH DESA SUKARATU	4	1.721.842.000	1.717.877.793	99,8	1.724.287.961	1.699.403.680	98,6	2.445.961	2.445.961	100,0	0	20.920.074	0,0
03.2006.	PEMERINTAH DESA CIKEUSI	4	1.425.220.000	1.421.649.144	99,7	1.368.374.834	1.364.354.787	99,7	(56.845.166)	(56.845.166)	100,0	0	449.191	0,0
03.2007.	PEMERINTAH DESA CIPEUTEUY	4	1.903.083.000	1.899.926.734	99,8	1.874.198.750	1.870.013.719	99,8	(28.884.250)	(28.884.250)	100,0	0	1.028.765	0,0
03.2009.	PEMERINTAH DESA CIEUNTEUNG	4	1.912.090.000	1.907.714.268	99,8	1.893.222.898	1.886.171.130	99,6	(18.867.102)	(18.867.102)	100,0	0	2.676.036	0,0
03.2010.	PEMERINTAH DESA KARANGPAKUAN	4	2.207.019.000	2.203.353.919	99,8	2.209.161.627	2.201.892.407	99,7	2.142.627	2.142.627	100,0	0	3.604.139	0,0
03.2011.	PEMERINTAH DESA PAKUALAM	4	1.391.330.500	1.387.464.166	99,7	1.357.051.096	1.344.172.234	99,1	(34.279.404)	(33.393.990)	97,4	0	9.897.942	0,0
03.2013.	PEMERINTAH DESA NEGLASARI	4	1.722.490.000	1.718.734.180	99,8	1.723.959.837	1.716.515.348	99,6	1.469.837	1.469.837	100,0	0	3.688.669	0,0
03.2015.	PEMERINTAH DESA TARUNAJAYA	4	1.815.046.750	1.811.477.779	99,8	1.802.017.297	1.795.754.160	99,7	(13.029.453)	(13.029.453)	100,0	0	2.694.166	0,0
03.2016.	PEMERINTAH DESA RANGGON	4	1.677.682.429	1.673.247.650	99,7	1.628.659.196	1.624.149.736	99,7	(49.023.233)	(49.023.233)	100,0	0	74.681	0,0
<b>04</b>	<b>KECAMATAN CIBUGEL</b>		10.274.248.000	10.268.950.537	99,9	10.075.613.102	10.027.469.257	99,5	(198.089.389)	(238.995.722)	120,7	545.509	2.485.558	455,6
04.2001.	PEMERINTAH DESA JAYAMEKAR	4	1.850.379.000	1.850.574.093	100,0	1.817.232.340	1.807.516.541	99,5	(33.146.660)	(73.706.500)	222,4	0	(30.648.948)	0,0
04.2002.	PEMERINTAH DESA BUANAMEKAR	4	1.762.856.000	1.761.695.753	99,9	1.742.976.000	1.731.779.232	99,4	(19.880.000)	(19.880.000)	100,0	0	10.036.521	0,0
04.2003.	PEMERINTAH DESA CIBUGEL	4	1.848.915.000	1.848.969.792	100,0	1.802.960.269	1.802.960.269	100,0	(45.954.731)	(45.954.731)	100,0	0	54.792	0,0
04.2004.	PEMERINTAH DESA SUKARAJA	4	1.653.513.000	1.648.931.148	99,7	1.653.513.000	1.649.042.194	99,7	545.509	545.509	100,0	545.509	434.463	79,6
04.2006.	PEMERINTAH DESA TAMANSARI	4	1.698.036.000	1.698.036.000	100,0	1.598.036.000	1.588.039.232	99,4	(100.000.000)	(100.000.000)	100,0	0	9.996.768	0,0
04.2007.	PEMERINTAH DESA JAYAMANDIRI	4	1.460.549.000	1.460.743.751	100,0	1.460.895.493	1.448.131.789	99,1	346.493	0	0,0	0	12.611.962	0,0
<b>05</b>	<b>KECAMATAN CISITU</b>		17.396.204.000	17.221.583.638	99,0	17.307.831.915	17.099.415.056	98,8	(87.412.266)	(87.772.432)	100,4	959.819	34.396.150	583,6
05.2001.	PEMERINTAH DESA CISITU	4	1.665.907.000	1.661.743.272	99,8	1.648.970.909	1.633.189.277	99,0	(16.936.091)	(16.936.091)	100,0	0	11.617.904	0,0
05.2002.	PEMERINTAH DESA SITUMEKAR	4	1.746.529.000	1.742.135.483	99,7	1.797.110.960	1.792.073.648	99,7	50.581.960	50.581.960	100,0	0	643.795	0,0
05.2003.	PEMERINTAH DESA PAJAGAN	4	1.599.927.000	1.570.557.712	98,2	1.604.865.150	1.575.418.298	98,2	4.938.150	4.938.150	100,0	0	77.564	0,0
05.2004.	PEMERINTAH DESA CIGINTUNG	4	1.954.840.000	1.950.745.675	99,8	1.966.164.093	1.960.874.326	99,7	11.324.093	11.324.093	100,0	0	1.195.442	0,0
05.2005.	PEMERINTAH DESA SUNDAMEKAR	4	1.558.907.000	1.505.217.416	96,6	1.564.993.037	1.509.784.032	96,5	6.086.037	6.086.037	100,0	0	1.519.421	0,0
05.2006.	PEMERINTAH DESA LINGGAJAYA	4	1.993.090.000	1.989.007.336	99,8	1.998.347.889	1.993.082.856	99,7	5.257.889	5.257.889	100,0	0	1.182.369	0,0
05.2007.	PEMERINTAH DESA RANJENG	4	1.626.623.000	1.564.264.667	96,2	1.540.082.570	1.468.302.207	95,3	(86.540.430)	(86.540.430)	100,0	0	9.422.030	0,0
05.2008.	PEMERINTAH DESA CILOPANG	4	1.762.541.000	1.757.906.581	99,7	1.712.541.000	1.707.861.483	99,7	(49.040.181)	(50.000.000)	102,0	959.819	45.098	4,7
05.2009.	PEMERINTAH DESA CIMARGA	4	1.616.020.000	1.612.151.797	99,8	1.573.421.220	1.561.817.583	99,3	(42.598.780)	(41.999.127)	98,6	0	8.335.087	0,0
05.2010.	PEMERINTAH DESA CINANGSI	4	1.871.820.000	1.867.853.699	99,8	1.901.335.087	1.897.011.346	99,8	29.515.087	29.515.087	100,0	0	357.440	0,0
<b>06</b>	<b>KECAMATAN SITURAJA</b>		25.353.797.240	25.292.730.087	99,8	24.618.706.432	24.389.148.562	99,1	(731.501.076)	(724.649.978)	99,1	3.589.732	178.931.547	984,5
06.2001.	PEMERINTAH DESA SITURAJA UTARA	4	1.736.861.000	1.733.211.291	99,8	1.696.861.000	1.678.722.476	98,9	(40.000.000)	(40.000.000)	100,0	0	14.488.815	0,0
06.2002.	PEMERINTAH DESA SITURAJA	4	1.829.807.000	1.825.813.595	99,8	1.854.046.000	1.844.766.062	99,5	24.239.000	24.444.158	100,8	0	5.491.691	0,0
06.2003.	PEMERINTAH DESA MEKARMULYA	4	1.586.721.000	1.583.605.338	99,8	1.458.824.000	1.451.921.469	99,5	(127.897.000)	(125.767.896)	98,3	0	5.915.973	0,0
06.2004.	PEMERINTAH DESA CIKADU	4	1.582.400.000	1.579.171.747	99,8	1.492.400.000	1.488.811.147	99,8	(90.000.000)	(89.020.395)	98,9	0	1.340.205	0,0

PROVINSI : 32 PROVINSI JAWA BARAT

KABUPATEN/KOTA : 32.11 PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

REALISASI S/D 31/12/2023

KODE	NAMA DESA	KODE POSTING	PENDAPATAN			BELANJA DESA			PEMBIAYAAN NETTO			SILPA TAHUN BERJALAN		
			ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
06.2005.	PEMERINTAH DESA BANGBAYANG	4	1.561.159.000	1.558.165.736	99,8	1.562.418.300	1.516.788.503	97,1	3.268.795	3.268.795	100,0	2.009.495	44.646.028	221,8
06.2006.	PEMERINTAH DESA KADUWULUNG	4	1.572.666.100	1.568.404.889	99,7	1.557.847.700	1.550.868.196	99,6	(14.818.400)	(14.096.117)	95,1	0	3.440.576	0,0
06.2007.	PEMERINTAH DESA KARANGHEULEUT	4	1.850.689.000	1.846.810.599	99,8	1.820.689.000	1.816.493.913	99,8	(30.000.000)	(30.000.000)	100,0	0	316.686	0,0
06.2008.	PEMERINTAH DESA CIJELER	4	1.735.479.000	1.731.627.179	99,8	1.648.690.700	1.642.956.092	99,7	(86.788.300)	(84.926.487)	97,9	0	3.744.600	0,0
06.2009.	PEMERINTAH DESA AMBIT	4	1.459.063.380	1.455.349.211	99,7	1.428.668.952	1.408.744.180	98,6	(30.394.428)	(29.445.048)	96,9	0	17.159.983	0,0
06.2010.	PEMERINTAH DESA JATIMEKAR	4	1.923.560.560	1.919.538.433	99,8	1.823.560.560	1.818.042.545	99,7	(100.000.000)	(100.000.000)	100,0	0	1.495.888	0,0
06.2011.	PEMERINTAH DESA CIJATI	4	1.785.601.000	1.781.602.410	99,8	1.785.601.000	1.778.061.739	99,6	0	0	0,0	0	3.540.671	0,0
06.2012.	PEMERINTAH DESA PAMULIHAN	4	1.669.159.000	1.665.187.196	99,8	1.590.867.677	1.583.928.680	99,6	(78.291.323)	(78.287.568)	100,0	0	2.970.948	0,0
06.2013.	PEMERINTAH DESA MALAKA	4	1.638.402.000	1.629.533.483	99,5	1.467.496.000	1.436.809.680	97,9	(170.906.000)	(170.906.000)	100,0	0	21.817.803	0,0
06.2014.	PEMERINTAH DESA SUKATALI	4	1.928.093.200	1.924.375.954	99,8	1.970.223.034	1.917.263.480	97,3	42.129.834	42.129.834	100,0	0	49.242.308	0,0
06.2015.	PEMERINTAH DESA CICARIMANAH	4	1.494.136.000	1.490.333.026	99,7	1.460.512.509	1.454.970.400	99,6	(32.043.254)	(32.043.254)	100,0	1.580.237	3.319.372	210,1
<b>07</b>	<b>KECAMATAN CONGGEANG</b>		<b>19.401.297.000</b>	<b>19.322.155.754</b>	<b>99,6</b>	<b>19.083.014.611</b>	<b>18.992.636.444</b>	<b>99,5</b>	<b>(300.539.314)</b>	<b>(231.292.670)</b>	<b>77,0</b>	<b>17.743.075</b>	<b>98.226.640</b>	<b>553,6</b>
07.2001.	PEMERINTAH DESA CONGGEANG KULON	4	1.482.302.000	1.482.511.265	100,0	1.482.302.000	1.482.437.000	100,0	7.373.075	7.373.075	100,0	7.373.075	7.447.340	101,0
07.2002.	PEMERINTAH DESA CONGGEANG WETAN	4	1.610.120.000	1.606.199.945	99,8	1.610.980.391	1.606.815.071	99,7	860.391	860.391	100,0	0	245.265	0,0
07.2003.	PEMERINTAH DESA CIPAMEKAR	4	1.724.756.000	1.720.626.152	99,8	1.624.756.000	1.620.482.853	99,7	(100.000.000)	(95.895.516)	95,9	0	4.247.783	0,0
07.2004.	PEMERINTAH DESA CIBEUREUYEUH	4	1.667.198.000	1.663.392.014	99,8	1.667.198.000	1.663.167.680	99,8	0	5.474.868	0,0	0	5.699.202	0,0
07.2005.	PEMERINTAH DESA JAMBU	4	1.463.846.000	1.460.646.119	99,8	1.468.278.620	1.464.248.300	99,7	4.432.620	6.926.804	156,3	0	3.324.623	0,0
07.2006.	PEMERINTAH DESA BABAKAN ASEM	4	1.871.223.000	1.867.055.959	99,8	1.856.223.000	1.851.692.495	99,8	(15.000.000)	20.597.457	37,3	0	35.960.921	0,0
07.2007.	PEMERINTAH DESA PADAASIH	4	1.915.496.000	1.916.605.114	100,1	1.731.628.600	1.722.599.896	99,5	(183.867.400)	(172.625.055)	93,9	0	21.380.163	0,0
07.2008.	PEMERINTAH DESA UNGKAL	4	1.444.527.000	1.437.781.598	99,5	1.434.527.000	1.427.499.180	99,5	(10.000.000)	(8.452.356)	84,5	0	1.830.062	0,0
07.2009.	PEMERINTAH DESA KARANG LAYUNG	4	1.605.615.000	1.601.336.634	99,7	1.605.615.000	1.601.228.845	99,7	0	1.798.307	0,0	0	1.906.096	0,0
07.2010.	PEMERINTAH DESA CACABAN	4	1.386.754.000	1.387.291.498	100,0	1.361.754.000	1.353.558.360	99,4	(25.000.000)	(21.259.062)	85,0	0	12.474.076	0,0
07.2011.	PEMERINTAH DESA NARIMBANG	4	1.754.129.000	1.749.828.861	99,8	1.754.129.000	1.749.682.148	99,7	0	2.068.941	0,0	0	2.215.654	0,0
07.2012.	PEMERINTAH DESA CIBUBUAN	4	1.475.331.000	1.428.880.595	96,9	1.485.623.000	1.449.224.616	97,5	20.662.000	21.839.476	105,7	10.370.000	1.495.455	14,4
<b>08</b>	<b>KECAMATAN PASEH</b>		<b>17.711.205.863</b>	<b>17.708.658.938</b>	<b>100,0</b>	<b>18.006.226.632</b>	<b>17.756.258.208</b>	<b>98,6</b>	<b>2.567.637.269</b>	<b>310.125.769</b>	<b>12,1</b>	<b>2.272.616.500</b>	<b>262.526.499</b>	<b>11,6</b>
08.2001.	PEMERINTAH DESA PASEHKIDUL	4	1.580.521.000	1.606.257.056	101,6	1.580.521.000	1.565.609.790	99,1	0	8.805.000	0,0	0	49.452.266	0,0
08.2002.	PEMERINTAH DESA PASEH KALER	4	2.288.486.000	2.285.305.753	99,9	2.301.160.059	2.266.354.735	98,5	12.674.059	17.674.059	139,5	0	36.625.077	0,0
08.2003.	PEMERINTAH DESA LEGOK KIDUL	4	1.702.653.000	1.697.511.033	99,7	1.627.734.231	1.613.729.430	99,1	(73.618.769)	(73.618.769)	100,0	1.300.000	10.162.834	781,8
08.2004.	PEMERINTAH DESA LEGOK KALER	4	1.754.673.235	1.751.457.986	99,8	1.874.423.235	1.867.410.525	99,6	2.391.066.500	119.750.000	5,0	2.271.316.500	3.797.461	0,2
08.2005.	PEMERINTAH DESA BONGKOK	4	2.196.885.000	2.194.727.738	99,9	2.396.418.783	2.311.759.981	96,5	199.533.783	199.533.783	100,0	0	82.501.540	0,0
08.2006.	PEMERINTAH DESA PADANAN	4	1.653.100.544	1.653.189.622	100,0	1.661.207.043	1.651.468.137	99,4	8.106.499	8.106.499	100,0	0	9.827.984	0,0
08.2007.	PEMERINTAH DESA PASIRREUNGIT	4	1.661.397.000	1.658.314.551	99,8	1.670.425.290	1.644.940.755	98,5	9.028.290	9.028.290	100,0	0	22.402.086	0,0
08.2008.	PEMERINTAH DESA CIJAMBE	4	1.816.912.000	1.813.596.836	99,8	1.824.218.391	1.810.669.871	99,3	7.306.391	7.306.391	100,0	0	10.233.356	0,0

PROVINSI : 32 PROVINSI JAWA BARAT

KABUPATEN/KOTA : 32.11 PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

REALISASI S/D 31/12/2023

KODE	NAMA DESA	KODE POSTING	PENDAPATAN			BELANJA DESA			PEMBIAYAAN NETTO			SILPA TAHUN BERJALAN		
			ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
08.2009.	PEMERINTAH DESA HAURKUNING	4	1.578.203.000	1.574.037.680	99,7	1.578.271.487	1.573.793.355	99,7	68.487	68.487	100,0	0	312.812	0,0
08.2010.	PEMERINTAH DESA CITEPOK	4	1.478.375.084	1.474.260.683	99,7	1.491.847.113	1.450.521.629	97,2	13.472.029	13.472.029	100,0	0	37.211.083	0,0
<b>09</b>	<b>KECAMATAN SURIAN</b>		14.189.558.624	13.988.315.912	98,6	14.219.674.805	13.855.461.514	97,4	32.262.541	42.983.918	133,2	2.146.360	175.838.316	192,4
09.2001.	PEMERINTAH DESA WANASARI	4	1.322.709.807	1.311.405.073	99,1	1.365.805.807	1.350.502.021	98,9	43.618.807	43.618.807	100,0	522.807	4.521.859	864,9
09.2002.	PEMERINTAH DESA WANAJAYA	4	2.464.717.000	2.455.758.235	99,6	2.476.545.381	2.406.016.544	97,2	12.685.612	12.685.612	100,0	857.231	62.427.303	282,4
09.2003.	PEMERINTAH DESA PAMEKARSARI	3	1.447.812.587	1.416.387.324	97,8	1.447.812.587	1.415.149.680	97,7	228.312	228.312	100,0	228.312	1.465.956	642,1
09.2004.	PEMERINTAH DESA TANJUNG	5	1.548.494.000	1.514.522.649	97,8	1.548.494.000	1.430.428.680	92,4	0	0	0,0	0	84.093.969	0,0
09.2005.	PEMERINTAH DESA SURIAN	5	1.601.172.000	1.595.029.953	99,6	1.685.581.600	1.648.218.813	97,8	84.409.600	94.157.273	111,5	0	40.968.413	0,0
09.2006.	PEMERINTAH DESA SURIAMUKTI	4	1.342.226.164	1.319.914.248	98,3	1.350.441.164	1.326.791.461	98,2	8.215.000	8.215.000	100,0	0	1.337.787	0,0
09.2007.	PEMERINTAH DESA SURIAMEDAL	5	1.463.780.066	1.394.553.881	95,3	1.463.780.066	1.424.457.446	97,3	0	0	0,0	0	(29.903.565)	0,0
09.2008.	PEMERINTAH DESA RANGGASARI	4	1.602.744.000	1.590.438.368	99,2	1.645.177.500	1.623.792.366	98,7	42.433.500	42.433.500	100,0	0	9.079.502	0,0
09.2009.	PEMERINTAH DESA NANJUNG WANGI	5	1.395.903.000	1.390.306.181	99,6	1.236.036.700	1.230.104.503	99,5	(159.328.290)	(158.354.586)	99,4	538.010	1.847.092	343,3
<b>10</b>	<b>KECAMATAN BUAHDUA</b>		21.413.577.564	21.365.448.191	99,8	21.355.233.307	21.050.682.810	98,6	(55.601.232)	(69.332.479)	124,7	2.743.025	245.432.902	947,5
10.2001.	PEMERINTAH DESA BUAHDUA	4	1.870.682.472	1.867.503.869	99,8	1.763.356.168	1.677.892.405	95,2	(107.326.304)	(106.626.259)	99,3	0	82.985.205	0,0
10.2002.	PEMERINTAH DESA HARIANG	4	1.511.680.785	1.511.616.488	100,0	1.511.680.785	1.510.541.241	99,9	0	0	0,0	0	1.075.247	0,0
10.2003.	PEMERINTAH DESA KARANGBUNGUR	4	1.475.785.000	1.471.725.199	99,7	1.475.785.000	1.470.802.732	99,7	2.433.449	2.433.449	100,0	2.433.449	3.355.916	137,9
10.2004.	PEMERINTAH DESA MEKARMUKTI	4	1.416.324.000	1.416.450.634	100,0	1.416.324.000	1.406.062.234	99,3	0	0	0,0	0	10.388.400	0,0
10.2005.	PEMERINTAH DESA CITALEUS	4	1.450.079.000	1.449.527.336	100,0	1.459.140.274	1.426.207.250	97,7	9.061.274	0	0,0	0	23.320.086	0,0
10.2006.	PEMERINTAH DESA NAGRAK	4	1.368.946.500	1.369.028.100	100,0	1.371.911.810	1.306.980.000	95,3	2.965.310	2.965.310	100,0	0	65.013.410	0,0
10.2007.	PEMERINTAH DESA CIBITUNG	4	1.674.400.000	1.667.401.124	99,6	1.676.696.200	1.663.550.772	99,2	2.296.200	2.296.200	100,0	0	6.146.552	0,0
10.2008.	PEMERINTAH DESA SEKARWANGI	4	1.442.773.000	1.443.963.854	100,1	1.455.696.642	1.443.133.240	99,1	12.923.642	7.553.642	58,4	0	8.384.256	0,0
10.2009.	PEMERINTAH DESA GENDEREH	4	1.586.023.907	1.573.294.995	99,2	1.544.083.000	1.508.075.574	97,7	(41.940.907)	(41.940.925)	100,0	0	23.278.496	0,0
10.2010.	PEMERINTAH DESA PANYINDANGAN	4	1.446.196.000	1.446.196.000	100,0	1.446.196.000	1.443.413.730	99,8	0	0	0,0	0	2.782.270	0,0
10.2011.	PEMERINTAH DESA CILANGKAP	4	1.517.657.000	1.518.100.762	100,0	1.520.057.056	1.516.274.606	99,8	2.400.056	2.400.056	100,0	0	4.226.212	0,0
10.2012.	PEMERINTAH DESA BOJONGLOA	4	1.509.441.900	1.505.208.684	99,7	1.543.322.911	1.538.441.017	99,7	33.881.011	33.881.011	100,0	0	648.678	0,0
10.2013.	PEMERINTAH DESA CIKURUBUK	4	1.612.687.000	1.589.827.942	98,6	1.579.691.250	1.556.460.277	98,5	(32.995.613)	(32.995.613)	100,0	137	372.052	570,8
10.2014.	PEMERINTAH DESA CIAWITALI	4	1.530.901.000	1.535.603.204	100,3	1.591.292.211	1.582.847.732	99,5	60.700.650	60.700.650	100,0	309.439	13.456.122	348,6
<b>11</b>	<b>KECAMATAN TANJUNGSARI</b>		26.359.900.900	26.349.823.367	100,0	26.091.897.854	25.876.498.181	99,2	(268.003.046)	(250.582.446)	93,5	0	222.742.740	0,0
11.2001.	PEMERINTAH DESA GUDANG	4	2.060.109.300	2.055.176.730	99,8	1.976.771.200	1.941.684.781	98,2	(83.338.100)	(83.338.100)	100,0	0	30.153.849	0,0
11.2002.	PEMERINTAH DESA TANJUNGSARI	4	2.054.167.000	2.055.657.967	100,1	2.056.394.300	2.051.947.448	99,8	2.227.300	2.227.300	100,0	0	5.937.819	0,0
11.2003.	PEMERINTAH DESA JATISARI	4	2.285.882.000	2.287.010.988	100,0	2.239.032.000	2.228.228.561	99,5	(46.850.000)	(46.850.000)	100,0	0	11.932.427	0,0
11.2004.	PEMERINTAH DESA MARGALUYU	4	1.771.855.000	1.775.051.201	100,2	1.886.234.989	1.800.794.086	95,5	114.379.989	114.379.989	100,0	0	88.637.104	0,0

PROVINSI : 32 PROVINSI JAWA BARAT

KABUPATEN/KOTA : 32.11 PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

REALISASI S/D 31/12/2023

KODE	NAMA DESA	KODE POSTING	PENDAPATAN			BELANJA DESA			PEMBIAYAAN NETTO			SILPA TAHUN BERJALAN		
			ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
11.2005.	PEMERINTAH DESA KUTAMANDIRI	4	2.650.953.000	2.653.557.775	100,1	2.550.953.000	2.541.160.654	99,6	(100.000.000)	(100.000.000)	100,0	0	12.397.121	0,0
11.2006.	PEMERINTAH DESA MARGAJAYA	4	2.665.078.000	2.665.908.932	100,0	2.515.078.000	2.499.842.041	99,4	(150.000.000)	(150.000.000)	100,0	0	16.066.891	0,0
11.2007.	PEMERINTAH DESA RAHARJA	4	2.479.398.000	2.479.793.905	100,0	2.480.711.453	2.472.029.859	99,7	1.313.453	1.313.453	100,0	0	9.077.499	0,0
11.2008.	PEMERINTAH DESA CIJAMBU	4	1.708.528.000	1.694.150.972	99,2	1.716.006.363	1.710.194.212	99,7	7.478.363	19.978.363	267,1	0	3.935.123	0,0
11.2009.	PEMERINTAH DESA PASIGARAN	4	1.677.393.000	1.678.453.229	100,1	1.682.804.980	1.673.776.276	99,5	5.411.980	5.411.980	100,0	0	10.088.933	0,0
11.2010.	PEMERINTAH DESA GUNUNGMANIK	4	2.164.375.600	2.160.451.034	99,8	2.164.375.600	2.153.819.612	99,5	0	4.920.600	0,0	0	11.552.022	0,0
11.2011.	PEMERINTAH DESA KADAKAJAYA	4	2.165.349.000	2.165.696.450	100,0	2.140.349.000	2.130.695.498	99,5	(25.000.000)	(25.000.000)	100,0	0	10.000.952	0,0
11.2012.	PEMERINTAH DESA CINANJUNG	4	2.676.813.000	2.678.914.184	100,1	2.683.186.969	2.672.325.153	99,6	6.373.969	6.373.969	100,0	0	12.963.000	0,0
<b>12</b>	<b>KECAMATAN SUKASARI</b>		<b>13.765.414.873</b>	<b>13.745.246.952</b>	<b>99,9</b>	<b>13.881.750.516</b>	<b>13.347.563.886</b>	<b>96,2</b>	<b>117.415.643</b>	<b>161.775.643</b>	<b>137,8</b>	<b>1.080.000</b>	<b>559.458.709</b>	<b>801,7</b>
12.2001.	PEMERINTAH DESA SUKASARI	4	2.261.245.000	2.260.054.067	99,9	2.174.422.000	2.155.086.177	99,1	(86.823.000)	(86.823.000)	100,0	0	18.144.890	0,0
12.2002.	PEMERINTAH DESA GENTENG	4	1.882.287.000	1.883.186.550	100,0	1.883.326.517	1.827.948.114	97,1	1.039.517	1.039.517	100,0	0	56.277.953	0,0
12.2003.	PEMERINTAH DESA BANYURESMI	4	1.599.432.000	1.597.867.797	99,9	1.562.232.046	1.525.718.874	97,7	(36.119.954)	(36.119.954)	100,0	1.080.000	36.028.969	336,0
12.2004.	PEMERINTAH DESA NANGGERANG	4	1.880.643.000	1.880.643.000	100,0	2.064.171.467	2.023.241.467	98,0	183.528.467	183.528.467	100,0	0	40.930.000	0,0
12.2005.	PEMERINTAH DESA MEKARSARI	3	2.416.463.000	2.413.233.943	99,9	2.444.695.232	2.124.477.124	86,9	28.232.232	28.232.232	100,0	0	316.989.051	0,0
12.2006.	PEMERINTAH DESA SINDANGSARI	4	2.016.590.000	2.011.964.210	99,8	2.022.230.000	1.999.520.730	98,9	5.640.000	0	0,0	0	12.443.480	0,0
12.2007.	PEMERINTAH DESA SUKARAPIH	4	1.708.754.873	1.698.297.385	99,4	1.730.673.254	1.691.571.400	97,7	21.918.381	71.918.381	328,1	0	78.644.366	0,0
<b>13</b>	<b>KECAMATAN PAMULIHAN</b>		<b>23.708.812.000</b>	<b>23.669.118.305</b>	<b>99,8</b>	<b>23.372.005.159</b>	<b>23.234.319.892</b>	<b>99,4</b>	<b>(336.806.841)</b>	<b>(334.650.858)</b>	<b>99,4</b>	<b>0</b>	<b>100.147.555</b>	<b>0,0</b>
13.2001.	PEMERINTAH DESA CIGENDEL	4	2.507.574.000	2.503.389.298	99,8	2.511.156.406	2.499.913.522	99,6	3.582.406	3.582.406	100,0	0	7.058.182	0,0
13.2002.	PEMERINTAH DESA CIJERUK	4	2.222.268.000	2.218.322.823	99,8	2.223.643.662	2.207.152.877	99,3	1.375.662	1.375.662	100,0	0	12.545.608	0,0
13.2003.	PEMERINTAH DESA PAMULIHAN	4	2.542.795.000	2.538.999.538	99,9	2.546.122.260	2.532.950.578	99,5	3.327.260	3.327.260	100,0	0	9.376.220	0,0
13.2004.	PEMERINTAH DESA HAURGOMBONG	4	2.496.695.000	2.493.234.224	99,9	2.317.398.054	2.309.364.325	99,7	(179.296.946)	(179.296.946)	100,0	0	4.572.953	0,0
13.2005.	PEMERINTAH DESA CILEMBU	4	2.342.353.000	2.338.991.435	99,9	2.298.635.106	2.284.096.254	99,4	(43.717.894)	(43.717.894)	100,0	0	11.177.287	0,0
13.2006.	PEMERINTAH DESA CIMARIAS	4	1.825.110.000	1.820.847.670	99,8	1.795.745.417	1.784.152.051	99,4	(29.364.583)	(29.364.583)	100,0	0	7.331.036	0,0
13.2007.	PEMERINTAH DESA CINANGGERANG	4	1.989.100.000	1.985.946.332	99,8	1.987.908.425	1.975.272.605	99,4	(1.191.575)	(1.191.575)	100,0	0	9.482.152	0,0
13.2008.	PEMERINTAH DESA MEKARBAKTI	4	2.071.865.000	2.069.553.446	99,9	2.016.865.516	2.009.515.132	99,6	(54.999.484)	(52.843.501)	96,1	0	7.194.813	0,0
13.2009.	PEMERINTAH DESA SUKAWANGI	4	1.874.899.000	1.871.615.258	99,8	1.879.933.704	1.864.509.643	99,2	5.034.704	5.034.704	100,0	0	12.140.319	0,0
13.2010.	PEMERINTAH DESA CIPTASARI	4	1.844.370.000	1.840.494.115	99,8	1.799.899.915	1.781.343.063	99,0	(44.470.085)	(44.470.085)	100,0	0	14.680.967	0,0
13.2011.	PEMERINTAH DESA CITALI	4	1.991.783.000	1.987.724.166	99,8	1.994.696.694	1.986.049.842	99,6	2.913.694	2.913.694	100,0	0	4.588.018	0,0
<b>14</b>	<b>KECAMATAN CIMANGGUNG</b>		<b>25.285.550.049</b>	<b>25.521.402.329</b>	<b>100,9</b>	<b>25.052.213.624</b>	<b>24.881.382.654</b>	<b>99,3</b>	<b>(233.336.425)</b>	<b>(237.980.327)</b>	<b>102,0</b>	<b>0</b>	<b>402.039.348</b>	<b>0,0</b>
14.2001.	PEMERINTAH DESA CIMANGGUNG	4	2.450.539.000	2.446.782.369	99,8	2.402.094.000	2.398.275.790	99,8	(48.445.000)	(46.451.657)	95,9	0	2.054.922	0,0
14.2002.	PEMERINTAH DESA SINDANGPAKUON	4	1.845.094.068	1.845.009.721	100,0	1.825.103.092	1.820.043.085	99,7	(19.990.976)	(19.990.976)	100,0	0	4.975.660	0,0
14.2003.	PEMERINTAH DESA TEGALMANGGUNG	4	2.680.463.000	2.914.576.754	108,7	2.680.463.000	2.669.187.736	99,6	0	0	0,0	0	245.389.018	0,0

PROVINSI : 32 PROVINSI JAWA BARAT

KABUPATEN/KOTA : 32.11 PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

REALISASI S/D 31/12/2023

KODE	NAMA DESA	KODE POSTING	PENDAPATAN			BELANJA DESA			PEMBIAYAAN NETTO			SILPA TAHUN BERJALAN		
			ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
14.2004.	PEMERINTAH DESA SINDULANG	4	2.503.260.000	2.503.806.080	100,0	2.491.867.358	2.491.867.358	100,0	(11.392.642)	(11.392.642)	100,0	0	546.080	0,0
14.2005.	PEMERINTAH DESA SINDANGGALIH	4	2.489.261.000	2.489.650.352	100,0	2.496.771.000	2.461.721.000	98,6	7.510.000	7.510.000	100,0	0	35.439.352	0,0
14.2006.	PEMERINTAH DESA SAWAHADAP	4	2.042.693.000	2.043.254.279	100,0	1.943.210.245	1.943.243.541	100,0	(99.482.755)	(100.000.000)	100,5	0	10.738	0,0
14.2007.	PEMERINTAH DESA CIKAHURIPAN	4	2.440.651.000	2.436.832.790	99,8	2.452.351.000	2.447.838.570	99,8	11.700.000	23.400.000	200,0	0	12.394.220	0,0
14.2008.	PEMERINTAH DESA SUKADANA	4	2.222.595.500	2.216.934.095	99,7	2.273.645.500	2.247.708.244	98,9	51.050.000	51.050.000	100,0	0	20.275.851	0,0
14.2009.	PEMERINTAH DESA MANGUNARGA	4	1.953.207.000	1.953.682.888	100,0	1.909.465.334	1.907.872.334	99,9	(43.741.666)	(43.741.666)	100,0	0	2.068.888	0,0
14.2010.	PEMERINTAH DESA CIHANJUANG	4	2.384.574.000	2.379.994.690	99,8	2.286.210.614	2.280.724.996	99,8	(98.363.386)	(98.363.386)	100,0	0	906.308	0,0
14.2011.	PEMERINTAH DESA PASIRNANJUNG	4	2.273.212.481	2.290.878.311	100,8	2.291.032.481	2.212.900.000	96,6	17.820.000	0	0,0	0	77.978.311	0,0
<b>15</b>	<b>KECAMATAN JATINANGOR</b>		<b>23.937.553.392</b>	<b>23.944.157.645</b>	<b>100,0</b>	<b>23.661.565.362</b>	<b>23.426.901.650</b>	<b>99,0</b>	<b>(214.238.030)</b>	<b>(185.077.530)</b>	<b>86,4</b>	<b>61.750.000</b>	<b>332.178.465</b>	<b>537,9</b>
15.2001.	PEMERINTAH DESA CIKERUH	4	2.168.272.000	2.168.642.180	100,0	2.130.960.872	2.122.371.134	99,6	(37.311.128)	(37.311.128)	100,0	0	8.959.918	0,0
15.2002.	PEMERINTAH DESA HEGARMAHAH	4	2.305.151.000	2.305.522.752	100,0	2.258.519.204	2.258.413.204	100,0	(46.631.796)	(46.631.796)	100,0	0	477.752	0,0
15.2003.	PEMERINTAH DESA CIBEUSI	4	2.180.837.000	2.181.063.547	100,0	2.065.143.171	1.999.753.208	96,8	(53.943.829)	(53.943.829)	100,0	61.750.000	127.366.510	206,3
15.2004.	PEMERINTAH DESA CIPACING	4	2.236.048.400	2.238.196.169	100,1	2.281.922.363	2.220.507.363	97,3	45.873.963	45.873.963	100,0	0	63.562.769	0,0
15.2005.	PEMERINTAH DESA SAYANG	4	2.224.069.777	2.224.693.875	100,0	2.199.907.489	2.183.715.700	99,3	(24.162.288)	(24.162.288)	100,0	0	16.815.887	0,0
15.2006.	PEMERINTAH DESA MEKARGALIH	4	1.851.250.000	1.852.387.740	100,1	1.933.335.413	1.901.233.598	98,3	82.085.413	82.085.413	100,0	0	33.239.555	0,0
15.2007.	PEMERINTAH DESA CINTAMULYA	4	1.813.790.000	1.813.895.510	100,0	1.788.980.823	1.782.945.704	99,7	(24.809.177)	(24.809.177)	100,0	0	6.140.629	0,0
15.2008.	PEMERINTAH DESA JATIMUKTI	4	1.694.010.000	1.693.987.577	100,0	1.694.378.795	1.694.145.000	100,0	368.795	368.795	100,0	0	211.372	0,0
15.2009.	PEMERINTAH DESA CISEMPUR	2	1.829.707.000	1.835.529.060	100,3	1.801.724.190	1.770.046.139	98,2	(27.982.810)	1.177.690	(4,2)	0	66.660.611	0,0
15.2010.	PEMERINTAH DESA JATIROKE	4	1.824.075.000	1.819.861.518	99,8	1.824.172.569	1.813.832.148	99,4	97.569	97.569	100,0	0	6.126.939	0,0
15.2011.	PEMERINTAH DESA CILELES	4	1.967.278.881	1.967.348.547	100,0	1.888.172.415	1.886.174.000	99,9	(79.106.466)	(79.106.466)	100,0	0	2.068.081	0,0
15.2012.	PEMERINTAH DESA CILAYUNG	4	1.843.064.334	1.843.029.170	100,0	1.794.348.058	1.793.764.452	100,0	(48.716.276)	(48.716.276)	100,0	0	548.442	0,0
<b>16</b>	<b>KECAMATAN RANCAKALONG</b>		<b>18.516.995.923</b>	<b>18.447.788.943</b>	<b>99,6</b>	<b>18.371.565.994</b>	<b>17.547.745.847</b>	<b>95,5</b>	<b>(145.385.743)</b>	<b>(103.090.762)</b>	<b>70,9</b>	<b>44.186</b>	<b>796.952.334</b>	<b>630,9</b>
16.2001.	PEMERINTAH DESA NAGARAWANGI	4	1.963.428.000	1.953.379.561	99,5	1.855.101.000	1.613.850.570	87,0	(108.282.814)	(108.282.814)	100,0	44.186	231.246.177	347,2
16.2002.	PEMERINTAH DESA CIBUNAR	4	1.592.696.000	1.583.127.317	99,4	1.587.067.432	1.573.551.781	99,1	(5.628.568)	(5.628.568)	100,0	0	3.946.968	0,0
16.2003.	PEMERINTAH DESA PANGADEGAN	4	2.270.861.000	2.260.889.993	99,6	2.314.467.190	2.292.939.284	99,1	43.606.190	43.606.190	100,0	0	11.556.899	0,0
16.2004.	PEMERINTAH DESA SUKAHAYU	4	2.290.006.000	2.283.949.877	99,7	2.270.006.000	1.813.578.280	79,9	(20.000.000)	(10.342.782)	51,7	0	460.028.815	0,0
16.2005.	PEMERINTAH DESA SUKAMAJU	4	1.865.133.000	1.855.504.539	99,5	1.855.133.000	1.844.730.016	99,4	(10.000.000)	(7.231.752)	72,3	0	3.542.771	0,0
16.2006.	PEMERINTAH DESA PAMEKARAN	3	1.813.243.923	1.809.828.813	99,8	1.798.243.923	1.784.963.779	99,3	(15.000.000)	(15.000.000)	100,0	0	9.865.034	0,0
16.2007.	PEMERINTAH DESA RANCAKALONG	4	1.678.022.000	1.675.463.424	99,8	1.638.152.485	1.590.340.130	97,1	(39.869.515)	(10.000.000)	25,1	0	75.123.294	0,0
16.2008.	PEMERINTAH DESA SUKASIRNARASA	4	1.838.990.000	1.835.176.090	99,8	1.840.597.244	1.833.496.689	99,6	1.607.244	1.607.244	100,0	0	3.286.645	0,0
16.2009.	PEMERINTAH DESA CIBUNGUR	4	1.583.964.000	1.580.992.149	99,8	1.592.145.720	1.585.425.170	99,6	8.181.720	8.181.720	100,0	0	3.748.699	0,0
16.2010.	PEMERINTAH DESA PASIRBIRU	4	1.620.652.000	1.609.477.180	99,3	1.620.652.000	1.614.870.148	99,6	0	0	0,0	0	(5.392.968)	0,0



PROVINSI : 32 PROVINSI JAWA BARAT

KABUPATEN/KOTA : 32.11 PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

REALISASI S/D 31/12/2023

KODE	NAMA DESA	KODE POSTING	PENDAPATAN			BELANJA DESA			PEMBIAYAAN NETTO			SILPA TAHUN BERJALAN		
			ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>17</b>	<b>KECAMATAN SUMEDANG SELATAN</b>		18.525.673.513	18.641.455.697	100,6	17.977.752.499	18.074.585.035	100,5	(536.197.557)	(537.630.434)	100,3	11.723.457	29.240.228	249,4
17.2005.	PEMERINTAH DESA SUKAGALIH	4	1.619.913.000	1.616.413.327	99,8	1.619.913.000	1.615.466.148	99,7	0	0	0,0	0	947.179	0,0
17.2006.	PEMERINTAH DESA BAGINDA	4	1.605.134.000	1.620.829.048	101,0	1.565.094.000	1.557.151.323	99,5	(40.040.000)	(40.040.000)	100,0	0	23.637.725	0,0
17.2007.	PEMERINTAH DESA CIPANCAR	4	1.451.148.000	1.447.861.049	99,8	1.451.148.000	1.447.175.599	99,7	0	0	0,0	0	685.450	0,0
17.2008.	PEMERINTAH DESA CITENGAH	4	1.778.481.000	1.775.203.626	99,8	1.778.481.000	1.774.486.520	99,8	0	0	0,0	0	717.106	0,0
17.2009.	PEMERINTAH DESA GUNASARI	4	2.177.867.204	2.172.052.540	99,7	2.178.069.500	2.173.801.464	99,8	202.296	0	0,0	0	(1.748.924)	0,0
17.2010.	PEMERINTAH DESA SUKAJAYA	2	1.944.066.000	2.075.198.132	106,7	1.545.651.600	1.687.931.401	109,2	(386.690.943)	(386.690.943)	100,0	11.723.457	575.788	4,9
17.2011.	PEMERINTAH DESA MARGAMEKAR	4	1.751.853.509	1.746.248.846	99,7	1.754.853.509	1.750.088.971	99,7	3.000.000	4.100.509	136,7	0	260.384	0,0
17.2012.	PEMERINTAH DESA CIHERANG	4	2.151.369.000	2.146.578.492	99,8	2.053.700.090	2.046.343.449	99,6	(97.668.910)	(100.000.000)	102,4	0	235.043	0,0
17.2013.	PEMERINTAH DESA MARGALAKSANA	4	2.103.596.000	2.102.868.224	100,0	2.154.596.000	2.149.924.680	99,8	51.000.000	51.000.000	100,0	0	3.943.544	0,0
17.2014.	PEMERINTAH DESA MEKAR RAHAYU	4	1.942.245.800	1.938.202.413	99,8	1.876.245.800	1.872.215.480	99,8	(66.000.000)	(66.000.000)	100,0	0	(13.067)	0,0
<b>18</b>	<b>KECAMATAN SUMEDANG UTARA</b>		19.465.541.000	19.433.124.621	99,8	18.775.674.590	18.713.709.709	99,7	(689.466.410)	(558.886.898)	81,1	400.000	160.528.014	132,0
18.2004.	PEMERINTAH DESA PADASUKA	4	1.947.927.000	1.944.403.021	99,8	1.763.519.960	1.759.741.033	99,8	(184.407.040)	(57.099.040)	31,0	0	127.562.948	0,0
18.2005.	PEMERINTAH DESA MULYASARI	4	1.892.387.000	1.888.887.915	99,8	1.814.136.045	1.809.878.735	99,8	(78.250.955)	(78.232.732)	100,0	0	776.448	0,0
18.2006.	PEMERINTAH DESA GIRIMUKTI	4	2.313.546.000	2.310.832.681	99,9	2.274.606.249	2.270.674.773	99,8	(38.939.751)	(35.036.502)	90,0	0	5.121.406	0,0
18.2007.	PEMERINTAH DESA MEKARJAYA	4	2.033.236.000	2.032.863.116	100,0	2.007.736.000	2.000.730.540	99,7	(25.500.000)	(25.500.000)	100,0	0	6.632.576	0,0
18.2008.	PEMERINTAH DESA MARGAMUKTI	4	2.095.814.000	2.092.520.099	99,8	1.872.214.976	1.867.616.708	99,8	(223.599.024)	(223.599.024)	100,0	0	1.304.367	0,0
18.2009.	PEMERINTAH DESA SIRNAMULYA	4	1.779.363.000	1.775.879.584	99,8	1.856.534.150	1.837.503.830	99,0	77.171.150	77.171.150	100,0	0	15.546.904	0,0
18.2010.	PEMERINTAH DESA KEBONJATI	4	1.693.409.000	1.689.486.058	99,8	1.696.403.002	1.689.517.524	99,6	2.994.002	2.994.002	100,0	0	2.962.536	0,0
18.2011.	PEMERINTAH DESA JATIHURIP	4	2.114.227.000	2.110.326.552	99,8	2.064.227.000	2.059.787.212	99,8	(50.000.000)	(50.000.000)	100,0	0	539.340	0,0
18.2012.	PEMERINTAH DESA JATIMULYA	4	1.752.465.000	1.748.283.031	99,8	1.727.065.000	1.723.107.266	99,8	(25.000.000)	(25.000.000)	100,0	400.000	175.765	43,9
18.2013.	PEMERINTAH DESA RANCAMULYA	4	1.843.167.000	1.839.642.564	99,8	1.699.232.208	1.695.152.088	99,8	(143.934.792)	(144.584.752)	100,5	0	(94.276)	0,0
<b>19</b>	<b>KECAMATAN GANEAS</b>		13.330.677.128	13.331.742.156	100,0	13.497.423.220	13.365.212.049	99,0	166.746.092	156.989.424	94,1	0	123.519.531	987,6
19.2001.	PEMERINTAH DESA GANEAS	4	1.730.610.018	1.727.302.111	99,8	1.752.925.773	1.725.754.483	98,4	22.315.755	22.315.755	100,0	0	23.863.383	0,0
19.2002.	PEMERINTAH DESA DAYEUHLUHUR	4	1.745.368.910	1.746.630.771	100,1	1.782.255.644	1.782.390.644	100,0	36.886.734	36.886.734	100,0	0	1.126.861	0,0
19.2003.	PEMERINTAH DESA CIKONENG	4	1.581.365.000	1.581.376.681	100,0	1.614.342.200	1.597.030.640	98,9	32.977.200	32.977.200	100,0	0	17.323.241	0,0
19.2004.	PEMERINTAH DESA SUKALUYU	4	1.691.475.000	1.692.324.839	100,1	1.682.246.000	1.665.668.484	99,0	(9.229.000)	(19.710.000)	213,6	0	6.946.355	122,8
19.2005.	PEMERINTAH DESA SUKAWENING	4	1.643.970.200	1.643.970.200	100,0	1.658.137.040	1.623.245.119	97,9	14.166.840	14.166.840	100,0	0	34.891.921	0,0
19.2006.	PEMERINTAH DESA TANJUNGHURIP	4	1.722.859.000	1.723.341.008	100,0	1.749.007.098	1.729.588.148	98,9	26.148.098	26.148.098	100,0	0	19.900.958	0,0
19.2007.	PEMERINTAH DESA CIKONDANG	4	1.678.113.000	1.679.165.385	100,1	1.729.168.265	1.729.058.433	100,0	51.055.265	51.779.597	101,4	0	1.886.549	0,0
19.2008.	PEMERINTAH DESA CIKONENGGULON	4	1.536.916.000	1.537.631.161	100,0	1.529.341.200	1.512.476.098	98,9	(7.574.800)	(7.574.800)	100,0	0	17.580.263	0,0
<b>20</b>	<b>KECAMATAN TANJUNGPURA</b>		19.743.239.000	19.709.648.575	99,8	19.645.200.477	19.587.565.840	99,7	(98.038.523)	(92.710.290)	94,6	0	29.372.445	0,0

PROVINSI : 32 PROVINSI JAWA BARAT

KABUPATEN/KOTA : 32.11 PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

REALISASI S/D 31/12/2023

KODE	NAMA DESA	KODE POSTING	PENDAPATAN			BELANJA DESA			PEMBIAYAAN NETTO			SILPA TAHUN BERJALAN		
			ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
20.2001.	PEMERINTAH DESA SUKAMANTRI	4	1.585.707.000	1.586.385.456	100,0	1.562.162.569	1.559.767.691	99,8	(23.544.431)	(23.554.431)	100,0	0	3.063.334	0,0
20.2002.	PEMERINTAH DESA CIPANAS	4	1.838.779.000	1.834.450.617	99,8	1.833.371.421	1.828.882.368	99,8	(5.407.579)	(5.407.579)	100,0	0	160.670	0,0
20.2003.	PEMERINTAH DESA GUNTURMEKAR	4	1.702.147.000	1.698.253.180	99,8	1.692.371.610	1.687.981.680	99,7	(9.775.390)	(9.775.390)	100,0	0	496.110	0,0
20.2004.	PEMERINTAH DESA MULYAMEKAR	4	1.471.232.000	1.456.557.111	99,0	1.456.440.153	1.439.404.254	98,8	(14.791.847)	(14.791.847)	100,0	0	2.361.010	0,0
20.2005.	PEMERINTAH DESA BANYUASIH	4	1.747.375.000	1.747.871.033	100,0	1.742.859.158	1.742.609.206	100,0	(4.515.842)	(4.515.842)	100,0	0	745.985	0,0
20.2006.	PEMERINTAH DESA KERTAMEKAR	4	1.765.730.000	1.761.099.627	99,7	1.755.846.339	1.749.210.670	99,6	(9.883.661)	(9.883.661)	100,0	0	2.005.296	0,0
20.2007.	PEMERINTAH DESA KERTAHARJA	4	1.839.478.000	1.839.799.890	100,0	1.836.162.001	1.836.173.000	100,0	(3.315.999)	(3.315.999)	100,0	0	310.891	0,0
20.2008.	PEMERINTAH DESA CIGENTUR	4	1.399.361.000	1.395.466.126	99,7	1.386.022.767	1.380.518.209	99,6	(13.338.233)	(15.000.000)	112,5	0	(52.083)	0,0
20.2009.	PEMERINTAH DESA TANJUNGMEKAR	4	1.804.805.000	1.800.479.154	99,8	1.800.111.874	1.797.540.000	99,9	(4.693.126)	(2.693.126)	57,4	0	246.028	0,0
20.2010.	PEMERINTAH DESA TANJUNG MULYA	4	1.563.872.000	1.564.552.961	100,0	1.564.289.806	1.551.031.784	99,2	417.806	5.417.806	296,7	0	18.938.983	0,0
20.2011.	PEMERINTAH DESA BOROS	4	1.468.283.000	1.468.576.641	100,0	1.470.092.779	1.470.176.978	100,0	1.809.779	1.809.779	100,0	0	209.442	0,0
20.2012.	PEMERINTAH DESA AWILEGA	4	1.556.470.000	1.556.156.779	100,0	1.545.470.000	1.544.270.000	99,9	(11.000.000)	(11.000.000)	100,0	0	886.779	0,0
<b>21</b>	<b>KECAMATAN TANJUNG MEDAR</b>		<b>15.292.311.800</b>	<b>15.255.961.127</b>	<b>99,8</b>	<b>15.243.479.405</b>	<b>15.025.176.776</b>	<b>98,6</b>	<b>(48.832.395)</b>	<b>(48.831.549)</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>181.952.802</b>	<b>0,0</b>
21.2001.	PEMERINTAH DESA CIKARAMAS	4	1.831.100.000	1.826.977.768	99,8	1.794.740.116	1.787.643.028	99,6	(36.359.884)	(36.359.884)	100,0	0	2.974.856	0,0
21.2002.	PEMERINTAH DESA WARGALUYU	4	1.923.130.800	1.919.473.069	99,8	1.940.618.963	1.935.392.016	99,7	17.488.163	17.488.163	100,0	0	1.569.216	0,0
21.2003.	PEMERINTAH DESA JINGKANG	4	1.648.349.000	1.642.642.748	99,7	1.643.349.000	1.501.356.052	91,4	(5.000.000)	(5.000.000)	100,0	0	136.286.696	0,0
21.2004.	PEMERINTAH DESA KAMAL	4	2.182.392.000	2.178.928.989	99,8	2.177.729.618	2.152.459.964	98,8	(4.662.382)	(4.662.382)	100,0	0	21.806.643	0,0
21.2005.	PEMERINTAH DESA KERTAMUKTI	4	1.638.455.000	1.634.205.127	99,7	1.636.909.485	1.624.808.053	99,3	(1.545.515)	(1.545.515)	100,0	0	7.851.559	0,0
21.2006.	PEMERINTAH DESA TANJUNGWANGI	4	1.535.895.000	1.532.012.291	99,7	1.530.973.429	1.525.086.544	99,6	(4.921.571)	(4.921.571)	100,0	0	2.004.176	0,0
21.2007.	PEMERINTAH DESA SUKAMUKTI	4	1.745.595.000	1.741.819.765	99,8	1.740.595.000	1.732.270.883	99,5	(5.000.000)	(5.000.000)	100,0	0	4.548.882	0,0
21.2008.	PEMERINTAH DESA SUKATANI	4	1.419.017.000	1.415.255.703	99,7	1.414.017.000	1.407.741.340	99,6	(5.000.000)	(4.999.154)	100,0	0	2.515.209	0,0
21.2009.	PEMERINTAH DESA TANJUNG MEDAR	4	1.368.378.000	1.364.645.667	99,7	1.364.546.794	1.358.418.896	99,6	(3.831.206)	(3.831.206)	100,0	0	2.395.565	0,0
<b>22</b>	<b>KECAMATAN CIMALAKA</b>		<b>26.310.402.121</b>	<b>26.278.603.878</b>	<b>99,9</b>	<b>28.219.181.978</b>	<b>26.585.941.461</b>	<b>94,2</b>	<b>1.909.439.972</b>	<b>1.911.387.856</b>	<b>100,1</b>	<b>660.115</b>	<b>1.604.050.273</b>	<b>995,6</b>
22.2001.	PEMERINTAH DESA CIMALAKA	4	1.735.885.000	1.732.029.376	99,8	1.732.125.765	1.722.514.543	99,4	(3.759.235)	(3.759.235)	100,0	0	5.755.598	0,0
22.2002.	PEMERINTAH DESA GALUDRA	3	1.768.197.000	1.764.156.190	99,8	1.743.196.880	1.736.701.173	99,6	(25.000.000)	(25.000.000)	100,0	120	2.455.017	847,5
22.2003.	PEMERINTAH DESA CIBEUREUM KULON	4	2.644.742.000	2.662.307.287	100,7	4.662.349.911	3.589.346.776	77,0	2.017.607.911	2.017.607.911	100,0	0	1.090.568.422	0,0
22.2004.	PEMERINTAH DESA NALUK	4	1.611.026.000	1.606.949.074	99,7	1.644.326.217	1.637.476.039	99,6	33.300.217	33.300.217	100,0	0	2.773.252	0,0
22.2005.	PEMERINTAH DESA NYALINDUNG	4	1.880.040.000	1.875.750.222	99,8	1.897.364.200	1.852.417.893	97,6	17.330.200	18.300.420	105,6	6.000	41.632.749	879,2
22.2006.	PEMERINTAH DESA TRUNAMANGGALA	4	1.921.386.282	1.916.074.074	99,7	1.921.386.282	1.909.970.202	99,4	0	0	0,0	0	6.103.872	0,0
22.2007.	PEMERINTAH DESA CIKOLE	4	1.950.196.000	1.946.731.834	99,8	1.947.261.938	1.940.679.938	99,7	(2.934.062)	(2.934.062)	100,0	0	3.117.834	0,0
22.2008.	PEMERINTAH DESA CIBEUREUM WETAN	4	1.648.816.000	1.646.229.786	99,8	1.828.665.899	1.809.219.047	98,9	179.849.899	179.849.899	100,0	0	16.860.638	0,0
22.2009.	PEMERINTAH DESA MANDALAHERANG	4	1.688.462.000	1.684.806.120	99,8	1.564.747.089	1.541.690.096	98,5	(123.714.911)	(123.714.911)	100,0	0	19.401.113	0,0
22.2010.	PEMERINTAH DESA LICIN	4	2.680.859.000	2.682.501.831	100,1	2.639.497.520	2.310.349.647	87,5	(41.361.480)	(41.361.480)	100,0	0	330.790.704	0,0

PROVINSI : 32 PROVINSI JAWA BARAT

KABUPATEN/KOTA : 32.11 PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

REALISASI S/D 31/12/2023

KODE	NAMA DESA	KODE POSTING	PENDAPATAN			BELANJA DESA			PEMBIAYAAN NETTO			SILPA TAHUN BERJALAN		
			ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
22.2011.	PEMERINTAH DESA CITIMUN	4	1.885.121.298	1.880.678.487	99,8	1.885.121.168	1.874.666.584	99,4	324	977.988	848,1	454	6.989.891	623,6
22.2012.	PEMERINTAH DESA SERANG	4	1.578.627.000	1.574.295.997	99,7	1.442.961.050	1.433.450.408	99,3	(135.665.950)	(135.665.950)	100,0	0	5.179.639	0,0
22.2013.	PEMERINTAH DESA PADASARI	4	1.585.593.541	1.578.136.196	99,5	1.587.616.746	1.558.463.091	98,2	2.676.746	2.676.746	100,0	653.541	22.349.851	419,8
22.2014.	PEMERINTAH DESA CIMUJA	4	1.731.451.000	1.727.957.404	99,8	1.722.561.313	1.668.996.024	96,9	(8.889.687)	(8.889.687)	100,0	0	50.071.693	0,0
<b>23</b>	<b>KECAMATAN CISARUA</b>		11.629.867.296	11.591.600.153	99,7	11.458.350.407	11.396.818.090	99,5	(171.516.889)	(174.525.829)	101,8	0	20.256.234	0,0
23.2001.	PEMERINTAH DESA CISARUA	4	2.059.512.296	2.053.991.810	99,7	1.960.062.296	1.954.439.402	99,7	(99.450.000)	(99.450.000)	100,0	0	102.408	0,0
23.2002.	PEMERINTAH DESA CIUYAH	4	1.510.254.000	1.506.094.884	99,7	1.516.849.993	1.509.725.875	99,5	6.595.993	6.595.993	100,0	0	2.965.002	0,0
23.2003.	PEMERINTAH DESA CIMARA	4	1.740.099.000	1.735.811.789	99,8	1.694.019.016	1.687.794.405	99,6	(46.079.984)	(46.079.984)	100,0	0	1.937.400	0,0
23.2004.	PEMERINTAH DESA BANTARMARA	4	1.377.265.000	1.365.872.818	99,2	1.378.441.387	1.366.390.123	99,1	1.176.387	0	0,0	0	(517.305)	0,0
23.2005.	PEMERINTAH DESA CIPANDANWANGI	4	1.661.329.000	1.657.472.161	99,8	1.622.380.150	1.616.979.371	99,7	(38.948.850)	(38.948.850)	100,0	0	1.543.940	0,0
23.2006.	PEMERINTAH DESA CISALAK	4	1.618.166.000	1.613.546.893	99,7	1.621.523.012	1.614.039.559	99,5	3.357.012	3.357.012	100,0	0	2.864.346	0,0
23.2007.	PEMERINTAH DESA KEBONKALAPA	4	1.663.242.000	1.658.809.798	99,7	1.665.074.553	1.647.449.355	98,9	1.832.553	0	0,0	0	11.360.443	0,0
<b>24</b>	<b>KECAMATAN TOMO</b>		14.590.594.332	14.705.186.873	100,8	14.266.384.129	14.347.357.505	100,6	(318.695.612)	(298.695.612)	93,7	5.514.591	59.133.756	072,3
24.2001.	PEMERINTAH DESA TOMO	4	1.549.660.000	1.545.605.531	99,7	1.499.879.300	1.489.514.731	99,3	(49.780.700)	(49.780.700)	100,0	0	6.310.100	0,0
24.2002.	PEMERINTAH DESA TOLENGAS	4	1.805.620.241	1.801.418.376	99,8	1.786.878.329	1.782.430.892	99,8	(18.741.912)	(18.741.912)	100,0	0	245.572	0,0
24.2003.	PEMERINTAH DESA DARMAWANGI	4	1.874.256.000	1.865.336.176	99,5	1.823.256.000	1.810.385.819	99,3	(50.000.000)	(50.000.000)	100,0	1.000.000	4.950.357	495,0
24.2004.	PEMERINTAH DESA MARONGGE	4	1.915.994.000	1.912.503.615	99,8	1.835.994.000	1.832.310.365	99,8	(80.000.000)	(80.000.000)	100,0	0	193.250	0,0
24.2005.	PEMERINTAH DESA JEMBARWANGI	4	1.560.350.591	1.556.778.248	99,8	1.484.609.000	1.476.218.720	99,4	(71.227.000)	(71.227.000)	100,0	4.514.591	9.332.528	206,7
24.2006.	PEMERINTAH DESA BUGEL	4	1.451.819.000	1.459.965.356	100,6	1.443.894.000	1.443.894.000	100,0	(7.925.000)	12.075.000	52,4	0	28.146.356	0,0
24.2007.	PEMERINTAH DESA CIPELES	4	1.467.012.000	1.462.391.492	99,7	1.482.012.000	1.468.770.748	99,1	15.000.000	15.000.000	100,0	0	8.620.744	0,0
24.2008.	PEMERINTAH DESA KARYAMUKTI	4	1.562.100.500	1.561.896.713	100,0	1.530.300.500	1.530.457.358	100,0	(31.800.000)	(31.800.000)	100,0	0	(360.645)	0,0
24.2010.	PEMERINTAH DESA MEKARWANGI	2	1.403.782.000	1.539.291.366	109,7	1.379.561.000	1.513.374.872	109,7	(24.221.000)	(24.221.000)	100,0	0	1.695.494	0,0
<b>25</b>	<b>KECAMATAN UJUNGJAYA</b>		15.468.904.000	15.354.476.009	99,3	15.051.449.610	14.753.677.172	98,0	(413.654.664)	(417.574.390)	100,9	3.799.726	183.224.447	822,0
25.2001.	PEMERINTAH DESA UJUNGJAYA	4	1.901.868.000	1.898.103.144	99,8	1.851.868.000	1.846.086.148	99,7	(48.370.119)	(50.000.000)	103,4	1.629.881	2.016.996	123,8
25.2002.	PEMERINTAH DESA PALABUAN	2	1.623.300.000	1.519.059.409	93,6	1.458.420.000	1.354.130.836	92,8	(162.710.155)	(165.000.000)	101,4	2.169.845	(71.427)	3,3
25.2003.	PEMERINTAH DESA PALASARI	4	1.714.031.000	1.710.822.304	99,8	1.685.034.527	1.680.586.875	99,7	(28.996.473)	(28.996.473)	100,0	0	1.238.956	0,0
25.2004.	PEMERINTAH DESA KEBONCAU	4	1.667.487.000	1.679.760.391	100,7	1.617.487.000	1.613.596.720	99,8	(50.000.000)	(50.000.000)	100,0	0	16.163.671	0,0
25.2005.	PEMERINTAH DESA SAKURJAYA	4	1.728.838.000	1.728.838.000	100,0	1.728.838.000	1.717.797.581	99,4	0	0	0,0	0	11.040.419	0,0
25.2006.	PEMERINTAH DESA KUDANGWANGI	4	1.424.971.000	1.420.965.785	99,7	1.424.971.000	1.417.972.701	99,5	0	0	0,0	0	2.993.084	0,0
25.2007.	PEMERINTAH DESA SUKAMULYA	4	1.767.684.000	1.760.446.209	99,6	1.667.684.000	1.519.271.720	91,1	(100.000.000)	(100.000.000)	100,0	0	141.174.489	0,0
25.2008.	PEMERINTAH DESA CIPELANG	4	1.436.259.000	1.431.945.345	99,7	1.437.681.083	1.433.099.231	99,7	1.422.083	1.422.083	100,0	0	268.197	0,0
25.2009.	PEMERINTAH DESA CIBULUH	4	2.204.466.000	2.204.535.422	100,0	2.179.466.000	2.171.135.360	99,6	(25.000.000)	(25.000.000)	100,0	0	8.400.062	0,0

PROVINSI : 32 PROVINSI JAWA BARAT

KABUPATEN/KOTA : 32.11 PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

REALISASI S/D 31/12/2023

KODE	NAMA DESA	KODE POSTING	PENDAPATAN			BELANJA DESA			PEMBIAYAAN NETTO			SILPA TAHUN BERJALAN		
			ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>26</b>	<b>KECAMATAN JATIGEDE</b>		17.724.117.200	17.391.573.170	98,1	17.621.336.693	17.254.987.435	97,9	(102.780.507)	(103.125.827)	100,3	0	33.459.908	0,0
26.2001.	PEMERINTAH DESA CIJEUNGJING	5	1.810.203.000	1.806.950.455	99,8	1.795.203.000	1.791.777.740	99,8	(15.000.000)	(15.000.000)	100,0	0	172.715	0,0
26.2002.	PEMERINTAH DESA KADUJAYA	5	1.791.758.000	1.701.829.334	95,0	1.761.758.000	1.670.392.264	94,8	(30.000.000)	(30.000.000)	100,0	0	1.437.070	0,0
26.2003.	PEMERINTAH DESA LEBAKSIUH	4	1.523.659.000	1.519.262.143	99,7	1.503.659.000	1.499.212.148	99,7	(20.000.000)	(20.000.000)	100,0	0	49.995	0,0
26.2004.	PEMERINTAH DESA CINTAJAYA	5	1.443.062.000	1.438.478.251	99,7	1.457.016.089	1.452.207.707	99,7	13.954.089	13.954.089	100,0	0	224.633	0,0
26.2005.	PEMERINTAH DESA CIPICUNG	5	1.631.352.000	1.627.087.382	99,7	1.631.352.000	1.626.955.532	99,7	0	0	0,0	0	131.850	0,0
26.2006.	PEMERINTAH DESA MEKARASIH	5	1.586.096.000	1.570.215.364	99,0	1.586.096.000	1.569.930.680	99,0	0	0	0,0	0	284.684	0,0
26.2008.	PEMERINTAH DESA CIRANGGEM	4	1.493.602.000	1.489.554.634	99,7	1.481.866.500	1.477.419.648	99,7	(11.735.500)	(11.735.500)	100,0	0	399.486	0,0
26.2009.	PEMERINTAH DESA CISAMPIH	5	1.880.519.000	1.846.145.790	98,2	1.859.574.000	1.808.067.144	97,2	(20.945.000)	(20.945.000)	100,0	0	17.133.646	0,0
26.2010.	PEMERINTAH DESA JEMAH	5	1.479.154.000	1.371.909.794	92,7	1.459.499.320	1.342.338.160	92,0	(19.654.680)	(20.000.000)	101,8	0	9.571.634	0,0
26.2011.	PEMERINTAH DESA KAREDOK	5	1.526.212.200	1.466.038.393	96,1	1.532.919.700	1.468.875.180	95,8	6.707.500	6.707.500	100,0	0	3.870.713	0,0
26.2012.	PEMERINTAH DESA KADU	5	1.558.500.000	1.554.101.630	99,7	1.552.393.084	1.547.811.232	99,7	(6.106.916)	(6.106.916)	100,0	0	183.482	0,0
	<b>JUMLAH</b>		488.525.514.225	487.545.784.566	99,8	484.953.278.418	478.347.781.995	98,6	(1.186.919.712)	(3.139.083.765)	264,5	2.385.316.095	6.058.918.806	254,0

**KODE POSTING :**

- 2 : APBDES AWAL
- 3 : PERKADES SEBELUM PERUBAHAN
- 4 : APBDES PERUBAHAN
- 5 : PERKADES SETELAH PERUBAHAN